Gus Sholah

SANG ARSITEK PEMERSATU UMAT

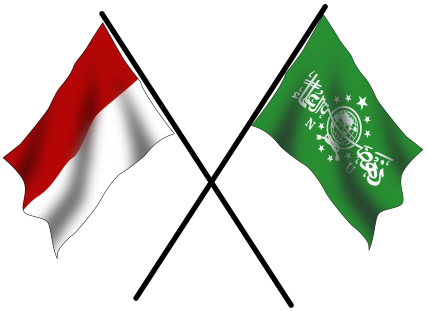

Gus Sholah

SANG ARSITEK PEMERSATU UMAT

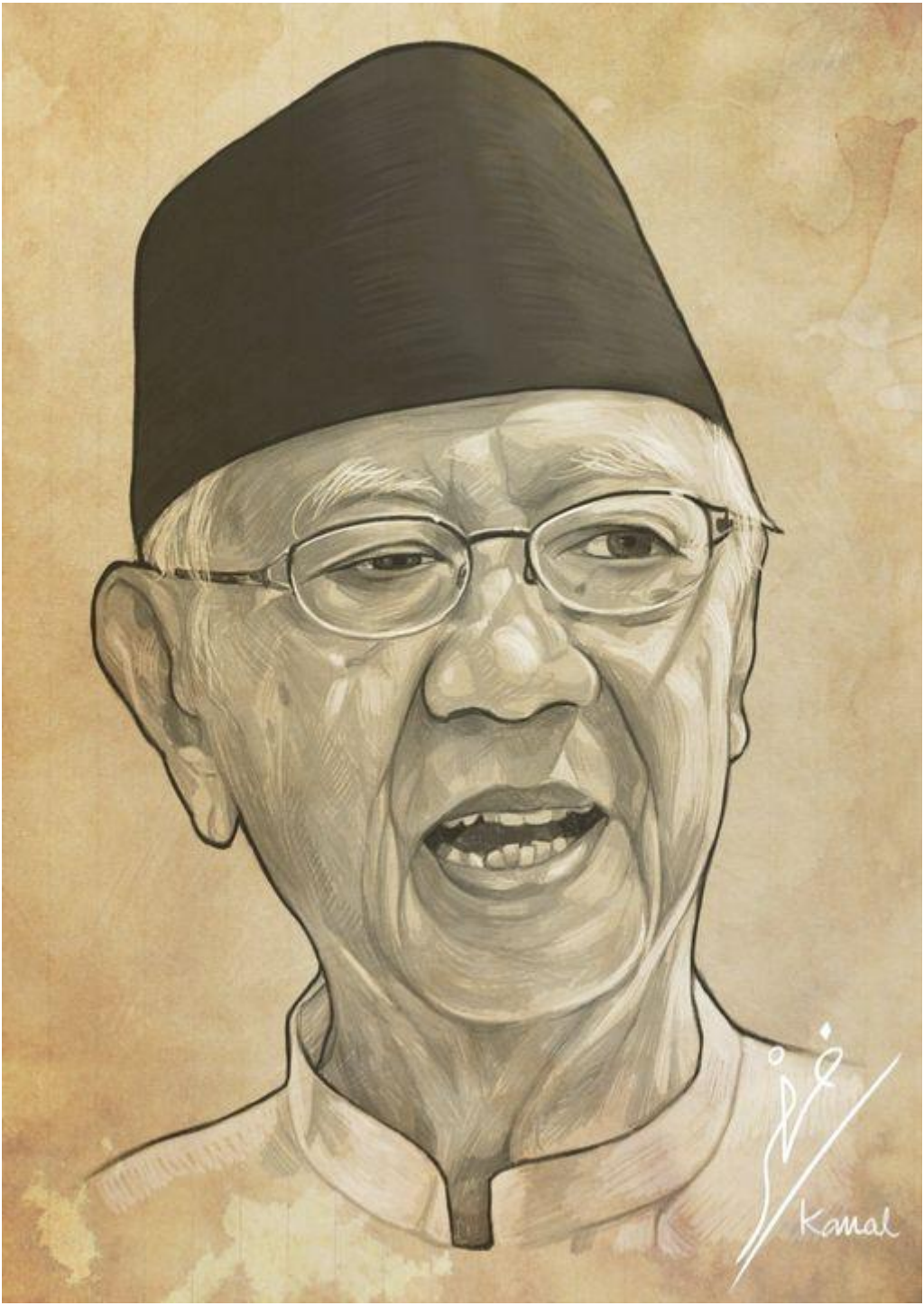
Kamal

Kamal

GUS SHOLAH
SANG ARSITEK PEMERSATU UMAT

Tim Penulis:
Editor merangkap Penulis:
Saifullah Ma'shum

Penulis:
Sahlul Fuad
Agus Ghulam Ahmad
Firdaus
Ali Zawawi
Rofiqul Umam Ahmad
Dumairi

Desain Cover:
Iwan Gemmy

Tata Letak Isi:
Riska Elharis

Penerbit
TEBUIRENG

Tahun 2021

Kamal

Sambutan
Pengasuh Pesantren Tebuireng

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama, kami atas nama Pengasuh Pesantren Tebuireng mengucapkan terima kasih kepada tim penulis buku (Saudara kami Mas H. Saifullah Ma'shum, dan kawan-kawan) yang telah menyiapkan buku berjudul "Gus Sholah; Sang Arsitek Pemersatu Umat". Buku ini menurut saya menjadi semacam manaqib *Al-Maghfurlah* Gus Sholah. Banyak inspirasi yang akan kita peroleh dari buku ini, dengan mengetahui rekam jejak seorang KH. Salahuddin Wahid, salah seorang di antara putera kebanggaan keluarga besar Hadratusyeikh Hasyim Asy'ari dan tentu bangsa Indonesia umumnya.

Membaca buku ini mengingatkan saya tentang kekhasan dari keluarga besar Tebuireng. Bahwa menyatunya semangat keislaman dan kebangsaan dalam garis pengabdian dan perjuangan menjadi semacam pesan yang bersifat turun temurun. Diteladankan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, juga oleh putera-putera beliau, terutama oleh Kiai Wahid Hasyim, turun kepada *Al-Maghfurlah* KH. Abdurrahman Wahid dan KH. Salahuddin Wahid dan tentunya diharapkan kita dapat meneladaninya.

Dari sisi manajemen pesantren, saya mengakui bahwa Gus Sholah telah menancapkan bentuk manajerial yang monumental di eranya. Dalam hal ini beliau tidak saja mengerti akan *al-muhafadzatu 'alal qadimishalih, wal-akhdzu bil-jadidil ashlah*, namun juga mengaplikasikannya dalam upaya-upaya konkret, sebagaimana kita saksikan kini.

Tentu pada kesempatan ini, saya mewakili keluarga besar Pesantren Tebuireng mengucapkan terima kasih tiada terhingga kepada para pihak yang selama ini berjibaku bersama *Al-Maghfurlah* dalam mengembangkan Pesantren Tebuireng. Semoga ini menjadi amal jariyah berkelanjutan dan berlipat ganda, bagai sebulir biji yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, dan di setiap tangkai berkembang menjadi seratus biji, terus berkembang dan menuai manfaat, mengalir tiada henti. (QS: Al-Baqarah: 261).

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamithariq
Wassalamu'alaikum Warahatullahi Wabarakatuh

Tebuireng, 02 Februari 2021

KH. Abdul Hakim Mahfudz
Pengasuh Pesantren

Sambutan Keluarga

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karuniaNya kita dapat menerbitkan buku biografi dari suami, ayah dan eyang kami, KH. Salahuddin Wahid, yang berjudul "Gus Sholah Sang Arsitek Pemersatu Umat".

Penerbitan buku ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, tidak lama sesudah Gus Sholah berpulang ke Rahmatullah, tanggal 2 Februari 2020. Dan rencananya akan diterbitkan pada saat peringatan 100 hari wafatnya. Manusia merencanakan Tuhan juga yang menentukan. Bulan Maret musibah pandemi Covid 19 melanda dunia, termasuk negeri kita.

Keluarga bersama tim penulis buku memutuskan untuk menghentikan sementara proses penulisan buku tersebut sampai situasi memungkinkan.

Penulisan buku biografi ini sepenuhnya diiniasi oleh kawan-kawan yang selama ini banyak berinteraksi dengan Gus Sholah setelah mendapatkan banyak usulan dari masyarakat. Kami dari keluarga menyetujui dan bersyukur atas insiatif mulia ini.

Sebagai pihak yang paling banyak mengetahui sepak-terjang dan aktivitas Gus Sholah sehari-hari, kami merasa banyak informasi penting tentang Gus Sholah yang mungkin tidak banyak diketahui masyarakat luas.

Dengan diterbitkannya buku ini, kami atas nama keluarga besar Gus Sholah, mengucapkan terima kasih kepada tim penulis buku (Mas Saifullah Ma'shum, Sahlul Fuad, Firdaus, Ali Zawawi, Rofiqul Umam, Agus Ghulam Ahmad, Dumairi dan kawan-kawan lain).

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang banyak membantu proses penulisan buku ini, terutama kepada para kontributor, nara sumber wawancara dan yang membantu dalam bentuk lainnya. Semoga kerja kerasnya menjadi jariyah bagi kawan-kawan.

Melalui buku ini, sesungguhnya kami, keluarga besar Gus Sholah, ingin meneguhkan kesaksian kami, juga kesaksian masyarakat luas, bahwa sesungguhnya Gus Sholah itu adalah insan yang "*khair*". Besar harapan kami hal-hal baik tentang Gus Sholah sebagaimana terekam dalam buku ini akan menjadi teladan dan diteladani oleh anak-anak muda Nahdliyin dan anak-anak muda pada umumnya, sesuai dengan mimpi Gus Sholah selama masih hayat, yang mendambakan anak-anak muda tampil sebagai kelompok masyarakat yang bertanggungjawab, baik sebagai warga bangsa maupun sebagai umat suatu agama.

Gus Sholah yang selalu mengingatkan kepada siapa saja yang bertemu dengan beliau, untuk mengedepankan akhlak yang mulia. Yaitu pribadi yang disiplin, jujur, adil, sederhana, dan ikhlas dalam melakukan sesuatu.

Akhirnya kami berharap semoga terbitnya buku ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas. Dan setiap kali kita menemukan butir-butir kebaikan yang melekat pada diri Gus Sholah, semoga hal itu menjadi amal saleh baginya yang menyertai doa-doa kita.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamithariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 02 Februari 2021

Nyai Farida Salahuddin Wahid

Pengantar Penulis

BANYAK jejak, juga instrumen, yang bisa digunakan seseorang yang ingin ta'aruf secara cepat terhadap sosok Dr. (HC) Ir. KH. Salahuddin Wahid (*almaghfurlah*). Jejak yang kecil dan teramat sederhana pun bisa secara mudah memandu orang untuk mendapatkan informasi, siapa sesungguhnya figur yang akrab dipanggil Gus Sholah ini.

Jejak kecil itu, misalnya, berupa deretan plakat yang terpajang di almari, di ruang depan kediaman Gus Sholah di Jalan Tendean No. 2C, Jakarta Selatan.

Plakat-plakat yang menjadi souvenir itu, jenis, model, ukuran dan kualitasnya serta berasal dari mana asalnya, sangat beragam. Ada plakat sebagai kenang-kenangan dari lembaga nasional untuk event yang sangat strategis dan berskala nasional, plakat dari universitas kenamaan di Republik ini, juga ada plakat dari majelis ta'lim ibu-ibu dari sebuah RT di kelurahan tertentu di daerah. Terpampang juga plakat terbuat dari bahan mahal, kenangan dari pimpinan pusat partai politik besar, berdampingan dengan plakat butut hasil print-out-an yang dibingkai pigura murahan dari organisasi kemahasiswaan tingkat komisariat atau kecamatan.

Dari jejak berupa plakat ini saja, kita bisa membayangkan seorang Salahuddin Wahid yang pernah hadir di panggung nasional, menghadiri undangan lembaga berkaliber nasional dan internasional, untuk menyampaikan gagasan dan pemikirannya tentang berbagai isu. Dan Salahuddin Wahid yang tanpa canggung dan *jaim* sebagai tokoh nasional, memenuhi undangan dari masyarakat kampung, di forum yang dihadiri hanya puluhan orang pesertanya.

Berbagai jenis plakat yang tersusun tidak rapi, karena ukuran rak yang tidak terlalu besar, menjadi saksi biksu dari kiprah seorang Salahuddin Wahid sepanjang hayat, yang setia menunggui sang pemilik yang tidak lagi bakal datang berkunjung menengoknya.

Jejak lain yang dapat memandu seseorang untuk memahami sosok Gus Sholah secara lebih komprehensif, adalah berupa buku karya Almarhum yang jumlahnya hampir mencapai 10 judul buku. Selama hayatnya – yang benar ialah sejak Indonesia memasuki era reformasi – Salahuddin Wahid dikenal sebagai seorang kolumnis dan penulis produktif. Sejak menjadi aktivis kampus dan menapaki dunia profesi sebagai seorang arsitek, sesungguhnya belum tampak tanda-tanda seorang Salahuddin Wahid bakal menjadi seorang penulis andal. Gus Sholah sejatinya terlambat menjadi penulis. Jika di usia senjanya ia menjadi produktif dalam membuat tulisan, tentang apa saja, itu lebih karena kecerdasasannya, kedisiplinannya, dan kemauannya dalam belajar yang tak pernah redup.

Beberapa buku karyanya, mengangkat berbagai topik dan isu. Kebanyakan adalah gagasan dan pemikiran mengenai ideologi Pancasila, demokrasi dan politik, isu sosial kemasyarakatan, masalah korupsi di Indonesia yang kian akut, tentang pendidikan, dan tidak ketinggalan adalah tulisan tentang NU dan problematikanya.

Yang agak aneh, justru Salahuddin Wahid tidak memiliki karya buku yang mengupas bidang yang selama puluhan tahun ia geluti, yaitu tentang dunia arsitek dan arsitektur. Jejak dan langkah Gus Sholah dalam dunia arsitektur hanya bisa ditelusuri langsung dari produk artsitektural berupa bangunan gedung di mana ia menjadi arsiteknya.

H. Zaini Syakur (alm), salah seorang pengusaha mebel asal Bangil Pasuruan yang sukses di bilangan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, seringkali membanggakan rumahnya yang berdiri kokoh di daerah Rempoa, Jakarta Selatan, sebagai bangunan yang sulit

dirobohkan, dan nyaman dihuni. Pengusaha yang dikenal hafal al-Qur'an 30 juz dan pemilik perusahaan Jati Indah Furniture itu mengagumi rumahnya, yang karya Gus Sholah itu.

Bangunan lain yang menjadi buah karyanya adalah gedung dan plaza Jakarta Fair yang pertama, yang berlokasi di kawasan Taman Ismail Marzuki. Itulah gedung yang pertama dibangun Gus Sholah selaku artsitek, sesudah ia berumah tangga.

Banyaknya warisan berupa buku-buku inilah yang pada satu sisi memudahkan tim penulisan buku biografi tentang Gus Sholah dalam melaksanakan tugas kepenulisannya. Telah tersedia "menu" yang beragam dari karya tulisnya, yang dapat memandu upaya memotret Gus Sholah secara lebih utuh dan objektif. Tetapi pada sisi yang lain tim penulis justru dibayang-bayangi perasaan was-was dan rikuh jika tidak berhati-hati, menulis dengan kualitas asal-asalan tentang sosok Gus Sholah yang produktif menulis itu, sehingga bisa dinyatakan sebagai besar pasak daripada tiang.

Terlambatnya tampil sebagai kolumnis sejalan dengan terlambatnya Salahuddin Wahid tampil sebagai tokoh nasional yang berkiprah dalam jagat politik. Banyak pihak menilai kiprah politik yang pernah dilakoni Gus Sholah tergolong tidak pernah sukses, sebagaimana pernyataan adik kandungnya. (Menurut dr. Umar Wahid, pada waktu Gus Dur bikin PKB, Gus Sholah bikin PKU dengan Pak Yusuf Hasyim. Saya pernah bilang, "Ngapain sih lu bikin partai politik itu?" Sebagai politisi juga saya kira Gus Sholah tidak terlalu sukses, biasa-biasa saja. Apa sih pencapaian Gus Sholah sebagai politisi? Coba ditunjukkan ke saya. Mendirikan PKU tidak sukses, hanya setahun dan bubar, tidak lagi terdengar ceritanya. Menjadi cawapres juga masuk dari NU. Sebetulnya ketokohan Gus Sholah baru mulai terlihat di NU, dan mencapai puncaknya justru ketika menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang. Baca: Ikhlas Mengasuh Tebuireng, hal. 502).

Pada masa peralihan dari Orba ke orde Reformasi, Salahuddin Wahid pernah mengenyam dunia politik dengan menjadi anggota MPR, yang dijabat hanya setahun, 1998-1999.

Tidak sukses dalam dunia politik tidak menjadikan eksistensinya sebagai tokoh publik redup. Ketidaksuksesan itu tidak lantas menyebabkannya ia mundur, atau menyesali kegagalan yang dialami. Ia pribadi yang *nothing to lose*.

"Tidak penting bagi saya, apakah yang saya lakukan berhasil atau gagal. Yang terpenting adalah saya telah melakukan sesuatu yang saya yakini benar, dengan proses yang benar dan jujur, dan saya harapkan bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi masyarakat,"ujar Gus Sholah suatu saat. Karena prinsip yang demikian itu, maka tidak aneh jika seolah-olah Gus Sholah tidak pernah merasa kapok atau capek untuk melakukan rintisan dan suatu gerakan, bahkan jika diperlukan melakukan pelembagaan suatu gerakan, dengan melibatkan banyak orang dan jaringan.

Dalam kaitan ini, Salahudin Wahid diibaratkan oleh Nashihin Hasan sebagai Yudistiro dalam cerita pewayangan, tokoh yang dikenal sangat jujur dan tidak mau berbohong. Salahudin Wahid berpendirian "tidak boleh ada kebohongan sedikitpun" di antara kita. Lebih baik kalah dari pada menang dengan harus berbohong dan membohongi orang lain (Baca: Yudistiro yang Lembut hal. 459). Gus Sholah senantiasa mampu membalut kejujuran dengan kesantunan dan kelembutan dalam benteraksi maupun bertutur.

Sama halnya dengan Gus Dur, sekalipun tidak lagi terlibat dalam jabatan formal struktural di organisasi pemerintahan atau di lembaga politik atau lembaga sosial, Gus Sholah tetap memiliki peran sentral di tengah masyarakat. Meminjam istilah populer orang Betawi, "*kagak ade matinye*". Terutama ketika bangsa ini menghadapi berbagai persoalan atau isu krusial, Salahuddin Wahid seringkali menjadi sasaran insan media untuk dijadikan nara sumber

utama. Sikap, pandangan dan opininya selalu lugas, jernih, jujur dan tidak *ambigu*. Sebagai figur yang tidak memiliki persoalan dan cacat moral di masa lalu, Salahuddin Wahid tidak memiliki beban apa pun ketika menyampaikan pandangan kritisnya terhadap suatu masalah atau isu.

Di usianya yang sudah uzur, kesibukanya justru terus meningkat. Ia bukan seorang aktivis purna tugas yang sering diasosiasikan sebagai "pengacara", pengangguran banyak acara. Melainkan acara atau kegiatanlah yang tiada hentinya menjemput Gus Sholah. Bolak-balik Jombang-Jakarta, menghadiri diskusi atau seminar yang satu ke diskusi dan seminar yang lain. Atau menerima tamu dari berbagai kalangan yang terus datang ke kediamannya, baik di Jakarta maupun di Jombang. Itulah keseharian Gus Sholah.

Pada tahun-tahun terakhir sebelum Gus Sholah berpulang, ia memprakarsai kegiatan yang dinamakan Komite Khitthah 26 (KK26). Salah satu agenda KK26 adalah mengadakan halaqah, "Ngaji Khitthah" di 12 pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten Jakarta dan Jogjakarta. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari gerakan ini, adalah mengembalikan marwah kemandirian NU sebagai jam'iyah, dan membersihkan NU dari anasir politik uang (*risywah*) dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis.

Ditilik dari riwayat hidupnya, Gus Sholah memang tidak pernah secara khusus mengenyam pendidikan agama di pesantren untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman dalam waktu yang lama, kecuali belajar Al-Qur'an, dasar-dasar ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Dalam hal kedalaman penguasaan ilmu keislaman, jelas tidak bisa diperbandingkan dengan Gus Dur atau tokoh lain. Tapi menariknya, berapa kiai sepuh, termasuk KH. Abdullah Faqih Langitan Tuban, pernah menyatakan kalau Gus Sholah adalah figur pengamal ilmu agama yang sangat baik.

Dari beberapa penuturan kerabat tentang Gus Sholah, selain aspek kesederhanaan, kejujuran dan keterbukaan, sosok ini juga kuat dikesankan sebagai pribadi yang sangat menghargai perbedaan pendapat. Hal itu antara lain dapat disimak dari pernyataan berikut:

"Dan siapapun juga, tidak boleh mempersalahkan kalau Gus Dur menganut pandangan politik sekuler. Itu adalah hak saseorang untuk menganut pikiran yang dianggapnya benar. Tetapi Gus Dur juga tidak berhak untuk menganggap yang menolak negara sekuler adalah penganut gerakan Islam yang menolak Pancasila. Masalahnya adalah terletak pada perbedaan cara menafsirkan Pancasila, apakah sekuler atau religius."

Tiga Fase Perkhidmatan

Kiprah Dr. (HC) Ir. KH. Salahuddin Wahid usai masa perkuliahan hingga wafatnya terbagi atas tiga fase perkhidmatan.

Pertama, selama lebih 25 tahun bergelut sebagai pengusaha-arsitek profesional (1971-1998).

Kedua, selama 10 tahun (sejak krisis ekonomi 1998) terjun di bidang sosial dan politik, dimulai dengan mendirikan partai politik (Partai Kebangkitan Umat), belajar menjadi penulis, terlibat dalam kepengurusan PBNU, menjadi komisioner Komnas HAM dan menaruh perhatian besar terhadap isu HAM, mendirikan Forum Indonesia Satu (FIS), terlibat aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi dan penegakan demokrasi di Tanah Air. Puncak karier di bidang sosial politik adalah ketika ia menjadi Calon Wakil Presiden berpasangan dengan Wiranto pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang pertama tahun 2004.

Dan *ketiga*, selama hampir 15 tahun menjadi Pengasuh Pesantren Tebuireng yang merupakan masa puncak khidmat dan kepemimpinan selama hayatnya (2006-2020).

Tiga fase perkhidmatan Gus Sholah seperti itu, selain riwayat hidup semasa kanak-kanak sampai memasuki dunia kampus, dicoba digambarkan dalam buku biografi ini. Buku ini berisikan tiga cluster tulisan, yaitu cluster riwayat hidup Gus Sholah, cluster gagasan dan pemikirannya, dan cluster testimoni kerabat dan sahabat Gus Sholah. ❖

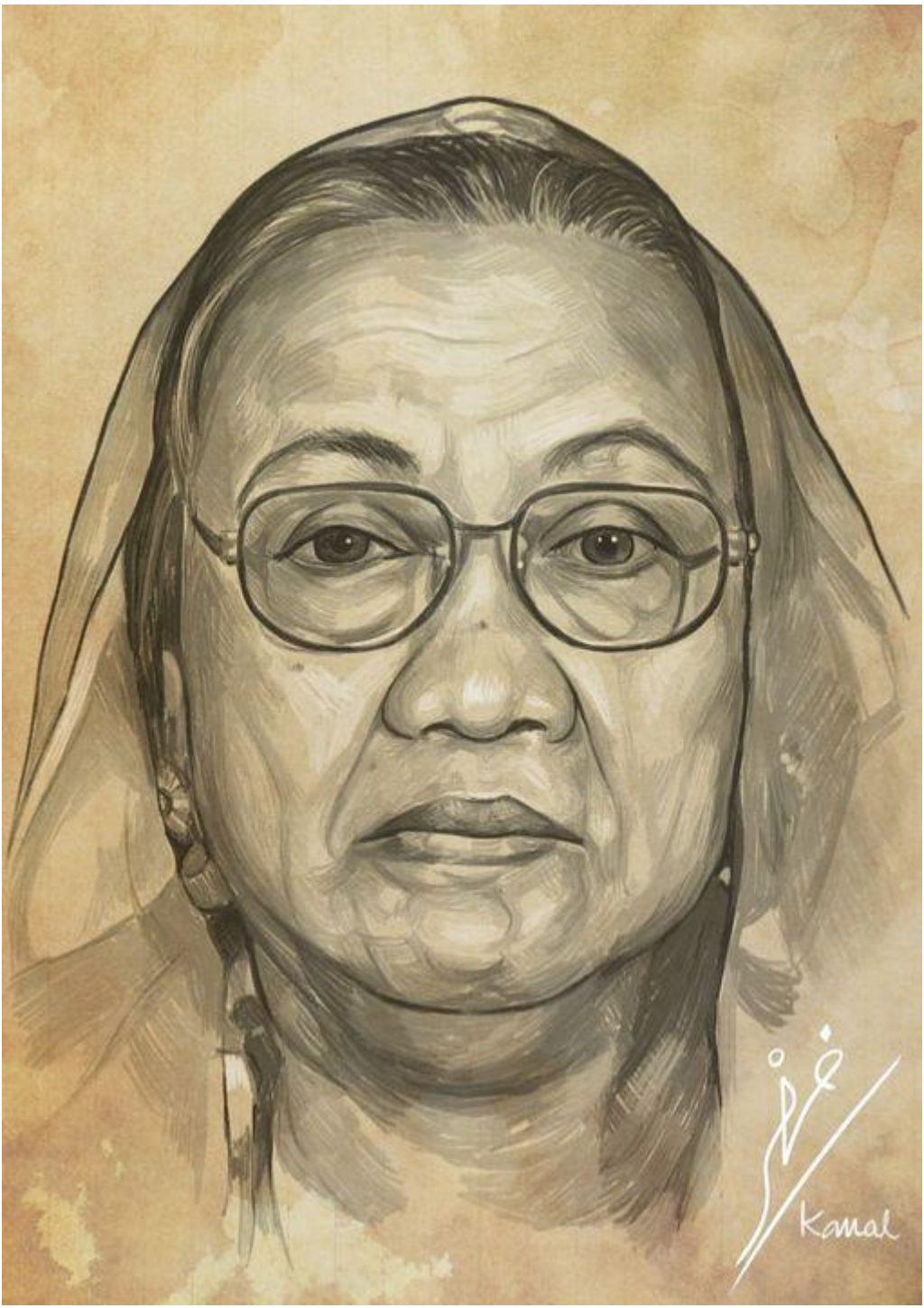
غمر
Kamal

Daftar Isi

Sambutan Pengasuh Pesantren Tebuireng i
Sambutan Keluarga iii
Pengantar Penulis v
Daftar Isi xiii

BAB I BIOGRAFI SALAHUDDIN WAHID
Bagian Kesatu: Masa Kecil dan Remaja
- Lahir di Tengah Pergolakan 3
- Tak Sempat Mengenal-Utuh Ayahanda 11
- Masa Kanak-Kanak 21
- Anak Gedongan dengan Permainan Kampung 29
- Menyanyi dan Bergitar 33
- Tradisi Keluarga Wahid 37
- Jawa Ngoko sebagai Bahasa Sehari-hari 41
- Makan Bersama sebagai Forum Belajar 45

Bagian Kedua: Membangun Rumah Tangga
- Vespa Lambretta Bersejarah 47
- Dinikahkan Karena Lebih Serius 55
- Penderitaan Usai Berumah Tangga 61
- Musik, Wanadri dan Gaple 69

Bagian Ketiga: Merambah Dunia Politik
- Mendirikan Partai 79
- Menggagas Gerakan Jalan Lurus (GJL) 83
- Menjadi Peserta Pilpres 2004 91

Bagian Keempat: Membangun Jejaring dan Mengabdi untuk Bangsa

- Mendirikan Forum Indonesia Satu (FIS) 105
- Mendirikan Gerakan Kebajikan Pancasila (GKP) 119
- Bergabung di Komnas HAM 129
- Menjadi Kolumnis 135

Bagian Kelima: Merawat Warisan Sang Kakek

- Berkiprah di Nahdlatul Ulama 139
- Menjadi Pengasuh Pesantren Tebuireng 151
- Dari Elitis ke Populis 191
- Produksi Film Jejak Langkah 2 Ulama dan Misteri di Dua Bulan Terakhir 197

BAB II GAGASAN DAN PEMIKIRAN SALAHUDDIN WAHID

Bagian Kesatu: Demokrasi dan Politik

- Demokrasi dan Politik 225
- Hak Politik Rakyat dan Peran Partai Politik 228
- Karakter Pemimpin Bangsa dan Negarawan 237
- Profesionalitas dan Moralitas Pejabat Negara 243

Bagian Kedua: Negara, Agama dan Pancasila

- KH. A. Wahid Hasyim, Pancasila dan Islam 249
- Hubungan Pancasila dan Agama 255
- Pancasila Jalan Tengah Kita 258
- Biarkan Sejarah yang Menilai 267
- Paradigma Barat 270
- Konsep Kesatuan dalam NKRI 274

Bagian Ketiga: Pendidikan dan Pengembangan Pesantren

- Pendidikan Agama Gagal 279
- Tantangan Dunia Pendidikan Kita 283
- Revitalisasi Pesantren, Kenapa Tidak 295

Bagian Keempat: Masalah Sosial Budaya

- Menangkal Korupsi Lahir Bathin 303
- Akhir Perang Melawan Korupsi 312

Bagian Kelima: Menggagas Kemajuan NU

Nahdlatul Ulama dan Terbentuknya KKNU 317

BAB III SALAHUDDIN DI MATA KERABAT DAN SAHABAT

- Gus Sholah yang Bersahaja dan Terbuka 357
  Prof. Dr. Abdul Mu'ti
- Gus Sholah Sang Teknokrat NU 361
  Dr. Ali Masykur Musa
- Pemikiran Gus Sholah: NU Sebagai Model *Civil Society* 366
  Ali Zawawi, MA.
- Gerakan Antipolitisi Busuk 374
  Romo Benny Soesatyo
- Tak Lelah Merindukan Kemajuan Bangsanya 379
  Dr. Burhanuddin Abdullah
- Gus Sholah Sang Moderat dan Penjaga Keseimbangan 386
  Prof. Dr. Haedar Nashir
- Mengembangkan Toleransi Aktif 392
  KH. Husein Muhammad
- Gus Sholah Negarawan Santun 396
  Prof. Ir. Hermawan Kresno Dipojono, MSEE, Ph.D
- Sang Fasilitator Pelembagaan Pancasila 400
  Iman PH Sirait, S.Sos., M.Si.
- Keikhlasannya yang Tiada Tara 413
  Irfan Asy'ari Sudirman Wahid
- Gus Sholah dan Kelanjutan Proyek-Proyek Sosial 416
  Prof. Dr. Kacung Marijan
- Konsistensi Peran Politik Kebangsaan dan Ke-NU-an 421
  Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.
- Salahuddin Wahid dan Penguatan HAM dan Wawasan Kebangsaan 429
  Prof. Dr. Masykuri Abdillah

- Gus Sholah Meneruskan Tradisi Founding Fathers 445
  Dr. Martiono Hadianto
- Penjaga Warisan Kakek dan Ayahnya 451
  Dr. Mujib Rohmat
- Isyarat Langit Mbah Liem untuk Gus Sholah: Ngaji Al-Hikam 456
  Prof. Dr. Nadirsyah Hosen
- Yudistiro yang Lembut 459
  Dr. Nashihin Hasan
- Gus Sholah Negarawan dengan Empat Kemampuan 469
  Ir. Purwoto Handoko (Poengky)
- Sosok yang Rasional, Gigih dan Bersahaja 473
  M. Sarmuji, M.Si.
- Belajar Berdemokrasi dari Dua Gus Tebuireng 478
  Saifullah Ma'shum
- Perjumpaan Demi Perjumpaan Bersama Gus Sholah 490
  Sabar Mangadu Tambunan
- Mas Sholah, Pemikir yang Tidak Bisa Berkata Tidak 497
  H. Tosari Widjaja
- Ikhlas Mengasuh Tebuireng 502
  dr. Umar Wahid

Sumber dan Referensi 511
Profil Penulis 513

SAMA BERBEDA
Kiai Sahal Mahfudh

Bab I

BIOGRAFI SALAHUDDIN WAHID

نهضة العلماء
N U

Bagian Kesatu: Masa Kecil dan Remaja

Lahir di Tengah Pergolakan

JOMBANG, tahun 1942, adalah Jombang yang bergolak. Terutama di kawasan Tebuireng, tempat Hadratussyekh Hasyim Asy'ari mengajar dan membina santrinya di pondok pesantren. Periode ini dicatat oleh sejarah, sebagai awal pendudukan Jepang di Tanah Jawa. Tidak lama sesudah pasukan Jepang mendarat, tepatnya tahun 1942, Pesantren Tebuireng dibubarkan oleh bala tentara Jepang, dan KH. Hasyim Asy'ari dijebloskan ke penjara di Surabaya.

KH. A. Wahid Hasyim yang saat itu tinggal di Tebuireng selang 10 hari usai melangsungkan pernikahannya dengan Sholihah, putri KH. Bisri Syansuri di Denanyar, terpaksa kembali ke Denanyar, untuk mengamankan istri dan kedua putranya yang masih kecil, Abdurrahman Ad-Dakhil dan Aisyah. Ny. Sholihah ketika itu sedang hamil tua. Sementara KH. A. Wahid Hasyim harus mondar-mandir ke Jakarta, untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh pergerakan di Jakarta, dan mengupayakan pembebasan ayahandanya dari penjara di Surabaya.

Ketika pindah di Denanyar itu, Sholihah melahirkan putra ketiganya, 11 September 1942, yang diberi nama Salahuddin Al-Ayyubi.

Kehadiran balatentara Jepang (Dai Nippon) ke Indonesia sejak Februari 1942 membuat KH. Abdul Wahid Hasyim tampak makin sibuk dan seringkali gelisah. Meski telah mengundurkan diri sebagai Ketua Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada pertengahan akhir 1941 dan menetapkan hati untuk konsentrasi memimpin

Pondok Pesantren Tebuireng, tiba-tiba kejadian demi kejadian penting menimpa Tebuireng dan umat Islam Indonesia pada umumnya. Konsentrasinya pecah, kesibukannya bukan lagi sekadar mengembangkan Pesantren Tebuireng, tetapi juga yang lain-lain. Sementara, Nyai Sholihah istrinya sedang hamil muda.

Pada 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerahkan kekuasaan atas Indonesia kepada Balatentara Jepang di Kalijati-Bandung. Sistem pemerintahan seketika berubah. Berbagai paraturan perundang-undangan diubah sesuai kehendak Balatentara Jepang. Berbagai perkumpulan yang pernah ada, perhimpunan politik, serikat-serikat sosial, termasuk Nahdlatul Ulama, seluruhnya dilarang penguasa baru ini. Sekolah-sekolah agama, seperti Islamictich Westerse Schoool NU (IWS NU), ditutup dan para guru harus bisa mencari pekerjaan lain.

Bendera Merah-Putih tidak boleh dikibarkan dan diganti dengan Hinomaru, bendera Nippon yang harus dikibarkan di kantor-kantor pemerintah dan sekolah. Rakyat dilarang menyanyikan dan mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan diganti dengan lagu kebangsaan Nippon, Kimgayo. Bahkan kalender pun diubah menjadi kalender Jepang, Kokki, tahun 1942 Masehi ditambah 660 menjadi 2602 Showa. Waktu dimajukan 1,5 jam sesuai waktu Tokyo, jam 07.00 menjadi 08.30. Semua peraturan perundang-undangan tersebut ditandatangani pembesar balatentara Dai Nippon.

Propaganda Jepang sebagai Saudara Tua Asia berhasil memikat masyarakat Indonesia. Sebelum balatentara Jepang mendarat, siaran Radio Tokyo tak henti-hentinya mengudarakan lagu Indonesia Raya dan mengajak rakyat Indonesia mengibarkan bendera Merah Putih. Propaganda Jepang ketika masuk ke Indonesia memang bukan untuk menjajah, sebaliknya untuk mengusir penjajah dan memperbaiki nasib rakyat Indonesia sebagai bangsa serumpun dan seketurunan dengan bangsa Jepang. Namun setelah mereka masuk

Indonesia, suasana berubah total. Selama Maret 1942-Maret 1943, kebencian rakyat Indonesia terhadap tingkah laku para tentara Jepang menyebar luas dan melahirkan gerakan perlawanan secara sporadis. Bagi sebagian besar kiai dan aktivis NU, kehadiran Jepang memang seperti lepas dari terkaman singa masuk ke mulut buaya. Bahkan tentara Jepang terasa lebih kejam dari pendahulunya, Belanda. Ribuan orang dari Jawa, Riau, dan Sumatera Utara digiring untuk kerja paksa, romusa, membangun jalur kereta api Jalur dari kota Pekanbaru, menuju ke Kampar Kiri, Kampar yang menghubungkan ke Sijunjung Sumatera Barat sepanjang 220 Km. Mereka bekerja siang dan malam tanpa henti untuk pembangunan rel tersebut. Pakaian rakyat yang terbuat dari karung goni penuh dengan kutu. Siapa yang tidak kerja, tidak diberi makan. Cak Durasim mengungkapkan situasi dan kondisi ini dalam bahasa Pantun, "*Bekupon omah doro, melu Nippon tambah soro* (Bekupon rumah burung dara, ikut Jepang bertambah sengsara)".

Balatentara Jepang menuduh gerakan-gerakan perlawanan anti-Nippon didalangi dan dikendalikan para ulama. Aksi terang-terangan para ulama yang mengharamkan upacara saikeirei, menyembah Kaisar Jepang Tenno Haika dengan sikap membungkuk 90 derajat (seperti rukuk dalam shalat) setiap pukul 07.00 pagi, menjadi bukti dan alasan utama Jepang untuk menuduh para ulama. Sikap saikeirei ini dinilai para ulama sebagai tindakan musyrik, sebab sikap ini hanya layak dilakukan untuk menyembah Allah SWT. Melalui bantuan kaki tangannya, Jepang menangkapi para ulama di berbagai daerah, seperti tokoh Syuriah NU Jawa Barat, KH. Zainal Musthofa, tokoh-tokoh NU di Jawa Tengah, KH. Habsullah, KH. Masykuri, KH. Ibnu Hajar, Kiai Tamlikho, dan lain-lain.

Puncaknya, pada April 1942, Rais Akbar NU Hadratussyeikh KH. Hasyim Asy'ari bersama Ketua Hoofdbestuur Nahdlotul Oelama (HBNO) atau Tanfidziyah PBNU, KH. Mahfudz Shiddiq,

ditangkap tentara Jepang dan dipenjarakan di Bubutan, Surabaya. Hadratussyeikh bersama para kiai-kiai lainnya dituduh membangkang penguasa Jepang, memimpin dan mendalangi gerakan anti-Nippon yang merebak di mana-mana. Pondok Pesantren Tebuireng pun ditutup dan dibubarkan Jepang. KH. Wahab Chasbullah, selaku Katib Syuriah HBNO segera mengambil alih seluruh tanggung jawab kepemimpinan NU dalam situasi darurat ini. Atas nama Ketua PBNU, KH. Wahab Chasbullah membaiat para pengurus NU, Syuriah maupun Tanfidziyah, untuk setia membantunya, apa pun akibatnya.

Di tengah situasi yang mencekam ini, KH. Wahid terpaksa mengungsikan istrinya, Nyai Sholihah, yang saat itu sedang mengandung janinnya yang ketiga, beserta kedua putra-putrinya yang masih belia, Abdurrahman Ad-Dakhil alias Gus Dur (3 tahun) dan Aisyah (2 tahun), dari Tebuireng ke Denanyar, sekitar 10 km. Istrinya yang baru dinikahi 10 Syawal 1356 H (1938 M) itu kembali tinggal bersama kedua orangtuanya, KH. Bisri Syansuri, di Denanyar. Beliau juga kembali berkumpul dengan saudari-saudarinya, dan sesekali mengajar para santriwati di Pondok Pesantren Mambaul Maarif, yang didirikan dan diasuh ayahandanya. Beliau kembali merasakan suasana Denanyar seperti sebelum menikah dan saat melahirkan putra pertamanya, Abdurrahman Ad-Dakhil.

KH. A. Wahid Hasyim, putra tertua Hadratussyeikh KH. Hasyim Asy'ari, segera berangkat ke Jakarta mencari jalan dan penghubung ke pembesar-pembesar Jepang guna membebaskan kembali ayahandanya. Di Jakarta, Wahid Hasyim segera menemui Abdul Hamid Nobuharu Ono, seorang pegawai di kantor agen rahasia Jepang di Kantor Menteng 46 Jakarta. Hamid Ono pertama kali dikenalnya di Sedayu, Gresik Jawa Timur, pada masa Belanda. Dia seorang muslim asal Jepang. Perkenalan keduanya makin akrab, bahkan Hamid Ono beberapa kali datang ke Tebuireng untuk mengikuti pengajian di Pesantren. Atas bantuan Hamid Ono, KH. Wahid

bersama KH. Wahab Chasbullah, yang juga pamannya, mendatangi instansi-instansi penting, menemui para pembesar Jepang untuk memperjuangkan pembebasan ayahandanya. Mereka tak kenal lelah berusaha menegosiasi para pembesar Jepang agar Rais Akbar PBNU dibebaskan. Sementara, KH. A. Khaliq Hasyim, adik Wahid Hasyim, ditugaskan menemui pengurus-pengurus NU di daerah-daerah, termasuk ke Banyumas, untuk mengabarkan kondisi terkini.

Melihat gejolak perlawanan rakyat sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok keagamaan, balatentara Jepang mencoba mengendalikan kondisi ini dengan membentuk kantor urusan bidang keagamaan bernama Shumubu. Mereka mencoba ingin mengambil pengaruh Hadratussyeikh untuk mengatasi persoalan ini. KH. Wahid Hasyim mendampingi ayahandanya dalam suatu pertemuan penting untuk mengatur hal ini. Hadratussyeikh menampik secara halus permintaan Jepang agar menjadi ketua secara langsung dengan cara mengajukan putranya, KH. Wahid Hasyim sebagai ketua. Pada tanggal 9 Mei 2602 Shumubu resmi berdiri, yang kelak menjadi cikal bakal Kementerian Agama RI. Namun Hadratussyeikh tetap ditahan.

Setelah empat bulan berusaha, pada Kamis, 18 Agustus 1942 (2602 Showa) KH. Wahid Hasyim dan KH. Wahab Chasbullah berhasil membawa pulang pendiri Pondok Pesantren Tebuireng ini dari Penjara Mojokerto. Kandungan Nyai Sholihah makin membesar. Tebuireng masih mencekam. KH. Wahid Hasyim mengisyaratkan agar anaknya yang ketiga dilahirkan di Denanyar, sebagaimana kakak pertamanya, Abdurrahman Ad-Dakhil.

Jumat, 11 September 1942, saat posisi matahari hampir tepat di garis khatulistiwa, Nyai Sholihah melahirkan anaknya yang ketiga. Bayi laki-laki yang dilahirkan di musim kemarau alam dan kemarau politik menyelimuti bumi Indonesia ini diberi nama Salahuddin Al-Ayyubi. Sebuah nama yang mengingatkan pada gelar seorang ksatria sekaligus ulama muslim besar dari Tikrit, Irak abad ke XII.

Dia adalah Yusuf bin Najmuddin al-Ayyubi, sosok pemuda yang berhasil menghidupkan perekonomian dan mengorganisir ulang kekuatan militer Mesir setelah mendapat serbuan dari Kerajaan Latin Jerussalem. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Mesir dari kaum Seljuk. Kelak dialah yang berhasil menghancurkan serangan Tentara Salib dan Pasukan Romawi Bizantium dalam Perang Salib kedua di Mesir. Dia pula yang berhasil mengembalikan Khilafah Abbasiyah di Baghdad mulai September 1171 M. Dan dia juga tokoh yang berhasil mempersatukan Damaskus, Mesir, dan Syam, serta memperluas wilayahnya hingga Mousul, Irak bagian Utara. Pada masa itu, namanya juga dikenal kaum muslim Sunni sebagai waliyullah.

Nama Salahuddin Al-Ayyubi seakan menggambarkan suasana batin KH. A. Wahid Hasyim masa itu. Suatu masa di mana umat Islam membutuhkan pemimpin yang kuat, cerdas, dan tangkas, serta mampu menyatukan berbagai kalangan. Untuk mampu mengatasi kekejaman Balatentara Jepang saat menginjak-injak martabat dan lahir-batin umat Islam Muslim di Indonesia saat itu, umat Islam Indonesia membutuh kehadiran sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Yusuf bin Najmuddin al-Ayyubi mungkin menjadi inspirasi KH. Wahid Hasyim dan sekaligus mendoakan putra ketiganya dengan memberi nama Salahuddin Al-Ayyubi. Tentu saja, nama "Sholah" sendiri juga berarti doa agar anak ini menjadi anak yang saleh, baik, berguna, bermanfaat, berbudi luhur, berkompeten, lurus, jujur, taat, alim, patuh, dan benar. Nama ini juga seakar kata dengan nama ibunya, Sholihah, dan nama-nama sepupu dari ibunya, Muslih dan Solichati.

Nama Al-Ayyubi yang melekat pada Salahuddin saat pertama kali yang diberikan tiba-tiba hilang dalam perjalanan waktu. Tidak ada informasi yang jelas atas hilangnya nama belakang tersebut, sebagaimana tidak ada informasi bagaimana proses persalinannya. Berbeda dengan Aisyah, kakaknya, ketika lahir di Tebuireng dua tahun sebelumnya sudah ditangani bidan, bukan dukun tradisional.

Salahuddin mendapat panggilan dasar "Sholah". Para santri memberikan gelar "Gus", gelar singkat dari kata Bagus karena Sholah adalah putra dan cucu kiai, sehingga mereka memanggil Gus Sholah. Ada juga yang memanggilnya Mas Sholah. Sejak remaja, saudara-saudaranya memanggilnya "Los", kebalikan dari "Sol", sebagaimana cara arek-arek Malang mengungkapkan banyak kata dengan cara mengucapkan dari belakang, atau yang dikenal dengan bahasa "*Walikan*" (kebalikan) seperti "Malang" menjadi "*Ngalam*", atau "Pulang" menjadi "*Ngalup*", dan seterusnya. ❖

Bersama
bu Aisyah Hamid,
gus Umar dan nyai Lily

Tak Sempat Mengenal-Utuh Ayahanda

HINGGA akhir 1943, Sholah tumbuh dan berkembang dalam keluarga besar Ibunya, Nyai Sholihah, di Pondok Pesantren Mambaul Maarif, Denanyar. Selain bersama kakek, KH. Bisri Syansuri, dan neneknya, Nyai Noor Khadijah, di sana juga ada saudari ibunya yang memiliki anak-anak sebayanya, yaitu Nyai Muashomah dan Nyai Muslihatin. Muashomah memiliki anak kecil bernama Sholihati, sedangkan Nyai Muslihatin memiliki putra kecil bernama Muslih dan saudarinya bernama Muchassonah. Bersama mereka Gus Sholah diasuh, bermain, dan bersenda gurau lazimnya anak kecil. Bahkan mereka menjadi saudara *radla*, saudara satu susuan.

Setelah Tebuireng boleh dibuka kembali oleh balatentara Jepang, Sholah dan kedua kakaknya kembali diboyong oleh ibunya ke Pondok Pesantren Tebuireng. Meski demikian, Sholah sangat jarang berkumpul bersama ayahandanya, KH. Wahid Hasyim. Kesibukan sebagai anggota Chuo Sang In, Penasihat Shumubu, dan juga pengurus Masyumi, membuat ayahandanya sering mondar-mandir ke Jakarta dan berbagai daerah lainnya.

Suatu ketika, dalam perjalanan ke Jakarta, KH. Wahid Hasyim mampir ke Sokaraja, Banyumas. Selain menjenguk KH. Sarwani, mertua adiknya, KH. Abdul Kholiq Hasyim, beliau juga berjumpa dengan KH. Saifuddin Zuhri untuk pertama kalinya. Saat berkenalan, KH. Wahid mengonfirmasi beberapa informasi yang telah didapatkan. “Saya mendapat informasi di Purbalingga, bahwa

ente masih kemenakan dari KH. Sarwani, juga masih kemenakan dari KH. Baidlowi, bagaimana jelasnya hubungan itu?" pertanyaan pembuka yang diajukan KH. Wahid Hasyim kepada KH. Saifuddin Zuhri.

Setelah mendengar penjelasan KH. Saifuddin Zuhri bahwa hubungan keluarga itu ditarik dari garis ibu, KH. Wahid Hasyim langsung terkesima, "*Masya Allah*, kita ini diam-diam masih kerabat, ya? *Alhamdulillah*!"

"Bagaimana kabar Hadratussyeikh setelah keluar dari tahanan Nippon?" tanya Saifuddin Zuhri.

"Alhamdulillah, kesehatannya justru makin membaik. Selama dalam penjara Hadratussyeikh mengkhatamkan al-Quran dan Kitab Hadits Bukhori berkali-kali. Nippon kini melakukan politik kompensasi terhadap Hadratussyeikh. Entah karena kedudukan perangnya mulai terdesak oleh serangan-serangan sekutu terutama Amerika, entah karena salah langkah dalam menghadapi umat Islam, entah karena mengalami tekanan batin berhubung informasi yang salah tentang Hadratussyeikh, entah karena semuanya?" jelas Kiai Wahid.

"Bagaimana macam kompensasinya?" tanya Kiai Saifuddin.

"Hadratussyeikh diangkat menjadi Shumubucho, kepala Jawatan Agama, dulunya dijabat oleh seorang Jepang Kolonel Horie," jelasnya.

"Hadratussyeikh setuju?"

"Setuju, meski ada tapinya."

"Bagaimana? Aku jadi tidak mengerti logika ini," sela Kiai Saifuddin.

"Lebih bijaksana bila menerima jabatan itu daripada menolaknya, karena bisa dianggap Nippon sebagai sikap tak mau kerjasama. Jangan dilupakan, Hadratussyeikh baru saja mengalami penderitaan lima bulan di penjara," tutur Kiai Wahid.

Beliau setuju menerima jabatan kepala Shumubucho. Akan tetapi karena usianya yang lanjut, juga memangku pesantren yang besar hingga amat susah pergi mondar-mandir antara Tebuireng-Jakarta yang amat melelahkan bagi orang seusia beliau, maka Hadratussyeikh menyerahkan tugas Shumubucho kepada putranya sendiri. Dengan demikian, Nippon tidak tersinggung dan tidak mencurigai, dan Hadratussyeikh tidak memikul madlaratnya.

Perbincangan serius itu berakhir saat KH. Wahid melirik jam tangannya yang sudah menunjuk angka 11.00 kurang. Beliau akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta naik kereta api dari stasiun Purwokerto. Sejak pertemuan tersebut, KH. Wahid dengan KH. Saifuddin kerap berjumpa dalam berbagai kesempatan dan berbagai tempat, baik di Jakarta, Semarang, maupun tempat-tempat lainnya. Mereka tidak pernah menyangka kelak sama-sama bakal menjadi Menteri Agama. Mereka juga tidak pernah menyangka kelak akan menjadi besan, putra KH. Wahid yang baru dilahirkan kelak akan menikah dengan putri KH. Saifuddin Zuhri, bernama Farida.

Kesibukan KH. Wahid Hasyim terus meningkat. Mulai Juli 1943, pemerintah Jepang di Jakarta mengadakan "latihan ulama", yang diselenggarakan selama tiga minggu. Tiap angkatan terdiri atas 40 orang. Akhirnya, pada 1944, beliau memutuskan tinggal di Jakarta bersama putra pertamanya, Abdurrahman (4 tahun). Mereka tinggal di Jl. Diponegoro Nomor 42. Sedangkan Sholah bersama Aisyah dan ibunya tetap tinggal di Tebuireng. Tidak lama kemudian, mereka bertiga menyusul ke Jakarta naik kereta api selama dua hari perjalanan, karena harus singgah di Semarang. Dalam rombongan tersebut juga ada Gus Ali (nama kecil Aziz Bisri), adik Nyai Sholihah.

Di Jakarta, keluarga Kiai Wahid hanya tinggal bersama selama enam bulan, kemudian kembali ke Jombang atas permintaan Hadratussyeikh untuk mengurus Pondok Pesantren Tebuireng.

Nyai Sholihah pulang dalam keadaan hamil putra yang keempat, yang kelak lahirlah Umar Al-Faruq pada 6 April 1945 di Jombang. Sementara, KH. Wahid Hasyim masih disibukkan dengan berbagai agenda di Jakarta, termasuk merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersama para tokoh nasional lainnya, hingga diangkat sebagai Menteri Agama RI pertama pada 18 Agustus – 14 November 1945.

Agresi Belanda bersama sekutu membuat suasana pemerintah Indonesia yang baru merdeka menjadi tidak menentu. Belanda marah besar karena Indonesia tiba-tiba memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. KH. Wahid pun tinggal tidak menentu. Terkadang di daerah kediaman Kiai Abdurrozzaq Mampang, Kiai Mohammad Na'im Cipete, atau daerah kediaman Kiai Baqir di Rawabangke, dan lain-lain. Peperangan pecah di mana-mana. KH. Wahid Hasyim menjadi salah satu dari daftar orang yang dicari tentara Belanda. Beliau terus melanglang buana dalam persembunyian, menghindar dari incaran Belanda. Sesekali beliau mengunjungi keluarganya secara diam-diam. Nyai Sholihah merasakan kondisi ekonomi dalam kekurangan, hingga berjualan makanan bagi para guru dan santri Tebuireng.

Ahad, 21 Oktober 1945, KH. Wahid telah bergabung bersama beberapa tokoh NU lainnya di kantor PBNU di Jalan Bubutan Surabaya menyikapi masuknya Netherlands-Indies Civil Administration (NICA) di Surabaya. Senin, 22 Oktober malam, seluruh konsul NU se-Jawa dan Madura mendengar langsung amanat Hadratussyeikh Hasyim Asy'ari tentang kewajiban umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, untuk jihad mempertahankan kemerdekaan tanah air Indonesia, yang dikenal dengan "Resolusi Jihad". Saat Kongres Umat Islam 8-9 November 1945, Resolusi Jihad kembali dikukuhkan. Pada 9 November, Hadratussyeikh Hasyim Asy'ari selaku komando tertinggi Laskar Hizbullah menginstruksikan seluruh Laskar

dari berbagai penjuru datang ke Surabaya untuk menghadapi ultimatum Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) yang akan membumihanguskan Surabaya. Sabtu, 10 November 1945, ratusan ribu santri, tentara, dan Arek-Arek Suroboyo menghadapi serangan tentara Inggris dan sekutu secara membabi buta. Perang dahsyat selama hampir satu bulan itu menggugurkan puluhan ribu pahlawan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, 10 November dikenang sebagai "Hari Pahlawan", sedangkan 22 Oktober akhirnya diabadikan sebagai "Hari Santri Nasional".

Pada 14 November 1945, pemerintah Indonesia mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, berdasarkan Maklumat 14 November 1945 yang berbunyi,

> *Maklumat 14 November 1945*
> *"Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha Negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah, tanggungjawab adalah di dalam tangan Menteri."*

Susunan Kabinet pun terbentuk, dipimpin oleh Soetan Sjahrir dari PSI sebagai Perdana Menteri. KH. A. Wahid Hasyim tidak lagi masuk kabinet. Kursi Menteri Urusan Agama diisi oleh H. Rasjidi dari Masyumi. Beberapa tokoh NU sebenarnya merasa kecewa, namun KH. Wahid Hasyim merasa tidak punya beban. "Tak usah kecewa! Saya toh bisa duduk di rumah. Saya mempunyai banyak kursi dan bangku panjang, tinggal pilih saja," ungkapnya suatu ketika menjawab pernyataan orang-orang saat di Purworejo.

"Menurutku, NU menjadi besar bukan lantaran ada tokohnya yang menjadi menteri. Dan insya Allah tidak akan menjadi kecil hanya karena tidak ada tokoh yang menjadi menteri. Selagi NU masih

dipimpin oleh para ulama, NU akan tetap menjadi besar, insya Allah," tegasnya kembali. Dengan Chevrolet Cabriolet putihnya, KH. Wahid memang sering bersilaturahim ke berbagai daerah mengunjungi sanak, saudara, dan temannya.

Iklim politik dalam negeri dalam kondisi tidak stabil. April-Juni 1946 kelompok politik terbelah antara golongan pendukung pemerintah (Partai Sosialis, Partai Komunis, Partai Buruh dan golongan pemuda Pesindo beserta laskarnya), yang disebut sebagai kaum Kiri, dengan golongan oposisi atau Persatuan Perjuangan (Masyumi, PNI, Barisan Banteng, Barisan Bung Tomo), termasuk golongan Hizbullah, disebut sebagai kaum Kanan. Banyak tokoh ditangkap, seperti Tan Malaka, Abikusno Tjokrosujoso, Wondoamiseno, Chaerul Saleh, Dr. Muwardi. Presiden Sukarno pun mengumumkan negara dalam keadaan bahaya. Pada 27 Juni 1946, Panglima Besar Sudirman memerintahkan seluruh tahanan dibebaskan dari tahanan Pesindo. Sebaliknya, pada malam 27 Juni itu, Perdana Menteri Sjahrir diculik di Solo. Mr. Amir Sjarifuddin selaku Menteri Pertahanan mengusulkan dalam rapat kabinet agar mandat diserahkan kepada Presiden untuk mengambil alih kekuasaan. Akhirnya 1 Juli 1946, Soetan Sjahrir dilepaskan kaum penculik. Pada 3 Juli 1946, Mr. Amir Sjarifuddin dalam mobil di Yogyakarta ditembaki anggota laskar, tidak jelas golongan mana.

Saat tiba di Kota Magelang 3 Juli 1946, tiba-tiba KH. A. Wahid Hasyim mendengar dari radio merek "Philips" Menteri Penerangan Muhammad Natsir atas nama Pemerintah mengumumkan berita genting.

"... Telah terjadi percobaan *coup d'etat* oleh Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka. *Coup d'etat* itu hendak memaksa Presiden Sukarno agar memberhentikan Kabinet Sjahrir dan diganti oleh kabinet baru di bawah pimpinan Tan Malaka dengan anggota-anggotanya yang terdiri atas... KH. A. Wahid Hasyim."

Mendengar namanya disebut, KH. Wahid langsung tercengang. "*Ngg*...?" mulutnya monyong seperti orang bersiul sambil bergeleng-geleng. "Dari mana Natsir menemukan nama saya? Saya sendiri tidak tahu menahu. Mengapa ia tak menanyakan kepada saya?" Dia terheran-heran sambil membacakan ayat 6 surat Al-Hujurat, "*Ya ayyuha al-ladzina amanu in ja-akum fasiqun binabain fatabayyanu an tushibu qauman bijahalatin fatushbichu 'ala ma fa'altum nadimin*.."

Saat itu juga, KH. Wahid segera meluncur ke rumah Mr. Suroso, namun orangnya tidak ada. Ia pun bertolak ke kantor Karesidenan Magelang, menemui Mr. Suyudi. Benar saja, sebagaimana yang diduga sebelumnya, di sana tampak Mr. Suyudi, Dr. Sukiman, Abikusno Tjokrosujoso, Mr. Ahmad Subardjo, Dr. Buntaran, Wondoamiseno, dan lain-lain sedang berkumpul. Semua terkejut melihat kehadiran KH. Wahid.

"*Piyee*..? *Piyee*..?" semua orang bertanya bagaimana.

"*Piyee*.. *Piyee*.. *Piyee*.. *mbuh ora weruh*...!" mereka serentak bangkit dari duduknya dan menyalami KH. Wahid satu per satu dengan genggaman yang erat tanda persahabatan. Sesekali gelak tawa mereka pecah dan terpingkal-pingkal.

Di kemudian hari baru terkonfirmasi bahwa pada saat 3 Juli 1946, Mr. Muhammad Yamin dan Mayjen Sudarsono meminta Presiden Sukarno membubarkan kabinet Sjahrir. Dan saat itu, konon, Tan Malaka menyodorkan susunan kabinet baru, termasuk menyebut KH. A. Wahid Hasyim sebagai salah satu menteri.

Kondisi politik tetap belum menentu. Sukarno kembali mempercayakan Perdana Menteri kepada Soetan Sjahrir. Dalam kabinet koalisinya yang ke-3, nama KH. A. Wahid Hasyim dimasukkan sebagai Menteri Negara dan Menteri Agama diisi oleh KH. Fathurrahman hingga pada 3 Juli 1947.

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 2 November 1949, yang menyatakan bahwa Belanda resmi akan menyerahkan

kekuasaannya kepada Indonesia pada 27 Desember 1949, suasana berangsur normal. Tanggal 20 Desember 1949-6 September 1950 KH. Wahid Hasyim diangkat lagi sebagai Menteri Agama dalam Kabinet RIS. Suasana Jakarta telah membaik. Ibukota negara telah kembali ke Jakarta. Memasuki tahun baru 1950, keluarga KH. Wahid kembali diboyong ke Jakarta. Kali ini rombongan keluarganya berangkat naik kapal laut dari Surabaya, dengan waktu tempuh selama dua hari satu malam. Keluarga mereka tinggal di Rumah Dinas Menteri Agama Jl. Jawa Nomor 112, sekarang Jl. HOS. Cokroamnioto), Menteng, Jakarta Pusat, bersebelahan dengan Kedutaan Iran. Mereka memulai babak kehidupan baru lagi di Jakarta bersama keluarga, setelah beberapa tahun kebersamaan mereka tidak menentu. Sholah dan saudaranya mendapat sentuhan kasih sayang ayahnya lebih intensif, di mana selama ini sering mencari-cari perhatian dengan tingkah yang cenderung "nakal".

Oktober 1952, setelah tidak menjadi Menteri Agama RI lagi, KH. A. Wahid Hasyim membeli sebuah rumah bekas di Jalan Taman Matraman Barat Nomor 8 (sekarang jalan Taman Amir Hamzah). Rumah berarsitektur Belanda itu berdampingan dengan rumah Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo. Rumah berukuran sekitar 400 meter persegi, di atas lahan dengan luas sekitar 1.500 meter persegi itu, menghadap sebuah taman dengan luas sekitar 4.000 meter persegi. Tidak jauh dari sana, terdapat Masjid Jami' Matraman yang dibangun pada 1837. Meski tidak berada dalam pusat lingkungan elit Menteng, lokasi rumah itu cukup dekat dengan pusat-pusat pemerintahan dan politik. Bahkan di deretan rumah itu juga terdapat kantor Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam (SI) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Di lingkungan yang asri itulah, Salahuddin bersama kedua orang tua dan saudara-saudarinya tinggal hingga dewasa.

Sayangnya, tidak lebih dari enam bulan, pada 19 April 1953 KH. A. Wahid Hasyim meninggalkan rumah dan seluruh penghuni itu untuk selamanya. Salahuddin pertama kali mendengar wafatnya ayahandanya akibat kecelakaan lalu lintas melalui siaran radio bersama kakak dan adik-adiknya. Ia tak sempat mengenal lebih jauh tentang sosok ayahnya, yang meninggal dalam usia 39 tahun itu. Perjumpaannya dengan sang ayah itu terlalu singkat bagi Salahuddin untuk dapat memahami secara mendalam siapa dan bagaimana ayahandanya. Sentuhan kasih sayang ayahandanya bukanlah sentuhan jasmani yang sepenuhnya. Namun, kelak Sholah berhasil mengidentifikasi sosok ayahanda yang dikaguminya dari orang-orang terdekatnya. ❖

Bersama
gus Dur

Masa Kanak-Kanak

SEBAGAIMANA anak-anak pada umumnya, sosialisasi utama Salahuddin adalah dengan orangtuanya. Meski jarang berjumpa dengan sang ayah, dia hampir tak pernah jauh dari ibundanya, Nyai Sholihah. Sebagai putri KH. Bisri Syansuri, Nyai Sholihah adalah sosok yang egaliter, bisa bergaul dengan semua kalangan, mulai dari kelas bawah hingga kelas atas. Orang Jombang menyebutnya grapyak yang berarti ramah kepada siapa saja. Ciri yang sama juga melekat pada KH. A. Wahid Hasyim. Beliau juga orang yang grapyak dengan siapa saja, tak terkecuali kepada orang-orang yang berbeda pandangan.

Ketika KH. A. Wahid Hasyim wafat pada tanggal 19 April 1953, Salahuddin Wahid masih berumur sepuluh tahun lebih beberapa bulan. Praktis ia hanya mengalami waktu beberapa tahun hidup bersama sang ayah. KH. A. Wahid Hasyim lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta, karena tuntutan tugas. Awalnya beliau tinggal di Jalan Diponegoro No. 42, sementara Ny. Sholihah Wahid Hasyim bersama putra-putrinya yang masih kecil tinggal di Jombang. Baru setelah awal 1950 keluarga KH. A. Wahid Hasyim pindah ke Jakarta.

Ketika masa kanak-kanak, putra-putri KH. A. Wahid Hasyim mendapatkan pendidikan baca-tulis al-Qur'an langsung dari sang ayah. Jangan dikira KH. A. Wahid Hasyim yang beperangai lembut itu lembut pula jika mengajar al-Qur'an kepada anak-anaknya. Beliau cukup keras dalam mendidik putra-putrinya.

Sebagai gambaran betapa kerasnya sang ayah mendidik putra-putrinya, dapat dilihat dari hukuman yang pernah ditimpakan kepada Salahuddin Wahid ketika ia melakukan kesalahan. Suatu

saat Salahuddin Wahid memecahkan bola lampu rumah. Untuk kesalahan itu dia dihukum dengan dikurung di dalam gudang.

Sebagai bocah yang masih ingusan, sudah tentu Salahuddin Wahid merasa jengkel mendapat hukuman seperti itu. Untuk melampiaskan kejengkelannya ia pun berontak dan mengencingi beras yang tersimpan di dalam gudang. Mengetahui perbuatan anak nomor duanya seperti itu, KH. A. Wahid Hasyim pun menjatuhkan hukuman yang lebih berat lagi. Ia diikat di sebuah tiang di depan rumah kesepuhan (kini dihuni oleh Pengasuh Pesantren) dalam keadaan telanjang, dari pagi sampai sore.

Tindakan keras itu menunjukkan sikap tegas dan disiplin yang dimiliki oleh sang ayah. Setelah dewasa baru Salahuddin Wahid menyadari bahwa didikan ekstra keras sang ayah bertujuan mendidik agar ia dan saudara-saudaranya menjadi orang yang bertanggung jawab atas setiap perbuatannya.

Meski hanya sejenak mendampingi sang ayah dan ditinggal ketika usia kanak-kanak, Salahuddin Wahid masih bisa mengingat-ingat beberapa pengalaman diajak bepergian ayahnya, dan diperkenalkan dengan sejumlah tokoh NU zaman itu. Sudah menjadi kebiasaan KH. A. Wahid Hasyim, jika melakukan perjalanan ke suatu daerah menyempatkan diri mampir ke rumah tokoh-tokoh NU di daerah yang menjadi kawan karibnya.

Gus Sholah masih cukup jernih memorinya, ketika masih kecil diajak ke rumah KH. Djunaidi, ayahnya Mahbub Djunaidi, ke rumah KH. A. Razak Makmun dan KH. Asmuni, keduanya tokoh NU Betawi, juga bersilaturahmi ke kediaman AS. Bahmid, Jamaluddin Malik, Asa Bafaqih dan lain-lain. Masih melekat di ingatannya, peristiwa ketika KH. A. Wahid Hasyim, menyetir mobil di jalanan Kota Bogor dengan kecepatan terlalu tinggi kemudian ditilang polisi.

Salahuddin Wahid, Abdurrahman Wahid, Aisyah dan Umar Wahid bersekolah di SD KRIS sampai tahun 1952. Mereka pindah ke

SD Perwari di Jalan Salemba Tengah yang dipimpin oleh Ibu Aliman (ibunda Ali Wardhana). Kepindahan itu karena pertimbangan lokasi agar lebih dekat dengan rumah tinggalnya. Sang ayah yang semula tinggal di Jalan Jawa No. 112 (kini Jalan Cokroaminoto) pindah ke Taman Matraman Barat.

Kehidupan di lingkungan Pondok Pesantren Denanyar dan Tebuireng, tempat lahir dan tumbuh kembang usia emas Sholah, memang berbeda. Menurut Nyai Sholihah, kehidupan di keluarga ndalem Denanyar lebih bebas dibandingkan di Tebuireng. Kehidupan di *ndalem* Tebuireng terasa lebih banyak aturan, tidak boleh keluar sendirian, seperti belanja ke pasar harus ada orang yang menemaninya. Sedangkan di Denanyar, Nyai Sholihah merasa lebih bebas bergerak, tanpa ada pengawal tertentu. Para santri yang mengabdi di ndalem Tebuireng diberikan giliran jam-jam tertentu dalam menjalankan tugas mengurus kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini memungkinkan pola pengasuhan kepada putra-putrinya juga diterapkan secara berbeda. Sholah dan saudaranya-saudaranya juga merasakan suasana dan pola pergaulan dan kehidupan yang berbeda.

Sejak di Denanyar hingga di Jakarta, teman, saudara, sekaligus "musuh" kecil Gus Sholah adalah Gus Muslih Chasbullah, sepupunya. Muslih juga turut ke Jakarta saat mereka hijrah hingga sekolah SD di sana. Muslih sudah mereka anggap saudara kandung sendiri. Mereka memanggilnya, "Mas Muslih", karena dia putra kakak Nyai Sholihah. Meski demikian, beberapa kali Gus Sholah mendapat hukuman gara-gara bertengkar dengan Muslih. Hubungan antara Sholah dan Muslih saat masih kecil, diibaratkan Lily (adiknya), seperti kucing dan anjing. Selalu ribut jika ketemu. Gara-gara bertengkar, keduanya pernah dimasukkan ke dalam kamar mandi dan dikunci dari luar. Namun saat di kamar mandi, justru mereka bermain bareng. Bahkan KH. Wahid pernah mengambil cangkul dan linggis diberikan

kepada keduanya, "*Kono tukaran kono, gowo pacul pisan kono* (sana bertengkar, sana, pakai cangkul sekalian)."

Sedari kanak-kanak, putra-putri KH. A. Wahid Hasyim sudah diperkenalkan dengan orang-orang penting, terutama di lingkungan NU.

Saat tinggal di Rumah Dinas Menteri Agama di Jalan . Jawa, mereka tinggal bersama keluarga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Menteri Agama, Raden Muhammad Kafrawi, asal Sumenep. Rumah dinas tersebut terdiri atas rumah induk sebagai tempat tinggal menteri dan rumah paviliun sebagai tempat tinggal sekjennya. Putra-putri Kafrawi juga menjadi teman dari putra-putri KH. Wahid. Mereka seperti memiliki pasangan bermain masing-masing sesuai usia sepantarnya: Inu (putra Kafrawi) sepantar dengan Gus Dur, Sisi sepantar dengan Aisyah, Fifi sepantar dengan Gus Sholah, dan Wita sepantar dengan Gus Umar.

Di Jakarta, pola kehidupan Sholah dan saudara-saudarinya diatur secara ketat. Setelah shalat Subuh, mereka harus mengaji, terus sarapan, dan siap-siap berangkat sekolah.

Entah dengan pertimbangan apa, pada awalnya KH. A. Wahid Hasyim menyekolahkan Salahuddin dan saudara-saudaranya di SR (Sekolah Rakyat, kini SD) KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) yang terletak di Jalan Asem Baru (kini Jl. Sam Ratulangi) Jakarta Pusat. Kedua sekolah di atas, SR KRIS dan SD Perwari di Jalan Salemba Tengah, bukan sekolah yang dikelola oleh organisasi Islam.

Belakangan, setelah Sholah menginjak dewasa, ia mulai memahami kenapa Kiai Wahid menyekolahkan anak-anaknya tidak ke sekolah Islam, atau sekolah yang dikelola oleh organisasi Islam. Kiai Wahid bermaksud menanamkan rasa kebangsaan dan mencegah timbulnya kefanatikan secara berlebihan terhadap Islam di dalam diri putra-putrinya. (Dalam sebuah kamus, fanatik diartikan sebagai sikap yang berlebihan terhadap sesuatu hal, termasuk agama, yang

pada tingkat tertentu dapat menimbulkan tindak kekerasan dan tidak rasional).

Dalam berbagai kesempatan, Gus Sholah menyampaikan bahwa dirinya tidak fanatik terhadap Islam, tetapi ia ingin menjadi penganut Islam yang taat, yang berusaha untuk memenuhi ketentuan syari'at Islam sesuai dengan pemahaman dan penafsirannya. Bagi Sholah, fanatik itu mengandung pengertian yang tidak positif, merasa paling benar sendiri.

Di sekolah tersebut di kemudian hari diketahui ternyata banyak sekali aktivis gerakan Komunis, di antaranya Ibrahim Isa. Di KRIS itu, selain dengan Ibrahim Isa, Salahuddin Wahid berkawan dengan Leentje Tambayong (Rima Melati), Sapti, Madrim Gondokusumo, Ali Shahab (Pertamina), putri Pak Sartono (Ketua DPR), putri Pak Wilopo dan lain-lain.

Pada tahun 1952 mereka pindah ke SD Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) di Salemba Tengah, depan UI, yang dipimpin oleh Ibu Aliman (ibunda Ali Wardhana). Kepindahan itu karena pertimbangan lokasi agar lebih dekat dengan rumah tinggalnya. Sang ayah yang semula tinggal di Jalan Jawa No. 112 (kini Jalan Cokroaminoto) pindah ke Taman Matraman Barat. Saat itu Sholah kelas 5 dan Umar kelas 3.

Sejak kanak-kanak jadwal harian mereka diatur dengan cukup ketat. Pulang dari sekolah, pukul 12.00, makan siang, shalat, dan masuk kamar untuk tidur siang dari pukul 14.00 hingga pukul 16.00, sebagaimana kebiasaan orang-orang Belanda. Tak jarang, mereka menolak tidur siang. Mereka keluar mengendap-endap melalui jendela kamar, kemudian bermain entah ke mana. Terkadang mereka bermain ke Taman Suropati, atau kadang ke Taman Sunda Kelapa. Ketika waktu sudah mendekati jam bangun tidur, yaitu sekitar pukul 15.30, mereka segera kembali ke kamar, dan pura-pura habis bangun dari tidur siangnya.

Gus Sholah dan Gus Umar adalah pasangan yang paling klop di antara saudara-saudara yang lain. Sejak sekolah SD keduanya merasa cocok dan nyaman satu sama lain. Mereka hampir selalu bersama saat berangkat-pulang sekolah dan bermain. Usia dan kelas mereka hanya terpaut dua tahun. Keduanya juga dikenal sebagai anak pintar, selalu juara kelas. Saat sekolah di SD Perwari, mereka kadang berjalan kaki sejauh dua kilometer, kadang naik becak, kadang pula diantar mobil. Namun, sejak KH. Wahid tiada, mereka lebih sering berjalan kaki, sebab keluarga ini sudah tidak punya mobil lagi. Apalagi saat ibunya tidak mempunyai uang untuk membayar ongkos becak.

Suasana kehidupan sepeninggal KH. A. Wahid Hasyim, mereka rasakan jauh berubah. Nyai Sholihah yang saat itu mengandung putra keenam harus mengasuh putra-putrinya seorang diri. Anak keenam diberi nama Hasyim atau dipanggil Iim. Sementara, Gus Dur, saudara tertua, saat itu baru lulus SD dan hijrah ke Yogyakarta. Aisyah dan Gus Sholah masih kelas 5, Gus Umar kelas 3, dan Lily masih TK. Selain kerabat dekat, orang-orang yang dulu sering berkunjung dan bercengkrama tidak lagi meramaikan suasana rumah mereka. Selain merasa kehilangan ayahnya, mereka juga merasa kehilangan sesuatu yang pernah ada tatkala KH. Wahid masih hayat. Mereka yang masih kanak-kanak itu merasa kehilangan keramahan para tamu, sahabat, atau kolega ayahandanya, yang biasanya terus mengalir datang ke rumahnya. Sebagaimana dirasakan Aisyah, beberapa orang yang dulu sering dilihatnya berkunjung ke rumahnya dan selalu bersikap ramah kepadanya, mereka tidak menyapa sama sekali sesudah ayahnya tiada. Padahal orang itu sedang berkunjung ke rumah sebelahnya.

Bahkan suasana seperti ini sudah dirasakan Gus Sholah saat ayahandanya tidak lagi menjadi menteri.

"Jadi, waktu ayah saya menjadi menteri, tiap hari orang datang membawa beras, minyak dan gula ke rumah. Setelah ayah saya

nggak jadi menteri lagi, ya sudah. Orang-orang itu nggak mampir ke rumah saya, melainkan mampir ke rumah sebelah yang dihuni seorang menteri. Jadi sudah biasa yang begini ini," tutur Gus Sholah suatu waktu.

"Makanya *Sampeyan* kalau membantu orang, jangan pamrih apapun, biar nantinya nggak kecewa," ungkap Gus Sholah lagi.

Menghadapi suasana yang seperti itu, Nyai Sholihah berusaha menguatkan hati putra-putrinya. Nyai Sholihah menegaskan kepada putra-putrinya tentang keragaman karakter manusia. "Ya, memang begitu. Kalian tidak perlu marah. Manusia itu ada yang baik, ramah, dan lain-lain. Tetapi ada juga yang jahat, tidak peduli. Itu sudah biasa," pesan Nyai Sholihah kepada putra-putrinya.

Nyai Sholihah juga bertekad sekuat hati dan tenaga untuk membesarkan putra-putrinya sendiri. Walaupun keluarga dari Tebuireng telah sepakat akan membantu pengasuhan anaknya yang laki-laki, Nyai Sholihah secara tegas menolak. Gus Dur, Gus Sholah, dan Gus Umar akan diasuh oleh saudara-saudara KH. Wahid, yaitu Gus Kholik, Gus Karim, dan Gus Yusuf.

"*Boten, kersanipun sedoyo dados setunggal* (Tidak, biar semua jadi satu)," jawab Nyai Sholihah.

"*Masio dodol gado-gado tak ewangi, gak gelem aku dipisah ambek anak-anakku* (Walau jual gado-gado saya jalani, saya tidak mau dipisah dengan anak-anak saya)."

Meski selama di Jakarta hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, setelah suaminya meninggal, Nyai Sholihah bangkit berjuang keluar dari rumah. Dibantu Hamid Baidlowi, beliau menjual beras. Dan mengurus proyek di pelabuhan.

"*Struggle*nya ibu yang seperti itulah yang memotivasi kita semua. Diri kita sendiri *struggle*nya jadi tinggi karena kita lihat ibu untuk membesarkan kita mengorbankan dirinya sampai seperti itu," kenang Lily Wahid. ❖

Bersama
Puteri Ketiga
Acha

Anak Gedongan dengan Permainan Kampung

KEBEBASAN bermain tampaknya lebih terasa ketika mereka telah tinggal di Matraman. Meski disebut anak "gedongan", mereka juga kadang bermain dengan anak-anak kampung yang tinggal di belakang masjid Matraman. Mereka bermain layang-layang dan bahkan membentuk tim sepak bola sendiri bersama teman-temannya. Adik sekaligus teman bermain utama Sholah adalah Umar. Sedangkan Gus Dur, kakak mereka, bukanlah teman yang asyik untuk bermain. Gus Dur adalah sosok kakak yang cenderung serius. Meski demikian, kadang Gus Dur juga ikut bermain sepak bola, dan ternyata dia juga pandai memainkan permainan asal Inggris ini.

Sholah dan Umar bermain layang-layang di lapangan taman, sekarang Taman Amir Hamzah. Di lapangan itu, mereka dapat leluasa menerbangkan layang-layang tanpa rintangan pohon atau lainnya. Pohon-pohon di sana tidak terlalu tinggi untuk menghalangi penerbangan dan pandangan layang-layang saat terbang tinggi. Mereka "menggelas" benang mereka sendiri agar benangnya menjadi tajam. Benang yang tajam adalah alat penting untuk dalam bermain layang-layang aduan. Untuk membuat agar benang menjadi tajam, benang perlu dibalur dengan pecahan kaca yang dihaluskan dan dikeringkan sehingga menyatu. Mereka *ndeplok* (menumbuk) pecahan botol kaca atau kaca bohlam yang sudah mati di lumpang kuningan hingga halus dan ditapis atau diayak untuk diambil serbuk yang paling halus. Setelah itu, disiapkan perekat atau lem kering, biasa disebut dengan ancur. Butiran-butiran perekat kering warna kuning dan keras itu harus mereka panaskan dengan sedikit air

hingga mencair. Setelah perekat mencair, serbuk kaca halus tersebut dicampur dan diaduk hingga merata, kemudian gulungan benang dimasukkan ke dalam adonan kaca tersebut. Selanjutnya, gulungan benang diulur panjang sambil diserut agar adonan serbuk kaca meresap rata, dikaitkan dari satu pohon atau tiang ke pohon atau tiang yang lain hingga seluruh gulungan benang habis terurari. Jaringan benang itu dibiarkan beberapa waktu hingga kering, lalu digulung lagi untuk menerbangkan layang-layang. Dengan benang yang tajam setelah digelas, dapat mengiris benang layang-layang milik lawan hingga terputus.

Selain bermain layang-layang, mereka juga membentuk tim kesebelasan sepak bola bernama Gelatik Muda. Anggota tim kesebelasan mereka adalah anak-anak gedongan di sekitar Matraman. Mereka beriuran untuk membeli bola kulit dan seragam tim, mengorbankan uang jajan mereka. Sholah dan Umar tak berani minta uang kepada ibundanya secara khusus untuk kepentingan bermain mereka. Keduanya menabung dari jatah uang jajan dari ibundanya.

Hampir setiap sore mereka berlatih sepak bola sendiri. Tanpa pelatih khusus. Di taman depan rumahlah mereka berlatih, walaupun kadang kucing-kucingan, karena sebenarnya tidak boleh main di tempat itu. Jika ketahuan orang yang melarang, mereka bubar, bahkan dikejar-kejar dan bolanya ditusuk hingga pecah. Kalau sudah begitu, mereka iuran lagi untuk membeli bola.

Sebagai permainan beregu, kadang ada saja teman mereka yang berhalangan ikut berlatih, sehingga kekurangan orang. Sepanjang masih genap dibagi dua tim, mereka akan bermain dengan jumlah orang seadanya. Akan tetapi jika ganjil, mereka merekrut siapa saja yang mau dan dianggap bisa. Bahkan saking tidak ada anak lain, akhirnya Lily, adiknya perempuan yang masih belia, pun dilibatkan sebagai pemain pelengkap.

"Kalau mereka kurang orang, ya biasanya saya diajak main dan menjadi kipernya. Sampai suatu hari, nggak tahu gimana, kalau kita bilangnya dulu kan gak *corner kick*, [tapi] dua belas pas. Itu tendangan penalti keras kena muka saya. Abis itu saya gak pernah ikut lagi," kenang Lily Wahid.

Pada hari Minggu tim Gelatik Muda ini suka berkeliling mencari lawan tanding. Jika di jalan atau lapangan terdapat anak-anak lain bermain sepak bola, mereka mengajak anak-anak tersebut bertanding. ❖

Mengiringi **Aqiila**, cucu pertama menyanyi

Satu satu

Menyanyi dan Bergitar

SETELAH lulus dari SD Perwari, Gus Sholah melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri I, di Cikini, Jakarta Pusat. SMP Negeri I kenal sebagai sekolah paling elit masa itu. Sedangkan Aisyah masuk di SMP Negeri 5, Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat. Masing-masing sudah memiliki teman barunya, bukan anak Matraman lagi. Teman-teman baru Gus Sholah adalah kebanyakan anak-anak Menteng, anak para pejabat atau anak orang kaya. Saudara-saudaranya menilai bahwa Gus Sholah pun sudah terpengaruh sebagai anak elit. Pakaiannya selalu rapi dan apik. Gus Sholah dan Gus Umar pun sudah tidak bermain-main seperti saat SD dulu lagi. Mereka berdua mulai jarang bertemu, kecuali di rumah. Dan di rumah, kegiatan mereka hanya belajar, mengaji, dan mendengarkan radio.

Suatu ketika, tiba-tiba Gus Sholah pulang membawa sebuah tropi atau piala kecil dengan rasa bangga. Dia menunjukkan kepada saudara-saudaranya bahwa dirinya telah memenangkan lomba menyanyi di sekolah. Menyambut kemenangan itu, saudara-saudaranya turut bangga dan gembira. Mereka menilai Gus Sholah sebagai anak yang hebat dan memiliki suara yang bagus, karena sebenarnya semua juga menyukai musik dan lagu-lagu atau nyanyian, namun tidak ada yang mengembangkan seperti Gus Sholah. Karena itulah, prestasi menyanyi Gus Sholah mendapat sambutan gembira dari kakak-adiknya.

Selain memiliki hobi baru menyanyi, Gus Sholah juga menemukan hobi baru pelengkapnya, yaitu bermain gitar. Pergaulan dengan teman-teman barunya di SMP membuatnya gandrung memetik gitar sambil melantunkan lagu-lagu favoritnya masa itu. Sebenarnya, Nyai

Sholihah kurang berkenan anaknya bermain musik. Namun beliau memberikan kebebasan kepada putra-putrinya. Dan sebenarnya, putra-putri beliau hampir semua menyukai musik, walaupun tidak seserius Gus Sholah dalam mengembangkan minatnya di bidang musik ini.

"Sebenarnya kita sekeluarga itu seneng musik, cuman pada akhirnya yang belajar gitar, sampai nyanyi beneran, cuma dia aja," ungkap Lily.

Saat SMA, Gus Sholah menyukai berbagai lagu, baik Indonesia maupun Barat. Lagu-lagu Indonesia yang disukai adalah lagu-lagu dari Koes Ploes. Lagu-lagu Barat favoritnya masa itu antara lain dari The Everly Brothers, Brothers Four, Greenfields, The Green Leaves of Summer, Elvis Prisley, Harry Belafonte, Jailhouse Rock, dan lain-lain.

Kalau Gus Sholah sudah memetik gitarnya, kadang saudara-saudaranya juga ikut menimbrung. Mereka menyanyi bersama. Namun tentu saja, mereka tidak menyanyikan di hadapan ibunya atau ketika ada kakeknya, KH. Bisri Syansuri. Mereka menilai Mbah Bisri sangat keras anti terhadap musik dan menganggap beliau mengharamkan musik. Karena itu, Lily pun mengunci pianonya ketika beliau sedang tinggal di rumah mereka.

Suatu ketika, TVRI sedang menyiarkan pemilihan bintang radio, dan Mbah Bisri duduk di depan televisi. Setelah menonton beberapa lama, tiba-tiba Mbah Bisri berkomentar, "*Iku kok lagune ket mang podo ae* (Itu kok lagunya sejak tadi sama saja)."

"*Enggeh Mbah niku pilihan, niku wonten lagune wajib, wonten lagune* pilihan (Iya, mbah. Itu pilihan. Itu ada lagu wajib, ada juga lagu pilihan)," jelas Lily.

"*Oh ngono*," Mbah Bisri memahami.

Lily pun terkejut dan baru menyadari, ternyata selama ini Mbah Bisri juga mengamati musik. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa selama ini mereka salah menilai kakeknya yang dianggap sangat

anti terhadap musik. “Baru tahu kita kalau Mbah Bisri mengamati musik juga, yang berarti juga senang musik. Kirain kan... wah *gua* rugi dah,” ungkap Lily.

Kesukaan putra-putri KH. Wahid pada musik, bukan hanya sekadar mendengar dari radio, tetapi juga membeli kasetnya. Mereka juga sering menonton film yang dibintangi oleh para pemusik favoritnya, seperti ketika Elvis Presley main di layar lebar. Bahkan, Gus Sholah dan Gus Umar saling memberikan hadiah ulang tahun berupa kaset-kaset lagu kesukaan mereka. ❖

Keluarga

KH. Wahid Hasyim

Tradisi Keluarga Wahid

SALAHUDDIN dan saudara-saudaranya tumbuh dan berkembang dalam tradisi keluarga santri Jawa ala keluarga KH. Wahid Hasyim. Keluarga KH. Wahid Hasyim adalah keluarga besar pesantren yang bertemu dengan peradaban modern masa itu, yang memiliki kekhasan tersendiri. Pondok Pesantren Tebuireng dan Denanyar, tempat masa-masa awal tumbuh-kembang Gus Sholah, adalah tempat bertemunya berbagai kebudayaan Jawa dan lainnya. Para santri yang tinggal dan belajar di kedua pondok pesantren ini datang dari berbagai wilayah Jawa, Madura, bahkan dari Jawa Barat (Sunda) dan pulau-pulau lainnya (Melayu). Hal ini membuatnya terbiasa melihat pemandangan dan pergaulan orang-orang yang beragam. Tiap hari dia menyaksikan kesibukan para santri, baik di Pondok Pesantren Tebuireng maupun Denanyar, belajar mengaji dan membaca kitab kuning. Di sisi lain, KH. Wahid Hasyim telah bersentuhan dengan peradaban modern pada masa itu. Beliau fasih berbahasa Belanda, bergaul dengan orang-orang terpelajar dari Eropa, dan berpakaian modern, memakai jas ala Eropa.

Pergaulan keluarga besar Pondok Pesantren Tebuireng sejak masa kolonial Belanda memang sudah sangat luas. Sebagai ulama besar yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, Kiai Wahid memiliki pergaulan yang luas dengan berbagai kalangan, status maupun kelas, mulai dari para petani hingga pejabat pemerintah. Tak jarang para pemimpin agama dan pergerakan juga datang ke Tebuireng. Bahkan di Pesantren Tebuireng juga memiliki dokter keluarga yang berasal dari Jerman.

Pendidikan sehari-hari dalam keluarga tentu tak luput dari perhatian pasangan KH. Wahid dan Nyai Sholihah ini. Salahuddin dan saudara-saudaranya mendapatkan pendidikan pertama terkait budi pekerti dan agama dari kedua orang tuanya. diajar mengaji oleh orang tuanya sendiri. Meski demikian, KH. Wahid memasukkan putra-putrinya ke sekolah rakyat (SR) yang berada di sekitar Tebuireng. Mungkin beliau berharap putra-putrinya kelak dapat mengikuti perkembangan zaman yang tampaknya sangat dipengaruhi oleh literasi latin yang melimpah. Sebagaimana Nyai Sholihah yang juga diajarkan membaca dan menulis aksara latin oleh KH. Wahid saat awal-awal pernikahannya.

Suatu ketika, KH. Wahid pernah berbincang dengan Nyai Sholihah terkait masa depan anak-anaknya, khususnya yang laki-laki. Sebagai seorang ayah, KH. Wahid tentu berharap ada putranya ada yang bisa mengikuti jejaknya. Namun, beliau tidak berharap semua putranya menjadi kiai.

"*Anakku telu, lanang, yo aku pengen ono sing genteni aku dadi kiai, tapi tak pikir gak usah kabeh dadi kiai, sing penting manfaat gawe masyarakat, ya ngerti agomo, misale sing siji dadi insinyur, sing siji dadi dokter* (Anak saya tiga laki-laki. Saya ingin ada di antara mereka yang menggantikan saya jadi kiai, tetapi saya pikir tidak usah semua jadi kiai, yang penting bisa bermanfaat bagi masyarakat, tapi mengerti agama. Seperti, satu jadi insinyur, satu lagi jadi dokter)," ungkap KH. Wahid kepada Nyai Sholihah ditirukan dr. Umar. Saat itu, Hasyim Wahid belum lahir. Ungkapan ini kelak terwujud, Abdurrahman menjadi kiai, Salahuddin menjadi insinyur, dan Umar menjadi dokter.

Kemampuan membaca al-Qur'an secara baik dan benar menjadi pelajaran mutlak dalam keluarga pasangan KH. Wahid dan Nyai Sholihah ini. Salahuddin dan saudara-saudaranya diajar langsung oleh kedua orang tuanya, khususnya Nyai Sholihah sendiri. Pagi-

pagi sebelum sekolah mereka mesti membaca (*tadarus*) al-Qur'an, disimak ibundanya yang memegang kemoceng atau sisir tulang. Jika terdengar bacaan salah, kemoceng atau sisir tulang itu seperti otomatis bergerak memberi tanda bahwa bacaan yang didengarnya salah. Bahkan jika kesalahan bacaan itu fatal atau berulang-ulang benda itu bisa memukul tangan mereka. Ketepatan pengucapan huruf dan bunyinya, panjang dan pendeknya bunyi huruf serta berhenti dan mulainya lafazh ayat atau membaca al-Qur'an secara bertajwid tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Setiap saat KH. Bisri Syansuri berkunjung ke Matraman, Sholah dan saudara-saudaranya juga mesti ber-*talaqqi* atau mengaji di hadapan kakeknya itu. Pukul 6.00 pagi, satu per satu membaca al-Qur'an sambil disimaknya. Mbah Bisri, demikian mereka menyebutnya, memiliki pendengaran yang tajam atas bunyi-bunyi bacaan yang mereka ucapkan. "Jadi kalau kita itu bilang "*waladhdhollin*", koq tidak pas "*dhod*"-nya, kita bisa nggak berangkat-berangkat sekolah," kenang Lily. Hal ini kadang membuat mereka kesal, bukan saja karena selalu disalahkan, tetapi mereka juga terburu-buru hendak berangkat sekolah pukul 7.00. Namun Mbah Bisri tidak peduli. Beliau tetap menginginkan cucu-cucunya mampu membaca ayat-ayat al-Qur'an secara benar dan tepat di hadapannya.

Meski Salahuddin dan saudara-saudaranya sekolah di sekolah umum, bukan sekolah agama, seperti madrasah atau pesantren, bukan berarti mereka tidak tahu ajaran pokok agama Islam, seperti akidah, fiqh, dan akhlak. Bagaimana pun kedua orangtuanya adalah guru di pesantren. Pemahaman terhadap pelajaran agama Islam dasar bagi putra-putrinya menjadi perhatian serius KH. Wahid, hingga dipanggilnya guru privat alumni Tebuireng untuk mengajarkan ilmu agama secara khusus.

Tradisi membaca buku dalam keluarga Wahid telah menjadi pemandangan sehari-hari. Seluruh anggota keluarga tidak ada yang

tidak gemar membaca, terutama Gus Dur. Saudara tertua mereka ini diakui saudara-saudaranya sangat senang membaca melebihi yang lainnya. Mereka dibebaskan memilih topik dan jenis bacaan yang masing-masing minati, buku, majalah, koran, maupun komik. ❖

Jawa Ngoko sebagai Bahasa Sehari-Hari

SEHARI-hari Gus Sholah dan saudara-saudaranya menggunakan bahasa Jawa 'ngoko', termasuk kepada kedua orangtuanya. Secara umum, bahasa Jawa memiliki tiga tingkatan, Bahasa Jawa Krama Inggil, Krama Madya, dan 'ngoko'. Krama Inggil biasa dipergunakan oleh masyarakat Jawa yang berada di lingkungan dengan status sosial tinggi, seperti di lingkungan kerajaan, sehingga jumlah penggunanya tidak banyak. Pengguna Krama Madya lebih banyak daripada Krama Inggil. Krama Madya banyak dipergunakan di lingkungan kelas dan status sosial menengah, orang-orang biasa atau orang yang lebih muda kepada yang lebih tua atau yang lebih dihormati. Orang-orang Jawa menyebut dua tingkatan pertama secara umum dengan istilah boso. Sedangkan bahasa 'ngoko' adalah bahasa yang paling banyak dipergunakan masyarakat Jawa pada umumnya, baik kepada sesama maupun orang yang kelas atau statusnya lebih tinggi. Bahasa Jawa 'ngoko' adalah bahasa sehari-hari masyarakat Jawa pada umumnya.

Bahasa Jawa 'ngoko' yang dipergunakan di lingkungan keluarga Gus Sholah adalah bahasa Jawa 'ngoko' dengan dialek Jawa Timur "Arek". Bahasa Jawa adalah nama bahasa yang dipergunakan seluruh orang etnis Jawa. Namun bahasa Jawa sendiri memiliki keragaman dialek sesuai dengan kawasan kebudayaan masing-masing. Di Jawa Timur sendiri setidaknya memiliki empat kawasan kebudayaan, yaitu Matramanan, Arek, Madura, dan Pandalungan. Masyarakat Jombang merupakan kelompok kebudayaan Arek dengan dialek

bahasa yang khas. Kelompok budaya Jawa Timur Arek memiliki ciri khas yang terbuka dan beradaptasi tinggi. Begitu juga karakter bahasanya. Arek-Arek Jawa Timur adalah kelompok yang hampir tidak mengenal tingkatan bahasa (*boso*), apalagi Krama Inggil. Paling banter mereka menggunakan Krama Madya untuk orang-orang yang sangat dihormatinya atau menghormati orang yang baru dikenal, itu pun masih bercampuran dengan bahasa 'ngoko'. Dalam lingkungan kebudayaan inilah Gus Sholah dan keluarganya hidup dan bergaul. Bahasa sehari-hari yang dipergunakan juga bahasa Jawa Timur 'ngoko' berdialek Arek.

Suatu ketika, KH. Bisri Syansuri, ayahanda Nyai Sholihah, menegur para cucunya agar menggunakan bahasa Krama ketika berbicara kepada Ibunya sebagai bentuk penghormatan. KH. Bisri Syansuri memang kelahiran Tayu, Jawa Tengah, yang cukup terbiasa menggunakan bahasa Krama ketika berbicara dengan orang tua. Karena itu, beliau heran saat para cucunya berbicara secara 'ngoko' kepada Ibunya. Meski demikian, Nyai Sholihah tidak terlalu mempersoalkan.

"*Aku ndelok koen iku gak ono sing boso nang ibumu* (Saya melihat kamu tidak ada yang berbicara Krama kepada Ibumu,"tegur KH. Bisri Syansuri suatu ketika. "*Gak oleh iku* (tidak boleh itu)," sambungnya.

Gus Sholah dan saudara-saudaranya merasa kebingungan mendapat teguran semacam itu. Selama ini, Ibunya tidak pernah menegur soal bahasa ini. Akhirnya, mereka mengadukan teguran tersebut kepada Ibunya.

"*Yo, ancene mestine yo ngono. Lah terus karepmu iku piye?* (Ya memang mestinya seperti itu. Lah, terus mau kalian bagaimana?)" tanggap Nyai Sholihah.

"*Gak iso Bu, kayakne kok dadi adoh ngono,* (Tidak bisa, Bu. Kayaknya koq jadi jauh begitu)," jawab putra-putrinya.

"*Yo, sing enak gawe koen kabeh lah, weslah. Ajarane yo ngono, tapi aku nganggep koen iku tetep hormat nang aku. Wes cukup iku. Nek iso boso sih luweh apik, tapi nek gak iso yo gak popo,* (Ya sudah, terserah kalian enaknya bagaimana. Aturannya memang begitu, tetapi saya menganggap kalian tetap menghormati saya. Sudah cukup itu. Kalau bisa berbahasa Krama sih lebih baik, tetapi kalau tidak bisa yang tidak masalah)," pungkas Nyai Sholihah.

Kebiasaan Gus Sholah menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa utama sehari-hari di rumah, walaupun sudah tinggal di Jakarta sampai akhir hayatnya. Pada masa-masa awal sekolah di Jakarta, bahasa yang dipergunakan Gus Sholah kadang masih tercampur-campur, antara Indonesia dan Jawa. Dia bahkan pernah bercerita di depan kelas dengan bahasa campuran yang membuat bingung guru dan teman-temannya. "Kemarin terjadi kebakaran. Tiyang-tiyang pada berlarian," ungkapnya. Sontak guru dan teman-teman bingung. Mereka membayangkan "*tiyang*" adalah "tiang". Bagaimana mungkin tiang bisa berlarian. Rupanya, dua kata tersebut adalah jenis kata homofon, yang mempunyai kesamaan pelafalan, tetapi berbeda ejaan dan makna. "*Tiyang*" dalam bahasa Jawa berarti "orang", sedangkan "tiang" adalah bahasa Indonesia yang berarti "tonggak panjang untuk menyokong atau menyangga sesuatu, yang bisa terbuat dari kayu, batu, atau lainnya".

Sebagai orang yang tinggal dan tumbuh berkembang di bumi Betawi, putra-putri KH. Wahid juga tidak bisa menolak pengaruh bahasa Betawi dalam bahasa sehari-hari mereka. Percakapan sehari-hari di antara putra-putri KH. Wahid atau dengan orang lain sering menggunakan istilah "*lu-gua*". Meski demikian, mereka juga memiliki ungkapan tersendiri ketika berkomunikasi dengan masing-masing saudaranya.

Dokter Umar Wahid, misalnya, jika berduaan dengan Gus Sholah ia biasa menyapa dengan '*lu-gua*'. Lain lagi jika dengan Gus

Dur. Umar Wahid memanggilnya dengan sapaan '*ente*'. Gus Dur ke Umar Wahid juga memakai sapaan '*ente*'. Belakangan dr. Umar Wahid mengubah sapaan ke Gus Sholah dengan panggilan '*ente*'.

"Ini untuk menunjukkan penghormatan saya kepada beliau sebagai Kiai. Saya sudah mulai menggeser panggilan saya menjadi '*ente*', Gus Sholah juga begitu. Tadinya sih '*lu-gua*' saja," ujar dr. Umar.

Kalau ke Bu Aisyah, Gus Sholah dan dr. Umar semula memanggil dengan 'Mbak', dan ke Gus Dur semula memanggil 'Mas', kemudian berubah menjadi '*ente*'. Ke Bu Aisyah yang awalnya memanggil 'Mbak' juga diganti menjadi '*ente*'. Sementara itu Gus Dur memanggil Umar dengan panggilan 'Ram' dan ke Gus Sholah dengan 'Los'. ❖

Makan Bersama sebagai Forum Belajar

MAKANAN sehari-hari yang tersaji di meja makan keluarga KH. Wahid Hasyim adalah masakan khas Jombang Jawa Timur. Meski telah lama hijrah ke Jakarta, masakan yang mereka konsumsi sehari-hari hampir tidak berbeda dengan masakan dari kampung halamannya. Bibi yang nderek di keluarga Wahid senantiasa menjaga selera kuliner Jombang. Kothokan tempe, adalah salah satu menu andalan keluarga KH. Wahid. Kothok tempe memiliki aroma khas, percampuran antara aneka bumbu, rempah, santan, tempe, dan *iwak pe* (ikan pari) asapan. Bahkan ketika Gus Dur menjadi Presiden pun sempat mencuri-curi waktu untuk pulang ke Matraman, demi mengenang selera kuliner di rumahnya.

Kuliner di keluarga KH. Wahid bukan saja membentuk selera makan tersendiri bagi keluarga asli Jombang ini, tetapi juga menjaga kebersamaan mereka. Kebersamaan di meja makan bukan semata-mata karena kesamaan selera, tetapi juga karena di meja makan itu mereka bisa mengekspresikan perbedaan secara bebas. KH. Wahid dan Nyai Sholihah memberikan ruang seluas-luasnya kepada putra-putrinya di meja makan itu untuk mengemukakan perbedaan pendapat, namun tetap menjaga kebersamaan. Di luar meja makan, mereka tidak lagi menyoal perbedaan-perbedaan yang telah mereka tuntaskan.

Ketika berkumpul di meja makan, satu per satu menceritakan pengalaman masing-masing selama seharian. Di meja makan itu mereka bebas berbicara tentang apa saja. Tidak jarang satu

sama lain saling berdebat di meja itu. Tak jarang pula Nyai Sholihah menceritakan ulang kisah-kisah masing-masing, seperti menyegarkan ingatan kisah putra-putrinya. Dari sana mereka saling mengetahui dan memahami masing-masing, termasuk karakter dan corak pemikiran mereka. Salahuddin yang kalem cenderung dekat dan sepemikiran atau sealiran dengan Umar. Abdurahman yang serius cenderung dekat dan seide dengan Lily dan Hasyim dibanding dengan Salahuddin dan Umar. Sedangkan Aisyah dijadikan sebagai sosok ibu kedua mereka.

Setelah majelis meja makan itu bubar, bubar pula perdebatan yang pernah ada. Mereka sudah cukup mengetahui dan memahami langkah-langkah yang ditempuh masing-masing saudara-saudaranya di luar sana. Mereka juga tidak akan mengusik keputusan-keputusan yang mereka ambil masing-masing. Semua persoalan telah mereka tuntaskan di meja makan, dan di luar itu mereka adalah keluarga KH. Wahid Hasyim. ❖

Bagian Kedua: Membangun Rumah Tangga

Vespa Lambretta Bersejarah

"*Sopo kuwi sing karo Sholah boncengan*
(Siapa itu yang bersama Sholah, berboncengan)?"

MBAH Bisri Syansuri bertanya dengan nada tinggi. Nyai Sholihah yang ditanya ayahnya seperti itu menjawab dengan ketakutan, "*Kancane* (temannya)."

Tahun 1967 agaknya menjadi kenangan pahit Salahuddin Wahid, tetapi juga menjadi pembuka sejarah kehidupan rumah tangganya. Mbah Bisri Syansuri tengah duduk santai di beranda rumah Wahid Hasyim, di Taman Amir Hamzah, Matraman, Jakarta Pusat. Tiba-tiba…*treng-treng-treng*…*teng-teng-teng*… terdengar ada vespa masuk, dikendarai cucunya, Salahuddin Al-Ayyubi, memboncengkan seorang cewek.

Mengetahui ada sang kakek, Salahuddin panik. Jarak antara pintu pagar rumah dengan garasi di belakang lumayan jauh. Mau balik arah tidak mungkin lagi karena sudah terlanjur dipergoki Mbah Bisri. Satu-satunya pilihan, terpaksa ia terus memacu cepat-cepat vespanya, masuk ke dalam garasi, tanpa menoleh. Keringat dingin meleleh di tubuhnya. Dengan sorot mata tajam menyelidik, Mbah Bisri tampak menahan amarah, memergoki dengan mata kepala sendiri sang cucu memboncengkan seorang cewek. Itulah untuk

yang pertama kali Salahuddin mengendarai vespa milik Farida, memboncengkan pemiliknya, dan langsung "ketangkap basah" oleh sang kakek yang dikenal sangat keras.

Padahal hubungan Sholah dan cewek tadi sekadar teman biasa. Sesama aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).

Salahuddin sudah mencium gelagat tidak mengenakkan. Dia menyuruh perempuan itu untuk pulang sendirian. Karena takut dimarahi sang kakek ia terus naik ke lantai atas dan mengurung diri. Besoknya ia bergegas balik ke Bandung, menghindar dari interogasi sang kakek.

Giliran sang perempuan yang kebingungan. Disuruh pulang sendiri dan harus melewati Mbah Bisri yang masih duduk di teras rumah ia jadi grogi. Ia berpikir, baiknya turun dari vespa dan menemui orang sepuh itu, atau tidak. Otaknya berputar mencari solusi.

Tahu-tahu… *treng-treng-treng*… *teng-teng-teng*.. ia memilih jurus ngacir, memacu kencang kendaraannya keluar dari halaman rumah KH. Wahid Hasyim tanpa menoleh sedikit pun. Sama dengan Salahuddin sewaktu memasuki halaman rumah, keringat dingin juga membasahi tubuh cewek itu saat keluar dari rumah KH. Wahid Hasyim.

Besoknya, setelah kejadian itu, Mbah Bisri memanggil putrinya, Nyai Sholihah. Ia diinterogasi tentang perempuan yang kemarin diboncengkan Salahuddin Wahid.

Dengan nada tinggi Mbah Bisri yang memang dikenal sangat keras dalam urusan etika Islam itu berkata, "*Gak oleh iku, harom iku goncengan, dhuduk muhrim*. (Tidak boleh itu, haram itu berboncengan dengan yang bukan muhrim)."

Nyai Sholihah kena damprat. Sebagai ibu, Nyai Sholihah berusaha melindungi putranya, dan menjelaskan, "Itu kemarin kan urusan sekolah. Terus pulang bareng."

"*Pokoke urusan opo ae¸ iku lak harom. Wis rabekno ae*. (Pokoknya urusan apa saja, berboncengan dengan yang bukan muhrim, itu kan haram. Sudah kawinkan saja)," sergah Mbah Bisri. Kontan saja Nyai Sholihah kaget bukan main.

Farida, cewek yang diboncengkan Salahuddin Wahid tadi, ketika itu adalah mahasiswi FISIP jurusan Kriminologi Universitas Indonesia (UI). Ia aktif di PMII, selain aktif di Dewan Mahasiswa UI. Sedangkan Salahuddin Wahid waktu itu aktif di Dewan Mahasiswa ITB Bandung. Sebagai sesama aktivis kampus pada tahun 1964-1965-an itu keduanya sering bertemu di acara-acara kemahasiswaan. Farida mulai berteman dengan Salahuddin, tetapi ia tidak tahu bahwa Salahuddin itu putranya KH. Wahid Hasyim.

Jika ditilik jauh ke belakang, jodoh Salahuddin Wahid dengan Farida Saifuddin Zuhri itu secara tidak disadari sudah terkondisikan sejak Salahuddin masih balita dan Farida masih bayi. Yaitu tatkala KH. Wahid Hasyim sering melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk menjumpai tokoh dan aktivis NU.

Tahun 1945, ketika dalam perjalanan ke Jakarta, KH. Wahid Hasyim menyempatkan diri mampir ke Sokaraja, Banyumas. Dalam kesempatan itu untuk pertama kalinya KH. Wahid Hasyim berjumpa dengan KH. Saifuddin Zuhri. Saat berkenalan, KH. Wahid mengonfirmasi beberapa informasi yang telah didapatkan. "Saya mendapat informasi di Purbalingga, bahwa ente masih kemenakan dari KH. Sarwani, juga masih kemenakan dari KH. Baidlowi, bagaimana jelasnya hubungan itu?" tanya KH. Wahid Hasyim kepada KH. Saifuddin Zuhri.

Setelah mendengar penjelasan KH. Saifuddin Zuhri bahwa hubungan keluarga itu ditarik dari garis ibu, KH. Wahid Hasyim langsung terkesima, "*Masya Allah*, kita ini diam-diam masih kerabat, ya? *Alhamdulillah*!"

Farida, putri kedua dari 10 bersaudara pasangan KH. Saifuddin Zuhri dan Nyai Solichah, lahir tahun 1944. Sewaktu kanak-kanak Farida belajar di SRI NU (Sekolah Rakyat Islam NU) Semarang. Sewaktu masih kelas 2 Farida mulai mendengar dan sedikit paham nama KH. Wahid Hasyim dari cerita ayahandanya yang waktu itu menjadi anggota DPR. Sebagai anggota DPR yang berkantor di Jakarta, setiap hari Sabtu dan Minggu KH. Saifuddin Zuhri pulang ke Semarang.

Di SRI NU jam pelajaran dimulai pukul 10.00. Libur sekolah hari Jumat, dan Minggu sekolah masuk seperti biasa. Karena hari Minggu sekolah masuk, maka setiap hari Minggu KH. Saifuddin Zuhri bisa mengantarkan Farida ke sekolah. Suatu ketika ayahnya mengantarkan Farida ke sekolah pagi-pagi sekali, padahal sekolah baru masuk jam 10.00.

"Sekolah baru masuk jam 10. Kenapa masih pagi-pagi begini kita sudah berangkat Pak?" tanya Farida, setengah protes.

"Kita mampir ke hotel (*Dupaviliun*) dulu, ketemu temannya ayah," ujar KH. Saifuddin Zuhri menjawab pertanyaan Farida. Hotel ini kemudian berganti nama menjadi Hotel Dibyapuri yang berlokasi di Jalan Pemuda Semarang dan sangat terkenal pada tahun 1980-an.

Sambil menunggu ayahnya mengobrol dengan temannya di hotel, Farida main-main di sekitar hotel. Tiba-tiba teman ayahnya itu memanggil Farida, "Sini, sini, ini ada roti. Ayo dimakan." Terang saja Farida senang bukan main dikasih roti yang menjadi hidangan di hotel. Sewaktu pulang, roti yang masih tersisa itu dibawakan semua ke KH. Saifuddin Zuhri, sebagai bekal anaknya di sekolah.

Di tengah perjalanan menuju sekolah, Farida bertanya kepada sang ayah, kenapa rotinya dikasih semua ke dia. "Emang temen-nya Bapak gak makan roti?"

"Nggak, beliau itu puasa. Saben hari berpuasa. Itu namanya Kiai Wahid Hasyim." Ternyata itu yang namanya Kiai Wahid Hasyim, yang sering diceritakan ayahnya.

Peristiwa yang dialami ketika Farida baru kelas dua SRI NU itu kemudian bersambung ketika Farida memasuki jenjang kuliah di UI. Farida mulai kenal dengan Salahudin, sebagai mahasiswa ITB dan aktivis Dema ITB. Ia tidak tahu Salahuddin itu siapa dan anak siapa. Sejak menjadi aktivis mahasiswa, dan sering mondar-mandir Bandung-Jakarta, Salahuddin juga berteman akrab dengan Fahmi Dja'far Saifuddin Zuhri, yang tak lain kakak kandung pertama Farida. Salahuddin juga tidak tahu kalau Farida itu adik kandung Fahmi.

Nyai Solichah, istri KH. Saifuddin Zuhri, aktif sebagai pengurus Muslimat NU. Begitu pula dengan Nyai Sholihah Wahid Hasyim. Keduanya bersahabat akrab. Seringkali Farida dimintai tolong untuk mengantarkan sang ibu ke rumah di Taman Amir Hamzah yang tak lain kediaman Nyai Sholihah, ibunya Salahuddin.

Suatu ketika, usai pertemuan mahasiswa UI dan ITB di Jakarta, Farida pulang mengendarai vespa, dan melihat ada Salahuddin sedang menunggu bus. Motor vespa menjadi kendaraan sehari-hari Farida dari rumahnya di Kebayoran Baru, ke kampus UI di Salemba. Vespa merupakan kendaraan favoritnya waktu itu. Farida sering ke kampus berboncengan dengan Titi Kadarsih yang menjadi teman sebangku sejak SMP. Melihat Salahuddin menunggu bus seorang diri Farida tergerak hatinya untuk menawarkan tumpangan. Ia tahunya Salahuddin anak ITB di Bandung.

"Kamu pulangnya ke mana? Saya mau ke Kebayoran, kalo kelewatan bisa ikut saya, kita bareng, daripada menunggu bis." Akhirnya Salahuddin memboncengkan Farida ke arah rumahnya di Matraman.

Sesampai di rumahnya, Farida merasa heran, dan bertanya, "Ini koq kayak rumah temen ibu saya."

"Koq kamu tahu?" kata Salahuddin.

"Saya sering nganterin ibu saya ke sini," jawab Farida.

"Ke rumah siapa?"

"Rumah Ibu Wahid Hasyim."

"Lah Bu Wahid Hasyim itu ibuku *tauk*."

"Oh jadi kamu anaknya Kiai Wahid Hasyim?"

Itulah pertama kali Farida tahu bahwa Salahuddin yang sudah menjadi teman akrab itu adalah putra Kiai Wahid Hasyim.

Dasar jodoh, banyak kejadian yang sifatnya kebetulan yang menyertai kehidupan Salahuddin dan Farida ketika masih kuliah dan menjadi aktivis PMII.

Pada tahun 1967, NU mengadakan acara Harlah ke-40 NU secara besar-besaran di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebagai anaknya tokoh Muslimat NU, Farida aktif menjadi anggota grup drumband PMII. Ikut aktif di grup drumband ini Lily Wahid, adiknya Salahuddin. Karena postur tubuhnya yang tinggi dan ramping, Farida ditunjuk menjadi mayoret.

Suatu ketika, saat diadakan latihan intensif menghadapi event Harlah NU, pemain bass-nya tidak datang. Tentu saja anggota tim grup drumband ini kelabakan. Pemain bass cuma satu. Menghadapi kondisi ini tiba-tiba Lili Wahid berkata ke Farida, "Mbak, gua tadi diantar sama abang gua, abang gua kan pemain band. Dia bisa main bass."

"Oh ya udah, panggil dia ke sini." Datanglah dia.

"Kamu ini biasa main bass? Bisa nggak minta tolong sehari ini saja, kamu pegang bass ini, biar kita bisa latihan," tutur Farida. Kakak Lily itu mengiyakan permintaan Farida. Waktu itu Farida belum kenal baik dengan Salahuddin. ❖

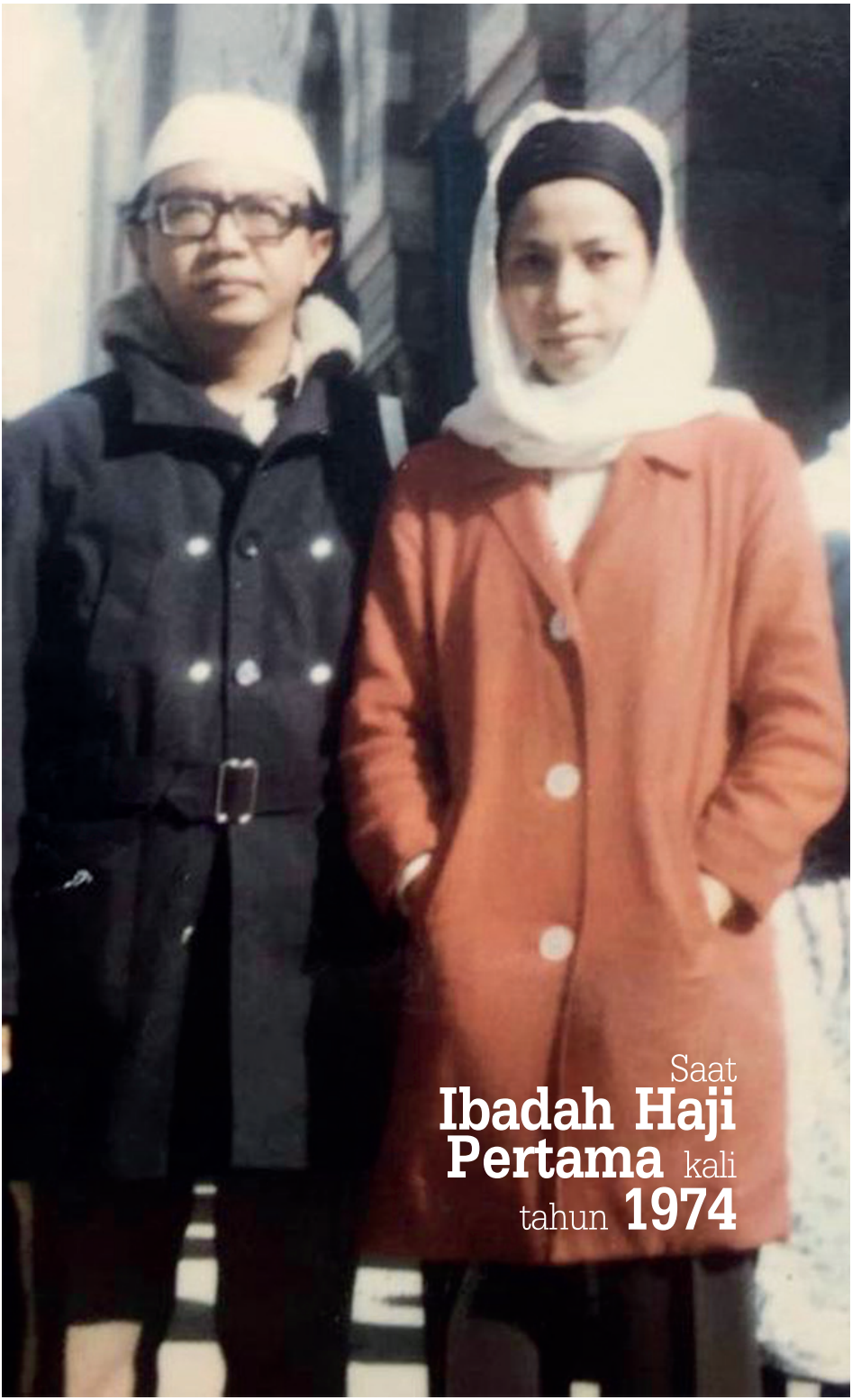

Saat
Ibadah Haji
Pertama kali
tahun **1974**

Akad Nikah

Dinikahkan karena Lebih Serius

SEJAK kejadian Salahuddin memboncengkan Farida dan dipergoki Mbah Bisri Syansuri, dia cukup shock. Bahkan Salahuddin agak jengkel bercampur marah ketika mendengar kabar bahwa ia akan segera dinikahkan dengan Farida, sesuai arahan kakeknya. Dia merasa belum waktunya menikah karena kuliahnya belum selesai.

Suatu saat ketika tiba musim liburan dan Salahuddin pulang ke Jakarta, ia dipanggil oleh KH. Saifuddin Zuhri. Usai menghadap ayah Farida, Salahuddin berkata kepada Farida, "Ayah kamu norak ya?"

"Kenapa emang?"

"Iya, kita baru kenal begini aja sudah ditanya, kamu serius nggak sama Ida?"

Mendengar itu Farida penasaran bagaimana Salahuddin menjawabnya. Farida tahu, betapa tidak mudahnya bagi Salahuddin memutuskan soal pernikahan. Farida menyadari, sebagai anak kedua dari 10 bersaudara, tentunya ia harus menjadi contoh bagi adik-adiknya. Fahmi, sang kakak, belum menikah. Ayahnya pasti memerlukan ketegasan dari lelaki yang mendekati anak gadisnya.

"Ya bagaimana lagi, aku bilang saja, iya," jawab Salahuddin. Mendengar penuturan dan jawaban teman lakinya seperti itu, hati Farida berbunga-bunga. Waktu itu benih cinta mulai bersemi di antara mereka berdua.

Selang setahun sesudah "ketangkap basah" berboncengan vespa dengan Farida, pada tanggal 8 Februari 1968, Salahuddin dinikahkan dengan Farida, tanpa didahului proses pacaran seperti lazimnya remaja zaman sekarang.

Hubungan antara keluarga KH. Wahid Hasyim dan KH. Saifuddin Zuhri ini memang unik dan spesial. Selain masih terjalin hubungan keluarga dari garis ibu, KH. Saifuddin Zuhri juga menjadi sekretaris KH. Wahid Hasyim semasa menjabat Menteri Agama. Sebelum menjadi besan, ketika meletus peristiwa Gestapu, dua keluarga ini dipersatukan oleh situasi genting yang mengancam keselamatan tokoh-tokoh NU, termasuk KH. Wahid Hasyim dan KH. Saifuddin Zuhri.

Dalam suasana yang genting dan tidak menentu usai terjadi peristiwa G30 S PKI, Nyai Sholihah Wahid Hasyim datang ke rumah KH. Saifuddin Zuhri membawa kabar kalau rumah ini mau digrebek. Ada informasi KH. Saifuddin Zuhri masuk dalam daftar tokoh yang mau dihabisi oleh PKI. Kediaman KH. Saifuddin Zuhri waktu itu dihuni 10 anak, yang sebagian masih kanak-kanak, tanpa ada orangtuanya. KH. Saifuddin Zuhri kebetulan sedang menjalani operasi di RS di Jepang, didampingi Ny. Solichah Saifuddin.

"Ayo anak-anak, semua ikut aku," kata Bu Wahid sembari membantu anak-anak memberesi pakaian. Anak-anak keluarga KH. Saifuddin Zuhri ini tidak mengerti ada apa dan mau dibawa ke mana.

Nyai Sholihah membawa ke 10 anak-anak itu ke Kebon Kacang, Jakarta Pusat, rumah keluarga Mahbub Djunaidi. Dipilihnya rumah Mahbub sebagai tempat pengungsian karena rumah keluarga Mahbub berjejer dalam satu lokasi. Selain pertimbangan itu, adik ipar Mahbub Djunaidi yang bernama Sawabi Ihsan, saat itu juga menjadi sekretaris pribadi Menteri Agama KH. Saifuddin Zuhri. Mungkin saja Nyai Sholihah berpikir, ke 10 anak-anak ini pasti akan diurus dengan baik oleh keluarga Mahbub Djunaidi, karena mereka itu adalah anak bosnya di Depertemen Agama.

Luar biasa watak dan jiwa sosial Nyai Sholihah Wahid Hasyim. Beliau ini memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap teman-temannya di Muslimat NU, dan terhadap anak-anak temannya.

Setiap hari Nyai Sholihah datang ke Kebon Kacang, membawakan makanan untuk ke-10 anak yang dititipkan. Kegiatan perkuliahan dan sekolah waktu itu terhenti total.

Perkuliahan di ITB waktu itu juga berhenti, dan Salahuddin untuk sementara waktu balik ke Jakarta. Sesekali Salahuddin mengantarkan ibunya membawakan makanan ke Kebon Kacang. Dalam kesempatan itulah Salahuddin banyak bertemu dengan Farida bersama 10 orang kakak dan adik-adiknya di tempat pengungsian. Di sini Farida mulai lebih mengenal Salahuddin sebagai putra Bu Nyai Wahid Hasyim.

Dalam tradisi keluarga NU, terutama di kalangan ulama dan tokoh-tokohnya, ihwal perjodohan putra-putri mereka lebih dominan ditentukan oleh orang tua. Meski sang anak sudah saling mengenal dekat dengan seseorang yang ditaksirnya, maka keputusan final umumnya tetap berada di tangan orang tua. Tidak heran jika banyak di antara ulama saling berbesanan. Sesama teman seperjuangan berusaha menjodohkan anak-anak mereka. Misalnya, KH. Wahid Hasyim berbesanan dengan KH. Saifuddin Zuhri. KH. Saifuddin Zuhri berbesanan dengan KH. A. Syaikhu. KH. Saifuddin Zuhri juga berbesanan dengan KH. Ilyas, dan banyak contoh yang lain.

Peristiwa pernikahan Salahuddin Wahid dengan Farida Saifuddin Zuhri agaknya bisa menjelaskan dominannya peran orang tua dalam perjodohan anak-anak mereka.

Sebelum disunting oleh Salahuddin, sebenarnya ada laki-laki lain asal Jawa Timur, yang telah meminangnya. Laki-laki tadi diantarkan orangtuanya, dan disertai rombongan kiai dari Jawa Timur, datang ke kediaman KH. Saifuddin Zuhri, melamar Farida.

KH. Saifuddin Zuhri menyambut pinangan itu dengan menyampaikan terima kasih atas silaturrahminya yang bermaksud untuk meminang Farida.

"Tapi saya saat ini tidak dalam posisi menerima dan tidak menolak. Kamu kenal nggak sama anak saya, Ida ini? Kenal deket nggak? Karena kalau orang mau berumah tangga kan harus mengerti semua. Sekarang begini saja, kamu kenal dulu sama anak saya. Kalau memang cocok, kamu datang lagi ke sini. Bilang sama saya."

Ternyata sampai waktu yang lama laki-laki tersebut tidak pernah datang lagi. Rupanya dia tidak berani.

Sebagai aktivis PMII (Farida masuk di jajaran pengurus PB PMII zaman dipimpin oleh M. Zamroni), banyak memiliki teman lelaki. Apalagi rumah KH. Wahid Hasyim di Matraman menjadi pusat nongkrongnya aktivis muda NU. Tapi dari sekian banyak aktivis muda NU, agaknya yang mendapat perhatian khusus adalah Salahuddin. Kedekatan Farida dengan Salahuddin juga diperlancar oleh hubungan kakaknya, Fahmi, dengan Salahuddin, yang sudah cukup lama berteman akrab.

Seringkali Salahuddin datang ke Jalan Darmawangsa Raya, Kebayoran Baru, rumah KH. Saifuddin Zuhri, dan membuat kagok tuan rumah. Ia datang mau ketemu Fahmi, atau adiknya.

Suatu ketika KH. Saifuddin Zuhri menyinggung soal perkawinan. "Saya lihat-lihat temen kamu kok banyak. Kayaknya Sholah itu naksir. Kalau yang lain kan nggak serius."

Mendengar ucapan tersebut Farida justru menyerahkan ke ayahnya untuk mengamati kira-kira lelaki mana yang serius. "Baru nanti saya yang menentukan."

Ternyata yang dipanggil dulu untuk ditanya perihal keseriusan itu adalah Salahuddin. Dan Sholah langsung menjawab kalau dia serius. Sebenarnya di luar wilayah pergaulan anak-anak, Nyai Wahid Hasyim dan KH, Saifuddin Zuhri sudah rasan-rasan untuk menjodohkan putra-putrinya. Apalagi setelah dipicu oleh marahnya KH. Bisri Syansuri yang memergoki Salahuddin berboncengan naik vespa dengan Farida.

Kepada beberapa aktivis PMII yang waktu itu menaksir Farida, M. Zamroni, Ketua Umum PB PMII waktu itu, meledek, "Oh kamu salah. Kalau di NU itu harus melakukan pendekatan sama bapaknya. Tidak cukup dengan mengenal anaknya. Kamu kalah sama Sholah."

Peristiwa Gestapu membuat perkuliahan Salahuddin dan Farida yang baru dinikahi berantakan. Sewaktu melangsungkan pernikakahan Farida memasuki semester tujuh, dan tinggal setahun lagi. Demikian halnya dengan Salahuddin.

"Ya sudahlah, mending *lu* aja yang selesai," ujar Farida mendorong suaminya untuk melanjutkan kuliah, tidak lama sesudah hidup berumah tangga.

Usai menikah Salahuddin tampak tidak berminat untuk melanjutkan kuliahnya yang tinggal setahun lagi. Sampai-sampai Bu Wahid Hasyim marah dan meminta anaknya untuk melanjutkan kuliahnya.

"Kalau sudah menikah saya ya harus bertanggung jawab kepada istri saya. Saya harus kerja, mencari nafkah untuk istri saya," ujarnya, menanggapi desakan istri dan ibunya agar ia melanjutkan kuliah.

Ketika situasi politik mulai agak stabil dan perkuliahan berjalan normal, Salahuddin tetap tidak berniat melanjutkan kuliah. Ia berargumentasi, "Buat apa sih selesai, yang penting kan saya bisa bekerja."

Farida menjawab, "Ya penting banget sih enggak, tapi lebih baik kalau elu punya ijazah. Lebih terhormat." ❖

Bersama
Keluarga Besar

Penderitaan Usai Berumah Tangga

TENTU pada akhirnya Gus Sholah berhasil merampungkan kuliahnya setelah sempat terputus beberapa tahun lamanya. Ia selesaikan kuliahnya sesudah ada *deadline* dari ITB dengan ancaman DO.

Usai menikah Salahuddin tinggal di rumah mertua, KH. Saifuddin Zuhri, di Jalan Darmawangsa Raya No. 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bisa dibayangkan betapa ramainya rumah KH. Saifuddin Zuhri yang tidak terlampau besar itu dihuni 10 anak ditambah satu menantu. Rumah tersebut memiliki empat kamar di bawah, dan empat kamar di lantai atas. Sebelum Farida menikah, kedelapan kamar itu sudah terisi oleh 10 orang kakak beradik Farida beserta kedua orangtuanya.

Farida menikah lebih awal, mendahului kakaknya, Fahmi D. Saifuddin. Demikian juga Salahuddin, ia nikah mendahului abangnya, Abdurrahman Wahid. Di rumah mertuanya ini lahir putra pertamanya yang diberi nama Irfan Asy'ari Sudirman, atau yang kemudian dikenal dengan panggilan Ipang Wahid. Selang setahun kemudian, lahir putra keduanya, Iqbal Humam Dorojatun, yang dipanggil Billy.

Kesibukan Salahuddin mulai terfokus kepada upaya membangun rumah tangga yang bahagia. Ia bertindak sebagai kepala keluarga dan harus menabung uang untuk membeli rumah sendiri, agar tak terus menumpang di rumah mertua, selain harus menyisihkan sebagian yang lain untuk pengeluaran bulanan.

Usai nikah Salahuddin untuk pertama kalinya mendapatkan proyek membangun gedung Jakarta Fair. Ini gedung dan fasilitas

Jakarta Fair yang pertama, yang dibangun di Jl. Cikini, berlokasi di komplek TIM (Taman Ismail Marzuki), sebelum dibangun gedung Jakarta Fair di dekat tugu Monas dan selanjutnya di Kemayoran. Proyek ini bagaikan kado baginya sebagai penganten baru.

Saat ia mengerjakan proyek Jakarta Fair itu Farida sedang mengandung bayi Irfan. Karena itu, sampai bayi Irfan berusia setahun Salahuddin relatif jarang bertemu anak pertamanya. Dia berangkat pagi-pagi sekali dari kantornya di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan ke lokasi proyeknya di Jakarta Pusat, dan malam hari baru pulang.

Setelah beberapa tahun tinggal di rumah mertua, Salahuddin pindah rumah. Tidak langsung ke rumah sendiri, melainkan menumpang di rumah ibunya, Bu Sholihah Wahid, di Taman Amir Hamzah, Matraman Jakarta Pusat.

Selang beberapa lama, pasangan Salahuddin-Farida yang sudah memiliki dua momongan itu mesti siap-siap mencari kontrakan rumah. Kamar yang sehari-hari dipakai oleh Salahuddin Wahid bersama keluarga kecilnya akan ditempati oleh kakaknya, Abdurrahman, yang segera pulang dari Mesir dan melangsungkan perkawinan dengan Sinta Nuriyah.

Di keluarga Wahid Hasyim Gus Dur agak terlambat menikah. Yang pertama dinikahkan adalah Aisyah, putra kedua, disusul Salahuddin.

Karena belum memiliki uang yang cukup, Salahuddin terpaksa mengontrak paviliun kecil di Jalan Panglima Polim, tidak jauh dari Blok A. Paviliun itu memiliki satu kamar ukuran kecil, ruang makan dan ruang kerja. Kontrakan sederhana ini diisi pasangan Salahuddin bersama dua anaknya yang masih kecil. Ruang makan yang ada dirombak menjadi kamar tidur untuk Ipang dan Billy, dengan dibuatkan tempat tidur bertingkat. Sementara untuk makan memanfaatkan ruang kerja. Sebagai arsitek Salahuddin memiliki

meja gambar, yang juga difungsikan sebagai meja makan dengan cara melipatnya.

"Jika Gus Sholah mau bekerja, meja tersebut dibuka lagi menjadi meja gambar seperti sediakala. Saking melaratnya waktu itu," kenang Bu Farida.

Terasa aneh, memang, pasangan muda yang keduanya sama-sama memiliki ayah yang pernah menjadi menteri agama itu hidup dalam kondisi ekonomi serba pas-pasan. Waktu Salahuddin melangsungkan pernikahan, sang mertua sudah tidak menjabat sebagai menteri agama. Bisa dibayangkan dengan mata batin kita, betapa bersahaja dan sederhananya kehidupan tokoh-tokoh NU yang menjadi pejabat negara pada waktu itu.

Sewaktu menjadi menteri agama KH. Saifuddin Zuhri mendapat bantuan dari Pemerintah sebuah rumah di Jalan Hang Tuah, Jakarta Selatan. Rumah yang berada di lokasi strategis itu belum pernah ditempati dan oleh KH. Saifuddin Zuhri dihibahkan ke Muslimat untuk dijadikan rumah bersalin Muslimat.

Waktu itu ada salah satu putranya yang mempertanyakan, kenapa dihibahkan untuk rumah bersalin. Padahal keluarga mereka butuh rumah mengingat rumah yang ada di Jalan Darmawangsa Raya itu telah penuh dihuni 10 orang anak.

Mendengar protes demikian KH. Saifuddin Zuhri dengan tenang menjawab, "Sudahlah, saya sama ibumu sudah sepakat. Takut nanti ada setan lewat terus nggak jadi. Nanti berubah pikiran. Ini kan untuk amal jariyah."

Farida sendiri, setelah memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah yang tinggal setahun karena keburu menikah, memilih untuk mengasuh sendiri dua anaknya yang masih kecil. Bukannya mereka tidak perlu asisten rumah tangga untuk membantu meringankan pekerjaan di rumah. "Kalau ada pembantu mau ditempatkan di

mana, *wong* rumah saja kecil hanya dengan satu kamar," kenang Nyai Farida.

Suatu saat Farida berkata ke suaminya, "*Elu* masih mau punya anak lagi nggak? Kalo masih pengen, saya nggak mau punya anak saat usia saya lebih dari 35 tahun."

Tidak berhenti di situ, Farida melanjutkan, "Kalo pengen punya anak lagi, kita harus sudah punya rumah. Saya nggak mau lagi tambah anak tapi rumahnya masih ngontrak, kecil gini."

Rupanya ini siasat Farida untuk memacu sang suami agar bisa mencari uang secukupnya untuk membeli rumah.

Mendengar ucapan istrinya yang bernada sindiran itu Salahuddin menyahutinya dengan kalem, "Ya, *insya Allah*, saya usahain."

Semangat Gus Sholah untuk mencari rejeki, menyejahterakan istri dan anaknya, kembali menyala-nyala. Dia pun tergerak untuk melanjutkan kuliahnya yang terbengkelai, agar "lebih terhormat" seperti ucapan istrinya.

Bekerja sambil menyelesaikan studinya dijalankan bersama-sama. Bekerja dan belajar. Ia mulai banyak mengerjakan proyek, dan merintis membuat perusahaan kontraktor. Ia menyewa kantor untuk kegiatan perusahaan yang ia pimpin.

Menyaksikan kegigihan menantunya mencari uang untuk membangun rumah, suatu saat KH. Saifuddin Zuhri menyerahkan sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan, untuk dibangun. Sebagai arsitek Salahuddin merancang dan mendesain sendiri rumah yang akan dibangun. Karena rumah untuk ditempati keluarganya, maka desain bangunan ia buat dengan sangat cermat dan detail.

Salahuddin bagaikan ingin menyahuti tantangan sang istri, yang pernah ia dengar dulu. "Kalau masih pengin punya anak lagi harus sudah punya rumah dulu." Pada saat membangun rumah, Farida hamil anak ketiganya. Dan masih tinggal di rumah kontrakan milik orang Betawi.

Berbarengan dengan pembangunan rumah di Kemang, Sholah mendapatkan proyek membangun 30 unit rumah. Lumayan, pikirnya, keununtungannya bisa buat tambahan membiayai rumah yang belum rampung. Untuk menangani proyek tersebut Sholah mengambil kredit di bank. Luar biasa sibuknya Sholah saat itu. Sembari mengelola proyek, ia juga harus mondar-mandir Jakarta-Bandung, untuk menyelesaikan tugas kuliahnya yang sempat terbengkelai beberapa tahun.

Dalam proses pembangunan rumah di Kemang, Salahuddin dan istrinya sempat kebingungan. Masa kontrak rumah habis dan tidak bisa diperpanjang lagi.

Melihat kebingungan itu Nyai Solichah, ibunya Farida, tidak tega dan meminta untuk tinggal bersama di Darmawangsa untuk sementara sambil menunggu rumah selesai. “Sudahlah enam bulan tunggus saja di Darmawangsa, di rumah ibu, kan kamu juga lagi hamil.”

Sembari menunggu finishing pembangunan rumah, Sholah dan istrinya sudah mulai mengemasi barang-barangnya. Dengan hati berbunga-bunga, mereka sudah tidak sabar untuk segera pindah rumah. Pindah ke rumah sendiri, mengakhiri perjalanan panjang sebagai “kontraktor”, dari kontrakan satu ke kontrakan lain.

Tidak berbilang tahun rumah idaman itu selesai dibagun. Berdiri anggun, artistik, di daerah yang asri, Kemang.

Ketika rumah sudah siap dihuni dan waktu pindah sudah ditentukan, datang musibah yang meluluhlantakkan perasaan suka cita memiliki rumah baru. Perusahaan yang dipimpin dan sedang menangani proyek pembangunan rumah itu bangkrut. Uang pinjaman dari bank dibawa lari oleh kontraktor.

Karena kesibukan kuliah dan penyelesaian pembangunan rumah di Kemang Salahuddin tidak bisa mengawasi proyek pembangunan

30 unit rumah secara ketat. Akibatnya ia kebobolan. Ia harus mencari uang pengganti untuk menyelesaikan proyeknya.

Untuk menutupi kerugian, rumah baru yang siap dihuni itu terpaksa dijual. Tidak cukup rumah, mobil Torano warna orange yang baru dibeli juga harus dilego. Salahuddin dan Farida benar-benar tak berdaya. Bisa dibayangkan betapa terpukulnya mereka. Sudah lama mengidamkan punya rumah sendiri, setelah hidup berpindah-pindah rumah kontrakan, rumah yang baru dibangun dengan susah payah itu harus berpindah tangan.

Menurut penuturan Bu Farida, pada waktu itu Gus Sholah sudah kayak orang mau gila. Tidak mau keluar dari kamar, karena shock. Beban perasan demikian berat karena ia memiliki dua anak kecil dan istrinya sedang mengandung. Tidak tahu harus tinggal di mana, selain kembali menumpang di rumah orangtuanya.

Untuk kembali bangkit, Salahuddin harus memulai dari nol lagi. Ibarat roda berputar, Salahuddin berada di posisi lingkaran bawah roda, dan untuk berputar naik, perlu banyak energi. Juga dorongan.

Pada waktu mereka mengantarkan seorang perempuan dokter untuk melihat-lihat rumahnya, calon pembeli itu memuji dan merasa surprise dengan disain rumah. "Jeng, enak sekali rumahnya." Mendengar pujian itu Farida membatin, "Ya enak wong kita mendesain sendiri." Sampai laci meja diukur secara cermat sesuai dengan bentuk dan ukuran gelas yang dimiliki. Demikian juga kamar tidur dan kamar mandi untuk anak-anak. Dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan dunia anak-anak.

Sepulang dari notaris untuk menandatangani dokumen jual-beli rumah, Farida dan Salahuddin tidak kuasa menahan air mata. Mereka berdua menangis di dalam mobil. Untuk sekejap mereka terdiam, merenungi apa yang terjadi.

Menyaksikan anak dan menantunya mendapat musibah, KH. Saifuddin Zuhri menenangkan, "Sudahlah, yang sabar. Ini namanya

ujian. Untuk sementara waktu tinggal bersama dulu, dan kamu melahirkan di sini saja." Disini lahir putra ketiga, Arina Saraswati (Acha), tanggal 20 September 1977.

Rupanya Allah mendengar jeritan batin yang menyayat dari pasangan Salahuddin dan Farida. Tangan tuhan menjelma melalui sosok Umar, adik Salahuddin. Dokter Umar yang pada waktu itu bertugas di RS Pasar Rebo Jakarta Timur ditugaskan ke Bangka, ke RS di PN Timah.

"Los, tempatin aja rumah *gua*," ujar Umar kepada abangnya. Sehari-hari Umar memanggil Sholah dengan panggilan "Los", bahasa walikan dari "Sol", khas malangan.

Bagaikan mendapat durian runtuh dari langit, kontan saja tawaran adiknya itu diiyakan Salahuddin. Ketika ditugaskan ke Bangka, Umar meninggalkan rumah di Kompleks Billy Moon, Kalimalang Jakarta Timur yang belum rampung. Belum ada ubin, plafon, dan daun pintu. Akses jalan menuju rumah Umar juga belum tersedia. Tidak ada pilihan lain, menempati rumah adiknya, walau bangunannya belum selesai, merupakan solusi terbaik bagi orang yang tengah jatuh tersungkur.

Di Billy Moon ini secara perlahan Salahuddin memulai lagi usahanya, dari awal, dengan sisa sumberdaya yang masih ada. Untuk membantu meringankan beban suami, Farida yang sejak remaja punya keterampilan menjahit ini menyambi dagang pakaian. Ia membeli pakaian langsung dari konveksi besar untuk mendapat harga yang miring, kemudian dijual kepada ibu-ibu yang ada di Kompleks Billy Moon dan perumahan sekitarnya. Usaha sampingan ini lumayan berhasil.

Suatu ketika Farida mendapat telepon dari salah seorang pelanggan yang menanyakan apakah Farida punya stock pakaian yang modelnya seperti disampaikan oleh yang bersangkutan. Karena

tidak punya persediaan pakaian seperti yang dimaksud, Farida menjawab apa adanya, "Tidak ada, Jeng."

Mendengar jawaban seperti itu, Sholah menegur sang istri. "Lain kali kalau ada permintaan model dan jenis pakaian yang diinginkan pelanggan, bilang saja siap, meski barangnya belum ada," ujar Salahuddin.

Salahuddin meminta istrinya untuk bersikap seperti itu maksudnya bukan ia mengajari istrinya untuk berbohong kepada orang lain. Bukan demikian. Pesan moral yang ingin ditanamkan oleh Sholah kepada istrinya, adalah jangan sekali-kali dalam berdagang kita menyia-siakan peluang.

Pelajaran penting tentang pentingnya memanfaatkan peluang hari itu didapatkan Farida dari suaminya.

Di kediamannya, di komplek Pesantren Tebuireng Jombang, Nyai Farida sore itu bercerita kepada tim penulis buku. Jika dihitung-hitung sejak Gus Sholah berumah tangga dengannya, telah 12 kali pindah-pindah rumah.

"Dan yang ke tiga belas, beliau pindah ke rumah yang di sana itu. Rumah yang dihuni untuk selamanya," tutur Bu Farida, sambal menunjuk ke pekuburan keluarga Mbah Hasyim Asy'ari, tempat Gus Sholah dimakamkan. ❖

Musik, Wanadri dan Gaple

Love me tender
Love me sweet
Never let me go
You have made my life complete
And I love you so

MENJELANG penghujung tahun 1956, salah seorang musisi terpopuler abad 20, Elvis Presley, membuat debutnya sebagai aktor dalam film Love Me Tender. Pada awalnya, film tersebut berjudul The Reno Brothers. Namun sejak single Love Me Tender yang dibawakan Elvis meledak di pasaran, judul film tadi kemudian sengaja dicocokkan, apalagi kalau bukan karena pertimbangan komersial. Film pertama Elvis boleh jadi tidak terlalu istimewa, tidak seapik lagunya. Namun bagi penggemar Elvis itu sudah cukup memuaskan dahaga mereka, melihat sang idola dengan kemeja kerah terbuka, rambut tebal ke depan dan sedikit helainya yang terurai, sambil beberapa kali menyanyi, menggenjreng gitar, dan menari dengan gerakan persendian lututnya yang merapat dan melebar.

Pesona Elvis termasuk juga menjamah sudut-sudut kota Jakarta, menarik hati pemuda-pemudinya yang sedang butuh hiburan dan pelepas jenuh. Pada tahun-tahun itu, Gus Sholah masih remaja. Ia dan adiknya, Umar, yang sama-sama bersekolah di SMA Negeri 1 Jakarta (Budi Utomo) sering menghabiskan waktu bermain bersama. Jika sewaktu SD mereka berdua sibuk mengejar layangan yang putus, atau berkeliling mengajak tanding bola anak-anak sekitar kampung, maka di sekolah menengah mereka sedang menggandrungi Elvis

yang sama. Tiap ada penayangan film Elvis Presley di Ibu Kota, bisa dipastikan dua bersaudara ini tak luput menontonnya, entah itu di Bioskop Megaria (sekarang Bioskop Metropole), Bioskop Menteng, atau di Garden Hall, mereka betah berpanjang-panjang mengantri dengan segenap penggemar Elvis yang lain.

Masa-masa itu mungkin telah berlalu, Elvis sudah pergi dan jasadnya digenggam bumi, sementara penggemarnya yang masih hidup sudah menjadi orang-orang tua yang gemar menggerutu, atau sekadar menunggu gilirannya pergi. Namun lagu, seperti juga warisan yang disampaikan turun-menurun, hal-hal seperti itu tak dibawa mati. Lirik dan nada yang tercipta akan mengalir melalui puluhan tahun hingga berabad-abad lamanya. Love Me Tender sepertinya menjadi satu dari sekian lagu yang terus dikenang Gus Sholah sepanjang hayatnya.

Dan kita cukup beruntung bisa menyaksikan lelaki yang kalem itu memainkan ulang tembang Love Me Tender dengan wibawanya yang tersisa. Sebuah video amatir berdurasi dua setengah menit menyebar di internet, menampilkan sosok Gus Sholah di umur senjanya memetik gitar klasik dari chord D, sambil mendendangkan syahdu lirik Love Me Tender yang sudah ia hafal sejak puluhan tahun lalu. Berbaju putih lengan panjang, peci hitam yang menyembunyikan setengah rambut putihnya, dan sarung bermotif kotak, Gus Sholah seperti sedang melakukan konser tunggal tanpa interupsi.

Salahuddin menyukai lagu-lagu romantis. “Tapi dia bukan orang yang romantis,” ujar Bu Ida, sang istri, saat ditemui di kediamannya di Tebuireng, sambil matanya menerawang, seperti mencoba menggapai kenangan-kenangan yang mereka lewati berdua. “Tapi dia sering main gitar, karena hobi ya. Dan suaranya enak hampir seperti Sam Saimun.” Memang tak berlebihan juga jika tarikan suara Gus Sholah dibandingkan dengan pelantun tembang Di Wajahmu Kulihat Bulan itu, vokalnya lembut dan berat. Dan perihal

video yang sudah ramai beredar, sang istrilah yang rupanya diam-diam merekam dengan kamera gawainya. Mungkin saja diam-diam Gus Sholah ingin menyampaikan perasaannya kepada sang istri lewat lagu, atau mungkin saja benar kata Bu Ida, ia hanya sedang menyalurkan hobinya sejak remaja, dan sejenak rehat dari kesibukan yang menggerus waktunya.

Menurut penuturan adik-adiknya, Gus Sholah sudah menekuni musik sejak sekolah menengah pertama. Suatu hari ia dengan bangga memboyong pulang piala kecil di tangannya, hasil dari lomba menyanyi di sekolahnya, SMP Negeri 1 Jakarta. Semenjak itu keluarga Wahid menyadari ada seseorang bersuara merdu di rumah mereka. Kegemarannya bermusik ini kemudian ia lanjutkan dengan belajar bermain gitar ke teman-temannya. Beruntung Nyai Sholihah sebagai ibu membebaskan putra-putrinya untuk berekspresi sebagaimana mereka mau, selama tidak melewati batas-batas yang prinsipil. Malahan sebagai seorang yang berlatar belakang keluarga Islam tradisional, Nyai Sholihah memiliki pemikiran modern dan terbuka. Wajar jika tidak semua anak-anaknya dikirim untuk belajar di pesantren, hanya Gus Dur saja yang sejak lulus sekolah dasar langsung dititipkan di rumah seorang pimpinan Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta, dan setelahnya nyantren di berbagai tempat. Sementara Gus Sholah sendiri terus tinggal di Matraman, sampai waktunya ia kuliah arsitektur di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1962.

Semasa SMA di Budi Utomo, Gus Sholah sering memainkan lagu-lagu Elvis Presley, selain Love Me Tender yang bernada sendu itu, juga Jailhouse Rock yang menghentak-hentak. Ia juga senang dengan karya dari grup folk asal Amerika, The Brothers Four, seperti Greenfields dan The Green Leaves of Summer, atau duet dari The Everly Brothers yang serasi. Dan bila hendak menghadirkan suasana yang santai, ceria, dan menyegarkan, ia akan memainkan lagu-

lagu dari Harry Belafonte. Di SMA Negeri 1 Jakarta itu, Gus Sholah bahkan membentuk grup vokal dengan beberapa kawannya. Ia terus melanjutkan kegiatan bermusik ini dan mengembangkannya saat kuliah. Selain aktif di organisasi, Gus Sholah juga membentuk bandnya sendiri. Bahkan setelah lulus pun, Gus Sholah tetap bermain gitar. Meski ia tak mendapat sumber penghidupan dari sana, musik telah menjadi aktivitas hidup Gus Sholah yang sulit untuk diceraikan. Tak banyak yang tahu Gus Sholah senang dan sering memetik gitarnya, selain mungkin hanya melihatnya sekilas di video yang sudah tayang. Namun orang-orang terdekatnya akan tahu, lelaki yang kalem itu senang menyendiri memeluk gitarnya, dan menyanyikan lagu-lagu yang telah lama menemaninya sejak masa remaja.

Selain bermusik, Gus Sholah semasa sekolah juga gemar berkemping. Ibu kota di tahun 60-an masih belum penuh sesak dengan mall-mall dan pusat perbelanjaan. Tempat-tempat hiburan hanya berkisar di gedung bioskop, atau rumah-rumah para gadis yang berulang tahun, dan menggelar pesta di sana sambil mengundang band kecil sebagai pengiring dansa. Selain tempat-tempat tadi, alam menjadi alternatif lain untuk rekreasi, merekatkan hubungan antarteman, atau memikirkan tentang kehidupan sambil memandangi daun-daun, awan-awan di langit, beralaskan tanah, dan mendengarkan suara-suara hewan dari hutan bersahutan. Gus Sholah muda tampaknya menyukai juga kegiatan seperti ini. Ia bergabung di gerakan kepanduan Ansor saat bersekolah di Budi Utomo, bahkan sampai harus tinggal kelas satu tahun, karena mengikuti Jambore Pandu Dunia ke-X di Makiling, Los Banos (Laguna) Filipina pada 1959. Di luar kegiatannya di Pandu Ansor, Gus Sholah juga sering kemping dengan teman-temannya sampai ke luar kota, seperti jauh pergi ke lereng Gunung Lawu, dan menggelar kemah di tepi Telaga Sarangan, menikmati pemandangan pohon pinus dan cemara yang memagarinya.

Di tahun 1964, saat itu Gus Sholah masih menjadi mahasiswa arsitektur tahun ketiga di ITB, 37 orang yang terdiri dari mahasiswa, siswa SMA, dan pemuda Bandung berusia 15 sampai 21 tahun, mengadakan acara tumpengan sederhana seusai kegiatan berkemah di hutan lindung Pananjung di Pangandaran. Ke 37 pemuda yang sama-sama gemar mendaki gunung itu, kemudian memutuskan untuk mendirikan suatu kelompok pecinta alam di Bandung. Enam orang dari mereka lalu dinamakan sebagai Angkatan Pendiri, dan sisanya yang lain dinamakan Angkatan Pelopor. Nama Salahuddin Wahid masuk ke dalam salah satu pelopor dari gerakan itu, dengan nomor keanggotaan W 023.

Mereka menamakan kelompok itu dengan nama Wanadri. Nama itu berasal dari bahasa Sanskerta, wana yang berarti hutan,

dan adri yang berarti gunung. Mereka menemukannya setelah membaca buku karangan A. Salmoen yang berisi daftar istilah pedalangan Sunda, berjudul Padalangan di Pasoendan. Di baris huruf w mereka mendapati kata itu terselip di sana, Wanadri: goenoeng tengah leuweung. Maka nama pertama yang mereka gunakan untuk kelompok baru mereka adalah, Wanadri: Gunung di tengah Hutan, yang kemudian berubah menjadi Wanadri, Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung. Gus Sholah selalu aktif mengikuti kegiatan Wanadri selama ia di Bandung, sampai kemudian ia harus pulang ke Jakarta karena kegaduhan menjelang dan sesudah peristiwa Gestapu. Ia bukan hanya meninggalkan kegiatan yang ia senangi, organisasi yang ia ikut mendirikannya, tapi juga kuliahnya yang hanya tersisa setahun lagi.

Setelah menjadi seorang suami dan ayah, Gus Sholah tak mudah lagi untuk dapat mendaki gunung dan bermalam di kemah bersama teman-temannya. Waktunya dihabiskan bersama keluarga, sebagaimana lazimnya kehidupan pasca pernikahan. Meski Anggaran Dasar Wanadri menganut sistem keanggotaan seumur hidup, yang berarti Gus Sholah selalu menjadi anggota Wanadri meskipun tak lagi aktif di dalamnya, tetap saja gunung dan hutan sudah menjadi sesuatu yang jauh dari Gus Sholah setelah ia menikah.

Maka kegemarannya semasa remaja yang masih menemaninya hingga hari tua adalah musik. Sejak 1994 Gus Sholah juga sering diminta menyanyi di kalangan Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI), dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Pahlawan di Departemen Sosial, atau di rumah salah satu pengurus IKPNI. Dan tampaknya, di penghujung dekade 90-an, Gus Sholah menemukan kegemaran baru dengan menulis. Ia lantas menjelma menjadi penulis produktif hingga ujung usianya. Yang menarik adalah, ternyata masih ada lagi kegemaran Gus Sholah semenjak mudanya yang diam-diam terus ia lakukan, dan dikompromikan

dengan baik sehingga tidak mengganggu perannya sebagai orang tua. Hobinya ini mungkin tersirat pada salah satu paragraf di tulisannya mengenai kemungkinan pencalonan Gus Dur sebagai presiden. Gus Sholah menuliskan, "Pencalonan Gus Dur oleh Amien Rais ibarat kartu bagus: kartu as atau balak enam. Bahkan, sebagai kartu yang dimainkan, Gus Dur sendiri juga bermain dengan baik." Perumpamaan yang digunakan oleh Gus Sholah mungkin bisa dengan mudah dimengerti sebagian orang, dan yang lain harus menerka-nerka lebih jauh maknanya.

Kartu as sebagai kartu yang menunjukkan maksud unggulan, jagoan, atau seperti kata Gus Sholah, kartu bagus, mungkin banyak dimengerti oleh orang-orang yang bahkan awam dengan permainan kartu. Namun balak enam yang ia sebut bergandengan dengan kartu as, kemungkinan tidak sebanyak itu yang mengetahuinya. Balak enam adalah kartu yang menunjukkan kombinasi sepasang bintik-bintik hitam berjumlah enam biji dalam permainan gaple atau domino, dan itu adalah kartu tertinggi. Di awal permainan, balak enam akan dikeluarkan pertama, dan pada kasus itu, ia akan jadi kartu bagus bagi pemegangnya (karena permainan gaple adalah berlomba menghabiskan kartu di tangan). Namun di tengah permainan, memegang balak enam adalah bala. Karena jika itu tidak dapat dikeluarkan sampai permainan habis, balak enam akan berpotensi menjadikan pemegangnya kalah. Pada kasus yang ini, balak enam menjadi kartu bagus buat lawan.

Mengumpamakan pencalonan Gus Dur dengan balak enam, dan balak enam dengan kartu bagus, hanya mungkin dituliskan oleh orang yang mahir bermain gaple, atau setidaknya pernah dan mengetahui peraturannya. Gus Sholah boleh dibilang bukan hanya penggemar gaple, ia adalah pemain gaple sejati. Gus Sholah memulainya sejak sekolah menengah atas di Budi Utomo. Ia bermain gaple dengan teman-teman sekolahnya yang main ke rumah, atau saat ia

berkunjung ke rumah teman yang lain, atau saat sedang berkemah. Ia juga bermain dengan adiknya Gus Umar bersama orang-orang yang menginap di rumah. Pernah suatu waktu, menjelang istrinya akan melahirkan anak pertama mereka, Gus Sholah mengantarkan sang istri ke Rumah Sakit Bersalin Muslimat di Jl. Hang Tuah. Setelah menunggui istrinya di sana beberapa lama, tak ada yang menyangka Gus Sholah kemudian pulang ke rumahnya di Matraman malam-malam. Tak ayal Nyai Sholihah, sang ibu, memarahi anaknya itu dan menyuruhnya kembali ke rumah sakit. "*Lah aku dek kono yo gak iso ngewangi opo-opo Bu* (Saya di sana juga tidak bisa bantu apa-apa, Bu) ," ia menjawab begitu ketika dimarahi. "*Ndang baliko rono* (Segera balik lagi ke sana)!" ujar ibunya. Dengan perintah itu Gus Sholah menurut dan tak bisa lagi membantah. Yang dilakukan Gus Sholah saat pulang ke rumah malam itu, adalah bermain gaple dengan Umar.

Gaple, tak salah lagi, menjadi hobi Gus Sholah yang tak pernah ia tinggalkan, tak mengenal berapa usianya, dan tak mengenal posisinya sebagai siapa. Seorang temannya semasa kuliah memberi sambutan pada acara peringatan tujuah hari wafatnya Gus Sholah di rumah Jalan Bangka Jakarta Selatan. Ia bercerita bahwa mereka mengadakan reuni kecil tiap tahun, dan di setiap kalinya selalu ada ritual yang tak boleh mereka tinggalkan tiap berkumpul. Ritual itu adalah bermain gaple. Hanya segelintir orang yang mengetahuinya, bahkan di lingkungan orang-orang terdekat Gus Sholah sendiri. Dan fakta itu dibuka ketika Gus Sholah sudah mangkat. Kegiatan itu mereka lakukan bahkan setelah Gus Sholah diangkat sebagai pengasuh Pesantren Tebuireng. Gus Sholah yang sudah melewati usia 60-nya tetap bermain gaple dengan cara main yang sama seperti saat usianya 20-an dulu. Pemain yang kalah akan dicoreng mukanya dengan tinta atau arang, mereka bermain berjam-jam, dan begitu seterusnya hingga lelah menjelajahi mata dan tubuh mereka.

Bu Ida membiarkan suaminya bersenang-senang dengan temannya saat berkumpul, hanya ada satu permintaan Bu Ida, "*Lu* boleh main gaple di mana aja, tapi jangan di Tebuireng." Permintaan sang istri itu tentu saja untuk menjaga *muru'ah* Gus Sholah sebagai pengasuh. Bagaimanapun, seorang pengasuh pondok pesantren yang senang bermain gaple masih menjadi hal asing di tengah masyarakat. Padahal yang seperti itu tak selalu dilakukan untuk berjudi. Namun di sini permainan kartu apapun sudah terlanjur identik dengan pertaruhan uang. Pada akhirnya, yang menghentikan Gus Sholah untuk bermain gaple adalah batas usianya. Teman-temannya di ITB mungkin akan terus melanjutkan reuni kecil mereka, dengan permainan gaple yang sama, hanya saja tidak ada lagi Gus Sholah yang akan ikut bermain bersama mereka. ❖

Diskusi bersama

Presiden RI Joko Widodo

Mendirikan Partai

REFORMASI yang terjadi pada tahun 1997-1998 telah melahirkan gelombang perubahan demi perubahan. Keran kebebasan berekspresi yang sejak puluhan tahun sebelumnya disumbat oleh rezim penguasa Orde Baru, tiba-tiba terbuka menganga, tanpa ada aral yang bisa menahan melaju dengan derasnya arus kebebasan. Eforia terjadi di mana-mana, dalam bidang apa saja, dan oleh siapa saja. Gelombang reformasi melahirkan pembaruan dan perubahan fundamental di segala bidang. Yang paling menonjol adalah ekspresi kebebasan berpikir, menyatakan pendapat dan kebebasan berkumpul dan berserikat.

Dengan berbagai spirit dan motif yang melatarbelakangi, hampir sebagian besar tokoh di Indonesia, tokoh politik, tokoh agama, tokoh ekonomi dan tokoh dari jenis apa pun, mewacanakan pendirian partai politik. Termasuk di dalamnya Salahuddin Wahid.

Ratusan ormas dan parpol lahir pada periode ini. Tuntutan paling awal dalam bidang politik, adalah disegerakannya penyelenggaraan pemilihan umum, dari tahun 2002 (sesuai siklus limatahunan sebagaimana telah diagendakan oleh Orba) diajukan menjadi tahun 1999. Menjelang Pemilu 1999 Departemen Kehakiman menerima pendaftaran ratusan partai politik baru. Dari sejumlah partai yang mendaftar, terdapat 48 partai politik yang akhirnya lolos mengikuti Pemilu 1999.

Pembentukan partai politik baru di era reformasi pada umumnya lebih mencerminkan tujuan praktis, bukan tujuan ideal

dan strategis, yaitu sebagai wahana untuk mengartikulasi berbagai kepentingan dan memperebutkan kekuasaan politik. Ini kesempatan langka yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Dalam berbagai kesempatan Salahuddin Wahid sering menyampaikan sikap kritisnya terhadap perkembangan dan dinamika yang terjadi di internal Nahdlatul Ulama. Kritik itu terutama menyangkut sikap, watak dan jatidiri NU sebagai jam'iyah diniyah, jangan sampai NU ditarik-tarik dalam kegiatan politik praktis.

Pada masa awal reformasi, setidaknya muncul tiga opsi dari kalangan Nahdliyin terkait penyaluran aspirasi politik warga NU. Pertama, kalangan yang mendorong NU berubah menjadi partai politik, sebagaimana pada Pemilu tahun 1955 dan Pemilu tahun 1971. Kedua, NU mendirikan partai politik sebagai kendaraan politik bagi warga NU. Dan yang ketiga, NU tidak perlu berubah jatidiri menjadi partai politik atau NU mendirikan partai politik. Aspirasi politik bagi warganya cukup disalurkan ke partai politik yang sudah ada.

Opsi yang ketiga ini sebenarnya tidak terlampau banyak yang mengusung. Mayoritas warga dan tokoh NU cenderung memilih opsi yang pertama, yaitu NU mendirikan partai politik. Hal ini tergambar dari serangkaian proses dan langkah konsolidasi yang dilakukan para tokoh dan pimpinan NU, terutama KH. Abdurrahman Wahid, dan sejumlah kiai sepuh. Setelah melalui serangkaian pertemuan di berbagai daerah, akhirnya pada tanggal 23 Juli 1998 dideklarasikanlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Ciganjur, Jakarta Selatan, dengan lima orang deklarator utama, yaitu KH. Abdurrahman Wahid, KH. Ilyas Ruchyat, KH. Muchit Muzadi, KH. Moenasir Ali dan KH. Musthofa Bisri.

Dalam proses pembentukan partai baru oleh Nahdlatul Ulama tersebut,di manakah posisi Gus Sholah?

Berbeda dengan arus besar yang terjadi kalangan Nahdliyin, Salahuddin Wahid, meski setuju ada wadah partai politik bagi kalangan warga NU, tapi ia tidak setuju jika pembentukan partai politik itu difasilitasi, atau apalagi bila melibatkan, NU secara struktural. Menurut Gus Sholah, partai politik adalah partai politik yang memiliki karakter dan normanya sendiri. Beda dengan NU sebagai jam'iyah.

Menurut Gus Sholah, Jam'iyah NU harus disterilkan dari kegiatan politik praktis. Meski NU memerlukan kendaraan politik untuk melancarkan dan mendukung program-programnya, tidak seharusnya NU dilibatkan secara formal dan struktural dalam proses pembentukan partai politik. Cukuplah pembentukan partai diinisiasi dan diproses oleh tokoh dan warga NU, sehingga marwah NU tetap bisa terjaga jika partai yang didirikan warga NU menghadapi masalah. Bukan oleh struktur NU. Dia lantas mencontohkan dengan apa yang ditempuh oleh ormas Muhammadiyah dengan pembentukan Partai Amanat Nasional (PAN).

Karena eforia di lingkungan NU untuk membentuk partai politik, dalam hal ini PKB, tak terbendung, dan pendirian PKB langsung difasilitasi oleh NU, dalam hal ini PBNU, Gus Sholah membangun poros kekuatan sendiri bersama pamannya, KH. M. Yusuf Hasyim, mendirikan Partai Kebangkitan Umat (PKU), sebagai kontra terhadap langkah tersebut. Langkah yang ditempuh Gus Sholah sudah tentu menuai pro dan kontra. Sikap politik yang diambil makin meneguhkan kesan di mata umum bahwa Gus Sholah dan Gus Dur memang memiliki perbedaan dalam menyikapi sejumlah masalah yang dihadapi NU dan bangsa.

PKU didirikan 21 September 1998, dengan Ketua Umum KH. Yusuf Hasyim dan Sekjen Drs. H.Asnawi Latief. Gus Sholah menjadi salah satu ketua DPP PKU. Partai ini berasaskan Pancasila dan

beraqidah Islam yang berhaluan Ahlussunah wal-Jamaah (wawasan keislaman); sifat kebangsaan (wawasan keindonesiaan); Penerus misi perjuangan pendiri dan perintis Nahdlatul Ulama (wawasan kejuangan).

Visi PKU adalah "Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berperadaban, demokratis, berkeadilan, makmur, maju dan mandiri". Sedangkan misi Partai ini adalah membangun masyarakat madani, di perkotaan maupun pedesaan, dengan ajaran Islam berlaku dalam kehidupan, sekaligus melindungi hak pemeluk semua agama.

Tokoh lain yang tergabung sebagai pendiri PKU antara lain Ny. Hj. Asmah Syahruni, Dr. Seha Supraptono, Abdy Kusumanegara, Ny. Hj. Chodijah Jumali, Chasbullah Muin, SH, Saifullah Ma'shum dan beberapa tokoh lain.

Menurut catatan Wikipedia, partai ini didirikan oleh sebagian tokoh Nahdlatul Ulama karena adanya perbedaan visi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bentukan PBNU. Pada pemilihan umum tahun 1999 partai ini mendapatkan suara sebanyak 300.064 suara atau 0,28% dari keseluruhan suara, dan partai ini hanya mendapatkan satu kursi di DPR.

Seperti sudah diprediksikan banyak pihak, PKU tidak akan bisa bersaing dengan PKB yang berdirinya dibidani oleh hampir semua tokoh NU baik struktural maupun nonstruktural. Tapi Gus Sholah seakan tak peduli dengan prediksi dan pesimistisnya banyak orang. Menurut Gus Sholah, ia terpaksa harus mendirikan PKU sebagai kritik keras terhadap pelibatan Jam'iyah NU secara struktural dalam proses pendirian PKB. ❖

Menggagas Gerakan Jalan Lurus (GJL)

PERNAH mendengar GJL? Pada awal tahun 2002, sejumlah eksponen dan aktivis pro reformasi intensif melakukan pertemuan dan diskusi. Salahuddin Wahid termasuk tercatat sebagai peserta yang aktif, dan menjadi salah satu motornya. Ujung dari forum pertemuan tersebut, lahirlah GJL, Gerakan Jalan Lurus. Ditilik dari namanya, dapat ditebak orientasi dan tujuan didirikannya gerakan ini, yaitu melakukan koreksi dan pelurusan terhadap jalannya reformasi.

Setelah reformasi berjalan beberapa tahun, banyak pihak yang semula menaruh harapan besar akan terjadinya perbaikan berarti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengalami kekecewaan. Kinerja banyak anggota DPR dan DPRD amat mengecewakan. Tampak para wakil rakyat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rakyat yang diwakilinya. Bahkan ada yang tidak malu mempertontonkan kekayaan secara mencolok, meskipun sebelum menjadi anggota DPR mereka bukan orang kaya.

Korupsi tidak berkurang, bahkan banyak pihak mengatakan semakin meningkat, menjalar ke semua lembaga, termasuk legislatif. Permainan dalam penerimaan LP] kepala daerah sudah menjadi rahasia umum. Demikian pula halnya dengan pemilihan bupati, walikota dan gubernur, yang melibatkan jumlah uang yang amat besar. Tetapi tidak ada tindakan apapun terhadap mereka. Hampir tidak ada koruptor yang diadili atau dijatuhi hukuman.

Kehidupan sejumlah besar rakyat masih amat memprihatinkan. Pengangguran makin meningkat akibat ditutupnya banyak

perusahaan yang merasa bahwa berusaha di Indonesia tidak menarik lagi. Kehidupan dunia usaha secara umum belum menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik dan memberi harapan. Ekonomi biaya tinggi masih tetap belum bisa diperbaiki. Pemerintah justru banyak membuat kebijakan yang tidak memihak rakyat kecil. Penjualan beberapa BUMN strategis dengan cara-cara yang tidak transparan dan dianggap merugikan negara, mengusik rasa kebangsaan banyak orang.

Pelanggaran HAM yang berat di masa lalu belum banyak yang diajukan ke pengadilan. Kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM tidak mendapat tanggapan positif dari DPR. Termasuk kasus Trisakti, Semanggi I dan II yang oleh DPR dinyatakan bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Kasus Mei 1998 yang laporannya telah disampaikan Komnas HAM ke Kejakgung (September 2003) dan ke DPR (Oktober 2003), tak kunjung ditindaklanjuti oleh kedua lembaga itu.

Banyak akademisi, cendekiawan, kalangan profesional dan pengusaha yang mempunyai pertanyaan sama (yang juga dipertanyakan banyak orang).

"Bagaimana selanjutnya kehidupan bangsa kita? Apa kita masih memiliki masa depan? Apa yang harus kita lakukan bersama untuk bisa turut memperbaiki keadaan? Kegalauan ini akhirnya memunculkan keinginan dan kebutuhan bersama untuk berkumpul dan saling tukar informasi serta pendapat dan gagasan," tutur Salahuddin Wahid menjelaskan latar belakang lahirnya GJL.

Waktu itu muncul berbagai kelompok diskusi, yang mula-mula jumlah pesertanya kecil dan terbatas, lalu membesar dan melebar. Salah satu dari kelompok semacam itu ialah Gerakan Jalan Lurus (GJL) yang dimotori oleh mantan Ketua Umum PB HMI periode 1963-1966 dr. Sulastomo. Di antara nama-nama yang ikut aktif dalam GJL ialah Nurcholish Madjid, Syafii Maarif, Salahuddin Wahid, Hari Tjan Silalahi (CSIS), Mayjen (Purn) Sunarso]ayusman (mantan Deputi Kabakin), Laksdya (Purn) Darmansyah (mantan anggota DPR), Sumarno Dipodisastro (Angkatan 66), Teddy Rahmat (mantan Dirut PT Astra Motor), Rosita Noer (pengusaha), Tommy Legowo (CSIS)_ Solichin, Sularso, Listiyanto, Adham, dan J. Kristiadi.

GJL dideklarasikan pada tanggal 20 Mei 2002 di Jakarta. Ulang tahun pertamanya diperingati di Assembly Hall Bhirawa dengan kegiatan yang dihadiri sekitar 500 orang. Acara itu menampilkan pembicara Syafii Maarif, Jakob Utama, Chusnul Mar'iyah, Teddy Rahmat, Sulastomo dan Salahuddin Wahid. Yang bertindak sebagai moderator ialah Hari Tjan Silalahi. Selanjutnya GJL menyelenggarakan kegiatan di Yogyakarta yang menampilkan pembicara Nurcholish Madjid, Sofyan Effendi (Rektor UGM),]. Kristiadi (CSIS), Teddy Rahmat dan Salahuddin Wahid. GJL juga melakukan kegiatan serupa di Medan (kerjasama dengan UNM), di Surabaya (kerjasama dengan Unair) dan di Semarang (kerjasama dengan Unisula). Umumnya kegiatan Gerakan Jalan Lurus di berbagai kota besar itu dihadiri pengunjung dalam jumlah besar dan mendapat liputan luas dari media.

Selain kegiatan-kegiatan di atas, GJL juga mencoba merumuskan Manifes Jalan Lurus yang meliputi masalah perekonomian dan kesejahteraan, politik dan ketatanegaraan, dan sosial budaya. Manifes Perekonomian dan Kesejahteraan Jalan Lurus memperoleh perhatian besar setelah dimuat oleh Harian Kompas secara utuh. Manifes tersebut disusun dengan bantuan para pakar melalui diskusi terbuka secara beruntun dengan mengundang pihak lain untuk mengkritisi draft yang telah disusun. Diskusi internal GJL mula-mula dilakukan secara berpindah-pindah, di gedung kantor GKBI, kantor CSIS atau tempat-tempat lain. Akhirnya pada awal 2003 GJL mendapat tempat untuk kantor dan tempat pertemuan di Jalan Proklamasi 41.

Manifes Perekonomian dan Kesejahteraan Jalan Lurus menyatakan bahwa rakyat Indonesia berhak atas perbaikan kesejahteraan yang lebih cepat daripada yang terjadi selama lima tahun terakhir, sesuai pasal 33 dan 34 UUD 1945. Indonesia harus masuk ke dalam fase pertumbuhan tinggi yang terbagi (shared high growth) dan berkelanjutan, yang memerlukan pendekatan baru yang tersimpul dalam ”Ekonomi Pasar Sosial Terbuka”.

Ekonomi pasar diperkuat secara konsisten dengan meningkatkan kepastian hukum, perlindungan pemilikan privat atas alat-alat produksi, kepastian dan perlindungan pemilikan ulayat, mempertimbangkan hajat hidup orang banyak, penguatan perlindungan perusahaan negara yang masih ada terhadap penjarahan oleh manajemen dan atau pihak lain lewat pasarisasi kuasi dan penguatan perlindungan atas pertumbuhan koperasi yang ramah pasar.

Untuk menghidupkan persaingan yang lebih sempurna diperlukan dekonglomerasi dalam dunia usaha, antara lain melalui kepemilikan perusahaan oleh koperasi tenaga kerja. Untuk maksud itu saham setiap orang atau organisasi pemegang saham dalam

bank umum dibatasi setinggi-tingginya 8% terhitung sejak akhir tahun 2007. Perlu direncanakan penyelesaian obligasi rekapitalisasi perbankan, selambat-lambatnya pada tahun 2009.

Gerakan Jalan Lurus menyadari bahwa perjalanan Indonesia menuju pertumbuhan tinggi yang terbagi dan berkelanjutan memerlukan keterlibatan pemerintah dalam bentuk yang berbeda daripada keterlibatan pemerintah sebagai pemilik alat-alat produksi. GJL memandang perlu transformasi negara menjadi negara sosial dengan ciriciri pokok antara lain sebagai berikut :

1. Peran terpenting negara dalam ekonomi adalah peran Sebagai pengatur (regulator) yang baik, adil, kompeten dan tegas sesuai hukum. Lewat swastanisasi, peran sebagai pemilik akan diturunkan ke tingkat yang minimum, yaitu hanya lapangan-lapangan usaha dimana terdapat ”kegagalan pasar”, terkait kepentingan politik nasional, keamanan negara dan hajat hidup orang banyak. Itupun harus diselenggarakan dengan ramah pasar.
2. Kompleksitas pertumbuhan tinggi yang terbagi dan berkelanjutan menuntut dekonsentrasi kewenangan pengaturan kepada regulator-regulator independen dan atau desentralisasi kepada pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Selambat-lambatnya pada akhir tahun 2005 pemerintah menerbitkan buku putih tentang kekayaan negara yang disebarluaskan untuk dibaca oleh sebanyak-banyaknya warga.
4. Program pemerintah tahun 2004-2009 harus meletakkan perang terhadap korupsi dan penegakan hukum pada urutan yang sangat tinggi dalam daftar prioritasnya. Pendekatan baru tidak akan berjalan kalau politisi dan pegawai negara tidak tunduk sepenuhnya pada hukum.
5. Untuk membuka pintu bagi reformasi pegawai negara, ujian klasifikasi ulang diselenggarakan bagi jabatan-jabatan direktur

jenderal dan direktur dalam tahun 2005 dengan maksud untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat.

Disamping kegiatan yang telah disebutkan di atas, GJL juga menaruh perhatian terhadap masalah kepemimpinan nasional. Hal itu wajar karena disadari bahwa konsep tentang berbagai masalah yang terkandung dalam Manifes Jalan Lurus tidak akan banyak bermakna kalau kepemimpinan nasional hasil Pilpres 2004 tidak seperti yang kita harapkan. ”Seperti banyak pihak, GIL juga menyadari bahwa kepemimpinan nasional yang ada saat itu masih di bawah harapan,” kata Gus Sholah.

Jadi wajar kalau GIL juga ingin turut dalam upaya untuk menampilkan tokoh-tokoh yang dianggap layak menjadi pemimpin nasional. Tokoh-tokoh yang sempat dibicarakan meliputi tokoh-tokoh yang sudah dikenal publik, juga termasuk tokoh-tokoh GJL sendiri. Ada empat nama dari dalam GIL yang muncul dalam beberapa kali diskusi internal, yaitu Nurcholish Madjid, Syafii Maarif, Sulastomo dan nama Salahuddin Wahid. Diharapkan pada saat yang tepat GIL akan menghubungi partai-partai untuk menawarkan nama-nama tersebut, namun hingga saat itu GIL belum melakukannya karena momentumnya dirasa belum tepat. Keempat nama tersebut juga cenderung tidak menonjolkan atau menawarkan diri, bersifat pasif dan menunggu.

Salahuddin menuturkan, gagasan itu ternyata layu sebelum berkembang setelah pada bulan Mei 2003 Nurcholish Madjid membuat pernyataan terbuka bahwa dirinya bersedia diajukan menjadi calon presiden oleh partai yang mempunyai platform sesuai dengan platformnya. Langkah Cak Nur ini mungkin dianggap terlalu dini dan ”mendahului” GIL. Setelah itu GIL tidak meneruskan langkah mencari calon presiden/wakil presiden untuk kemudian menawarkannya kepada partai politik yang berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden.

Disamping GJL muncul banyak lembaga atau organisasi yang mempunyai kepedulian dan keprihatinan serta tujuan yang sama. Lembaga-lembaga itu bukan berbentuk kekuatan politik, tetapi lebih tepat disebut sebagai gerakan moral. Mereka diharapkan dapat memberi pencerahan kepada masyarakat tentang berbagai masalah yang kita hadapi sebagai bangsa. GIL juga mengadakan kerjasama dengan lembaga, forum atau organisasi semacam itu.

Nama Salahuddin Wahid yang kemudian masuk dalam bursa calon wakil presiden, dimulainya dari GJL ini. Seandainya waktu itu tidak ada manuver Cak Nur yang mendahului mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, ceritanya akan lain. Gerakan dan rekomendasi yang diusung oleh GJL memiliki bobot tersediri, karena di dalamnya diisi orang-orang yang memiliki integritas tinggi.

Nama Salahuddin Wahid, dalam lintasan aktivis proreformasi, tidak bisa dipisahkan dari keberadaan GJL. ❖

2004
SURAT SUARA
SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2004
1
2
3
4
5

Menjadi Peserta Pilpres 2004

HARIAN Duta 10 Januari 2004 pada halaman 1 memunculkan berita tentang hasil jajak pendapat oleh Student Polling Center, Jakarta yang mengambil responden sejumlah 2000 orang.

Kepada para responden diberikan sejumlah nama yang dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, yang sudah menyatakan diri menjadi bakal capres. Kedua, yang belum menyatakan diri sebagai bakal capres. Selain nama-nama yang telah diberikan, responden boleh memilih nama lain.

Untuk kelompok pertama, ternyata Gus Dur muncul di urutan pertama (26%). Selanjutnya Amien Rais dan Nurcholis Madjid (19%), disusul Hamzah Haz (12%), Wiranto dan Megawati (9%) dan Akbar Tandjung (6%). Untuk kelompok kedua, SBY di urutan teratas (28%). Urutan berikutnya ialah Salahuddin Wahid (14%), Syafii Maarif (10%), disusul Hasyim Muzadi dan Meutia Hatta (9%), Siswono dan Habibie (5%).

Walaupun pada jajak pendapat Student Polling Center nama Gus Sholah ada di peringkat dua, tetapi jajak pendapat lain yang diadakan oleh lembaga yang lebih dikenal dan lebih punya reputasi sama sekali tidak mencantumkan namanya di dalam hasil jajak pendapat yang mereka lakukan. Sebuah jajak pendapat oleh Sugeng Saryadi Syndicated pernah mencantumkan nama Salahuddin Wahid pada urutan ke 15 dengan dukungan hanya sekitar 3%. Jadi wajar sekali bila di dalam berbagai diskusi yang diselenggarakan dalam kaitan mencari tokoh yang akan didukung sebagai capres/cawapres namanya tidak pernah muncul dan seakan tenggelam.

Hal ini tidak mengherankan. Pertama, Salahuddin Wahid bukan ketua umum sebuah partai atau ormas besar yang biasanya secara otomatis akan diklasifikasi sebagai bakal calon. Kedua, dia juga tidak pernah membuat pernyataan mengajukan diri menjadi bakal calon presiden/calon wakil presiden sehingga tidak diklasifikasi publik sebagai orang yang mengincar posisi politik.

Pada waktu itu, setelah Partai Golkar muncul menjadi pemenang pemilu legislatif tahun 2004 dengan suara 24,5 juta, maka partai itu berketetapan hati untuk mengajukan calon presiden. Hanya tinggal menunggu kepastian siapa calon yang akan ditetapkan melalui konvensi yang diselenggarakan pada tanggal 20 April 2004. Dari sekian banyak nama yang mendaftarkan diri, hanya tinggal lima orang yang maju pada babak akhir, yaitu Akbar Tandjung, Wiranto, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dan Prabowo Subiyanto. Jusuf Kalla telah mengundurkan diri dari konvensi, karena yang bersangkutan sudah berancang-ancang untuk berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Hamengku Buwono X telah mengundurkan diri sebelum Jusuf Kalla. Yang paling diunggulkan ada dua nama, yaitu Akbar Tandjung dan Wiranto.

Proses Panjang yang Melelahkan

Hari Jum'at tanggal 16 April 2004 Gus Sholah bertemu dengan Mahadi Sinambela, salah seorang Ketua DPP Partai Golkar, di rumah kakak iparnya, Hamid Baidlowi. Dalam pertemuan itu Mahadi Sinambela menyampaikan salam dari Akbar Tandjung dan menyatakan bahwa Akbar Tandjung bila menang dalam konvensi Partai Golkar menginginkan saya untuk mendampingi sebagai cawapres. Kepada Mahadi Sinambela dia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Salahuddin Wahid juga mengatakan akan melaporkan hal itu kepada DPP PKB dan Gus Dur. "Hal ini penting sebab saya tidak membayangkan untuk

meraih posisi politik apapur tanpa dukungan DPP PKB dan Gus Dur," ujar Gus Sholah ketika itu.

Hari Selasa, 20 April 2004 malam hari dilangsungkan Konvensi Nasional Partai Golkar untuk menentukan siapa yang akan menjadi capres mewakili partai. Pada putaran pertama Akbar Tandjung paling unggul dan Wiranto pada posisi kedua. Pada putaran kedua Wiranto mengalahkan Akbar dengan angka telak. Sebenarnya pemungutan suara semula hanya akan dilakukan sekali putaran, tetapi kubu Akbar Tanjung menghendaki dua putaran. Seandainya satu putaran, maka yang menang adalah Akbar Tanjung. Tetapi Allah memang telah menghendaki Wiranto untuk menjadi capres mewakili Partai Golkar.

Pada saat konvensi itu berlangsung, Salahuddin Wahid sedang bekerja di rumahnya bersama Pendeta Natan Setiabudi (Ketua Umum Persekutuan Gereja lndonesia), Haris Rusli Moti (mantan Ketua PRD), Melki (PMKRI), Gusrizal (HMl) dan Sulaiman Haikal (mantan aktivis Pijar). Mereka bekerja mulai pukul 23:00 hingga 01:30 untuk menyempurnakan draft usulan Pendeta Natan untuk konsep Kerangka Kebersamaan Minimal (KKM), yang pada bulan Agustus 2004 disampaikan oleh tokoh lintas agama kepada para bakal capres. Ketika mengetahui bahwa Wiranto yang memenangkan konvensi dan menjadi capres dari Partai Golkar, Gus Sholah tidak terlalu banyak memberi perhatian karena yang telah mengontaknya adalah Akbar Tandjung.

Tetapi beberapa hari kemudian sudah muncul isu bahwa Wiranto dan DPP Partai Golkar menginginkan beberapa nama untuk mendampingi Wiranto, salah satunya ialah nama Gus Sholah. Partai Golkar mempunyai beberapa pilihan untuk posisi cawapres, termasuk Gus Sholah. Partai Golkar menginginkan cawapres dari kalangan NU.

Gus Sholah menduga, pilihan pertama dari kalangan NU tentu Hasyim Muzadi dan akan lebih baik kalau dicalonkan PKB. Karena itu

DPP Partai Golkar bersama Wiranto menemui Gus Dur dalam rangka meminang Hasyim Muzadi. Ternyata Gus Dur tidak memberi lampu hijau sehingga Partai Golkar mengutus Slamet Effendi Yusuf untuk sowan kepada Rais Aam PBNU KH. Sahal Mahfudz guna mendapat ijin bagi Hasyim Muzadi untuk bisa menjadi cawapres dari Partai Golkar. Rais Aam menjawab bahwa PBNU tidak pada posisi memberi ijin, PBNU tidak mendukung dan tidak melarang tokoh PBNU untuk menjadi cawapres.

Sementara isu tentang Gus Sholah menjadi cawapres dari Wiranto berkembang, banyak pihak, khususnya aktivis HAM, datang menemuinya dan menyatakan penolakan mereka. “Saya menerima sikap mereka. sebagai masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi saya dalam mengambil keputusan. Saya benar-benar menghadapi suatu dilema yang tidak mudah untuk memutuskannya.”

Di lain sisi, kawan-kawan dari Tim Mei ‘98 (Ester, Lamria, dan Hotma) yang mendorong Gus Sholah sebagai capres tetap gigih meyakinkan Gus Dur agar PKB mengajukan Gus Sholah sebagai capres. Pada tanggal 24 April 2004 mereka ke Sukabumi untuk menemui Gus Dur yang sedang berobat. Di sana mereka bertemu dengan Hasyim Muzadi yang juga sedang menemui Gus Dur. Esok harinya mereka menemui Syafii Maarif di Bandara Cengkareng untuk membujuk dan meyakinkan Ketua PP Muhammadiyah itu agar bersedia menjadi cawapres mendampingi Gus Sholah apabila PKB bersedia mencalonkan. Tentu Syafii Maarif sulit untuk menjawab permintaan itu, apabila memang usul mereka disetujui oleh PKB. Tetapi Syafii Maarif mengetahui dengan pasti bahwa amat kecil kemungkinan itu akan terjadi.

Banyak kawan dari LSM yang datang ke rumah Gus Sholah, seperti Longgena Ginting (Walhi), Yenny Rosa Damayanti, dan banyak lagi, dengan maksud yang sama, yaitu mencegah Gus

Sholah menjadi cawapresnya Wiranto. Secara terpisah mereka juga mendatangi Gus Dur dan DPP PKB untuk membujuk dan meyakinkan bahwa sebaiknya PKB mengajukan Gus Sholah sebagai capres apabila Gus Dur ditolak oleh KPU. Namun tampaknya upaya mereka untuk meyakinkan Gus Dur maupun DPP PKB tidak berhasil.

Pada malam hari tanggal 27 April 2004, Gus Sholah menjadi pembicara pada acara peluncuran buku "Gus Dur, Militer, dan Politik" karya Malik Haramain, mantan Ketua Umum PB PMII. Pada kesempatan itu, Gus Sholah menggarisbawahi usul Ketua Umum PB PMII agar PKB mengajukan calon presiden dari kalangan NU kalau Gus Dur ditolak KPU. "Pidato ini saya maksudkan bukan untuk bersiap sedia mendampingi Wiranto dalam pilpres, tetapi dalam rangka menjaring kemungkinan lain yang lebih moderat dan dapat melepaskan saya dari dilema," ujar Gus Sholah.

Selain kawan-kawan dari LSM, para aktivis muda khususnya angkatan '98 juga mendatangi Gus Sholah. Mereka mengadakan pertemuan di PBNU pada malam hari 30 April 2004, yang dihadiri juga oleh Pendeta Natan Setiabudi dan Jeffrey Winters. Mereka juga ingin mendesak Gus Dur dan DPP PKB supaya mengajukan Gus Sholah sebagai capres dari PKB bila Gus Dur tidak lolos. Pertemuan itu juga membahas nama-nama yang bisa menjadi cawapres untuk mendampingi Gus Sholah.

Maka dalam masa-masa ini, Gus Sholah sedang berada di antara dua kubu, yang menghendakinya mendampingi Wiranto sebagai cawapres, seperti Rahmawati Soekarnoputri, Mohtar Pakpahan, dan kawan-kawan angkatan '98, yang secara khusus menanyakan mengenai kepastian Gus Sholah mendampingi Wiranto dalam pilpres. Dan kubu lain mendesak agar Gus Sholah bisa maju sebagai capres yang diusung DPP PKB menggantikan Gus Dur, apabila Gus Dur tidak lolos pencalonan. Terhadap segala kemungkinan ini Gus

Sholah paling menyadari bahwa ia tidak bisa memutuskan seorang diri, melainkan juga dengan pertimbangan pihak-pihak krusial yaitu Gus Dur, PKB, dan para Kiai sepuh NU.

Di tengah pembicaraan dengan kawan-kawan aktivis, Pendeta Natan dan Jeffrey Winters, Gus Sholah mendapatkan panggilan telepon dari Kiai Abdullah Faqih. Ia segera meninggalkan pertemuan untuk menerima telepon itu. Kiai Faqih paring dawuh supaya Gus Sholah mau menjadi cawapres kalau diminta oleh Wiranto, karena mayoritas Kiai di Jawa Timur cenderung untuk mendukung Wiranto sebagai capres. "Kiai Faqih betul-betul menghendaki supaya saya bersedia melaksanakan dawuh itu yang merupakan aspirasi masyarakat." Dalam benak Gus Sholah, itu mungkin skenario Gus Dur sebagai solusi dari masalah besar yang tengah dihadapi PKB. "Dalam pikiran saya, kalau Kiai Faqih paring dawuh, mustahil hal itu dilakukan tanpa terlebih dulu berdiskusi dengan Gus Dur."

Kesimpulan ini dihasilkan dengan pertimbangan PKB tidak mungkin mencalonkan figur selain Gus Dur. Hal ini juga merupakan bentuk perjuangan politik Gus Dur melawan keputusan KPU. Di lain sisi, PKB sebagai partai besar juga ingin menyelamatkan gerbong politik dalam pilpres. Untuk mengetahuinya secara pasti, Gus Sholah memutuskan untuk menemui kakaknya itu, dan mendengarkan jawabannya secara langsung.

Setelah pertemuan di PBNU dengan para aktivis muda itu, tengah malamnya Gus Sholah bertemu dengan Wiranto di Hotel Century Senayan, diatur oleh Norman (seorang kawan yang sering berada dalam lingkaran Wiranto). Wiranto menyampaikan informasi bahwa rapat DPP Partai Golkar dan juga Wiranto telah sepakat untuk meminta Gus Sholah menjadi cawapresnya.

Pada siang hari di tanggal 2 Mei 2004, Gus Sholah bersama kakaknya, Aisyah Hamid Badilawi, dan adiknya, Umar Wahid, sowan ke kantor PBNU untuk menemui Gus Dur. Gus Sholah melaporkan

bahwa Wiranto dan DPP Partai Golkar telah memintanya untuk menjadi cawapres, dan ia memohon izin kepada Gus Dur sebagai kakak tertua dan juga sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB. "Gus Dur menyatakan memberi izin kepada saya untuk menjadi cawapresnya Wiranto, tetapi tidak mendukung karena Gus Dur akan tetap maju sebagai capres dari PKB." Jawaban Gus Dur ini merupakan isyarat yang kuat yang membenarkan dugaan Gus Sholah, bahwa semua proses ini tidak lepas dari peran Gus Dur. Selanjutnya Gus Dur meminta Gus Sholah untuk melapor kepada DPP PKB.

Setelah mendapat restu dari Gus Dur, segera saja malam harinya Gus Sholah menemui Wiranto dan beberapa anggota DPP Partai Golkar yaitu Fahmi Idris, Slamet Effendi Yusuf, Irsyad Sudiro, Abdul Gafur, dan Bomer Pasaribu. Ikut hadir juga Fahrul Rozi (mantan wakil panglima TNI), Suaidy Marasabessy, dan beberapa anggota Tim Sukses Wiranto. Sementara dari pihak Gus Sholah ia didampingi oleh Gus Umar, Saifullah Ma'shum, Ali Mahsun, dan putra sulungnya Irfan Wahid.

Dalam pertemuan itu Gus Sholah menyampaikan keinginannya untuk menjadi wapres yang aktif dan diberi tugas yang jelas. "Saya minta diberi kewenangan koordinasi masalah penegakan hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi, dan diberi wewenang untuk memilih Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri Kahakiman." Wiranto menyambut baik keinginan Gus Sholah, ia menjanjikan akan melibatkan Gus Sholah secara penuh dalam penyusunan kabinet, tentunya bersama DPP PKB dan DPP Partai Golkar.

Keesokan harinya, Gus Sholah melapor kepada DPP PKB terkait perkembangan permintaan Wiranto dan DPP Partai Golkar untuk menjadikan Gus Sholah cawapres. Gus Sholah mengusulkan agar DPP PKB bisa segera bertemu Wiranto dan DPP Partai Golkar untuk membahas berbagai hal yang perlu dilakukan. Pada tanggal 4 Mei 2004, dicapai kesepakatan tertulis tentang prinsip-prinsip

dari kerjasama PKB dengan capres dan Partai Golkar. Tanggal 5 Mei Gus Sholah bertemu lagi dengan Wiranto untuk memperjelas dan mempertegas pembagian tugas, khususnya tentang masalah penegakan hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi.

Hamzah Haz mengundang Gus Sholah untuk bertemu di rumah pribadinya pada hari Kamis, 6 Mei 2004. Gus Sholah datang bersama beberapa anggota Tim 9 DPP PKB antara lain Mahfud MD dan Arifin Junaidi. Tuan rumah Hamzah Haz didampingi antara lain oleh Arief Mudatsir dan Lukman Hakim Saifuddin. Maksud pertemuan ini adalah untuk menindaklanjuti pertemuan antara Gus Dur dengan Hamzah Haz untuk menjajagi koalisi PKB dengan PPP.

Setelah berbicara panjang lebar tentang untung rugi koalisi PKB dan PPP, Gus Sholah menandaskan bahwa PKB menginginkan ketegasan PPP tentang kesungguhan untuk berkoalisi, karena PPP adalah pihak yang mengambil prakarsa awal. Gus Sholah menyampaikan, "Saya berharap PPP tidak bermain ulur waktu. Jangan sampai PKB menolak Golkar untuk bekerja sama dengan PPP, lalu PPP mendekati Wiranto. Saya juga menandaskan kalau koalisi dilakukan, PKB mendapat capres dan PPP mendapat cawapres. Hal ini wajar karena perolehan suara PKB lebih besar."

Malam harinya Lukman Hakim Saifuddin mengabarkan bahwa PPP mau berkoalisi dengan PKB apabila Hamzah Haz menjadi capres. Argumentasinya berdasarkan pertimbangan senioritas, Hamzah Haz dinilai lebih senior dibanding Gus Sholah. Menurut Gus Sholah, argumen itu lemah karena dari segi jumlah suara PKB jelas lebih tinggi. Dari segi akseptabilitas, Gus Sholah merasa bahwa dirinya lebih layak jual ketimbang Hamzah Haz. PKB yang dari awal sudah tidak semangat, menganggap sudah tidak perlu bicara lagi dengan PPP.

Sabtu pagi tanggal 8 Mei 2004 Gus Sholah berkunjung ke Ciganjur, menemui Gus Dur. Di tengah perbincangan bersama kakak

tertuanya itu, datanglah Rahmawati dengan seorang anggota DPP Partai Pelopor. Rahmawati menyampaikan kepada Gus Dur keinginan aliansi partai-partai kecil untuk mengajukan Gus Dur sebagai capres. Gus Dur kemudian bertanya siapa calon wapresnya yang akan diajukan mereka. Rahmawati menjawab bahwa cawapresnya adalah dirinya sendiri. Gus Dur mempersilakan Rahmawati untuk menanyakan langsung kepada Gus Sholah apakah bersedia atau tidak. Gus Sholah menjawab, "Saya merasa berterima kasih atas kepercayaannya, tetapi saya menyerahkan kepada keputusan Tim 9 DPP PKB yang akan mengadakan rapat esok hari di Langitan."

Slamet Effendi Yusuf kemudian membawa berita kalau Tim 9 DPP PKB telah memutuskan, bahwa Gus Sholah didukung oleh PKB untuk menjadi cawapres berpasangan dengan Wiranto. Gus Sholah kemudian mendapat berita yang lebih rinci tentang hasil keputusan pertemuan di Langitan pagi itu. Intinya ada 3 butir, pertama, tetap mengajukan Gus Dur sebagai calon presiden PKB dan memperjuangkannya di KPU maupun Mahkamah Agung. Kedua, mengizinkan beberapa nama untuk menjadi cawapres mendampingi Wiranto. Nama-nama tersebut ialah Alwi Shihab, Mahfud MD, A.S. Hikam, Khofifah Indar Parawansa, dan Salahuddin Wahid. Ketiga, mengizinkan Salahuddin Wahid untuk menjadi capres alternatif mewakili aliansi partai-partai kecil.

Saat itu sudah banyak wartawan yang menunggu di rumah Gus Sholah untuk menanyakan tanggapannya terhadap keputusan Tim 9 DPP PKB. Sore harinya Gus Sholah kembali menerima telepon dari KH. Abdullah Faqih yang menegaskan sekali lagi bahwa ia tetap harus menjadi cawapres mendampingi Wiranto, tidak boleh berubah. "Saya sudah mengambil sikap untuk mengikuti nasihat KH. Abdullah Faqih itu."

Setelah maghrib Gus Sholah berangkat ke rumah Alwi Shihab untuk kemudian bersama-sama menuju kantor DPP Partai Golkar di

Slipi. Di sana diadakan pertemuan dengan DPP Partai Golkar, yang intinya menanyakan dukungan tertulis dari DPP PKB. Alwi Shihab menjawab bahwa surat berisi hasil keputusan rapat Tim 9 DPP PKB sedang dimintakan tandatangan Gus Dur. Diperkirakan pukul 21:30 surat tersebut sudah sampai di tangan DPP Partai Golkar. Malam hari sekitar pukul 23.00 ia diundang lagi ke Kantor DPP Partai Golkar bersama Ketua Umum atau Ketua DPP PKB, untuk memantapkan keputusan yang telah diambil di Langitan. Ternyata sampai pukul 01.00 dinihari tidak ada satupun anggota DPP PKB yang datang ke kantor DPP Partai Golkar.

Keesokan harinya pukul 08.30, DPP PKB dan DPP Partai Golkar bertemu dengan Wiranto dan saya di kediaman resmi Akbar Tandjung untuk membahas rencana deklarasi pencalonan Wiranto Wahid yang akan berlangsung pada tanggal 11 Mei 2004. Deklarasi itu akan diadakan di Assembly Hall Gedung Bidakara. Dalam pertemuan itu dibahas juga permintaan Gus Dur supaya Marwah Daud Ibrahim diizinkan oleh DPP Partai Golkar untuk dijadikan cawapresnya Gus Dur dan mendaftar ke KPU atas nama PKB.

Deklarasi pengalonan pasangan Wiranto-Wahid berjalan dengan baik dan meriah. Dalam kesempatan itu Gus Dur berkenan hadir. Akbar Tandjung dan Alwi Shihab menyampaikan .kata sambutan. Lalu Wiranto dan Salahuddin Wahid menyampaikan pidato pencalonan. Wiranto menyampaikan agenda yang dinamakan lima program penyelamat bangsa. Agenda pertama ialah penegakan hukum dan HAM serta terjaminnya demokrasi. Agenda kedua ialah pelaksanaan *good governance*. Agenda ketiga ialah peningkatan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, penyediaan lapangan kerja untuk melawan kemiskinan serta penyediaan pelayanan kesehatan sampai ke pelosok. Agenda keempat ialah perbaikan sistem pendidikan bagi masyarakat. Agenda kelima ialah rekonsiliasi nasional. Wiranto menyatakan

bahwa dirinya ingin menjadi presiden hanya untuk satu kali masa jabatan.

Dalam kesempatan menyampaikan pidato itu Gus Sholah menegaskan komitmern untuk pemberantasan korupsi yang dimulai dari tingkat paling atas, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. "Pemberantasan korupsi dari tingkat atas itu merupakan wujud keteladanan pemimpin, yang tentu harus dikontrol oleh masyarakat. Karena itu saya meminta masyarakat untuk mengingatkan dan meminta saya untuk mundur dari jabatan, kalau saya terpilih dan ternyata melanggar komitmen itu," tegas Salahudin Wahid. Dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan pengunduran dirinya dari Komnas HAM dan dari jabatan Ketua PBNU. Dengan mundur dari jabatan struktural Komnas HAM dan dari PBNU itu Gus Sholah ingin membuktikan konsistensi terhadap pandangannya selama ini. Menurut Gus Sholah, keberadaan NU harus dijaga kemandiriannya dari tarik menarik kepentingan politik praktis. "Karena saya mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden, saya harus mundur dari PBNU. Supaya NU tidak terseret-seret dalam pertarungan politik plipres. Saya harus fair," ujarya.

Salahuddin mengaku berat rasanya meninggalkan Komnas HAM yang baru dijalani selama 21 bulan. Kegiatan di Komnas HAM memberinya kesempatan untuk berbuat sesuatu secara langsung bagi masyarakat luas. Dia juga menyadari bahwa pilihannya menjadi cawapresnya Wiranto mendapat reaksi amat negatif dari kalangan aktifis HAM. Tetapi Salahuddin Wahid tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima pencalonan itu, mengikuti perintah para kiai sepuh.

Gus Sholah menyatakan bahwa dirinya telah mengambil keputusan dan menjatuhkan pilihan. "Saya harus berani menanggung beban yang akan timbul akibat pilihan itu. Saya sadar bahwa tugas berat tengah menanti saya untuk memenangkan pertarungan,

sesuatu yang belum pasti tetapi harus saya bayar dengan harga yang cukup mahal," kata Gus Sholah usai ditetapkan jadi calon wapres mendampingi Wiranto.

"Itulah kehidupan, yang selalu mempunyai unsur kejutan, unsur ketidakpastian dan juga unsur misteri. Tetapi karena saya menilai itu semua dengan niat baik, tidak untuk mengejar kekuasaan, tetapi untuk berbuat apa yang terbaik buat saya lakukan untuk masyarakat, apapun hasilnva insyaAllah saya akan bisa menerima dan menjalaninya."

Pada laga Pilpres Tahun 2004 itu terdapat empat pasang calon yang maju, yaitu Wiranto-Salahuddin Wahid (26.286.788 suara), Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi (31.569.104 suara), Amien Rais-Siswono Yudo Husodo (17.392.931 suara), dan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla (39.838.184 suara). ❖

sebagian buku terbitan

Forum Indonesia Satu (FIS)

Mendirikan Forum Indonesia Satu (FIS)

KEINGINAN Gus Sholah untuk 'pulang' dan membentuk komunitas baru di lingkungan NU tak dapat dibendung. Beliau ingin memberi sumbangsih dan baktinya kepada NU, bangsa dan negara setelah lama berkiprah dalam dunia kerja sebagai profesional. Indonesia tengah dilanda krisis ekonomi dan moneter, pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat, dan akhirnya jatuh setelah sekian lama berkuasa. Suatu hari di akhir milenium kedua, atas prakarsanya, beberapa aktivis muda NU dengan latar belakang partai politik dan profesi yang berbeda, bersepakat membentuk forum. Wadah untuk tempat bersilaturrahmi dan bertukar pikiran dalam berbagai persoalan bangsa.

Terbentuknya forum setidaknya menjelaskan dua hal. Pertama, melalui forum ini Gus Sholah ingin membuktikan gagasannya untuk membangun NU menjadi model masyarakat sipil yang kuat dan disegani. Kedua, melalui forum kecintaannya yang mendalam kepada para tokoh NU sekaligus generasi mudanya dapat diwujudkan melalui penulisan. Gus Sholah ingin menulis agar generasi penerus bisa mengetahui perjalanan kesejarahan NU dalam kehidupan bangsa melalui perjalanan hidup para tokohnya.

Maka terbentuklah wadah itu dengan nama yang keren: Forum Indonesia Satu, disingkat FIS. Forum ini baru diresmikan beberapa waktu kemudian pada tahun 2000 dengan nama Yayasan Forum Indonesia Satu.

Nama forum ini cukup fenomenal. Berdiri dengan filosofi "Indonesia Satu" yang berarti cinta persatuan dan anti perpecahan. Forum Indonesia Satu seolah menjadi jawaban atas persoalan bangsa yang tengah dilanda krisis transisi dan terancam pecah. Di bawah pimpinan Gus Sholah, lembaga berbadan hukum yayasan ini mengusung gagasan pembaharuan untuk memberi warna pada seluruh proses perubahan.

Membentuk YBB

Sebelum membentuk FIS bersama beberapa koleganya, Salahuddin Wahid terlebih dahulu membentuk sebuah yayasan bersama sejumlah aktivis NU Jakarta. Yayasan yang diberi nama Yayasan Bina Buana (YBB) itu didirikan untuk membantu memberdayakan masyarakat pesantren dan warga NU, baik yang ada di sekitar Jakarta maupun di luar Jawa. Selain KH. Salahuddin Wahid, tokoh NU yang terlibat dalam kepengurusan YBB antara lain adalah KH. Muhyiddin Ishaq, H. Zarkasyi Marzuki, Saifullah Ma'shum, Arief Mudatsir Mandan dan Ubay.

Melalui YBB yang bermarkas di bilangan Simprug, Jakarta Selatan, ini Gus Sholah mendedikasikan tenaga dan pikiran, bahkan uangnya, untuk memfasilitasi kelompok usaha kecil yang ingin berkembang. Untuk keperluan itu Gus Sholah membentuk tim yang dimotori oleh Yakub Chudlori dan Saifullah Ma'shum yang bertugas menyeleksi kelayakan proposal yang diajukan kelompok masyarakat dari sejumlah daerah. Pasca kerusuhan Mei 1998 yang berujung pada resesi ekonomi, banyak usaha yang dikelola masyarakat gulung tikar. Kemampuan Pemerintah untuk memfasilitasi dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat sangat terbatas. Melihat kondisi yang mengenaskan itu, nurani Gus Sholah tergerak untuk membantu masyarakat, meskipun dengan kemampuan yang terbatas.

Program pemberdayaan ekonomi melalui wadah YBB yang telah direalisasikan di antaranya ialah pengadaan peralatan/teknologi tepat guna berupa alat perontok padi buatan perusahaan Jepang yang sangat praktis dan mudah dioperasikan. Alat perontok padi itu didemontrasikan di sejumlah sentra-sentra penghasil padi di daerah pantura Jawa Barat, dan peralatan perontok padi itu disumbangkan ke kelompok tani di Purwakarta, Karawang, dan Gondanglegi Malang. Kemudian pemberdayaan pertani jahe di daerah Cigugur, Kuningan, melalui sebuah koperasi, serta pemberdayaan pedagang kaki lima di DKI Jakarta dan daerah Mataram NTB.

Pasca kerusuhan sosial horisontal di Maluku yang nyaris memporakporandakan keutuhan NKRI, Gus Sholah secara konkret membantu masyarakat muslim di Ambon, melalui organisasi NU setempat. Masyarakat waktu itu mengajukan permohonan kepada Gus Sholah untuk dibantu moda transportasi laut untuk menghubungkan antarpulau di Maluku. Waktu meletus kerusuhan di Maluku, memang banyak kapal pengangkut penumpang yang dibakar massa.

Untuk memenuhi harapan masyarakat Maluku itu, diadakanlah kegiatan konser musik yang disetting dalam bentuk opera, melalui acara Penggalangan Dana Kemanusiaan. Acara yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Mulia Senayan itu berlangsung meriah, dihadiri banyak artis Ibukota, dan berhasil menghimpun dana ratusan juta rupiah. Dana yang dikumpulkan dari kegiatan ini dibelikan perahu mesin dan disumbangkan ke masyarakat di Maluku melalui pengurus NU setempat.

FIS awalnya juga berkantor di bilangan Simprug Jakarta Selatan. Suatu tempat yang tidak jauh dari gedung Parlemen yang dihempas oleh gelombang demonstrasi menuntut perubahan total sistem bernegara dan kepemimpinan nasional. Presiden Soeharto mundur dan rezimnya telah sampai di ujung sejarah. Lahir pemimpin nasional

baru di bawah Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengemban amanah reformasi, menuntaskan transisi dan konsolidasi demokrasi. Indonesia kembali bersatu dengan konstitusi baru yang religius, sebagai negara hukum yang demokratis dan menghargai HAM.

FIS punya program dan agenda yang jelas serta SDM yang mumpuni. Beberapa tahun kemudian, setelah situasi mereda dan seluruh agenda reformasi telah dituntaskan kecuali amandemen konstitusi yang masih berlangsung, kantor FIS dipindahkan menjauh dari gedung Parlemen ke kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Meski letaknya di pinggiran, tetapi kawasan elit ini lebih tenang dan asri serta cocok untuk bekerja. Kantor FIS tidak pernah sepi, tamu berdatangan dari berbagai kalangan, diskusi dan kajian tak pernah ditinggalkan.

Di Pondok Indah FIS berkantor di Jalan Gedung Pinang Kav. V No. 22. Kantor itu menempati rumah yang disewa oleh Salahuddin Wahid, dan menjadi pusat aktivitas Salahuddin Wahid sehari-hari bersama koleganya.

Pada tahun 2002-2008 an nama FIS lumayan populer di kalangan aktivis Nahdliyin dan sebagian aktivis LSM di negeri ini. Banyak kegiatan yang diseleneggarakan oleh FIS, dengan motornya Gus Sholah. Lembaga ini aktif menyelenggarakan diskusi dan seminar, menciptakan jejaring sosial (social networking), mengadakan aksi sosial dan menerbitkan buku.

Nama FIS mengingatkan kita pada nama sebuah partai di Aljazair. Partai Islam, Front Islamique du Salut/FIS yang memenangkan pemilu demokratis tetapi dibatalkan oleh militer yang tak rela dengan kemenangannya. Parlemen hasil pemilu dibubarkan dan FIS sendiri dinyatakan sebagai partai terlarang.

Tak pelak lagi bayang-bayang kegagalan reformasi Indonesia menyelimuti benak aktivis NU dalam FIS. Apakah Indonesia akan selamat atau mengalami kegagalan dan kembali dalam cengkeraman

rezim militer. Pengalaman Aljazair memberi pelajaran berharga bahwa pilihan kita melakukan perubahan melalui reformasi dan bukan revolusi merupakan pilihan tepat yang meniscayakan seluruh kekuatan reformasi bersatu padu dalam satu barisan yang kokoh. Sebab kalau tidak satu barisan, kendali bisa terlepas dan kita akan kehilangan kontrol atas jalannya reformasi.

Divisi Penerbitan FIS

Gus Sholah sangat kuat daya ingatannya dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Kelebihan itu membantunya mudah mengayunkan langkah meraih keberhasilan. Tahun 2000 FIS menggelar konser amal yang cukup sukses. Gus Sholah perlu menghubungi teman-temannya untuk mendukung. Seorang staf yang membantu diminta untuk mencatat nama dan nomor telepon. Betapa terkejutnya dia. Gus Sholah mendektekan nama-nama dan nomor telpon itu tanpa melihat catatan, hafal semuanya. Salahuddin Wahid pernah bilang bahwa melihat catatan itu pekerjaan yang merepotkan dan ribet. Benar juga...!

Kehebatan serupa kembali terulang, ketika menyusun daftar nama-nama tokoh untuk dibuat tulisan biografinya. Gus Sholah hadir membantu mempercepat pendataan karena dengan mudah menyebut nama-nama dan nomor kontak. Cukup banyak nama yang mengemuka, terdaftar hingga 30-an nama. Itu artinya 30 judul buku akan digarap dan diterbitkan. Jumlah yang sangat ambisius. Bagaimana dengan realisasinya. Berapa yang berhasil diterbitkan.

Terbitlah buku tokoh perempuan. Bukan ibu Sholihah Wahid, ibunda Gus Sholah, tetapi ibu Asmah Syachruni, tokoh perempuan asal Kalimantan yang memimpin organisasi Muslimat NU selama tiga dekade. Gus Sholah begitu bangga dengan tokoh satu ini. Dalam kata sambutan sewaktu acara peluncuran buku itu, Gus Sholah menyatakan Ibu Asmah adalah tokoh perempuan lintas zaman,

tokoh nasional dari kalangan NU yang berhasil memimpin dan memberdayakan kaum perempuan. Masih ada sejumlah nama tokoh perempuan terpampang dalam daftar. Ada nama Ibu Mahmudah Mawardi, ibunda Chalid Mawardi, ada juga Ibu Umroh Mahfudzoh Wahab, ibunda Muhammad Fajrul Falaakh (alm) dan Muhammad Rhomahurmuzy. Dua nama yang cukup terkenal di lingkungan muslimat generasi awal. Sayangnya tidak sempat berlanjut.

Kemudian terbit buku-buku tokoh NU lainnya. Kebanyakan tokoh-tokoh nasional dari kalangan NU generasi pelanjut (bukan generasi perintis), seperti Subchan Z.E., Mohammad Zamroni, dan Mahbub Djunaidi. Tiga tokoh yang terlibat langsung dalam transisi yang gegap gempita di ujung senja rezim Soekarno dan awal rezim Orde Baru. Juga buku tentang Ny. Asmah Syahruni, tokoh Muslimat NU. Gus Sholah rupaya mengenal dengan baik kiprah perjuangan dan peranan mereka. Subchan (Ketua IV PBNU) adalah pimpinan MPRS yang mengeluarkan TAP mengerikan, yaitu TAP No. XXV/ MPRS/1966 berisi pembubaran PKI dan larangan ajaran-ajarannya di seluruh pelosok negeri. Gus Sholah mengibaratkan peran penting Subchan waktu itu mirip-mirip dengan Amien Rais pada era reformasi. Sayangnya Subchan tidak berlanjut karena wafat kecelakaan di Arab Saudi yang meninggalkan misteri.

Generasi muda NU bersyukur dengan kecakapan Gus Sholah menyederhanakan historiografi yang sering ruwet. Penulisan sejarah pergantian rezim yang didahului peristiwa G30S/PKI misalnya, itu tidak gampang dipahami. Apa yang sebenarnya terjadi pada negeri ini pada dekade 60-an itu. Tetapi Gus Sholah dapat menguraikannya dengan jelas, mudah dan ringan, termasuk menjelaskan posisi NU mengapa meminta pembubaran PKI dan mendukung Pak Harto waktu pergulatan politik tahun 1965-1967 sekaligus siapa-siapa yang tampil memainkan peran penting pada masa genting seperti itu.

Muhammad Zamroni, tulis Gus Sholah, memainkan peran penting dalam episode singkat yang menentukan. Bergerak memimpin demonstrasi berbulan-bulan menuntut Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) membuat gentar nyali Presiden Soekarno. Sementara Mahbub yang dekat dengan Bung Karno lebih banyak berperan ke 'dalam' bersama Ketua Umum PBNU KH Idham Chalid. Mahbub waktu itu adalah Ketua Umum PB PMII. Sedangkan Zamroni yang memimpin gerakan ekstra Parlememter selaku Ketua Presidium KAMMI yang terdiri atas organisasi ekstra kampus seluruh Indonesia, adalah Ketua II PB PMII.

FIS punya devisi penerbitan bernama PIS, Pustaka Indonesia Satu, yang dinahkodai Saifullah Ma'shum sebagai direktur. Lagi-lagi visi persatuan pada filosofi FIS dijadikan ruh dan acuan bagi program penerbitan. Selain menerbitkan buku-buku bermutu, FIS juga menerbitkan jurnal ilmiah bernama Civility untuk demokrasi dan *civil society*.

Sebagai penerbit, PIS menerbitkan buku-buku yang diusahakan sendiri oleh FIS maupun buku-buku karya perorangan. Karya Gus Sholah cukup banyak diterbitkan devisi ini (6 judul), menyusul Arief Mudatsir (4 judul), Saifullah Ma'shum (2 judul), Chozin Chumaidy (3 judul), Umar Basalim (1 judul), Slamet Effendy Yusuf (1 Judul), Ali Masykur Musa (1 judul), dan masih banyak lagi yang tak mungkin disebut satu persatu.

Buku-buku terbitan FIS/PIS terbilang laris di pasaran. Itu karena setiap terbit buku, FIS menggelar event peluncuran untuk promosi. Ada buku yang dialokasikan khusus untuk dibagikan kepada undangan yang hadir secara cuma-cuma. Acara lounching itu seringkali berlanjut menjadi ajang transaksi penjualan yang efektif dan menguntungkan.

Buku-buku FIS dijual melalui toko buku dengan sistem konsinyasi, FIS menerima sejumlah nominal tertentu dari total hasil

penjualan buku-buku yang laku terjual secara periodik. Ada juga yang dijual sendiri secara langsung kepada pembeli. Di kantor FIS ada gudang untuk menyimpan stok.

Buku-buku terbitan FIS/PIS sangat banyak, sebagian masih ada yang beredar di pasaran. Tetapi sebagian besar sudah habis dan tidak diproduksi lagi. Sekadar menyebut contoh, berikut hanya beberapa buku yang terpenting (urut berdasarkan tahun terbit):

- Reformasi Konstitusi Indonesia, Amandemen Pertama UUD 1945 (Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, 2000).
- Negeri di Balik Kabut Sejarah (Salahuddin Wahid, 2000).
- SU MPR RI 1999 Memilih Gus Dur Menjadi Presiden, (Arief Mudatsir Mandan, 2000).
- Menggagas Peran Politik NU (Salahuddin Wahid, 2001).
- Pola Ideal Hubungan Eksekutif-Legislatif (jurnal Civility, 2001)
- Mahbub Djunaidi, Seniman Politik dari Kalangan NU Modern (2001).
- Mendengar Suara Rakyat (Salahuddin Wahid, 2001).
- KPU & Kontroversi Pemilu 1999 (Saifullah Ma'shum, 2001).
- Subchan Z.E. Sang Maestro, Politisi Intelektual dari Kalangan NU Modern (2001).
- NU dan Islam Politik di Era Reformasi (Bahtiar Effendi, 2001).
- Pro-Kotra Piagam Jakarta di Era Reformasi (Umar Basalim, 2002).
- Asmah Sjachruni Muslimah Pejuang Lintas Zaman (2002)
- Karir Politik Anak Desa: Biografi Tosari Widjaja, (2004).
- Mendung di Atas Senayan, Refleksi Empat Belas Bulan DPR RI, 1 Oktober 2004-31 Desember 2005 (Arief Mudatsir Mandan, 2006).
- Muhammad Zamroni, Tokoh Kunci Angkatan '66 (2006)
- Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid: Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah (2008).

Divisi Litbang FIS

FIS bagi Gus Sholah merupakan tempat yang menyenangkan. Tempat berkumpul banyak teman mengadu gagasan. Gagasan NU sebagai model civil society yang kuat dan disegani mendapatkan pematangan dan pengayaan. Tiada hari bagi Gus Sholah selain tampil menyuarakan disiplin Khittah NU 1926 dan sembilan pedoman berpolitik warga NU. Gus Sholah menolak setiap upaya yang menyeret NU kembali terlibat politik praktis. Gus Sholah meminta PBNU agar terus menerus menjelaskan dan memberikan contoh konsistensi menjalankan Khittah NU 1926 dan sembilan pedoman berpolitik warga NU.

Dalam kaitan itu pula Gus Sholah mendirikan FIS, yakni agar terbangun aliansi strategis warga NU di Parlemen. Namun betapa kecewanya Gus Sholah ketika melihat kenyataan bahwa pada tahun 2002 Presiden KH. Abdurrahman Wahid harus lengser dalam Sidang Istimewa MPR. Jerih payahnya selama ini seperti nyaris tak berbekas. Presiden hanya didukung satu Fraksi PKB yang berhadapan dengan fraksi-fraksi koalisi partai pemenang pemilu. PKB dan PBNU yang selalu mendapat kritik Gus Sholah sebagai tidak taat Khittah NU kali ini seperti kehilangan kemampuan untuk bermain cantik memenangkan persaingan. Fraksi PKB tampak hanya mengandalkan "otot" dengan jumlah kursi yang tidak seberapa menghadapi kelompok kepentingan yang rakus kekuasaan.

Gus Sholah sebenarnya memimpikan terbentuk koalisi strategis seperti pada waktu terpilihnya Gus Dur sebagai presiden. Namun apa daya impian itu tinggallah impian, Presiden dilengserkan dalam masa jabatannya, meninggalkan luka sejarah yang tak mudah dilupakan.

"*Team Work*" FIS

Gus Sholah didukung oleh *team work* dengan SDM yang mumpuni. FIS didirikan sebelum ada Undang-Undang Tentang

Yayasan (UU No. 26/2001). Perbedaan mencolok tampak pada struktur kepengurusan. Struktur yayasan pasca terbitnya undang-undang terdiri tiga kamar, yaitu penasehat, pengawas, dan pengurus. Penasehat tidak boleh rangkap jabatan dan dilarang terima gaji atau imbalan apapun. Struktur FIS terdiri badan pendiri, badan pengawas dan badan pengurus serta belum ada larangan rangkap jabatan. Pendiri dan pengurus bisa saja bertukar tempat bahkan sekaligus bisa berperan sebagai kepala sebuah organ pelaksana sekaligus.

Sekadar mengenang orang-orang yang telah berjasa melambungkan nama FIS disebutkan di sini. Selain Gus Sholah sendiri sebagai pendiri, inspirator, penggerak organisasi, dan bertanggung jawab mengemban amanah organisasi, ada Saifullah Ma'shum, arek Malang, hafizh Al-Qur'an, politisi PKB (kelak jadi anggota FPKB DPR RI), membantu Gus Sholah di jajaran pimpinan, bertanggung jawab atas bekerjanya divisi-divisi yang merangkap Direktur PIS. Ia juga merangkap sebagai sekretaris FIS.

Kemudian Arief Mudatsir Mandan (alm), aktivis LSM, politisi PPP (kelak jadi anggota FPPP DPR RI), memperkuat jajaran pimpinan menggerakkan roda organisasi dan membangun jaringan. Arief Mudtasir Mandan dipercaya untuk menjadi ketua FIS. Lalu ada Ali Zawawi, staf ahli pimpinan DPR RI/ Koordinator bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), pernah menjadi Staf Khusus Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, lulusan PTIQ Jakarta, memperkuat jajaran divisi penerbitan, belakangan merangkap divisi keuangan sebagai bendahara umum. Tak ketinggalan juga ada Rofiqul-Umam Ahmad, staf ahli kesekjenan MPR RI, ahli hukum tata negara lulusan UI, bertanggung jawab menggawangi penerbitan jurnal Civility dan Divisi Litbang.

Semua SDM FIS, baik pendiri, penasehat, maupun pengurus dan anggota berperan sebagai narasumber dan narahubung bagi

jaringan masyarakat politik NU untuk perkuatan NU sebagai model masyarakat madani yang menjadi prasyarat negara maju. Mereka perlu kita sebut nama-namanya, agar jasa-jasa tetap bisa dikenang dan menjadi dokumen sejarah yang tak mudah terlupakan. Berikut nama-nama mereka sebagaimana disebut dalam akta pertama pendirian Yayasan FIS No. 3 Tanggal 9 November 2000 yang dikeluarkan Notaris Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A. di Jakarta.

Di jajaran Pendiri: Ir. H. Salahuddin Wahid (Ketua) dengan anggota-anggota H Muhammad Said Budairy (alm), Prof. Drs. H. Umar Basalim, Drs. H. Slamet Effendy Yusuf M.Si (alm), Drs. H. Tosari Widjaja, Drs. Ahmad Bagdja (alm), Dr. Arief Mudatsir Mandan (alm), Drs. Muhaimin Iskandar M.Si, dan Saifullah Ma'shum.

Dewan Pengawas: Prof. Drs. H. Umar Basalim (Ketua), anggota: Ir. H. Salahuddin Wahid (alm), Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (alm), Drs. KH. Yusuf Muhammad (alm), Drs. Masdar Mas'udi, Drs H Muhammad Ichwan Sam, Drs. Suryadharma Ali, H. Yahya Umar, Prof. Dr. Musdah Mulia.

Kemudian keanggotaan Badan Pengurus: Drs. Arief Mudatsir Mandan (Ketua), Drs. Ali Masykur Musa (Wakil), Drs. H. Saifullah Ma'shum (Sekretaris), Drs. H. Ali Zawawi (Wakil), H. Muhammad Taufik (Bendahara), Muhammad Prayitno (Wakil).

Anggota: Drs. H. Ahmad Mujib Rohmat, Drs. H. Chozin Chumaidy, Drs. Ahmad Muqowam, Dr. Masykuri Abdillah, Drs. Lukman Hakim Saifuddin, Rofiqul Umam Ahmad, SH, Drs. Amin Said Husni, Lilis Nurul Husna, Muhammad Saiful Hadi (alm), dan Dra. Maria Ulfah Ansor.

Melalui FIS Salahuddin Wahid mengonsolidasikan potensi dan kekuatan anak-anak muda yang tidak masuk wilayah politik kekuasaan, misalnya terlibat dalam aktivitas politik kenegaraan di Istana, membantu Presiden Abdurrahman Wahid, atau bergabung bersama kelompok politisi di Senayan, entah menjadi anggota

Parlemen atau staf ahli para senior yang kebetulan menjadi anggota DPR dari berbagai partai politik.

Pada awalnya banyak pihak yang menyalahpahami bahwa FIS dijadikan tunggangan oleh Salahuddin Wahid untuk membangun kekuatan menghadapi kepemimpinan Presiden Abdurraahman Wahid di Istana. Kesan seperti itu wajar terjadi, sebab sudah sejak lama Gus Sholah kerapkali berseberangan pandangan dan sikap dengan abangnya, Gus Dur. Di bawah binaan Salahuddin Wahid FIS memang dikenal kritis terhadap berbagai kebijakan politik yang muncul dari Istana. Ketika hampir semua kekuatan Nahdliyin berkolaborasi dengan kekuatan Istana, dan sebagian malahan cenderung memanfaatkan kekuatan kepemimpinan Gus Dur sebagai Presiden untuk kepentingan pribadi, Gus Sholah dengan FIS nya justru mengambil jarak dengan Istana. “Inilah cara saya membantu Gus Dur. Saya sangat ngeman Gus Dur dan berusaha memagari Gus Dur dari orang-orang yang justru hanya merongrong kepemimpinan Gus Dur,” ujar Salahuddin Wahid suatu waktu. ❖

Mendirikan

Gerakan Kebajikan Pancasila

Bersama sebagian pendiri

Gerakan Kebajikan Pancasila

Mendirikan Gerakan Kebajikan Pancasila (GKP)

TERAS belakang rumah Salahuddin Wahid di Jalan Bangka Raya No. 29 tidak bisa dibilang luas. Berukuran 10x16 meteran areal yang ditumbuhi rerumputan dan tanaman bunga itu sudah tentu tidak cukup representatif jika digunakan sebagai panggung untuk menggelar forum diskusi yang mengundang banyak orang. Tapi di teras belakang rumah Salahuddin Wahid yang agak sempit itulah pada tanggal 8 Desember 2015 digelar diskusi tentang Pancasila sekaligus acara peresmian lembaga yang diberi nama Gerakan Kebajikan Pancasila (GKP).

Teras belakang yang dipasang tenda dan digelar tikar dan karpet, disulap sebagai panggung diskusi. Puluhan aktivis kampus, aktivis LSM dan beberapa dosen muda berkumpul di sini, mendiskusikan tema yang lumayan berat, bagaimana strategi menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama generasi milenial, untuk menjadikan Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan bersama.

GKP lahir setelah melewati proses dan dinamika yang panjang. Tidak banyak yang tahu, sesungguhnya Yayasan GKP menjadi salah satu eksponen yang sejak awal aktif merintis upaya penguatan kelembagaan pada organ yang diberi tugas mengawal dan memasyarakatkan Pancasila, yang awalnya berwujud Unit Kerja Presiden - Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang kemudian berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Diakui

atau tidak, GKP punya andil besar dalam proses lahirnya BPIP dan dipilihnya Dr. Yudi Latif sebagai ketua, serta BPIP menjadi lembaga yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden dengan tugas dan peran yang lebih besar dan strategis.

Pada suatu sore di awal tahun 2015, Sabar Mangadoe Tambunan, Iman Partogi HS dan Saifullah Ma'shum datang ke kediaman Gus Sholah di Jalan Bangka Raya Jakarta Selatan. Dengan gayanya yang khas, sarungan berkemeja batik dan kopiah, beliau menyambut mereka.

Gus Sholah mendengarkan dengan seksama substansi pembicaraan mereka bertiga. Intinya mereka menyampaikan kerisauannya terhadap dinamika kehidupan politik, pasca kampanye Pilpres yang sarat oleh pembelahan sosial dalam bentuk kekerasan, hoaks, intoleransi dan politik kebencian, hingga janji kampanye Jokowi-JK dalam Program Nawacita.

Dengan sabar Beliau mendengarkan kisah dari mereka satu persatu.

"Pancasila adalah dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Saran saya segera bicarakan ini, suarakan ini, lakukan silaturahmi ke banyak pihak, nanti kita atur pertemuan seperti ini lagi, ketika saya ke Jakarta lagi, di rumah ini saja," begitu anjuran beliau sebagai sebuah kesimpulan, sebelum mengakhiri pertemuan.

Setelah pertemuan, Saifullah Ma'shum dan Sabar Mangadoe menugaskan Iman Partogi untuk menerjemahkan anjuran Gus Sholah menjadi sebuah konsep dan strategi komunikasi. Dituangkan ke dalam dua pokok pikiran, yaitu "Pancasila dan Silaturahmi".

Sejak saat itu mereka bertiga dan Gus Sholah intensif berkomunikasi. Setiap tahap penyusunan konsep gerakan, Gus Sholah banyak mengirimkan link referensi bacaan, termasuk tulisan beliau yang dimuat di media cetak maupun media online.

Pikiran dan gagasan Gus Sholah oleh ketiga orang ini dikembangkan dan didiskusikan di lingkungan dan jaringan masing-masing. Mereka membenarkan gagasan yang disampaikan Gus Sholah, dan antusias sekali dengan gagasan tersebut, bahkan sebagian mendorong agar dijadikan sebagai sebuah gerakan.

Pada bulan Maret 2015 mereka berkumpul lagi di rumah beliau. Agendanya adalah mempresentasikan pikiran dan gagasan beliau dalam bentuk skema dan tahapan operasional. Gus Sholah tampak semangat, dan memberi beberapa masukan dan koreksi kecil di sana-sini.

"Segera wujudkan saja gagasan ini. Mulai lakukan pertemuan-pertemuan, apa yang perlu dipersiapkan, kalo perlu tempat pakai saja rumah ini. Pakai kamar kerja saya yang di depan," ujar Gus Sholah.

Langkah konkret segera diwujudkan. Iman Partogi mulai mendesain logo dan nama gerakan. Untuk menentukan apa namanya, mereka mendapatkan inspirasi dari dua poin utama yang disampaikan Gus Sholah, yakni Pancasila dan silaturahmi.

Pada suatu kesempatan berdiskusi tentang Pancasila, terlontar ucapan dari Bernad Napitupulu kosa kata "kebajikan". Ya kebajikan. Menurutnya, yang sedang kita kerjakan ini adalah sebuah usaha untuk kebaikan bersama. Dari sini kemudian muncullah pemberian nama lembaga ini dengan Gerakan Kebajikan Pancasila, disingkat GKP.

Dipilihnya Salahuddin Wahid sebagai tokoh yang paling awal diminta responnya terhadap gagasan ini bukannya tanpa alasan. Salahuddin Wahid dalam kurun waktu terakhir banyak menulis tentang masalah kebangsaan, termasuk ideologi Pancasila. Gayung bersambut. Kehadiran anak-anak muda yang mendiskusikan implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa disambut oleh Salahuddin Wahid dengan penuh antusias. Sejak itu rumahnya

menjadi tempat pertemuan rutin bagi aktivis yang memiliki kepedulian terhadap nasib Pancasila yang sejak awal reformasi bak mati suri itu.

Selain Salahuddin Wahid, tokoh lain yang dimintai pandangannya ialah Buya Syafii Maarif. Pada akhirnya mereka berlima (Salahuddin Wahid, Syafii Maarif, Sabar Mangadoe Tambunan, Iman Partogi HS dan Saifullah Ma'shum) tercatat sebagai pendiri Yayasan Gerakan Kebajikan Pancasila. Banyak tokoh pernah diundang diskusi tentang Pancasila di kediamannya.

Gegap gempita reformasi tanpa disadari telah menciptakan suasana sepi bagi percaturan tentang ideologi bangsa, Pancasila. Pada saat yang bersamaan mulai muncul kecenderungan orang untuk mengais-kais sumber ideologi lain sebagai sumber dan norma kehidupan bersama di luar Pancasila. Termasuk memunculkan agama sebagai ideologi berkehidupan bersama, meski masih dalam lingkup yang terbatas, seperti norma dalam komunitas sosial tertentu. Kekerasan juga kian marak dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Suasana ini yang kemudian menimbulkan keprihatinan sebagian elemen masyarakat, tidak terkecuali Salahuddin Wahid dan beberapa orang yang kemudian mendirikan Gerakan Kebajikan Pancasila.

Di dalam kepengurusan Yayasan GKP sendiri nama Salahuddin Wahid tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina bersama Buya Prof. Dr. Syafii Maarif, Prof. Dr. Mahfud MD, Ir. Abdon Nababan dan Ir. Sabar Mangadoe Tambunan. Sedang di jajaran Dewan Pengurus tercantum nama Saifullah Ma'shum sebagai ketua umum, Charles Siahaan, Iman Partogi HS sebagai ketua-ketua, Syaiful Amin Lubis sebagai sekretaris umum, dan Buntulan Tambunan sebagai bendahara umum.

Menurut Gus Sholah, lahirnya Gerakan Kebajikan Pancasila ini dilatarbelakangi terus meningkatnya kekerasan di Indonesia, dan

bahkan frekuensinya makin meninggi. “Kekerasan terjadi di dalam keluarga, di depan publik, dan ada juga kekerasan atas nama agama. Kini juga yang paling dominan adalah kekerasan yang dilakukan Negara terhadap rakyatnya,” ujar Gus Sholah, dalam diskusi menjelang peluncuran Yayasan GKP.

Salahuddin menuturkan, kekerasan yang ditempuh oleh berbagai elemen masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalah. “Justru kekerasan yang terjadi tidak menumbuhkan rasa dan nilai kebajikan di negeri ini. Padahal jalan dan bentuk kebajikan di muka bumi ini demikian banyaknya,” ujarnya.

Gus Sholah merasa prihatin. Nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin lama semakin terkikis. Lima sila dalam Pancasila tidak lagi diterapkan secara konsiste oleh pemimpin negara ini. Menghadapi kondisi seperti itu, Salahuddin Wahid berkesimpulan bahwa nilai dan substansi yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara harus dilembagakan.

Sepanjang 2015 setidaknya ada lima kasus intoleransi. Salah satunya ialah yang terjadi pada 17 Juli 2015, peristiwa Tolikara di Papua. Ketika itu sedang dalam suasana Idul Fitri. Jika diamati, salah satu faktor yang membuat suasana semakin panas kala itu, adalah maraknya berita-berita hoaks di sosial media, ditambah opini-opini yang bernada provokatif dan tidak bertanggung jawab.

Suasana ini mendorong Sabar Mangadoe, Iman Partogi dan Saifullah Ma’shum untuk bertemu Gus Sholah, guna membahas langkah apa yang bisa dilakukan. “Komunitas seperti kita ini harus tetap bergerak, namun Negara juga harus terlibat. Ini kerja besar, kerja bersama. Pancasila harus dilembagakan agar disadari sebagai nilai bersama,” ujar Gus Sholah.

Kemudian Gus Sholah menyarankan kepada ketiga orang tersebut untuk mengundang beberapa tokoh intelektual yang tergolong produktif berkarya dalam soal-soal kebangsaan. “Kita

paparkan saja konsep dan tujuan dari gerakan kita ini secara terbuka agar menjadi gerakan bersama," tutur Gus Sholah lebih lanjut.

Pertemuan menyepakati untuk segera menyelenggarakan pertemuan dengan mengundang tokoh-tokoh yang dipandang memiliki *concern* yang besar tentang Pancasila.

Pada 19 Oktober 2015 berlangsung pertemuan yang direncanakan itu, bertempat di kediaman Gus Sholah. Hadir sejumlah tokoh, antara lain Buya Syafii Ma'arif, Yudi Latif, budayawan Radhar Panca Dahana, Indradi Kusuma (alm), dan beberapa tokoh alumni ITB.

Pertemuan menghasilkan beberapa catatan. Pertama, Gerakan Kebajikan Pancasila diharapkan segera membuat acara yang cukup besar, mengundang banyak pihak untuk memperbincangkan tema utama tentang Pancasila. Melalui acara tersebut diharapkan tercipta kohesi sosial, dan semua pihak bisa mengambil peran untuk menyuarakan kembali Pancasila di ruang-ruang publik.

Kedua, komunikasi politik di tingkat elit harus diintensifkan dan diingatkan pentingnya toleransi serta persatuan dan kesatuan sebagai modal sosial bersama. Untuk poin kedua ini Gus Sholah dan Buya Syafii Maarif yang akan menjadi aktor penggeraknya.

Untuk menyiapkan kedua agenda tersebut, Sabar Mangadoe, Saifullah Ma'shum dan Iman Partogi menyiapkan konsep dan disain kegiatan serta langkah operasionalnya.

Pada tanggal 8 Desember 2015, bertempat di teras belakang rumah Gus Sholah, berlangsung kegiatan yang dihadiri berbagai elemen bangsa, sebagai tindak lanjut dari pertemuan beberapa tokoh sebelumnya. Selain mendiskusikan tentang Pancasila, pada hari itu juga dideklarasikan lahirnya Gerakan Kebajikan Pancasila, sebagaimana disinggung dalam paragraf pembuka tulisan ini.

Selain di kediaman Salahuddin Wahid, persiapan pembentukan Yayasan ini juga seringkali memanfaatkan kantornya Saifullah

Ma'shum di Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) di gedung Wisma 46 lantai 14 Kota BNI 46 Jakarta Pusat. Sebelum diresmikan di rumah Gus Sholah, tercatat paling tidak lima kali diadakan diskusi kecil yang melibatkan beberapa aktivis dan pemerhati ideologi Pancasila di ruang pertemuan kantor IKI. Juga di kantor Buya Syafii Maarif, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Esoknya, berita deklarasi GKP tersebar luas di berbagai media massa. Banyak pihak menghubungi para pencetus gerakan dan ingin mengundang Gus Sholah untuk melakukan kegiatan serupa. Iman Partogi, Sabar Mangadoe dan Saifullah Ma'shum secara bergantian mendampingi Gus Sholah ke berbagai acara. Selain itu mereka juga melakukan safari silaturrahmi ke berbagai tokoh untuk menyuarakan gagasan tersebut dan menyampaikan terbentuknya lembaga ini.

Pada periode awal sejak diresmikan, kegiatan yang dilaksanakan GKP adalah diskusi, roadshow atau silaturrahmi ke beberapa tokoh nasional, dan mengadakan talkshow di sejumlah radio nasional. Sesuai dengan namanya, tema yang diangkat berfokus pada isu tentang aktualisasi ideologi Pancasila.

Direspon Pemerintah

Gayung pun bersambut. Pada pertengahan 2016 pengurus GKP dihubungi oleh pihak Pemerintah. Mereka diundang Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan (LBP), ke kantornya. LBP ingin mendengarkan konsep pelembagaan Pancasila yang diusulkan oleh GKP. Sebelumnya, Iman Partogi ditugaskan Gus Sholah untuk selalu mendampingi Yudi Latif ketika menghadiri forum diskusi yang membahas tentang Pancasila. Gus Sholah bersama GKP rupanya sedang mempersiapkan figur Yudi Latif untuk kelak bisa mengelola lembaga yang membidangi urusan Pancasila.

Komunikasi GKP dengan LBP berjalan baik dan intensif. Beberapa kali GKP diundang kembali untuk berdiskusi bersama

LBP. Beliau adalah tentara yang berpikiran terbuka dan pribadi yang mau mendengar. GKP diberi kesempatan dengan baik untuk mengutarakan semua gagasan yang ada. LBP juga menyumbangkan pikiran dan pandangan yang menyempurnakan konsep pelembagaan Pancasila yang diusulkan GKP tersebut.

Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan merupakan pejabat yang pertama kali menyambut semua ide dan gagasan dari GKP. Beliau juga berjanji untuk segera menindaklanjutinya. Dalam satu kesempatan Yudi Latif juga pernah diundang ke Istana untuk memaparkan konsep pelembagaan Pancasila.

Masih di tahun 2016, pengurus GKP bersama Yudi Latif kembali dihubungi LBP, agar mempersiapkan konsep dan struktur lembaga yang pernah diusulkan. Iman Partogi kembali ditugaskan oleh Gus Sholah untuk mendampingi Yudi Latif memaparkan konsep struktur lembaga Pancasila sebagaimana yang diminta LBP. Usai pemaparan dan diskusi, LBP berjanji akan segera membahas materi konsep yang dipaparkan dengan jajaran di Kementerian Polhukam, dan menyempurnakannya dari sudut pandang Pemerintah. Yudi Latif dan kawan-kawan dari GKP diminta mempersiapkan diri jika dalam waktu dekat lembaga ini akan diwujudkan.

Akhirnya LBP memenuhi komitmennya. BPIP dibentuk berdasarkan Keppres, dan menunjuk Yudi Latif sebagai ketuanya. Iman Partogi yang sejak awal aktif mengawal pemasaran gagasan GKP ke berbagai pihak, termasuk ke kantor Menko Polhukam, diangkat menjadi staf ahli di BPIP.

Itulah jejak sejarah yang tersimpan rapi di laci GKP dan di benak penggagas dan pengurus GKP, tentang benang merah lahirnya BPIP sebagai organ Negara dengan didirikannya GKP sebagai organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap nasib Pancasila.

Jika publik tidak banyak tahu tentang kiprah GKP dalam hubungannya dengan lahirnya BPIP, itu bisa dimaklumi. Karena

bagi GKP dan Gus Sholah, tidak penting publik tahu hal ini, tetapi yang jauh lebih penting adalah gagasan yang pernah disampaikan oleh GKP kepada Negara (melalui LBP) sebagian besar telah diwujudkan.

Ide dan gagasan GKP tentang Pancasila dan pelembagaannya, banyak terinspirasi dari ide dan gagasan Gus Sholah. ❖

Bersama
Said Aqil Sirodj

Bergabung di Komnas HAM

JALAN Latuharhary yang membentang di sisi utara Sungai Ciliwung di bilangan Jakarta Pusat tidak terlalu istimewa di mata publik Jakarta. Kecuali tidak jauh dari jalan ini ada rumah Jenderal Ahmad Yani, yang kini menjadi museum dan dinamakan Sasmitaloka, yang menyimpan dokumen dan info kesejarahan peritiswa keganasan PKI yang menyebabkan tewasnya Sang Jenderal. Selebihnya jalan ini tidak menyimpan keistimewaan apa-apa.

Tapi sejak reformasi bergulir dan Indonesia memiliki salah satu komisi negara yang mengurusi persoalan hak asasi manusia, yaitu Komnas HAM, jalan ini menjadi ramai. Di jalan inilah berdiri gedung dengan bangunan yang sudah agak tua yang dijadikan markas Komas HAM. Sejak ada Komnas HAM berkantor di kawasan ini, Jalan Latuharhary mulai familiar di publik Jakarta. Bahkan Jalan Latuharhary sering diidentikkan dengan Komnas HAM. Dari kantor Komnas HAM, di awal reformasi, banyak bermunculan tokoh pemerhati dan pejuang HAM di Indonesia.

Komnas HAM di masa-masa awal pembentukannya, cukup berwibawa dan eksistensinya diperhatikan. Ada Ali Said, mantan Menteri Kehakiman, yang dipercaya menjadi ketua pada periode pertama (1993-1995), dilanjutkan oleh Marzuki Darusman SH (1995-1996), kemudian Munawir Sjadzali, mantan diplomat dan Menteri Agama (1996-1998). Tokoh yang dikenal memiliki pemikiran keislaman yang progresif itu digantikan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara.

Pada bulan September 2002 Gus Sholah dilantik menjadi anggota Komnas HAM utuk periode 2002-2007, dan dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua II. Sebagai anggota Komnas HAM dia sering ditugasi untuk menerima pengaduan dari berbagai pihak.

"Pada awalnya saya merasa awam dengan detil dan lingkup tugas di lembaga ini. Tapi lama kelamaan saya merasa kerasan berada di dalamnya," ujar Salahuddin Wahid suatu waktu.

Terpilihnya Salahuddin Wahid sebagai salah satu dari beberapa anggota komisioner HAM dalam sidang di Komisi III DPR RI menyisakan kisah yang unik. Salah seorang anggota Komisi III terus terang kepincut pada sosok Salahuddin Wahid karena kejujuran dan keterusterangannya. Dalam sesi penyampaikan visi dan misi dan tanya jawab dengan anggota Dewan, Salahuddin ditanya apa yang mendorong dirinya untuk menjadi anggota Komnas HAM.

"Nggak tahu ya, kawan-kawan saya mendorong-dorong saya untuk maju. Ya saya ikuti saja. Saya sih awalnya tidak ada niatan sama sekali untuk menjadi angggota Komnas HAM," jawabnya dengan lugu.

Di lembaga tersebut banyak hal yang dapat ia lakukan, terutama memberi pertolongan bagi kalangan yang sedang mengalami masalah. Gus Sholah juga belajar sangat banyak di lembaga tersebut. Secara perlahan dia mulai memahami lingkup pekerjaan di Komnas HAM. Beberapa kawannya secara berseloroh menyebut bahwa lama kelamaan nama Komnas HAM identik dengan beberapa nama, termasuk nama Salahuddin Wahid. Maksud mereka mungkin ingin memuji kesungguhan Gus Sholah dalam "belajar" di Komnas HAM.

Salah satu dampak dari aktivitasnya di Komnas HAM adalah popularitas. Setiap kasus yang diadukan ke Komnas HAM memang mendapat liputan cukup baik dari media massa, terutama media elektronik. Banyak dari pengadu memang menghendaki Gus Sholah lah yang menerima pengaduan mereka. Selain itu Salahuddin

Wahid memang termasuk anggota Komnas HAM yang sering berada di kantor. Secara perlahan namanya dikenal oleh masyarakat luas, wajahnya dikenal oleh banyak orang.

Pengalaman hidup yang dilakoni sejak 1992 mengajarkan kepadanya untuk tidak mengejar suatu jabatan. "Tetapi kalau sudah diberi tugas dan tanggung jawab kita harus berusaha secara maksimal melaksanakan tugas tersebut," tuturnya. Gus Sholah yakin betul, kalau suatu posisi atau jabatan memang milik kita, "Tangan Tuhan" akan mengaturnya. Tentu kita harus berikhtiar, tetapi harus dalam batas-batas yang wajar dan tidak melanggar etika dan hukum. Batas yang wajar itu sulit untuk ditentukan secara pasti, amat individual dan situasional. "Teologi yang saya anut memang Asy'ariyah yang mendorong kita untuk berikhtiar sekuat kita bisa, tetapi pada akhirnya Allah SWT adalah pengambil kata putus," tuturnya.

Pada November 2002 Gus Sholah diberi tugas memimpin tim yang akan mengkaji hasil laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kasus Mei 1998. Tim melaporkan kepada Sidang Pleno Komnas HAM bahwa perlu dilakukan tindak-lanjut terhadap laporan TCPF itu, berupa penyelidikan pro-yustisia terhadap kasus tersebut. Maka pada bulan Januari 2003 dia diberi tugas untuk memimpin Tim Adhoc Penyelidikan Pro-yustisia terhadap Kasus Mei 1998. Selain anggota Komnas HAM, dalam tim itu juga banyak terlibat para aktivis HAM dari berbagai LSM yang umumnya masih amat muda, seusia anaknya. Dalam waktu sembilan bulan dia bekerja sama dengan mereka secara intens dalam menyusun program dan jadwal melakukan penyelidikan, memeriksa saksi, melakukan analisis dan menulis serta menyusun laporan.

Dalam bulan Agustus 2003, anggota Tim Adhoc Kasus Mei 1998 bekerja untuk menyusun draft laporan bertempat di Hotel Sofyan Cut Meutia. Saat istirahat makan siang, beberapa anggota tim, yaitu Ester Indahyani Yusuf, Lamria Siagian, dan Hotma Hutapea, mengatakan

kepadanya bahwa mereka ingin mulai upaya menawarkan gagasan untuk mengajukan Salahuddin Wahid menjadi calon presiden. Mereka menanyakan bagaimana komentar Gus Sholah.

Terus terang Salahuddin Wahid merasa kaget dan juga terharu atas kepercayaan mereka yang diberikan kepadanya, walaupun ia merasa usulan tersebut agak berlebihan. Akhirnya Gus Sholah balik bertanya, apa alasan mereka untuk menawarkan gagasan seperti itu. "Bukankah itu hanya wishfull thinking belaka? Kita tidak punya apa-apa, tidak punya dana, tidak punya partai, tidak punya segala-galanya," ujarnya kepada anak-anak muda itu. Menurut mereka, setelah bekerja bersama Gus Sholah selama lebih enam bulan, mereka melihat Salahuddin Wahid sebagai orang yang rendah hati, tulus, mau bekerja keras, punya kepedulian dan juga punya kemampuan. Menurut mereka Gus Sholah tidak lebih jelek dibanding tokoh-tokoh yang sudah ada. Mereka juga sadar bahwa peluang itu ada walaupun kecil. Tetapi sekecil apapun peluang itu, tetap harus diperjuangkan.

Pada prinsipnya kawan-kawan tadi punya pandangan sama dengan kawan-kawan di Gerakan Jalan Lurus terhadap diri Salahuddin Wahid. Setelah menyelesaikan laporan akhir Tim Adhoc Penyelidikan kasus Mei awal September 2003, dengan segala keterbatasan (dana, waktu dan tenaga), mereka mulai melakukan langkah-langkah mempromosikan Salahuddin Wahid ke publik. Dalam hal ini mereka bekerja sama dengan kawan-kawan lain yang selama ini sudah dekat dengan Gus Sholah, l sebelumnya seperti Saifullah Ma'shum, Dokter Ali Mahsun, Gugus Joko Waskito, Arifin, Ali Syafaat dan lain-lain. Kawan-kawan ini umumnya mantan aktivis Ansor, PMII dan HMI yang dalam beberapa tahun terakhir intens berdiskusi dengan Gus Sholah mengenai berbagai persoalan kebangsaan. Mereka juga membantu beberapa kegiatan Salahuddin Wahid di FIS dan di forum lain.

Selain kawan-kawan di atas, ada unsur dari kelompok masyarakat lain yang menghubungi Gus Sholah untuk tujuan yang sama. Mereka mewakili kelompok keluarga mantan tapol/napol untuk peristiwa 1965. Gus Sholah mengenalnya pada bulan Maret 2004 ketika berkunjung ke kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung untuk bertemu dengan para mantan tapol dan keluarganya. ❖

Menjadi Kolumnis

MENCARI dokumen atau arsip dari karya tulis Salahuddin Wahid yang dibuat pada tahun 80-an, atau masa-masa sebelum itu, bak mencari jarum di tumpukan jerami. Sulit ketemu, atau memang tidak pernah ada. Jika di kemudian hari, sampai akhir hayatnya, Gus Sholah dikenal termasuk orang yang aktif dan produktif menulis, itu terjadi mulai awal tahun 1998-an. Keahliannya dalam menulis datang terlambat, sebagaimana juga terlambatnya Gus Sholah tampil sebagai figur nasional yang diperhitungkan.

Berbeda dengan kakaknya, Gus Dur, yang bakat dan keahlian menulisnya sudah tampak sedari muda, dan produktif, dan terus ditekuni hingga akhir hayat. Tapi dengan Gus Sholah?

Jika ada sesuatu yang patut dikasih ucapan terima kasih oleh Salahuddin Wahid berkenaan dengan dunia tulis menulis, sesuatu itu tiada lain adalah "krisis ekonomi" yang melanda Indonesia sejak tahun 1997.

Sejak krisis moneter yang diikuti dengan krisis ekonomi dan krisis politik menerpa masyarakat di Tanah Air pada tahun 1997-1998, banyak perusahaan yang rontok. Termasuk perusahaan kontruksi dan konsultan yang didirikan Gus Sholah. Kantor PT Mirazh miliknya, di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, tidak lagi berdenyut oleh kegiatan bisnis. Selama beberapa bulan sejak perusahaannya bangkrut, tidak ada aktivitas yang dilakoni Gus Sholah, kecuali berdiskusi ringan dengan sejumlah koleganya.

Dari aktivitas diskusi ke diskusi itulah, Salahuddin Wahid mulai melatih diri dan membiasakan diri membuat tulisan.

"Dik Saiful, saya lagi membuat tulisan. Tolong kalau Sampeyan ada waktu tulisan saya dibaca-baca dan diperbaiki," kata Gus Sholah melalui telepon di suatu siang, di awal tahun 1998-an. Permintaan itu segera dipenuhi oleh Saifullah Ma'shum, yang sejak akhir tahun 1997 an sudah membantu Gus Sholah dalam berbagai kegiatan. Setelah dilakukan perbaikan di sana-sini, tulisan tersebut diserahkan kembali ke Gus Sholah.

Menurut penuturan Saifullah Ma'shum, tidak sekali-dua kali permintaan untuk membaca dan mengedit tulisan dari "penulis pemula" Salahuddin Wahid itu. Melainkan berkali-kali.

Awalnya, proses editing memakan waktu lumayan lama. Maklum, banyak redaksi dan susunan kalimat yang perlu dipoles. Setelah beberapa kali menulis, dengan materi yang berbeda, Saifullah mengaku tidak banyak lagi memperbaiki draft tulisan yang disodorkan kepadanya.

Tibalah suatu saat, di mana Gus Sholah meminta pertimbangan bagaimana kalau tulisan yang sudah diedit itu dikirim ke koran. Tidak lama kemudian, sebuah artikel dengan penulis Salahuddin Wahid dimuat di media surat kabar Republika. Itulah artikel pertama dari penulis pemula, Salahuddin Wahid. Belum sah ketika itu jika Gus Sholah disebut sebagai kolumnis.

Sejak itu Gus Sholah semakin keranjingan menulis. Menulis dan menulis. Hampir setiap hari membuat tulisan. Tidak hanya ke Saifullah Ma'shum Gus Sholah menyodorkan tulisan untuk dikoreksi, sebelum dikirimkan ke redaksi surat kabar. Permintaan untuk mengoreksi tulisan terkadang juga disampaikan kepada Ali Zawawi, atau ke Rofiqul Umam (keduanya aktivis PMII dan Ansor), juga ke Arifin SJ (aktivis HMI yang juga dekat dengan Gus Sholah). Biasanya, untuk memperbaiki tulisannya, para "editor" muda itu dipersilakan duduk di kursinya, di ruang kerjanya, karena dia menuliskan gagasannya itu di komputer yang berada di meja

kerja. Sambil menunggu proses perbaikan, seringkali Gus Sholah memainkan gitar, sambil menyanyikan satu-dua buah lagu.

Dalam perkembangan berikutnya, sejumlah "editor" muda yang sering dimintai bantuan Gus Sholah untuk mengoreksi tulisannya sebelum dikirim ke surat kabar sudah tidak diperlukan lagi. Materi tulisan, struktur tulisan, gaya bahasa dan gaya tulisannya sudah baik. Selain itu kemampuan Salahuddin Wahid dalam menulis artikel dengan intensitas yang tinggi sangat luar biasa, sampai-sampai mengagetkan mereka. Kawan-kawan muda yang awalnya membimbing Gus Sholah dalam keterampilan tulis menulis, pada akhirnya tertinggal jauh dari Gus Sholah dalam produktivitas dan keajegannya menulis artikel.

Lucunya, ada sejumlah aktivis muda NU yang sampai beberapa waktu sesudahnya masih menyangka jika artikel-artikel yang hampir setiap minggu muncul di beberapa koran itu bukan murni tulisan Gus Sholah, melainkan tulisan Saifullah Ma'shum atau teman-teman mudanya Gus Sholah yang lain.

Keterampilan dan produktivitasnya dalam menulis tidak bisa dilepaskan dari karakter dan sikapnya yang sangat disiplin, tekun, cermat dan kemauannya belajar yang kuat. Ketika keterampilan menulis telah terasah, maka mengalir terus tulisan demi tulisan dari tangannya, karena stock atau bahan tulisan tersedia banyak di kepalanya.

Menggunakan alat komunikasi communicator Salahuddin bisa menulis artikel, di mana saja dan kapa saja. Di sela-sela kesibukan, di pesawat, di ruang tunggu bandara, bahkan sambil menerima tamu sekalipun, Gus Sholah mudah saja menulis. Menulis seakan telah menjadi *life style* baginya.

Berdasarkan penuturan Gugus Joko Waskito, anak muda NU yang pernah mandampingi Gus Sholah, dia tidak pernah mengambil uang honoraria dari menulis artikel di koran. Karena tidak diambil-

ambil honor menulisnya dikirim melalui wesel pos. Ada yang Rp 500.000, Rp 750.000 dan yang tertinggi Rp 1.000.000.

Kumpulan karya tulis Gus Sholah diterbitkan menjadi beberapa buku, yaitu Mendengar Suara Rakyat, Negeri di Balik Kabut Sejarah, Jihad Akbar Melawan Korupsi, Ikut Membangun Demokrasi, Dialog Gus Dur-Mas Sholah, Berguru pada Realitas, Meneladani Eyang Wahid, dan beberapa dokumen lain. ❖

Berkiprah di Nahdlatul Ulama

MESKI tidak sedominan peranan yang dilakukan abangnya, KH. Abdurrahaman Wahid, di Nahdlatul Ulama, pada awal tahun 1980-an Gus Sholah sudah terlibat dalam proses pengkajian dan gerakan agar NU kembali ke khitthah 1926, yakni kembali pada semangat awal kelahirannya. Gagagasan itu lahir dari sekelompok tokoh muda NU yang sering berkumpul dan berdiskusi di rumah HM. Said Budairy di Jalan "G", daerah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Selain Salahuddin Wahid, mereka antara lain adalah Fahmi D. Saifuddin

Zuhri, Said Budairy, Slamet Effendy Yusuf, Ichwan Syam, Umar Basalim, Abdullah Syarwani, Cholil Musyaddad, Mustofa Zuhad, Masdar Farid Mas'udi dan beberapa tokoh lain. Dari diskusi-diskusi yang sangat intensif kala itu, muncul pemikiran dan gerakan yang tidak terbendung, yaitu perlunya NU kembali ke Khitthah 1926.

Salahuddin Wahid dkk. waktu itu menyimpulkan, NU sebagai jamaah mengalami kemandegan karena pimpinan NU menghabiskan energinya di panggung politik praktis, dalam hal ini PPP. Para pimpinan NU lebih banyak berkantor di Jalan Diponegoro (kantor DPP PPP) daripada di Jalan Kramat Raya 164 (kantor PBNU). Kelompok G terus mengintensifkan pertemuan-pertemuannya dengan memanfaatkan fasilitas Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LKK) NU yang kebetulan mempunyai program sosialisasi keluarga berencana, baik yang didanai lembaga-lembaga donor dari luar maupun Pemerintah. Lalu muncullah inisiatif agar pelaksanaan program-program LKK dimanfaatkan untuk mengundang kiai-kiai secara lebih luas dalam rangka menyosialisasikan gagasan khitthah tersebut. Di antara ulama yang diundang adalah Kiai Sahal Mahfudz dan Gus Dur.

Di antara anggota kelompok G, Slamet Effendy Yusuf-lah yang sering diberi tugas untuk menyiapkan draft konsep sekaligus mengorganisir pertemuan-pertemuan. Maka diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 24 kiai, bertempat di sebuah hotel di depan Plaza Senayan. Waktu itu sebenarnya tidak ada uang untuk membiayai acara tersebut. Akhirnya melalui Fahmi Saifuddin, Slamet Effendy Yusuf dipanggil oleh KH. Saifuddin Zuhri. Dalam pertemuan itu Kiai Saifuddin Zuhri menyampaikan pada Slamet bahwa beliau sedang mendapat rejeki yang bisa dipakai untuk membiayai acara pertemuan kiai-kiai tersebut. Dari pertemuan itu dibentuklah "Tim Tujuh" yang diketuai Gus Dur dan wakil ketua Fahmi Saifuddin. Tim ini bertugas untuk menyusun tentang strategi pemulihan

Khitthah. Akan tetapi karena Gus Dur mungkin terlalu sibuk, konsep itu tidak kunjung selesai, maka Fahmi Saifuddin meminta Slamet Effendy Yusuf untuk segera menyelesaikannya agar bisa segera disosialisasikan. Oleh Slamet konsep itu segera dikerjakan dan bisa diselesaikan dalam waktu cepat, kemudian disampaikan kepada Fahmi Saifuddin. Ketika itu Slamet menyampaikan kepada Fahmi agar konsep itu terlebih dahulu diserahkan kepada Gus Dur sebagai ketua Tim Tujuh untuk diperiksa sebelum disosialisasikan.

Pada awal tahun 1980-an, terjadi pertentangan yang cukup tajam antara kelompok Cipete (kubu Kiai Idham Chalid) dan kelompok Situbondo yang dikomandani oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Menghadapi situasi seperti itu Kelompok G bersikap netral, tidak berpihak pada salah satu kelompok. Hanya saja belakangan kelompok Situbondo-lah yang cepat merespon dan menerima secara baik konsep yang ditawarkan oleh Kelompok G. Terlebih kala itu berbagai kritik dilancarkan cukup keras kepada Idham Chalid yang dinilai membuat NU sebagai jama'ah terbengkalai karena pimpinan PBNU terlalu sibuk pada urusan politik praktis.

Gagasan atau konsep strategi pemulihan Khitthah NU tersebut terus bergulir dan mendapat respon dari para kiai sampai akhirnya menjadi ketetapan di Muktamar ke-26 NU di Situbondo tahun 1984. Peran Slamet di Muktamar tersebut berlanjut dengan menjadi sekretaris Komisi Khitthah. Menurut pengakuan Slamet, dalam perumusan di Komisi Khitthah sifatnya hanya menyempurnakan konsep yang sudah ia buat sebelumnya, dengan dilakukan penambahan di sana-sini. Prinsip dasar Khitthah dalam rumusan itu adalah agar NU lebih berkonsentasi pada kerja-kerja dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakat, serta mengundurkan diri dari dunia politik praktis, dalam hal ini keluar dari PPP. NU harus lebih banyak bekerja untuk memajukan masyarakat, bukan mengejar kekuasaan.

Momentum Khitthah sangat penting bagi perjalanan NU selanjutnya. Melalui Khitthah, ada beberapa hal penting yang akan dicapai, yakni; pertama, agar NU kembali pada jati diri sebagai pergerakan, sosial maupun moral, kembali ke jatidiri sebagai jam'iyah ijtima'iyyah, sifat-sifat waro'nya kembali kuat; yang kedua, mengembalikan peranan ulama sebagai sentral komando di NU. Sebab sebagai jam'iyyah diniyyah, posisi tanfidziyah itu seharusnya hanya sebagai pelaksana, jadi karakter keulamaannya jelas terlihat; yang ketiga, agar NU kembali pada aspek kewargaan, artinya bukan sebagai organisasi politik dan memberi kebebasan kepada warganya untuk mengambil peran dan pilihan politik yang bermafaat bagi keluarga besar NU.

Kelompok G "Baru"

Kelompok G bubar tidak lama setelah berhasil mengantarkan Gus Dur menjadi ketua PBNU dan melakukan reformasi dalam tubuh NU, dalam Muktamar NU di Situbondo tahun 1984. Hampir semua aktivis Kelompok G berbeda haluan dengan Gus Dur, lebih karena perbedaan strategi, yang kemudian Gus Dur meninggalkan mereka.

Sebenarnya Kelompok G tidak benar-benar bubar sesudah itu. Terutama menjelang dan sesudah Muktamar NU di Cipasung 1994, yang dicatat sebagai muktamar NU yang "panas", sejumlah orang sering mengadakan pertemuan di rumah HM. Said Budairy, Mampang Prapatan, atau terkadang di Kantor Yayasan Saifuddin Zuhri, di Jl. Darmawangsa Raya Kebayoran Baru.

Eks anggota Kelompok G yang aktif mengadakan pertemuan ketika itu ialah Fahmi D Saifuddin, Said Budairy, Slamet Effendy Yusuf, Salahuddin Wahid, M. Ichwan Sam, Umar Basalim, dan Masdar F. Mas'udi, serta Saifullah Ma'shum sebagai pendatang baru. Saifullah Ma'shum yang waktu itu masih menjadi sekjen PP

GP Ansor, diminta bantuan untuk mengelola pertemuan tersebut; dari menyebar undangan, membuat notulasi dan merumuskan rencana tindak lanjutnya, serta mengoordinasi pertemuan tim berikutnya.

Agenda yang sering dibahas dalam pertemuan Kelompok G "Baru", ialah tidak jalannya gagasan dan program Khitthah NU 1926 dalam implementasi di lapangan, terutama bidang pendidikan dan pengembangan ekonomi warga NU. Kelompok ini merasa prihatin melihat kondisi NU waktu itu. Platform dan agenda perjuangan yang telah mereka rumuskan menjelang Muktamar NU di Situbondo, ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Mereka ini dikenal sebagai tokoh-tokoh NU yang kritis dan berani mengoreksi kebijakan dan langkah yang ditempuh Gus Dur waktu itu.

Eksistensi kelompok diskusi ini akhirnya memunculkan ketegangan di internal NU. Gus Dur menuduh kelompok ini punya agenda melengserkan Gus Dur dari kepemimpinan PBNU. Padahal, menurut penuturan Gus Sholah, tidak ada sedikit pun agenda yang dibangun oleh kelompok ini – yang dimotori oleh Fahmi D Saifuddin, orang yang sangat dekat dengan Gus Dur dan Gus Dur sering menjuluki sebagai orang "gila NU" – untuk melengserkan Gus Dur dari tampuk kepemimpinan NU. Yang mereka lakukan ialah mengritisi kondisi PBNU dan sejumlah langkah politik Gus Dur. Hanya itu, tidak lebih.

Bermula dari Muktamar NU di Lirboyo

Gus Sholah, sebagaimana aktivis NU seangkatan dengannya, memiliki imajinasi tentang bagaimana sosok ideal NU ke depan. Sebagai orang yang berlatar belakang pendidikan umum, eksakta lagi, dan berkecimpung dalam dunia profesi di luar habitat NU, ia merasakan kalau perkembangan NU tidak sebagaimana yang ia bayangkan. Ia memendam ketidakpuasan dengan kondisi yang

terjadi di NU. Tak aneh kalau dalam berbagai kesempatan Gus Sholah melontarkan kritiknya kepada kepemimpinan NU, bahkan termasuk ketika NU dinahkodai kakaknya, KH. Abdurrahman Wahid. Lontaran kritik dari Gus Sholah terhadap perkembangan NU lebih masif dan tajam lagi saat PBNU berada di bawah kepemimpinan KH. Hasyim Muzadi dan KH. Said Aqil Siroj.

Mungkin karena interaksinya yang lebih intens dengan tokoh NU seperti Dr. H. Fahmi D Saifuddin, HM. Said Budairy dan KH. Samet Effendy Yusuf, ketiganya sudah terlebih dahulu wafat (Allahu Yarhamhum), pemikiran dan pandangannya tentang NU mirip dengan pemikiran dan pandangan mereka. Sama dalam satu mainstream dan pakem ketika mengimajinasikan NU ke depan.

Karena antara bayangan tentang NU yang diidealkan dengan realitasnya terdapat gap yang lumayan jauh, Gus Sholah kemudian terpanggil untuk ikut terlibat langsung dalam upaya konkret memperbaiki NU. Atas dorongan beberapa kawan dan sejumlah kiai, Salahuddin Wahid memutuskan maju sebagai kandidat Ketua Umum PBNU dalam Muktamar NU di Pesantren Lirboyo, Kediri pada November tahun 1999. Ia bersaing dengan KH. Hasyim Muzadi (yang waktu itu mendapat dukungan politik dari Presiden Abdurrahman Wahid) dan KH. Said Aqil Siroj.

Sebelum maju untuk berkompetisi, Salahuddin Wahid secara intensif banyak berkonsultasi dengan kakak iparnya, Dr. Fahmin D. Saifuddin, Slamet Effendy Yusuf, Saifullah Ma'shum dan beberapa tokoh NU lain, yang akhirnya mereka itu menjadi satu barisan dalam tim pemenangan Gus Sholah. Melalui mekasnisme pemilihan yang sangat demokratis, dalam Muktamar ini Salahuddin Wahid mendapatkan dukungan 57 suara, Said Aqil Siroj 72 suara dan Hasyim Muzadi mendapatkan 92 suara. KH. Hasyim Muzadi yang yang sejak awal mendapat dukungan politik dari Presiden Gus Dur dinyatakan sebagai pemenang.

Kekalahan Salahuddin Wahid di arena Muktamar Lirboyo Kediri ini seperti sudah diduga oleh beberapa pihak sebelumnya. Forum muktamar di Kediri melahirkan dampak yang luar biasa bagi Salahuddin Wahid dalam kancah nasional. Banyak yang merasa surprise dengan keberhasilan Gus Sholah mendapatkan dukungan dari cabang-cabang NU, meskipun yang dihadapi adalah Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada Muktamar NU berikutnya, tahun 2004, yang berlangsung di Boyolali, Gus Sholah tidak ikut ambil bagian dalam berkompetisi. Suasana muktamar ketika itu memang diselimuti oleh susana bergabung oleh musibah jatuhnya pesawat Lion Air di bandara Adi Soemarno Solo, yang menewaskan tokoh NU KH. Yusuf Muhammad dan beberapa tokoh lain.

Tahun 2009 kota Makasar menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-32. Di muktamar yang dihelat di Asrama Haji Sudiang itu, atas dorongan sejumlah kiai dan beberapa PCNU, Gus Sholah kembali maju berkompetisi. Sebenarnya beberapa pihak, terutama kalangan keluarga, mencegah agar dirinya tidak lagi mencalonkan diri, mengingat faktor usia.

Akhirnya ia maju. Tetapi yang menarik, dalam muktamar kali ini, Gus Sholah sejak awal melakukan kolaborasi dengan dua orang tokoh NU lain yang sama-sama berniat maju sebagai kandidat ketua umum PBNU, yaitu KH. Slamet Effendy Yusuf dan KH. Masdar F. Mas'udi.

Ketiga orang ini memiliki keprihatinan yang sama tentang NU, dan apa gagasan yang ditawarkan untuk memperbaiki NU ke depan sehingga eksistensi NU sesuai dengan yang mereka idamkan. Critical point yang mereka angkat ke depan publik, adalah Kemudian mereka bertiga berkeliling ke daerah-daerah untuk berdiskusi dengan pimpinan wilayah dan pimpinan cabang NU. Ke mana-mana hampir selalu bertiga. Mereka bersepakat untuk menggalang dukungan

untuk sama-sama maju di arena Muktamar NU tahun 2010, dengan satu komitmen: siapa saja nanti yang mendapatkan dukungan paling banyak dari muktamirin, dialah yang harus didukung. Kesepakatan ini dibuat kira-kira setengah tahun menjelang pelaksanaan Muktamar.

Pada Muktamar Makasar ini Said Aqil Siroj mendapatkan 294 suara, unggul dari SEY yang memperoleh 201 suara. Sementara Salahuddin Wahid mendapatkan 83 suara, Ahmad Bagja 34 suara, Ulil Abshar Abdalla 22 suara, Ali Mashan Musa 8 suara, dan Masdar Farid Mas'udi 6 suara. Di dalam Tata Tertib Pemilihan persyaratan minimal untuk menjadi calon adalah 99 suara. Dengan demikian yang bisa maju pada tahap pemilihan hanya dua orang, yaitu KH. Said Aqil Siroj dan KH. Slamet Effendy Yusuf.

Karena itu Salahuddin Wahid dan Masdar Farid Mas'udi mengarahkan pendukungnya untuk memilih Slamet Effendy Yusuf. Salahuddin Wahid sendiri waktu itu dilobi oleh banyak pihak agar bergabung dan mengarahkan pendukungnya untuk memilih calon lain, yaitu KH. Said Aqil Siradj. Permohonan ini ditolak, bukan karena ia tidak suka kepada Said Aqil Siroj, tetapi lebih pada sikap moral yang harus ditegakkan, bahwa memenuhi komitmen dan janji kepada orang lain harus dijunjung tinggi. Salahuddin Wahid tidak mau mengkhianati komitmen yang telah dibuatnya bersama Slamet Effendy Yusuf dan Masdar Farid Mas'udi.

Concern Gus Sholah berjuang di NU dan bertekad maju sebagai calon ketua umum PBNU memiliki latar pemikiran yang panjang dan dalam. Sudah lama ia merenung, dan merasa tidak happy, menyaksikan kondisi warga Nahdliyin yang menurutnya masih terus begitu-begitu saja. Secara organisasi, NU dinilai masih tertinggal dari organisasi keagamaan lain. Secara ekonomi, kondisi warga NU masih banyak yang tidak sejahtera dan tidak cukup punya kemampuan untuk menjadi lebih mandiri.

Mempermalukan di Depan Pendiri

Sesudah dua kali ikut memberikan pembelajaran dalam proses demokrasi di dalam tubuh NU dengan berlaga di muktamar NU (Muktamar Kediri dan Muktamar Makassar) sesungguhnya Gus Sholah sudah tidak tertarik lagi mengikuti muktamar tahun 2015 yang berlangsung di tempat kelahiran NU, yaitu Jombang. Selain faktor usia, ketidaktertarikan itu juga disebabkan oleh konstelasi "politik" di dalam tubuh NU yang menurutnya kurang menguntungkan.

Di muktamar inilah dilakukan perubahan besar mengenai tatacara pemilihan Rais Am dari pemilihan langsung one man (PCNU/PWNU) one vote, menjadi pemilihan melalui *Ahlul Halli wal-Aqdi*. Menjelang Muktamar berlangsung, sudah ada indikasi adanya keterbelahan sikap pengurus NU di daerah terhadap perubahan sistem pemilihan Rais Am ini.

Entah kenapa, banyak aktivis NU, baik struktural maupun nonstruktural, yang kemudian mendorong Gus Sholah untuk maju, berpasangan dengan KH. Hasyim Muzadi yang didorong untuk menduduki posisi Rais Am. Seperti biasa, Gus Sholah menyikapi desakan untuk maju itu dengan kalem. Mengalir saja, sambal melihat situasi.

Menjelang pelaksanaan muktamar, ternyata opsi memasangkan KH. Hasyim Muzadi dengan Gus Sholah terus menguat. Apalagi KH. Hasyim Muzadi sendiri banyak melakukan konsolidasi ke bawah, dengan memanfaatkan sejumlah isu dan tema yang sensitif. Ada yang mengalkulasi, dua tokoh ini masing-masing masih punya pendukung yang solid. Karena itu, santer gerakan yang mencoba memotong kekuatan duet Hasyim Muzadi-Salahuddin Wahid. Sesaat menjelang pembukaan muktamar, masalah sistem pemilihan Rais Am menjadi indikator dan representasi dari dukungan NU di bawah, apakah mendukung Kiai Said, atau mengusung duet Kiai Hasyim

Muzadi dan Gus Sholah. Jika mendukung perubahan pemilihan, berarti mendukung Kiai Said, jika menolak, berarti pendukung Gus Sholah.

Sebagaimana diketahui, akhirnya muktamar yang diselenggarakan di alun-alun kota Jombang itu berlangsung ricuh, bahkan berdasarkan penuturan orang-orang yang pernah menghadiri beberapa muktamar NU sebelumnya, inilah muktamar paling jorok, paling kasar dan jauh dari nilai akhlaq karimah. Peserta muktamar terbelah di dua lokasi: Sebagian di dalam Pesantren Tebuireng, dan sebagian lagi di luar Tebuireng. Di tengah situasi yang tidak kondusif itu, KH. Musthofa Bisri atau Gus Mus, memberikan tawsiyah sambil menangis sesenggukan, karena merasa malu. Ujung-ujungnya, Gus Mus yang sejak awal digadang-gadang menjadi Rais Am menyatakan tidak bersedia.

Puncak kegaduhan muktamar terjadi malam terakhir menjelang pemilihan ketua umum, setelah Rais Am hasil pemilihan melalui *Ahlul Halli wal-Aqdi* terpilih, yaitu KH. Ma'ruf Amin. Sebagian pimpinan NU bertahan di dalam Pesantren Tebuireng, dan sebagian di lokasi muktamar.

Gus Sholah tampak sangat kecewa dengan pelaksanaan muktamar yang berjalan kacau dan brutal ini. "Kita harus malu pada Pendiri NU. Para pimpinan NU justru mempermalukan NU di depan Para Pendiri, di tempat NU dilahirkan," ujarnya.

Sejak peristiwa Muktamar NU di Jombang, Gus Sholah makin meyakini, bahwa berkhidmah di NU melalui jalur nonstruktur NU seperti yang selama ini ditempuh, tidak kalah mulianya. Dan kelak dia tidak ikut memanggul beban sejarah jika ternyata perjalanan NU di kemudian hari tidak sesuai dengan amanah yang dititipkan oleh para *muassis*-nya. ❖

Bersama
Jusuf Kalla
dan **Mbah Maimoen**

Membuka
Festival Takbir
di **Pesantren Tebuireng**

Bersama
Presiden RI Joko Widodo

Menjadi Pengasuh Pesantren Tebuireng

BERPIKIR atau mimpi menjadi pengasuh pesantren dari sebuah pesantren besar sekaliber Tebuireng tidak pernah terlintas di benak Salahuddin Wahid. Ditilik dari riwayat pendidikan dan fase perkhidmatan yang ditempuh sejak usia remaja, memang tidak ada jejak-jejak pembelajaran dan pembekalan yang bisa dilacak bahwa kelak ia dipersiapkan untuk menjadi pengasuh pesantren. Tapi jalan Tuhan yang ditorehkan untuk dilalui hambaNya seringkali tidak bisa ditebak.

Sebenarnya titah dari Yang Kuasa bahwa kelak Salahuddin Wahid bakal memangku pesantren telah "dibocorkan" Tuhan jauh hari sebelumnya, tepatnya 20 tahun sebelum ia menjadi pengasuh pesantren, melalui lesan KH. Muslim Rifai Imampuro atau yang lebih dikenal dengan Mbah Lim.

Suatu hari di tahun 1986, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti, Klaten Jawa Tengah, ini bersilaturrahmi ke rumah keluarga besar Kiai Abdul Wahid Hasyim di Matraman, Jakarta Pusat, ditemani Gus Dur. Tidak lama menyusul Salahuddin Wahid yang datang bersama Umar Wahid.

Ketika Mbah Lim melihat Gus Sholah, ia langsung berdiri sembari berkata "*Nuwun sewu* (permisi)," sambil menyerudukkan kepalanya ke perut Gus Sholah. Mbah Lim memanggil Gus Sholah, "Kiai Tebuireng, Kiai Tebuireng. *Iki engkok* (ini nanti) jadi Kiai Tebuireng," tutur Mbah Lim dengan kalimat terbata-bata. Tentu saja kejadian itu disambut tawa seisi rumah, karena dianggapnya

sebagai guyonan belaka. Namun 20 tahun kemudian ucapan Mbah Lim menjadi kenyataan.

"Ma'rifat" nya Mbah Lim yang telah memberikan isyarat kelak Gus Sholah akan menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng dan ditanggapi sebagai guyonan itu, mendapatkan respon empirik (syari'at) nya melalui kisah yang dialami Umar Wahid bersama Gus Dur, beberapa tahun sesudahnya.

Pada tahun 2000, Dokter Umar Wahid, adik Gus Sholah sekaligus teman bermain sejak kanak-kanak, beberapa kali datang ke Pesantren Tebuireng. Kedatangan Umar Wahid ke Tebuireng cukup intens di saat Aburrahman Wahid menjabat Presiden. Hal ini terkait tugasnya sebagai Tim Dokter Kepresidenan yang senantiasa mendampingi Gus Dur dalam agenda kunjungan ke berbagai daerah.

Melihat lingkungan pesantren yang didirikan kakeknya ini minim perawatan, baik sarana belajar maupun sanitasi dan lingkungan, Umar Wahid sowan ke pamannya, Kiai Yusuf Hasyim, yang menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng.

Kepada Kiai Yusuf Hasyim ia berkata blak-blakan, apa adanya, "Pak Ud (panggilan akrab Kiai Yusuf Hasyim), kok Tebuireng tampak kumuh seperti ini ya?" Kiai Yusuf Hasyim cukup kaget dengan pernyataan Umar Wahid. Kiai Yusuf Hasyim balas bertanya "Kumuh *piye* (bagaimana)?" dengan nada tinggi. Melihat respon yang demikian, Umar Wahid menyadari, intro pembicaraan yang disampaikan kurang pas, dan momentumnya agak kurang tepat.

Sejenak Umar Wahid terdiam, sambil mencoba mencairkan suasana. Umar Wahid mencoba mengalihkan materi pembicaraan, dari bentuk kritik diganti dengan *sharing* pendapat, menyangkut regenerasi kepemimpinan Pesantren Tebuireng. Ia membuka perbincangan terkait estafeta pengasuh Tebuireng, menggunakan bahasa Jawa, sebagai bentuk penghormatan Umar Wahid kepada pamannya.

"Pak Ud, *iki wes wayahe* generasiku *genteni* Pak Ud. *Lek menurut ku, lek nggak* Mas Dur, ya Mas Sholah. *Lek* Mas Dur kan nggak mungkin, *dadi* ya Mas Sholah (Ini sudah masanya generasiku menggantikan Pak Ud. Menurut saya, kalau tidak Mas Dur, ya Mas Sholah. Kalau Gus Dur tidak mungkin, berarti ya Mas Sholah)," ungkap Dokter Umar Wahid. Dia merasa lega telah menyampaikan usulannya, meski dengan sedikit was-was, kalau-kalau sang paman tidak berkenan.

Ternyata Pak Ud tidak marah mendengar usulan sang keponakan seperti itu. Pak Ud mendengarkan usulan Umar Wahid dengan serius. Selama beberapa waktu usulan Umar Wahid itu menjadi perhatian khusus dan selalu mengusik pikirannya. Selang setahun kemudian (2004), Kiai Yusuf Hasyim mengundang Gus Sholah untuk datang ke Tebuireng. Dalam kesempatan itu Kiai Yusuf Hasyim menyampaikan kepada Gus Sholah agar dirinya bersiap-siap menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng, menggantikan dirinya yang sudah mulai uzur. Tentu saja Gus Sholah kaget mendengar permintaan Pak Ud seperti itu.

Lepaskan Tawaran Menjadi Duta Besar

Sebelum Kiai Yusuf Hasyim mengundang Gus Sholah ke Tebuireng, pada akhir 2005 Gus Sholah diajak makan malam oleh seorang pejabat tinggi negara. Pada kesempatan itu, pejabat bersangkutan menyampaikan agar Gus Sholah berkenan menerima penugasan dari Negara untuk menjadi Duta Besar Indonesia di Mesir. Ia pun bertanya mengapa dirinya yang dipilih, dan mengapa pula negara Mesir. Setelah dijelaskan alasannya berikut beberapa pertimbangan, ia pun memahami dan menyatakan kesediaannya.

Tidak lama kemudian, Gus Sholah menerima telepon dari pejabat tersebut, yang menyampaikan bahwa negara yang ditempati Gus Sholah bukan Mesir, melainkan Aljazair. Mendengar adanya

perubahan negara tempat ia akan ditugaskan itu, Gus Sholah tidak mengiyakan atau menolak. Ia minta waktu untuk berpikir. Dua bulan setelah mendapat tawaran tersebut, pada bulan Februari 2006 Gus Sholah diundang sang paman untuk bertemu di Tebuireng.

"*Aku wis tuwo, kudu diganti. Aku takon ke sedulur-sedulur, ke alumni dan ke konco-konco, kabeh ngusulno awakmu sing ganti aku* (Saya sudah tua, harus diganti. Saya tanya ke saudara-saudara, ke alumni dan teman-teman. Semua mengusulkan kamu yang menggantikan saya)," ujar KH. Yusuf Hasyim.

Mendengar itu Gus Sholah menyampaikan, bahwa ia baru saja diserahi tugas oleh Pemerintah untuk menjadi Dubes RI di Aljazair.

"*Lha lek koen mentolo yo lungoo*. (Ya kalau kamu tega ya pergilah ke Aljazair)," jawab Pak Ud.

Sempat bimbang dengan kedua tawaran yang ada, antara menjadi dubes dan menjadi pengasuh pesantren, ia pun berkonsultasi dengan teman curhat yang juga adiknya, Umar Wahid. Kesimpulannya, ia memilih untuk hijrah ke Tebuireng, suatu pilihan yang ternyata sangat tepat. Dengan menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng kepemimpinan dan kemampuan manajerial Gus Sholah mendapatkan habitatnya. Ketokohan dan kepemimpinannya melambung tinggi sejak ia mengelola pesantren peninggalan kakeknya, Pesantren Tebuireng.

Pada tanggal 10 April 2006, dengan menggunakan kereta api Salahuddin Wahid berangkat boyongan ke Jombang, disertai keluarganya dan dikawal oleh Gugus Joko Waskito.

Gerak cepat dilakukan oleh Gus Sholah setibanya di Tebuireng. Pada 12 April 2006, Gus Sholah mengadakan pertemuan yang dihadiri Kiai Yusuf Hasyim dan keluarga besar KH. Hasyim Asy'ari Tebuireng, serta para alumni senior. Dari hasil pertemuan disepakati, bahwa pergantian pengasuh akan diresmikan keesokan harinya, bersamaan dengan acara Tahlil Akbar Hadratussyeikh KH. Hasyim

Asy'ari dan Temu Alumni Nasional Pondok Pesantren Tebuireng, bertempat di halaman Pesantren Tebuireng. Sejak 13 April 2006, Gus Sholah resmi menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng. Tugas pokok yang diemban olehnya, adalah pengembangan Pesantren Tebuireng dengan fungsi menjaga keaslian pendidikan Pesantren Tebuireng. Serah terima kepengasuhan dari Kiai Yusuf Hasyim kepada Gus Sholah baru dilakukan pada 26 Juni 2006, setelah semua dokumen pertanggungjawaban siap diserahkan.

Sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi tersebut, Gus Sholah bertekat melakukan perubahan di semua bidang. Ia menerima kepercayaan yang berat itu sebagai kehendak Allah yang mesti dijalani. Mengingat perjalanan panjang sejarah Pesantren Tebuireng dan harapan dari berbagai kalangan, termasuk dari keluarga Bani Hasyim Asy'ari, para guru, santri dan wali santri, amanah tersebut menjadi tantangan bagi dirinya.

Gus Sholah resmi menjalankan fungsinya sebagai pengasuh Pesantren Tebuireng yang ketujuh. Yang pertama ialah Hadratussyeikh Hasyim Asy'ari (1899-1947), dilanjutkan oleh KH. Abdul Wahid Hasyim (1947-1950), dan diteruskan oleh KH. Abdul Karim Hasyim yang hanya mengasuh selama satu tahun (1950-1951). Pengasuh keempat ialah KH. Achmad Baidhawi yang juga mengasuh selama setahun (1951-1952), dilanjutkan pengasuh kelima, KH. Abdul Kholik Hasyim (1953-1965). KH. M. Yusuf Hasyim menjadi pengasuh keenam (1966-2006) dan menjadi pengasuh yang terlama sesudah KH. Hasyim Asy'ari (40 tahun).

Banyak perubahan akseleratif dan massif yang ia lakukan, bertolak dari apa yang telah dikembangkan oleh para pengasuh sebelumnya yang dimulai sejak 121 tahun silam (1899).

Pesantren Tebuireng terletak 5 km dari pusat Kota Jombang Jawa Timur. Bermula saat Kiai Hasyim Asy'ari membeli sebidang tanah milik seorang dalang terkenal di dusun Tebuireng. Tepatnya

pada 26 Rabiul Awal 1317 H, bertepatan dengan 3 Agustus 1899 M (46 tahun sebelum Indonesia merdeka, 1945). Di atas sebidang tanah itu Kiai Hasyim mendirikan sebuah bangunan kecil yang terbuat dari anyaman bambu (Jawa: *tratak*), berukuran 6X8 meter. Bangunan sederhana itu disekat menjadi dua bagian. Bagian belakang dijadikan kediaman Kiai Hasyim dan bagian depan menjadi tempat shalat (mushalla). Saat itu santri berjumlah 8 orang dan tiga bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang.

Itulah warisan yang berada di tangan Gus Sholah untuk dikembangkan.

Komitmen Gus Sholah untuk memajukan pesantren, tergambar dari aktivitasnya yang padat. Pada masa awal memimpin pesantren, dalam sehari, dia pernah melakukan rapat hingga lima kali. Misalnya, pukul 07.00-08.00 rapat dengan para kepala sekolah, lalu 09.00-10.00 rapat dengan pelaksana pembangunan, lanjut 10.00-12.00 pertemuan dengan para karyawan, kemudian 13.00-14.00 rapat dengan para murabbi pesantren, dan pukul 16.00 s/d 17.00 rapat dengan para kiai pengajar kitab atau santri senior.

Dalam setiap rapat pasti disediakan kudapan dan atau makan siang. Ada salah seorang pengurus mengaku "menyerah" bila harus selalu mengikuti aktivitas Gus Sholah, saking padatnya kegiatan. Pengurus ini mengaku tidak mampu menandingi semangat juang dan stamina Gus Sholah yang sudah berumur.

Meski tidak lagi menjadi pengasuh, KH. M. Yusuf Hasyim masih memperhatikan perkembangan pesantren di bawah kepemimpinan penerusnya. Ia mengusulkan agar dirintis unit pendidikan baru. Tepatnya pada 6 September 2006, berdiri unit pendidikan baru dengan jenjang perguruan tinggi strata I yang diberi nama Ma'had Aly Hasyim Asy'ari. Empat bulan kemudian, tepatnya hari Minggu, 14 Januari 2007, KH. M. Yusuf Hasyim wafat.

Setelah menerima estafet kepengasuhan, Gus Sholah menyiapkan langkah-langkah kerja. Sebagaimana prinsipnya selama

ini “apa yang harus saya kerjakan”. Ia terlebih dahulu melakukan kajian mendalam tentang kepengasuhan sebelumnya, dimulai dari sang kakek sampai ke pamannya, baik dari sisi karakteristik pribadi dan kepemimpinan, maupun bentuk perubahan pesantren di setiap periode sebelumnya.

Memasuki Tebuireng Salahuddin Wahid menghadapi tumpukan masalah yang akut.

Gugus Joko Waskito yang ikut mendampingi Gus Sholah pada awal-awal hijrahnya ke Tebuireng, melukiskan betapa beratnya beban yang dihadapi Gus Sholah.

Yang sangat memprihatinkan, jumlah santri tinggal sedikit. Ada sekitar 300 an santri yang tinggal di asrama. Kedisiplinan para pengurus, guru dan staf-staf pesantren sangat tidak memenuhi ukuran dan standar minimum Gus Sholah. Sangat rendah.

Beberapa saat sesudah acara serah terima, Gus Sholah mengundang rapat semua pengelola, pengurus, guru dan karyawan Pesantren. Rapat pertama ini gagal. Karena saat Gus Sholah tiba di ruang pertemuan belum banyak yang datang. Langsung Gus Sholah

bilang, "Rapat saya tunda, tidak jadi hari ini, karena tidak datang tepat waktu."

Gagal rapat pertama disusul undangan rapat kedua. Kali ini semua yang diundang hadir tepat waktu. Pada rapat pertama, Gus Sholah menekankan perlunya semacam transaksi sosial mengenai keterbukaan di antara semua pihak yang terlibat di Pesantren.

"Jangan biasakan menutup-nutupi informasi atau masalah. Sudah ngomong saja secara bebas, apa persoalan yang ada di masing-masing bidang, dan bagaimana usulan solusinya? Kalau tidak berani ngomong di rapat ini, catat nomor hp saya. Silakan SMS saya."

Pada rapat berikutnya, Gus Sholah marah kepada seluruh peserta rapat. Pasalnya, tidak ada peserta rapat yang membawa alat tulis, kecuali sedikit. Melihat hal ini, Gus Sholah langsung memberi teguran dan mengingatkan agar setiap kali rapat semua peserta harus membawa alat tulis. Teguran ini memberi pelajaran kepada para pengurus agar serius dalam memikirkan pesantren. Semua hasil rapat harus tercatat agar mudah diingat dan dilaksanakan.

"Bagaimana kita bisa menindaklanjuti hasil rapat kalau tidak punya catatan tertulis. Apa kita mau mengandalkan ingatan saja?"

Gus Sholah selalu membuat catatan kecil di lembaran kertas. Apa saja informasi penting yang diterima ia tulis. Termasuk fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Semua hal dan persoalan yang ia jumpai diinventarisasi, selanjutnya dikelompokkan dalam kluster apa, dan dirumuskan strategi penyelesaiannya.

Membangun moral kedisiplinan di kalangan pengelola, pengurus, guru dan karyawan masuk skala prioritas yang dikerjakan pada masa-masa awal. Untuk keperluan itu ia mengadakan pelatihan kedisiplinan, bekerja sama dengan Polres Jombang. Diikuti semua unsur.

"Baru kali ini Mas, saya diundang pondok pesantren di Jombang untuk pelatihan kedisiplinan," kata petugas dari Polres Jombang kepada Gugus.

Sesudah mempermak urusan kedisiplinan, giliran masalah menu dan makanan santri serta kesehatan lingkungan pesantren menjadi sasaran berikutnya. Gus Sholah meminta bantuan Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Universitas Airlangga Surabaya untuk meneliti, apakah santri Tebuireng ini sehat secara gizi atau pun tempat tinggalnya?

Setelah melakukan penelitian secara menyeluruh Kesmas Unair diminta untuk merekomendasikan makanan bergizi bagi santri, lengkap dengan daftar menu hariannya. Tidak berhenti sampai di situ. Gus Sholah juga minta pihak Kesmas untuk mengalkulasi berapa harga untuk masing-masing menu, dan total anggaran konsumsi yang diperlukan untuk seluruh santri beserta para pengurus, guru dan karyawan.

Sesudah memiliki daftar menu beserta harganya, Gus Sholah memanggil pengelola kantin. Kepada pengelola kantin Gus Sholah menyampaikan, kalo masih mau mengelola kantin ini, harus mengikuti rekomendasi dari Kesmas Unair, baik mengenai menu maupun harganya. "Kalo *Sampean* tidak sanggup, biar saya panggil katering dari luar." Pengelola kantin mengikuti arahan Gus Sholah.

Kemudian Gus Sholah memanggil pengelola koperasi. Dia ingin mengetahui, usaha yang dikelola oleh koperasi ini punya pondok apa keluarga? Kalo punya pondok, bagaimana bentuk kerja samanya? Kalo ini punya keluarga, tokonya merupakan aset pondok atau aset keluarga?" Luar biasa detailnya Gus Sholah mengaudit satu persatu bidang usaha yang dilaksanakan di Pesantren Tebuireng. Layaknya BPK. Termasuk aset dan kekayaan Pesantren berupa lahan kering dan persawahan.

Kondisi kebersihan lingkungan pesantren juga mengusik perhatian Gus Sholah. Awalnya beliau menginspeksi kebersihan asrama dan kamar-kamar santri. Begitu menyaksikan banyak sandal dan sepatu berserakan di depan kamar, Gus Sholah protes. Untuk mendisiplinkan santri dalam menjaga kebersihan lingkungan,

dibuatlah maklumat berisi pengumuman tentang kamar terkotor dan kamar terbersih. Tidak hanya menuntut dan mewajibkan para santri menjaga kebersihan, Gus Sholah juga memberikan atensi pada hak-hak pengelola, pengurus, guru dan keryawan, termasuk petugas kebersihan. Salah satu terobosannya, adalah menaikkan gaji tukang sapu dan karyawan lain, termasuk gaji kepala sekolah.

Salah satu kelemahan yang dijumpai di Pesantren Tebuireng kenapa tampak jorok, disebabkan santri-santri yang berstatus mahasiswa yang bertugas menjadi pengasuh dan pembina kamar banyak yang indekost di luar. "Bagaimana mereka bisa mengawasi santri?" ujar Gus Sholah. Gus Sholah lalu membuat kebijakan, semua pengasuh dan pembina kamar santri harus tinggal di pesantren. Mereka dipanggil dan diminta menandatangani pernyataan kesediaan untuk tinggal di asrama santri. Jika tidak mau silakan keluar. Gus Sholah menerapkan aturan yang sangat ketat dalam urusan kebersihan, kesehatan dan makanan santri.

Dalam tempo yang tidak terlalu lama, hasilnya bisa dinikmati. Lingkungan dan wajah Pesantren Tebuireng berubah total, menjadi lingkungan yang bersih, rapi dan asri.

Perbaikan infrastuktur dan fasilitas fisik tak kalah spektakulernya digarap oleh Salahuddin Wahid selama 14 tahun kepemimpinannya.

KH. Salahuddin Wahid yang diakui banyak pihak sukses mengelola dan mengembangkan Pesantren Tebuireng sebenarnya bukanlah original manajer pendidikan. Ia merupakan seorang arsitek yang lama bergelut di bidang manajemen sekaligus perancang dan arsitek bangunan. Saat pertama kali menerima tampuk kepemimpinan pesantren dan menghadapi lemahnya manajemen pendidikan dan pembelajaran di lingkungan pesantren, Gus Sholah memanfaatkan tenaga konsultan pendidikan yang profesional dan cukup representatif.

Ada benarnya pernyataan yang pernah disampaikan oleh Kiai Yusuf Hasyim, bahwa ke depan pesantren tidak harus dipimpin oleh seorang kiai yang ahli di bidang agama. Pesantren dapat pula dikendalikan oleh seorang pemimpin yang kemampuan manajerialnya bagus. Sebagaimana rumah sakit yang baik tidak harus dipimpin oleh seorang dokter, tetapi dapat pula dipimpin oleh seorang manajer. Itulah yang agaknya dipertimbangkan betul oleh Salahuddin Wahid.

Banyak rekomendasi dari hasil diagnosis yang disampaikan oleh tim konsultan. Untuk menindaklanjutinya, sejak bulan April hingga akhir tahun 2007, Gus Sholah secara berkala dan marathon mengadakan rapat bersama unit-unit yang ada di bawah naungan Yayasan Hasyim Asy'ari.

Ia meminta laporan tentang kendala yang dihadapi, di samping meminta masukan maupun kritikan dari mereka. Bahkan Gus Sholah menurunkan "mata-mata" yang terjun langsung ke kamar-kamar untuk bertanya kepada para santri tentang kinerja pengurus, selain juga bertanya tentang dan apa saja yang kurang selama ini, dan apa pula harapan mereka dari pesantren tempat mereka menimba ilmu.

Menjadi Kiai Manajer

Setelah delapan bulan dilakukan diagnosis, peran seperti apa dan perubahan bagaimana yang harus dilakukan, mulai ia temukan. Permasalahan umum pesantren selama ini adalah lebih tertuju pada aspek manajerial. Demikian pula yang terjadi di Tebuireng. Karena itu ia pun lantas menunjukkan skill manajerialnya yang fokus sebagai inspirator, motivator sekaligus penggerak.

Sebagai inspirator, ia menemukan ide dengan mencanangkan target perubahan dalam tahapan waktu. Tiga tahun masa kepemimpinannya, Tebuireng harus menjadi salah satu pesantren yang terbaik di wilayah Jombang. Lima tahun kemudian Tebuireng ditargetkan memiliki kualitas pada level Jawa Timur. Lalu pada tahun ke-10 Tebuireng ditargetkan memiliki kualitas yang diakui secara nasional.

Sebagai motivator, ia melakukan perbaikan kualitas kinerja dan pemberian kesejahteraan bagi seluruh sumber daya manusia yang turut aktif di Tebuireng. Pemberian kesejahteraan yang layak ini dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi dan dedikasi kerja yang tinggi, selain juga sebagai penghargaan terhadap jerih payah mereka kepada Tebuireng. Selain itu, kepada siapa saja yang memiliki potensi unggul, Gus Sholah memberinya kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui program beasiswa.

Sebagai penggerak, Gus Sholah menjalin silaturrahim dengan berbagai pihak. Tujuannya memperoleh dukungan dan bantuan, baik berupa materiil maupun spiritual. Silaturrahmi ini diawali dari keluarga besar Bani Hasyim Asy'ari.

Keluarga besar dimintai saran, masukan dan terlibat aktif dalam melakukan perubahan. Menurutnya, kesatuan hati dan tekad dari semua keluarga besar Bani Hasyim Asy'ari merupakan kekuatan moral paling dahsyat bagi dirinya dalam memimpin Pesantren Tebuireng.

Di sini tampak kejeliannya dalam melihat potensi dan skill yang dimiliki keluarga besar Tebuireng dan tersebar di mana-mana. Tidak mudah memang awalnya, sebab mereka memiliki pandangan dan idealisme masing-masing. Namun, atas nama pengembangan Pesantren Tebuireng yang sejatinya adalah merupakan amanah bagi semua keluarga Bani Hasyim Asy'ari, akhirnya Gus Sholah pun mampu menyatukan hati dan pikiran mereka semua.

Revitalisasi Akseleratif dan Massif (2011-2015)

Secara teknis, dalam waktu lima tahun, Gus Sholah mampu melakukan revitalisasi secara akseleratif dan masif. Mulai dari peningkatan mutu pendidikan, pemeliharaan kultur pesantren, penerapan manajemen sumber daya manusia dan dana, peremajaan sarana fisik, hingga inovasi lainnya terkait unit dan jenjang pendidikan.

Kegiatan belajar-mengajar di lingkungan Pesantren Tebuireng secara umum dibagi menjadi dua, yakni aktivitas pendidikan formal dan aktivitas pendidikan penunjang (nonformal).

Aktivitas pendidikan formal direlokasi keluar area Pesantren induk, meliputi Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Mu'allimin (MM), dan Ma'had 'Aly (setingkat S-1).

Sementara aktivitas pendidikan penunjang (nonformal) dipusatkan di area Pesantren Tebuireng (baik putra maupun putri), meliputi Madrasah Diniyah, pengajian al-Qur'an, pengajian kitab kuning, kursus Bahasa Arab-Inggris, serta kegiatan ekstra kurikuler lainnya yang dilaksanakan di wisma dan kamar santri.

Selain lokasi dan media pendidikan, Gus Sholah juga melakukan perombakan kurikulum. Kualitas guru pun ditingkatkan. Mereka diberi penataran tentang metode mengajar yang baik, diberi beasiswa untuk meneruskan jenjang pendidikan, disediakan fasilitas yang cukup serta kesejahteraan yang memadai.

Kepala sekolah termasuk posisi yang menjadi perhatian utama. Dalam sebuah kesempatan, Gus Sholah menegaskan, "Untuk meningkatkan mutu pendidikan, kuncinya ada di posisi kepala sekolah atau madrasah. Karena pemimpin adalah lokomotif yang menarik semua gerbong."

Agar obyektif, pengelola Pesantren menjalin kerjasama dengan KPI (Konsorsium Pendidikan Islam, kini menjadi "Kualitas Pendidikan Indonesia") untuk melakukan uji kompetensi kepala sekolah, yang diikuti oleh kepala sekolah dan guru yang berminat menjadi kepala sekolah. Selanjutnya, diadakan penjaringan sehingga yang terpilih menjadi kepala sekolah atau madrasah adalah orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi. Pendekatan ini tidak menyinggung atau membuat sakit hati kepala sekolah yang ada, sebab diadakan secara obyektif, transparan, berorientasi kepada mutu, dan dilakukan oleh pihak rekanan yang tidak memiliki kepentingan politis di pesantren.

Gebrakan melakukan suksesi serentak di lingkungan unit pendidikan Pesantren Tebuireng merupakan perubahan revolusioner yang dilakukan Gus Sholah sebagai pengasuh pesantren yang baru. Para guru, santri dan alumni, termasuk juga keluarga besar Bani Hasyim, menyambut baik revolusi pendidikan ala Gus Sholah.

Mereka mengaku senang dengan perubahan spektakuler demi tujuan mulia itu. Meski kemudian ada suksesi jabatan kepala sekolah, hal itu dianggap sebagai hal biasa demi peningkatan mutu pendidikan di Tebuireng. Tidak ada gejolak, semua berjalan dengan baik, dan para kepala sekolah yang tidak lagi terpilih juga merasa legowo. Di samping diadakan proses suksesi kepemimpinan kepala sekolah, Gus Sholah juga mencanangkan penataan administrasi sekolah agar tertib.

Yang paling mengusik pikiran Gus Sholah, ketika awal menjadi pengasuh Pesantren, ialah lemahnya mentalitas dan budaya bersih di kalangan santri. Problem ini dirasakan menjadi pekerjaan besarnya di awal kepemimpinannya, sampai-sampai dia pernah menyatakan, "Sewaktu pertama kali menjadi pengasuh Tebuireng, hal yang membuat saya ngeri itu, yaitu mentalitas santri tentang budaya bersih yang sangat lemah. Padahal kebersihan itu sangat penting. Saya ubah budaya yang '*reged*' (kotor) dari mental santri yang dibawa dari rumah menjadi budaya bersih dan sehat. Alhamdulillah, sekarang sudah terwujud."

Dalam mewujudkan Tebuireng yang bersih dan sehat, Gus Sholah membuat gebrakan dengan cara menyediakan tong-tong sampah di setiap wisma, ada penanggung jawab kebersihan, bahkan diadakan lomba kamar wisma yang "terbersih dan terkotor".

Kamar mandi di bagian belakang yang dulu kumuh dan tidak terawat, segera direhab, diganti dengan keramik yang indah dan bersih. Terakhir Gus Sholah mendapat bantuan seorang konsultan kebersihan yang membantu melatih para Pembina dan santri dalam mengembangkan budaya bersih.

Langkah nyata lainnya dalam membangun jiwa disiplin bagi semua guru dan santri di lingkungan pesantren, Gus Sholah membentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM). Tugas utama dari UMP ini adalah mengawasi dan mengevaluasi kegiatan sehari-hari guru-guru

dan kepala sekolah, termasuk di dalamnya mengevaluasi penerapan kurikulum, evaluasi kebijakan pimpinan sekolah dan pengaruhnya terhadap kebijakan pesantren, serta mengevaluasi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru.

Melalui evaluasi tersebut, upaya perbaikan akan mudah dilakukan secara berkesinambungan. Bahkan, dari hasil evaluasi juga, bisa diketahui nasib guru dan tenaga pendidik. Keberadaan Lembaga Penjamin Mutu di Tebuireng ini merupakan hal baru dan mungkin satu-satunya inovasi di lingkungan pesantren di Jombang, atau bahkan mungkin juga di wilayah Jawa Timur.

Pengadaan Unit Pendidikan Baru

Mulai awal tahun 2007, diterapkan penambahan jam belajar atau sistem full day school di semua unit pendidikan. Di masa kepemimpinan Kiai Yusuf Hasyim, jam belajar dimulai dari jam 06.00 hingga jam 13.00. Oleh Gus Sholah jam belajar diperpanjang mulai jam 06.00 hingga jam 16.00. Gus Sholah juga menghadirkan seorang pustakawan guna mengelola perpustakaan secara sistematis dan terarah. Yang direkrut alumni IAIN Surabaya yang tamat S2 dari Leiden. Perpustakaan yang bernama A. Wahid Hasyim ini berdiri pada tahun 1936, atas inisiatif Kiai Wahid Hasyim bersama Kiai Muhammad Ilyas.

Kini perpustakaan ini sudah memiliki lebih dari 8.000 judul buku, yang terdiri atas buku umum, agama, kitab kuning serta berbagai jenis koran dan majalah, ditambah koleksi kaset-kaset dakwah, dokumen pendiri Pesantren Tebuireng yang masih berupa manuskrip, disamping juga paper, skripsi, tesis, hasil survey mahasiswa dan laporan penelitian di Tebuireng. Hadirnya pustakawan yang profesional tersebut diharapkan pengelolaan perpustakaan menjadi sistematis dan profesional sehingga meningkatkan minat baca santri dan siswa, khususnya mahasiswa Ma'had Aly.

Pada saat yang sama, Madrasah Mu'allimin dan Ma'had Aly didirikan, serta kegiatan pengajian dilakukan secara klasikal melalui Madrasah Diniyah dan Kelas Takhassus. Madrasah Mu'allimin didirikan pada tahun 2008 yang menampung 20-an tamatan SD/MI yang lulus tes dan dibebaskan dari membayar SPP.

Untuk meningkatkan minat membaca, menulis dan berkarya, pada tanggal 1 Januari 2007 Gus Sholah mendirikan unit penerbitan yang merupakan lembaga yang berkompeten di bidang pengembangan intelektual santri melalui penerbitan majalah, buletin dan buku.

Pada awalnya unit penerbitan hanya menerbitkan (kembali) Majalah Tebuireng; majalah yang pernah eksis di tahun 1980-an dan berhenti terbit akibat kendala teknis. Pada masa kepemimpinan Gus Sholah, majalah itu diterbitkan kembali secara berkala dan edisi perdananya mulai terbit pada bulan Juli 2007.

Kini unit penerbitan telah mengelola tiga divisi di bawahnya, yaitu Divisi Majalah, Divisi Buletin dan Divisi Penerbit Buku. Sedangkan Divisi Penerbit Buku yang diberi nama Pustaka Tebuireng, kini telah menerbitkan banyak buku bertema sosial, pendidikan, dan keagamaan. Untuk menghormati para Masyayikh Pesantren Tebuireng, Gus Sholah mengambil inisiatif untuk menerbitkan buku riwayat hidup Masyayikh Tebuireng.

Akselerasi Sumber Dana Pesantren

Gus Sholah dalam melibatkan seluruh *dzurriyyah* atau keluarga besar Hadratussyeikh KH. Hasyim Asy'ari, tidak hanya pada peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya Manusia Pesantren, namun juga peningkatan kemampuan ekonomi pesantren.

Untuk saat ini, Pesantren Tebuireng telah memiliki bidang usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Oleh Gus Sholah, *dzurriyyah*

yang memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan perusahaan dilibatkan di dalamnya.

Selain itu dia juga mengambil prakarsa mempekerjakan seorang insinyur pertanian untuk mengelola sawah milik Yayasan Hasyim Asy'ari. Namun saat itu insinyur tersebut kurang gigih, selanjutnya diganti oleh seorang berusia remaja tapi sudah lebih berpengalaman walaupun bukan sarjana pertanian. Di lahan tersebut, pada 2008 Gus Sholah juga merintis penanaman sebanyak 7.000 pohon Sengon.

Di samping unit perusahaan, Pesantren Tebuireng juga memiliki Lembaga Sosial Pondok Pesantren (LSPT), yakni sebuah lembaga amal yang didirikan pada bulan Agustus 2007. LSPT bergerak di bidang penggalian dan pengelolaan dana, baik berupa zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah, dan lain-lain. Dana-dana tersebut dikumpulkan dari para alumni dan donatur, untuk dialokasikan bagi kesejahteraan santri, siswa, guru, pekerja, karyawan pesantren, dan masyarakat sekitar.

Secara struktural, LSPT berada di bawah naungan Yayasan Hasyim Asy'ari. Dana yang masuk ke LSPT disalurkan sesuai amanah donatur. LSPT, dalam operasionalnya berada di bawah pengawasan akuntan publik, pengelola Yayasan, Pengasuh, serta Dewan Pembina. Semua kinerja LSPT dapat dipantau oleh donatur atau penyumbang melalui laporan tahunan atau datang langsung ke kantor LSPT.

Lembaga ini terus berkembang. Sejauh ini LSPT telah menetapkan beberapa program, di antaranya BeGe (Bagimu Guru), Banapes (Bantuan Abdi Pesantren), PSTM (Peduli Siswa Tidak Mampu), eMHa (Membangun Harapan) untuk bantuan anak-anak putus sekolah, PIYATU (Peduli Yatim Piatu), PMM (Peduli Masyarakat Miskin), dan Be-eSPe (Bea Siswa Berprestasi).

Dari dua institusi di atas, diharapkan Pesantren Tebuireng memiliki sumber pendanaan untuk pengembangan sarana dan

prasarana. Selain itu, Tebuireng juga memiliki Unit Wakaf, yaitu badan pengelola tanah-tanah wakaf milik Pesantren Tebuireng. Pengurusnya rata-rata diisi oleh pengurus Yayasan Hasyim Asy'ari. Tanah-tanah wakaf itu dikelola secara produktif guna menunjang pembiayaan pendidikan di Tebuireng.

Setiap tahunnya, pengurus Unit Wakaf mempertanggung-jawabkan pengelolaan tanah wakaf melalui laporan tertulis, seperti laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan penghasilan wakaf, laporan arus kas, dan lain sebagainya. Tanah wakaf yang kini dikelola luasnya mencapai 432.774 m2.

Tanah-tanah wakaf tersebut umumnya merupakan tanah wakaf dari Kiai Hasyim Asy'ari, ditambah tanah wakaf dari masyarakat dan tanah hasil pembelian. Tidak hanya di kawasan Tebuireng, tanah-tanah tersebut juga tersebut luas di berbagai desa, seperti di Desa Jombok, Desa Keras, Seblak, Jatirejo, Cukir, dan Kesamben (semuanya berada di Kabupaten Jombang).

Kecuali tanah yang ditempati bangunan, tanah-tanah wakaf yang masih berupa persawahanan dikelola secara produktif dengan ditanami berbagai macam tanaman. Menurut data tahun 2006, tanah wakaf Tebuireng yang ditempati bangunan pondok dan sekolah adalah seluas 12 ha, kemudian tanah yang ditanami tebu seluas 14 ha, ditanami mangga seluas 4 ha, ditanami padi, jagung dan palawija seluas 12 ha. Penghasilan dari tanah wakaf dimasukkan ke dalam kas Yayasan untuk membiayai berbagai kebutuhan Pesantren atau menutupi anggaran yang membengkak. Tujuannya hanya satu, demi suksesnya proses belajar mengajar di Pesantren Tebuireng.

Pada periode Kiai Yusuf Hasyim, sumber keuangan Pesantren Tebuireng banyak berasal dari iuran (SPP) para santri, iuran (SPP) siswa yang belajar pada semua unit pendidikan, hasil pengelolaan tanah waqaf, sumbangan pihak luar yang tidak mengikat, dan hasil usaha sendiri.

Di masa Gus Sholah, keuangan Pesantren diperoleh dengan lebih mengoptimalkan potensi sumbangan dari pihak luar yang tidak mengikat dalam jumlah yang besar. Dalam upayanya itu, Gus Sholah memanfaatkan jaringan keluarga, teman dan pejabat negara. Tampaknya, upaya yang dilakukannya ini membawa hasil positif. Terbukti dengan banyaknya pihak luar yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan sarana dan prasarana.

Peremajaan Sarana Fisik Pesantren

Secara fisik, hingga tahun 2007 kondisi bangunan yang ada di pondok induk tampak sudah kurang layak lagi. Antara jumlah santri dan fasilitas yang tersedia rasionya kurang mencukupi. Sebagian santri menempati kamar-kamar berukuran 3x4 m yang dihuni sebanyak 7 orang atau lebih. Tidak ada tempat yang memadai untuk istirahat dan belajar.

Melihat kondisi itu, Gus Sholah sebagai pengasuh mencanangkan rencana pengembangan bangunan pondok. Sebenarnya, sejak pertengahan Desember 2006, proses pembangunan sudah dimulai. Tahap pertama, dalam waktu sekejap, hanya tempo dua tahun, lima asrama santri berlantai dua dan tiga telah dibangun. Juga merenovasi masjid, dapur santri dan membangun poliklinik untuk umum. Hingga tahun 2011 terus berlanjut pembangunan gedung lainnya.

Gedung pertama yang dibangun adalah Wisma Suryokusumo. Asrama berlantai dua yang diresmikan pada 5 Agustus 2007 oleh Drs. H. Wisnu Hadi Suryokusumo (ipar Nyai Salahuddin Wahid sebagai donatur). Menyusul Wisma Hadji Kalla berlantai tiga, diresmikan pada 26 Oktober 2007 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kedua asrama ini terletak di sebelah Barat kompleks Pesantren Tebuireng.

Pembangunan terus berlanjut. Asrama ketiga adalah Wisma KH. Saifuddin Zuhri, berlantai tiga, yang juga merupakan sumbangan

Drs. H. Wisnu Hadi Suryokusumo. Gedung keempat adalah Wisma Nyai Hj. Sholichah Wahid, berlantai tiga, merupakan sumbangan keluarga KH. Wahid Hasyim. Kedua asrama ini diresmikan pada 9 Agustus 2008. Sedangkan asrama kelima adalah Wisma KH. M. Ilyas, berlantai tiga, sumbangan dari Kementerian Agama RI atas perintah dari Menteri Agama KH. Maftuh Basyuni, menantu KH. Muhammad Ilyas.

Selain renovasi asrama, di masa kepemimpinan Gus Sholah juga dilakukan renovasi masjid. Masjid lama yang berada di tengah-tengah Pesantren Tebuireng sudah tidak mampu lagi menampung jamaah, terutama jamaah shalat Jumat.

Peletakan batu pertama dilakukan pada bulan Maret 2007. Renovasi ini tidak membongkar bangunan utama masjid, karena bangunan utama adalah hibah KH. Hasyim Asy'ari yang tidak boleh dibongkar selama masih bisa dimanfaatkan. Renovasi masjid ini pun selesai pada akhir tahun 2008.

Sarana lain yang turut direnovasi di masa Gus Sholah adalah ruang makan, dapur, dan fasilitas bagi para karyawan yang bekerja di dapur Jasa Boga. Untuk menu sehari-hari santri, Koperasi Jasa Boga juga memperbaiki menu sesuai dengan kebutuhan gizi santri.

Pada tanggal 9 April 2008, poliklinik yang dinamai "Pusat Kesehatan As-Salamah" diresmikan operasionalnya oleh Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadilah Supari. Poliklinik ini adalah hasil lobi Gus Sholah kepada Konsul Jepang, Kerajaan Jepang di Surabaya. Poliklinik ini tidak hanya untuk santri, siswa, guru, dan karyawan Pesantren Tebuireng, akan tetapi juga untuk masyarakat umum.

Pengembangan selanjutnya adalah renovasi kantor Yayasan Hasyim Asy'ari, perpustakaan, dan auditorium (aula), yang selama ini menjadi satu gedung berlantai dua. Gedung baru tersebut diberi nama Gedung KH. M. Yusuf Hasyim, berlantai tiga. Sedangkan fasilitas aula dibangun atas sumbangan dari Drs. Soetrisno Bachir dan diberi nama Aula H. Bachir Achmad.

Relokasi Ma'had Aly dan pembangunan ruang Jasa Boga dimulai pada pertengahan tahun 2011. Seluruh proses pembangunan fisik oleh Gus Sholah ditargetkan selesai dalam 5-7 tahun, terhitung sejak tahun 2007. Kompleks pondok induk menempati area seluas kurang lebih 1,7 hektar, dilingkari tembok keliling setinggi 2,5 meter, dengan tiga pintu gerbang di sebelah barat, timur dan utara. Pintu gerbang utama adalah pintu gerbang sebelah timur.

Dalam kaitan pembangunan sarana penunjang bagi peziarah makam Gus Dur, Gus Sholah berhasil meyakinkan Pemerintah (Departemen PU) untuk membangun jalan masuk dan jalan keluar yang lebar dan nyaman. Untuk itu banyak fasilitas di pondok yang harus dibongkar seperti dapur, ruang makan, kantor dan asrama. Pada September 2011 telah dibangun asrama baru, sebagai pengganti asrama yang dibongkar.

Gus Sholah juga berhasil meyakinkan Pemerintah untuk membangun tempat parkir seluas hampir 5 hektar di sebelah barat kompleks Pesantren termasuk sarana pendukung, seperti tempat istirahat sopir, MCK, warung, kios dan musholla. Gus Sholah juga berhasil meyakinkan Pemerintah untuk membantu pembangunan Museum Islam Nusantara Hasyim Asy'ari. Museum ini dimaksudkan memberi informasi tentang pesan para ulama dalam perjuangan mendirikan Negara.

Melihat berbagai perubahan fisik yang terus dikembangkan di Pesantren Tebuireng, kini pesantren yang didirikan oleh Hadratus Syekh itu telah berubah menjadi pesantren modern, yang salah satu cirinya memiliki fasilitas yang memadai.

Inovasi Pendidikan

Kemampuan manajerial Gus Sholah yang berlatar belakang insinyur, ternyata tidak hanya sebatas membangun sarana fisik pesantren, tapi juga ruh pendidikan yang ada di lembaga-lembaga

pendidikan di bawah naungan Yayasan Hasyim Asy'ari. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas Pondok Pesantren dan unit-unit pendidikan di Tebuireng.

Di pesantren putra, terdapat Majelis Ilmu, yaitu sebuah lembaga yang berkompeten menangani pendidikan santri di dalam pesantren (putra) Tebuireng. Lembaga ini merupakan bagian dari Majelis Tarbiyah wa-Ta'lim (MTT) yang menangani bidang keamanan dan pendidikan al-Qur'an. Pada dekade 1990-an, bidang keamanan diubah namanya menjadi Badan Pembina Santri (BPS) dan bidang pendidikan al-Qur'an menjadi badan tersendiri dengan kompetensi bidang al-Qur'an dan pengajian kitab kuning bersistem bandongan. Di akhir dekade 1990-an, Bidang Pengajian tadi diubah menjadi Majelis Ilmi dengan menambah sistem pengajian kitab secara sorogan dan klasikal

Pada tahun 2006, di masa awal kepemiminan Gus Sholah, Madrasah Diniyah didirikan dan menjadi bagian dari Majelis Ilmi. Kemudian tahun 2007, Tim Penggerak Bahasa dibentuk dan digabungkan ke dalam Majelis Ilmi bersama Pengurus Ta'mir Masjid.

Kelahiran Madarasah Diniyah Tebuireng dilatarbelakangi oleh kurangnya minat mengaji santri, menurunnya kualitas keilmuan agama santri, serta gencarnya desakan dari alumni dan beberapa pengurus untuk mendirikan Madarasah Diniyah.

Gus Sholah yang saat itu baru dua bulan mengasuh Tebuireng, merespon usul tersebut dengan membentuk Tim Perumus Madrasah Diniyah. Dalam rapat dengan pengurus Badan Pembina Santri (BPS), diputuskan bahwa pembentukan Madrasah Diniyah diserahkan kepada Tim Lima. Tim ini bertugas merancang sistem, kurikulum, mendata kebutuhan, sarana dan pra sarana yang dibutuhkan Madrasah Diniyah.

Tim Lima kemudian melakukan rapat-rapat secara maraton dan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Kegiatan belajar-

mengajar Madrasah Diniyah secara resmi dilaksanakan mulai tanggal 20 Juli 2006.

Pada tahun ajaran 2006-2007, Madrasah Diniyah hanya menangani santri kelas satu (di sekolah formal) dan diklasifikasikan berdasarkan sekolah asal. Setahun kemudian, klasifikasi diubah dengan sistem Madrasah Diniyah murni, yaitu siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan tanpa melihat latar belakang pendidikan di sekolah formal.

Inilah gebrakan pertama Gus Sholah dalam upaya membenahi lembaga pendidikan di Tebuireng. Pada tahun ajaran 2008-2009, seluruh santri Tebuireng diwajibkan mengikuti kegiatan belajar-mengajar di Madrasah Diniyah. Jam belajar pun diperpanjang dari pukul 18.00 sampai pukul 20.10 WIB.

Sebelumnya, sekitar tahun 2003, Pesantren Tebuireng mendirikan pondok khusus putri sebagai respon dari usulan para alumni, guru dan masyarakat sekitar, serta dukungan dzurriyyah Bani Hasyim. Santri putri pertama berjumlah 10 orang. Satu tahun kemudian meningkat menjadi 50-an orang, dan pada tahun 2008 sudah mencapai 112 santriwati. Para santri Pondok Putri berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Pada awal kelahirannya, sebagian besar santri putri adalah anak-anak alumni Pesantren Tebuireng. Namun kini, santri Pondok Putri tidak hanya berasal dari keluarga para alumni. Bahkan, sejak tahun ajaran 2009-2010, santri baru yang mendaftar di Pondok Putri jumlahnya membludak sehingga terpaksa dialihkan ke pondok-pondok sekitar, karena saat itu fasilitas asrama masih terbatas dan tidak mampu menampung banyaknya jumlah pendaftar.

Mulai tahun 2009 Pondok Putri menambah asrama baru agar bisa menampung santri dalam jumlah besar. Tahun 2011 dibangun lagi sebuah gedung asrama santri putri untuk memenuhi minat para orang tua.

Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafi'iyyah (MTSS) adalah unit sekolah tertua di Tebuireng, berdiri pada masa kepemimpinan Kiai Wahid Hasyim dan mendapat pengakuan formal pada tahun 1951. MTSS selama kurang lebih setengah abad ini telah berhasil menjadi salah satu sekolah favorit dengan status "Disamakan" dan "Terakreditasi A", berdasarkan SK No. Wm.06.03/PP.03.2/ 1838/ SKP/1997 sampai pada tahun 2009 oleh BAN-S/M dengan nilai 9,2.

Pada tahun ajaran 2010-2011, di masa kepemimpinan Gus Sholah, MTs Tebuireng membuka program Kelas Internasional berbasis Cambridge (dua kelas putra dan putri) hasil kerjasama dengan Laboratorium School Universitas Negeri Malang. Sebuah langkah inovasi yang luar biasa karena MTSS selalu mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman.

Sedangkan pengembangan di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyyah (MASS) dilakukan mulai tanggal 9 Agustus 2008, yaitu dengan dibangunnya perpustakaan berlantai dua sumbangan keluarga besar mantan Menteri Agama KH. Muhammad Ilyas. Ide awal pendirian madrasah ini sudah dimulai sejak kepemimpinan KH. Hasyim Asy'ari, lalu disempurnakan pada masa KH. Wahid Hasyim dengan nama Madrasah Nidzamiyah, dan diformalkan pada masa kepemimpinan KH. Abdul Kholiq Hasyim (tahun 1962) dengan nama Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyyah (MASS).

Di tingkat menengah, Tebuireng juga dilengkapi SMP A. Wahid Hasyim (SMP AWH), Berdirinya SMP AWH ini hampir bersamaan dengan SMA A. Wahid Hasyim (tahun 1975). Dalam kurikulumnya, SMP AWH menggabungkan kurikulum Diknas dan kurikulum pesantren (Program Diniyah). Hingga kini SMP AWH sudah berhasil meluluskan banyak siswa dengan prestasi yang cukup membanggakan.

Pada tahun ajaran 2010-2011, SMP AWH membuka kelas unggulan, yaitu International Class Programme (ICP) yang dibina

sekolah Center Laboratorium Universitas Negeri Malang, bekerjasama dengan Cambridge International Programme (CIP). Prestasi yang juga membanggakan pernah disabet SMP AWH pada tahun 2003 ketika diberi kepercayaan sebagai Sekolah Target (Sekolah Percontohan) serta telah terakreditasi ulang dengan nilai terbaik tingkat SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Jombang (tahun 2003).

Tebuireng juga dilengkapi dengan SMA A. Wahid Hasyim (SMA AWH) yang berada di bawah naungan Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng dan berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. SMA AWH didirikan pada masa Kiai Yusuf Hasyim pada tahun 1975 dan sejak tahun 2005 mendapat status "Terakreditasi A" dan merupakan Sekolah Rintisan Standar Nasional.

Sejak tahun 2004, SMA AWH selalu mengirimkan siswa-siswinya yang berprestasi untuk mengikuti pertukaran pelajar (Program AFS) ke Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya.

Unit sekolah terbaru yang berdiri di masa kepemimpinan Gus Sholah adalah Madrasah Mu'allimin yang berdiri pada pertengahan tahun 2008. Sebagai lembaga *tafaqquh fiddin*, Madrasah Mu'allimin diharapkan mampu melahirkan kader-kader handal penerus perjuangan agama.

Dibentuknya Madrasah Mu'allimin merupakan respon atas usulan para alumni dan tokoh masyarakat, yang menginginkan Pesantren Tebuireng menghidupkan kembali sistem pendidikan salaf yang telah terbukti mampu mengantarkan alumninya menggapai sukses dalam berbagai bidang.

Pada awalnya, usulan itu ditindak lanjuti Gus Sholah dengan membentuk Tim Sebelas yang terdiri dari 11 anggota yang bertugas menyusun kurikulum, jenjang kelas, dan jadwal kegiatan belajar-mengajar Madrasah Mu'allimin. Hasil rancangan Tim 11 kemudian

dirapatkan bersama para pengasuh pesantren, guru senior dan alumni.

Hasil rapat memutuskan bahwa kegiatan belajar-mengajar Madrasah Mu'allimin dimulai pada tahun ajaran 2008-2009, dan berlaku efektif sejak Agustus 2008. Jenjang kelas yang ditempuh selama 6 tahun, dari kelas I sampai kelas VI, dengan ijazah setara Madrasah Aliyah. Selain materi wajib seperti nahwu, sharaf, tafsir, hadis, dan lain-lain, para siswa Madrasah Mu'allimin juga mendapat pembinaan bahasa Inggris dan Arab secara aktif, ilmu komputer (operasional dan programer), metode penulisan karya ilmiah, diskusi bahtsul masail, dan lain sebagainya.

Mulai tahun ajaran 2009-2010, Madrasah Mu'allimin mengadakan pembinaan penulisan berita dan karya ilmiah (KIR) dengan tutor dari Majalah dan Pustaka Tebuireng. Hasilnya, sejak tahun itu para siswa Mu'allimin menerbitkan buletin "Aliem", sebagian lainnya mengisi beberapa rubrik Majalah Tebuireng.

Pembinaan di Wisma (asrama) Mu'allimin dilakukan secara berjenjang dan mandiri. Para santri senior ikut serta membantu Pembina dalam mendidik dan memberi teladan kepada adik-adiknya. Cara seperti itu cukup efektif sehingga semua kegiatan di Wisma Mu'allimin dapat berjalan secara kontinyu dengan suasana yang baik.

Wisma ini merupakan wisma paling produktif di antara wisma-wisma lain di Tebuireng. Para siswa tampil dengan prestasi cukup baik di berbagai event yang diikuti, ditunjang dengan *akhlaqul karimah* yang menyejukkan. Siswa yang masuk Madrasah Mu'allimin selama 2 tahun, rata-rata sudah bisa menguasai kitab kuning standar.

Di tingkat perguruan tinggi, Tebuireng dilengkapi Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, sebuah lembaga pendidikan tinggi setingkat S1, setara perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama. Didirikan pada 6 September 2006 atas prakarsa Kiai Yusuf Hasyim dan dilestarikan oleh Gus Sholah.

Proses belajar-mengajar seluruhnya disampaikan dalam bahasa Arab dan Inggris. Rata-rata dosen Ma'had Aly adalah lulusan Timur Tengah dengan stratifikasi S-2 (Magister) dan S-3 (Doktoral). Para calon mahasiswa diharuskan memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat diterima sebagai mahasiswa Ma'had Aly, di antaranya telah lulus pendidikan serendah-rendahnya Madrasah Aliyah, memiliki wawasan luas tentang khazanah keilmuan Islam, memiliki kemampuan dasar di bidang ilmu yang akan menjadi pilihan spesialisasinya, dan lulus tes.

Manajemen Hubungan Masyarakat

Gus Sholah pasti meyakini bahwa kekuatan silaturrahim bisa memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Bahkan, silaturrahim atau membina hubungan yang baik dengan para kolega dan masyarakat adalah bukti keimanan seseorang. Inilah salah satu senjata Gus Sholah dalam mengembangkan Pondok Pesantren Tebuireng.

Dalam menjalin hubungan dengan lingkungannya, Gus Sholah berusaha membina hubungan kekerabatan dengan teman-teman dekat untuk lebih dekat lagi. Teman-temannya banyak tersebar di berbagai bidang, mulai kelompok profesional seperti direktur-direktur perusahaan, pejabat negara termasuk presiden, wapres dan para menteri, akademisi dan teman-teman kuliah di ITB, semuanya didekati dan dijadikan sebagai potensi yang bisa berkontribusi kepada kemajuan pondok pesantren.

Apa yang dilakukan Gus Sholah itu, ternyata membuahkan hasil, dengan mengalirnya sumbangan dari berbagai pihak, termasuk di antaranya Menteri Agama, Menteri Perhubungan, Wapres, keluarga dan teman-teman di ITB. Bukti keberhasilan Kiai Salahuddin membina hubungan dengan lingkungannya secara monumental di Pesantren Tebuireng, adalah berdirinya Wisma Suryo Kusumo, Wisma Haji Kalla, Wisma Saifuddin Zuhri dan Wisma Nyai Hj. Sholichah A. Wahid da Wisma KH. M. Ilyas.

Dilihat dari hubungan Gus Sholah dengan lingkungan masyarakat di sekitar Pesantren Tebuireng, beliau adalah kiai yang sangat dekat dengan warga. Gus Sholah mudah berbaur dan tidak segan-segan mendatangi undangan tahlil tetangga, tahlil yang dilakukan oleh pegawai dan sopir pondok pun didatangi. Padahal biasanya, hubungan antara kiai atau pengasuh pesantren dengan masyarakat dekat, sangat eksklusif dan jarang bisa berbaur. Tapi hal itu tidak berlaku dalam kamus hidup Gus Sholah. Beliau adalah sosok yang *low profile*, rendah hati, santun, sopan, mudah bergaul dan dekat dengan siapapun.

Demikian pula dengan Ibu Nyai Sholah atau Ibu Farida yang cukup akrab dengan ibu-ibu. Terbukti beliau kerapkali ikut tahlil dan turut terlibat dalam kegiatan Agustusan di kampung. Bu Nyai berhasil memperbaiki kinerja Unit Jasa Boga, yang bertanggung jawab menyediakan makanan untuk santri, guru dan karyawan.

Dari uraian ini, bisa dipahami bahwa Kiai Salahuddin Wahid merupakan sosok kiai komunikator yang efektif, baik komunikasi secara internal maupun eksternal. Kemampuannya membina persahabatan dan menjalin silaturrahim membawa berkah bagi Pesantren Tebuireng yang dipimpinnya.

Dari IKAHA ke UNHAS

Pesantren Tebuireng mendirikan Universitas Hasyim Asy'ari (Unhasy) pada tahun 1968. Karena tidak ada kesesuaian maka Unhasy memisahkan diri dari Pesantren Tebuireng. Untuk menyesuaikan diri dengan pesantren, maka nama Unhasy diubah menjadi Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (Ikaha).

Sejak tahun 2008 Yayasan Hasyim Asy'ari dan Pesantren Tebuireng mendekati Yayasan Unhasy untuk mencoba menjajaki adanya sinergi antara Pesantren Tebuireng dengan Ikaha. Gus Sholah pernah diminta untuk memberikan pidato ilmiah pada saat wisuda Ikaha tahun 2009.

Pada akhir 2010, Gus Sholah ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Unhasy. Selanjutnya Gus Sholah mengundang berbagai pihak untuk mencoba mencari siapa yang tepat diangkat menjadi Rektor Ikaha. Dalam rapat yang dihadiri antara lain oleh Prof. Imam Suprayogo dan Prof. Kacung Marijan. Prof. Imam Suprayogo melontarkan pendapat bahwa kalau Ikaha ingin maju sebaiknya yang diangkat menjadi Rektor adalah Gus Sholah.

Pada tanggal 27 Pebruari 2011, Gus Sholah dipercaya oleh Senat Ikaha sebagai Rektor Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA) yang beberapa tahun ke depan, rencananya akan diubah statusnya menjadi universitas. Gus Sholah menerima dengan catatan kalau Prof. Haris Supratno bersedia menjadi Wakil Rekor 1.

Rencana mengubah status IKAHA menjadi UNHASY (Universitas Hasyim Asy'ari) di masa depan, telah dipersiapkan dengan cermat. Berbagai rencana strategis telah disusun secara rapi, mulai dari target yang hendak dicapai, gambaran potensi yang dimiliki, berbagai kendala yang dihadapi serta solusinya, dan berbagai hal lainnya.

Sebagai rektor dan sekaligus kiai, Gus Sholah bersama tim suksesnya juga merancang sebuah universitas ala pesantren yang unggul dan modern, baik dari aspek bangunan fisik maupun bangunan keilmuan yang dikembangkan. Bahkan, desain bangunan tersebut diteliti dengan cermat oleh Gus Sholah sendiri yang notabene memang sosok insinyur handal. Sebagai langkah awal, dimulai pembangunan gedung kuliah pada akhir Oktober 2011.

Mendirikan Karya Monumental

Sebagai sosok pemimpin yang kuat dan bervisi (strong and visionary leadership), Gus Sholah selalu memiliki gambaran mental masa depan. Tatapannya ke arah yang akan datang, cita-citanya yang tinggi dan mimpi-mimpi yang tak pernah berhenti, semua itu adalah karakter Gus Sholah.

Masih ada karya monumental yang diwujudkan Gus Sholah bagi Tebuireng khususnya, dan juga bagi dunia pendidikan pesantren pada umumnya. Dalam sebuah visinya, ia menegaskan:

"Ke depan, selain saya ingin ada perbaikan yang dilakukan secara terus menerus sebagai budaya mutu agar Pesantren Tebuireng ini benar-benar berkualitas dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Saya juga ingin menggagas adanya Museum Islam Nusantara Hasyim Asy'ari, di dalam museum itu akan ditampilkan informasi tentang pesan-pesan ulama dalam mendirikan Negara Republik Indonesia dan berperang dalam mempertahankan kemerdekaan.

"Saya juga memimpikan, ke depan, ada Tebuireng-tebuireng yang memiliki lahan luas dan memadai serta fasilitas yang sangat lengkap dan modern. Memang, semua cita-cita bermula dari mimpi," kata Gus Sholah.

Selain bangunan pesantren, komplek Makam Tebuireng juga tak luput dari perhatian Gus Sholah untuk ikut diperhatikan. Makam Tebuireng merupakan tempat dimakamkannya keluarga besar Hadratus Syekh KH Hasyim Asy'ari. Lokasinya berada tepat di tengah-tengah pondok Pesantren Tebuireng. Para pengasuh Tebuireng dan anggota keluarga serta tokoh-tokoh Tebuireng lainnya yang telah wafat, dikebumikan di sana.

Para tokoh yang dimakamkan di sana antara lain: Hadratus Syekh KH Hasyim Asy'ari dan Nyai Hj. Nafiqoh (isteri), KH A. Wahid Hasyim dan Nyai Hj. Sholichah (isteri), KH Abdul Kholik Hasyim, KH Ma'shum Ali (pengarang kitab sharaf Amtsilatus Tashrifiyyah) dan Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim (isteri), KH. Yusuf Hasyim dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Sejak dahulu, makam ini selalu ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai penjuru Nusantara. Mereka berasal dari berbagai kalangan, termasuk para peneliti, akademisi dan pemerhati

pesantren, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Setelah wafatnya Gus Dur pada 30 Desember 2009, Makam Tebuireng semakin ramai dikunjungi peziarah.

Pada hari-hari biasa, makam itu juga tidak pernah sepi pengunjung. Para peziarah datang silih berganti, ada yang datang berombongan dengan naik bis, mobil besar, bahkan truk. Ada pula yang datang dengan mobil pribadi. Kian ramainya peziarah di Makam Tebuireng mendorong pihak pesantren untuk menyediakan segala fasilitas yang sebenarnya masih serba terbatas.

Untuk mengatasi masalah keterbatasan fasilitas ini, Gus Sholah berinisatif menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara untuk menyampaikan perkembangan terkini Makam Tebuireng, terutama kondisi pasca wafatnya Gus Dur. Dalam pandangan Gus Sholah, pengelolaan makam mantan Presiden (Gus Dur) bukan hanya tanggung jawab keluarga atau Pesantren Tebuireng saja, melainkan juga tanggung jawab pemerintah. Presiden SBY menyanggupi untuk membantu melengkapi fasilitas yang dibutuhkan dengan mengikutsertakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Sejak akhir tahun 2010, pembangunan fasilitas ziarah di makam Tebuireng sudah dimulai dengan melakukan perluasan jalan raya dan pembangunan tempat parkir (terminal bus), pembebasan tanah untuk jalan, relokasi stand pedagang, relokasi jalan masuk menuju pondok, dan sebagainya.

Kini, selain Pesantren Tebuireng yang tengah berkembang menjadi sebuah pesantren modern dengan fasilitas lengkap, hal lain yang menjadi daya tarik dan bahkan denyut nadi Kebupaten Jombang, adalah Makam Tebuireng. Kompleks makam yang membawa berkah bagi banyak pihak, termasuk juga para pedagang. Mereka membuka kios-kios semi permanen di sepanjang jalan menuju makam. Tempat parkir bis dibangun di sebelah barat Masjid Ulul Albab. Jembatan tua yang terletak di gerbang masuk areal

parkir yang sempat retak-retak gara-gara terlalu sering dilewati bis, dibangun dengan cor beton yang kokoh. Bangunan MCK juga disediakan di ujung barat tempat parkir.

Walhasil, Pondok Pesantren Tebuireng kini telah menjadi salah satu tujuan wisata religi dalam paket ziarah Wali Songo. Tak salah jika Makam Tebuireng oleh para peziarah disebut sebagai Wali Kesepuluh.

Selain pengembangan komplek Makam Tebuireng, karya monumental yang menjadi visinya, adalah Museum Islam Nusantara KH. Hasyim Asy'ari (MINHA). Nama ini kemudian berubah menjadi Museum Islam Indonesia KH. Hasyim Asy'ari (MINHA) ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Desember 2018. Bangunan lima lantai yang berdiri gagah dengan model bangunan Piramida itu berlokasi 500 meter bagian selatan dari lokasi Pesantren Tebuireng.

Peresmian
Museum Islam Nusantara Hasyim Asy'ari

Selain pengembangan komplek Makam Tebuireng, karya monumental yang menjadi visinya, adalah Museum Islam Nusantara KH. Hasyim Asy'ari (MINHA). Nama ini kemudian berubah menjadi Museum Islam Indonesia KH. Hasyim Asy'ari (MINHA) ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Desember 2018. Bangunan lima lantai yang berdiri gagah dengan model bangunan Piramida itu berlokasi 500 meter bagian selatan dari lokasi Pesantren Tebuireng.

Di bawah kepengasuhan Gus Sholah, Pesantren Tebuireng berkembang meraksasa. Lembaga, infra struktur, personil dan daya dukung lain meningkat kuantitas dan kualitasnya. Unit-unit dan bidang baru bermunculan, dengan Pesantren Tebuireng sebagai sentralnya.

Dalam fase perkembangan yang demikian, sudah barang tentu Gus Sholah memerlukan keterlibatan banyak pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan Pesantren. Terutama pihak keluarga besar Mbah Hasyim Asy'ari.

Gus Sholah mewanti-wanti kepada Billy Wahid, putra keduanya, agar ikut terlibat dalam pembangunan untuk memajukan Pesantren Tebuireng sesuai dengan kapasitasnya.

"Kamu harus ikut berjuang, ikut bercapek-capek, membangun dan mengembangkan warisan *simbah-buyutmu* ini. Agar nanti Mbah Hasyim Asy'ari merasa senang melihat anak, cucu, buyut dan cicitnya merawat dan mengembangkan warisannya," ujar Gus Sholah.

Billy ditugasi oleh ayahnya untuk terus ikut dalam proses pembangunan Rumah Sakit Hasyim Asy'ari sampai nanti beroperasi. Gus Sholah mengharapkan kelak Rumah Sakit ini bisa dikelola secara profesional dan menjadi kebanggaan kita. Rumah Sakit ini nantinya bisa membantu masyarakat umum yang ingin mendapatkan pengobatan secara baik dan murah, khususnya warga Jombang yang

tidak mampu, agar mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan murah.

Billy pernah bertanya kepada ayahnya, "Kenapa sih Papa kerjakan semua ini. Ya pesantren, ya rumah sakit, ya memproduksi film. Dan ada kesan Papa buru-buru ingin menyelesaikan semuanya?"

"Itulah hidup. Kita harus berjuang, berpayah-payah, agar hidup kita bermakna. Yaitu ketika kita bisa melakukan sesuatu yang membawa manfaat bagi orang lain," tutur Gus Sholah seperti ditirukan Billy.

Perihal produksi film, Gus Sholah menyatakan, sejarah itu harus didokumentasikan agar tidak dilupakan orang.

"Generasi boleh berganti dan orang boleh mati. Tapi sejarah harus tetap hidup dan diingat oleh orang. Karena itu sejarah harus didokumentasikan," ujar Gus Sholah lagi.

Berdasarkan kenangan Mbak Wila terkait kepemiminan Gus Sholah di Pesantren Tebuireng, ada karakter dan prinsip kepemimpinan yang kuat dan beda pada diri Gus Sholah. Beliau, kata Mbak Wila, berhasil meluruskan dan mengubah kondisi atau ketentuan tidak tertulis yang menurutnya kurang pas bagi kemajuan pesantren. Dan perubahan itu berlangsung secara *smooth*. Misalnya, santri yang sekolah di Tebuireng harus mondok di Tebuireng, yang tidak mondok di Tebuireng tidak boleh sekolah di Tebuireng. Ada kondisi seperti itu sebelum Gus Sholah masuk. Masing-masing dzurriyah punya pesantren, dan para santri yang mondok di sana tidak boleh sekolah di Tebuireng, dan/atau sebaliknya.

Pada akhirnya oleh Gus Sholah semuanya dijadikan satu. Santri dari Pondok Gus Irfan, Gus Hakam, Pondok Cukir dan Pondok Seblak semuanya diperbolehkan sekolah di Tebuireng. "Malah pembayarannya ditertibkan menjadi satu di Tebuireng. Setiap bulan dananya dibagikan ke unit-unit pesantren yang ada. Jadi standar biayanya sama," ujar Mbak Wila.

Yang juga menarik dari diri Gus Sholah, adalah menyangkut pengelolaan aset tanah wakaf yang banyak dimiliki Pesantren Tebuireng. Kebanyakan orang mewakafkan tanah kosong ke Pesantren Tebuireng, untuk dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan atau yang lain, tanpa memberikan anggaran sama sekali. Yang ada adalah wakaf secara kosongan.

Menghadapi kenyataan seperti itu Gus Sholah selalu bertanya kepada sang waqif: "Tanahnya mau dibuat apa?" Dijawab oleh yang pemberi wakaf, untuk dibangun sekolah, atau apa. Gus Sholah pun menyanggupinya. "Ya sudah nanti kita bangun sekolah seperti permintaan Waqif."

Melihat respon Gus Sholah seperti itu ketika menerima pemberian wakaf tanah, dzurriyah merasa aneh, dan menyindir, "Ngasih wakaf kok bikin susah. Kita yang disuruh bangunin." Seperti itulah cara pandang yang selama ini berkembang di lingkungan pengelola Pesantren Tebuireng.

Gus Sholah menegaskan, "Lha itu amanah dari pemberi wakaf. Waqif minta dibangunin sekolah, ya kita harus bangun seusai harapannya."

Ada lagi mengenai pembangunan pondok pesantren cabang (filial Tebuireng) di berbagai daerah. Kemudian pembangunannya oleh Gus Sholah disubsidi sekitar Rp 300 juta. Menurut pandangan sebagian pihak Tebuireng ini aneh. Tidak lazim.

"Mau membuat cabang kok minta disubsidi. Enak banget. Kalau tidak bisa membantu Tebuireng minimal ya jangan nyusahin," tuturnya berbisik.

Mendengar selentingan seperti itu Gus Sholah menimpali, "Lho ini kan amanah. Kita dikasih amanah, kita harus ngembangin mereka."

"Hal-hal seperti ini kalau diceritakan semuanya, kita bisa merinding menyaksikan bagaimana Pak Sholah menyikapinya," ujar Wila.

Doktor HC Pertama dari UIN Malang

Melihat akselerasi pengembangan bidang pendidikan di Pesantren Tebuireng yang masif pada lima tahun awal kiprahnya sebagai pengasuh, Rektor UIN Malik Ibrahim Malang tertarik untuk menganugerahi penghargaan kepada Gus Sholah. Melalui Sidang Senat Terbuka UIN Malang pada 2011 Salahuddin Wahid dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang. Dia menyampaikan orasi ilmiah dengan judul "Transformasi Pesantren Tebuireng Menjaga Tradisi di Tengah Tantangan".

Prof. Dr. Imam Suprayogo, Rektor UIN Malang, menjelaskan, Gus Sholah merupakan orang pertama yang menerima gelar Doktor Kehormatan dari UIN Maliki. Selama UIN Malang berdiri, belum pernah memberikan gelar tersebut kepada siapa pun.

Dari langkah yang dilakukan Gus Sholah selama lima tahun sebagai masa gemilang, maka dapat dikatakan 6 tahun kemudian sampai akhir hayatnya, ia sedang berada di masa yang cemerlang. Masa keemasan.

Teman dekat sekaligus adiknya, Umar Wahid, mengatakan, "Saya melihat keberhasilan Gus Sholah itu di Tebuireng. Saya melihat kepemimpinannya muncul dengan optimal di Tebuireng."

"Saya melihat rasa kemanusiaannya mencapai puncak itu di Tebuireng. Optimal segala-galanya di diri Gus Sholah saat ia di Tebuireng. Jadi prestasinya yang paling puncak itu ya di Tebuireng, dan pada saat seperti itu beliau wafat," kenang Umar Wahid.

Siswono Yudohusodo, kawan karib Gus Sholah semasa SMA dan masuk perguruan tinggi yang sama di ITB, menuturkan, "Kita semua, teman-teman, juga sangat menghargai ketika di bagian akhir kehidupannya, ia memimpin Pesantren Tebuireng. Arsitek banyak, tapi yang menjadi kiai sangat terbatas, antara lain Gus Sholah. Seorang yang masa mudanya begitu aktif, begitu giat, di hari tuanya

menjadi pendidik berbasis agama Islam. Di bawah kepemimpinannya, Tebuireng mengalami kemajuan yang sangat berarti."

"Saya melihat, hal yang paling baik kita tinggalkan dalam hidup ini adalah mendidik generasi yang lebih muda untuk menjadi lebih baik dari kita. Jadi, pengabdian di bidang pendidikan di hari tua itu menurut saya adalah berkah Allah SWT. Kalau seseorang diberi kesempatan oleh Tuhan di hari tuanya menjadi pendidik, itu patut disyukuri," tegas Siswono mengenang Gus Sholah. ❖

Penganugerahan

Gelar Honoris Causa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bersama Putra Kedua

Billy

Dari Elitis ke Populis

SEMASA menekuni profesi sebagai konsultan dan arsitek, dan belum terjun ke lapangan sosial sebagai tokoh NU dan tokoh publik, Salahuddin Wahid memiliki jejaring persetemanan dengan kalangan profesional dan pengusaha. Karena itu ada yang mengesankan Gus Sholah figur yang cenderung elitis, tidak populis. Kurang terlibat akrab untuk mengurusi persoalan umat di bawah. Paling tidak demikianlah pandangan seorang Bu Lily Chodijah Wahid, sang adik.

Dengan membandingkan Gus Sholah dengan Gus Dur, Bu Lily Wahid menyatakan Gus Sholah beda dengan Gus Dur yang sejak dulu populis, sementara Gus Sholah itu lebih elitis. "Sehingga figur seperti dia, sesuai dengan pemetaan politik saya, sulit diterima di NU dan tidak mungkin bisa berkompetisi di NU," ujarnya.

Selain aktif di Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di mana ia menjadi sekjennya (1994), ia juga terlibat di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai Ketua Departemen Konsultasi Manajemen (1998). Belum lagi kesibukannya sebagai Direktur Utama PT Mirazh, sebuah perusahaan konsultan yang didirikan bersama sejumlah rekannya. PT Mirazh ini mengalami mati suri sejak krisis moneter melanda negeri ini.

Elitis, populis, atau apalah. Yang pasti, ketika Salahuddin Wahid memulai debutnya di NU dengan memberanikan diri berkompetisi di Muktamar Lirboyo, Kediri tahun 1999, kehadirannya mencengangkan publik Nahdliyin. Meski kalah suara dari KH. Hasyim Muzadi, pada muktamar tersebut KH. Salahuddin mendapatkan dukungan 57 suara. Banyak muktamirin yang terkejut dengan perolehan suara

yang diraih Gus Sholah. Sebagai pendatang baru di lingkungan formal-stukrutral NU, kehadiran Gus Sholah dinilai membawa dinamikanya sendiri.

Sejak itu, bahkan sesudah ia mendampingi Wiranto menjadi pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden tahun 2004, interaksi sosial Salahuddin Wahid dengan publik di bawah, termasuk dengan umat NU, demikian cair. Tidak ada kesan sama sekali sikap elitis Gus Solah sebagaimana penilaian Bu Lily Wahid.

Bahkan, menurut sejumlah kawan yang banyak membantu Gus Solah sejak era Reformasi, sikap populis Gus Solah justru dinilai melampaui batas. Banyak pengalaman yang menunjukkan hal ini. Tamu yang datang ke rumahnya di Tendean, atau di Jombang, terdiri atas kelompok masyarakat yang beragam, disambut tanpa pandang bulu. Setiap ada undangan dari mana pun yang mengharapkan kehadirannya, seringkali Gus Sholah berusaha memenuhi untuk bisa hadir tanpa memperdulikan siapa dan kelas apa yang mengundang.

Misalnya pernah diundang oleh PMII Cabang di Bandar Lampung, hanya acara pelantikan pengurus cabang. Beliau menyempatkan datang dan menginap di Hotel Marcopollo, satu kamar bersama Gugus .

Yang paling menikmati keterbukaan dan sikap populistisnya Gus Solah terutama anak-anak muda aktivis NU, PMII dan organisasi kelompok Cipayung lain. Banyak aktivis muda NU dan pemuda lain yang mengaku nyaman bila bertemu dan berdiskusi dengan Gus Sholah.

“Gus, cairkan wesel ini ke kantor pos. Berikan uangnya untuk adik-adik PMII itu,” ujarnya kepada Gugus Joko Waskito, anak muda NU yang cukup lama mendampingi Gus Sholah.

Menurut Gugus, wesel pos itu adalah kiriman dari media cetak yang merupakan honoraria penulisan atikel Gus Solah yang

tidak pernah diambil. Dan wesel-wesel pos itu selalu dicairkan dan diberikan seluruhnya kepada adik-adik PMII yang datang bertemu. Sudah menjadi rahasia umum jika keluarga Wahid Hasyim memang dikenal ringan tangan dalam urusan membantu orang lain.

Masih dari penuturan Gugus, setiap ada aktivis datang dan bertemu Gus Sholah untuk menyampaikan proposal bantuan, pulangnya hampir pasti diberi sumbangan. Lebih-lebih jika untuk keperluan penyelesaian kuliah. Banyak anak muda NU yang menyelesaikan kuliah di S2 atau S3 atas bantuan Gus Sholah.

Sikap entengan seperti itu terkadang sering disalahgunakan oleh sementara orang. Ada anak muda yang dikenal Gugus datang ke beliau, menyampaikan rencana kegiatan. "Padahal saya tahu, kegiatan yang dimaksudkan itu tidak ada sama sekali," tuturnya. Ketika mau pulang Gus Solah meminta Gugus untuk mencairkan wesel di kantor pos untuk diberikan kepada yang bersangkutan.

"*Nggapleki tenan* (kurang ajar betul) anak-anak itu. *Mosok* Gus Sholah dibohongin," ujarnya mengenang. Dan kejadian seperti ini, menurut Gugus, berulang kali terjadi.

Kesaksian serupa disampaikan Mbak Wilawati. Menurut perempuan yang masih berhubungan keluarga itu, Gus Solah itu orangnya tidak tegaan dan tidak pilih-pilih orang untuk bisa berinteraksi dengannya.

"Jiwa solidernya tinggi banget. Gampang menaruh belas kasihan kepada orang lain. Megang uang sejuta yang dikasi sejuta," tutur Mbak Wila.

Sama dengan kesaksian Cak Gugus, Mbak Wilawati pun mengingatkan sepenggal cerita tentang Gus Solah terkait dengan kisah Kongres PMII yang menyisakan tunggakan. Usai kongres yang berlangsung beberapa hari di Kalimantan, panitia ternyata menanggung banyak hutang yang harus dibayarkan. Datanglah mereka ke Gus Sholah. Mengadu, minta saran dan solusi. Maksudnya

sesungguhnya minta bantuan. Menurut Wila, waktu itu Gus Sholah baru menjual sebuah rumah ukuran kecil di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Rumah itu sehari-harinya dimanfaatkan sebagai basecamp anak-anak muda "geng" HMI yang banyak membantu. Selain dengan anak-anak PMII dan Ansor, Gus Sholah memang juga dekat dengan aktivis HMI, seperti dr. Ali Mahsun, Arifin SJ, Ali Safaat (kini Dekan Fakultas Hukum Unibraw), dan juga Sarmuji (kini anggota DPR RI, Ketua DPD Golkar Jatim).

Mereka tidak menjelaskan laku berapa rumah tersebut. Ketika didatangi adik-adik PMII yang meminta bantuan untuk menutupi utang-utang yang harus dibayarkan, tanpa pikir panjang Gus Sholah masuk kamar mengambil uang puluhan juta mata uang rupiah ditambah 1.000 (USD). "Hasil penjualan rumah itu sebagian dikasikan ke anak-anak PMII," tutur Wila.

Jika diingatkan untuk tidak gampang menyumbang ke kelompok yang tidak jelas eksistensinya, Gus Sholah hanya diam.

Suatu waktu Gus Sholah berkata, "Siapapun yang minta tolong, baik tenaga, pikiran, atau materi, kalau Sampean bisa bantu, bantu saja. Tapi jangan pamrih apapun. Anggap saja ya sudah, biar nggak kecewa. Yang kedua, jangan anggap kebaikan-kebaikan seperti itu hilang. Kebaikan-kebaikan seperti itulah yang selalu mengiringi langkah Sampean ke mana pun. Sehingga kalau ada apa-apa, itu jadi penyelamatnya."

Sewaktu masih aktif di Yayasan Bina Buana (YBB) dan Yayasan Forum Indonesia Satu (FIS), perhatian Gus Sholah banyak tercurahkan untuk menangani kegiatan sosial dan kemanusiaan. Kebetulan waktu itu terjadi konflik horizontal antara masyarakat muslim dan nonmuslim di Maluku. Pasca terjadi bentrokaan, berbagai upaya rekonsiliasi terus dilakukan oleh banyak pihak. Termasuk oleh Gus Sholah melalui YBB dan FIS. Gus Sholah mengadakan Malam Dana dengan menampilkan konser musik di Hotel Mulia, didukung

puluhan artis Ibukota. Sesuai dengan permohonan masyarakat Maluku, dana yang berhasil dihimpun dibelikan kapal penyeberangan dan diserahkan langsung oleh Gus Sholah ke warga Maluku.

Kegiatan sosial berskala besar lain yang dikerjakan Gus Sholah, ialah memberdayakan sejumlah kelompok tani di Cigugur, Kuningan Jawa Barat, dan pedagang kaki lima di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.

Untuk memberdayakan kelompok tani di Cigugur, Gus Sholah mengucurkan dana bergulir ratusan juta rupiah melalui Koperasi Al-Hidayah Cigugur Kuningan. Untuk membantu petani padi menangani kegiatan pasca panen, YBB bekerja sama dengan perusahaan swasta dari Jepang, membantu pengadaan alat perontok padi dengan teknologi tepat guna.

"Selama dua bulan kami berkeliling ke Karawang, Indramayu sampai Kuningan, bersama tim dari Jepang, untuk melakukan sosialisasi dan memperagakan bagaimana cara mengoperasikan alat tersebut," kata Saifullah Ma'shum.

Demikian juga dengan kelompok pedagang kaki lima di Kota Mataram, Gus Sholah membantu dana hibah ratusan juta rupiah.

Mungkin benar kata Bu Lily Chodijah Wahid jika Gus Sholah itu cenderung elitis. Tetapi itu dahulu, ketika masih menekuni dunia bisnis dan hidup sebagai kaum profesional muda. Tetapi sikap dan kecenderungan elitis berubah 180 derajat ketika Gus Sholah aktif dan terlibat di NU.

Suatu ketika, ketika Gus Dur menjadi Presiden, Gus Sholah ke Cirebon, naik kereta api Cirebon Express, didampingi Gugus. Setelah di atas kereta baru diketahui kalau oleh sopirnya dibelikan tiket bisnis, bukan eksekutif.

"*Pak, kulo tak ngurus ten kondekture, kulo upgrade ten eksekutif* (saya mau mengurus ke kondekturnya. Saya mau upgrade ke eksekutif)," ujar Gugus.

"Gak usah Gus, kita beli tiketnya bisnis ya gerbongnya bisnis saja."

Para penumpang di gerbong itu banyak yang berbisik-bisik, "*Iku gak adike presiden ta? Adike Gus Dur kok numpak bisnis*? (Itu adiknya Presiden kan? Adiknya Gus Dur koq naik bisnis)."

Keluarga Wahid juga dikenal dengan kecerdasannya. Gus Sholah selain cerdas, juga dikenal sangat cermat dalam merencanakan sesuatu.

Gugus menuturkan, pada waktu Jakarta mengalami banjir besar tahun 2012, Gus Sholah bersama beberapa orang sedang berada di Surabaya. Ketika mau balik ke Jakarta, mereka tidak bareng satu pesawat. Masing-masing memilih naik pesawat yang berbeda. Ada kawan yang beli tiket Garuda ke Jakarta, sedang Gugus memilih pesawat yang murah, Lion.

"Bapak mau naik apa? Dibelikan Garuda atau yang lain?" tanya Gugus.

"Saya carikan Merpati saja Gus, yang jurusan Bandung."

Gugus tidak banyak tanya. Dia mengira Gus Sholah masih ada kegiatan di Bandung.

Di luar perhitungan banyak orang, ternyata orang yang pertama kali masuk Jakarta adalah Gus Sholah. Pasalnya, jalan yang menghubungkan Bandara Soeta ke kota Jakarta tergenang banjir parah. Jalan tol tidak bisa dilalui. Sementara dari Bandung ke Mampang tidak ada hambatan sama sekali. Orang lain yang berangkat sama-sama dari Surabaya bisa masuk Jakarta selang puluhan jam setelahnya. Nah itu dia salah satu kecerdasan Gus Sholah. ❖

Produksi Film Jejak Langkah 2 Ulama dan Misteri di Dua Bulan Terakhir

SAAT Gus Sholah mengasuh Tebuireng pada 2006 menggantikan pamannya, KH. Muhammad Yusuf Hasyim (Pak Ud), pondok pesantren di dekat Pabrik Gula Tjoekir itu sedang dalam kondisi memprihatinkan. Sebagai pesantren yang didirikan oleh Kiai besar, pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, KH. Hasyim Asy'ari, dan sempat pula jadi rujukan keilmuan di Jawa, Tebuireng pada 2006 ibarat kehilangan taringnya. Santri-santri banyak yang boyong meninggalkan Tebuireng, bangunan pesantren seperti terlantar, dan pengajian menjadi redup.

"Kenapa sih ya orang-orang di pesantren ini kemudian pindah dari Tebuireng apa kendalanya?" begitu tanya Gus Sholah suatu hari. Gus Sholah sendiri meski sebagai cucu Mbah Hasyim yang menggendong nama besar kakeknya, tetap dipandang setengah hati sebelah mata saat menjadi pengasuh Tebuireng pertama kali. Tak lain karena latar belakang pendidikannya yang orang-orang anggap kurang "nyantri". Gus Sholah hanya mengaji di rumah, seringnya bersama Mbah Bisri, dan tidak mengenyam pendidikan pesantren salaf seperti abangnya, Gus Dur. "Seorang arsitek bisa apa?" mungkin begitulah benak orang-orang berujar.

Siapa sangka justru latar belakang pendidikan formalnya yang ajek ini menjadikan Gus Sholah pengasuh yang cemerlang. Menurut pengakuan adiknya, Gus Umar, tak seperti Gus Dur yang dalam bergerak cenderung banyak improvisasi, Gus Sholah adalah tipikal orang dengan cara berpikir yang sistematis dan analistis. Maka setiap

pilihan dan keputusan tidak bisa hanya mengandalkan dugaan atau intuisi saja, tapi harus berdasarkan data-data yang ada. Begitulah bagaimana Gus Sholah kemudian membangun Tebuireng, berusaha mengembalikannya ke "khittah" pesantren ini.

Sebagai seorang arsitek, yang pertama tampak di mata Gus Sholah perlu pembenahan jelas bangunan. Tebuireng butuh perbaikan, dan untuk mempertahankan santri yang tersisa agar tidak ikutan boyong adalah dengan membangun pesantren yang nyaman untuk ditinggali. Pesantren tidak boleh terlihat kumuh dan kusam, dan juga asupan gizi santri haruslah sepantasnya. Pola pikir seperti ini mungkin agak berbeda dengan banyak kiai tradisional, yang berpandangan bahwa santri itu yang penting ngaji dan khidmah, urusan makan dan tidur seadanya. Justru kalau santri tidur tak beralas misalnya, atau makan sedikit tanpa lauk yang cukup, itu bagus sebagai sarana riadah, latihan mengekang hawa nafsu. Gus Sholah agaknya kurang sependapat dengan konsep seperti itu, dan baginya kualitas hidup santri akan berbanding lurus dengan kualitas belajarnya.

Maka tak jarang Gus Sholah mendanai sendiri pembangunan infrastruktur pesantren untuk menopang tujuannya itu. Saat ditanyakan mengapa Gus Sholah berani saja membiayai pembangunan yang belum tentu akan untung, ia hanya menjawab, "Kalau mau mendapatkan hasilnya jangan memikirkan hal itu, inilah salah satu strategi bagaimana cara mencerdaskan anak bangsa. Udah jangan memikirkan itu, masih banyak yang harus dipikirkan dan banyak yang membutuhkan pendidikan di luar sana."

Salah satu yang menjadi sorotan Gus Sholah saat didapuk menjadi pengasuh Tebuireng adalah susunan organisasi pesantren yang kurang terurus, tidak menyambung satu sama lain. Mungkin karena banyak *dzuriah* pesantren yang tinggal di Tebuireng, dan masing-masing orang merasa memiliki pengaruh dan kepemilikan

atas sebagian pesantren, tanah, dan usahanya. Bukan hal mudah untuk menyatukan berbagai kepentingan di pesantren, dan meyakinkan masing-masing orang untuk berjalan berdampingan. "Kita tidak pernah membereskan problem-problem itu, kita harus mengembangkan kader-kader SDM kita sendiri dan membuat kehidupan di pesantren ini semakin membaik dari pada menunggu orang lain," pungkas Gus Sholah.

Berkat keteguhan pendiriannya itu, juga koneksi yang ia miliki, dan pengalamannya yang malang-melintang baik dalam bisnis maupun politik, Gus Sholah boleh dikatakan berhasil memodernisasi Pesantren Tebuireng setelah sebelumnya nyaris tumbang. Ada 35 lembaga baru di bawah naungan Pesantren Tebuireng sejak Gus Sholah menjadi pengasuh, baik yang didirikan dengan dana pribadi maupun dari yayasan pesantren. Lembaga-lembaga itu merupakan perwujudan dari pengembangan SDM Tebuireng, dan usaha untuk memberdayakan pesantren agar mandiri secara ekonomi. Salah satu dari lembaga yang berdiri itu adalah Rumah Produksi Tebuireng, yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan Maksi di kalangan anggotanya (akronim dari Rumah Produksi).

Maksi berdiri pada tahun 2018, setelah sebelumnya di Jawa Timur berlangsung pilkada yang memenangkan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Anggota awal Maksi adalah santri-santri Tebuireng yang pernah terlibat menggarap video-video pendek Khofifah-Emil pada pilkada lalu. Gus Sholah yang melihat potensi para santri itu kemudian memanggil Amin Zein, yang kelak menjadi produser di Rumah Produksi Tebuireng.

"Kamu harus buat film ini." Gus Sholah menyampaikan proposal film tentang pesantren dan kemerdekaan kepada Cak Amin, panggilan akrab Amin Zein. "Jangan mikirkan soal alat-alat, kerjakan dulu, anak-anak mampu," tandasnya lagi. Sebagai santri, Cak Amin manut saja dituturi begitu, ia sendiri bukan buta sama sekali dalam dunia

perfilman, setidaknya pada 2001 Cak Amin pernah ikut berperan dalam film garapan Hanung Bramantyo berjudul "Doa Bilik Santri" yang mengambil latar di Pesantren Tebuireng. Film pertama garapan Maksi itu kemudian diberi judul "Binar". Usai gala premiere "Binar" di Pesantren Tebuireng, tim Maksi menggelar roadshow keliling mulai dari Jombang hingga Blitar sebagai tempat pengambilan gambar mereka. Ribuan penonton berdatangan, dan mereka yang menonton pemutaran film ini tidak ditarik biaya apapun, karena Maksi meniatkannya sebagai dakwah. "Kami tidak menayangkan di bioskop, melainkan ke jantung masyarakat dengan mendatangi tempat mereka," ujar Cak Amin selaku co-produser.

Tak puas hanya dengan film "Binar", Maksi memproduksi lagi film keduanya, "Sakinah" yang tayang perdana pada Sabtu, 13 April 2019. Film kedua ini berfokus kepada penyampaian pesan bagaimana membangun keluarga yang sakinah. Para aktor dan kru diambil dari unsur Pesantren Tebuireng sendiri. Ribuan orang memadati Tebuireng selama pemutaran film berlangsung. "Penuh, sampai buka-tutup gerbang," Cak Amin menuturkan.

Seperti juga film sebelumnya, para penonton tidak ditarik biaya. Lantas darimana Maksi mengambil keuntungan untuk bisa memproduksi film lagi? Dakwah memang satu hal, tapi produksi film adalah hal lain yang membutuhkan dana dan properti. Di sinilah peran Gus Sholah sebagai promotor pendirian Rumah Produksi Tebuireng. Gus Sholah mengadakan bedah film dan ikut mengundang tokoh-tokoh penting dan nasional saat pemutaran film produksi Maksi. Ia mempromosikan kemampuan santri-santrinya dalam memproduksi film, meski dengan latar belakang yang kurang mumpuni di dunia perfilman, dan dengan properti yang kurang memadai. Bagaimana jika santri-santri ini dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan yang cukup dalam perfilman? Atau dibekali dengan peralatan dan properti yang bagus?

Sebelum mendapatkan sponsor, pembiayaan produksi Maksi ditanggung oleh Gus Sholah dan Yayasan Pesantren Tebuireng. Sementara kru Maksi dikumpulkan dari santri-santri Tebuireng, mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari (Unhasy), mahasiswa Ma'had Aly Tebuireng, dan kader-kader dari Komunitas Photography Tebuireng (Kopi Ireng). Dan berkat pamor Tebuireng dalam produksi film inilah, suatu hari Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO) Muhammadiyah sowan ke *ndalem* Gus Sholah di Tebuireng. Perihal maksud kedatangan LSBO Muhammadiyah adalah untuk menawarkan kerjasama produksi film tentang dua pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul 'Ulama.

Sejatinya LSBO Muhammadiyah sebelum mendatangi kediaman Gus Sholah, sudah lebih dulu menawarkan iktikad pembuatan film ini kepada Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama (PBNU) di Jakarta. Namun gayung belum bersambut. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi Gus Sholah sebagai representasi warga Nahdliyyin, yang mana ia bukan sembarang orang NU, pun cucu dari tokoh yang akan mereka filmkan nanti, KH. Hasyim Asy'ari, dan waktu itu pun sedang memegang tongkat kepemimpinan pesantren peninggalan kakeknya. Tiada tokoh yang lebih pas kiranya selain Gus Sholah untuk dihubungi LSBO Muhammadiyah, di samping Pesantren Tebuireng juga sudah memiliki Rumah Produksinya sendiri.

"Wah aku tertarik sekali mau mengfilmkan ini, setelah Sakinah langsung garap film ini ya," pinta Gus Sholah kepada Cak Amin waktu itu setelah menerima kunjungan dari LSBO Muhammadiyah. "Segera kamu riset untuk khusus mengumpulkan tulisan-tulisan hadratusy syaikh dan beberapa orang yang menulis tentang beliau secara utuh semenjak beliau lahir sampai beliau wafat."

"Kalau tiga tahun sebelum akhir wafat beliau itu sudah difilmkan di 'Sang Kiai' Yai."

"Pokoknya yang belum ada tentang beliau, kecuali yang ada di 'Sang Kiai', tolong kamu dengan tim mencermati semuanya yang itu benar-benar fakta sejarah, mulai dari Mbah Hasyim mendirikan pesantren di Keras, nyantri di Kiai Kholil Bangkalan, sampai ke Mekkah. Pokoknya itu diriset semuanya."

Atas dawuh Gus Sholah tadi, dibentuklah tim riset yang dipilih dari anggota Tebuireng Online dan Pusat Kajian Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. Merekalah yang kemudian melakukan riset terkait pendiri NU tersebut sebagai bahan produksi film Jejak Langkah 2 Ulama nanti, sementara riset tentang sosok KH. Ahmad Dahlan menjadi tanggung jawab Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Tim Riset Tebuireng mengumpulkan buku-buku yang menuliskan tentang KH. Hasyim Asy'ari, dan juga menemui santri-santri beliau yang masih hidup dan bisa ditemui. Hanya segelintir santri yang pernah belajar langsung kepada Mbah Hasyim dan panjang umur sampai 2019, di antara mereka adalah KH. Affandi dari Nganjuk, KH. Ruhan Sanusi dari Ngoro Jombang, KH. Masyhudi dari Wajak Malang, dan KH. Abu Bakar dari Diwek Jombang.

Hasil riset tersebut lantas dipresentasikan langsung kepada Gus Sholah yang nantinya akan dirumuskan untuk alur cerita. Gus Sholah menyuntingnya dengan teliti, memastikan tiap peristiwa cocok dengan tahun kejadian, mengurangi bagian-bagian yang dianggap tak perlu ditampilkan, dan menambahkan keterangan-keterangan yang belum masuk. Setelah mengoreksi cerita yang dikumpulkan oleh santri-santrinya itu, cerita tentang sang kakek yang membuatnya bernostalgia tentang kehidupan di Jombang semasa kecilnya, Gus Sholah menyampaikan, "Film ini akan menjadi sebuah gambaran yang besar. Kita akan menampilkan bagaimana persamaan kedua ulama besar ini sehingga bangsa ini memahami dan tahu, bahwa dua ulama besar ini adalah santri dari satu guru."

Pesan tersebut lahir dari keprihatinan Gus Sholah yang muncul melihat warga dari dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia masih sering bersitegang dan kurang akur, seperti suporter klub bola yang kerap tak bisa bersatu, apalagi di tingkat akar rumput. Katakan saja problema tahunan seperti rukyah dan hisab dalam menentukan awal-akhir Ramadhan yang kadang berujung perdebatan tak habis-habis. Beberapa yang fanatik di antara kedua golongan bahkan tidak mau kawin-mawin karena gengsi.

Persinggungan antara NU-Muhammadiyah bukannya baru lahir belakangan ini, tetapi bisa ditarik sejak masa awal pendirian kedua ormas. Muhammadiyah (berdiri tahun 1912) yang banyak dipengaruhi pemikiran modernis-reformis ulama Mesir seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, sejak awal didirikan untuk memodernisasi umat Islam di Indonesia dengan jalan puritan. Praktek keagamaan haruslah terpisah dari tradisi yang tidak ada dasar Al-Qur'an dan sunnahnya. Hal ini tentu saja menyinggung langsung tradisi beragama warga NU waktu itu, yang memahami Islam tidak hanya langsung lewat Al-Qur'an dan sunnah, tetapi juga tradisi Ulama terdahulu (salaf). Nahdlatul 'Ulama kemudian berdiri tahun 1926 tak lain untuk menjaga tradisi ini, dan memastikan warganya bisa bermazhab, tahlilan, salawatan, ziarah kubur, tanpa dibilang sesat.

Konflik sosial-kultural ini lantas membangun persepsi di masing-masing ormas kepada ormas yang lain. Muhammadiyah menganggap NU itu tradisional, kolot, ndeso, anti perubahan. Sebaliknya, NU melihat Muhammadiyah sebagai ormas yang sok modern dan berpendidikan meski sejatinya tidak terlalu paham agama, tidak bisa baca kitab kuning dengan huruf Arab gundul. Memang kita juga melihat beberapa elit dari kedua ormas dapat berhubungan baik satu sama lain, ada juga tokoh-tokoh keduanya yang saling bersahabat, atau para aktivis yang saling bersatu dalam

gerakan sosial. Namun suara-suara miring di akar rumput NU dan Muhammadiyah masih jamak terdengar.

Ketegangan NU-Muhammadiyah lebih-lebih semakin menganga jika ditambahkan dengan unsur politis dalam perkembangan sejarahnya. Di masa kepemimpinan Orde Lama Soekarno, NU banyak mendapatkan tempat di pemerintahan selaras dengan hubungan baik NU dan proklamator kemerdekaan itu. Pos-pos Menteri Agama hampir pasti dimandatkan kepada orang NU, mulai dari ayahanda Gus Sholah, KH. Abdul Wahid Hasyim, sampai KH. Saifuddin Zuhri. Beberapa tokoh NU juga dimasukkan ke dalam kabinet di kementerian yang lain. Posisi NU yang nyaman di pemerintahan ini tak berlangsung lama seiring pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Perlahan peran NU terkikis walau dulu sempat menjadi salah satu yang paling getol mengganyang PKI (yang memulai roda kekuasaan Soeharto berputar).

Pada masa Orba, Muhammadiyah justru lebih diuntungkan. Kementerian Agama yang dahulu diisi orang-orang NU mulai digantikan Muhammadiyah, mulai dari tingkatan menteri sampai penyuluh-penyuluh agama di kampung. Pembersihan NU di kursi-kursi pemerintahan inilah yang kian menyulut sakit hati warga Nahdliyyin dari atas ke bawah. NU kemudian mengambil peran sebagai oposisi pemerintah dan menjauhi kekuasaan. Kakak Gus Sholah, Gus Dur, waktu itu menjadi ikon perlawanan NU terhadap Soeharto. Sebelum akhirnya Orde Baru tumbang, dan Gus Dur diusung oleh poros tengah Amien Rais untuk menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Dalam waktu yang singkat itu hubungan NU-Muhammadiyah seketika membaik. Rekonsiliasi kedua ormas diwakilkan dengan bergabungnya Gus Dur dan Amien Rais sebagai representasi Muhammadiyah.

Namun bulan madu itu bertahan seumur jagung saja, rasanya baru kemarin Amien Rais sowan kepada KH. Abdullah Faqih Tuban,

KH. Abdullah Abbas Cirebon, dan kiai-kiai sepuh NU yang lain untuk "minta restu" mereka atas pencalonan Gus Dur, sebelum kemudian ia juga yang menjadi sponsor untuk gerakan politik melengserkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Setelah itu yang tersisa hanya sejarah, dan hubungan NU-Muhammadiyah kembali merenggang.

Gus Sholah sadar betul dengan kondisi ini, sebagaimana pula yang dirasakan oleh pemerhati lain. Bahwa kerukunan antara NU-Muhammadiyah macam mitos saja, seperti yang pernah disampaikan Sumanto Al Qurtuby dalam tulisannya. Maka Gus Sholah menyambut baik tamu dari LSBO Muhammadiyah yang mengusulkan untuk memproduksi film tentang sejarah Mbah Hasyim dan Mbah Dahlan, pendiri dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu. Bagi Gus Sholah, pembuatan film yang nantinya diberi judul "Jejak Langkah 2 Ulama" itu, tidak lain adalah usaha rekonsiliasi dari perseteruan di masa lalu yang bertahan hingga kini, dengan mengingatkan kembali mereka yang sempat dibuat lupa oleh ego masing-masing, bahwa dua ulama besar Indonesia itu pernah berguru kepada guru yang sama (Kyai Sholeh Darat), dari sumber yang sama. Kendati aliran perjuangan keduanya pun bercabang, tetapi tetap bermuara satu, laut yang maha luas itu, ilmu Allah SWT.

Pada Rabu, 24 Juli 2019, Gus Sholah balik menyambangi Yogyakarta, menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir di kantornya, untuk menandatangani kesepakatan antara PP Muhammadiyah dan Pesantren Tebuireng dalam produksi film Jejak Langkah 2 Ulama. Sigit Ariansyah terpilih sebagai sutradara untuk film ini. Sigit sangat mewakili kedua sisi NU-Muhammadiyah, mengingat ia adalah sineas asli Jombang, kota di mana Mbah Hasyim berkiprah, dan besar di Jogja, tempat perjuangan Mbah Dahlan untuk berdakwah. Sebagai alumnus Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Sigit juga paham betul bagaimana kehidupan pesantren, juga relasi antara kiai dan santri.

Sigit menetapkan standar ketat untuk pemeran Mbah Hasyim dan Mbah Dahlan, syarat wajib adalah fasih berbahasa Arab dan mampu membaca kitab kuning. Gus Riza Yusuf Hasyim, putra dari KH. Yusuf Hasyim (Pengasuh Tebuireng sebelum Gus Sholah), yang juga cucu dari Mbah Hasyim terpilih memerankan kakeknya itu. Selain memenuhi syarat yang ditetapkan sutradara, pertalian darah dengan Mbah Hasyim semakin mendekatkan peran yang Gus Riza mainkan.

Gus Sholah ikut mengawasi langsung produksi film Jejak Langkah 2 Ulama, lebih-lebih untuk pengambilan gambar dan plot cerita Mbah Hasyim. Karena menceritakan perjalanan hidup dua tokoh, Gus Sholah membayangkan film ini akan menjadi lumayan panjang. Namun ia tak memperkirakan jadi sepanjang 300 scene untuk pengambilan gambar. Setelah Rumah Produksi Tebuireng dan Muhammadiyah memaparkan rencana itu, Gus Sholah memintanya untuk direvisi agar tidak jadi terlalu panjang, tapi tidak juga terlalu padat dengan durasi terbatas.

"Pokoknya rasional, waktu dan tahunnya harus rasional semua, karena kita harus terbawa seperti dulu dan dua sosok ulama ini bisa terlihat oleh kaum milenial," ujar Gus Sholah. Selama seminggu tim Maksi dan Muhammadiyah menggodok ulang skenarionya, dan mengurangi lebih dari setengah scene yang sudah direncanakan.

Pada bulan Agustus syuting sudah mulai dilakukan. Selama 25 hari penuh tim produksi menyelesaikan pengambilan gambar yang terbagi di Jombang, Yogyakarta, Kediri, dan Bangkalan. "25 hari kita syuting nonstop mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 pagi. Kita break waktu salat, di*jama'*," Cak Amin menerangkan, "Dengan total talent 800 pemain, krunya 130 sekian, dan perpaduan santri dengan tim Muhammadiyah yang ada di Jogja, ya *Alhamdulillah* semuanya berjalan dengan baik."

Proyek film Jejak Langkah 2 Ulama tidak digarap main-main meski masa produksinya relatif singkat. Mulai dari pemilihan pemain, penggunaan properti, sampai setting tempat dipikirkan dengan sungguh-sungguh dan matang. Sebagai contoh serban hijau dan jubah yang digunakan Gus Riza untuk memerankan Mbah Hasyim, adalah replika dari serban dan jubah asli milik beliau. Sementara untuk menghadirkan suasana awal abad 20 agar lebih nyata, Maksi meminjam kereta uap lori pengangkut tebu yang masih disimpan Pabrik Gula Tjoekir. "Masih hidup dan alhamdulillah masih bisa dijalankan. Setelah kami cek itu sesuai dengan tahun itu, dan masih beruap, jadi beruntung sekali. Awalnya catnya merah sama kuning, karena tahun itu hitam semua jadi tim kami ngecat lagi," jelas Cak Amin.

Penghujung 2019, Film Jejak Langkah 2 Ulama selesai diproduksi. Pada 12 Januari 2020, Gus Sholah mengirim pesan kepada Prof. Haedar Nashir. "Akan lebih baik dampaknya terhadap minat masyarakat bila film itu diputar perdana di Jakarta yang dihadiri RI 1. Apa panjenengan setuju? Apa kita membuat surat kepada RI 1 yang ditandatangani bersama?" usul tersebut langsung saja disanggupi oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah itu. Rencananya nanti, pada 2 Februari 2020, Jejak Langkah 2 Ulama akan launching perdana. Gus Sholah semakin serius memperbincangkan tentang persiapan pemutaran film, seperti ingin melihat masa depan di mana warga NU dan Muhammadiyah saling berpegangan tangan luar-dalam.

Namun sehari pasca Gus Sholah mengirimkan pesan kepada Prof. Haedar, Gus Sholah dirujuk ke RS Harapan Kita Jakarta untuk ablasi jantung. Dokter menyayat paha Gus Sholah dan memasukkan kateter dari sana yang mengarah ke jantung untuk mengatur irama detak jantungnya. Tanpa tindakan ablasi bisa jadi dapat mengakibatkan strok nantinya. Gus Sholah cepat pulih dan bisa segera keluar rumah sakit. Namun siapa yang tahu lelaki penyabar

berumur hampir 80 tahun itu akan bertahan berapa lama lagi. Benar saja, pada akhir Januari 2020 Gus Sholah kembali dilarikan ke RS Harapan Kita. Cairan menggenangi selaput jantungnya dan harus dioperasi lagi. Jantung yang tak pernah berhenti bekerja sejak 1942 itu layaknya baterai hp tua yang dayanya merosot jauh.

Jantung dan tubuh Gus Sholah seperti ingin istirahat sejenak dari ingar-bingar kehidupan itu. Puluhan tahun sudah Gus Sholah menggunakan tubuhnya dengan daya penuh, dan banyak dipergunakan untuk orang lain. Belasan tahun terakhir pula ia kerahkan sisa-sisa usia senjanya untuk membangun Pesantren Tebuireng, mengabdikan diri pada pengembangan dunia pendidikan. Selepas operasi jantung terakhir itu, Gus Sholah hanya terbaring di ranjang rumah sakit, ditemani orang-orang terdekatnya, terutama sang istri. Sementara segala doa datang menghujam dari berbagai arah untuk kesembuhan Gus Sholah. Doa-doa yang mungkin datang dari orang-orang yang tak ia sangka, mereka yang merasa berterimakasih kepadanya.

Wajar jika simpati publik lantas begitu besar saat Gus Sholah jatuh sakit, sama halnya dulu Gus Dur didoakan berbagai golongan. Sebab seseorang sekaliber Gus Sholah—yang suaranya didengar oleh banyak elit dan pemangku kepentingan—untuk bertahan menjadi seorang pendengar yang baik adalah hal yang tidak mudah, dan itulah jalan yang ia pilih. Gus Sholah mendengarkan siapa saja yang datang ke rumah, tanpa melihat latar belakang orangnya, mau itu anak muda, orang besar, tokoh nasional, atau orang biasa. Kebiasaan mendengarkan itu ditambah lagi dengan kemampuan silaturahmi yang luar biasa.

"Misalnya, diundang sama orang yang tidak terlalu dekat, juga yang secara kepangkatan mungkin ya 'biasa-biasa saja', rumahnya di ujung gunung misalnya, beliau tetap datang untuk datang ke acara pernikahan anaknya, atau acara syukuran, atau acara apa,

selama waktunya pas tidak bentrok, pasti disambangi oleh beliau," kenang putra Gus Sholah, Irfan Wahid yang biasa dipanggil Gus Ipang, "Saat-saat terakhir, sebelum beliau wafat, hampir seluruh keponakan-keponakan, sepupu saya itu didatangi rumahnya satu per satu. Hal ini merupakan kenangan berkesan bagi mereka karena didatangi di rumahnya. Itu enggak mudah, dan itulah kemampuan silaturahmi beliau. Jadi setiap kali kalau ke Jakarta, karena tinggalnya di Jombang, yang sakit disambangi, yang meninggal ditakziahi."

Detak jantung Gus Sholah pada penghujung Januari 2020 tinggal menghitung detik-detik terakhirnya. Di sebelahnya ada Amin Zein, santri yang dulu ia percayakan dan pasrahi untuk mendirikan Rumah Produksi Tebuireng (Maksi), khidmat menemani tubuhnya yang lemah. Selama itu juga Gus Sholah meminta Cak Amin membaca Al-Qur'an juz 27. Lantunan ayat demi ayat bergetar di dinding, diselingi napas yang lembut, suara alat-alat medis memberitahukan tanda-tanda kehidupan, seperti menegaskan kembali kalimat "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" dari potongan surat Ar-Rahman.

"Min, juz 27 bacanya sudah selesai Min?"

"Iya Yai."

"Gimana undangan film untuk review sudah selesai itu? Terus tanggal 2 siapa saja yang diundang?"

"Ada Gus Fahmi, Gus Aying, Gus Riza, terus siapa lagi gitu Pak."

"Anak-anak Maksi suruh berangkat semua Min satu mobil. Film itu nanti tayang supaya bangsa bisa tahu bagaimana fakta sejarah dua ulama besar yang mendirikan dua organisasi besar itu, biar tidak terpetak–petakkan. Jangan sampai dua ulama ini terabaikan fakta sejarahnya dengan khilafiah-khilafiah yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Kamu jangan ubah tanggal pertemuannya, tanggal 2 itu."

"Iya Yai, ini kami sudah undangkan kok Yai."

"Min, ini sebenernya saya ini sakit apa sih Min?"

"*Jenengan* sakit medis Yai."

"Enggak gitu, kok saya ngerasa sehat gini."

"Iya Yai, *jenengan* kan sudah sehat."

"Iyalah, habis ini paling juga sehat kan?"

"Iya Yai. Yai, *jenengan* istirahat dulu ya, sudah jam 11 loh."

"Ya sudah Min, aku tak tidur dulu ya, panggilin dokternya. *Sampean* pamit dulu aja Min, pulang dulu, nanti kita ketemu lagi."

***

Sudah lama Gus Sholah keluar masuk rumah sakit. Sekitar tahun 1984-1985-an riwayat sakit jantung Gus Sholah dimulai, dan bermula di lapangan tenis. Waktu itu ia bersama istri dan anak-anaknya yang masih kecil, bermain tenis di lapangan. Meski tidak mahir betul bermain tenis, Salahuddin termasuk menyukai olah raga yang memacu pernafasan karena mengharuskan banyak berlarian ini. Ketika baru bermain satu set dia mengeluh capek.

"Ah udah papah berhenti dulu." Lantas ia tiduran di pinggir lapangan, di atas kursi.

"Kok papah baru main satu set udah begini," keluhnya. Kejadian itu terjadi malam minggu.

Karena merasa meriang malam itu ia dibawa ke dokter THT langganannya. Usai memeriksa kondisi Gus Sholah, sang dokter yang dikenal rajin beribadah itu berkata kepada Gus Sholah dan Bu Farida, "Sudah Pak, banyak *istighfar, istighfar*. Sekarang Bapak dan Ibu saling memaafkan saja. Perbanyak *istighfar*."

Terang saja Farida yang mendengar perkataan dokter seperti itu jadi ketakutan dan was-was. Malam itu mereka belum tahu kalau Salahuddin mulai terkena serangan jantung. Karena badannya masih

lemas, ia diminta istirahat sebentar di ruang pemeriksaan, sebelum akhirnya diperbolehkan pulang malam itu juga.

"Jangan-jangan mau meninggal nih," pikir sang istri.

Tidak lama sesudah itu ia terkena serangan lagi. Farida meminta tolong dr. Siti Fadilah Supari yang rumahnya bertetanggaan, untuk memeriksa kondisi Gus Sholah. Siti Fadilah menyarankan agar Gus Sholah dibawa ke RS Harapan Kita.

"Nanti ketemu saya di sana," tutur Siti Fadilah Supari, yang pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diangkat menjadi Menteri Kesehatan RI.

Di RS Harapan Kita pada waktu itu banyak pasien penderita penyakit jantung yang meninggal. Diduga ada ketidakberesan, atau apa. Keluarga memutuskan membawa Salahuddin Wahid untuk berobat ke RS di Australia. Karena ada penyempitan pembuluh darah dilakukan pemasangan balon di Sidney.

Sejak kejadian itu Gus Sholah sering keluar-masuk rumah sakit. Seingat Bu Farida, perempuan yang setia mendampinginya selama 52 tahun itu, ada sekitar 17 rumah sakit di dalam dan di luar negeri yang pernah merawat Gus Sholah. Di antaranya ialah rumah sakit di New Delhi, Mekkah, Sidney, Kuala Lumpur dan Singapura.

Sewaktu menjalani perawatan di India, hampir saja Gus Sholah mengalami tragedi yang membahayakan jiwanya. Merasa sudah sembuh ia memutuskan untuk pulang ke Tanah Air. Ketika sampai di airport dan hendak masuk pesawat, ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata terdeteksi Gus Sholah mendapat serangan jantung lagi. Penerbangan ke Tamah Air dibatalkan dan ia masuk perawatan lagi.

Berdasarkan penuturan Nyai Farida, di antara keluarga KH. Wahid Hasyim, Gus Sholah dikenal sebagai orang yang paling disiplin dibandingkan kakak dan adik-adiknya, baik menyangkut

pola makan, pola hidup, soal penyakit dan cara berpakaian. Gus Sholah dikenal sangat berhati-hati dalam urusan makanan.

Kurang beberapa hari sebelum berpulang, Gus Sholah mengeluh ke istrinya, "Aku ini sakit bener ya, *mosok* makan kesukaanku aja aku udah nggak doyan." Jarang-jarang Gus Sholah mengeluhkan perihal menu makanan yang tersaji. Waktu itu Bu Farida menyuguhkan ke suaminya kue lemper, klepon dan lumpur. Itulah sebagian penganan yang disukai.

Baru mencicipi sedikit, Gus Sholah sudah tidak mau. "Aku ini memang sakit ya. Kok makan apa-apa terasa enggak enak gini," ujarnya lagi.

Selain kue-kue tadi Gus Sholah juga penggemar tempe dan telor dadar atau diceplok. "Setiap hari harus ada menu tempe di meja makan," tutur Farida.

Nyai Farida menuturkan, jika di meja makan sudah tersaji menu makanan, dan Gus Sholah minta dibuatkan telur dadar, berarti beliau tidak berkenan dengan menu yang tersaji.

Gus Sholah juga diketahui penyuka cokelat dan es krim. "Ke mana saja kita pergi berdua, di tas saya mesti tersedia cokelat," ujar Farida lagi.

Jika istrinya bepergian, sering kali Gus Sholah mengirim pesan melalui WA, "Jangan lupa beli es krim ya." Begitu itu sedari dulu.

Meski sudah sakit-sakitan, putri bungsunya, Acha, mengenang Gus Sholah sebagai lelaki yang konsisten kutu buku. Kalau ada kesempatan jalan-jalan ke mal bersama ayahnya, yang dituju pasti ke toko buku Gramedia. Seingat Acha, sejak ia kanak-kanak sudah begitu. Sebagai anak kecil tentu jalan-jalan ke mal maunya cuci mata, lihat-lihat gerai yang menjual aneka barang. "Ngapain kami yang masih anak-anak itu diajak ke toko buku."

Tapi yang dituju sang ayah selalu ke Gramedia. "Lama-lama kita bosen. Akhirnya kita sepakat, Papa di toko buku dan anak-anak

jalan-jalan sesuai dengan keinginannya. Jika sudah selesai kami menjemput ke Gramedia lagi," tuturnya.

Tidak aneh kalau Gus Sholah betah berlama-lama di toko buku. "Dalam hal membaca buku Papa nggak ada tandingannya," ujar Acha lagi.

Selain dikenal hobi membaca, seperti keluarga Wahid Hasyim yang lain, menurut Acha papanya memiliki daya ingat yang tinggi. Sama teman-teman Acha di SD, SMP, SMA dan kuliah yang dulu suka main ke rumah, Gus Sholah masih hafal nama-namanya satu per satu. "Yang saya kagumi dari Papa, kok daya ingatnya kuat banget gitu."

Berdasarkan penuturan Acha, Gus Sholah punya menu makanan yang digemari sejak dulu, dan tak tergantikan sampai wafat. Soto Betawi, sate Senayan, dan gado-gado omplong. Pernah waktu mau merayakan ulang tahun, semua anak-anak mau ajak makan di restoran yang kekinian, seperti restoran Jepang. "Ketika Papa ditanya, jawabnya ke situ lagi. Maunya ke Sate Senayan."

***

Kembali pada Januari 2020, setelah Gus Sholah menyuruh Cak Amin pulang, ia segera pamit dan menyalami lelaki berambut sempurna putih itu. Ia kembali ke hotel bersama putra Gus Sholah, Gus Billy. Belum ada setengah jam ia keluar dari rumah sakit, di perjalanan menuju hotel, perawat menelepon Cak Amin. "Pak, Pak, dipanggil sama Yai Sholah, beliau minta permen yang pedes katanya."

"Baik-baik, saya segera cari permennya."

Beberapa saat kemudian gantian Gus Sholah menelepon, "Min, saya belikan permen yang pedes ya, sekarang saya tunggu pokoknya."

"Iya Yai, ini sudah saya belikan." Ia kembali ke kamar di mana Gus Sholah berbaring, sambil membawa permen pedes yang

dimaksud (permen mentos bundar berwarna biru). Jam sudah lewat tengah malam, dan tanggal sudah berganti ke 31 Januari 2020.

Sejak tahun 2016 an hingga menjelang wafatnya, Salahuddin Wahid kian akrab dengan dunia asketis. Wirid menjadi bacaan utama. Jika tidak sedang beraktivitas, waktunya dihabiskan dengan memutar biji tasbih yang mengiringi lafal demi lafal bacaan wirid. Bagai tidak ingin mendegradasi keikhlasan dalam laku spiritualitasnya, Gus Sholah tidak memutar-putar biji tasbih secara demonstratif ketika berada di tengah banyak orang, seperti yang banyak kita jumpai pada sebagian orang yang gemar memamerkan laku asketisnya ketika memutar-mutar biji tasbih.

Seperti dituturkan istrinya, Ny. Farida, ketika beraktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di jalan, atau ketika menjumpai tamu, atau di mobil, atau di pesawat, lesannya selalu berzikir. Jari-jari tangannya bergerak-gerak, menandakan batinnya sedang melafalkan Asma Allah. Di tempat tidur juga begitu.

"Apa sih yang dibaca?" sela Farida suatu saat.

"Ya baca apa saja, kan zikir itu bagus."

Dari dulu, ya selalu begitu. Jari tangan kanannya bergerak-gerak, seperti sedang menghitung sesuatu.

Pada beberapa bulan terakhir, ketika mau tidur, Gus Sholah lebih sering memfokuskan kosentrasinya pada zikir. Mulutnya komat-kamit. Bahkan dalam zikirnya, ketika membaca kalimat *thoyyibah, Laa ilaaha illallah,* dia ucapkan kencang-kencang. "Saya sering kaget dibuatnya," tutur Farida.

Bu Farida menuturkan, beberapa bulan-bulan terakhir sebelum wafatnya, kalo mau tidur malam, tangan kanan Gus Sholah mencari-cari tangan kirinya. Tangan kanannya memegang tangan kiri Farida, sambil mengelus-ngelus dengan gerakan teratur, seakan mengajak bersama menandai hitungan bacaan zikir.

"Kok nggak wiridan?" tanya Farida.

"Ini sambil wirid."

"Koq ngitungnya nggak pake tangan sendiri?"

"Gak apa-apa, pake ini," sambil menepuk-nepuk tangan kiri istrinya, lembut.

Selama menjadi pengasuh pesantren dan tinggal di Tebuireng Salahuddin mentradisikan dirinya shalat berjamah. Tiap kali habis shalat, sebelum membaca doa, dilantunkan bacaan surat al-Fatihah beberapa kali, sebanyak jumlah orang atau pihak yang perlu dihadiahi Fatihah. Terus membaca doa. Di dalam doanya selalu mendoakan nama-nama orang atau lembaga yang perlu didoakan. Dari santri, guru, sekolah, nama-nama cucu satu persatu disebut dan didoain.

Sejak waktu yang lama, dan terutama setelah menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng, Salahuddin melanggengkan ritual malam. Sesudah menunaikan shalat tahajud hingga menyambung ke shalat Subuh, dipungkasi dengan membaca al-Qur'an bersama istrinya 1 juz. Habis itu baru mengerjakan aktivitas yang lain.

Tiga hari jelang berpulang, Gus Sholah ingin melanjutkan mengajinya. Melalui rekaman murotal di HP nya. "Cha, Cha itu puterin juz 27," kata Gus Sholah kepada putrinya, Acha. Ke istrinya juga minta diputerin murotal juz 27. Setelah mengaji juz 27 ia tidur. Tidak lama, datang Ipang, "Pang ayo puterin juz 28." "Loh kan Papa istirahat?" jawab Ipang. "Gak lah, aku mau ngaji juz 28-29. Pokoknya hari ini harus 3 juz. Besok juz 30, jadi aku pengen khatam sekarang."

Pemintaan diputarkan murotal juga disampaikan ke Amin Zen yang setia menemani Gus Sholah.

"Min."

"Gimana Yai?"

"Aku kok pengen ngaji juz 28-29."

"Loh kan sudah malam Yai?"

"Aku pengen ngaji Min."

"*Loh* gimana Yai?"

"Biar aku nyenyak, biar aku tenang."

"Baiklah Yai." Cak Amin membacakan juz 28-29 sampai sekitar jam satu dini hari.

"Sudah?"

"Iya Yai."

"Sekarang kamu istirahat Min."

Cak Amin kembali menyalami Gus Sholah untuk kedua kali. Tidak berapa lama, hpnya kembali berdering. "Pak, bisa balik ke sini lagi Pak? Kondisi Bapak semakin menurun," ucap suara dari seberang. Cak Amin segera kembali ke kamar Gus Sholah yang baru saja terbangun setelah diambil darahnya.

"Min?"

"Iya Yai?"

"Kenapa kok kamu balik lagi ke sini?" tanya Gus Sholah menyelidik, seperti mengerti bahwa ada yang tidak beres, "Saya mau diapakan lagi?"

"Itu Yai, dipanggil dokter."

"Saya bingung ini sebenernya saya sakit apa sih? Mau diapain lagi ini? Saya enggak ngerti nih."

"Enggak Yai, Yai kan butuh istirahat, habis ini kan pasti sudah sembuh."

"Enggak, saya habis ini mau diapakan kok sampai kamu ke sini lagi? Pasti saya mau diapa-apakan ini."

"Nanti biar dokter aja yang jelasin ya."

"Ya sudah, dokternya suruh datang ke sini sekarang." Tak lama dokter datang dan segera diajukan pertanyaan yang sama. "Saya mau diapakan lagi ini?" Dokter berbicara berdua dengan Gus Sholah menjelaskan tindakan yang harus dilakukan rumah sakit kepadanya, sementara Cak Amin menunggu di luar.

"Min sini masuk Min." Gus Sholah melepas kacamatanya, sebelum kemudian memberi pesan. "Mama tolong dimuliakan seperti halnya saat ada saya."

"Baik Yai."

"Kamu lanjutkan perjuangan saya, karena kamu yang tahu saya bagaimana."

"Iya Yai, tapi Yai, kenapa Yai ngomong seperti itu?"

"Kamu panggil mama sekarang, kamu panggil Ipang juga, semuanya, bilang kalau saya besok mau dibedah."

"Baik."

"Film itu harus tetap tayang."

"Iya Yai."

"Kamu segera bel ibu sekarang." Cak Amin segera menghubungi nama-nama yang disebut Gus Sholah.

Hari itu keluarga menyepakati operasi Gus Sholah dengan kemungkinan apapun yang akan terjadi. Sabtu, 1 Februari dini hari, Gus Sholah terjaga. Putranya, Gus Billy, yang melihat sang ayah bangun pagi-pagi sekali di ruang ICU bertanya, "Bapak kok sudah bangun?"

"Saya sudah mandi, jam 3 pagi sudah mandi, setelah itu saya buang air besar, setelah itu saya buang air kecil, lalu saya ambil wudlu, saya salat subuh." Pagi itu wajah Gus Sholah terlihat segar dan wangi. Dokter memulai operasi dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi, dokter bilang semuanya oke, operasi berjalan dengan sukses dan lancar. Minggu pagi Gus Ipang mengabarkan kalau Gus Sholah sudah bisa diajak ngobrol meski dengan suara yang lirih.

"Bapak ngerasa sakit?"

"Enggak," jawab Gus Sholah singkat. Selesai operasi, Gus Sholah masih sempat mereview film yang harusnya dirilis hari itu. Sementara perawat yang menjaganya berkata kepada Cak Amin, "Kondisi Pak Sholah saat ini sedang bergantung dengan alat. Ketika alat ini dilepas, maka selesai semuanya."

Selepas isya', seluruh keluarga berkumpul di lantai 4 RS Harapan Kita, kamar Gus Sholah berada. Lelaki penyabar itu dikelilingi istri tercinta, Farida, dan ketiga anaknya, Irfan Asy'ari

Sudirman (Gus Ipang), Iqbal Billy (Gus Billy), dan Arina Saraswati (Mbak Acha). Lantunan salawat dan zikir tak henti-hentinya bergema, hingga napas Gus Sholah habis detiknya, dan jantungnya yang sudah bertahan 78 tahun itu berhenti berdetak sepenuhnya. 2 Februari 2020 yang seharusnya menjadi pemutaran perdana film Jejak Langkah 2 Ulama yang ia siapkan dengan sepenuh hati, pada akhirnya menjadi hari terakhir ia bisa berkumpul dengan keluarganya.

Penerimaan Jenazah oleh
Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa

Tim penulis menemui Bu Farida beberapa bulan setelah Gus Sholah berpulang. Perempuan yang menemani Gus Sholah seatap-serumah sejak 1968 itu mengenang suaminya sebagai lelaki yang tak pernah marah dan senang bercanda. Sambil mendengarkan suara-suara santri mengaji dari ruang tamu rumahnya di komplek Pesantren Tebuireng Bu Farida bercerita, suatu hari Gus Sholah pernah bilang kepadanya, "Kita kan di rumah ini cuma tinggal berdua *loh*, jadi kita gak boleh berantem, kita harus akur. Kalau berantem nanti *lu* gak ada temennya, *gue* gak ada temennya."

Lalu beberapa lama setelah Gus Sholah menjadi pengasuh pada 2006, dan Bu Farida diajak kembali ke Jombang setelah sekian lama tinggal di Jakarta, Gus Sholah bertanya, "Lu gimana, udah di sini udah kerasan kan yah?"

"Ya harus *kerasan, wong* sama suami."

"Terus gimana? Nanti kalo udah gak di sini, mau pulang ke Jakarta apa enggak? Kalo *gue* nih, kalo *lu* meninggal duluan, *gue* tetep di sini, kalo *lu* gimana, kalo *gue* meninggal duluan?"

"Ya kalo *lu* meninggal duluan, *gue* juga tetep di sini deh."

"Ya bener ya, nanti anak-anak kita kasih tahu, kita tetep rumahnya di sini, kalo mau pergi ke Jakarta ya *gapapa*, tapi kita domisilinya di sini."

Begitulah, setelah dinyatakan wafat di Jakarta, jasad Gus Sholah segera dibawa ke Jombang, rumahnya kembali. Seperti juga yang pernah ia sampaikan kepada istrinya, bertahun-tahun yang lalu. ❖

Presiden RI Joko Widodo Saat Takziyah

Bab II

GAGASAN DAN PEMIKIRAN SALAHUDDIN WAHID

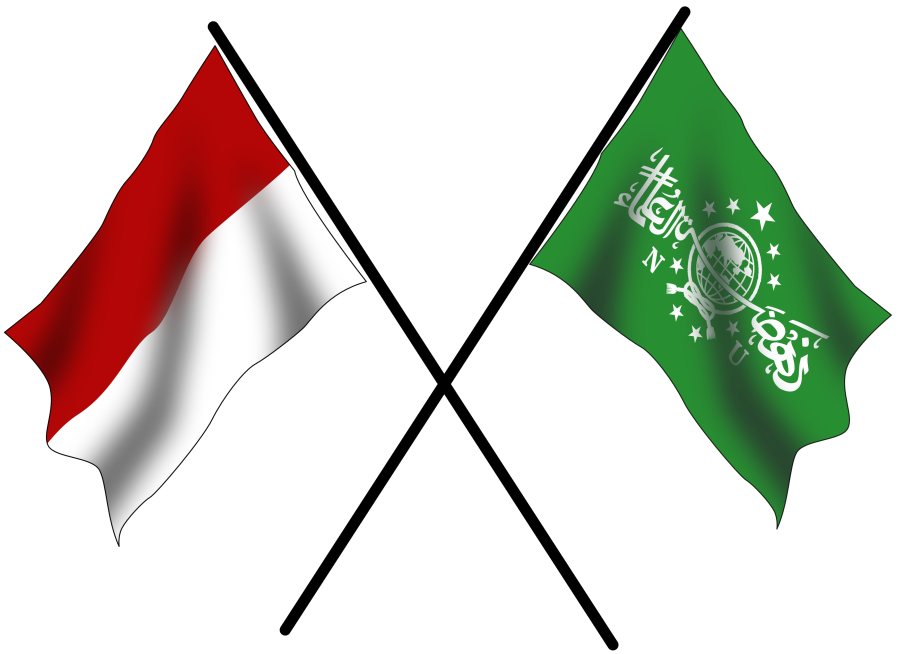

Demokrasi dan Politik

KELUARGA Wahid tidak bisa lepas dari dunia politik. Bahkan sebelum Kyai Wahid Hasyim terlibat dalam perumusan dasar negara di BPUPKI, dan sebelum ia diangkat sebagai Menteri Agama, Kyai Wahid sudah lebih dulu berkecimpung di dunia politik dengan menjadi aktivis muda NU, dan ikut mendukung seruan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) tentang Indonesia Berparlemen. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tak salah lagi menjadi pemain penting dalam politik nasional sejak menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, dilanjutkan dengan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan pada akhirnya terpilih menjadi presiden, sebuah pencapaian politik yang luar biasa.

Salahuddin Wahid secara jelas mengikuti jejak ayah dan kakaknya untuk berpolitik, walau sebelumnya ia lebih banyak berkecimpung di dunia profesional sebagai arsitek. Langkah awal Gus Sholah menapaki dunia politik nasional ketika diajak bergabung oleh pamannya, Kyai Yusuf Hasyim (Pak Ud) ke Partai Kebangkitan Umat (PKU) menyusul jatuhnya Soeharto. Masuknya Gus Sholah ke dalam PKU secara langsung menjadikannya lawan politik Gus Dur di PKB. Benar saja, Gus Sholah membuat garis yang jelas untuk posisinya itu, pada periode ini media nasional sering menampilkan tulisan Gus Sholah untuk menanggapi permainan politik Gus Dur dengan PKB.

Sorotan utama Gus Sholah jelas sikap Gus Dur yang mencitrakan PKB sebagai partainya NU, dengan menafikan keberadaan partai lain yang juga berbasis massa NU, termasuk PKU. Meski analisis yang diungkapkan Gus Sholah terdengar akurat dan meyakinkan, tetap saja strategi ini kurang diterima masyarakat, khususnya kaum nahdliyyin, yang memang sudah terlanjur memandang Gus Dur sebagai figur kuat dan sosok yang tak tergantikan (tak lain karena kiprah Gus Dur di NU sudah lebih dulu terlihat dibanding Gus Sholah sendiri). Pada akhirnya Gus Sholah meninggalkan PKU pada September 1999, tetapi tidak dengan politik.

Menggunakan tulisan-tulisannya di media, Gus Sholah menjelma sebagai pengamat politik nasional. Wawasannya tentang perkembangan politik di Indonesia, juga analisisnya yang selalu menghitung untung-rugi dari setiap pergerakan politik, menjadikan tulisan Gus Sholah penting untuk dibaca, dan bahkan ditanggapi. Semenjak ia juga berani berkonfrontasi langsung dengan Gus Dur, maka pengamatannya terhadap situasi politik di tanah air mulai diperhitungkan.

Dalam tulisannya yang berjudul "Kembalikan Kedaulatan kepada Rakyat", kita bisa melihat kejelian Gus Sholah dalam membaca arah perpolitikan nasional, hingga mendapatkan kesimpulan seperti yang ia ungkapkan, "Betapa *njomplang*-nya keadaan, selama 52 tahun kita punya dua presiden, dan dalam tiga tahun kita telah mempunyai tiga presiden." Kalimat ini mungkin hanya terdengar sebagai perbandingan yang menggelitik, tapi di baliknya kita bisa membaca analisis yang kuat, bahwa keadaan lucu yang seperti itu dapat terjadi karena pelanggaran terhadap UUD dibiarkan begitu saja, dan mekanisme transisi kepemimpinan hanya berlangsung karena ego sesaat dan kepentingan kelompok.

Pada akhirnya kita bisa mendapatkan pandangan yang hampir menyeluruh tentang pemikiran Gus Sholah terhadap politik dan

demokrasi dari tulisan-tulisannya semenjak akhir 90-an. Meski mungkin pencapaian politik Gus Sholah yang paling tinggi adalah ketika mendampingi Wiranto sebagai cawapres, tetapi pasca itu Gus Sholah tetap menjadi pemain penting dalam percaturan politik nasional, setidaknya sebagai orang yang terus mengamati kehidupan berbangsa dan bernegara dari kursi kepemimpinan di Tebuireng. Beberapa pandangan Gus Sholah terhadap politik dan demokrasi kami rangkum sebagai berikut. ❖

Hak Politik Rakyat dan Peran Partai Politik

GUS Sholah kita tahu termasuk kerap mengkritik langkah politik Gus Dur, baik sebelum pencalonannya sebagai presiden, maupun setelah Gus Dur menjadi presiden terpilih. Ia mengungkapkan banyak pendekatan politik Gus Dur yang merugikan, baik untuk dirinya sendiri, maupun para pendukungnya. Gus Dur yang sebelum menjadi presiden ia anggap mampu merangkul berbagai golongan, yang akhirnya dapat mengantarkannya menjadi pilihan alternatif dari poros tengah, sangat disayangkan justru mencari banyak lawan setelah menjabat sebagai presiden. Belum lagi berbagai pernyataan kontroversialnya kepada pers yang makin memperkeruh suasana.

Bagaimanapun Gus Sholah menuliskan kritik terhadap Gus Dur, ia selalu juga menyampaikan hak Gus Dur untuk mencalonkan diri kembali adalah sah-sah saja, dan kalaupun pencalonannya ditolak karena alasan-alasan yang memberatkan (kesehatan mata Gus Dur), itu mesti melewati proses legal dari KPU dan sesuai konstitusi yang berlaku. Gus Sholah dalam tulisannya terlihat selalu konsisten menyuarakan hal ini, bahwa hak berpolitik adalah dilindungi undang-undang, dan dalam negara demokrasi ini rakyat memiliki hak politik yang sama rata.

Begitu juga ketika media ramai menyorot berbagai celah dan kelemahan dalam kepemimpinan BJ Habibie pasca Soeharto, mulai dari penyelesaian kasus korupsi yang terkesan ditarik ulur, kasus Bank Bali, tindak kekerasan TNI pada peristiwa Semanggi I dan II, kasus di Aceh dan Ambon, dan masalah jajak pendapat Timor Timur

yang menyebabkan disintegrasi dengan Indonesia. Gus Sholah tak hanya menulis pendapatnya tentang kekurangan BJ Habibie itu, tapi juga kelebihannya yang sering ditutupi banyak media. Lebih lanjut, Gus Sholah menyatakan bahwa hak politik BJ Habibie untuk mencalonkan diri kembali—seandainya pertanggung jawabannya ditolak Sidang Umum MPR—tidak bisa dilarang.

Dalam tulisannya yang berjudul "Pertanggung-jawaban Habibie" Gus Sholah menulis, "Kita mencatat adanya kalangan yang berpendapat bahwa kalau BJH terpilih kembali menjadi presiden, maka kestabilan nasional tidak akan tercapai dan kita akan sulit keluar dari krisis. Karena itu BJH tidak boleh menjadi presiden, berarti tidak boleh dicalonkan. Tanpa mengabaikan niat baik kalangan di atas, rasanya tidak demokratis untuk melarang BJH maju sebagai calon presiden. Paling jauh yang dapat dilakukan adalah menghimbau BJH dan pendukungnya untuk mempertimbangkan kembali pencalonan BJH, dan menyampaikan bahwa hal itu adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara."

Gus Sholah menilai demokrasi sebagai sistem yang membuka kemungkinan setiap orang bebas menentukan pendapatnya sendiri, hingga bahkan setiap orang bebas menjadi ambisius untuk memperoleh jabatan politik tertentu dengan batasan undang-undang. Selama langkah politik yang dilakukan seseorang tidak melanggar undang-undang, maka tak ada yang mampu mencegahnya untuk terus maju. Hak politik rakyat bagi Gus Sholah selalu berjalan beriringan dengan peraturan undang-undang.

Oleh sebab itu Gus Sholah juga menerima pinangan Wiranto dan Golkar sebagai cawapres, sebab ia berpandangan tak ada pelanggaran undang-undang di sana. Walau posisi Wiranto tampak memberatkan karena dianggap telah melakukan pelanggaran HAM. Namun menurut Gus Sholah pelanggaran itu belum dibuktikan di pengadilan, sehingga hak politik Wiranto untuk maju sebagai

capres juga tidak bisa dilarang. Pun demikian, kepekaan politik Gus Sholah terlihat dengan keputusannya untuk mundur dari Komnas HAM.

Gus Sholah juga menyadari bahwa di bawah sistem demokrasi, negara pada dasarnya dijalankan oleh rakyat, dan bahwa presiden adalah pemangku mandat yang diberikan oleh rakyat kepada perwakilannya untuk mencapai cita-cita bersama, cita-cita rakyat. Dalam prosesnya, di awal-awal perjalanan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, rakyat mewakilkan suara mereka untuk menentukan presiden kepada wakil-wakil mereka di partai. Rakyat tidak secara langsung memilih presiden, tetapi memilih partai yang mereka percaya dapat mengemban amanah rakyat. Maka partai politik sesungguhnya adalah kendaraan bagi rakyat untuk mencapai cita-cita politiknya, sekecil apa pun cita-cita itu.

Dalam hal ini, kondisi yang ideal dan diharapkan terwujud adalah, ketika partai politik mampu menjadi penyambung lidah rakyat. Namun pada kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Gus Sholah menilai adanya kesenjangan antara keinginan rakyat dan keinginan partai politik. Kondisi yang terburuk adalah, timbulnya ketidakcocokan antara suara rakyat dan suara wakil rakyat di parlemen, seperti yang Gus Sholah singgung pada salah satu paragrafnya.

"Saya ingin mengetengahkan fakta mengenai jajak pendapat yang diadakan oleh RCTI dan Metro TV untuk mengetahui siapa calon wapres yang ideal dari tiga calon wapres dalam SI MPR 2001. Ternyata Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa meraih sekitar 90 persen dari suara yang masuk. Sedang di dalam MPR, SBY hanya meraih 25 persen. Fakta itu menunjukkan adanya kesenjangan antara keinginan rakyat dan keinginan MPR yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Memang kita akui bahwa suara melalui jajak pendapat itu sangat sedikit dan bisa bersifat distortif. Tetapi bagaimanapun fakta

itu menunjukkan bahwa cukup besar kemungkinan akan terjadi kesenjangan antara suara 700 tokoh wakil rakyat dengan si rakyat sendiri."

Kesimpulan itu juga didasarkan kepada apa yang terjadi terhadap bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, yang diungkapkan oleh Gus Sholah sebagai keadaan yang njomplang, ketika kita hanya memiliki dua presiden (Soekarno dan Soeharto) dalam kurun waktu 52 tahun, sedangkan tiga tahun setelahnya kita memiliki tiga presiden (BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati). Seandainya proses pemilihan presiden yang dimandatkan kepada MPR setia dan tunduk kepada UUD, seharusnya tidak akan terjadi ketimpangan sedemikian rupa. Tidak akan ada presiden yang menjabat dalam waktu sekian lama, atau sebaliknya, tidak akan ada pemberhentian presiden sebelum habis masa jabatannya.

Peristiwa seperti di atas dimungkinkan terjadi karena adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap UUD 1945, dan itu adalah bentuk pengkhianatan kepada mandat yang diberikan oleh rakyat. Sementara rakyat menitipkan kepercayaannya untuk kehidupan politik yang lebih baik kepada partai politik, yang terjadi malah kepentingan kelompok atau partai dengan mudah dianggap sebagai kepentingan nasional. Ketika hal seperti itu berlangsung, maka kepentingan rakyat hanya akan menjadi janji-janji selama kampanye untuk mengeruk suara mereka, dan permainan politik seperti ini pada akhirnya akan menghancurkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertera pada UUD 1945.

Mengesampingkan keinginan rakyat dengan keinginan suatu kelompok atau partai, sama dengan mempermainkan hak politik rakyat. Demokrasi memang menghendaki kedaulatan di tangan rakyat, tetapi pada prakteknya, rakyat memberi mandat kepada perwakilannya lewat partai politik untuk mengelola berbagai keinginan mereka. Dan secara umum, lebih banyak rakyat yang

memakai hak politiknya untuk mewakilkan daripada untuk mencalonkan diri menjadi perwakilan rakyat. Yang mana hal ini adalah wajar belaka, sebab perwakilan kelompok mustahil lebih banyak daripada anggota kelompok itu sendiri. Maka konsekuensinya adalah, momentum bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya secara langsung terbatas pada masa pemilihan umum. Setelah itu tergantung bagaimana partai politik menyuarakan dan melaksanakan kepercayaan dari rakyat ini.

Tentu saja demokrasi tetap memiliki celah, seperti halnya sistem pemerintahan yang lain. Meskipun demokrasi menjadi sebuah sistem yang menjamin rakyat untuk dapat menentukan pemimpinnya sendiri. Namun pilihan rakyat tidak menjamin untuk mendapatkan pemimpin yang tepat. Kondisi seperti ini diibaratkan Gus Sholah sebagai kabut tebal, seperti yang ia tuliskan dalam esainya "SI MPR, Berkah atau Bencana?" berikut, "Kini, adegan demi adegan dalam panggung politik membuat kita seperti sedang menembus kabut yang sangat tebal. Kabut tebal itu membuat kita tidak tahu apa yang berada di baliknya, apakah berupa udara terbuka yang membuat kita bisa melaju tanpa hambatan berarti. Atau di balik kabut tebal itu justru terdapat bukit karang yang menghadang kapal yang kita tumpangi?"

Hal ini menurut Gus Sholah semakin merugikan rakyat ketika pemilihan presiden diwakilkan kepada perwakilan rakyat di MPR. Terutama melihat kesenjangan yang jelas antara keinginan rakyat dan keinginan partai politik. Kabut yang menutupi rakyat akan semakin tebal karena pertama, mereka tidak mengetahui secara pasti apakah partai yang mereka pilih menjalankan amanah dengan baik atau tidak. Kedua, suara mereka tidak lagi berpengaruh dalam menentukan siapa presiden terpilih nantinya.

Bisa dibayangkan ketika partai politik mengabaikan suara rakyat, dan memilih presiden atas pertimbangan kepentingan

partai belaka, maka presiden terpilih adalah representasi dari partai, bukan representasi rakyat. Mekanisme yang seperti ini akan menjadikan presiden sebagai alat partai, bukan lagi mandataris rakyat. Akhirnya presiden akan dipertahankan dengan cara apapun selama menguntungkan partai, dan akan diberhentikan secepat apapun ketika dianggap merugikan. Lalu, di mana posisi rakyat berada? Keresahan ini yang Gus Sholah sampaikan dalam tulisannya "Kembalikan Kedaulatan kepada Rakyat".

"Berbagai penyimpangan yang diuraikan di atas dan fakta adanya kesenjangan antara suara rakyat dan suara wakil rakyat (baca wakil parpol) menurut saya perlu mendapat perhatian serius dan memicu kita untuk mempertimbangkan apakah bukan sudah saatnya kita mengembalikan kedaulatan kepada pemiliknya, kepada rakyat? Biarkanlah rakyat menentukan pilihan siapa tokoh yang paling tepat untuk menjadi presiden. Harus diupayakan oleh rakyat bahwa dalam tahun 2004 kita sudah bisa memilih langsung presiden dan wapres (dalam satu paket).

Tentu banyak juga yang tidak menyetujui gagasan itu dengan dalih bahwa rakyat belum siap. Menurut saya, rakyat telah siap. Memang diakui perlu proses pembelajaran. Hal itu bisa dilakukan dalam waktu tiga tahun ini. Yang jelas kita telah melihat kenyataan bahwa ratusan tokoh MPR(S) telah menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya mampu melaksanakan amanat rakyat. Dan yang lebih penting, hal semacam itu, yang senapas dengan itu, masih mungkin terjadi lagi di masa mendatang."

Sejak tahun 2004 harapan Gus Sholah sudah terwujud dengan adanya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat. Namun jalan untuk menuju cita-cita politik ideal yang diharapkan Gus Sholah kelihatannya masih panjang. Selama kesenjangan antara rakyat dan partai politik masih ada, memilih presiden secara langsung hanya menjadi langkah kecil mengembalikan kedaulatan

kepada rakyat. Dalam tulisannya "Gelora Bung Karno", Gus Sholah telah berusaha untuk menunjukkan jalan menuju ke sana.

"Saya bermimpi bahwa para politisi melakukan kegiatannya dengan cerdas dan mendidik serta mencerdaskan rakyat, bukannya memanfaatkan fanatisme pengikutnya untuk mendukung secara membabi buta. Rasanya mimpi semacam itu bukan monopoli saya saja. Tetapi saya sadar bahwa mimpi semacam itu masih membutuhkan waktu lama dan kerja keras kita bersama untuk bisa mewujudkannya.

Langkah awalnya ialah upaya pengendalian diri. Mengendalikan diri untuk tidak menonjolkan kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa, untuk tidak saling memanaskan suasana, untuk tidak bersikap menang-menangan. Kita semua tanpa terkecuali perlu bertanya lebih mendalam kepada hati nurani kita masing-masing, lebih jujur kepada diri sendiri, apakah kita lebih menonjolkan kepentingan kelompok atau kepentingan bangsa?"

Sebagai mantan aktivis yang ikut juga bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dalam memprotes kebijakan Orde Lama, Gus Sholah meyakini bahwa gerakan rakyat di akar rumput merupakan salah satu alat kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Gerakan yang akhirnya berwujud demonstrasi atau unjuk rasa ini diperlukan untuk keberlangsungan sebuah negara—terlebih yang menganut paham demokrasi—karena beberapa sebab.

Pertama, sebagai upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan antara penyelenggara negara dan rakyat. Dalam hal ini rakyat akan bertindak sebagai oposisi dari pemerintah di luar parlemen, untuk mencegah konsekuensi negatif dari kemungkinan terciptanya koalisi partai politik pendukung pemerintah tanpa adanya oposisi. Kedua, jaminan adanya kebebasan berpendapat dan hak untuk didengarkan, yang mana merupakan perwujudan dari demokrasi. Ketiga, sebagai sinyalemen bagi pemerintah terkait adanya penyimpangan atau

pelanggaran yang terjadi di dalam lembaga negara, dan juga pertanda terputusnya komunikasi yang baik antara rakyat dengan partai politik sebagai alat penampung aspirasi mereka.

Beberapa hal yang memicu timbulnya gejolak perlawanan dari rakyat kepada pemerintah adalah, pertama, pemerintahan dijalankan dengan sistem otoriter. Benih-benih pemerintahan yang otoriter bisa dilihat dari rumusan produk hukum yang terkesan melindungi pemerintah dan tidak berpihak kepada rakyat. Dalam kondisi ini, biasanya kritik keras yang disampaikan lewat berbagai media bisa saja dianggap sesuatu yang melecehkan atau menghina lembaga negara. Pada kasus yang lebih lanjut, pemerintah akan terlihat membungkam media, lalu sumber berita dan informasi akan diatur atau dimonopoli oleh pemerintah.

Kedua, kurangnya keterlibatan rakyat di luar parlemen dalam perumusan kebijakan pemerintah. Meskipun perwakilan di parlemen menduduki posisi sebagai wakil rakyat, tetapi seperti apa yang juga disampaikan Gus Sholah, perwakilan ini lebih tampak sebagai wakil parpol dibandingkan wakil rakyat. Oleh karena itu, dalam mengambil kebijakan apapun, pemerintah idealnya mendengarkan juga pendapat dari para ahli, peneliti, dan masyarakat yang akan terdampak dari berlakunya kebijakan tadi.

Ketiga, ketidakterbukaan informasi kepada rakyat, yang mengakibatkan pandangan bahwa pemerintah dan partai politik sengaja menutup-nutupi pembahasan sesuatu yang berpotensi polemik dan merugikan rakyat. Hal ini bisa juga terjadi karena sosialisasi dan publikasi kebijakan yang kurang efektif kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kesalahpahaman kepada pemangku kebijakan.

Maka dari itu, Gus Sholah menilai gerakan rakyat adalah upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada pemilik sahnya, dan gerakan ini—di bawah sistem demokrasi—otomatis legal secara

hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Kita bisa dengan jelas membaca bahwa Gus Sholah cenderung mendukung gerakan rakyat yang non-kekerasan (tidak membahayakan keselamatan umum) dan disampaikan dengan argumentasi yang kuat sebagai hak politik mereka. Selaras dengan itu, Gus Sholah cenderung menghindari gerakan massa yang besar dan didasari atas emosi kelompok, dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab yang akan menimbulkan konflik horizontal antar rakyat sendiri.

Mungkin cita-cita politik Gus Sholah belum akan terwujud sampai kedaulatan kembali kepada rakyat secara paripurna, karena hanya dengan demikian institusi negara akan kembali dipercaya dan dipertahankan. Cita-cita ini bisa kita baca pada paragraf terakhir "Kembalikan Kedaulatan kepada Rakyat" yang berbunyi, "Apakah kita merelakan mereka untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan cara yang tidak selaras dengan hakikat UUD? Jawabannya ada pada diri rakyat. Jawaban rakyat itu harus disuarakan oleh kalangan mahasiswa, kalangan cendekiawan, kalangan profesional, atau kalangan lain yang punya kepedulian akan nasib dan masa depan bangsa. Mungkin saja anggota MPR tidak setuju dengan gagasan itu. Kalau demikian halnya, tidak ada pilihan lain, rakyat harus merebut kembali kedaulatan mereka yang berada di tangan MPR. Tentunya dengan cara damai, tidak dengan cara kekerasan." ❖

Karakter Pemimpin Bangsa dan Negarawan

SEUMPAMA kita menanyakan kepada Salahuddin Wahid, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan bangsa Indonesia? Mungkin Gus Sholah akan tegas menjawab: pemimpin yang pro rakyat. Karena itu Gus Sholah sering menyinggung kelompok ini dalam tulisannya: pedagang kecil dan petani. Bagaimana pasar tradisional digusur dan dibangun ulang, lalu dikenakan biaya sewa yang terlampau tinggi jauh dari harga pembangunannya, sehingga mencekik para pedagang kecil yang sebelumnya berdagang di sana. Atau bagaimana puluhan juta hektar lahan dikuasai ratusan perusahaan, sedangkan puluhan juta petani hanya menguasai belasan juta hektar lahan.

Setelah pertanggungjawaban BJ Habibie ditolak Sidang Umum MPR, pergolakan pandangan seputar siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Indonesia kembali bergulir. Gus Sholah termasuk yang rutin menulis tentang berbagai kemungkinan dan perhitungan siapa yang berpotensi akan menjadi presiden. Nama BJ Habibie dan Megawati paling dominan saat itu, walau BJ Habibie tidak begitu diunggulkan karena citra dan akseptabilitasnya di MPR yang rendah. Namun dengan keunggulan itu, jalan Megawati menuju kursi presiden tak lantas terbuka lebar begitu saja. Menurut Gus Sholah, masyarakat masih ragu dengan kemampuan yang dimiliki Megawati sebagai seorang tokoh bangsa.

Gus Sholah juga menyuarakan keraguan itu, bahwa Megawati harus lebih sering tampil di publik dan menyampaikan gagasannya tentang bangsa dan negara. Megawati harus menunjukkan bahwa

ia menguasai permasalahan dan bisa dijadikan sandaran bagi rakyat untuk berharap.

"Megawati mempunyai kelebihan dukungan masyarakat yang sangat besar, bersih dari dosa politik, dan dapat kepercayaan luar negeri. Kelemahannya: keraguan soal kemampuan, kurang tenaga yang dapat diandalkan untuk duduk di pemerintahan, kurang solidnya organisasi PDI-P. Pidatonya terakhir pada Juli 1999, walau sangat menarik perhatian dan simpati, tapi belum berhasil meyakinkan masyarakat politik terhadap kemampuannya. Megawati harus lebih sering tampil di berbagai kesempatan, terutama diskusi atau seminar yang memberikan kesempatan masyarakat dapat berdiskusi langsung mengenai berbagai hal," begitu tulis Gus Sholah dalam "Indonesia Baru, Sebuah Fatamorgana?".

Menurut Gus Sholah akan sulit untuk menilai kualitas calon presiden tanpa rekam jejak yang jelas mengenai sikap, gagasan, dan pemikirannya, juga kepada siapa ia berpihak. Dan baginya tolak ukur memilih pemimpin begitu kentara, tak lain adalah keberpihakan kepada rakyat. Pemimpin yang pro rakyat ialah mereka yang saat menjabat dalam posisi apapun (presiden, menteri, gubernur, pengusaha), membuat kebijakan yang jelas pro rakyat.

Untuk itu tidak hanya diperlukan slogan, tetapi suatu gambaran utuh mengenai acuan bagaimana sang tokoh akan membuat kebijakan yang betul-betul pro rakyat, dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Masalahnya, bagaimana cara untuk menyampaikan hal itu kepada rakyat? Apalagi jika sang tokoh penyusun program itu belum banyak dikenal rakyat. Yang problematik adalah, ketika politik saat ini masih mendorong kepada ketergantungan dana untuk memunculkan tokoh kepada masyarakat, daripada karakter yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Akhirnya kebanyakan opsi yang diambil oleh partai politik dan bisa dipilih oleh rakyat adalah para tokoh yang memiliki modal dana besar.

Gus Sholah pernah menyebutkan dalam tulisannya "Yang Terpenting dalam PILKADA" bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) di mana pun pasti melibatkan paling tidak empat faktor yaitu rakyat, partai, calon, dan dana. Idealnya yang terpenting adalah rakyat, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang kita anut. Jembatan antara rakyat dan calon adalah partai. Maka partai politik akan menjadi faktor yang menentukan ke mana arah pembangunan daerah atau negara nantinya. Untuk itu partai punya tanggung jawab moral kepada pemilih untuk menentukan calon yang berpihak kepada rakyat.

Namun ada pula partai yang memilih calon yang bisa menyediakan dana amat besar, semacam 'sewa kendaraan' politik di luar dana kampanye. Tidak dapat dibantah bahwa partai membutuhkan dana untuk bisa menjalankan roda organisasi. Kalau angka sewanya masih wajar, masih bisa dipahami, tetapi sampai sekarang pun tidak ada ukuran kewajaran yang cukup jelas. Memilih calon pemimpin dengan lebih menitikberatkan pada besarnya uang sewa partai, adalah suatu tindakan yang mencederai kepercayaan pemilih.

Dana yang besar tak bisa dipungkiri dibutuhkan untuk strategi pemenangan calon, tapi menurut Gus Sholah itu bukan suatu jaminan kemenangan. "Pendapat partai bahwa dana kampanye yang besar akan menjamin kemenangan, bisa dibantah dengan kemenangan Gamawan Fauzi dalam pemilihan gubernur di Sumatera Barat (Sumbar) dan Paliuju di Sulawesi Tengah. Gamawan Fauzi yang punya dukungan kuat ternyata tidak dihiraukan oleh partai pemenang pemilu 2004. PDIP yang tidak kuat di Sumbar mencalonkannya dan akhirnya menang. Tidak hanya menang, tetapi calon yang bersangkutan berhasil meraih kursi gubernur yang menjanjikan perubahan," tulisnya.

Lebih lanjut, seorang pemimpin tidak bisa hanya pro rakyat tanpa mengetahui bagaimana mewujudkan keberpihakannya kepada

rakyat secara nyata. Pemimpin harus memiliki visi ekonomi, visi demokrasi dan kemanusiaan, dan sikap kenegarawanan. Visi presiden dapat dilihat pada tulisan, pidato, pernyataan, dan kebijakannya dalam bentuk keputusan berbagai masalah, baik di dalam maupun luar negeri. Walaupun presiden dibantu oleh wakilnya, para menteri, penasehat, dll, tetapi presiden harus mempunyai kemampuan dan sikap yang baik untuk dapat memberi penilaian terhadap usul dari pembantunya sebagai masukan dalam mengambil keputusan.

Visi ekonomi yang berpihak kepada rakyat menurut Gus Sholah adalah yang tidak hanya fokus kepada pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan di masyarakat. Politik ekonomi Indonesia sesuai amanat Pembukaan UUD adalah Ekonomi Pasar Sosial, bukan Ekonomi Pasar Bebas seperti yang telah kita jalani selama ini. Gus Sholah berpendapat bahwa kita memang tak mungkin menolak modal asing, tapi tak boleh juga memberinya keleluasaan yang terlalu luas. Pemimpin bangsa harus selektif dan melindungi pengusaha lokal dan menjamin hak-hak dasar rakyat terpenuhi.

Sementara visi demokrasi dan kemanusiaan presiden harus menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, menjamin tidak adanya tindak kekerasan dari aparat kepada rakyat atau antara rakyat sendiri, dan melindungi hak asasi manusia. Pemerintahan yang dijalankan dengan visi demokrasi dan kemanusiaan yang pro rakyat tidak akan jatuh ke dalam lubang otoriter. Segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran akan ditindak melalui mekanisme dari undang-undang, dan vonis bersalah atau tidak bersalah harus diputuskan secara hukum yang adil. Semua sama di mata hukum, tak mengenal status sosial di masyarakat.

Gus Sholah menulis dalam salah satu esainya "Presiden dan Negarawan", "Komitmen kepada demokratisasi dan masyarakat sipil harus ditunjukkan dengan tidak mengembalikan pemerintahan

yang militeristis. Dengan menghargai kebebasan beragama warga negara. Dengan tidak mencurigai tanpa dasar sekelompok warga masyarakat. Dengan menjaga keamanan warganya di manapun mereka tinggal."

Pemimpin yang mempunyai visi ekonomi, demokrasi, dan kemanusiaan yang berpihak kepada rakyat adalah seorang negarawan menurut Gus Sholah, yaitu mereka yang bertindak untuk kepentingan negara, bukan pribadi. The World Book Encyclopedia (1994) menulis bahwa *a statesman is a person with a broad general knowledge of government and politics, who take a leading part in public affairs. Most people think of statesman being concerned with the needs and interests of their country as a whole. In contrast, they think of politicians as having only party or political aims*.

Meskipun menurut Gus Sholah negarawan tidak harus pejabat pemerintah, tetapi baginya seorang presiden haruslah bersikap sebagaimana negarawan. Sikap kenegarawanan pemimpin dapat dilihat dari loyalitasnya kepada negara, seperti salah satu ungkapan dari Winston Churchill yang terkenal, "*The duty to my party ends when the duty to my country begins.*" Kewajiban dan kesetiaan kepada partai berakhir ketika kewajiban dan kesetiaan kepada bangsa dan negara dimulai. Berarti juga tidak boleh mengutamakan kepentingan diri, keluarga, kawan serta kelompok di atas kepentingan bangsa dan negara.

Untuk dapat melaksanakan semua itu, satu hal yang tak boleh terpisah dari seseorang adalah hati nurani. Tidak bisa seorang pemimpin memihak kepada rakyat tanpa hati nurani. Tidak bisa seorang presiden mengatakan tidak pada tekanan partai dan lain-lain untuk mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat tanpa hati nurani. K. Bartens dalam bukunya "Etika" menulis bahwa biasanya hati nurani akan berbicara ketika seseorang menghadapi dilema, apakah harus mengungkap fakta pahit yang dilihat atau

berdiam diri demi keselamatan sendiri. Bila ia berbicara, maka terancamlah keselamatannya. Namun bila berdiam diri, maka belum tentu ia dapat mempertanggungjawabkan sikap tersebut terutama kepada diri sendiri.

Meskipun tampaknya kita dalam kondisi krisis kepemimpinan dan kenegarawanan, namun dalam sejarah nasional kita beberapa tokoh telah menunjukkan sikap kenegarawanan yang baik dan berhati nurani. Salah satu contoh terbaik mungkin dapat kita temukan dalam sosok Bung Hatta, banyak kalangan sampai menjulukinya Hati Nurani Indonesia. Demi mengikuti hati nuraninya, Bung Hatta merelakan jabatannya dan mengundurkan diri dari wakil presiden pada tahun 1957. Sebuah sikap yang langka ditemukan dalam budaya politik Indonesia. Paling banyak adalah seseorang justru baru mau mengikuti hati nurani bila mereka tak lagi menjabat sebagai pejabat publik, atau yang terburuk malah tidak pernah mengikuti hati nurani sama sekali.

"Berbicara tentang hati nurani berarti berbicara tentang moralitas dan etika. Di sudut lain, etika dan hukum sangat erat kaitannya seperti bunyi pepatah kuno Roma, *quid leges sive maribus*. Artinya, hukum dapat meningkatkan dampak sosial dari etika dan moralitas, sebaliknya etika hanya akan mengambang tanpa dilembagakan dalam masyarakat," tulis Gus Sholah dalam salah satu esainya "Gunakan Hati Nurani". ❖

Profesionalitas dan Moralitas Pejabat Negara

SEPASANG wartawan harian The Washington Post, Carl Bernstein dan Bob Woodward pernah mewartakan skandal Watergate yang akhirnya membuat Presiden Nixon harus mundur dari jabatannya. Berkat investigasi mendalam itu, The Washington Post meraih penghargaan Pulitzer pada 1973 untuk kategori layanan publik. Laporan kasus Watergate itu kemudian dibukukan dengan judul "All The President's Men". Istilah itu memberikan asosiasi tentang bagaimana sikap (biasanya dalam pengertian negatif) dari orang-orang terdekat di sekeliling presiden. Dalam kasus Watergate diungkapkan bagaimana lingkaran terdekat Nixon melakukan penyadapan terhadap markas Partai Demokrat untuk keuntungan mereka. Melalui serangkaian proses pengadilan terhadap para penasehat terdekatnya, dan ancaman impeachment yang menimpanya, Nixon terpaksa lengser dari jabatan presiden.

Gus Sholah pernah menyinggung tentang "All The President's Men" dalam tulisannya terkait kasus Bank Bali pada masa kepresidenan BJ Habibie, yang diduga melibatkan lingkaran dalam presiden. Kalangan yang tidak menghendaki BJ Habibie kembali menjabat menggunakan kasus ini sebagai senjata untuk membentuk opini publik. Mereka berpendapat apabila BJ Habibie terpilih kembali sebagai presiden, maka proses pemeriksaan perkara itu tidak akan menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan. Hal ini

ditambah lagi dengan penyelesaian kasus KKN sebelumnya yang melibatkan Soeharto dan terkesan diulur-ulur sampai batas akhir. Sebagian masyarakat menilai bahwa BJ Habibie enggan untuk mengadili Soeharto, padahal bagi mereka bobot masalah ini sangat berat. Sedangkan BJ Habibie sendiri berpegang pada prinsip kalau belum ada dasar hukum yang kuat untuk mengajukan Soeharto ke pengadilan, maka hal itu tidak akan dilakukan.

Presiden sebagai kepala negara memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikatnya ketika seseorang terpilih menjadi presiden, secara langsung ia harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Sehingga apapun kebijakan dan keputusan yang presiden ambil berorientasi untuk kepentingan rakyat. Namun dalam trias politica, selain eksekutif, kekuasaan negara dibagi lagi menjadi legislatif dan yudikatif. Presiden sebagai eksekutif negara tertinggi berjalan berdampingan dengan legislatif yang merumuskan undang-undang. Sedangkan dalam prakteknya selama ini, hubungan antara presiden dan parlemen tak hanya berjalan berdasarkan hubungan fungsional, tetapi juga transaksional. Yang terakhir ini seringkali mengakibatkan kerugian kepada bangsa dan mengorbankan kepentingan rakyat.

Hal ini bisa terjadi karena seseorang perlu kendaraan politik untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Sehingga presiden terpilih tidak terlepas dari bantuan partai pendukung dan pengusungnya selama pemilu. Sementara anggota parlemen notabene adalah anggota partai politik. Kondisi ini mengakibatkan posisi partai politik sangat mempengaruhi komunikasi antara kedua pihak (presiden dan parlemen) yang mengakibatkan dinamika politik nasional. Presiden dengan pandangan politik pro rakyat dan berhati nurani tidak akan terlalu terpengaruh dengan fakta ini, walau harus mengambil resiko akan kehilangan dukungan di

dalam parlemen. Hilangnya dukungan ini akan menjadi berarti ketika itu menghambat jalannya pemerintahan. Maka komunikasi presiden untuk merangkul berbagai golongan sangat menentukan bagaimana pemerintahannya akan berjalan, tentu saja lagi-lagi harus berdasarkan kepentingan rakyat. Di sinilah keputusan presiden dalam memilih para pembantunya di pemerintahan menjadi sangat penting.

Gus Sholah memperkirakan bahwa akan terjadi pembagian kekuasaan (*sharing of power*) di antara partai-partai, dan menurutnya itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan dalam kehidupan politik. Tetapi pembagian kekuasaan itu tidak boleh melupakan prinsip utama—yang bersifat universal—dalam memilih pejabat negara, yaitu profesionalitas dan moralitas. Gus Sholah menuliskan, "Kita membutuhkan pemimpin atau pejabat negara yang berkemampuan sekaligus mempunyai integritas, keberanian untuk berkata tidak kepada sang bos kalau diminta melakukan sesuatu yang salah; mampu membuat penilaian yang seimbang; lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kelompoknya."

Memilih orang-orang di luar partai tentu saja lebih menguntungkan presiden untuk mengurangi potensi dualisme komando, sehingga presiden bisa memastikan bahwa pembantunya hanya mengikuti arahan darinya, bukan dari pihak lain. Tetapi ketika pembagian kekuasaan tidak bisa dihindari, maka yang harus dilakukan oleh partai politik adalah menyodorkan orang yang berkompeten di bidangnya, dan yang harus presiden lakukan adalah memilih yang terbaik di antara kandidat-kandidat dari berbagai pihak dan memiliki kesamaan visi untuk menyejahterakan kehidupan rakyat. Tentu ini menjadi problematis ketika partai politik hanya mementingkan keuntungan petinggi-petinggi partai semata, padahal seharusnya partai politik berfungsi sebagai penampung aspirasi rakyat.

Memang dalam prosesnya, presiden masih mempunyai pilihan perombakan kabinet bila dianggap perlu. Namun hal itu juga menunjukkan ketidaktelitian presiden dalam memilih pembantunya di awal. Dan pada tahap yang lebih lanjut, penggantian orang dan posisi yang terlalu sering dapat memicu hilangnya kepercayaan di lingkungan dalam pemerintahan maupun rakyat. Lalu akan terjadi upaya-upaya untuk mempertahankan posisi dengan cara yang tidak etis. Seperti halnya membuat laporan menyesatkan yang hanya bertujuan mengambil perhatian presiden, yang biasa kita dengar dengan sebutan laporan ABS (Asal Bapak Senang). Istilah ABS populer pada masa Orde Baru sebagai idiom politik, dipakai untuk menjuluki pejabat yang senang "menjilat" Soeharto. Gus Sholah menjuluki orang-orang seperti ini dengan istilah "Brutus", atau para oportunis yang hanya memikirkan diri sendiri dan sangat mungkin berubah menjadi pengkhianat.

Para oportunis ini hanya peduli kepada kedudukan, kekuasaan, dan harta, sehingga cenderung tidak memiliki kesetiaan politik. Mereka ini pada akhirnya akan berbalik menjadi senjata makan tuan apabila keadaan berbalik merugikan atasannya. Gus Sholah memberikan contoh seperti mantan Ketua Umum DPP Golkar Harmoko yang mendorong Soeharto untuk menjadi presiden lagi pada 1998, tetapi setelah rakyat menolak, alih-alih dirinya mundur dari jabatan Ketua DPR/MPR, Harmoko malah meminta Soeharto untuk mundur. Sama halnya dengan 14 menteri yang mengundurkan diri dari kabinet terakhir Soeharto (1998), yang baru meminta mundur ketika Soeharto goyah kedudukannya. "Mereka bertindak seperti Brutus terhadap tokoh yang membesarkan mereka, hanya karena ingin mempertahankan kedudukan," tulis Gus Sholah.

Sikap politik menyenangkan atasan untuk mempertahankan posisi dan kedudukan pribadi adalah warisan watak paternalisme dalam budaya feodal pada kerajaan. Paternalisme adalah sistem

kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, seperti hubungan antara ayah dan anak. Dalam kehidupan bernegara, paternalisme menempatkan pimpinan sebagai pihak dominan. Budaya paternalisme memandang atasan sebagai pihak yang harus dihormati oleh bawahannya, sedangkan bawahan hanya dipandang sebagai alat bagi atasan. Hal ini bertentangan dengan demokrasi yang mana menjadikan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Tentu untuk menghindari hal-hal semacam itu terjadi dan mengganggu jalannya pemerintahan yang baik, presiden harus pintar-pintar memilih orang-orang terdekatnya, sehingga tidak menjerumuskannya menuju kehancuran. Akan lebih baik apabila presiden mempunyai kepekaan dan melakukan penelitian yang mendalam terhadap para pembantu dan lingkaran terdekatnya, dengan patokan profesionalitas dan moralitas yang dimiliki para kandidat. Profesionalitas seseorang bisa dilihat dari pengabdian dan tanggung jawabnya terhadap bidang keahlian dan pekerjaannya, hasil positif yang ia berikan untuk pekerjaannya, dan pengakuan atas profesionalitasnya dalam bekerja dari berbagai pihak. Sementara moralitas di negara ini dapat dilihat salah satunya melalui rekam jejak seseorang dalam masalah hukum dan bagaimana ia mempertanggungjawabkan tindakannya.

Nantinya masyakarat yang akan menilai profesionalitas dan moralitas orang-orang terdekat presiden, apakah presiden memilih menteri dan pejabat tinggi berdasarkan kemampuan dan kebutuhan atau transaksional semata. Dalam hal ini Gus Sholah pernah menulis, "Jadi siapapun yang terpilih menjadi presiden, kita harus menyuarakan sikap kritis kita terhadap lingkaran terdekat presiden dan juga memberikan komentar tajam kepada para tokoh yang akan dijadikan menteri atau pejabat tinggi lainnya. Kita tentunya masih ingat bagaimana Menteri Agraria Hasan Basri Durin

didemo oleh mahasiswa di Padang karena ada dugaan keterlibatan KKN. Kita juga mencatat komentar yang tajam dan pedas terhadap Menteri Lingkungan Hidup Panangian Siregar dari berbagai pihak yang peduli dengan masalah lingkungan hidup." ❖

Bagian kedua: Negara, Agama dan Pancasila

KH. A. Wahid Hasyim, Pancasila dan Islam

KURUN waktu antara 1998 dan 1999 merupakan era di mana Gus Sholah terlibat dalam diskusi intensif dan menjurus ke polemik dengan Gus Dur. Yang diperdebatkan antara dua kakak beradik itu ialah berkenaan dengan Pancasila, dan hubungan antara Islam dan Negara. Yang menjadi basis pemikiran dan perdebatan keduanya, ialah bagaimana sesungguhnya pandangan dan sikap ideologis sang ayah (KH. A. Wahid Hasyim) terhadap hubungan Islam dan Negara. Kedua tokoh ini memiliki persepsi yang berbeda dalam memandang posisi ayahnya. Perdebatan antarkeduanya menggunakan panggung dan forum media, melalui artikel yang mereka tulis.

Harian Media Indonesia pada tanggal 8 dan 9 Oktober 1998 memuat tulisan KH. Abdurrahman Wahid berjudul A. Wahid Hasyirn, Islam dan NU. Tulisan itu secara garis besar menyampaikan sikap KH. A. Wahid Hasyim terhadap Pancasila dalam kaitan dengan hukum Islam, sikap (kalangan) Islam terhadap Pancasila selama ini dan perlunya mengkaji kembali serta melakukan reorientasi terhadap sikap itu.

Gus Dur menulis tentang Soewarno (73 tahun) yang pemah menjadi ajudan Panglima Besar Sudirman dan sering mengikuti perbincangan Pak Dirman dengan banyak pimpinan nasional lainnya. Dalam salah satu pertemuan antara Pak Dirman dengan Dr. Soekiman (pimpinan Masyumi) dan A. Wahid Hasyim, Soewamo menceritakan bahwa KH. A. Wahid Hasyim menjelaskan kepada

kedua tokoh itu tentang perlunya hukum Islam disandarkan pada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya diuraikan bagaimana KH. A. Wahid Hasyim sebagai menteri agama membuktikan pendapatnya itu dengan menerima permintaan pelajar putri untuk belajar di Sekolah Guru Hakim Agama Negeri (SGHAN), sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan syari'at yang merupakan karya ulama.

Selain itu Gus Dur juga menguraikan bahwa dalam Muktamar I935 di Banjarmasin, NU memutuskan untuk mempertahankan dan membela kerajaan Hindia Belanda dalam menghadapi kemungkinan serangan dari Jepang. Jadi mempertahankan pemerintahan nonmuslim yang sah adalah suatu kewajiban. Sebaliknya, ketika Republik Indonesia telah diproklamasikan, maka PBNU mengeluarkan Resolusi Jihad (22-10-1945) yang berisi seruan kewajiban bagi orang muslim untuk berjuang mempertahankan negara RI dari serangan orang luar (yang notabene adalah negara yang dahulu dibela melalui keputusan Muktamar NU tahun I935).

Di atas diuraikan, Soewarno menuturkan tentang Abdul Wahid Hasyim yang mengakui bahwa hukum Islam harus disandarkan pada Pancasila yang ditafsirkan oleh Gus Dur menjadi keunggulan Pancasila di atas hukum Islam. Gus Sholah menuturkan bahwa dirinya mengenal Soewarno dan sering mendengar uraian tentang Abdul Wahid Hasyim dan Pak Dirman darinya. Tetapi uraian diskusi tentang Pancasila dan hukum Islam di atas belum pernah dia dengar. Menurut Gus Sholah dirinya tidak tahu, sejauh mana kebenaran dan penuturan Soewarno itu, karena kejadiannya sudah berjarak 50 tahun dari kita. Kalau KH. Abdul Wahid Hasyim masih hidup sekarang, Salahuddin Wahid bisa paham kalau beliau mempunyai pendapat tentang posisi Pancasila terhadap hukum Islam setelah mengalami proses eksperimentasi di dalam realitas politik selama beberapa puluh tahun. Tetapi bahwa KH. Abdul Wahid Hasyim mempunyai

pendapat semacam itu 50 tahun yang lalu, Gus Sholah tidak begitu yakin. Kekentalan rasa keislaman sang ayah saat itu tidak bisa dibantah, walaupun beliau tidak bersifat mutlak-mutlakan, seperti yang terlihat ketika beliau dan beberapa pemimpin Islam lainnya bersedia menghilangkan tujuh kata dari Piagam Jakarta.

Dalam Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 13-7-1945, KH. A. Wahid Hasyim menyampaikan pendapat sebagai berikut: a) Buat masyarakat Islam penting sekali perhubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu diusulkan pasal 4 ayat (2) ditambah dengan kata-kata; "yang beragama Islam". Jika Presiden orang Islam, maka perintah-perintah berbau Islam dan akan besar pengaruhnya b) Diusulkan supaya pasal 29 diubah sehingga bunyinya kira-kira, "Agama Negara ialah agama Islam", dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain, untuk dan sebagainya. Hal ini erat perhubungan dengan pembelaan. Pada umumnya pembelaan yang berdasarkan atas kepercayaan sangat hebat, karena menurut ajaran agama, nyawa hanya boleh diserahkan buat ideologi agama. Usul KH. A. Wahid Hasyim itu didukung oleh Dr. Soekiman yang berpendapat sebagai berikut: Oleh karena usul-usul Wahid Hasyim akan memuaskan rakyat dan pada hakikatnya tidak ada akibatnya apa-apa, maka saya setuju dengan usuI-usul Wahid Hasyim (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKl-Setneg R1, Jakarta 1995 hal 224).

Kekentalan rasa keislaman pada saat itu bukanlah sesuatu yang aneh, bukan aib, bukan pula noda politik atau hal lainnya yang bersifat negatif. Tetapi suatu keyakinan untuk memperjuangkan dasar negara sesuai dengan pandangan hidup dan pandangan politik kalangan lslam. Kita tidak bisa menilai sikap dan pandangan politik keislaman yang dianut seseorang saat itu dengan angle atau sudut pandang saat ini. Gus Sholah tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Soewarno tentang sikap KH. A.

Wahid Hasyim itu tidak benar. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh KH. A. Wahid Hasyim itu belum tentu dapat ditangkap dan dipahami sepenuhnya oleh Soewarno.

Diberitakan, bahwa Pemerintah telah mengakui hari lahir Pancasila adalah 1 Juni I945, ketika Bung Kamo menyampaikan pidato di hadapan Sidang BPUPKI. Dasar negara yang diusulkan Bung Karno ialah: l) Kebangsaan lndonesia; 2) lntemasionalisme atau perikemanusiaan; 3) Permusyawaratan atau demokrasi; 4) Kesejahteraan sosial; 5) Ketuhanan. Usul Bung Kamo itu telah dibahas dalam persidangan Panitia Sembilan dari BPUPKI dan kemudian disempurnakan serta dirumuskan seperti yang tertuang dalam naskah resmi Pancasila yang kita kenal sekarang, yaitu; 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perubahan susunan dan perubahan redaksional dari kelima sila itu tentunya mempunyai maksud dan makna yang mendalam. KH. Achmad Siddiq, Rais Aam PBNU I984-1991, dan merupakan tokoh NU yang sangat berperan dalam merumuskan hubungan NU dan Pancasila dalam makalahnya berjudul "Hubungan Agama dan Pancasila" (Dialog, No.17 tahun [X September 1984), menyatakan, bahwa walaupun negara Rl berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti negara lndonesia adalah teokrasi atau negara berdasarkan suatu agama tertentu. Sebaliknya, dengan sila pertama itu, negara kita bukan negara sekuler. Di negara sekuler, agama terpisah dari negara dan negara tidak campur tangan dalam masalah agama. Dalam negara Pancasila, negara mempunyai peranan penting dalam pembangunan di berbagai sektor, termasuk pembangunan sektor agama dan sebaliknya juga agama mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara.

Selanjutnya KH. Achmad Siddiq menyatakan, kata "Yang Maha Esa" pada sila pertama merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata "Yang Maha Esa" merupakan penegasan dari sila Ketuhanan sehingga rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" itu mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (surah al-Ikhlas).

Pada bagian lain makalahnya, KH. Achmad Siddiq menyatakan bahwa materi dan rumusan rancangan Pembukaan Hukum Dasar (Piagam Jakarta) yang disusun dan dirumuskan oleh Panitia Sembilan itu seluruh dan seutuhnya, setelah diadakan perubahan, diterima dan disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 tempat tercantum rumusan dan susunan Pancasila mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada UUD atau konstitusi, sebab ia memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur yang disebut ground-norm atau pokok kaidah negara yang fundamental.

Sejalan dengan itu, dikutipkan sebagian dari TAP MPRS No. XX/MPRS /1966 yo. TAP MPR No. V/MPR/ 1973, yaitu Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan memuat Pancasila sebagai dasar negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapa pun juga, termasuk oleh MPR hasil pemilihan umum yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945 berwenang menetapkan dan mengubah isi UUD yang berarti pembubaran negara. Dalam kedudukan tadi, Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar dan sumber hukum dan batang tubuhnya

Dalam menanggapi makalah KH. Achmad Siddiq itu, Dr. Nurcholish Madjid menyampaikan pendapat bahwa adanya perubahan sila pertama dari "Ketuhanan" menjadi "Ketuhanan Yang

Maha Esa" sebagai penyeimbang dari penghapusan tujuh kata, apakah tidak justru lebuh baik daripada Piagam Jakarta. Mengapa rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa jauh lebih prinsipil dari pada "dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", sebab hal itu merupakan penegasan terhadap asas tauhid. ❖

Hubungan Pancasila dan Agama

DASAR negara dan agama adalah dua hal yang berbeda. Pancasila adalah hasil pemikiran manusia, upaya penggalian oleh Bung Karno selama sekian lama yang disempurnakan oleh Panitia Sembilan. Agama Islam adalah wahyu Allah SWT, bukan hasil pemikiran Nabi Muhammad SAW. Merujuk kepada pendapat KH. Achmad Siddiq, Pancasila dan Islam bukanlah dua hal yang harus dipilih salah satu sambil membuang yang lain. Keduanya dapat sejalan dan saling mengukuhkan, tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya tidak saling mengalahkan bahkan saling menunjang, saling melengkapi, harus bersama-sama dilaksanakan dan diamalkan.

Jadi pendapat bahwa hukum Islam disandarkan kepada Pancasila adalah sesuatu yang wajar, tetapi tidak harus ditafsirkan bahwa hal itu merupakan dominasi Pancasila atas hukum Islam. Di dalam negara karena Pancasila adalah dasar negara maka adalah wajar bila hukum agama harus bersandar kepada Pancasila Tetapi karena adanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, penafsiran terhadap Pancasila bersifat religius bukannya bersifat sekuler. Kembali kita sitir pendapat KH. Achmad Siddiq: "Sesungguhnya salah satu masalah besar bagi bangsa Indonesia zaman ini ialah bagaimana memproporsionalkan (*wad'u syai'in fi mahalihi*) Pancasila dan agama sehingga benar-benar terbukti bahwa di dalam negara dan masyarakat berpancasila ini agama dapat diamalkan dengan lebih baik. Dan sebaliknya umat beragama di negara ini merupakan tulang punggung ideologi nasional Pancasila."

Di dalam realitas politik selama 25 tahun terakhir, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan masuknya ketentuan syari'at Islam ke dalam beberapa UU, dimulai dengan UU Perkawinan, diikuti UU Peradilan Agama, maka telah terwujud suatu negara Pancasila yang berketuhanan, suatu negara yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Di dalam negara yang sudah kita jalani selama seperempat abad ini, diberikan akomodasi terhadap masuknya secara terbatas syari'at ke dalam peraturan perundangan. Memang akan muncul pertanyaan, apakah tidak ada keinginan atau kecenderungan untuk memasukkan sebanyak mungkin syari'at Islam ke dalam hukum positif di Indonesia? Rasanya kecenderungan semacam itu kian hari kian berkurang dengan makin bertambahnya jumlah kalangan Islam moderat di segala lapisan dan segala kalangan.

Gus Dur menulis bahwa secara tidak terasa kita telah banyak membohongi Pancasila untuk kepentingan-kepentingan kaum muslimin. Menurut Gus Sholah, penilaian itu tergantung pada penafsiran kita terhadap Pancasila, apakah bersifat religius ataukah bersifat sekuler. Cara penafsiran yang berbeda akan memberikan hasil penilaian yang berbeda Tentunya kita setuju untuk melakukan koreksi dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kebenaran sinyalemen itu dan melakukan koreksi apabila hal itu memang benar. Seandainya terdapat penyimpangan minor yang terjadi pada waktu sekian tahun yang lalu yang terasa tidak tepat lagi untuk suasana saat ini, rasanya tidak tepat menyebutnya sebagai tindakan membohongi Pancasila oleh kaum muslimin.

Penulis beranggapan, bahwa negara Pancasila yang berketuhanan seperti yang kita jalani saat ini adalah suatu bentuk perwujudan hubungan Islam dan negara yang sudah tepat dan proporsional, dengan catatan bahwa memang masih ada beberapa ekses yang harus diperbaiki. Upaya untuk mengubahnya menjadi

negara Piagam Jakarta yang ditafsirkan sebagai negara di mana akan dimasukkan sebanyak mungkin syari'at Islam ke dalam hukum positif, atau mengubahnya menjadi negara sekuler yang tidak menginginkan adanya satu pun ketentuan syari'at Islam ke dalam hukum positif, akan mendapat tentangan sebagian besar umat Islam. ❖

Pancasila Jalan Tengah Kita

Kalau tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari Indonesia"

- almarhum Dr. Setia Budi -

DALAM Media Indonesia tanggal 23 Oktober I998, KH. Abdurrahman Wahid membuat tulisan: "Terserah Suara Rakyat", untuk menanggapi kembali tulisan tanggapan dari Salahuddin Wahid. Tulisan Gus Sholah itu menurutnya sama sekali tidak ada kaitan dengan Partai Kebangkitan Umat (PKU) yang dianggap Gus Dur merupakan koreksi terhadap dirinya. Gus Sholah yakin bahwa perbedaan pandangan politik antara dua bersaudara tidak harus menyebabkan rcnggangnya persaudaraan di dalam keluarga Wahid Hasyim. "Sejak kecil kami didorong oleh Ibu untuk tidak malu berpikir. Kami dibiasakan untuk berani bersikap, berani berbeda pendapat dan mengemukakan pendapat itu, asal disampaikan dengan cara yang baik," tutur Gus Sholah.

Dalam artikelnya Gus Sholah menyatakan bahwa dirinya mencintai, menghormati dan mengagumi Gus Dur sebagai kakak sekaligus sebagai tokoh yang sangat luar biasa. Tetapi kalau Gus Sholah mempunyai perbedaan pendapat dengan Gus Dur dalam masalah kemasyarakatan yang penting, adalah sesuatu yang wajar

kalau pendapat itu disosialisasikan. Toh Gus Sholah meyakini jika Gus Dur menghormati perbedaan pendapat, dari manapun datangnya, apalagi dari adiknya sendiri.

Motto di atas dikutip oleh Gus Sholah dari motto sebuah tulisan KH. A. Wahid Hasyim yang terbit tanggal 24 Agustus 1952, sekitar tujuh bulan sebelum beliau wafat. Tulisan itu termuat dalam buku Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim. "Motto itu menunjukkan lagi kekentalan keislaman seorang A. Wahid Hasyim, sesuatu yang menyebabkan penulis meragukan keabsahan cerita Soewarno yang disitir Gus Dur," tulis Gus Sholah dalam tulisannya di Media Indonesia 9 Oktober I998.

Pada waktu itu, sekitar tahun 1948, seluruh tokoh Islam, termasuk KH. A. Wahid Hasyim, menerima Pancasila sebagai dasar negara dengan keinginan untuk memperjuangkan Islam menjadi dasar negara di kemudian hari (melalui Majelis Konstituante). Demikian pula halnya dengan Mohammad Natsir yang masih terlihat dalam perjuangan melalui Konstituante. Ternyata perjuangan itu tidak berhasil, setelah melalui pemungutan suara tiga kali, tidak ada partai yang dapat mencapai 2/3 dan jumlah suara. Gus Sholah merasa yakin bila KH. A. Wahid Hasyim masih ada di tengah kita saat ini, beliau akan sama pandangan dan sikapnya dengan Gus Sholah, yaitu menerima sepenuhnya Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, dengan penafsiran bersifat religius. Apabila KH. A. Wahid Hasyim masih sugeng saat ini, menurut Gus Sholah, beliau akan sepenuhnya menerima Pembukaan dan Batang Tubuh UUD I945 sebagai sumber hukum, dengan catatan sepanjang hukum itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. "Dan saya yakin bahwa KH. A. Wahid Hasyim akan menyetujui masuknya ketentuan syari'at Islam ke dalam peraturan perundang-undangan sepanjang ketentuan tersebut memang betul-betul relevan," demikian tulis Gus Sholah.

Perlu dikemukakan pendapat Bung Hatta dalam Memoir, Jakarta Tintamas l982, yang menyatakan bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik lndonesia, syari'at Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadits dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi lndonesia. Selanjutnya Bung Hatta menyatakan bahwa perbedaan hukum antara penduduk yang beragama Islam atau beragama Kristen akan terdapat terutama dalam hukum keluarga. Dalam bidang hukum perdata lainnya, hukum perniagaan dan hukum pidana tidak perlu ada perbedaan.

Gus Sholah kemudian merujuk pada hasil suatu penelitian yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat Indonesia ada keinginan kuat untuk berhukum dengan hukum agama atau hukum Islam. Penelitian itu menggambarkan keadaan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*) sangat akrab dengan hukum Islam atau bahkan hukum Islam sendiri (Sayuti Thalib dalam Receptio A Contrario - Jakarta Bina Aksara 1985 hlm. 66). Cita-cita batin, suasana kejiwaan dan watak rakyat Indonesia banyak dibentuk oleh ajaran agama. Hukum Barat dan Hukum Adat dapat diserap selama tidak bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai Hukum Dasar. Demikian kutipan dari tulisan Ichtiyanto berjudul Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia.

Perubahan drastis RUU Perkawinan yang sekuler menjadi UU Perkawinan yang memuat ketentuan syari'at Islam ketika jumlah anggota DPR Rl dari kalangan Islam hanya sekitar 20% dapat dijadikan bukti pendukung dari penelitian dan pendapat di atas.

Nilai Islam dalam Hukum Nasional

Cukup banyak nilai-nilai Islam yang telah masuk kedalam hukum nasional, bahkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya,

rumusan tentang gagasan bernegara bangsa Indonesia yang dapat kita sarikan dari alinea dua dan tiga Pembukaan UUD 1945, yang intinya ialah: keadaan kehidupan berkelompok bangsa Indonesia yang atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa; didorong oleh keinginan luhur bangsa; untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas; dalam arti merdeka, berdaulat adil dan makmur.

Rumusan di atas jelas menunjukkan adanya nilai-nilai Islam jika kita ingat bahwa yang menjiwainya adalah Piagam Jakarta. Rumusan ini tidak bersifat sekuler sebagaimana rumusan Rousseau (liberal) tentang negara yang beranggapan bahwa negara adalah hasil perjanjian individu-individu yang bebas. Jadi rumusan Indonesia lebih integral. Demikian pendapat Prof. Padmo Wahyono dalam tulisannya berjudul Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang (I990).

Selanjutnya Prof. Padmo Wahyono berpendapat bahwa rumusan tentang kedudukan warga-negara dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 27 ayat 1 (bahwa para warganegara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali), berbeda dengan rumusan dalam sistem liberal, yang hanya menekankan *equality before the law* dalam hal r*ule of Iaw*-nya Menurut pandangan Gus Sholah, hal ini adalah nilai-nilai Islam. Demikian pula halnya dengan rumusan pasal 29 UUD 1945: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu". Melihat sejarah terjadinya, pada rumusan pasal ini jelas tampak pengaruh nilai-nilai Islam.

Kemudian Prof. Padmo Wahyono menguraikan tentang teori peningkatan hukum apabila diterapkan pada UUD 1945, yang akan memberikan gambaran sebagai berikut: 1) Norma Hukum Abstrak atau cita-cita hukum bangsa, yaitu pokok-pokok pikiran

yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 2) Norma Hukum Antara; UUD menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya (*the body of consutution*). Aturan-aturan menyelenggarakan aturan pokok diserahkan kepada UU. 3) Norma Konkret; Pedomannya ada di dalam penjelasan pasal 28 dengan hukum (konkret) harus berdimensi tiga, yaitu demokratis, berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial.

Menurut Salahuddin Wahid, dengan memahami bahwa Pembukaan UUD 1945 itu sarat dengan nilai-nilai Islam sebagian besar mungkin bersifat universal, maka tidak dapat dihindari bahwa nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya sebagai cita-cita hukum bangsa akan juga menjadi bagian dari sumber hukum nasional.

Jalan Tengah itu Telah Terwujud

Gus Dur menulis bahwa pandangan Salahuddin Wahid tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia sama atau senafas dengan pendapat Endang Saifuddin Anshari (ESA) dan Amien Rais, dikaitkan dengan pendapatnya tentang asas Representativeness dalam susunan pemerintahan kita. Gus Sholah mengaku tidak mengetahui dengan tepat pandangan Amien Rais tentang Representanveness itu pada saat ini, setelah keterlibatannya dalam pendirian PAN. ESA dalam bukunya Piagam Jakarta 22 Juni I945, Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959), memang terlihat berupaya untuk mengangkat kembali Piagam Jakarta ke posisi yang seharusnya menurut ESA dan kawan-kawannya, yaitu merupakan suatu authoritative sources terhadap hukum nasional. Sedang Gus Sholah mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda dengan ESA.

Wacana tentang dasar negara bisa ditarik kembali ke tahun 1940, ketika terjadi polemik antara Bung Kamo dengan Moh. Natsir. Bung Kamo mengusulkan suatu negara RI sekuler dengan mengambil contoh Turki di bawah kepemimpinan Kemal Ataturk, sedang Moh. Natsir mengusulkan suatu negara RI berdasar Islam. Dalam persidangan BPUPKI dan PPKI masalah dasar negara adalah masalah yang paling berat dan paling pelik. Perdebatan yang seru dan panas berubah kompromi dalam bentuk Piagam Jakarta yang akhimya harus direvisi dengan menghilangkan "tujuh kata" yang merupakan inti dari Piagam Jakarta. Perdebatan di atas dilanjutkan kembali pada persidangan Majelis Konstituante seperti diuraikan di awal tulisan ini, dan akhirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 "menghidupkan" kembali Piagam Jakarta.

Menurut Salahuddin Wahid, yang dimaksud dengan negara Islam, yaitu suatu negara yang mengambil ajaran Islam sebagai satu-satunya sumber hukum nasional yang mengikat bagi seluruh warga negara tanpa memandang agamanya. Bahkan ada teori dari Maududi yang tidak ada penganutnya di Indonesia yang menyatakan bahwa kewarganegaraan suatu negara Islam dibagi dua; warga negara beragama Islam dengan hak politik penuh (memilih dan dipilih) serta warga negara tidak beragama Islam dengan hak politik yang terbatas. Teori ini telah merugikan kalangan Islam di Indonesia.

Sedangkan negara sekuler, menurut Gus Sholah, ialah negara yang memisahkan secara tajam dan secara total kehidupan agama dan negara. Seorang teolog Kristen menyatakan bahwa gagasan mengenai landasan politik sekuler secara kultural adalah dari Kristen. Van Leeuwen dalam buku Christianty in World History menyatakan bahwa penyebaran agama Kristen ke seluruh Eropa membawa pesan sekularisasi. Secara umum, menurut Van Leeeuwen, sejarah revolusioner Barat sampai sekarang terus melanjutkan proses sekularisasi yang tak bisa dihentikan dan terus berputar.

Budaya sekuler, menurut pendapatnya, merupakan hadiah Kristen kepada dunia dan ia sangat berharap bahwa akibat pertemuan itu umat Islam akan melepaskan mitos otoritas syari'at yang mengatur kehidupan (kutipan dari buku Menentang Negara Sekuler, oleh Mark Juergensmeyer, terjemahan Noorhaidi-Pustaka Mizan 1998).

Dalam realitas politik di Indonesia, Gus Sholah membuat kesimpulan bahwa kita pernah mengalami negara sekuler, yaitu mulai Proklamasi sampai dengan Januari 1946, dan ketika diputuskan untuk mendirikan Departeman Agama yang mengubah negara Rl menjadi negara tidak sekuler berlaku mulai Januari 1946 s/d. Juli 1959. Mulai 5 Juli 1959 kita memasuki era negara Piagam Jakarta walaupun hanya di atas kertas, karena tidak mempunyai efektivitas.

Awal Januari 1974 membuka era negara Pancasila berketuhanan, ketika UU Perkawinan disahkan dan diundangkan. UU itu dapat dikatakan merupakan suatu blessing in disquise bagi kalangan Islam, karena RUU Perkawinan yang sekuler yang mengandung banyak pasal yang bertentangan dengan syari'at Islam akhimya disahkan menjadi UU Perkawinan yang mengandung ketentuan-ketentuan syari'at Islam. UU No. I/l974 itu kemudian disusul dengan beberapa UU yang mengandung aspirasi dan ketentuan syari'at Islam, seperti UU Peradilan Agama (1989), UU Sistem Pendidikan Nasional dan lain-lain.

Bagi Gus Sholah, negara yang kita telah hidup di dalamnya hampir 25 tahun lamanya, adalah negara yang merupakm perwujudan dari jalan tengah antara negara Islam dengan negara sekuler, yaitu negara Pancasila yang religius. Jalan tengah itu betul-betul telah terwujud selama 25 tahun, bukan sesuatu yang maya atau semu. Bahwa negara kita sekarang sedang terpuruk, menurut Gus Sholah, hal itu disebabkan oleh cara penyelenggaraan kekuasaan yang otoriter, tidak demokratis, menginjak-injak hukum. Dan negara

seperti yang sedang kita jalani ini harus kita pertahankan dengan segala daya dan upaya. Seperti dikemukakan Gus Sholah dalam tulisan terdahulu, kita harus menolak negara Islam, menolak negara Piagam Jakarta dan menolak negara sekuler.

Gus Dur menganggap jalan tengah itu adalah suatu sikap yang mendua, karena itu kita harus tegas memilih salah satu negara Islam atau negara sekuler. Yang tidak menghendaki negara sekuler dianggap menginginkan berdirinya negara Islam. Gus Sholah perpandangan, adalah hak Gus Dur sepenuhnya untuk memilih negara sekuler, tetapi tidak beralasan untuk menuduh bahwa yang memilih jalan tengah bukan negara agama dan bukan negara sekuler adalah juga menginginkan berdirinya suatu negara Islam di lndonesia.

Pendapat seperti itu adalah pendapat yang mengenyampingkan sejarah perjalanan bangsa. Kalau memang hanya itu pilihannya, apa artinya jerih payah para pemimpin bangsa selama sekian puluh tahun (mulai tahun 1940) dalam mencari suatu jalan keluar yang bisa diterima oleh seluruh pihak, yaitu negara Pancasila berketuhanan yang kita jalani sampai saat ini. Kalau memang cuma itu pilihannya, sia-sialah pengorbanan kalangan Islam yang telah mencoret tujuh kata piagam Jakarta dari Pembukaan UUD l945 demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Gus Sholah menilai, pendapat Gus Dur seperti itu tidak mau melihat realitas politik yang ada. Inti masalahnya adalah penafsiran terhadap Pancasila: sekuler atau religius? Tidak kurang dari Bung Karno yang telah mencoba untuk memberikan penafsiran sekuler terhadap Pancasila. Tetapi karena beliau memperhatikan realitas politik yang ada, maka akhirnya di dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1954 beliau akhirnya menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD I945 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Konstitusi itu.

Realitas politik saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia tidak menginginkan negara Islam, tidak

menginginkan Piagam Jakarta dan tidak menginginkan negara sekuler. Rasanya debat atau polemik tentang negara Islam versus negara sekuler sudah harus dihentikan karena terkesan hanya bersifat perdebatan masalah semantik belaka. "Juga merupakan hal yang *counter-productive* dan bisa menimbulkan kekhawatiran (bahkan ketakutan) di kalangan non-lslam kalau Gus Dur menyatakan bahwa ada pihak yang ingin mendirikan negara Islam," tegas Gus Sholah. ❖

Biarkan Sejarah yang Menilai

TULISAN Gus Dur berjudul "A. Wahid Hasyim, Islam dan NU", yang kemudian ditanggapi oleh Gus Sholah dalam media yang sama, yang kemudian balik ditanggapi oleh Gus Dur, akhirnya menimbulkan polemik (debat tertulis) di antara kakak beradik tersebut. Terakhir Gus Dur menanggapinya dengan tulisan berjudul "Hindari Negara Berasumsi Agama" yang oleh redaksi Media Indonesia dinyatakan sebagai akhir dari polemik.

Menghadapi penghentian polemik itu Gus Sholah menilai kurang afdhal dan kurang fair, karena tidak berimbang. Karena itu Gus Sholah membuat tulisan tanggapan yang diterbitkan ke dalam buku kecil yang khusus memuat materi polemik dengan sang kakak. Menurut Gus Sholah, langkah ini perlu dilakukan karana polemik itu perlu diketahui oleh warga NU dan juga masyarakat luas.

Gus Sholah merasa perlu menanggapi tulisan Gus Dur itu karena seorang kawannya menyimpulkan bahwa tulisan Gus Dur yang pertama itu memberi kesan bahwa KH. A. Wahid Hasyim adalah seorang yang berpandangan politik sekuler. Oleh karenanya Gus Sholah mencoba meluruskan kesan yang keliru itu. Dalam tulisan tanggapannya (23/10/98), Gus Dur menegaskan bahwa bagi Indonesia tidak ada pilihan lain kecuali memilih salah satu: Negara Islam atau negara sekuler. Gus Dur sendiri memilih negara sekuler yang wujud nyatanya adalah dihilangkannya ketentuan syari'at lslam dari UU negara Republik Indonesia. Jadi nantinya kalau Indonesia sudah menjadi negara sekuler tidak akan ada UU Perkawinan, UU Peradilan Agama dan lain-lain.

Dalam tanggapan yang kedua, Gus Sholah berpandangan bahwa kita tidak harus memilih salah satu dari kedua pilihan itu, sebab ada kompromi dari keduanya, yaitu negara Pancasila yang bersifat keagamaan. Negara semacam itu bukan khayalan tetapi sudah terwujud ketika UU Perkawinan yang mengandung ketentuan syari'at Islam disahkan (1974).

Sebelum polemik diakhiri, terakhir kali Gus Dur menulis tanggapan berjudul "Hindari Negara Berasumsi Agama". Merespon tulisan Gus Dur, ia pun kembali menanggapi. Gus Sholah mencoba mencari terjemahan kata "berasumsi" di dalam dua buah kamus, yang memberi pengertian bahwa negara berasumsi agama adalah negara yang menerima atau mengambil sesuatu (nilai) dari agama. Jadi menghindari negara berasumsi agama adalah menjauhkan negara dari sesuatu yang bersifat atau berkaitan dengan agama. Kita harus sama sekali memisahkan agama dengan negara. Gus Sholah lantas mengingatkan ucapan KH A. Wahab Hasbullah (alm) Rais Aam PBNU 1947-1971 yang manyatakan bahwa memisahkan Islam dari politik (baca negara) sama dengan memisahkan gula dari rasa manisnya.

Tentunya yang dimaksud Gus Dur ialah ketentuan agama jangan diformalkan dalam bentuk peraturan negara atau udang-undang, cukup menjadi konvensi (lihat tulisan Gus Dur diJawa Pos 30/10/98: "PKB, Syarah dan PKU"). Oleh Gus Dur keadaan semacam itu dianggap sebagai sesuatu yang ornamental dan seremomial belaka dan tidak fungsional dalam kehidupan sehari-hari di negeri ini.

Selanjutnya Gus Dur menyatakan bahwa "Sepenting siapapun KH. A. Wahid Hasyim, Moh. Natsir dan lain-lain, mereka seharusnya menyadari bahwa penghilangan Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus I945, penerimaan Pancasila, penetapan kembali Piagam Jakarta (5 Juli 1959), hanyalah bersifat taktis belaka. Dalam

jangka panjang secara prinsipil adalah perjuangan menghilangkan atau menetapkan Islam dalam kehidupan bernegara. Kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, berarti kita adalah pengikut gerakan nasional. Sedang sebaliknya adalah pengikut gerakan Islam yang menolak Pancasila. Inilah sejarah yang berjalan di negeri kita, kalau kita mau jujur terhadap diri sendiri." ❖

Paradigma Barat

GUS Sholah menuturkan, Gus Dur berhak untuk menilai bahwa KH. A. Wahid Hasyim dan Moh. Natsir dan lain-lain tidak begitu penting Tetapi Gus Sholah menganggap peran Panitia Sembilan, antara lain Wahid Hasyim, Bung Hatta, dan Agus Salim sangat paenting dan sangat menenntukan (bahkan tidak tergantikan) dalam mendirikan dan meletakkan dasar-dasar dari bangunan Republik lndonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga menjadi Pembukaan dari UUD Republik Indonesia Serikat serta UUDS 1950. Pembukaan UUD 1945 memuat kandungan cita-cita hukum, gagasan sosial dan budaya dari bangsa Indonesia. Pemerintahan kita boleh berganti, UUD kita boleh berganti, tetapi Pembukaan UUD itu tidak bisa diganti atau diubah, kapanpun dan oleh siapapun.

Gus Sholah tidak sependapat bahwa "penghilangan" Piagam Jakarta, penerimaan Pancasila di Konstituante dan penetapan kembali Piagam Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959 hanyalah bersifat taktis belaka dan yang lebih prinsipil adalah menerima atau menolak Islam dalam kehidupan bernegara yang berarti menerima atau menolak ketentuan Islam dalam UU. Salahuddin Wahid yakin demikian pula pendapat para pemimpin Islam terdahulu seperti KH. A. Wahid Hasyim, Moh Natsir, Dr. Sukiman, Moh. Roem, KH. A. Wahab Chasbullah, Agus Salim, dan lain-lain. Mereka menerima Pancasila sebagai dasar negara karena menyadari bahwa tidak mungkin untuk memperjuangkan Islam menjadi dasar negara. Selain itu, mereka menerima Pancasila sebagai dasar negara karena

berpendapat bahwa Pembukaan UUD 1945 di mana Pancasila termuat di dalamnya adalah sarat dengan nilai islami dan bersifat keagamaan.

Dalam tulisan "Pancasila Jalan Tengah Kita" Gus Sholah juga menyitir penafsiran Bung Hatta terhadap Pembukaan UUD I945, selain penafsiran dari Prof. Padmo Wahyono dan penafsiran KH. Achmad Siddiq, Rais Aam PBNU 1984-1991, terhadap Pancasila yang merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945. Penafsiran tersebut, menurut Gus Sholah, adalah sesuai dengan Keputusan Muktamar NU Situbondo.

Penafsiran dari berbagai tokoh, baik dari kalangan Islam maupun non-Islam, tentang Pancasila yang bersifat keagamaan, telah banyak dikutip orang. Dan bagi sebagian besar umat Islam masalah ini sudah final dan tidak pernah menjadi agenda lagi. Cukup mengherankan bahwa justru tokoh Islam sendiri (Gus Dur) yang mengungkit-ungkit masalah ini yang sebenarnya bersifat kontra produktif. Pandangan Gus Dur itu adalah hasil dari pemikiran yang mempergunakan paradigma Barat, yang akhirnya memunculkan dua pilihan: mengikuti jalan yang ditempuh Iran atau jalan yang ditempuh Turki. Padahal kita punya jalan sendiri, yaitu negara Pancasila yang religius, jalan yang oleh Gus Dur dianggap sebagai penipuan diri sendiri.

Kemudian Salahuddin Wahid juga merujuk pada tulisan Prof. Dr. Munawir Sjadzali dalam bukunya Islam dan Tata Negara (UI Pras1993), hal. l92. Mantan Menteri Agama itu menyampaikan ceramah di Univesitas Leiden dengan judul "Republik Indonesia yang berdasar Pancasila itu bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler". Salah seorang guru besar dari Universitas Leiden yang banyak mendalami masalah politik Turki, memberikan tanggapan bahwa dengan pengertian tentang Pancasila seperti yang diuraikan oleh Pak Munawir, maka lndonesia beruntung karena

tidak melakukan kesalahan yang telah dilakukan oleh Turki yang kemudian harus terus menerus dikoreksi.

Gus Dur mengakhiri tulisannya dengan berpendapat bahwa sejarahlah nanti yang akan membuktikan kebenaran tersebut. Gus Sholah menyatakan, tidak ada yang dapat mempersalahkan mengapa penulis (Gus Dur) berpendapat demikian. Kalau terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah mendasar seperti penafsiran terhadap dasar negara atau hubungan antara agama d.engan negara, maka memang tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan kepada jalannya sejarah. Dan siapapun juga, tidak boleh mempersalahkan kalau Gus Dur menganut pandangan politik sekuler. Itu adalah hak seseorang untuk menganut pikiran yang dianggapnya benar. Tetapi Gus Dur juga tidak berhak untuk menganggap yang menolak negara sekuler adalah penganut gerakan Islam yang menolak Pancasila. Masalahnya adalah terletak pada perbedaan cara menafsirkan Pancasila, apakah sekuler atau religius.

Yang *musykil*, menurut Gus Sholah, adalah bagaimana sikap warga NU yang masih berpikir kritis dan (matinya) sikap PBNU terhadap kenyataan bahwa Ketua Umum PBNU yang memimpin *Jam'iyyah* NU yang menurut anggaran dasarnya memperjuangkan pandangan politik keagamaan dipimpin oleh tokoh yang berpandangan politik sekuler? Ditambah lagi, partai yang didirikannya (PKB) jelas tidak mencantumkan akidah dan tujuan *Jam'iyah* NU menjadi akidah dan tujuannya. Masih ada lagi masalah lain, ketua umum partai itu, Drs. Matori Abdul Djalil, menyatakan dalam wawancara dengan Majalah Sabili (l4 Agustus 1998) bahwa PKB bukanlah partai agama, karena partai agama sudah ketinggalan zaman.

Di akhir polemiknya dengan Gus Dur itu Gus Sholah mengemukakan kekhawatiran mangenai maraknya pemikiran sekuler di kalangm warga NU, khususnya generasi mudanya.

Menurut Gus Sholah, secara kualitatif penganut sekularisme di kalangan NU cukup tinggi, terutama di kalangan aktivis PMII. Tetapi dari segi jumlah dia mengaku tidak mengetahui persis. Tapi Gus Sholah lantas teringat kepada informasi dari Gus Dur kepadanya, beberapa tahun sebelumnya, yang menyatakan kebanggaannya terhadap kemajuan dari generasi muda NU dibanding generasi muda Muhammadiyah. Gus Sholah bertanya di dalam hati, apakah hal ini yang dianggap oleh Gus Dur sebagai kemajuan dari generasi muda NU? Kalau memang demikian, apakah hal itu merupakan suatu kemajuan.

Terakhir Gus Sholah juga menyampaikan bahwa kalau laju dan intensitas gerakan pemikiran sekuler di dalam *Jam'iyah* NU ini semakin meningkat, maka arah pemikiran di kalangan NU nantinya akan bertentangan dengan tujuan *Jam'iyah* NU, yang berarti menyimpang atau menyeleweng dari cita-cita perjuangan para pendiri *Jam'iyah* NU. Nanti akan terdapat dua kekuatan yang agak seimbang: NU Islam (NU Putih) danNU sekuler (NU merah). Sejauh mana sinyalemen tersebut akan menjadi kenyataan, hanya sejarah yang bisa membuktikan. "Saya hanya menyampaikan sinyalemen tersebut karena menganggap hal itu sebagai kewajiban selaku warga NU dan selaku keturunan dari pendiri Jam'iyah NU," kata Gus Sholah.

Sinyalemen yang sama pernah disampaikan oleh KH. A. Wahid Hasyim di dalam tulisan yang merupakan cuplikan dari buku Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim oleh Abubakar Aceh (1957), yang berbunyi: "Maka buat masa datang yang dekat, akan terjadilah salah satu dari tiga kemungkinan sebagai berikut: Pertama, partai gajah ini pecah menjadi dua; dan dengan demikian di Indonesia ada suatu kombinasi yang lucu dari gerakan Islam, yaitu gerakan nasionalistis lslam dan komunistis Islam". ❖

Konsep Kesatuan dalam NKRI

ISTILAH Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berasal dari UUD 1945 Pasal 1 (1) yang berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Kata kesatuan antara lain memberi makna lawan dari negara federal atau berserikat. Kesatuan juga bisa merujuk makna kesatuan wilayah geografis seperti yang terkandung dalam kalimat: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.

Soekarno dalam pidatonya Genta Suara Revolusi Indonesia (gesuri) menjelaskan, "Dari Sabang sampai Merauke, empat perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu *geographisch begrip* (pemahaman geografis). Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu *geographical entity* (entitas geografis)." Hal ini menunjukkan makna kesatuan tidak semata-mata melingkupi wilayah geografis.

Kata kesatuan hampir selalu dikaitkan dengan kata persatuan menjadi kesatuan dan persatuan. Persatuan bangsa secara formal dimulai dari saat deklarasi Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda 1928, yang berbunyi: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia. Dengan kata lain, 28 Oktober 1928 adalah proklamasi bangsa Indonesia, sedangkan 17 Agustus 1945 adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia tidak mungkin merdeka tanpa adanya kesadaran bersama untuk bersatu. Kesadaran bersama itu adalah hasil renungan dan interaksi para pemuda terdidik di Tanah Air dari berbagai suku. Tanpa persatuan suku-suku itu, yang

kemudian mengambil sumpah sebagai bangsa, tidak mungkin terwujud kemerdekaan.

Kemerdekaan bangsa itu diwujudkan dengan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan UUD Alinea IV menyatakan bahwa tujuan membentuk Pemerintah Negara Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia bisa bersatu dan menjadi kesatuan karena tujuan yang sama yaitu hidup sejahtera, adil, dan makmur. Maka ancaman terhadap kesatuan dan persatuan bangsa sesungguhnya adalah ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.

Pada dasawarsa 1950-an timbul berbagai pemberontakan di beberapa daerah di luar Jawa, seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Kecuali Aceh, pemberontakan di atas dapat diselesaikan dengan cepat. Pada masa Orde Baru, keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI tetap tersimpan (bahkan menguat) di dalam diri sebagian warga Aceh dan juga muncul di dalam diri sebagian warga Papua. Faktor utama yang menyebabkan keinginan memisahkan diri adalah ketidakadilan yang terjadi secara meluas, meliputi ketidakadilan hukum, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakadilan sosial. Rakyat merasa kehidupan mereka tidak lebih baik dari saat sebelum merdeka, dan hak-hak dasar sebagai warga negara tidak terpenuhi. Dalam istilah Gus Sholah, "Pemerintah betul-betul telah menjadi tukang perintah rakyat, bukan pemegang amanat rakyat."

Sementara itu untuk meredam ancaman disintegrasi bangsa, pemerintah lebih sering menggunakan pendekatan keamanan dibandingkan dialog. Pelanggaran HAM berat terjadi di banyak tempat di Aceh dan Papua, meliputi penyiksaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Korbannya bukan hanya warga yang dianggap

pemberontak (Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan Organisasi Papua Merdeka di Papua), tetapi juga banyak dari kalangan warga sipil biasa. Sedangkan upaya penegakan hukum yang memadai terhadap para pelaku pelanggaran HAM hanya dijalankan setengah hati atau tidak sama sekali. Maka timbul rasa dendam terhadap TNI dan Pemerintah Indonesia di dalam diri sebagian warga di Aceh dan Papua.

Pendekatan dialog yang efektif di Papua baru dimulai pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dua bulan setelah dilantik menjadi presiden, Gus Dur berkunjung ke Papua yang saat itu masih bernama Irian Jaya. Ia berdialog dengan berbagai elemen masyarakat di sana, mendengarkan semua pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan orang-orang. Dari semua jawaban Gus Dur, yang paling menarik adalah pernyataan untuk mengembalikan nama Irian menjadi Papua. Selama masa Orde Baru adalah tabu jika orang Papua menyebut diri mereka sebagai orang Papua. Pemerintahan Soeharto secara politis mengidentikkan Papua dengan gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Gus Dur juga mengizinkan penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua II, ia bahkan memperbolehkan berkibarnya bendera Bintang Kejora di tanah Papua yang selama ini dianggap sebagai lambang separatis. Gus Dur menilai bendera Bintang Kejora sebagai lambang kultural orang Papua, sehingga boleh berkibar dengan syarat dikibarkan di bawah bendera Merah Putih.

Sedangkan di Aceh, pemerintah baru mulai menyelesaikan konflik di sana dengan cara damai—bukan dengan perang—pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, melalui perundingan dengan GAM di Helsinki yang menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Perjanjian Helsinki antara lain berisi pembentukan undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh

oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi, pemberian amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM dan pengembalian hak-hak mereka dalam politik, ekonomi, dan sosial, juga pembebasan tanpa syarat tahanan politik yang dipenjara akibat konflik.

Gus Sholah sendiri cenderung mendorong penyelesaian ancaman disintegrasi bangsa dengan jalan demiliterisasi dan dialog antara kedua belah pihak yang berkonflik. Demikian juga pro-kontra jajak pendapat di Timor Timur pada masa pemerintahan BJ Habibie yang akhirnya menunjukkan hasil kemenangan untuk pihak anti integrasi. Hal itu memunculkan tuduhan dari pihak tertentu bahwa Presiden tidak nasionalis atau berambisi untuk memenangkan hadiah Nobel. Gus Sholah menulis, "Sulit dibantah adanya upaya politisasi masalah jajak pendapat Timtim yang mengabaikan kondisi obyektif yang harus kita hadapi, bahwa tanpa ada jajak pendapat maka integrasi Timtim dengan Indonesia akan lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya bagi kedua belah pihak."

Karena bagi Gus Sholah kesatuan bangsa mengandung makna kesatuan harapan, kesatuan cita-cita, dan kesatuan nasib. Sedangkan selama puluhan tahun pasca kemerdekaan, kata kesatuan hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis semata. Cita-cita kita sebagai bangsa sudah termaktub dalam Pembukaan UUD, dan selama itu tidak diabaikan, seharusnya bangsa Indonesia tidak mengalami keterpurukan dan ancaman disintegrasi bangsa. Kata kesatuan pada NKRI seharusnya juga mengandung pengertian kesatuan jiwa dari ratusan juta manusia yang masih merasa menjadi bangsa Indonesia. Dalam pengertian seperti itulah persatuan dan kesatuan masih mengandung makna seperti yang dulu kita harapkan.

Persatuan yang hanya terfokus kepada kesatuan wilayah akan meninggalkan kesan ambisi negara untuk mengeksploitasi kekayaan

dan sumber daya alam setempat. Hal itu hanya akan menjadikan kita sebagai bangsa penjajah. Padahal Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 telah menyebutkan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maka pengabaian terhadap hak-hak dasar warga negara telah bertentangan dan melanggar undang-undang.

Gus Sholah menambahkan dalam tulisannya "Menafsirkan Kembali NKRI", "Huruf K pada NKRI juga (harus) berarti kesejahteraan dari seluruh rakyat Indonesia. Tanpa kesejahteraan rakyat, kemerdekaan kita tidak berarti apa-apa. Kesejahteraan itu tentu meliputi aspek lahir dan batin, termasuk pemenuhan HAM baik hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang berarti pemenuhan hak-hak dasar rakyat Indonesia.

Dengan melakukan penafsiran baru terhadap NKRI seperti uraian singkat di atas, kita masih bisa berharap bahwa rakyat Papua dan Aceh tidak lagi punya keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. Kita juga masih bisa berharap untuk mempertahankan keberadaan negara dan bangsa Indonesia serta tidak perlu merasa malu menjadi bagian darinya.

Kita telah menyia-nyiakan waktu selama 60 tahun dan hanya punya waktu pendek untuk memperbaiki diri dengan menafsirkan kembali NKRI secara cerdas. Untuk itu, ada *conditio sine qua non* atau persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta reformasi birokrasi.

Tanpa memenuhi persyaratan di atas, mustahil kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan dan mustahil kita bisa memenuhi hak-hak dasar rakyat. Juga mustahil kita bisa menjaga kesatuan harapan dan kesatuan cita-cita rakyat Indonesia. Artinya, juga mustahil kita bisa menjaga kesatuan wilayah kita. Mustahil pula kita mampu mempertahankan keberadaan NKRI." ❖

Pendidikan Agama Gagal

DUA cendekiawan Islam menyatakan bahwa pendidikan agama (Islam) gagal. Prof. Dr. Musdah Mulia menyatakan hal itu (Suara Pembaruan 21/12/09) berkaitan dengan pembakaran gereja di Bekasi (17/12/09). Dr. Haidar Bagir dalam majalah Tempo (21-27/12/09) menyatakan hal itu dikaitkan dengan kenyataan masih maraknya praktek korupsi.

Seorang kawan menanyakan kepada saya mengapa ada santri pesantren di Jombang yang tewas karena dikeroyok oleh kawan-kawannya? Tersirat bahwa pertanyaan kawan itu juga mengandung sinyalemen atau gugatan bahwa pendidikan agama (Islam) telah gagal.

Musdah Mulia menyatakan bahwa orang tua, masyarakat, keluarga, tokoh agama dan pemerintah tidak mengajarkan agama secara seluas-luasnya sehingga solidaritas antarumat beragama tidak terjalin dan berakibat sektarianisme masih terjadi. Apabila gereja dirusak, maka umat agama lain merasa bahwa itu bukan urusan mereka, padahal itu adalah urusan bersama.

Haidar Bagir menyatakan bahwa keislaman kita lebih pada urusan legal formalistik ketimbang pada pemikiran dan akhlak. Bagi Haidar, agama adalah akhlak. Puncak keberagamaan seseorang bukan dinilai dari ibadah atau dari akhlak. Dia tidak mengatakan bahwa akidah tidak penting, tetapi mengukur kuat-tidaknya akidah

seseorang itu harus dari akhlak. Kalau orang keras dalam ber-lslam tapi masih menenggang korupsi, pasti akidahnya tidak benar.

Apakah betul pendidikan agama Islam gagal? Apakah pendidikan agama Islam saja yang gagal? Apakah hanya pendidikan agama saja yang gagal? Apakah bukan dunia pendidikan kita yang gagal?

Menurut saya, pendidikan semua agama di Indonesia sampai pada batas tertentu telah gagal, bukan hanya pendidikan agama Islam. Pendidikan telah memperkenalkan nilai-nilai agama kepada anak didik, tetapi proses internalisasi nilai itu yang menjadikan nilai itu sebagai sesuatu yang dihayati dan dipegang dalam kehidupan, tidak berjalan seperti yang kita harapkan.

Pendidikan kita telah gagal dalam membangun karakter bangsa. Awal 1970-an Mohtar Lubis menulis tentang karakter negatif bangsa kita, yang tampaknya sampai sekarang substansi tulisan ini belum membaik bahkan bisa jadi memburuk.

lndikatorya adalah beberapa fakta tindakan negatif yang muncul saat ini tetapi belum ada pada saat itu, antara lain pengeroyokan anggota geng putri terhadap sesama pelajar putri. Juga fakta adanya pengeroyokan oleh senior terhadap yunior seperti dilakukan oleh mahasiswa STPDN dan beberapa lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Pengeroyokan oleh beberapa polisi terhadap ahli sejarah UI beberapa waktu lalu juga menunjukkan bahwa pendidikan dalam sekolah kepolisian gagal. Dugaan kuat terlibatnya banyak perwira tinggi dan menengah dalam berbagai peristiwa pelanggaran berat HAM juga menjadi indikator dari lemahnya pendidikan untuk membentuk karakter dari akademi militer yang notabene merupakan pendidikan yang paling selektif dan paling mahal di Indonesia.

Rendahnya etika jabatan dari aparat penegak hukum seperti yang kita baca di media juga menunjukkan rendahnya mutu pembentukan karakter dan akhlak dalam pendidikan kedinasan lembaga penegak hukum. Perilaku banyak pengacara dalam perdagangan perkara

di dalam proses peradilan kita, apapun agamanya, menunjuk-kan bahwa banyak universitas terkemuka juga gagal dalam membentuk karakter anak bangsa.

Salah satu unsur utama dari akhlak atau karakter ialah kejujuran. Dan kita harus berani mengakui bahwa kejujuran adalah sesuatu yang kian hari kian langka. Ada yang terpaksa tidak jujur. Misalnya guru yang membantu siswa mengerjakan soal Ujian Nasional. Kalau si guru tidak membantu murid, maka angka kelulusan sekolahnya (swasta) akan rendah. Akibatnya sekolah itu akan tutup.

Sekolah yang mutu gurunya tinggi (biasanya mahal) bisa melarang siswa nyontek dan menindak guru yang membiarkan penyontekan. Ada seorang kepala sekolah yang menyatakan bahwa di sekolahnya dalam ulangan tidak ada guru yang mengawasi karena kalau ada siswa yang nyontek akan ada siswa lain yang melaporkannya.

Di sekolah tersebut ada kantin yang juga tidak ada penjaganya. Semua siswa mengambil makanan/minuman lalu membayar dan mengambil sendiri uang kembalinya. ”Kantin kejujuran” dan ulangan tanpa diawasi seperti itu akan sangat bermanfaat dalam menanamkan kejujuran ke dalam diri siswa.

Kita perlu mendorong dua latihan kejujuran itu dilakukan oleh sekolah, tetapi jangan latah. Di Jawa Timur lebih dari 200 sekolah mencoba melakukannya dalam waktu singkat. Saya kuatir hal itu dipaksakan sehingga menjadi massal tanpa melihat kelayakan dari program yang baik itu. Kita harus berhati-hati bertindak supaya masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap program yang baik itu.

Ada tulisan seorang guru sekolah Katolik tentang pengalaman mendidik kejujuran kepada muridnya. Dia bicara tentang pentingnya kejujuran dan menyatakan bahwa orang yang jujur akan menjadi orang yang beruntung. Para muridnya membantah pendapat guru

itu dan kenyataan menunjukkan bahwa yang jujur akan buntung, tidak untung. Jadi pengalaman di dalam masyarakat kita mendidik kita untuk tidak jujur dan tidak saling percaya.

Seorang ilmuwan yang mengambil S3 di Jepang menulis di koran tentang pengalamannya yang menunjukkan bahwa kejujuran muncul sangat nyata di dalam kehidupan masyarakat Jepang padahal mereka tidak banyak bicara tentang agama. Dia menemani anaknya bermain-main di taman. Karena harus mengikuti anaknya, tanpa terasa tasnya tertinggal.

Setelah berjalan cukup jauh dan lama, dia baru sadar, ia kembali untuk mengambil tas tersebut. Ternyata sudah tidak ada. dia mendatangi pos polisi di dekat taman itu untuk melaporkan masalahnya. Ternyata tasnya sudah ada di sana, diantarkan oleh seseorang yang menemukannya. Dia juga pernah alami ponselnya jatuh di bis kota dan mencoba mencari di kantor perusahaan operator bis kota, ponselnya aman, ada di sana.

Masyarakat Jepang tampaknya sudah terbiasa berlaku jujur seperti itu. Mereka dididik untuk jujur oleh masyarakatnya. Di sanapun ternyata masih ada juga pejabat yang korupsi, tetapi yang korupsi itu umumnya akan mendapat hukuman, secara hukum atau moral.

Di Bali dulu ada kebiasaan bahwa di dalam suatu banjar kalau seseorang mencuri, maka dia akan dikucilkan dan tidak ada seorangpun akan mengajaknya bicara. Maka masyarakat mendidiknya untuk jujur. Saya tidak tahu apakah tradisi yang begitu he-bat masih bisa tetap bertahan.

Sedang didalam masyarakat kita saat ini, mereka yang amat layak diduga telah melakukan korupsi tetapi tidak terkena tindakan hukum ternyata masih dihormati masyarakat. Sikap masyarakat seperti itu akan lebih efektif merusak akhlak ketimbang pengajaran agama untuk membina akhlak yang lebih bersifat kognitif. ❖

Tantangan Dunia Pendidikan Kita

TAK putus-putusnya kita meratapi nasib malang yang menimpa Indonesia yang alamnya kaya dan pemimpinnya juga kaya, tetapi rakyatnya miskin. Ironis sekali memang fakta yang harus kita saksikan itu. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas bangsa Indonesia, banyak tokohnya yang mengenang zaman keemasan Islam sekian abad lalu dan ingin kembali ke era itu. Sebagian lagi ingin meniru bangsa di dunia Barat. Sebagian lagi yang lain mengacu kepada pemikiran tokoh-tokoh Islam mutakhir dari berbagai negara.

Salah satu tokoh yang layak kita kaji gagasannya ialah Malik bin Nabi dari Aljazair yang wafat sekitar tahun 1970-an. Sekitar 50-an tahun lalu Malik bin Nabi pernah meramalkan bahwa dunia Islam akan beralih dan tunduk pada tarikan gravitasi Jakarta, sebagaimana dulu pernah tunduk pada tarikan gravitasi Kairo dan Damaskus. Entah bagaimana tanggapan tokoh pemikir itu seandainya masih hidup dan melihat kenyataan yang bertentangan dengan perkiraannya.

Malik bin Nabi menunjukkan kita beberapa jalan menuju kebangkitan. *Pertama*, kita harus memahami unsur-unsur pembentuk peradaban, yaitu manusia, tanah dan waktu. Manusia adalah unsur utama karena ia adalah pelaku sejarah dan pencipta peradaban. Tanah ialah sumber daya alam yang dengannya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Waktu dalam pandangan Malik bin Nabi adalah nilainya dalam kehidupan manusia dan hubungannya

dengan sejarah, kebangkitan ilmu, produktivitas dan pencapaian peradaban.

Kedua, walaupun kita sudah memiliki ketiga unsur tadi dan mengelolanya dengan baik, tidak menjamin terbentuknya Suatu peradaban. Harus ada katalisator yang akan mematangkarmy Sebagaimana oksigen dan hidrogen tidak akan membentuk air kala tidak ada katalisator yang menghubungkannya. Katalisator dalam1 peradaban ialah agama (Islam).

Ketiga, kita harus memiliki metode berpikir dan bekerja tersendi,1 yang sesuai dengan metode Islam. Peradaban Barat dasarnya ada peradaban Romawi. Peradaban Islam dasarnya ialah tauhid yan bersumber dari wahyu Illahi. Keempat, Malik mengajak Muslimin untuk memiliki etos kerja yang tinggi.

Untuk memenuhi gagasan Malik bin Nabi itu, kita harus mendidik unsur utamanya yaitu manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan mampu menjadi unsur utama. Tidak akan mampu menjadi *khalifatullah fil ard*.

PM Winston Churchill berpidato di Harvard University pada tahun 1943 : *"The em-pires of the future will be empires of the mind. The battles of the future will be battles for talent". The old battles for national still there but they are being suplemented by new ones for talent; not just among companies, but also among countries (which fret about the "balance of brains*"). Maka pendidikan adalah prioritas utama dalam pembangunan bangsa dan negara.

Tidak akan ada perbaikan SDM negara tanpa perbaikan gizi masyarakatnya. Saat ini konsumsi susu per kapita rakyat Indonesia adalah 6,51iter, lebih rendah dari Kamboja (12,97 ltr) Bangladesh (31,55 ltr), amat jauh di bawah lndia (601tr). Konsumsi daging kita hanya 7 kg/thn/kapita, di bawah Malaysia (48 kg) dan Philipina (18 kg). Konsumsi telur 51 butir/thn/kapita, sedang Malaysia 279. Konsumsi ikan kita hanya 26 kg/thn/kapita, Malaysia 45 kg dan

Jepang 70 kg. Maka konsumsi susu, daging, telur, dan ikan per kapita per tahun dari rakyat Indonesia perlu ditingkatkan dalam jumlah yang signifikan. Kalau tidak, dalam satu generasi rakyat Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, Filipina dll akan lebih tinggi, lebih kuat dan lebih cerdas dari pada rakyat kita. Peluang mereka untuk maju dan berprestasi akan lebih besar.

Sejalan dengan pidato Churchill di atas, kita perlu mencari dan mengembangkan anak-anak Indonesia yang berbakat istimewa. Diperkirakan anak yang cerdas istimewa, yang ber IQ di atas 125 diperkirakan berjumlah sekitar 2,2% dari jumlah anak usia sekolah, sekitar 1 juta. Sebuah sumber mengatakan jumlah anak jenius lebih kecil lagi, sekitar 0,05 per mil dari jumlah penduduk (sekitar 11.500 orang). Tetapi potensi itu tidak dapat dikembangkan dengan baik karena faktor ekonomi. Syukur beberapa putra-putri Indonesia telah memenangkan kompetisi Olimpiade *Science* Internasional. Tetapi yang diperlukan masih amat banyak. Harus ada upaya khusus untuk mene-lusuri potensi itu dan lalu mengembangkannya.

Amerika Serikat pada tahun 2003 mulai kuatir karena insinyur muda yang siap bekerja di perusahaan multinasional hanya 540.000, kurang dari kebutuhannya. China punya 160.000 insinyur sekelas itu. Singapura punya 10,9% populasi di bawah 24 tahun yang bergelar S2 di bidang eksakta. Korea punya 11,1% dan USA punya 5,7%. Kita mengalami kekurangan anggaran walaupun UUD telah menentukan bahwa minimal 20% dari APBN harus dialokasikan untuk pendidikan. Pada tahun 2006, anggaran untuk 33 juta siswa SD dan SMP hanya Rp 600.000 per siswa per tahun (SD) dan Rp 800.000 (SMP). Padahal menurut UNDP, untuk memperoleh pendidikan bermutu dibutuhkan anggaran per siswa per tahun sebesar Rp 1,7 juta (SD) dan Rp 2,4 juta (SMP). Tahun 2006, biaya per mahasiswa per tahun adalah Rp 200 juta di AS, Rp 108 juta di Jepang dan Rp 81 juta di Eropa. Di Indonesia anggaran untuk 1 juta

mahasiwa PT negeri dan 4 juta mahasiswa PT swasta adalah Rp 6 juta per mahasiswa per tahun.

Guru yang baik berperan sebagai fasilitator, yaitu terus berusaha memantik ke-mampuan siswa termasuk bakatnya. Terutama kepada para siswa yang ”lamban”. Seharusnya persentase proses siswa belajar harus lebih besar dari pada proses guru mengajar.

Menurut Kompas 27/10/2009, berdasarkan pengujian yang pemah dilakukan Depdiknas, sekitar 77,85% guru SD tidak layak menjadi guru karena pendidikannya tidak memenuhi syarat. Hasil tes umum untuk guru TK/SD rata-ratanya hanya 34,26, sedangkan untuk guru diluar TK/SD rata-ratanya 40,15. Nilai untuk penguasaan ma-teri matematika dan sains sangat rendah, rata-rata 13,24 hingga 22,33. Banyak terjadi ketidaksesuaian keilmuan guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, sehingga komptensi guru itu dipertanyakan. Perlu ada upaya untuk memberi pelatihan khusus bagi guru-guru seperti itu, termasuk bagi guru swasta, dengan dukungan dana APBN.

Pendidikan oleh lembaga pendidikan swasta (mayoritas lembaga pendidikan agama) lebih menyedihkan lagi dibanding pendidikan milik Pemerintah. Pendidikan semacam itu sebagian besar dikelola oleh lembaga swasta yang kemampuan penda-naannya amat minim. Lembaga pendidikan semacam itu adalah ujung tombak pen-didikan kita ditingkat akar rumput. Anggaran Pemerintah untuk membantu lembaga pendidikan semacam itu amat kecil.

Kesejahteraan hampir 1 juta guru swasta amat minim dibanding sekitar 1,8 juta guru PNS yang memperoleh gaji di atas Rp 2 juta rupiah per bulan. Gaji guru swasta ada yang hanya Rp 150.000 per bulan. Iklan Depdiknas tentang sekolah gratis yang menyesatkan (karena tidak sepenuhnya gratis) justru lebih memperparah kondisi sekolah swasta itu. Menurut UUD, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, yang tentunya harus baik mutunya, termasuk

dari lembaga pendidikan swasta. Pemerintah harus membantu kesejahteraan guru non-PNS itu dengan dana APBN, supaya siswa sekolah swasta bisa memperoleh haknya yang dijamin UUD.

Kondisi tidak menggembirakan dalam dunia pendidikan dasar dan menengah juga kita lihat pada dunia pendidikan tinggi. Dalam daftar Top 400 Universities: World University Rankings 2008 yang dikeluarkan The Times Education Suplement (THES) bersama Quaacquarelli Symonds (QS), terdapat tiga perguruan tinggi di Indonesia yaitu Universitas Indonesia pada peringkat 287, Institut Teknologi Bandung pada peringkat 315 dan Universitas Gajah Mada pada peringkat 316. Ketidakberhasilan kita memasuki posisi 200 terbaik adalah karena lemahnya kegiatan penelitian.

Kini kita melihat adanya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang pernah memicu kontroversi dan menuai protes di mana-mana. Padahal kehadiran UU BHP itu hanyalah penegasan belaka atas kenyataan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia telah berkembang menjadi industri. Di negara-negara maju, seperti AS, Kanada, Inggris, Jepang Jerman dll, pendidikan tinggi memang merupakan lahan industri strategis yang menjadi bagian dari dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan.

Di negara-negara maju, industri pendidikan tinggi tumbuh pesat seperti industri jasa dan perdagangan yang lain. Di AS umumnya perguruan tinggi yang menonjol adalah milik swasta dengan usia ratusan tahun. Perguruan tinggi milik negara bagian tidak sebaik milik swasta.

Di Indonesia, perguruan tinggi yang baik mutunya kebanyakan adalah milik Pemerintah. Perguruan tinggi swasta yang baik mutunya juga cukup banyak jumlahnya. Biaya pendidikan di perguruan tinggi seperti ini masih terjangkau oleh kebanyakan mahasiswa. Ada yang sudah berusia hampir lima puluh tahun. Beberapa dimiliki oleh lembaga keagamaan.

Di Indonesia fenomena industri pendidikan tinggi belum lama dimulai dengan adanya sejumlah perguruan tinggi yang baik mutunya dengan biaya mahal seperti UPH. Di samping itu terdapat banyak perguruan tinggi terutama di daerah yang ha-rus tutup karena sulit bersaing. Tetapi juga muncul perguruan tinggi baru yang cukup baik mutunya dan tidak terlalu mahal biayanya. Kita paham bahwa masih banyak tantangan yang harus kita hadapi, kita masih tertinggal dibanding banyak negara maju. Tetapi kita harus tetap optimistis bahwa kita masih bisa mengejar ketertinggalan itu.

Industri pendidikan tinggi yang terlalu komersial mengandung bahaya bagi perguruan tinggi tersebut. Derek Bok dalam Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education (2005) sebagaimana dikutip oleh Amich Alhumami mencatat sejumlah bahaya yang patut diwaspadai.

Pertama, bila godaan mencari keuntungan finansial melalui aneka kontrak dari perusahaan/industri tak terkendali dan tak dikelola dengan baik, hal itu akan menggiring perguruan tinggi melupakan *mission scare* (tugas suci) yang harus diemban, yakni melahirkan insan-insan terdidik dan berkeahlian, yang menjadi basis bagi ikhtiar membangun masyarakat beradab dan pilar utama upaya pencapaian kemajuan bangsa.

Kedua, bila sekadar terobsesi oleh motif ekonomi semata, perguruan tinggi akan cenderung mengabaikan fungsi utamanya sebagai lembaga produsen ilmu pengetahuan, pelopor inovasi teknologi serta pusat eksperimentasi dan observatorium bagi penemuan-penemuan baru Padahal peran hakiki perguruan tinggi adalah *the center of knowledge inquiries and technology innovations,* yang bukan saja penting untuk memperkuat institusi perguruan tinggi sendiri sebagai pusat keunggulan dan penelitian, tetapi juga akan memberi sumbangsih pada ikhtiar membangun peradaban manusia.

Ketiga, konflik kepentingan antara dua hal -- menggali sumber pembiayaan dan mengembangkan iptek melalui riset ilmiah -- berpotensi mengorbankan *core academic values* karena perguruan tinggi cenderung berkompromi antara pilihan menjaga standar mutu program akademik dan tuntutan mendapatkan dukungan finansial dari perusahaan, industri.

Diperlukan sikap waspada dan hati-hati dari semua stake holder sangat diperlukan dalam melaksanakan UU BHP agar tidak memunculkan ekses negatif yang justru kontraproduktif bagi upaya memajukan perguruan tinggi di Indonesia.

Dari 9.427.600 yang masuk kategori pengangguran terbuka pada Februari 2008, 626.200 adalah tamatan universitas, 519.900 adalah tamatan diploma dan akademi, serta 1.165.600 adalah tamatan sekolah kejuruan. Minimnya kompetensi dan keahlian lulusan sekolah formal terlihat dalam bursa-bursa yang sering diselenggarakan sejak 2006.

Lebih dari 80% iklan lowongan pekerjaan mencari tenaga minimum 51 dengan IP tinggi. Kalau ada iklan mencari lulusan D-3 atau SMU, lulusan S-1 pun tidak keberatan mengisinya. Pasok S-l ke pasar tenaga kerja melimpah, tapi ternyata kita kekurangan tenaga terampil yang terlatih dengan baik dan layak mendapat imbalan memadai.

Bicara sejujurnya, banyak lapangan kerja sebenarnya tidak membutuhkan kualifikasi setinggi sarjana. Tetapi ternyata banyak lapangan kerja itu diisi oleh sarjana yang sudah menjalani pelatihan. Maka diselenggarakanlah pendidikan diploma 3 atau politeknik. Tetapi tidak jarang tamatan program D-3 ini lalu masuk ke program S-1.

Sementara itu terdapat kebutuhan akan tenaga kerja profesional yang tidak bisa dipenuhi oleh tenaga yang ada di Indonesia sehingga diisi oleh tenaga dari LN. Tidak ada *link and match* antara kebutuhan

pasar akan tenaga hasil PT dengan yang dihasilkan oleh PT di Indonesia. Masalah ini pernah dikemukakan oleh Mendiknas Wardiman pada akhir 1990-an, tetapi tidak dilanjutkan oleh penggantinya.

Sebaliknya terdapat juga "*brain-drain*", pelarian tenaga ahli (terdidik dan terampil) seperti dokter, insinyur, dosen, ilmuwan, peneliti dan teknisi profesional ke LN, teru-tama ke AS, Kanada, Inggris, Perancis, dan Jerman. Carrington dan Detragiache dalam kertas kerja berjudul How Extensive is the Brain Drain?, membuat perkiraan bahwa dari jumlah penduduk 61 negara berkembang yang bermigrasi ke negara-negara OECD, sekitar 54,3 memilih AS. Dari Asia, yang paling banyak berasal dari Philipina 1,1 juta, India 1,03, China 817.000, Korea 653.000, Vietnam 506.000 dan Pakistan 222.000. Tenaga ahli Indonesia hanya sedikit yang bermigrasi ke negara maju. Imi-gran asal India, 75% adalah tamatan perguruan tinggi. Saat ini ada sekitar 50.000 dok-ter India dan ratusan ribu manajer, teknisi dan ahli komputer yang bekerja di AS.

Mengapa *brain-drain* itu meningkat dari tahun ke tahun? Pertama, mereka mencari pendapatan yang lebih baik, mencari kepuasan bekerja dan mengembangkan karier profesional di tingkat global. Kedua, akibat mengalami tekanan politik, menghindari rezim represif yang mengekang kebebasan dan merasa tidak aman akibat perang dan pergolakan politik domestik.

Tetapi ada juga *brain-drain* yang dilakukan untuk menyusun jejaring intelektual di LN untuk kepentingan negaranya. Contoh nyata adalah India dan Taiwan yang telah melahirkan manifesto Bangalore Boomerang dan Sinchu Project, yaitu kalangan terdidik dua negara itu, yang telah secara kreatif membuat jejaring intelektual selama mereka belajar di AS dan bekerja si Silicon Valley (pusat TI dunia) dalam rangka membangun jaringan "IT Complex" di Bangalore dan Sinchu, yang memberi sumbangsih amat berharga bagi negaranya masing-masing.

Kabarnya para pemenang olimpiade dari Indonesia telah ditawari bea siswa di Singapura dan Jepang sampai S3 dan tampaknya kepintaran mereka akan dimanfaatkan oleh kedua negara itu. Kita juga mendengar kabar bahwa cukup banyak teknisi penerbangan kita yang menganggur di sini lalu dipekerjakan oleh banyak negara di Asia, Eropa dan Amerika Selatan.

Kita dulu pernah mengirim ribuan tenaga untuk belajar berbagai bidang ilmu ke berbagai negara, yang dilakukan dibawah koordinasi Pak Habibie. Malaysia juga melakukan langkah serupa. Tetapi tampaknya kita tidak sepandai Malaysia dalam memilih orang dan memanfaatkanya dengan baik.

Dalam buku Genom, karya Matt Ridley disebutkan bahwa Joe HinTjio, seorang Indonesia telah berperan penting dalam upaya manusia mengurai sandi-sandi yang tesimpan dalam DNA. Bersama Albert Levan, Joe HinTjio berhasil mengurai bahwa genetika manusia terdiri atas 23 pasang sel kromosom, bukan 24 seperti dimiliki kera. Berkat temuan itu, kini para ahli berhasil membaca karakter-karakter apa yang disimpan pada setiap pasang 23 sel kromosom manusia, mulai dari kecerdasan, konflik, stres, kepribadian, seks sampai kemampuan merakit diri.

Fakta bahwa anak-anak bangsa Indonesia adalah sama pintarnya dengan bangsa lain dipertegas oleh langkah Prof, Johannes Surya yang berhasil menampilkan anak-anak bangsa Indonesia sebagai pemenang di pentas olimpiade fisika. Dalam bidang bisnis putra-putri Indonesia tidak kalah pintar. Pada akhir abad 20, dua kakak beradik, Sehat dan Pantas Sutarya, terpilih sebagai orang terkaya di bawah usia 40 tahun di AS. Mereka pada tahun 1980-an merantau ke AS dan kuliah di kampus terkemuka di sana, lalu mendapatkan penemuan spektakuler dibidang TI dan berhasil memasukkan usahanya ke pasar modal.

Banyak orang-orang Indonesia menginginkan anaknya menjadi juara kelas. Umumnya, pertanyaan apa yang membuat ortu bangga terhadap anak-anaknya, jawabannya ialah juara kelas. Kepintaran seseorang dalam dunia akademis bukan penentu tunggal dalam kesuksesan hidup. Bahkan sebetulnya bukan itu pula tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ialah untuk memperbaiki cara berpikir seseorang dan sekaligus membebaskannya dari berbagai mitos yang membelenggunya.

Sejarah menemukan bahwa terdapat orang-orang yang memiliki pola bekerja dan belajar seperti mesin diesel, yang perlu waktu panjang untuk memanaskannya. Mereka yang pintar secara akademis belum tentu sukses di dalam bekerja. Dalam hukum genetika perilaku, unsur-unsur pembentuk keperibadian manusia tersimpan dalam bentuk sandi-sandi. Salah satu unsur penting dalam sandi itu adalah huruf O yang mengandung makna keterbukaan (*openmind atau openness to experience*).

Kita mengenal dua jenis manusia pintar. Pertama, mereka yang diketahui memiliki unsur O amat tinggi, yang dikenal sebagai wirausaha sukses yang berhasil membangun berbagai perusahaan besar dan penerima hadiah Nobel. Mereka memiliki banyak minat, terbuka terhadap hal-hal baru, kritis, imajinatif, cenderung fleksibel dan menyukai orisinalitas.

Jenis kedua ialah mereka yang suka menghabiskan waktu hanya mengejar nilai tinggi di sekolah. Mereka ini memang pintar tetapi unsur O yang mereka punyai amat rendah. Meski berpendidikan tinggi dan pintar, orang semacam ini cenderung reaktif, defensif bahkan dogmatik. Akibatnya mereka resisten terhadap hal-hal yang berbau pembaruan. Mereka tidak *welcome* terhadap fakta-fakta baru.

Organisasi yang dipimpin oleh orang-orang pintar jenis kedua, kinerjanya kurang bagus dan respek publik terhadap mereka berkurang. Organisasi yang dipimpin orang-orang pintar

jenis pertama berbeda. Pimpinan jenis pertama ini semangat mengeksplorasi hal baru dan kreatif.

Kita perlu memikirkan kembali makna pembelajaran, yaitu apakah untuk membebaskan diri dari berbagai belenggu dengan cara lebih terbuka atau hanya untuk memintarkan secara akademis. Einstein mengatakan bahwa "ukuran kecerdasan manusia sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk berubah".

Pendidikan kita selama ini lebih menekankan pada aspek kognitif, itupun mutunya jauh di bawah harapan. Dibanding sekian puluh tahun lalu mutu pendidikan secara umum tidak baik dan tidak merata -- dibanding negara tetangga kita jauh tertinggal. Menurut Prof. Mochtar Buchori yang menggali dari gagasan Ki Hajar Dewantara, pendidikan watak seharusnya membawa anak didik kepada pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. Istilah pedagogiknya, dari gnosis sampai ke praksis. Untuk sampai kepada praksis, ada satu peristiwa batin amat penting yang harus terjadi dalam diri anak, yaitu munculnya keinginan yang sangat kuat (tekad) untuk mengamalkan nilai. Peristiwa itu disebut *conatio*. Dan langkah untuk membimbing anak membulatkan tekad ini disebut langkah konatif. Urutan langkah pengenalan nilai secara kognitif, memahami dan menghayati nilai secara afektif dan pembentukan tekad secara konatif, adalah trilogi klasik pendidikan yang oleh Ki Hajar Dewantara diterjemahkan sebagai cipta, rasa dan karsa.

Tampaknya pendidikan kita belum menyentuh pendidikan watak. Selama ini pendidikan watak diformulasikan menjadi pendidikan agama, tetapi dalam implementasinya pendidikan agama juga ditekankan pada aspek kognitif. Pendidikan agama yang seharusnya menjadi pendidikan karakter tidak berhasil karena pendekatannya hanya pada otak kiri (dalam bentuk pengetahuan yang harus dihafal) dan tidak me-nyentuh otak kanan (merasakan,

menghayati dan mengubah perilaku). Metode pembentukan karakter: 1) Pembiasaan; 2) Keteladanan; 3) Sentuhan kalbu melalui kata hikmah dan penanaman nilai; 4) Kisah-kisah.

Pendidikan kita gagal dalam menghasilkan warga negara yang berakhlak atau berkarakter. Proses pendidikan nasional terkesan menganut asas *subject-matter oriented*, yaitu bagaimana memberi peserta didik begitu banyak informasi kognitif dan motorik yang terkadang justru kurang relevan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan psikologis mereka. Sudah saatnya mengubah asas itu menjadi asas *student oriented* yang lebih menekankan pada pertumbuhan, perkembangan dan kebutuhan peserta secara utuh, baik lahir maupun batin.

Kita perlu menegaskan lagi bahwa prioritas utama dan pertama bagi pembangunan bangsa ialah pendidikan. Kedua ialah pendidikan dan ketiga ialah pendidikan. Efisiensi anggaran pendidikan yang sudah ditingkatkan menjadi 20% dari APBN harus dilakukan dalam bentuk menghentikan KKN dalam lembaga yang mengelola pendidikan. Keefektifan anggaran harus dilakukan dalam bentuk merumuskan program yang sesuai dengan tuntutan keadaan, realistis dan fokus. ❖

Revitalisasi Pesantren, Kenapa Tidak

TIDAK banyak diketahui oleh umat Islam bahwa selama berabad-abad sebelum abad ke 20, pesantren telah memberi sumbangsih amat besar bagi pendidikan warga yang tinggal di seluruh wilayah Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Pesantrenlah yang telah berhasil membentuk jiwa Islam Nusantara yang punya sikap moderat dan ramah terhadap budaya lokal dan menjadi cikal bakal dari muslim yang berjumlah besar yang kelak akan tumbuh menjadi bangsa Indonesia. Tingkat keilmuan dari para kiai yang mendirikan dan memimpin sejumlah pesantren beberapa abad lalu itu amat tinggi. Menurut Laporan Pemerintah Hindia Belanda, pada 1885 jumlah pesantren di Jawa (kecuali kesultanan Yogya) mencapai 14.929 dengan murid sebanyak 222.663 (data dari buku Tradisi Pesantren, Zamakhsyari Dhofier, jilid 1, Nawasea Press 2009).

Pendidikan seperti yang kita kenal saat ini baru dimulai oleh Belanda pada 1870-an dan lebih ditingkatkan pada 1901 dalam kaitan Politik Etika yang diusulkan oleh Van Deventer. Sebenarnya pendidikan itu diadakan untuk kepentingan pihak Belanda. Orang-orang pribumi yang bisa ikut pendidikan itu tidak banyak, umumnya adalah anak dari *ambtenaar* dan bangsawan. Para cendekiawan hasil pendidikan Belanda itu ternyata menjadi para perintis kemerdekaan, mulai dari Boedi Oetomo, Syarikat Islam, Kongres Pemuda dan akhirnya menjadi motor penggerak dalam mewujudkan proklamasi kemerdekaan Pada 1945. Saat Rl didirikan, tidak sampai 200 sarjana

pribumi yang kita punya. Jadi pada saat bangsa Indonesia merdeka, maka kalau mau jujur sebenarnya yang berperan mendidik sebagian besar bangsa Indonesia adalah para ulama dan pesantren.

Setelah Rl merdeka, secara perlahan dan bertahap pesantren yang umumnya semula adalah pesantren salaf mulai bergeser menjadi madrasah yang memberi pendidikan non-agama. Mutu keilmuan bidang agama mulai menurun. Kecenderungan semacam ini semakin meningkat. Saat ini tidak banyak yang masih betul-betul bertahan sebagai pesantren salaf, mungkin sekitar 15%. Yang tidak menggembirakan, banyak pesantren besar yang sudah berusia 100 tahun belum mendapat legalitas Pemerintah karena kurikulum mereka tidak mengikuti standar Pemerintah. Madrasah dan sekolah-non agama yang bernaung di bawah pesantren, secara umum mutu pendidikan non-agamanya kurang baik.

Jumlah pesantren semakin meningkat dengan kecepatan tinggi Pada 2008 tercatat ada 21.521 pesantren dengan jumlah santri sebesar 3.557.713. Umumnya pesantren dan madrasah itu terletak di daerah pedesaan. Banyak pesantren/madrasah menjadi lembaga pendidikan satu-satunya di pedesaan dalam radius 3-4 kilometer. Guru swasta pada 2009 berjumlah hampir 1 juta dibanding sekitar 1,8 juta guru PNS. Sebagian besar dari jumlah itu adalah guru pada lembaga pendidikan Islam. > 90% SD adalah milik negara, sedang > 90 %MI adalah milik swasta. > 80% SMP adalah milik negara dan > 80 % M Ts adalah milik swasta. > 70 % SMA adalah milik negara dan > 70 % MA adalah milik swasta. Kesejahteraan kebanyakan guru swasta itu umumnya amat minim. Mutu mereka (dan juga banyak guru PNS) tidak tinggi sehingga cukup banyak guru yang tidak mampu membuat siswa bisa menempuh sendiri UN dan terpaksa membantu para siswa.

Banyak pesantren yang mempunyai lembaga pendidikan tinggi ilmu agama, jumlahnya mencapai 1.078. Pesantren yang punya

lembaga pendidikan tinggi ilmu non-agama berjumlah 625. Secara umum mutunya tidak sebaik PTN. Sebagian besar adalah milik swasta yang tidak banyak menerima bantuan dari Pemerintah. Sikap Pemerintah yang membantu pesantren tidak sepenuh hati adalah sikap yang tidak memberi penghargaan kepada pihak yang berjasa besar terhadap pembentukan bangsa.

Tantangan

Dunia pendidikan Indonesia termasuk pesantren menghadapi tantangan yang serius dan berat dalam rangka ikut menjaga masa depan bangsa dan negara. Apalagi Indonesia adalah negara dengan umat lslam terbesar di dunia. Kita adalah salah satu negara yang diharapkan dapat membawa umat Islam menuju kemajuan dan kejayaan seperti pada abad ke 7-15. Saat ini umat Islam adalah umat yang paling tertinggal di dalam kehidupan antar-bangsa. Tantangan yang harus dihadapi itu spektrumnya amat luas sehingga membutuhkan kerja keras dan sinergi antara semua pihak yang terkait dengan dunia pendidikan. Sungguh tidak mudah untuk melakukannya, terutama dalam meyakinkan Pemerintah supaya punya niat mengubah pesantren dari kecenderungan sebagai beban menjadi aset bangsa.

Pada saat ini di Indonesia terdapat beberapa jenis pesantren, yaitu: (a). Psantren salaf murni seperti Sidogiri, Lirboyo, Langitan. (b). Pesantren khalaf seperti Gontor, Darunnajah dan lain-lain; (c). Pesantren yang ikut kurikulum Pemerintah; (d) pesantren yang punya pendidikan khusus, misal pesantren yang fokus pada pertanian. Tidak diperoleh data pasti, tetapi tampaknya jenis (c) adalah yang jumlahnya terbanyak. Kita tidak perlu berdebat tentang jenis mana yang paling tepat dalam menghadapi tantangan mutakhir. Kesemua jenis pesantren itu kita butuhkan, dengan catatan harus ada kerja keras dalam meningkatkan mutunya. Mungkin perlu ada

penambahan jumlah dari jenis tertentu supaya perbandingannya tidak terlalu timpang.

Kita tidak perlu sibuk merumuskan perbandingan antara mapel agama dengan mapel non-agama. Di Tebuireng, SMP dan SMA jam pelajaran pagi dipakai untuk mapel kurikulum Diknas, siang untuk kurikulum lokal dan setelah shubuh serta malam dipakai untuk materi keagamaan. MTs dan MA juga demikian. Ada lembaga yang baru kami dirikan pada 2008 yaitu Madrasah Muallimin, yang 90% waktunya untuk materi keagamaan dan tidak memberi ijazah. Kalau siswa butuh ijazah, bisa ikut ujian MTs atau MA.

Tampaknya belum ada pemetaan dari mutu pesantren itu, tapi secara umum kebanyakan kurang baik mutunya dibanding pesantren seabad lalu. Untuk mutu ilmu agama, diperlukan standar mutu yan bisa menjadi acuan bersama. Untuk jenis (c) standar ilmu non-agama mengambil acuan standar internasional, karena dalam dunia yang mengglobal, di Indonesia pun kita harus bersaing dengan tamatan sekolah internasional. Kita harus berani mengakui bahwa mutu pengajaran dalam ilmu non-agama masih jauh ketinggalan, sehingga ada kemauan kuat untuk meningkatkannya.

Jumlah umat Islam yang taat menjalani ibadah mahdhah bertambah, yang dulu abangan atau Islam KTP kini sudah beribadah. Tetapi perilaku umat Islam tidak semakin baik, kalau tidak mau disebut makin buruk. Bisa disimpulkan bahwa peningkatan jumlah pesantren bertolak belakang dengan fakta tentang penurunan akhlak masyarakat. Rupanya pendidikan di pesantren saat ini baru sebatas pengajaran, yaitu transfer ilmu pengetahuan keagamaan yang bersifat kognitif. Pendidikan yang bersifat afektif dan psikomotorik belum banyak tersentuh. Pembentukan karakter atau pendidikan akhlak umumnya juga baru sebatas menghafal/memperkenalkan nilai tetapi belum sampai pada penghayatan nilai-nilai itu, apalagi sampai pada tingkat menjadikan nilai-nilai itu sebagai komitmen

pribadi di dalam kehidupan. Kita perlu menyiapkan para tamatan pesantren/madrasah supaya menjadi muslim yang percaya diri, bertanggungjawab, punya motivasi kuat, siap bekerja keras, ikhlas, jujur, sederhana, rendah hati (bukan rendah diri), berwawasan luas, saling percaya dan mampu bekerja sama. Akan lebih ideal apabila mereka dipersiapkan menjadi pemimpin yang efektif, karena banyak dari mereka yang kemudian menjadi pemimpin informal.

Dalam masalah keagamaan, untuk pesantren salaf maupun untuk jenis pesantren lain, tantangan berat yang harus dihadapi adalah derasnya arus pemikiran yang baru dan amat berbeda dengan apa yang selama ini dibebankan di dalam pe-santren. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai perang pemikiran. Yang dimaksud adalah kecenderungan di dalam kalangan muda untuk berpikir bebas atau progresif yang terkesan bertentangan dengan pemikiran konservatif yang banyak dianut oleh pesantren. Ponpes Gontor secara terbuka menyatakan menolak pemikiran Cak Nur tentang sekularisasi. Konflik pemikiran antara sesama cendekiawan muda di kalangan Muhammadiyah dan NU, harus dicarikan jalan tengahnya. Kita tidak bisa menolak kebebasan berpikir, tetapi kita juga tidak bisa menerima kebebasan berpikir tanpa batas. Sebagai contoh adalah pertentangan pendapat dalam menyikapi kebebasan beragama atau pluralisme agama. Harus dibahas lalu ditentukan mana tapal batas dari kebebasan berpikir. Masalah lain ialah munculnya kembali kelompok yang gemar menyerang secara terbuka praktik keagamaan lain sebagai *bid'ah*.

Pertentangan antara pendidikan agama dan pendidikan non-agama masih cukup kuat. Perlu ditingkatkan upaya untuk memberi penyadaran bahwa semua ilmu perlu kita kuasai, kalau kita betul-betul menginginkan umat Islam tidak tertinggal lebih jauh. Terasa masih kuat pendapat yang tidak betul bahwa ilmu non-agama itu ilmu dunia dan ilmu agama itu ilmu akhirat. Padahal yang

menentukan mana amal dunia dan mana amal akhirat adalah niat kita belajar ilmu itu, bukan jenis ilmunya.

Untuk pendidikan tinggi keagamaan perlu diberikan materi sosiologi agama yang cukup memadai dan metodologi penelitian sosial serta pelatihannya, sehingga para mahasiswa bisa mempunyai perspektif sosial yang baik dalam masalah keagamaan. Diharapkan kesenjangan antara kehidupan agama dengan kondisi sosial, dapat dijembatani. Tanpa ada kesadaran terhadap adanya perubahan pemahaman keagamaan sebagai akibat perubahan sosial, maka kesenjangan yang ada bukan mengecil, tetapi justru membesar.

Keterlibatan langsung para pengasuh dan kiai pesantren dalam dunia politik praktis terutama pilkada masih menjadi salah satu tantangan berat bagi sebagian besar pesantren, walaupun intensitasnya makin rendah. Fakta bahwa dukungan kiai pesantren tidak terbukti ampuh dalam mendulang suara pemilih, membuat daya tarik pesantren dan para kiai menurun. Di masa depan, pesantren masih akan mengalami penurunan daya tarik dalam masalah politik, tetapi daya tarik itu tidak akan mungkin hilang sama sekali.

Solusi

Pesantren termasuk madrasah dan pendidikan tinggi di dalam naunganya, kurang tinggi mutunya. Pesantren tidak akan mampu meningkatkan mutu itu tanpa bantuan dana Pemerintah. Fakta yang ada: Pemerintah kurang memberi perhatian terhadap lembaga pendidikan swasta termasuk pesantren. Pemerintah harus melihat masalah itu dengan perubahan perspektif yang mendasar. Kalau tidak dibantu dalam peningkatan mutu, tamatan sekolah swasta termasuk pesantren akan cenderung menjadi beban dan tidak bisa diharapkan akan menjadi aset bangsa.

Salah satu langkah nyata yang perlu dilakukan Pemerintah ialah memberi perhatian penuh kepada upaya untuk meningkatkan mutu

guru swasta dan PNS yang sebagian besar mutunya kurang. Selama mutu guru belum baik, UN bisa dihentikan sementara (sekitar 8 tahun). Kalau Pemerintah membiarkan lembaga pendidikan swasta dalam kondisi tidak bermutu, sebenarnya Pemerintah melanggar UUD pasal 28 yang mengatur bahwa pendidikan (bermutu) adalah salah satu hak dasar warga negara. Yang berkewajiban menjamin terpenuhinya hak itu adalah Pemerintah, tanpa melihat apakah pendidikan itu dikelola oleh Pemerintah/Negara atau swasta.

Untuk pendidikan tinggi ilmu-ilmu non-agama, kalau Pemerintah sudah berniat untuk membantu secara sungguh-sungguh, perlu ada dorongan Pemerintah supaya lembaga-lembaga pendidikan swasta yang sudah ada untuk bergabung, baru setelah itu Pemerintah membantu secara serius pengembangan dan peningkatan mutunya. Langkah ini diperlukan supaya anggaran Pemerintah yang terbatas dapat digunakan secara efektif. Selain anggaran, mungkin diperlukan bantuan tenaga dosen bermutu.

Jumlah lembaga pendidikan tinggi milik pesantren yang akan dibantu Pemerintah tentu harus dibatasi (mungkin 5-10%), supaya tujuan peningkatan mutunya tercapai secara efektif, disesuaikan dengan minimnya anggaran Pemerintah. Supaya fokus dan mutunya terjaga, diperlukan adanya spesialisasi dari pendidikan tinggi itu, seperti yang khusus ilmu sosial, teknologi dan IPA, kedokterran, politeknik, pendekatanya adalah mutu, bukan jumlah.

Di perlukan perjuangan keras untuk memperoleh model pendidikan karakter yang tepat sehingga diperoleh anak-didik atau tamatan pesantren yang betul-betul siap menghadapi tantangan, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari anak bangsa. Masalah ini tidak hanya dihadapi pesantren, tetapi juga oleh dunia pendidikan Indonesia secara umum. Adalah suatu hal yang menggembirakan bahwa Mendiknas Prof. M. Nuh memberi perhatian yang besar terhadap pembinaan karakter. Tetapi harus dijaga jangan sampai

kampanye pembinaan karakter itu menjadi seperti P4 yang heboh tetapi justru kontra produktif. Jangan sampai program atau proyek pembinaan karakter hanya menghabiskan anggaran, tetapi anak didik tidak terbina karakternya.

Program bea-siswa di PTN yang baik (ITB, UI, IPB, UGM, Unair, ITS dan lain-lain) bagi para alumni SMA/MA di pesantren yang berprestasi, perlu ditingkatkan. Setelah tamat, mereka perlu dikumpulkan dalam satu pesantren yang siap melakukan transformasi menjadi pesantren masa depan, sehingga bisa mencapai *critical-mass* dan bisa kita manfaatkan untuk bisa melakukan semacam transformasi terhadap pesantren yang akan dibina dan dikembangkan itu. ❖

Menangkal Korupsi Lahir Bathin

KERISAUAN Gus Sholah terhadap maraknya korupsi tak pernah pupus. Beberapa kali Gus Sholah menuangkan gagasan dan usulannya bagaimana bangsa ini memberantas korupsi.

Secara luas dan mendalam, dengan menggunakan analisa dan diagnosa yang cukup rasional, Salahuddin Wahid menuangkan gagasan tentang bagaimana pember-antasan korupsi di Indonesia seharusnya dilakukan, melalui bukunya Jihad Akbar Melawan Korupsi.

Gus Sholah dalam sebuah tulisannya menyitir pandangan Ayip Rosidi dalam bukunya ”Korupsi dan Kebudayaan” yang membuat pendekatan kebudayaan terhadap perilaku korup dan tindak pidana korupsi yang masih marak di indonesia. Dia menekankan pada watak perilaku elite penguasa yang berorientasi pada upaya memperkaya diri (dengan cara berkuasa) sebagai akar dari budaya politik yang korup. Perilaku penguasa kita sekarang tidak jauh berbeda dengan watak kaum ningrat masa lalu. Di dalam kerajaan di Nusantara, tidak ada perbedaan antara milik pribadi raja dengan milik publik. Karena itu tidak ada keharusan yang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban publik. Sepanjang sejarah kerajaan atau kesultanan di seluruh Nusantara, perpecahan dalam tubuh kerajaan atau pemberontakan yang memperebutkan tahta kerajaan yang melibatkan kerabat kerajaan, dilihat sebagai periode awal yang

melahirkan mentalitas budaya korup yang lebih mementingkan upaya memperkaya diri atau golongan dari pada menjaga keutuhan dan kepentingan bangsa. Kelompok dalam keluarga kerajaan banyak yang meminta bantuan VOC dalam menghadapi kelompok lawannya.

Korupsi mulai dikenal dalam organisasi pemerintahan modem. VOC adalah lembaga yang memperkenalkan tradisi korupsi di sini. MC Ricklefs menulis dalam buku Sejarah Indonesia Modern: "Personil VOC di Indonesia seperti diduga orang tidaklah selalu bermutu tinggi terutama pada tahun-tahun terakhir masa kekuasaannya. Sulit ditemukan orang yang jujur.

Orang terhormat yang mempunyai keinginan untuk menempuh karier yang berbahaya di Asia. Meskipun VOC adalah organisasi Belanda, tetapi sebagian besar personilnya bukanlah orang Belanda. Para petualang gelandangan, penjahat dan orang-orang yang bernasib dari Eropa-lah yang mengucapkan sumpah setia. Inefisiensi, ketidakjujuran, nepotisme dan alkoholisme tersebar luas di kalangan VOC". Dalam hal ini, yang bisa dikemukakan adalah suap yang dilakukan oleh para priyayi Jawa untuk mendapatkan kedudukan yang dibagikan oleh VOC menyusul pergantian sistem penggajian tradisional dan perluasan pungutan pajak oleh Belanda atas tanah dan hasilnya. Dr JC van Leur menulis bahwa VOC bangkrut akibat praktik korupsi yang meluas.

Gus Sholah juga memperkuat gagasannya, dengan menukil catatan Teten Masduki. Ia menyatakan bahwa sejak kemerdekaan ada tiga periode sejarah yang sangat penting dalam peningkatan intensitas korupsi di Indonesia. *Pertama*, proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang dilakukan oleh tentara pada pertengahan tahun 1950-an, yang akhimya banyak sang mengalami kebangkrutan. Menurutnya, pada babak inilah korupsi sistematis mulai terbangun, ketika penguasa militer yang kemudian menjadi

salah satu pilar utama kleptokrasi Orde Baru disamping kalangan konglomerat dan birokrasi, menguasai sumber-sumber ekonomi negara. *Kedua*, era Demokrasi Terpimpin (1958-1965), terutama ketika Presiden Soekarno menempatkan lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung, di bawah kendalinya. Penegakan hukum berjalan dengan baik pada era demokrasi liberal (1950-1959), ketika tiada seorangpun pelaku kriminal lolos dari jerat hukum, walaupun dia seorang menteri, jenderal, pimpinan parpol atau kroni Bung Karno. Dengan tindakan Bung Karno terhadap Mahkamah Agung, penegakan hukum menjadi tidak berjalan. *Ketiga*, sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden yang semakin menguat di era Orde Baru. Semua elemen demokrasi seperti pemilu, parpol dan DPR, birokrasi, pers dan lembaga peradilan berhasil dijinakkan. Maka sistem *checks and balances* tidak bisa berjalan.

Kita semua menyaksikan bahwa dalam awal era Reformasi, muncul kesadaran bahwa korupsi adalah salah satu masalah utama bangsa dan negara Indonesia. Pembentukan KPK disetujui melalui UU pada 2002. Tetapi ternyata intensitas korupsi tidak juga berkurang kalau tidak mau disebut bertambah. Demikian tinggi daya rusak korupsi itu, yang terlihat pada keterlibatan PBB untuk mencari solusi dalm upaya memberantasnya. Karena itu PBB telah mengeluarkan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), 2003. Mari kita baca kutipan dari UNCAC: ”prihatin atas kegawatan masalah ancaman-ancarnan yang ditimbulkan korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang meruntuhkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai etika dan keadilan serta mebahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Perilaku korup juga bertambah marak, termasuk munculnya kebiasaan memberi uang kepada para pemilih di dalam pemilu legislator dan pemilukada. Maka banyak pihak merasa prihatin

dan risau akan masa depan bangsa. Berbagai dialog dan seminar diadakan untuk membahas upaya memerangi korupsi dengan berbagai pendekatan.

Peran iman dan moral sebagai penangkal korupsi demi sustainable development pernah didiskusikan secara serius. Sungguh tidak mudah untuk merumuskan peran itu. Secara orang per orang, pasti banyak orang yang mampu menjaga dirinya dari banyak perbuatan yang dilarang oleh agama (apapun) termasuk korupsi. Tetapi secara sosial ternyata tidak demikian. Data yang ada menunjukkan bahwa agama atau iman ternyata tidak mampu menangkal korupsi. Enam rukun iman didalam Islam terbukti tidak cukup kuat untuk menangkal korupsi termasuk yang dilakukan oleh para pimpinan parpol Islam atau parpol yang berbasis massa Islam. Bahkan bukan tidak mungkin juga dilakukan oleh sejumlah kecil pimpinan ormas Islam.

Survey Gallup di sekitar 40 negara dengan 1.000 responden tiap negara menunjukkan bahwa makin miskin suatu negara, maka penduduk negara itu menganggap makin penting peran agama dalam kehidupan. Untuk negara dengan PDB perkapita < USD 2.000, 99% penduduk berpendapat bahwa agama amat penting bagi kehidupan masyarakat. Sebaliknya bagi warga dari negara yang PDB per kapitanya > USD 25.000, hanya 47% yang berpendapat begitu. Kecuali di Amerika Serikat yang mencapai angka 65%. Indonesia dan sejumlah negara berkembang lainnya, 99% warganya berpendapat bahwa agama amat penting bagi kehidupan masyarakat. Warga Denmark hanya 19% yang berpendapat seperti itu. Tetapi dalam kenyataan, Denmark adalah negara yang paling bersih dari korupsi dan Indonesia berada pada peringkat ke-111. Berarti pentingnya agama di mata penduduk suatu negara tidak otomatis membuat penduduk negara itu menjalankan perintah agama dalam kehidupan bermasyarakat/benegara.

Ada empat pertanyaan yang diajukan di dalam TOR diskusi tentang ini. *Pertama*, mengapa seruan moral dan agama sebagai upaya pemberantasan korupsi sejauh ini tak juga berdampak tegas dan memuaskan. *Kedua*, bagaimana memahami gejala korupsi yang terus saja meluas di tengah kuatnya gaung klaim kebertuhanan dan keadilan sosial sebagai watak dasar bangsa ini? *Ketiga*, apabila pendidikan tetap dipandang penting sebagai sarana pemberantasan korupsi, dari segi moral dan iman, subtansi macam apa yang diperlukan sebagai isi kurikulum untuk semua jenjang pendidikan. Keempat, perang terhadap korupsi tak boleh berhenti pada sisi moral dan iman dalam arti konseptual; ia harus menjadi gerakan sosial yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Karena itu dari segi pendidikan praktis pertanyaannya adalah wajah gerakan sosial macam apa yang diperlukan bangsa ini untuk sekurang-kurangnya menekan korupsi ke tingkat serendah mungkin.

Tindak pidana korupsi ialah pelanggaran-hukum yang memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dengan bahasa dan logika hukum yang rumusannya sering menimbulkan beragam tafsir. Berbagai jenis tindak kriminal yang mudah kita kenali dan terjadi di banyak lembaga kita biarkan dan dianggap lumrah, karena tidak mudah membuktikan secara hukum dan jumlah dananya kecil (walaupun secara nasional amat besar. Bisa kita ambil sebagai contoh ialah perjalanan dinas fiktif, perjalanan dinas yang jumlah hari perjalanannya kita gelembungkan, proyek fiktif, penurunan mutu, pemotongan dana terhadap para rekanan yang memperoleh proyek. APBN, APBD (kontraktor, pemasok, konsultan) dalam jumlah besar (25 - 40% dari nilai kontrak).

Perilaku korup adalah pelanggaran yang mengakibatkan kenyamanan atau hak sesama warga negara terabaikan, terganggu, bahkan mungkin terampas, tidak mau antre secara tertib, disiplin berlalu lintas yang amat rendah, menebang pohon secara besar-

besaran dan tidak menanamnya kembali yang menyebabkan perusakan lingkungan. Salah satu perilaku korup yang baru tumbuh beberapa tahun terakhir adalah menyewakan "kendaraan" partai untuk kepentingan menjadi calon pilkada dan pilpres. Juga industri perizinan yang marak dilakukan oleh kepala daerah dan oleh pejabat-pejabat tertentu di Jakarta.

Salah satu perilaku korup yang akhirnya dapat dikonversi menjadi tindak pidana korupsi adalah pemberian uang kepada para anggota DPR RI dalam kaitan pemilihan Gubernur BI Miranda Gultom. Hal ini bisa terjadi karena ada seorang penerima dana itu melaporkan adanya dugaan suap. Tindakan pelaporan itu bisa efektif karena sudah ada UU yang melindungi si pelapor sebagai "*a whistle blower*". Perilaku korup lain yang masih berjalan dan tidak dianggap sebagai perilaku korup ialah kebiasaan membolos PNS dan anggota DPR. Juga kegiatan "studi banding" anggota DPR ke LN yang diragukan manfaatnya, apakah seimbang dibanding besarnya dana yang dipakai.

Nabi Muhammad mengatakan bahwa beliau diutus Allah SWT tak lain adalah untuk memperbaiki akhlak umat. Inti dari akhlak adalah kejujuran. Umat Islam diperintahkan untuk berpuasa supaya bertaqwa. Unsur utama dari taqwa adalah kejujuran. Di dalam berpuasa umat Islam dilatih untuk jujur. Tetapi ternyata kejujuran umat Islam di luar bulan Ramadhan masih jauh dari harapan, termasuk sedikit tokohnya. Upaya untuk menanamkan kejujuran harus ditanamkan dengan serius sejak kecil melalui keluarga, melalui sekolah dan berbagai cara lain. Kalau didalam rumah tangga tidak ditanamkan makna dan pentingnya kejujuran baik dari sudut agama maupun sosial, di sekolah siswa tidak mendapat bimbingan yang efektif dalam menanamkan kejujuran dan didalam masyarakat dia melihat banyak contoh tentang perilaku tidak jujur dari para tokoh masyarakat, pengusaha dan

pejabat, bagaimana kita bisa berharap bahwa anak-anak bangsa akan jujur.

Kalau ayahnya pengusaha, di dalam rumah dia pasti sering mendengar tentang perilaku tidak jujur atau korup dari para pejabat yang harus dilayani ayahnya kalau mau berhasil mendapat kontrak. Lalu di sejumlah sekolah (yang tidak bermutu) dia menyaksikan bahwa para guru di sekolah itu membantu para siswa yang sedang menempuh ujian nasional. Kalau tidak dibantu, maka kebanyakan siswa itu tidak akan bisa lulus karena para guru tidak mampu mempersiapkan mereka supaya bisa lulus. Lalu di dalam kehidupan nyata di masyarakat, dia melihat fakta bahwa banyak tokoh masyarakat atau pejabat yang diduga kuat berperilaku korup, ternyata tidak mendapat sanksi sosial atau sanksi hukum. Maka lengkaplah contoh yang tersaji didepan mata kebanyakan anak-bangsa, bahwa kejujuran itu tidak penting kalau mau sukses. Bahkan kejujuran itu cenderung akan menyusahkan dirinya.

Tampak nyata bahwa *hablum minallah* (hubungan vertikal) tidak selalu ada kaitan dengan *hablum minan nas* (hubungan horizontal). Kebanyakan umat Islam lebih mengutamakan hubungan vertikal tanpa memikirkan hubungan horizontal. Kalau sudah merasa saleh secara ritual/personal (shalat, puasa, berhaji dan zakat) dan saleh secara sosial (berderma, baik kepada tetangga dan masyarakat), tidak masalah kalau tidak saleh secara profesional (korupsi, kesaksian palsu, membeli suara).

Kita seperti membuat neraca pahala dan dosa. Padahal kalau kita tetap berbuat keji dan mungkar, maka shalat kita belum tentu benar. Prof. Mochtar Buchori membuat tulisan berjudul ”Memerangi Budaya Korupsi Melalui Pembaruan Pendidikan Nilai”, yang akan saya kutip pendapatnya di bawah ini. Menurutnya, dari sudut pandang pendidikan setidaknya terdapat tiga sebab utama yang ikut membuat subur “budaya korupsi”. *Pertama*, pendidikan yang mengabaikan

pembinaan kesadaran nilai. *Kedua*, metode pendidikan nilai yang salah (jika memang sudah ada pendidikan nilai). *Ketiga*, kegiatan pendidikan yang tidak ada perhatian terhadap hubungan antara ”nilai”, ”norma ‘ dan moralitas. Dari sudut pandang ini, pendidikan untuk membina kesadaran nilai dipahami sebagai ”masalah hulu”, dan pemberantasan korupsi adalah ”masalah hilir”. Maka, kita dapat menyatakan bahwa sesungguhnya ‘budaya korupsi” adalah dampak langsung dari polusi yang terjadi di hulu, yaitu pendidikan yang tidak atau kurang memberikan fondasi nilai yang cukup kuat kepada siswa selama masa pertumbuhan mereka.

Secara garis besar, “kesadaran nilai” meliputi tiga hal. Pertama, pengetahuan dan pemahaman tentang nilai. Kedua, penghayatan nilai-nilai itu. Ketiga, pengikatan diri secara sukarela terhadap nilai-nilai itu. Kebanyakan sekolah saat ini tampaknya terlalu menekankan pada aspek pengetahuan termasuk tentang nilai-nilai dan pada saat yang sama mengabaikan pendidikan nilai dalam penghayatan maknanya yang lebih mendalam sehingga anak-anak didik mau mengikatkan diri pada nilai itu. Akibatnya, siswa yang seharusnya menjadi manusia utuh (memiliki ilmu, dan ketrampilan sekaligus memiliki kesadaran nilai) dikurangi menjadi manusia satu dimensi yang miskin nilai.

Transformasi pemahaman menjadi tindakan dalam pendidikan nilai harus melalui suatu proses yang panjang. Suatu nilai, baik nilai estetika maupun etika, tidak secara otomatis dapat diejawantahkan ke dalam perilaku segera setelah nilai-nilai itu diajarkan oleh seorang guru kepada siswanya. Guru-guru sering lupa bahwa siswa-siswa yang mereka ajar belum tentu benar-benar memahami nilai-nilai yang diajarkan itu, apalagi melakukan internalisasi nilai itu ke dalam penghayatan dan kesadaran.

Dalam keadaan sebenarnya, internalisasi nilai mencakup suatu proses transformasi mental yang cukup panjang. Proses tersebut

dimulai dari memahami nilai-nilai yang diajarkan, merasakan nilai-nilai yang dipahami, menghormati nilai-nilai yang dirasakan, meyakini dan bersedia terikat dengan nilai-nilai yang dihormati, terdorong untuk melakukan nilai-nilai yang diyakini tersebut. Jadi pengertian dan pemahaman kita terhadap suatu nilai tidak serta merta dapat mendorong perubahan perilaku. Sebab jika kita tidak cukup merasakan, tidak cukup menghormati, kurang meyakini dan kurang terikat dengannya, dan belum terdorong melakukannya, maka nilai-nilai tersebut tidak akan memiliki dampak apapun bagi perilaku kita. Persoalannya nilai-nilai apa yahg harus diperkenalkan kepada para siswa dan lain harus mereka internalisasikan secara pribadi dan secara kolektif untuk membuat masyarakat kita hidup dengan rukun, saling percaya dan Saling menghormati.

Untuk membangun kesadaran publik supaya anti korupsi tidak terlalu sulit. Tetapi masalahnya, masyarakat tidak memberi sanksi sosial kepada mereka yang amat layak untuk diduga sebagai koruptor. Masyarakat umumnya tetap memberi penghormatan kepada mereka yang mau memberi bantuan kepada masyarakat, walaupun orang itu amat layak diduga atau bahkan sudah dijatuhi hukuman untuk tuduhan korupsi. Para koruptor yang telah menjalani hukuman mungkin awalnya kurang PD untuk tampil di depan publik, tetapi lama kelamaan akan beradaptasi. Kampanye anti korupsi harus tetap dilanjutkan. Pendidikan anti korupsi harus digiatkan. Pendidikan karakter, terutama kejujuran, harus segera dicarikan metodenya yang cepat dan disebarluaskan ke seluruh sekolah, madrasah dan pesantren. ❖

Akhir Perang Melawan Korupsi

DALAM kampanye putaran II Pilpres 2004 untuk pasangan SBY-JK di Pasuruan, saya berpidato bahwa alasan utama saya mendukung SBY-JK adalah janji SBY untuk memimpin sendiri perang melawan korupsi, masalah utama kita.

Dalam 100 hari pertama kita amat berharap bahwa Presiden SBY akan betul-betul memimpin sendiri perang melawan korupsi itu. Waktu itu mulai terdengar isu bahwa Presiden SBY akan menerbitkan Perppu anti korupsi yang memuat penerapan secara penuh prinsip pembuktian terbalik.

Sayang sekali, isu itu tidak menjadi kenyataan. Kabarnya DPR akan menolak Perppu itu karena tidak ada kondisi ”darurat” yang memaksa diterbitkannya Perppu itu. Saya kecewa tetapi bisa memahami keputusan itu.

Pembuktian Terbalik

Kita sering mendengar pernyataan bahwa untuk bisa memerangi korupsi yang sudah seperti kanker, diperlukan penerapan hukuman mati di dalam UU Anti Korupsi kita. Pendapat seperti itu tidak memahami bahwa seberat apa pun hukuman maksimal yang ditentukan UU, tetapi kalau tidak terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tipikor, maka hukuman itu tidak berarti apa-apa. Tanpa prinsip pembuktian terbalik, amat sulit untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tipikor.

Di banyak negara prinsip pembuktian terbalik telah diterapkan secara penuh dalam UU tipikor. Karena itu program pemberantasan tipikor dapat berjalan dengan efektif. Dalam sistem hukum nasional kita upaya penerapan pembuktian terbalik secara penuh selalu tidak berhasil.

Dalam pembahasan UU anti korupsi pada 1971, ada seorang anggota DPR perempuan dari Parkindo yang memperjuangkan penerapan prinsip pembuktian terbalik, tetapi ternyata DPR menolaknya. Dalam pidato terakhirnya anggota DPR tersebut menyatakan bahwa dia telah terbebas dari dosa sejarah apa bila terbukti kernudian bahwa RI akan mengalami kehancuran akibat korupsi.

Ternyata anggota DPR tersebut mempunyai visi yang amat luar biasa. Dia mampu menangkap ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup RI jauh sebelum kita menyadarinya, bahkan dia memperjuangkannya Walaupun tidak berhasil. Para anggota DPR 1971 terutama dari fraksi Golkar dan TNI, tanpa mereka sadari, secara tidak langsung telah ikut "merusak RI". Mungkin pernyataan terakhir ini terlalu bombastis, tetapi sedikit banyak mengandung kebenaran. Dugaan saya Presiden Soeharto tidak setuju prinsip itu.

Kesempatan memperbaiki UU Anti Korupsi (1999) disia-siakan para anggota DPR, sehingga UU No. 31/1999 juga tidak menerapkan penerapan prinsip pembuktian terbalik secara penuh. Kesempatan menyempurnakan UU tersebut beberapa tahun kemudian kembali disia-siakan.

Melemahkan KPK

Syukur DPR mengesahkan UU tentang KPK. Kita juga telah berhasil menyusun KPK, pertama dipimpin oleh Taufikurrahman Ruki dan kedua dipimpin oleh Antasari Azhar. Tetapi sejak akhir

2008 kita melihat perkembangan yang amat merisaukan, yaitu gejala serangan balik koruptor. Ada upaya untuk membonsai KPK.

Antasari menjadi terdakwa. Setelah itu muncul isu ”cecak melawan buaya” yang dilontarkan oleh petinggi Polri. Dan selanjutnya sang buaya mulai menggigit sang cecak dengan menetapkan Bibit Ryanto dan Chandra Hamzah sebagai tersangka. Polri terkesan membela koruptor karena menetapkan petinggi KPK yang mencekal dua terdakwa tipikor, sebagai tersangka.

Muncul suara agar Presiden SBY turun tangan dengan menekan Polri supaya tidak meneruskan langkah menetapkan petinggi KPK sebagai tersangka. Presiden menyatakan bahwa hal itu tidak bisa dilakukannya karena berarti campur tangan terhadap kemelut antara dua lembaga penegak hukum. Pendapat itu dibenarkan oleh Jimly as-Shiddieqi.

Tidak bisa dihindari kesan bahwa tuduhan Polri saat itu dicari-cari. Seharusnya penasehat Presiden memberi saran kepada Presiden untuk mencari pemecahan yang bisa menyelamatkan Polri dan KPK. Ketua MK menyatakan bahwa Polri tidak bisa menilai kewenangan KPK, persoalan ini hanya bisa diselesaikan PTUN. Prof Mahfud menyarankan KPK mengajukan praperadilan. Menerbitkan Perppu Plt Ketua KPK terkesan melangkah terlalu jauh sebelum jelas masalah Polri menilai kewenangan KPK itu.

Partai Demokrat, kepanjangan tangan Presiden di DPR, tidak menunjukkan semangat memerangi korupsi karena menyetujui pelemahan kewenangan KPK dalam pembahasan RUU Tipikor. Mau tidak mau saya harus sampai pada kesimpulan bahwa Presiden SBY sudah tidak punya niat untuk memimpin sendiri perang melawan korupsi atau mungkin bahkan sudah tidak merasa lagi perlunya perang melawan korupsi.

Tindakan Nyata

Tentu Presiden dan para penasehatnya membantah kesimpulan di atas. Tetapi itulah kesimpulan logis yang muncul dalam diri saya sejak berpidato dalam kampanye di Pasuruan itu, sampai melihat kondisi nyata yang kini ada.

Untuk membantah kesimpulan itu, diperlukan tindakan nyata, bukan penjelasan. Mohon maaf saya terpaksa mengusulkan langkah nyata, yang terkesan menggurui Presiden yang punya banyak penasehat pandai dalam bidang hukum.

Partai Demokrat harus mengajak semua partai untuk tidak meneruskan langkah mengurangi wewenang KPK melalui RUU Tipikor. Akan lebih baik apabila RUU itu tidak usah diteruskan. Sebagai gantinya, Presiden menerbitkan Perppu tentang Tipikor. Da-lam Perppu itu harus dimuat substansi penerapan pembuktian terbalik secara penuh.

Kalau membiarkan RUU Tipikor mengurangi kewenangan KPK, berarti Presiden berpendapat perang melawan korupsi telah berakhir. Kalau Presiden meminta Partai Demokrat tidak mendukung pengurangan kewenangan itu, tetapi membiarkan RUU Tipikor dijadikan UU, maka Presiden berpendapat bahwa perang melawan korupsi belum berakhir. Tetapi Presiden tidak ingin memimpin sendiri perang itu.

Presiden dapat dikatakan memimpin sendiri perang melawan korupsi, kalau menerbitkan Perpu tipikor yang menerapkan pembuktian terbalik secara penuh dan juga meningkatkan hukuman maksimum.

Prestasi memimpin sendiri perang melawan korupsi akan meningkat kalau Presiden juga membuat ketentuan yang bisa meningkatkan keefektifan perang tersebut, yaitu mewajibkan orang tertentu untuk melaporkan seluruh kekayaannya. Kalau kemudian

ternyata ada harta yang tidak dilaporkan, maka harta (di DN atau LN) yang tidak dilaporkan itu akan menjadi milik negara.

Sekaligus Presiden juga perlu membuat ketentuan bahwa mereka yang melaporkan kekayaan yang belum pernah dilaporkan (berarti melakukan pemutihan), diwajibkan menyerahkan sekitar 30-35% dari harta yang diputihkan. ❖

Nahdlatul Ulama dan Terbentuknya KKNU

SETELAH berhasil menahkodai Pesantren Tebuireng Jombang selama 14 tahun, agaknya *Jam'iyah* Nahdlatul Ulama menjadi tempat berlabuhnya pemikiran reflektif terakhir Salahuddin Wahid. NU, di mata Gus Sholah di saat-saat akhir hayatnya, sedang menghadapi problem yang serius. Dan sebagai *dzuriyyah* dari Pendiri NU ia merasa bertanggungjawab untuk turut melakukan perbaikan, melalui cara-cara yang konstitusional dan sesuai dengan norma ke-NU-an.

"Pokok-pokok pikiran yang baik yang bermaksud memperbaiki kondisi NU harus disampaikan melalui forum muktamar NU," ujarnya, ketika menghadiri acara halaqah Komite Khitthah 26 NU di Pesantren Darunnajah, Ulujami, Jakarta Selatan.

Gus Sholah memang tidak sendirian dalam melakukan pemetaan (*mapping*) dan mendiagnosa tubuh NU untuk selanjutnya mendorong dilakukannya perubahan fundamental di dalam tubuh NU. Ada sejumlah kiai, cendekiawan dan tokoh NU yang sehaluan dengan pemikiran Gus Sholah. Tetapi harus diakui, tanpa kehadiran Gus Sholah, baik sebagai simbol maupun motor gerakan, boleh jadi tidak akan bisa terwujud pelembagaan gagasan dan gerakan sosial kaum nahdliyin yang kemudian berhimpun di dalam sebuah forum bernama Komite Khittah 26 NU (KKNU).

Gus Sholah harus diakui adalah inisiator, motor dan mentor dari gerakan moral ini. Apa yang dihasilkan dari kegiatan Gus Sholah bersama anggota forum berkeliling dari satu pesantren ke pesantren

yang lain untuk mengadakan halaqah, dalam kondisi fisiknya yang tidak lagi prima?

M. Nashihin Hasan, salah satu tokoh yang aktif membantu Gus Sholah dalam mengelola forum tersebut, berkesempatan membantu menuliskan apa dan bagaimana KKNU yang digagas Gus Sholah bersama sejumlah tokoh NU yang lain, sebagaimana tulisan berikut.

Pendahuluan dan Batasan

Khittah (bahasa Arab) dapat diartikan garis-garis besar perjuangan bagi sebuah kelompok tertentu. Kata ini mengandung konsepsi (pemikiran) sebagai dasar aturan dan tuntutan, pedoman dan arah sebuah organisasi. Di dalam ber-*jam'iyah* (berorganisasi), khittah adalah prinsip, yakni suatu pernyataan asasi atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai acuan dan rujukan untuk berpikir atau bertindak. Dari beberapa sumber, lebih jauh, bahwa khittah adalah roh dari keberadaan sebuah entitas yang merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Khittah adalah garis haluan, landasan perjuangan dan kebijakan.

Khittah adalah kode etik, yakni tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu (jama'ah) dan ditetapkan dalam suatu forum tertinggi.

Dalam konteks di atas, Khittah 26 adalah landasan berpikir, bersikap dan bertindak yang merupakan "kesepakatan fundamental" di dalam ber-Nahdlatul Ulama (NU). Artinya, setiap orang dan/atau kelompok pemangku kepentingan harus mengikatkan diri (komit) terhadap elaborasi pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Dan yang penting dan perlu dipahami dan disadari bahwa kesepakatan asasi ini tidak dapat dirubah oleh siapapun, kecuali melalui forum pengambilan keputusan tertinggi

organisasi. Pola interaksi antarkomponen tersebut merupakan bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang difungsikan sebagai dasar untuk menilai/menghakimi tindakan yang secara logika (rasional) umum (*common sense*) dinilai menyimpang atau tidak. Dengan demikian, khittah sekaligus merupakan refleksi dari "*self control*", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial tertentu, baik sebagai fungsionaris maupun anggota.

Akan halnya komite adalah "kepanitiaan" (kecil). Nama ini dilekatkan sebagai "*tabaruk*an" ke Komite Hijaz yang melatar-belakangi dan mendorong berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) tahun 1926. Sedangkan Komite Khittah 26 (KKNU '26) diinisiasi oleh dhurriyah (keluarga) pendiri NU, yakni wakil keluarga dari pesantren Tebuireng dan Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Pertemuan pertama dihadiri 50 orang kiai pada tanggal 28 Oktober 2018, di Pesantren Tebuireng. Dengan demikian Komite Khittah 26 Nahdlatul Ulama merupakan kelompok kerja untuk meneguhkan kembalinya NU pada rel dasar dan semangat keberadaan dan kejuangannya. Bersifat kerelawanan sebagai forum jaringan kultural bagi jama'ah dan para simpatisan yang prihatin dan peduli terhadap keberadaan dan keberlanjutan Nahdlatul Ulama. Menfokuskan pada ikhtiar peneguhan dan pengamalan nilai dan prinsip Khittah 26 di lingkungan jama'ah dan jam'iyah di semua tingkatan.

Kesejatian Khittah 26

Secara garis besar, Khittah Nahdliyah adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Landasan tersebut adalah faham Islam Ahlussunnah wal-Jama'ah An-Nahdliyah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.

Setidaknya ada 4 (empat) faktor utama, mengapa Khittah 26 perlu dirumuskan (menjelang Mu'tamar 27 di Situbondo, dalam Khittah Nahdliyah, oleh KH. Achmad Siddiq):

1. Semakin jauhnya jarak waktu antara generasi pendiri (*muassis*) dengan generasi penerus.
2. Semakin meluasnya medan perjuangan dengan beragamnya bidang yang harus ditangani.
3. Semakin banyaknya jumlah dan ragam perorangan maupun kelompok dengan latar belakang pendidikan, suku dan budaya berbeda yang menggabungkan diri dengan Nahdlatul Ulama.
4. Semakin berkurangnya peranan dan jumlah ulama generasi pendiri dalam pimpinan Nahdlatul Ulama.

Secara rinci Khittah 26 terdiri dari 7 (tujuh) poin kepedulian, (ikhtisar dari Khittah Nahdliyah KH. Achmad Siddiq yang dirangkum oleh KH. Muchit Muzadi, cetakan ke III Des 2005; dan Pemikiran KH. Achmad Siddiq tentang Aqidah, Syariah, dan Tasawuf Khittah NU 26, oleh Choirul Anam, cetakan ke II Feb 2010), sebagai berikut:

1. Dasar Keagamaan

1. Aqidah, NU mengikuti Ahlussunnah Wal Jama'ah (Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Manshur al-Maturidzi);
2. Fiqih, NU mengikuti jalan pendekatan (*al-madzhab*) salah satu dari 4 madzhab, yakni Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal;
3. Tasawuf, mengikuti Imam al-Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali.

2. Sikap Kemasyarakatan

a. *Tawassuth wal-I'tidal*, yakni prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan bersama;
b. *Tasaamuh*, toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, *furu'* atau masalah *khilafiyah*, dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan;
c. *Tawaazun*, seimbang dalam berkhidmah. Khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang;
d. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, yakni kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

3. Perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan kemasyarakatan, yakni:

a. Menjunjung tinggi nilai dan norma ajaran Islam;
b. Mendahulukan kepentingan bersama dari pada pribadi;
c. Menjunjung tinggi keikhlasan dan berhidmat dalam berjuang;
d. Menjalin persaudaraan;
e. Meluhurkan kemuliaan moral (*as-shidq*);
f. Loyalitas kepada bangsa dan negara;
g. Berprestasi sebagai bagian dari ibadah;
h. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan;
i. Menyesuaikan dalam setiap perubahan untuk kemaslahatan;
j. Memelopori kerja perubahan dalam kebersamaan.

4. Ikhtiar yang dilakukan:

a. Silaturahim/komunikasi/ relasi antar ulama;
b. Peningkatan bidang keilmuan dan pendidikan;
c. Peningkatan penyiaran Islam;
d. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia: ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan)

5. Fungsi Organisasi dan Kepemimpinan

a. Dalam rangka kemaslahatan, NU membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu dengan fungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi terciptanya tujuan yang telah ditentukan, baik bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan;
b. Karena pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah *Jam'iyyah Diniyah* yang membawa faham keagamaan, maka Ulama sebagai mata rantai pembawa faham Islam Ahlussunnah wal-Jama'ah An-Nahdliyah, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing utama jalannya organisasi;
c. Untuk melaksanakan kegiatannya, NU menempatkan tenaga-tenaga berkeahlian khusus yang sesuai dengan bidangnya.

6. Kehidupan Bernegara

a. NU merupkan organisasi kemasyarakatan (masyarakat madani/*civil society*) yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia;
b. NU senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan Nasional Bangsa Indonesia;
c. NU secara sadar mengambil posisi aktif dalam proses

perjuangan mencapai dan memperjuangkan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945;

d. Keberadaan NU senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Ulama dan segenap warganya selalu aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah SWT. Oleh karenanya, setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warga Negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

7. Pandangan Berpolitik

a. Bagi NU yang sudah kembali menjadi organisasi sosial keagamaam dan kemasyarakatan, politik hanya sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kemaslahatan bangsa dan negara;

b. Politik yang dipraktikkan NU secara struktural adalah politik kebangsaan, politik keumatan, politik kerakyatakan, dan politik yang penuh dengan etika, bukan politik praktis yang berorientasi kekuasaan semata dengan menghalalkan semua cara.

Untuk lebih mempertegas pandangan dan perilaku berpolitik warga Nahdlatul Ulama tersebut di atas, berikut uraian ringkas Sembilan (9) Pedoman Berpolitik NU.

Ketika kembali ke Khittah 1926, NU tidak lagi menjadi partai politik atau bagian dari partai politik dan tidak terikat oleh partai politik manapun. Akibatnya, masyarakat para jama'ah yang sebelumnya cara berpolitiknya ditentukan oleh pimpinan pusat partai dan adanya perubahan politik dari stelsel kelompok atau organisasi menjadi stelsel individual, pada umumnya mereka mengalami kebingungan. Untuk itu, NU merasa perlu memberi

petunjuk/pedoman agar warganya tetap menggunakan hak politik secara benar dan bertangung jawab.

Karena itulah, lima tahun setelah keputusan Muktamar Situbondo 1984, Muktamar NU di Yogyakarta 28 November 1989, merumuskan pedoman berpolitik bagi warga Nahdliyin dengan menekankan *akhlaqul karimah*, baik berupa etika sosial maupun norma politik, sbb:

1. Keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Politik berwawasan kebangsaan menuju integrasi bangsa yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
3. Pengembangan nilai-nilai kemerdekaaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
6. Dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal-Jamaah An-Nahdliyah.

7. Dengan dalih apapun perilaku berpolitik NU tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecahbelah persatuan.
8. Perbedan pandangan di antara aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, *tawadlu'* dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
9. Menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisiasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Pengembalian NU ke kode etik Khittah 26, dirintis oleh Tim 7 (Tujuh) sebagai kristalisasi dari Majlis 24 (Dua Empat), selama satu tahun 1983, menjelang Mu'tamar XXVII Situbondo 1984. Semangat tersebut didorong atas keberdaan NU yang terlalu jauh masuk ke relung-relung politik praktis, baik NU sebagai entitas partai politik maupun kemudian bergabungnya dengan PPP. Keterlibatan di dunia politik telah membawa NU melupakan jati dirinya sebagai entitas masyarakat madani yang bergerak di bidang pengembangan kesejahteraan kemasyarakatan aspek amal ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Maklumat pendirian Komite Khittah NU (KKNU) dimaklumatkan kepada publik pertama kali pada tanggal 28 Oktober 2018 jam 12.00 di Pesantren Tebuireng, tepatnya di teras Rumah Kasepuhan pendiri NU, Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari. Deklarasi dibacakan oleh Saudara Choirul Anam didampingi KH. Salahudin Wahid dan KH. Hasib Wahab Chasbullah, berisi tiga pokok keprihatinan dan kepedulian;

Pertama, bahwa, PBNU periode ini dinilai telah melakukan kesalahan di dalam mengelola *jam'iyah* Nahdlatul Ulama, dalam hal: a) Pembelokan aqidah Aswaja, yakni pembiaran terhadap Syiah dan Islam Liberal; b) Mengubah NU *Ashhabul Haq wal A'dl* menjadi *Ashabul Qoror*; c) Menetapkan Khittah 26 NU dapat dirubah sesuai keperluannya, serta; d) Terjebaknya NU dalam pusaran politik uang (Kesimpulan Tebuireng, 2020);

Kedua, bahwa, dengan berserah diri kepada Allah, kami para dzuriyah muassis NU, KH. Salahudin Wahid dari pesantren Tebuireng dan KH. Hasib Wahab Hasbullah dari pesantren Tambak Beras, didukung para kiai yang hadir dalam ijtima' tgl 28 Oktober 2018 di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, menyatakan berdirinya Komite Khittah Nahdlatul Ulama (KKNU) sebagi gerakan moral untuk mengembalikan NU pada rel kesejatiannya;

Ketiga, KKNU menyatakan netral dalam Pilpres 2019, dan membebaskan para anggota dan pendukungnya secara pribadi menentukan pilihannya.

Komite Khittah, Pengertian, Sifat dan Prioritas Kerja

1. Mempergunakan sebutan KOMITE, setidaknya merupakan "*Tabarruk*an" ke Komite Hijaz, sebagai panitia kecil pendirian Nahdlatul Ulama.
2. Komite Khittah 26 Nahdlatul Ulama (KKNU) dibentuk oleh dan atas kesepakatan (37) *masyayih* dalam ijtima' kiai di Pesantren Tebuireng 28 Oktober 2018 yang diinisiasi *dzuriyah* pendiri NU yakni KH. Salahuddin Wahid dan KH. Hasib Wahab Chasbullah.
3. Memfokuskan keberadaan dan kegiatannya pada ikhtiar peneguhan dan pengamalkan nilai dan prinsip Khittah 26 di lingkungan jama'ah dan *jam'iyah* Nahdlatul Ulama.
4. Bersifat temporer (sementara) sebagai forum jaringan kultural bagi jama'ah dan para simpatisan Nahdlatul Ulama yang dikelola oleh kepanitian (kecil).

5. Merupakan gerakan moral non-politik dalam arti suatu perubahan yang dilakukan secara evolutif penyadaran, sistimatis, programatik dan masif (tapi tidak struktural) dalam suatu jaringan komunitas kiai dan pesantren yang terintegrasi dalam pengikatan diri, partisipasi, keswadayaan dan kerelawanan (*voluntary*).

Latar Belakang dan konteks

Pembentukan KKNU 26 dilatarbelakangi dan didorong sejumlah realitas yang merupakan keprihatinan sekaligus kepedulian para kiai kultural di pesantren, berupa, antara lain:

1. Semangat untuk menjadikan NU sebagai penghulu gerakan Islam rahmatan lil'alamin;
2. Pembelokan Aqidah Aswaja dengan pembiaaran Syi'ah dan Islam Liberal (catatan Ust. Hilmi Assiddiqy, Ponpes Al Hikam Depok);
3. PBNU dinilai kurang dan tidak istiqomah dalam mengelola *jam'iyah* dengan mengubah NU dari *Ashabul Haq wal 'Adl* menjadi *Ashabul Qoror*;
4. Terdapat indikasi semakin diingkarinya nilai dan prinsip Khittah '26 sebagai "kode etik" organisasi oleh sebagian jama'ah dan jam'iyah NU dan menjadikan Khittah 26 "*mutaghoyirah*";
5. NU struktural diindikasikan semakin terjebak dalam politik praktis dan politik uang (*abuse of power*);
6. Dirasakan kurang terwadahinya dan tersalurkannya khidmat, aspirasi, dan kepedulian sebagian jama'ah kultural oleh sistem kelembagaan formal dan struktural NU.

Menyadari realitas seperti di atas, maka mengemuka sejumlah pertimbangan sebagai berikut:

1. Para kiai komunitas pesantren adalah "juru kunci" dan "penjaga gawang" kelestarian dan keberlanjutan keberadaan,

bahkan dapat dikatakan "pemilik" kehadiran NU di Ibu Pertiwi Indonesia;

2. NU tanpa kiai dan pesantren bagaikan "pahatan di atas pasir", dalam arti hilang jika diterpa angin;
3. Semakin dirasakan terabaikannya upaya pembelaan dan pemberdayaan dalam kegiatan yang sistematis terprogram terhadap jama'ah yang masih dalam ketertinggalan;
4. Menipisnya rasa kepemilikan (*sense of belonging*), partisipasi dan keswadayaan jama'ah serta semakin menguatnya rasa acuh dan tidak pedulinya kiai pesantren beserta para jama'ah pendukungnya terhadap pengelolaan organisasi NU baik di pusat maupun sebagian daerah.

Dengan tetap berserah diri dan memohon ma'unah kepada Allah SWT, maka halaqah/ijtima' para Kiai tanggal 28 Oktober 2018, berketetapan hati membentuk Komite Khittah NU. Semangat dan kepedulian kembalinya NU ke rel "Khittah '26", pada garis besarnya berisikan himbauan dan dorongan kepada para pihak pemangku kepentingan, agar:

1. Organisasi NU harus dijalankan dan dikelola berdasarkan ketentuan Khittah '26 dan Anggaran Dasar yang ditetapkan;
2. Organisasi NU tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu;
3. NU harus dibebaskan dan diselamatkan dari berbagai kebiasaan dan cara dengan "politik uang";
4. Dihentikannya bentuk-bentuk kooptasi dan intrumentalisasi NU untuk manuver demi kepentingan kekuasaan baik oleh perorangan maupun kelompok.

Tujuan

Tujuan Umum: Meneguhkan Khittah 26 sebagai landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus

dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan (jama'ah) maupun organisasi (*jam'iyah*) serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Landasan tersebut adalah faham Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan dan kemasyarakatan.

Tujuan Khusus:

1. Kembalinya NU pada relnya, yakni Khittah 26 sebagai prinsip dasar dan kode etik bagi Jama'ah dan Jam'iyah.
2. Mengingatkan, menyadarkan, menegaskan, dan meneguhkan para pihak pemangku kepentingan, bahwa:

a. Khittah NU 26 harus menjadi kode etik pengelolaan jam'iyah NU sebagai landasan berfikir, bersikap dan bertindak.
b. Faham Islam Ahlussunnah wal-Jama'ah An-Nahdliyah harus diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan dan kemasyarakatan.

Pola Kegiatan

1. KKNU merupakan gerakan moral untuk mengingatkan, menyadarkan, menegaskan, menegakkan dan meneguhkan para pihak akan adanya kode etik berjam'iyah yang dilakukan secara masif tidak struktural dalam suatu jaringan yang terintegrasi, dilandasi adanya pengikatan diri (komitmen), kemandirian, keswadayaan, partisipasi dan kerelawanan (*voluntary*).
2. Menjadikan Pesantren Tebuireng sebagai "miqot" gerakan KKNU bersama Pesantren Tambak Beras, Jombang dan Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo, Jawa Timur.

Strategi dan Kerja Prioritas

Ikhtiar dan Amalan KKNU Terdiri dari 3 Himmah Strategi:

1. Indoktrinasi Aswaja dalam proses pemahaman dan pencerahan.

2. Difusi/penyebarserapan untuk internalisasi nilai dan prinsip Khittah 26 menjadi perilaku bagi pengelolaan *jam'iyah*.
3. Refleksi untuk muhasabah dan dialog saling mengingatkan dalam kebajikan.

Strategi Pertama:

Meneguhkan Islam Aswaja An-nahdliyah sebagai, doktrin kokoh yang mengikat bagi jama'ah dan *jam'iyah* NU.

Rencana Kerja Prioritas:

1. Halaqah reguler realisasi prinsip Aswaja sebagai nilai dasar Islam kebangsaan dan basis peradaban Indonesia.
2. Dialog interaktif menjaga keutuhan Islam Aswaja An-Nahdliyah dari berbagai pengaruh ajaran lain.
3. Ijtima' rutin untuk menjadikan ranting (desa) sebagai basis amalan keagamaan (tahlilan, sholawatan, yasinan, dzibaan, manakiban dan amalan wirid lainnya) serta gerakan amal saleh (sosial, pendidikan, ekonomi, lingkungan) jamaah NU.
4. Gerakan dakwah yang dimotori kiai dan ulama untuk menjadikan Islam Rahmatan lil'Alamin.

Strategi Kedua:

Menyebarserapkan nilai dan prinsip Khittah NU sebagai pedoman keagamaan dan kemasyarakatan bagi jama'ah dan pengelolaan *jam'iyah*.

Rencana Kerja Prioritas:

1. Menyelenggarakan ijtima' khususiyah untuk merealisasikan Khittah 26 NU menjadi amalan kegiatan bagi jama'ah di semua tingkatan (Anak Ranting, Ranting, MWC , Cabang, Wilayah).
2. Menyusun Buku Panduan "Unjuk Ajar Aswaja" di pesantren dan madrasah.

3. Menerbitkan Jurnal Khittah 26 NU
4. Membuat website Khittah 26 NU.

Strategi Ketiga:

Memastikan pengelolaan KKNU bersifat non-formal dalam semangat jaringan untuk implementasi Khittah 26.

Rencana Kerja Prioritas:

1. Menetapkan tim/kelompok kerja pengelola KKNU (terdiri dari coordinator (ketua), sekretaris, bendahara dan bidang-bidang).
2. Membentuk "simpul jaringan" KKNU berbasis pesantren di beberapa daerah sesuai kebutuhan.
3. Menyelenggarakan halaqah managemen jam'iyah Khittah 26 NU.
4. Menyusun dan mengirimkan risalah tabayun dan muhasabah kepada para pihak terkait atas pelanggaran terhadap Khittah 26 NU.
5. Membuka dialog interaktif dengan para pihak untuk kebaikan dan kemajuan NU.

Ikhtiar KKNU untuk Kemaslahatan NU

1. Refleksi kritis. Dalam pertemuan pertama para kiai di Tebuireng tgl 24 Oktober 2018 dan pertemuan kedua tanggal 8 Nov 2018 di pesantren Tambak Beras, dapat ditarik kesimpulan mengapa Komite ini diperlukan pendirannya. Dari buku "Kesimpulan Tebuireng" terbit 1 Maret 2020, terdapat 5 (lima) perpektif sebagai realitas yang melatarbelakanginya:
   a. Bersifat mendasar, yakni "pembelokan" terhadap aqidah Ahlis Sunnah wal-Jama'ah (Aswaja), dengan pembiaran terhadap faham Syiah dan Islam Liberal di dalam tubuh organisasi;

b. Posisi Khittah 26, yakni menjadikan Khittah *mutagoyyiroh*, dalam arti bersifat kondisional yang dapat dirubah kapan saja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
c. PBNU dinilai tidak istiqomah dan kurang tumu'ninah dalam mengelola *jam'iyah*, dengan mengubah Nahdlatul Ulama sebagai *Ashabul Haq* menjadi *Ashabul Qoror*;
d. NU diindikasikan dalam kendali dan sekaligus menjadi intrumen salah satu partai politik:
e. Pengelolaan organisasi NU sering terjebak dalam pusaran politik uang.

Ke lima aspek tersebut dinilai merupakan penyimpangan mendasar yang benar-benar mencederai kesejatian NU dan Khittahnya.

2. Silaturrahmi dan Sosialosasi
   a. Kepada para Kiai Khos dan sesepuh NU untuk mensosialisasikan keberadaan KKNU. Prof. KH. Tholhah Hasan (alm) adalah sesepuh NU yang pertama kali dan sangat mendukung atas berdirinya KKNU-26, bahkan almarhum hadir dan memberikan tausiyah pada halaqah ke III para kiai di Pasuruan. Dilanjutkan dengan dukungan *Allahumagfir lahu* KH. Maemun Zubair yang diwujudkan dengan menyarankan untuk diselenggarakannya halaqah IV di Pesantren An-Nur Lasem, Jawa Tengah. Almarhum tidak sempat hadir karena ada acara keluarga di Solo.
   b. Dengan PBNU. Di awal keberadaan KKNU, KH. Salahudin Wahid, bersama KH. Abdullah Muchit dan penulis, membuka pintu dialog dengan Rois 'am KH. Miftahul Akhyar bersama timnya. Dialog pertama lebih menginformasikan latar belakang dan tujuan berdirnya KKNU. Dengan maksud, jangan sampai ihtiar peneguhan

Khittah 26 ini disalahfahami. Sedangkan pertemuan kedua tgl 2 Desember 2018, lebih dikhususkan untuk memposisikan kesejatian Khittah 26 dalam pengelolaan NU dan pengikatan diri para pengurus terhadapnya. Kami berharap bahwa pokok bahasan dalam dialog dalam dua kali silaturahmi tersebut dapat dikomunikasikan dengan pengurus PBNU lainnya. Kami menunggu akan tindak lanjutnya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Penulisngnya, dialog interkatif yang diharapkan menjadi forum solutif ini tidak memperoleh perhatian dan respons keberlanjutannya.

c. Dialog dengan Bapak H. Jusuf Kala pada tgl 12 Desember 2019. Kami berempat (KH. Salahudin, Prof. dr. Umar Basalim (Rektor Unas), Abdullah Syarwani (Dubes Lebanon) dan penulis sendiri menyampaikan keberadaan, tujuan dan kegiatan KKNU. Dalam pertemuan tersebut diangkat; a) NU harus perlu jarak dengan partai politik; b) Pejabat di PBNU harus mengerti, memahami dan melaksanakan Khittah 26 beserta Anggaran Dasarnya; c) Masa bakti PBNU harus dibatasi, cukup dua periode. Reformasi berhasil menetapkan dua periode masa tugas presiden, masak NU akan memberi contoh lebih dari itu; d) Pengalaman pelaksanaan Mu'tamar di Makasar yang dikendalikan penguasa dan beraroma politik uang serta mu'tamar Jombang yang semrawut tidak boleh terulang lagi.

d. Dialog dengan para aktifis NU yang sudah merasa dibesarkan dan sangat berhutang budi kepada organisasi kiai pesantren yang didirikan KH Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah. Mereka adalah para duta besar (H. Cholid Mawardi, Abdullah Syarwani, Tosari Widjaya,

Chozin Khumaedi), akademisi (Prof. dr. Umar Basalim, mantan Rektor Universitas Nasional), Prof. dr. Endang Turmudzi (peneliti senior LIPI), Khariri Makmun (aktifis International Conference of Islamic Scholars/ICIS)), Ust. Hilmi Assidiqy (Pesantren Alhikam Depok), Idi Muzayad (KPI) dan pejabat tinggi negara. Mereka sengaja minta bertemu dan betdiskusi pada tgl 7 Desember 2019 di Jl Pejuangan 24, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Setelah memperoleh penjelasan cukup dari KH. Salahudin Wahid, mereka sangat setuju dan akan join merealisasikan tujuan KKNU untuk keberlanjutan NU dan kesejahteraan jama'ahnya.

3. Ngaji Khittah 26 NU

Menyebarserapkan Khittah 26 dan memahamkan substansinya kepada para pemangku kepentingan NU, baik itu pengurus jam'iyah, jama'ah maupun simpatisan. Kegiatan ini kemudian populer disebut "Ngaji Khittah NU" di sejumlah halaqah para kiai. Sampai dengan Januari 2020, halaqah "Ngaji Khittah NU" diselenggarakan secara swadaya di 12 pesantren dan daerah, dihadiri kurang lebih 1.500 kiai. Halaqah I di Tebuireng, dilanjutkan di pesantren Tambak Beras, halaqah III di Tashfirul Afkar Surabaya, dilanjutkan di Pesantren An-Nur Lasem, di Pasuruan, di Bandung, di Pesantren Darun Najah, Jakarta, di Pesantren Tebuireng VIII Serang, Banten, di Pekalongan, di Krapyak Jogjakarta dan di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Situbondo.

Halaqah para kiai ke 12 diselenggarakan di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah pada tanggal 21 November 2019. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo kembali menjadi saksi penting dalam penegakan Khittah Nahdlatul Ulama (NU). 35 tahun lalu, di pesantren ini pula keputusan penting kembali ke Khitthah 1926 ditetapkan.

Silaturrahim ini menghasilkan sembilan rumusan penting, sebagai berikut:

a. Sebagai prinsip pergerakan dan pengabdian, khittah NU secara substantif sejatinya sudah digariskan oleh Hadratussyeikh Kiai Haji Hasyim Asya'ri, yakni kembali pada garis perjuangan para ulama salafussholihin, sebagaimana doa yang biasa kita panjatkan kepada Allah SWT. Untuk itu, khitthah sebagai garis perjuangan perlu diaktualisasikan dalam rangka *jam'iyah diniyah wa ijtima'iyah*.
b. Melalui gerakan kultural ini, majelis silaturrahim mengajak kepada semua warga Nahdlatul Ulama untuk selalu melakukan muhasabah terhadap fenomena ke-NU-an yang terjadi selama ini. Tindakan koreksi diri ini menjadi penting dijalankan, karena tidak ada kesempurnaan dalam hidup setiap manusia. Selain prinsip ini, kita semua juga memiliki kepedulian dan keberpihakan kepada jamiyah NU agar menjalankan organisasi sebagai sarana ibadah perjuangan dan pengabdian kepada Allah SWT. Jangan jadikan organisasi NU sebagai alat untuk memuluskan kepentingan pragmatis pribadi dengan menjauhkan prinsip perjuangan yang telah dibangun oleh para *muassis* Nahdlatul Ulama.
c. Niat tulus dan ikhlas dalam memperjuangkan NU, hanya mengharap target keridhoan Allah SWT. Jika ada di antara kita, baik yang menjadi pengurus maupun tidak, melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan garis perjuangan NU, maka, tegurlah dengan benar dan sabar, sebagaimana prinsip *watawa shaubil haq watawa shaubish shabr*.
d. Permusyawaratan dalam tubuh NU sebagai *jam'iyah* harus mendasarkan pada prinsip dan nilai-nilai yang dibangun para muassis NU. Untuk mengembalikan prinsip-prinsip permusyawaratan dalam setiap penyelenggaraan

permusyawaratan di berbagai tingkatan, agar tidak menggunakan cara-cara yang tidak terpuji, seperti mempengaruhi musyawirin dengan politik uang. Fenomena politik uang di setiap hajatan organisasi, tentu tidak berjalan secara tunggal, ada keterlibatan pihak lain yang ingin memanfaatkan NU secara poragmatis. Jika ini masih terjadi dan terus dipertontonkan para pengurus, kami khawatir NU akan kehilangan wibawa dan kharismanya sebagai *jam'iyah diniyah wa ijtima'iyah*.

e. Forum meminta kepada PBNU agar melakukan kerja koreksi dan seleksi terhadap penyimpangan-penyimpangan akidah, karena ada dugaan penyusupan terhadap penyimpangan akidah yang tidak sejalan dengan akidah dan prinsip-prinsip Ahlussunannah wal-Jama'ah di tubuh jam'iyah Nahdlatul Ulama
f. Kepada seluruh warga NU yang berperan dalam politik dan penyelenggaran pemerintahan, tetap istiqomah memperjuangkan amanah NU, sehingga NU tidak hanya dijadikan alat perebutan kekuasaan, tetapi harus bermanfaat secara umum, *maslahah amah*.
g. Perlu memperkuat fungsi kelembagaan mustasyar di jam'iyah Nahdlatul Ulama sehingga apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan kepengurusan, seharusnya mendapat teguran dan sanksi oleh seluruh anggota mustasyar.
h. PBNU hendaknya mengelola NU menjadi *jam'iyyah ashabul haq wal 'adl* jangan mengubah menjadi *jam'iyah ashabul qoror*.
i. Menghimbau kepada seluruh warga nahdliyyin agar selalu istiqomah membaca wirid Ya Jabbar Ya Qahhar.

Dalam kegiatan halaqah di 12 daerah dan pesantren inilah para kiai dan aktifis NU benar-benar diharapkan dapat memahami kesejatian esensi dan pentingnya Khittah 26 dalam batang tubuh organisasi NU.

Agenda pokok pada setiap halaqah adalah:

a. Penjelasan tentang KKNU oleh KH. Salahudin Wahid;
b. Penayangan video tausiyah KH. Tholhah Hasan dan KH. Hasyim Muzadi, berisi pesan moral tentang perlu dan pentingnya pelaksanaan Khittah 26 di dalam pengelolaan organisasi.
c. Para peserta halaqah mendialogkan kesejatian Khittah 26 NU yang terurai dalam 7 (tujuh) prinsip dan kode etik dan bagaimana para fungsionaris *jam'iyah* mentaati dan mengimplementasikan dalam kehidupan organisasi. Pokok-pokok prinsip tersebut terurai dalam : a) Dasar keagamaan, mencakup Aqidah, Fiqih, dan Tasawuf; b) Sikap Kemasyarakatan, mencakup *tawassuth wal-I'tidal* (moderat dan berkeadilan), *tasamuh* (toleran) terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, *furu'* atau masalah khilafiyah, dalam kemasyarakatan dan kebudayaan; *tawazun*, seimbang dalam berkhidmah. Khidmat kepada Allah SWT, khidmat kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. dan amar ma'ruf nahi munkar; c) Perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan kemasyarakatan; d) Ikhtiar yang dilakukan mencakup silaturahim/komunikasi/relasi antarulama, peningkatan bidang keilmuan dan pendidikan, peningkatan penyiaran Islam, peningkatan taraf dan kualitas hidup; e) Fungsi organisasi dan kepemimpinan; f) Kehidupan bernegara; dan g) Pandangan Politik; mencakup: bagi NU yang sudah kembali menjadi organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan, politik hanya instrumen mencapai tujuan kemaslahatan bangsa dan negara; dan politik yang dipraktikkan NU secara struktural adalah politik kebangsaan, politik keumatan, politik kerakyatakan, dan politik yang penuh dengan etika, bukan politik praktis yang berorientasi kekuasaan semata dengan menghalalkan semua cara.

4. Lokakarya secara periodik untuk merefleksikan dan menyimpulkan beberapa isu yang sedang berkembang.

Dalam rangka merefleksikan perjalanan KK 26, pada tgl 7-8 Agustus 2019 Komite Khittah menyelenggarakan Lokakarya dengan pokok bahasan "Peneguhan Khittah 26", di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, sebagai "*miqot*" kembalinya NU ke relnya. Lokakarya terbatas, diikuti 70 orang peserta, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Setelah mengamati dan menelaah dengan seksama berbagai aspek keberadaan NU selama 3 tahun terakhir ini, maka dengan ikhlas dan berserah diri kepada Allah SWT, para peserta menyimpulkan dan merumuskan sejumlah rekomendasi serta beberapa program aksi sebagai berikut:

a. Bahwa Khittah 26 merupakan landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Landasan tersebut terurai secara jelas di dalam haluan Ahlus Sunnah wal-Jama'ah an-Nahdliyah. Oleh karena itu Komite Khittah menolak pernyataan dan sikap PBNU bahwa keberadaan Khittah 26 bersifat kondisional yang dapat berubah dan diubah sesuai keadaan dan kepentingannya.
b. Bahwa sejak berdirinya, keberadaan Nahdlatul Ulama merupakan kelompok entitas masyarakat madani (*civil society*) yang senantiasa secara konsisten melakukan pencerahan, pemberdayaan dan pembelaan (*advocacy*) kepada masyarakat serta penyadaran secara kritis-kontruktif kepada Pemerintah.
c. Bahwa pelaksanaan Muktamar 32 di Makasar dan 33 di Jombang telah diwarnai pelanggaran Khittah 26, yakni berupa tindakan tidak berakhlak mulia. Diharapkan dengan sungguh-sungguh, agar apa yang terjadi di Muktamar 32 dan 33 yang sangat melukai hati jama'ah dan mencederai kesejatian, prinsip

dan kode etik jam'iyah Nahdliyah, tidak terulang di Muktamar 34 yang akan datang.

d. Bahwa, dalam perjalanannya, PBNU periode 2015-2020 diindikasikan telah melakukan penyimpangan terhadap Khittah 26 dan pelanggaran berat terhadap AD/ART, antara lain dalam:
Domain ideologis (paham keagamaan) berupa:
- Mengganti sanad keilmuan dari Aswaja ke Mu'tazilah.
- Menjadikan kitab rujukan Mu'tazilah (*al-Qunyah*) sebagai rujukan dalam bahtsul masail (catatan Ust. Hilmi Assiddiqy).
- Menghilangkan Ijma' dan Qiyas sebagai sumber ajaran/ pemikiran yang kemudian diganti dengan akal dan realitas empirik (catatan Ust. Hilmi Assiddiqy).
- Penggunaan istilah Islam Nusantara yang menimbulkan kontroversi sumber pemecah belah jama'ah.
- Melegitimasi paham Syiah dan Islam Liberal.

Domain Politik, berupa:
- Mengubah paradigma politik keumatan (*Ashabul Haq*) menjadi paradigma politik kekuasaan (*Ashabul Qoror*).
- Menggunakan struktur NU di berbagai tingkatan sebagai instrumen politik peraih kekuasaan.
- Menjadikan politik uang sebagai wahana untuk meraih jabatan struktural di berbagai tingkatan di lingkungan pemerintahan maupun kelembagaan sosial ekonomi lainnya.
- Tidak responsif dan kurang reaktif terhadap isu komunisme dan marxisme serta investasi dari negara lain yang dinilai akan mengancam kedaulatan Indonesia.

Domain Organisasi, berupa:
- Perangkapan jabatan pengurus NU di partai politik maupun organisasi underbow partai politik di berbagai tingkatan.

- Penyalahgunaan otoritas pimpinan NU untuk membatalkan hasil permusyawaratan NU (konferwil dan konfercab).
- Menetapkan dan mengangkat fungsionaris NU tanpa dasar jenjang perkaderan dan kriteria ke NU-an.

e. Bahwa dengan niat *lillahi ta'ala* untuk kebaikan bersama di dalam rel *jam'iyah* NU, Komite Khittah perlu melakukan tabayun kepada Mustasyar PBNU tentang keadaan dan perkembangan NU serta kejelasan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengurusnya.

f. Bahwa peserta Lokakarya Tebuireng (7-8 Agustus 2019) yang mewakili aspirasi para peserta, 9 (sembilan) kali Halaqah "Ngaji Khittah" di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Jakarta, memberikan dukungan sepenuhnya terhadap langkah-langkah yang telah dan akan diambil Komite Khittah dalam semangat mengembalikan NU ke relnya.

Respon dan Tabayun

Hadirnya KKNU nyatanya menarik respons berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal Komite, bahkan dari para simpatisan NU dan pengamat, masyarakat madani maupun budayawan. Apabila dipetakan secara sederhana kelompok tersebut dapat diurai sebagai berikut:

Pertama, adalah para pihak yang memberikan dukungan penuh atas ikhtiar penyadaran dan peneguhan untuk ditaatinya Khittah NU sebagai kode etik di dalam menjalankan roda *jam'iyah*. Bahkan di antaranya merupakan pelaku sejarah kembalinya NU ke Khitah 26 itu sendiri. Mereka ini antara lain adalah:

1. KH. Tholhah Hasan (*Almaghfurlahu*) sebagai penggerak Majlis Dua empat (24) dan Tim Tujuh (7) kembalinya Khittah 26 menjelang Muktamar 27 di Situbondo 1984. Almarhum tidak hànya memberikan endorsemen terhadap KKNU tetapi ikut

mengawal jalannya kegiatan mengembalikan NU ke relnya melalui peneguhan Khittah 26. Bahkan dalam kondisi kurang sehat Almarhum menyempatkan hadir di Halaqah Ngaji Khittah ke-4 di Pasuruan, Jawa Timur.

2. KH. Achmad Hasyim Muzadi (*Almaghfurlahu*), Ketua PBNU 1999-2014, melalui pesan moralnya (dalam video) yang senantiasa diangkat dan ditegaskan oleh santri kesayangannya, yakni Ustadz Hilmi Assiddiqy. Berikut petikannya:
    a. Keharusan NU untuk kembali ke Khittah NU 1926 sebenarnya sudah diputuskan pada 1984 saat Muktamar NU di Situbondo. Putusan tersebut berisi: (i) Pemurnian dari unsur idelogi lain, sekaligus pengembangan manhaj tersebut guna mengakomodasi perkembangan zaman tanpa membongkar prinsip-prinsip dasar NU; (ii) Penetapan Pancasila sebagai dasar dan filosofi negara; (iii) Penetapan Ahlussunnah wal-Jamaah an-Nahdliyah sebagai akidah syariat; (iv) Politik NU adalah politik keumatan dan kebangsaan dalam menegakkan NKRI. Bukan politik kepartaian; (v) Kemandirian NU dari seluruh partai politik. NU membebaskan warganya untuk berpartai tetapi siapapun tidak boleh menjadikan *jam'iyah* NU sebagai entitas partai politik atau bagian dari sebuah partai politik. Apalagi mengatur mekanisme *jam'iyah* NU dengan aturan partai politik.
    b. Politik keumatan dan kebangsaan mengandung arti pengembangan sumber-sumber kekuatan masyarkat (*mabadi khoiru ummah*) sebagai bagian dari pengabdian terhadap agama dan bangsa kata almarhum DR. (HC) KH Ahmad Hasyim Muzadi, seperti dikutip dalam catatan "Khittah 1926 NU".

c. Menurut Kiai Hasyim, jika khittah NU 1926 ditinggalkan, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut: (i) NU akan disusupi oleh multi-ideologi yang mengakibatkan NU tidak bisa tegas sebagai organisasi Sunni, dan pengembangannya akan berjalan tanpa arah dalam konteks liberalisasi pemikiran agama dan pragmatisasi kepentingan. Dari sini, tidak ada kemurnian dan kemandirian; (ii) Saat ini Pancasila mulai redup karena belum sepenuhnya didukung oleh konstitusi dan aturan perundangan serta kebijakan teknis penyelengaraan negara. Secara ideoligis, Ahlussunnah wal-Jamaah an-Nahdliyah merupakan pilar pokok tegaknya Pancasila. Hal itu ditinjau dari hubungan syar'i antara agama dan negara. Kalau NU sendiri disusupi multi-ideologi, maka penegakan Pancasila pun akan terganggu; (iii) Apabila Khittah 26 ditinggalkan maka keluhuran, keagungan, serta penghormatan pihak lain terhadap NU akan menjadi pudar. Berganti dengan pragmatisme yang harganya semakin hari akan semakin murah; (iv) Kalau NU menjadi bagian dari partai politik maka wujud NU akan menjadi lebih kecil dari partai politik. Dan hal ini pernah terjadi semenjak tahun 1973-1984, di mana NU menjadi bagian dari PPP. Kala itu NU hanya bicara tentang DPR dan DPRD dalam suasana saling pertikaian, sehingga tugas-tugas amanat besar dari para pendiri NU di bidang kesejahteraan jama'ah aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan menjadi terbengkalai; (v) Pemisahan NU dan partai politik bukan berarti kita menghalagi para kader NU untuk berpolitik, lanjut Kiai Hasyim. Pemisahan tersebut adalah pemisahan struktural, sedangkan secara strategis suatu ketika bisa bertemu dalam kepentingan perjuangan;

(vi) Menurut Kiai Hasyim, secara nasional apabila kita meninggalkan khittah itu akan mengalami kesulitan untuk silaturahmi dengan ormas Islam yang lain, apalagi dengan

pemuka ormas-ormas Islam dan keagamaan yang lain; (vii) Pengaruh NU pada eksponen dan komponen nasional akan menjadi semakin rendah. Hal ini berpengaruh kepada eksistensi dan reputasi NU di dunia internasional; (viii) Pesantren dan para ulamanya adalah pemilik yang sah keberadaan NU. Oleh karenanya, pesantren dan ulamanya-lah yang paling berkepentingan untuk menyelamatkan dan mengembangkan NU.

d. Untuk menyandingkan agama dengan politik di dalam batang tubuh NU sebagai organisasi sosial-keagamaan, kiranya diperlukan perenungan tersendiri. Agama tidak bisa diunggah, diatur dan direkayasa oleh kekuatan politik apapun, manapun dan kapanpun. Agama tumbuh berkembang tidak dengan logika dan kekuatan kekuasaan, tetapi dengan logika hati dan kepercayaan. Daya tarik agama berbeda dengan daya tarik politik. Pemulyaan agama akan menyuburkan perikemanusiaan. Sedangkan penindasan terhadap agama justru akan dan sering menyuburkan gelora agama itu sendiri.

e. Agama memiliki vitalitas, daya hidup dan daya tarik yang sangat berbeda dengan syahwat politik praktis.

Daya serap, daya tahan dan daya dorong (*pushing and blocking power*) agama niscaya tersendiri dan khususi. Ia punya ritme, rasa dan *roso* (kekuatan dahsyat) menggelora. Kalau tidak di permukaan, agama akan bergerilya meretas dan merasuk di bawah urat nadi kesadaran akali. Getaran agama bak air mengalir terus, tenang dan damai, tak mudah dihalangi. Kalau dibendung dan dihadang akan selalu mencari jalan alternatif. Jika salah antisipasi , getaran pintu langit itu bisa mendadak menjelma menjadi arus dan gelombang menuju samudra kedamaian.

f. Dalam beragama perlu berpolitik, untuk membangun, merekonstruksi dan mengkonsolidasikan kekuatan agar nilai agama menjadi perilaku bermasyarakat dan berbangsa. Para politisi beridentitas agama, hendaknya jangan tutup mata dan telinga atas kesemrawutan masyaragkat. Berapa banyak sudah undang-undang yang Anda rumuskan dan tetapkan. Tetapi mengapa rakyat semakin kehilangan elan, simpati dan empati. Jangan-jangan kejujuran, kesantunan dan ketulusan telah diganti dan menjelma berupa perilku yang bertentangan dengan norma dan nilai agama itu sendiri.

g. Oleh karena itu, para kiai sepu senantiasa bertausiyah hati-hati dengan agama. Dia hanya minta para penganutnya untuk menghayati dan mencerahinya. Diresapi dan diakhlaki. Sekali-kali tidak untuk diperalat dan dikooptasi. Semata tidak untuk kepentingan duniawi. Agama adalah modal sosial interaksi maha dahsyat. Secara alami dan manusiawi. Bila benar cara mengakrabi, agama akan menjadi sumber mata air yang menyejukkan sanubari. Jika salah mensikapi tidak jarang dapat bermetamorfosa menjadi sumber api, memanaskan dan membakar diri.

Agama adalah naktar duniawi dan madu surgawi. Menjadi pemanis saat hidup ini terasa pahit. Menjadi embun penyejuk manakala hidup terasa panas di tengah kegersangan padang pasir. Dan menjadi bintang penunjuk bila hidup ini dalam kegelapan kehilangan arah.

3. Kiai sepuh kharismatik NU lainnya yang memberikan support tethadap ijtihad untuk tidak ditinggalkannya Khittah 26 oleh PBNU adalah KH. Maemun Zuber (*allahumagfir lahu*). Melalui santri seniornya, almarhum menyarankan agar pertemuan

para kiai dalam Halaqah Ngaji Khittah diselenggarakan juga di pesantren An-nur, Lasem, Rembang, Jawa Tengah.

Kedua, adalah para pihak internal yang berhasrat untuk "melegalkan" eksistensi KKNU. Maksud baik ini didasarkan pada: 1) Adanya kegiatan program KKNU yang telah diputuskan dan direkomendasikan dalam lokakarya para kiai; 2) Pelaksanaan kegiatan program yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana; 3) Agar segala urusan yang menyangkut formalitas dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Untuk maksud tersedianya daya dukung sarana, memang tidak terhindarkan. Tetapi perlu dicatat tersirat di pikiran dan hati para dzuriyah muassis NU serta para kiai sepuh, akan kekuatiran adanya "penyalah gunaan" untuk kepentingan tertentu, dan tidak mudahnya melakukan kontrol terhadap entitas legal-formal tersebut.

Sangat difahami dan disadari bahwa kelompok ini demikian prihatin terhadap keberadaan NU, utamanya perilaku para oknum pengurus di sejumlah tingkatan baik pusat dan daerah. Keprihatinan mereka ini "sudah sampai ke ubun-ubun". Mereka tidak rela kalau NU peninggalan para masyayih berjalan atas kemauan pengelolanya, tanpa memperhatikan aturan dan kode etik yang telah disepakati. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap Khittah 26 dan qonun asasi terus terjadi. Mereka ingin segera ada perubahan perbaikan dan penjernihan kembali. Dari ungkapan realitas yang sesugguhnya ditemui dan dirasakan tentang perilaku sebagian pejabat NU di daerah, memang sangat dirasakan. Tetapi tetap saja harus dimengerti dengan sepenuh hati, bahwa KKNU sekali lagi adalah gerakan moral dari dhuriyah pendiri dan para kiai yang prihatin atas berubahnya kesejatian NU dari *ashhabil haq* menjadi *ashhabil qoror.* Tetapi dengan jalan melegalkan KKNU menjadi institusi yang struktual tetap harus difikir ulang akan dampaknya.

Sekedar catatan pengingat. Selama berlangsungnya Mu'tamar 33 Jombang, mayoritas PWNU dan PCNU (catatan panitia di Tebuireng kurang-lebih ada 299), mereka tinggal di pesàntren Tebuireng. Sebagian besar dari mereka tidak berkenan dan memang tidak dapat hadir karena dipersulit dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh panitia untuk mengikuti persidangan. Nah, setelah penutupan Mu'tamar yang menurut mereka tidak amanah, mereka berkumpul di Aula lantai III gedung KH Yusuf Hayim. Mereka berikrar menyatakan sikap membentuk kepengurusan PBNU. Setelah mempertimbangkan akan adanya berbagai dampak dan konsekuensinya, dengan arif dan bijaksana KH. Hasyim Muzadi dan KH Salahudin Wahid menyatàkan ketidaksetujannya. Dengan berat hàti mereka berdua bersama para masyayih kiai tetap menjaga agar NU tidak pecah. NU harus tetap satu. Dan jangan sampai kita (PWNU-PCNU di Tebuireng) merupakan unsur dari perpecahan tersebut. Nah, di sinilah letak niat suci keberadaan KKNU adalah untuk mengingatkan dan menyadarkan para pengurus dan pengelolka NU di semua tingkatan.

Ketiga, adalah pihak ekternal yang tidak mengikuti latar belakang, dasar pemikiran dan keprihatinan dhuriyah dan para kiai pesantren yang masih kritis sebagài tanda kecintaan mereka terhadap kejernihan NU. Menstigmakan KKNU sebagai "New Khawarij" adalah sangat tidak beralasan dan "sembrono" sebagai lemparan beraroma politis yang menyeramkan. Semoga yang bersangkutan memahami betul apa yang dimaksud sebutan khawarij. Pertanyaan mendasar adalah kekerasan bentuk apa kiranya yang ditampilkan KKNU. Lebih-lebih kalau tuduhan "new Khawarij" itu dialamatkan kepada pesan moralnya KH. Maemun Zuber, KH. Tholhah Hasan dan KH. Achmad Hasyim Muzadi. Semula penulis menduka bahwa prediket tersebut dialamatkan kepada teman-teman yang berhasrat melembagakan secara struktural KKNU. Meskipun demikian, sebutan yang dipadankan dengan kelompok Khawarij, tetap saja menyakitkan.

Mengapa, karena para dhuriyah pendiri NU dan kiai perintis dan anggota KKNU tetap dan tidak keluar meninggalkan jam'iyah NU. Para kiai tentu faham betul perilaku kelompok Khawarij dalam sejarah Islam. Khawarij, seperti diketahui adalah kelompok ekstrem dan brutal yang dalam catatan sejarah dapat dipersonifikasikan kepada Abdrurahman Ibnu Muljam. Pembunuh keji Sayidina Ali. Kecuali memang yang bersangkutan bermaksud memercikkan bensin di atas bara dalam sekam. Dalam konteks ini, secara pribadi penulis sampaikan terima kasih kepada akhina Masud Adnan dan Muhlas Sarkum yang telah memberikan penjelasan dan klarifikasi panjang-lebar yang cukup jelas, baik dan seimbang. Semoga bisa difahami.

Keempat; adalah nahdliyin yang mendukung adanya koreksi terhadap perilaku pengelolaan kepengurusan *jam'iyah* dengan posisi mendua. Dalam arti "kaki kanan" di posisi KKNU tetap berada di gerakan moral dengan pendekàtan untuk mengingatkan dan menyadarkan, bersamaan dengan itu "kaki kiri" berada di KKNU yang perlu didaftarkan keberadaannya (harus legal). Posisi mendua ini ditempuh, karena pada dasarnya kelompok ke empat ini berpendàpat bahwa pelanggaran oknum PBNU sudah terlalu berat, menyangkut "*i'tiqodan, syar'an, manhajiyan wa 'amaliyan*". Dan untuk purifikasi dan pelurusannya kiranya diperlukan berbagai kaifiyah. Yang penting, harus dalam langkah-langkah berkeadaban, komunikatif dalam dialog interaktikf yang transparan dan tidak semakin membingungkan jama'ah dan umat.

Kelima, adalah para akademisi, budayawan dan aktifis lembaga swadaya masyarakat. Dari komunikasi berupa pertanyaan dan pernyataan yang diangkat, pada umumnya mereka menyayangkan terhadap realitas pengelolaan NU dan respek terhadap keprihatinan serta kepedulian kiai kultural yang kritis konstruktif. Yang menarik dan perlu dicatat baik-baik oleh para pihak pemangku kepentingan adalah penegasannya bahwa, NU tanpa kiai kultural dari pesantren,

organisasi Islam terbesar di Indonesia ini tiada arti, kecuali hanya untuk kepentingan sesaat beberapa orang dan kelompok kecil. Kalau yang diandalkan adalah kekuasaan, perlu disadari bahwa jabatan apapun (di eksekutif/pemerintahan, legislatif, perusahaan, BUMN) ada batas waktu dan pasti akan redup entitasnya. Pada intinya, mereka budayawan dan penggerak lembaga swadaya masyarakat bersyukur, masih ada di antara anggota dan warga suatu ormas Islam seperti NU yang menyampaikan peringatan terhadap cara kerja pengelolaan organisasinya. Seharusnya para pejabat dan pengelola utamanya di lingkungan kepengurusan di pusat dan daerah berterima kasih dan membuka dialog interaktif untuk klarifikasi dan menemukan solusi dengan penuh hikmah, arif dan bijaksana. Sebenarnya, pihak KKNU sudah bersilaturahmi dan membuka dialog dengan Rois Syuriyah tapi nampaknya tidak dianggap penting dan tidak kunjung tindak lanjutnya. Mereka para budayawan penuh keyakinan, bahwa para kiai kultural tidak ada maksud apa-apa dengan kritik dan peringatannya kecuali demi perbaikan jam'iyah untuk kemaslahatan jama'ah.

Respon dan Tabayun

Sebagai penutup naskah ini, berikut disampaikan sumbangan pemikiran berupa saran:

1. Menata perubahan. Tiada yang abadi kecuali perubahan. Tentu saja perubahan yang dimaksud adalah *man kana yaumuhu khoiron min amsihi*, perubahan ke arah yang lebih baik. Kini, NU sudah eksis menjelang satu abad pertama 1926-2026. Disamping jumlah jama'ahnya yang cukup besar, modal sosial NU juga tidaklah kecil. Adalah tanggung jawab dan tugas kita semua untuk mengantarkan NU memasuki abad ke dua 2026-2126. Suatu babakan masa yang kita tidak tahu persis keadaannya. Akan tetapi, di penghujung abad ini saja dunia

(termasuk Indonesia tercinta) sudah diwarnai oleh *three forms of disasters*, yakni kerusakan mental (ahlak), kehancuran lingkungan dan keretakan sosial (Felix Guitar 2000). Dalam konteks ini, NU memiliki tanggung jawab dan tugas yang tidak kecil, yakni menghadirkan nilai-nilai Islam (*qimatul Islam*) Aswaja sebagai isi, substansi dan ruh perubahan. Para pemangku jam'iyah ini di masa mendatang nanti (2026-20126), pastilah anak-cucu generasi mendatang. Sungguh berat tanggung jawab mereka. Tidak ada cara lain tugas pokok kita semua kecuali membekali mereka dengan uswatun hasanah berupa patos, yakni nilai Islami kebangsaan yang membangkitkan dan menyentuh emosi kehidupan. Logos, yakni analisis berdasar pada bukti dan realitas rasional yang diterima akal sehat oleh siapapun. Dan ketiga, bersifat ethos, yakni berujung pada suatu kegiatan solutif berdasar pada nilai-nilai yang dipatuhi bersama sebagai bukti etis yang menggerakkan adanya perubahan dalam perbaikan.

2. Merawat daya tahan. Seberapa banyak organisasi masa yang lahir dan besar, tetapi lambat-laun menurun dan akhirnya menghilang dari peredaran. NU memiliki landasan eksistensional kuat, yakni islam Aswaja sebagai "sokoguru Islam kebangsaan". Dan soko guru ini dipeluk dan dianut oleh puluhan juta jama'ah anggota pengikut setianya. Masalahanya adalah, bagaimana sokoguru ini tetap tegak dan teguh dalam menghadapi tiga tantangan tersebut di atas di melinium ke III ini. Tersedia pendekatan untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman keberadaan NU sebagai organisasi, yang harus dan perlu menjadi perhatian para pengelolanya: a) Berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh jama'ah. Dalam arti "produksi" daya hasil, yakni tingkat keterlibatan dan

pengerahan sumberdaya untuk tercapainya tujuan organisasi di bidang keberagamaan (moralitas Islam) dan kemasyarakatan (kesejahteraan bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan); b) Pengelolaan organisasi melalui mekanisme yang ditetapkan, yakni tingkat pengerahan sumberdaya untuk menjamin bahwa semua pekerjaan organisasi berjalan lancar dan tertib berdasarkan khittah dan anggaran dasar yang ditetapkan; c) Kewirausahaan Sosial (*Social enterpreneurship*), yakni tingkat keterlibatan dan pengerahan sumberdaya untuk melahirkan gagasan-gagasan kreatif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan anggotanya; dan d) Integrasi, yakni tingkat pengerahan dan keterlibatan sumberdaya untuk menjamin tumbuhnya rasa kepemilikan dan suasana dimana para anggota/jama'ah merasa aman dan diakui peran dan jasa-jasanya.

3. Jangan hadap-hadapkan dikotomi NU kultural dan struktural. Kalau yang dimaksud NU struktural adalah para pengelola jam'iyah yakni PBNU-PWNU-PCNU dan seterusnya, dan NU kultural adalah para kiai di pesantren dan jama'ah yang tidak menjabat di kepengurusan organisasi, itu adalah kelaziman terjadi di organisasi manapun. Tetapi penulis tidak tahu siapa yang mulai mengangkat dokotomi dan pembelahan ini di ruang publik dan apa maksudnya. Jangan-jangan sebutan klaster ini muncul secara alami di bawah kesadaran masing-masing pihak. Dikotomi ini tendengar sayup-sayup pasca Mu'tamar Makasar dan semakin menggema di permukaan pada pasca Mu'tamar Jombang. Apabila diamati, akar masalahnya adalah terletak pada proses Mu'tamar sebagai "*kaflah*nya" para kiai dan pesantren ini yang diwarnai aroma di luar akhlakul karimah. Dan dampaknya hampir saja masuk di ranah hukum. Ini kontoversi bukan kepalang dalam perjalanan organisasi himpunan para

ulama. Bagaimana tidak. Antara yang mengurus yakni para pengeloa organisasi terjebak di "persimpangan jalan" dengan yang diurus. Ganjalan berikutnya, adalah bagaimana Ormas himpunan para ulama ini menjawab pertanyaan publik tentang harapkan berperansertanya secara aktif di dalam pemecahan masalah kenegaraan dan kebangsaan yang semakin demikian rumit, sementara menyelesaikan persoalan internal saja yang sudah terpendam selama hampir sepuluh tahun tidak kunjung terlihat tanda-tanda solusinya. Untuk itu, tidak bisa tidak, suka atau tidak suka, cepat maupun lambat perlu ditemukan formula jalan sutra untuk menitik-temukan belahan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kuncinya adalah dialog para pihak dari hati-kehati.

4. Buka pintu dialog. Mengembangkan jam'iyah NU melalui dua penomena di atas yakni menata perubahan dengan merawat daya tahan tersebut memang tidaklah mudah. Tetapi Islam telah menyediakan "jalan sutra" berupa "syuro" melalui dialog. Kalau forum dialog dari hati ke hati untuk rekonsiliasi antara PBNU dan KKNU ini terwujud (penulis berharap dan senantiasa berdoa), maka materi utama dialog yang mendesak perlu dihadirkan di atas meja antara lain: a) Program lima tahun kejuangan NU 2021-2026 sebagai bagian dari Peta Jalan (*Road Map/Long range Strategic Plans and Directions*) NU menuju Abad ke II 2026-2126 ; b) Mempersiapkan Mu'tamar 34 (2021) yang penuh kemandirian dan berkeadaban sebagai kaflah besarnya kiai dan ulama pemilik NU. Dialog titik-temu lintas "kultural dan struktural" harus merupakan pertemuan ramah yang memungkinkan para pamangku kepentingan untuk menyentuh diksi dan topik yang dekat dengan hati (*dialogue cross clusters, cordial meeting that allowed them to touch on topics close to their hearts*), pesan Raja Abdullah Arab Saudi. Ketika

manusia adalah hatinya, dialog yang mengubah dan menjanjikan perubahan tata keagamaan, keumatan dan kebangsaan adalah dialog dari hati ke hati. Sejak tata Islam kebangsaan (pemikiran Gus Dur selama 1996/1997 menjelang pendirian Partai Kebangkitan Bangsa/ PKB) dipondasikan pada prinsip-prinsip fenomenologis kehidupan Syaikh KH. Hasyim Asya'ari dan KH. Wahab Hasbullah, pengalaman manusiawi para pejuang NU, kehidupan kiai dan jama'ah NU beserta rakyat Indonesia akan bergeser ajaib kepada dialogalisasi, kolaborasi dan koeksistensi. *Jami'yah* dan jama'ah NU yang dalam format *societas dialogal*, merupakan cita-cita sekaligus melukiskan sebuah karakter keakraban humanis tata hidup bersama manusia yang kodratnya memang plural. Angin perubahan di NU itu bernama: dialog. Perlu benar-benar disadari. bahwa tata kelola organisasi seperti NU tak bisa diselesaikan dengan kekuatan kekuasaan, tetapi berdasar pada karakteristik dialogal-kolaboratif. ❖

Bersama
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir

Bersama
Emha Ainun Najib
dan **Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak**

Bersama
Gus Baha
AQUA

Bab III

SALAHUDDIN WAHID DI MATA KERABAT DAN SAHABAT

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Gus Sholah yang Bersahaja dan Terbuka

Prof. Dr. Abdul Mu'ti
Sekretaris Umum PP. Muhammadiyah

SUATU siang saya mendapatkan pesan WA dari Pak Haedar, ketua umum PP. Muhammadiyah, bahwa Gus Sholah sedang dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita. Saat itu kebetulan saya sedang berada di luar Jakarta. Dalam perjalanan pulang dari bandara, saya ingin sekalian mampir. Kebetulan lokasi Rumah Sakit Harapan Kita satu arah menuju kantor PP. Muhammadiyah. Akan tetapi, saya tidak dapat besuk Gus Sholah. Salah seorang keluarga yang saya hubungi menyampaikan bahwa Gus Sholah belum bisa dibesuk dan hanya bisa ditemui oleh keluarga inti. Saya putuskan untuk langsung pulang dan berencana besuk esok hari. Belum sempat besuk, saya mendapatkan kabar bahwa Gus Sholah wafat. *Inna lillahi wainna ilaihi rajiun.*

Saya merasa sedih dan sangat kehilangan. Saya yakin tidak sendirian. Berjuta-juta masyarakat Indonesia merasakan duka cita yang mendalam. Mangkatnya Gus Sholah adalah kehilangan yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam dan warga Nahdlatul Ulama.

Terakhir saya bersama Gus Sholah pasca Pilpres 2019. Sebagai seorang negarawan, Gus Sholah sangat khawatir dengan polarisasi politik yang berpotensi merusak persatuan bangsa. Saya juga merasakan kekhawatiran yang sama. Dan, benar saja, sampai saat

ini polarisasi itu masih ada. Permusuhan belum pupus, bahkan ketika Pak Prabowo menjasi menteri pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju.

Tidak ada seorangpun yang meragukan merah-putih Gus Sholah. Kecintaannya kepada Indonesia membuatnya tak pernah lelah melangkah menemui berbagai pihak. Gerak fisiknya memang lambat, tapi gagasan dan pikirannya cepat dan trengginas. Dalam kondisi sakit dan fisik yang ringkih, Gus Sholah tetap produktif menulis. Tulisan terakhirnya tentang NU dan Indonesia sempat saya baca di salah satu koran nasional. Inilah salah satu di antara sekian banyak kehebatan Gus Sholah.

Gus Sholah adalah sosok yang bersahaja. Walaupun seorang tokoh besar berdarah biru NU, Gus Sholah tidak pernah menjaga jarak dengan siapa saja. Walaupun jarang tertawa terbahak, Gus Sholah adalah seorang pribadi yang hangat. Perbedaan organisasi dan usia tidak membuat jarak antara saya dan Gus Sholah. Usia Gus Sholah sebaya dengan almarhum ayah saya. Secara usia, saya pantas disebut anak. Gus Sholah adalah tokoh NU dan saya sekretaris umum PP. Muhammadiyah.

Gus Sholah tidak pernah melihat Muhammadiyah sebagai lawan atau pesaing NU. Di mata Gus Sholah, Muhammadiyah dan NU adalah mitra dan saudara seperjuangan. Bahkan, tidak sedikit tokoh Muhammadiyah dan NU yang merupakan kerabat dekat. Sudah bukan rahasia bagaimana persahabatan KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asyari. Keduanya adalah santri Kiai Saleh Darat, seorang ulama ahli hisab di Kampung Darat, Semarang. Demikian pula ketika belajar di Mekah. KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari adalah saudara seperguruan. Di antara keduanya banyak terdapat kesamaan pandangan keagamaan. Keduanya banyak membaca dan terpengaruh Tafsir Al-Manar karya Syeikh Muhammad Abduh dan Syeikh Rasyid Ridha. Keduanya juga menggunakan ilmu falak dalam

penetapan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan penentuan waktu-waktu shalat fardlu.

Kedekatan KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari itulah yang mendorong Gus Sholah dan Pak Syukrianto AR memproduksi film bersama. Film itu sudah selesai diproduksi. Saya sempat bicara dengan Gus Sholah untuk nonton bersama dan *soft launching* di PP. Muhammadiyah. Sedih sekali, sebelum acara peluncuran film Gus Sholah sudah menghadap Sang Khalik, Tuhan Yang Maha Hidup yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Film itu memang tidak diputar di bioskop. Sejak awal, film diproduksi sebagai film rakyat yang tujuan utama untuk merajut ukhuwah umat, khususnya antara warga Muhammadiyah dan Nahdliyin. Beberapa acara nonton bersama diselenggarakan di daerah sukses besar. Film itu mampu mencairkan kebekuan hubungan dan kekakuan komunikasi Muhammadiyah dan NU.

Lebih dari itu, Gus Sholah adalah jembatan dan mediator Muhammadiyah dan NU yang dalam kasus tertentu mengalami ketegangan. Kebijakan full day school (FDS) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan penolakan keras dari sebagian masyarakat, termasuk dari kalangan NU yang khawatir bahwa FDS akan mematikan Madrasah Diniyyah yang sebagian besar dikelola warga NU. Mendikbud Muhajir Effendi adalah tokoh dan salah seorang ketua PP. Muhammadiyah. Ketegangan hubungan Muhammadiyah dan NU di akar rumput tidak dapat terhindarkan.

Gus Sholah sangat gelisah dengan keadaan itu. Oleh karenanya, ketika saya minta menjadi narasumber Pengajian Bulanan PP. Muhammadiyah tentang FDS, Gus Sholah sangat antusias. Di hadapan jamaah pengajian yang memenuhi aula Gedung Pusat Dakwah dan pemirsa televisi Muhammadiyah (TVMU), Gus Sholah menyampaikan tiga poin penting yang melegakan warga Muhammadiyah.

Pertama, Gus Sholah menyatakan mendukung kebijakan FDS sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Kedua, bahwa sekolah di Tebuireng juga sudah memberlakukan FDS. Ketiga, sekolah Tebuireng diselenggarakan Trensain, sebuah model pendidikan yang dikembangkan Dr. Agus Purwanto, seorang tokoh intelektual Muhammadiyah. Di hadapan warga Persyarikatan Muhammadiyah Gus Sholah mengatakan bahwa dirinya tidak segan dan malu belajar kepada Muhammadiyah. Pernyataan Gus Sholah itu disambut dengan gemuruh tepuk tangan jamaah pengajian.

Saya tahu persis, Gus Sholah tidak sedang *mujamalah* (basa basi). Seperti halnya Gus Dur, Gus Sholah adalah figur yang terbuka dan melintas batas. Walaupun sempat masuk dunia politik dan menjadi calon wakil presiden, Gus Sholah bukanlah seorang politisi. Karena itu, kedekatan personal dan kelembagaan dengan Muhammadiyah bukan merupakan bagian dari agenda politik. Membangun hubungan dan kerjasama yang baik antara Muhammadiyah dan NU adalah bagian dari cita-cita besarnya merajut persatuan umat dan bangsa sebagai modal memajukan bangsa dan negara.

Dari Gus Sholah saya banyak belajar bagaimana hidup sederhana di tengah gempita kehidupan yang hedonistik. Bagaimana hidup bersahaja walaupun memiliki banyak alasan untuk berbangga-bangga. Kepada Gus Sholah ingin saya katakan bahwa warga Muhammadiyah sangat mencintai dan mengagumi ketulusannya membangun kerukunan yang sejati. Inilah salah satu di antara sekian banyak legasi Gus Sholah yang bisa kita warisi.

Selamat jalan Gus Sholah. Beristirahatlah dengan tenang di sorga, di sisi Allah Tuhan yang sangat engkau rindukan. *Insya Allah* kami akan melanjutkan perjuanganmu. ❖

Gus Sholah
Sang Teknokrat NU

Dr. Ali Masykur Musa
Ketua Umum PP Ikatan Sarjana NU

SAYA meyakini tidak ada satupun aktivis NU, bahkan juga keluarga besar NU yang tidak mengenal garis keturunan pendiri NU mulai dari KH. Hasyim Asy'ari, KH. A. Wahid Hasyim, dan selanjut Gus Dur dan Gus Sholah, serta saudara-saudaranya lainnya. Dzuriyah dengan mata rantai itu menjadi mata pelajaran dan mata kuliah, meski tidak diwajibkan akan dipelajari oleh seluruh pengurus dan aktivis NU dari Pengurus Anak Ranting sampai dengan Pengurus Besar NU. Dzuriyah pendiri NU itu adalah oase pemikiran dan kaca benggala yang menjadi rujukan para orang tua-orang tua NU dalam mendidik anaknya. Oase itu akan terus mengalir jernih, dan kaca benggala itu akan terus dibersihkan melalui lantunan doa dan kiriman surat Al-Fatehah di bilik-bilik pesantren, langgar, masjid, dan ritual *ubudiyah* Aswaja semisal maulidan, manaqiban, yasinan, dan ziarah kubur. Semua dzuriyah pendiri NU selalu terhormat dengan segala karakter, pendidikan dan profesinya.

Gus Sholah, begitu para aktivis memanggilnya, seperti halnya saya. Begitu masuk PMII pada tahun 1981 di Rayon Fakultas Sospol Univeritas Negeri Jember, saya di 'dongengkan' satu nama aktivis PMII dari ITB yang peserta MAPABA diarahkan agar memiliki ideal tipe yang bernama Gus Sholah. Betapa tidak, meski saya berlatar belakang pendidikan agama, tapi karena saya kuliah di

PTN umum, maka idola yang dikenalkan adalah toloh seperti Gus Sholah yang aktivis PMII ITB, tentu juga tokoh Gus Dur Sang Pemikir dan Pendobrak Kemapanan. Saat itu saya berpikir, hebatnya ya Gus Sholah di tengah-tengah minoritas masih bertahan dalam mengembangkan PMII di ITB. Hal ini mengispirasi saya agar terus berjuang mengembang PMII di Fakultas Sospol Unej tempat saya kuliah. Dalam benak saya, PMII harus eksis di PTN umum untuk menyongsong kebangkitan NU agar mampu memimpin negeri di kemudian hari.

Suka Diskusi

Meski secara struktural saya tidak masuk dalam struktur kepengurusan Forum Indonesia Satu (PIS), namun saya aktif ikut diskusi-diskusi yang dilaksanakan. Di situlah Gus Sholah selalu hadir menyampaikan pikiran-pikiran besarnya tentang kenegaraan, kebangsaan dan keagamaan. Dalam pandangan saya, Gus Sholah adalah sedikit dari tokoh NU yang mampu menyampaikan masalah besar negara Indonesia secara komprehensif.

Gus Sholah memiliki pola pandang yang runtut dalam menyampaikan gagasan-gagasanya yang memenuhi *logical framework* yang *ajeg*, tidak meloncat-loncat. Jadi andaikan direkam, maka rekaman itu manakala ditranskrip sudah bisa menjadi tulisan yang runtut dan bisa dipahami alur pikiran besarnya. Karena itulah tidak heran jika Gus Sholah dinilai sebagai sedikit dari tokoh NU yang mampu menulis di media massa, bahkan amal jariyah dalam bentuk buku pun banyak kita dapati di toko buku atau lewat e-book.

Salah satu yang kuat dari pemikiran Gus Sholah adalah mampu mengurai hubungan Islam dan negara yang tidak saling diperhadapkan. Islam dan negara adalah mutual simbiotik yang saling mencerahkan. Gus Sholah memaparkan bahwa gerakan Islam mempunyai konstribusi yang besar bagi lahirnya NKRI sejak jaman

penjajahan maun jaman perjuangan kemerdekaan. Jadi, gerakan Islam itu dilakukan oleh hampir seluruh organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam dan lain sebagainya. Oleh karena itu Gus Sholah sangat aktif menggalakkan ukhuwah Islamiyah. Misalnya, Gus Sholah sangat aktif di ICMI, di saat banyak orang NU tidak menyukainya, seperti ditunjukkan oleh Gus Dur, Sang Kakak.

Sang Cawapres

Mengejutkan? iya dan tidak. Iya, karena saat itu sesungguhnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai terbesar ketiga seharusnya bisa mencalonkan Capres dan Cawapresnya sendiri. Tapi PKB waktu itu memutuskan mencalonkan Gus Sholah menjadi Cawapres yang berpasangan dengan Pak Wiranto dari Partai Golkar setelah memenangi konvensi. Saat itu deklarasi dilaksanakan di Hotel Shangri la. Keputusan Gus Dur dan PKB untuk menentukan Gus Sholah sebagai Cawapres sungguh sangat cepat dengan mengedepankan semangat relegius-nasionalis yang mempersonifikasikan PKB-Golkar,

Jadi, Gus Sholah adalah figur netral nonpartai yang direkrut oleh partai politik di generasi awal untuk menjadi Cawapres. Pola seperti ini akhirnya diikuti oleh tokoh-tokoh nasional nonpartai politik seperti Presiden RI sekarang ini, Ir. Joko Widodo. Gus Sholah adalah figur profesional yang bisa diterima oleh semua kalangan karena pandangan politiknya yang inklusif dan berpandangan luas.

Dalam berbagai kampanye saya mendampingi Gus Sholah Bersama Pak Wiranto, salah satunya ke Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan, dan Bangka. Karena mewakan waktu yang lama dalam penerbangan, saya diajak diskusi dalam berbagai hal tentang kenegaraan dan keagamaan. Hasil diskusi itu dijadikan pointers bahan kampanye berikutnya. Gus Sholah memaparkan pokok-pokok

pikirannya dan tim kampanye membahasnya. Walhasil, Gus Sholah adalah tokoh yang mau mendengar masukan orang lain sebagai upaya untuk meningkatkan wawasannya.

Dalam hal komunikasi politik, meski suara Gus Sholah tidak keras seperti halnya Juru Kampanye Pemilu pada umumnya, namun Gus Sholah mampu mampu berdialog dengan audien dan konstituen secara timbal balik. Gus Sholah memang bukan orator, tetapi Gus Sholah adalah penyampai pesan/komunikator yang mudah untuk diterima para pendengarnya/komunikan sehingga pesan dan isi kampanyenya sampai dan bisa diterima.

ISNU harus Ekspansi

Beberapa kali saya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarja Nahdlatul Ulama (ISNU) bertemu Gus Sholah di Jakarta atau ke Pesantren Tebuireng di mana Gus Sholah sebagai pengasuhnya. Tiga hal yang dipesankan Gus Sholah kepada saya dan ISNU. Pertama, kepada saya, Gus Sholah memesankan agar saya tidak hanya menjadi Ketua Umum ISNU belaka, tetapi saya di minta agar kepemimpinan saya bisa diterima dalam dunia pemikiran di berbagai organisasi intelektual.

Kedua, kepada komunitas organiasi intelektual ISNU jangan hanya menggeluti ilmu-ilmu keagaamaan belaka. Gus Sholah berpesan agar ISNU mampu mempersiapkan intelektual dari berbagai ilmu pengetahuan, khususnya ilmu eksakta dan umum. Masyarakat sudah dan terus berubah, ISNU harus mampu menjadi lokomotif pemikiran di lingkungan NU. Karena itulah, kami dari ISNU mengkoordinir para pemikir-pemikir atau intelektual NU baik yang bergelar akdemik Guru Besar dari berbagai ilmu yang sekarang telah 694, bahkan terus bertambah, belum lagi lulusan S2 dan S3 yang sudah sangat banyak; juga pemikir NU yang tidak memiliki gelar formal terus menjadi tempat bagi ISNU untuk menimba ilmu pengetahuan.

Ketiga, Gus Sholah menyarankan agar ISNU tidak hanya berkutat di Perguruan Tinggi Agama Islam saja, tetapi harus ekspansi ke Perguruan Tinggi Umum. Walhasil, *alhamdulillah* hampir seluruh PTU di Indonesia sudah banyak tokoh intelektualnya menjadi pengurus ISNU, bahkan sampai sekarang ini telah 21 PTU, rektornya di pimpin oleh kader NU melalui ISNU.

Akhirnya, saya menyimpulkan Gus Sholah adalah Sang Teknokrat NU yang terasa sekarang ini dan sampai kapan pun untuk merekayasa kader NU agar bisa menjadi pencerah bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. ❖

Pemikiran Gus Sholah: NU Sebagai Model *Civil Society*

Ali Zawawi, MA.
Sekretaris Yayasan Saifuddin Zuhri

KIAI Salahuddin Wahid atau Gus Sholah punya silsilah darah biru dalam geneologi NU. Beliau adalah cucu pendiri NU Hadratussyaikh Mahakiai Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Namun demikian kehadirannya di NU tidak mengikuti garis keturunan, mendadak jadi NU, tetapi melalui pertimbangan yang matang. Walaupun hadir belakangan, penguasaan terhadap NU tidak diragukan. Gus Sholah paham betul apakah NU, kelebihan dan tantangannya serta peran strategis yang diemban sejak jauh sebelum Indonesia merdeka hingga masa kontemporer.

Bagaimana konstruksi pemikiran Gus Sholah tentang NU dalam konteks Islam dan Indonesia. Ada banyak sekali buku dan tulisan tentang NU yang tersiar di berbagai media massa. Namun tulisan yang memotret NU secara lengkap dan komprehensif tidak banyak. Satu yang menarik adalah tulisan yang dibuatnya tahun 2002 yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul "Menggagas Peran Politik NU". Kala itu Gus Sholah merespon gemuruh politik NU pasca reformasi 1998 dan peristiwa dilengserkannya Gus Dur sebagai Presiden melalui Sidang Istimewa MPR 2001. Dalam tulisan ini dirujuk pula tulisan beliau yang terakhir Refleksi 74 Tahun NU yang dimuat di harian Kompas (27/01/2020) lima hari sebelum wafat (2/2/2020).

Membaca karya Gus Sholah yang satu ini kita merasakan seolah beliau hadir dalam kesadaran kolektif kita sebagai warga NU. Gus Sholah dengan lembut menasehatkan bagaimana kita berjuang membesarkan NU tanpa harus mengorbankannya. Tersaji 5 bab. Mulai dari pendahuluan, acuan bagi kegiatan politik NU, kiprah politik NU, tantangan terkini, hingga peran politik NU yang ideal. Dalam tulisan ini hanya empat hal yang akan kita telaah yang merefleksikan sosok pemikiran Gus Sholah.

Menjaga Tradisi Khittah NU 1926

Apa acuan kegiatan politik NU. Biasanya hanya anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan hasil-hasil keputusan resmi di bawahnya. Bagi Gus Sholah hal itu tidak cukup. Sejarah perjuangan bangsa dan negara harus juga dijadikan acuan. Sejarah dimaksud adalah kehadiran NU dalam membangun hubungan agama dengan negara, hubungan Islam dengan Pancasila, serta hubungan NU dan partai politik. Semua dokumen resmi itu harus dijadikan acuan bagi kegiatan politik NU.

Bagian terpenting dari pemikiran Gus Sholah adalah penegakan Khittah NU dan sembilan pedoman berpolitik warga NU. Reformasi telah mengubah tatanan kehidupan bernegara lebih demokratis. Keran demokrasi telah dibuka lebar, kebebasan berekspresi tidak lagi dikekang. Banyak tokoh ambil bagian dengan mendirikan partai politik untuk ikut merayakan demokrasi lokal maupun nasional. Tidak ketinggalan Gus Sholah, dengan partai yang didirikan bersama kawan-kawan, seperti Pak Ud atau KH. Yusuf Hasyim, KH. Asnawi Latief, dan KH. Saifullah Ma'shum, juga siap bertarung menjajal sistem pemilu liberal yang segera digelar.

Di sinilah untuk pertama kali khittah NU diuji. Kita telah menyaksikan begitu hebat kebijakan NU kembali ke khittah 1926, kembali kepada jati dirinya sebagai *jam'iyah diniyah* yang tidak

terlibat dalam politik praktis. NU dengan berani berperan di garda depan menjadi simbol perlawanan terhadap berhala otoritarianisme. Tetapi memasuki periode reformasi, marak penilaian bahwa kebijakan itu tak lebih sekadar langkah taktis yang sengaja dibuat untuk elit berburu kekuasaan.

Ketika melihat kenyataan bahwa banyak elit NU melanggar ketentuan jaga jarak politik yang diatur dalam Khittah NU dan pedoman berpolitik warga NU, Gus Sholah menyerukan perlunya netralitas NU. Dalam ranah politik praktis, NU harus mampu menjadi wasit dalam setiap kontestasi politik. Karena itu NU harus legowo untuk tidak jadi pemain. Secara formal organisatoris NU harus menjaga jarak yang sama terhadap semua partai politik.

Gus Sholah melihat pentingnya digaungkan kembali semangat berjuang di jalur netral secara murni dan konsekuen di kalangan nahdliyin-nahdliyat, struktural-kultural di segala level. NU harus tetap menjadi kekuatan *civil society* yang kuat dan disegani. Karena itu Gus Sholah konsisten menolak gagasan khittah plus, baik yang diusung pada dekade 80-an maupun yang muncul belakangan, yakni NU sebagai ashabul qarar yang dilontarkan oleh Kiai Said Aqil Siraj. Sayangnya Gus Sholah belum sempat membahas. Beliau hanya minta supaya ide itu dibahas dalam Muktamar yang tak kunjung terlaksana karena pandemi covid-19.

"Pendapat dan sikap PBNU bahwa NU adalah *ashabul qoror*, bukan *ashabul haq*, harus dibahas dalam muktamar. Masalah ini amat mendasar dan menentukan masa depan NU, bahkan masa depan Indonesia," bunyi tulisan terakhir Gus Sholah seolah berwasiat kepada generasi penerus.

Yang menarik, cara Gus Sholah menghitung masa jeda NU berpolitik. Kebanyakan kita menghitung periode NU lepas dari politik praktis dimulai dari 1984 saat NU mertobat dari politik praktis sampai sekarang, karena memang belum ada satupun keputusan

resmi yang mencabut. Tapi bagi Gus Sholah tidak seperti itu. Beliau menghitungnya mulai dari 1984 hanya sampai 1998 saja, saat tokoh NU mendirikan PKB. Jadi NU lepas dari keterlibatan politik praktis, menurut beliau, pada periode 1984-1998, hanya 14 tahun saja. Tidak ada yang tahu apakah beliau hendak marah atau jengkel dengan mengungkapkan hal itu. Yang jelas, jejak NU sebagai partai politik selama 32 tahun (1952-1984) tidak mudah dihapus bekasnya. Para elit NU begitu mudah tergiur dalam gegap gempita politik seraya abai dengan penegakan disiplin khittah organisasi.

Mempertemukan Perbedaan

Hal lainnya yang menarik diberi catatan adalah cara Gus Sholah mengambil sikap dalam menghadapi perbedaan. Gus Sholah bergerak fleksibel, tidak mengikuti salah satu kerangka kerja ideologi tertentu. Ketika terjadi polemik tentang formalisme Islam yang membuat umat terbelah dalam dua golongan, Gus Sholah tidak ngeblok atau memihak kepada salah satunya. Tidak kepada pengusung formalisme Islam, juga tidak kepada mereka yang emoh sama sekali dengan formalisasi Islam alias sekuler.

Gus Sholah memilih jalan tengah berdasarkan pertimbangan obyektif dan rasional. Beliau setuju syariah Islam secara terbatas, cukup hanya yang dibutuhkan dan diterima secara politik dan budaya, bukan secara total seperti tokoh-tokoh Masyumi yang mengusung Islam sebagai dasar negara. Di sinilah mula-mula munculnya stereotip untuk Gus Sholah sebagai 'neo masyumi' karena dianggap seideologi dalam memperjuangkan syariah Islam. Uniknya sikap Gus Sholah itu dalam waktu bersamaan dianggap anti formalisme Islam yang tengah ngetrend kala itu di kalangan PBNU dan kelompok Gusdurian. Padahal sebenarnya tidak demikian. Gus Sholah menentang keduanya!

Gus Sholah begitu cermat memahami sejarah. Menurut beliau umat Islam telah terbukti dalam sejarah mengalami kegagalan berkali-kali dalam perjuangan menjadikan Indonesia sebagai negara berdasar Islam. Mengusung Islam tidak harus melulu pada level dasar negara atau undang-undang dasar. Ada saatnya strategi harus diubah dan "dosis" perjuangan harus diturunkan. Perjuangan umat Islam cukup pada level peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi negara. Pada level ini peluang justru terbentang luas, aspirasi umat Islam bisa masuk dalam beragam peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah bahkan sampai level peraturan desa sekalipun. Pandangan Gus Sholah inilah kelak justru menjadi dominan. Sewaktu pertama kali melontarkan gagasan tersebut, beliau baru bisa menyebut satu undang-undang saja, yaitu UU Perkawinan (1974) berkat perjuangan para kiai NU di PPP, sekarang banyak sekali undang-undang dan perda bernuansa syariah yang telah diundangkan. Bahkan sampai ada yang menilai kebablasan!

Untuk penegakan Khittah NU, Gus Sholah memandang perlunya PBNU dan struktur NU merangkul serta memanfaatkan potensi semua warga NU yang berada di berbagai partai politik. Gus Sholah mengusulkan PBNU memiliki Komisi Politik yang berfungsi memfasilitasi kerja sama antar warga NU yang berada di berbagai partai politik. Hal ini sudah menjadi niscaya sebagai upaya nyata meminimalisir konflik di antara sesama warga NU dengan latar belakang partai yang berbeda. Komisi ini akan lebih dapat diharapkan memaksimalkan kerjasama yang sinergis antar warga NU.

Tantangan Terberat

Selain kurangnya kesadaran akan mekanisme organisasi sesuai ketentuan AD/ART dan budaya berorganisasi yang belum mantap, tantangan terberat yang dihadapi NU adalah perbedaan yang tak

kunjung teratasi dalam ranah pemikiran keagamaan dan politik sehingga berdampak pada konflik internal warga NU.

Gus Sholah menjawab tuntas masalah perbedaan pandangan yang dahulu sempat membelah bangsa dalam dua golongan, nasionalis sekuler dan nasionalis religius. Ketika perbedaan dirasakan juga membelah warga NU dalam PPP dan PKB, Gus Sholah tampil dengan gagasan perlunya membangun aliansi partai berbasis massa NU itu yang dimulai dengan persamaan persepsi dan platform perjuangan.

Piagam Jakarta itu bukanlah suatu tujuan tetapi cara menuju tujuan. Apa tujuannya. Tujuannya ialah berlakunya syari'at Islam di dalam kehidupan masyarakat yang berarti sesuai dengan tujuan organisasi NU seperti tercantum dalam Pasal (5) Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama. Pandangan NU itulah yang sering disebut dengan istilah nasionalisme religius, yang tidak mempertentangkan kebangsaan dengan

keagamaan, tidak mempertentngkan keindonesiaan dengan keislaman.

Gus Sholah menolak pilihan negara Islam seperti Iran dan negara sekuler seperti Turki, sebaliknya memilih cara Indonesia seperti yang sudah kita jalani selama ini, yaitu menerima syari'at Islam secara terbatas di level undang-undang dan tidak lagi mempersoalkan syariat Islam pada level dasar negara atau undang-undang dasar.

Namun hingga Gus Sholah wafat, gagasan mulia membangun aliansi politik itu tak kunjung terwujud. Karena kedua pihak masih bersikukuh dengan pandangan masing-masing. PPP berasas Islam, sedang PKB berasas Pancasila, PPP memperjuangkan Piagam Jakarta dan PKB menentang Piagam Jakarta, PPP menentang Presiden wanita sedang PKB tidak, dan seterusnya. Sementara PBNU yang diharapkan dapat menjembatani perbedaan tersebut tak kunjung bertindak, bahkan sepertinya cenderung membiarkan salah satu

partai berbasis warganya itu mengecil dengan sendirinya seraya menganakemaskan yang lain.

Tawaran Solusi

Gus Sholah memberikan pertimbangan dan langkah penting bagi pematangan politik NU. Ketika menyatakan bahwa NU kembali kepada Khittah 1926, salah satu gagasan utamanya ialah menjauhkan NU dari kehidupan politik praktis. Oleh karena itu PBNU harus terus menerus menjelaskan dan memberikan contoh konsistensi menjalankan Khittah NU 1926 dan sembilan pedoman berpolitik warga NU.

Secara struktural dan kultural, warga NU harus menyadari bahwa NU merupakan bagian penting bagi penguatan civil society. NU harus menjadi model masyarakat sipil yang kuat dan disegani. Masyarakat sipil yang kuat merupakan prasyarat bagi negara yang maju. Peran politik tidak melulu melalui partai politik dan kekuasaan, meskipun keduanya tetap penting.

NU harus membina tradisi dan budaya berorganisasi yang sehat, mengacu pada AD/ART organisasi dan dokumen historis perjuangan NU, termasuk di dalamnya menciptakan sistem pengkaderan yang terarah, berjenjang dan terpadu. Meskipun perbedaan pandangan sudah biasa dalam kultur NU, namun perlu ditumbuhkan tradisi kritik internal yang sehat dan bertanggungjawab.

Struktur NU, di manapun dan di tingkat apapun, dapat menjauh dari peran sebagai perantara atau makelar politik. Kalau NU mempunyai kader yang baik, kader itu dapat diperjuangkan melalui warga NU yang berada di berbagai partai dan di lembaga eksekutif untuk meniti karir yang diminati.

Gus Sholah mengharap ulama NU betul-betul dapat menjadi kekuatan moral yang bebas dari kepentingan politik sesaat. Struktur NU menjadi semacam wasit dalam permainan politik di tingkat

nasional maupun lokal. Ulama NU harus dapat menjadi uswatun hasanah atau teladan yang baik. Seperti juga kaum profesional, ulama bukan hanya bermakna keilmuan tetapi juga, bahkan yang terpenting, makna moralitas.

Gus Sholah memandang perlu mempersatukan dan meningkatkan kekuatan politik NU melalui penggalangan perwakilan warga NU di parlemen baik tingkat nasional maupun tingkat daerah serta lembaga eksekutif dan yudikatif. Hal itu disadari bahwa pengalaman pemilu selalu menunjukkan kekuatan massa NU tidak bisa dikonversi menjadi kekuatan politik yang linier dengan jumlah warganya. Kekuatan politik ditentukan oleh jumlah anggota DPR/DPRD, posisi strategis di lembaga eksekutif serta birokrasi pemerintahan.

Untuk mewujudkan kerjasama semacam itu di tengah maraknya pragmatisme dan politik transaksional di kalangan partai politik, Gus Sholah berharap PBNU berperan, baik secara langsung maupun melalui apa yang beliau namakan Komisi Politik.

Gus Sholah minta ajaran yang dianut NU, yakni Ahlussunnah wal-Jama'ah (aswaja) an-nahdliyah diperluas. *Pertama*, aswaja dalam bidang politik. NU ikut merumuskan Pembukaan UUD 1945. NU adalah pelopor dalam menerima Pancasila pada Muktamar 1984. NU ikut berjuang dalam ikhtiar mendirikan Departemen Agama pada 1946. *Kedua*, aswaja dalam bidang ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam aswaja harus terus dikembangkan untuk memperkuat aswaja keagamaan yang sudah mapan. ❖

Gerakan Antipolitisi Busuk

Romo Benny Soesatyo
Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP

AKTIVIS, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan komponen bangsa lainnya menyerukan gerakan antipolitisi busuk. Gerakan ini bahkan sudah menyebar ke mana-mana.

Gerakan yang dimotori LSM dan tokoh-tokoh masyarakat ini bukan sekadar wacana. Mereka yang masuk kategori politisi busuk diumumkan segera dalam bentuk nama-nama. Dengan berbagai risikonya, gerakan moral seperti ini bagaikan cahaya lilin di kegelapan. Prinsipnya, ketidakpercayaan atas reformasi yang dijalankan secara kacau oleh semua politisi yang mengaku dirinya reformis, tetapi turut korupsi.

Sekarang kita masih menemukan banyak politisi tipikal di atas. Sebagian dari mereka bahkan terlibat dalam skandal korupsi skala besar. Tidaklah mengherankan bila masyarakat skeptis luar biasa. Politisi yang seharusnya menjadi teladan ternyata perilakunya merugikan dan memalukan.

Maka, perlu kiranya kita membangkitkan kembali gerakan antipolitisi busuk agar masyarakat sadar bahwa politisi harus ikut bertanggung jawab terhadap gagalnya bangsa ini membangun sistem pemerintahan bersih dan dipercaya rakyat.

Merusak Sistem

Rusaknya sistem kebangsaan hampir secara menyeluruh ini bukan semata-mata kesalahan elite meski mereka menjadi pelaku

utama. Namun, masyarakat juga andil karena lupa mengontrol perilaku busuk elit.

Politisi busuk telah gagal membangun sistem pemerintahan yang berpihak pada masyarakat miskin. Anggota Dewan umumnya bukan berusaha menyejahterakan masyarakat miskin, melainkan justru menjadi budak pemilik modal.

Secara teoretis, negara beserta perangkatnya terbentuk atas dasar kesepakatan-kesepakatan untuk memerintah dan diperintah: antara penguasa dan rakyatnya. Keduanya terlibat kontrak sosial berupa kesepakatan mengenai bagaimana negara ini dikelola, oleh siapa, dan bagaimana caranya. Ini dasar-dasar pembentukan negara demokratis sebagaimana disemangati Jean Jacques Rousseau, Montesquieu, dan John Locke.

Namun, secara nyata, teori kontrak sosial itu tidak pernah menguntungkan rakyat. Justru rakyat sebagai kelompok mayoritas menjadi obyek yang dikuasai penguasa yang berjumlah minoritas. Dalam negara demokrasi, rakyat secara teoretis adalah subyek, tetapi secara nyata menjadi obyek. Wakil rakyat justru menjadi simbol kejahatan politik.

Jika elite busuk tidak diberantas, baik yang menjadi wakil rakyat maupun pemimpin bangsa, percayalah bangsa ini akan segera masuk jurang kehancuran. Mereka akan mengelola bangsa dan negara demi keuntungan pribadi tanpa mengindahkan aspirasi masyarakat.

Penguasa asyik bekerja dalam gelimang kemewahan dan demi itu siap berjibaku dalam pelbagai konflik perebutan lahan jabatan basah. Nama "rakyat" memang dimunculkan dalam konteks pengambilan kebijakan, tetapi hanya sebagai pemanis.

Kegagalan mereka menjalankan amanat penderitaan rakyat seharusnya menjadi pelajaran bangsa kita. Karier politik mereka yang sekarang duduk di Dewan terhormat dan otoritas pemerintahan harus

segera diakhiri. Caranya melalui perjuangan rakyat secara kolektif melawan korupsi. Kedaulatan harus dikembalikan kepada rakyat.

Para politikus meneken kontrak untuk menjalankan roda pemerintahan sebaik-baiknya. Karena terbukti gagal membawa bangsa ini ke arah kesejahteraan, mereka perlu segera kita akhiri kontraknya.

Indonesia Kembali Menangis

Di tengah maraknya politisi busuk, Indonesia kian menangis ketika Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH. Salahuddin Wahid atau yang akrab disapa Gus Sholah tutup usia pada Minggu 2 Februari 2020. Gus Sholah berpulang di usia 77 tahun karena sakit yang dideritanya. Gus Sholah merupakan adik dari Presiden ke-4 Republik Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid sekaligus salah satu tokoh besar organisasi Islam Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Kakeknya, KH. Hasyim Asy'ari merupakan pendiri NU. Selain sebagai ulama, Gus Sholah dikenal sebagai seorang aktivis, politisi, cendekia, dan tokoh Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada tahun 2006, Gus Sholah menerima tongkat estafet kepemimpinan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa timur. Ia menjadi generasi ketujuh dari sang kakek, KH. Hasyim Asy'ari yang mengasuh Pesantren Tebuireng. Saat itu Gus Sholah menggantikan pamannya KH. Yusuf Hasyim. Banyak ilmu dan nasihat yang menginspirasi banyak orang dari sosoknya.

Presiden Jokowi mengatakan dirinya banyak mendapatkan titipan pesan dari beliau semasa hidup yang merupakan cendekiawan muslim yang menjadi panutan bersama dan tentu saja kita semuanya masyarakat Indonesia sangat kehilangan atas pulangnya beliau ke *rahmatullah*.

Salahuddin Wahid lahir pada 11 September 1942 di Jombang, Jawa Timur. Ia merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB)

jurusan arsitektur. Semasa hidup ia memilik banyak rekam jejak di sejumlah organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua PBNU periode 1999-2004 dan Ketua ICMI (Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia) tahun 2001-2003. Di awal periode reformasi 1998, ia pernah menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dikenal sebagai sosok pejuang Hak Asasi Manusia (HAM), Gus Sholah pernah menjabat posisi Wakil Ketua Komnas HAM periode 2002-2007. Kehadiran Gus Sholah di Komnas HAM ikut menjembatani Nadlatul Ulama dengan berbagai organisasi hak asasi manusia.

Membela Kemajemukan Indonesia

Pada 23 Desember silam, Gus Sholah memberikan ucapan selamat natal kepada saya dan itu menjadi komunikasi terakhir antara Gus Sholah dengan saya. Ia mengatakan bahwa Indonesia kehilangan tokoh bangsa yang berjasa dalam memperjuangkan nilai demokrasi, HAM, dan pluralisme.

Selian itu, Gus Sholah kerap mencari solusi perdamaian terkait konflik-konflik yang melanda sejumlah daerah seperti di Papua, Ambon, dan Poso bersama tokoh lintas agama. Beliau konsisten dalam masalah memperjuangkan nilai kemanusiaan yang universal dan selalu berupaya menjaga agar bangsa ini selalu tunduk konstitusi.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga merasa sangat kehilangan sosok Gus Sholah. Seperti diketahui, orang nomor satu di Jawa Timur ini sering bertemu dengan Gus Sholah dalam berbagai kesempatan.

Khofifah yang turut menjemput jenazah di Bandara Juanda, Surabaya, menyebut Gus Sholah sebagai pejuang bangsa. Beliau adalah guru, aktivis, ulama, cendekia, sekaligus tokoh Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Insyaallah, husnul khotimah.*

Cita-cita Pendiri Bangsa

Bangsa ini harus dikembalikan kepada cita-cita pendiri bangsa, yakni mewujudkan masyarakat cerdas dan sejahtera. Cita-cita ini bisa tercapai bila ada kemauan dari elite politik untuk melayani dan mengabdi masyarakat, bukan partai dan pemilik modal.

Pengertian politisi busuk bukan hanya untuk koruptor, pelanggar HAM, dan yang menjadi penjahat lingkungan, seksual, ataupun narkoba, melainkan harus diperluas kepada mereka yang selama ini gagal menciptakan sistem pemerintahan yang memekarkan nilai-nilai kemanusiaan. Mandat mereka harus dicabut dan kontraknya diakhiri.

Di sini pentingnya bagi kita untuk bersatu dan kritis membuat daftar mereka yang selama ini tercela, mulai dari daerah hingga pusat. Daftar hitam caleg bermasalah adalah simbol perlawanan terhadap mereka yang selama ini turut memperburuk kehidupan bangsa.

Pemilihan umum bisa menjadi momen untuk mengakhiri kontrak politik dengan mereka. Mari bersatu padu untuk tidak memilih mereka yang sudah terbukti hanya menjual retorika dan berdoa serta yakin bahwa akan ada banyak Gus Sholah selanjutnya yang akan terlahir. ❖

Tak Lelah Merindukan Kemajuan Bangsanya

Dr. Burhanuddin Abdullah
Menko Perekonomian (1999-2001)

JARANG sekali saya mendengar berita bahwa Gus Sholah sakit. Sore itu, saya benar-benar kaget mendengar berita beliau wafat dalam usia 77 tahun di RS Harapan Kita. Sungguh, berpulangnya tokoh seperti beliau merupakan kehilangan yang sangat besar. Belum jelas benar siapa yang akan menggantikan posisinya. Agar Indonesia lengkap terisi kembali mozaik kepemimpinannya.

Sebenarnya, mungkin saya belum pada tempatnya mengklaim kenal dengan Gus Sholah. Pertemuan "dari hati ke hati" dengan beliau hanya beberapa kali saja. Pertama, pada tahun 2001, ketika saya baru beberapa hari jadi Menteri pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Saya belum pernah ketemu, apalagi mengenal beliau.

Sore itu, Ahad pertengahan Juni 2001, tiba-tiba ada beberapa orang tamu ke rumah. Salah satu dari tamu itu memperkenalkan beliau dengan penuh hormat, Gus Sholah atau Salahuddin Wahid, adik kandung Presiden RI waktu itu. Penampilannya sangat sederhana. Mengenakan kemeja batik lengan pendek dengan warna yang sudah tak cerah lagi. Bicaranya pelan. Tutur katanya teratur, irit dan datar. Tidak banyak yang beliau sampaikan. *To the point*.

Beliau datang meminta saya untuk membuka seminar tentang BUMN yang akan dilakukan besok paginya, Senin pertengahan Juni 2001. Bagaimana kaitannya sampai beliau yang datang sendiri, meminta saya hadir, baru saya pahami setelah saya tahu bahwa salah satu dari tamu saya adalah Dirjen BUMN. Dalam hati saya mengaduh karena sangat mendadak dan saya belum tahu banyak tentang persoalan yang dihadapi BUMN. Penjelasan sekilas dari Pak Dirjen waktu itu cukup membantu. BUMN kita bukannya menopang perekonomian yang sedang krisis, tetapi justru menjadi tambahan beban. BUMN kita kalah gesit oleh swasta. Kebanyakan BUMN kita justru merugi.

Sesuai dengan saran IMF pada waktu itu, mestinya Pemerintah melepaskan beban itu dan berusaha memanfaatkan sumberdaya yang terbatas itu untuk memulihkan ekonomi kita.

Sampai di situ saya agak hafal ke mana pembicaraan akan berlanjut dan bagaimana seminar besok harus diarahkan. Sebagai persiapan pidato, saya menghubungi Sesmenko, sebagai orang yang paling lama berdinas di Kemenko Perekonomian waktu itu. Saya hanya meminta gambaran umum tentang BUMN kita. Saya tidak meminta data atau penjelasan detil karena waktu Seminar adalah esok hari, pagi-pagi. Saya pun kemudian membuat 'oret-oretan' singkat setengah halaman. Hanya pokok-pokoknya saja.

Keesokan harinya, pukul 7.00, saya sudah dijemput oleh Dirjen BUMN, Departemen Keuangan. Di mobil Pak Dirjen menerangkan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian, privatisasi BUMN kelihatannya tak terhindarkan. Banyak BUMN yang harus diidentifikasi secara mendalam untuk kemudian 'didandani' secara menyeluruh dan kalau sudah bisa ditampilkan, ditawarkan untuk dijual. Saya berpikir rasanya pembicaraan dari kemarin malam belum ada yang mempertanyakan mengapa BUMN kita ketinggalan. Apakah menjualnya menjadi jalan ke luar atau

justru akan membuka persoalan baru bagi kemandirian bangsa ini dalam perekonomian.

Saya sudah lupa di mana seminar tersebut diselenggarakan. Dalam ingatan saya mungkin di Universitas Trisakti, karena pada waktu ke sana rasanya sempat melewati rumah dinas tempat saya sebelumnya, di daerah Slipi.

Setelah pembukaan, saya langsung mendapat kesempatan bicara pertama. Pemberi *Keynote Address* sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Itulah pidato saya yang pertama sebagai Menteri. Tidak ada pidato tertulis yang saya siapkan. Saya hanya menyiapkan catatan tulisan tangan buatan saya sendiri.

Yang saya tulis dan saya katakan dalam pidato, *pertama* adalah apa yang saya pikir dan saya yakini tentang bagaimana seharusnya BUMN kita dijalankan. Saya berargumentasi bahwa setiap negara memiliki kewenangan untuk menentukan format perekonomiannya. Indonesia, sebagai negara bekas jajahan, memiliki struktur ekonomi yang khas yang belum tentu cocok dengan kondisi Indonesia merdeka yang punya cita-cita menyejahterakan rakyatnya. Itu semua terpampang dengan jelas dan telah menjadi kesepakatan seluruh bangsa Indonesia bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang bangyak dikuasai oleh negara, dan bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung didalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua, BUMN yang sebenarnya merupakan warisan sejarah penjajahan diambil alih oleh Negara dengan biaya yang cukup besar. Itu bukan hasil rampasan karena hampir semua BUMN tersebut yang semula milik swasta asing diambil alih dengan ganti rugi yang memadai.

Ketiga, warisan yang menyedihkan dari ratusan tahun menjadi tanah jajahan Belanda, Indonesia praktis tidak punya pengalaman bagaimana membangun perusahaan besar. Mengelolanya dengan baik dan menguntungkan. Membiayai proyek-proyek besar dan rumit. Sementara swasta domestik yang sudah mulai tumbuh belum memiliki kekuatan yang memadai untuk menopang derap dan derasnya langkah pembangunan.

Dan *keempat*, yang menurut saya alasan yang paling penting, yaitu bahwa tidak ada argumen yang meyakinkan bahwa unsur kepemilikan menentukan apakah perusahaan itu menjadi maju atau bangkrut. Banyak BUMN di negara lain yang maju dan bahkan berkembang sehingga menopang kemajuan negaranya. Memang harus diakui bahwa BUMN kalah trengginas, lincah dan terampil oleh swasta. Akan tetapi, kekalahan itu bukan karena soal kepemilikan, tetapi lebih karena kurangnya sikap agresif, responsif, akomodatif, dan inovatif terhadap perkembangan pasar. Karena itu, BUMN kalah dalam hal efisiensi dan produktivitas.

Kesimpulan yang saya sampaikan dalam pengantar seminar itu adalah satu pesan untuk tetap awas, cermat, penuh pertimbangan manakala kita ingin merumuskan kebijakan yang pada akhirnya akan memindahkan kepemilikan BUMN.

Pidato saya tersebut memang sangat menyimpang jauh dari niat seminar semula. Pihak IMF pada saat itu sangat mungkin tidak suka dengan itu. Saya tidak tahu pembicaraan selanjutnya. Karena setelah memukul gong saya segera kembali ke kantor. Saya hanya mendapat komentar halus dari Dirjen BUMN yang mengantar saya kembali ke kantor. “Saya tidak menduga Bapak akan bicara seperti itu.”

Beberapa hari kemudian Gus Sholah mampir ke kantor. Beliau mengatakan dengan nada datar bahwa maksud seminar itu semula tidak seperti itu. Tanpa menjelaskan lebih lanjut. Saya pun tidak menanyakan lebih jauh. Saya pikir, memang mestinya begitu.

Gus Sholah datang lagi ke rumah, tapi setelah sekian lama. Tak kurang dari lima tahun sejak pertemuan pertama. Saya pun sudah beralih posisi, menjadi Gubernur BI. Beliau datang ditemani anaknya, Ipang. Obrolan di antara kami mengcover banyak isu. Tapi semua bermuara di politik.

Banyak yang berpandangan bahwa pemerintahan SBY jilid 1 dianggap kurang berprestasi. Ada kepentingan untuk mencari pemimpin alternatif. Beberapa orang disebutkan oleh beliau. Untuk pemetaan opini masyarakat tentang siapa yang pantas memimpin negeri ini diperlukan sebuah studi yang menyeluruh. Beliau meminta dukungan. Saya pun maklum. Hal-hal begini tak mungkin kantor dilibatkan. Aku bilang bahwa aku mendukung segala niat baik atas nama pribadi. Posisi formal sebagai otoritas moneter tidak bersangkut-paut dengan politik. Beliau sangat memahami sikapku.

Beberapa bulan kemudian beliau datang lagi. Beliau berceritera bahwa survei tentang tokoh yang memiliki potensi memimpin Indonesia masa depan belum memberikan gambaran yang jelas. Pengetahuan masyarakat masih terbatas pada yang itu-itu saja. Dan, saya pun tak terlalu heran dengan hasil tersebut. Masyarakat perkotaan yang terdidik lebih mengutamakan perhatiannya pada upaya menjaga tingkat kenyamanan hidupnya. Sementara masyarakat kebanyakan terlalu sibuk memikirkan kehidupan diri dan keluarganya. Dan, yang miskin sibuk meratapi kesehariannya.

Pertemuan ketiga jauh setelah Gus Dur tiada. Saya pun sudah menjadi penganggur sempurna. Mungkin sekitar tahun 2013, saya sengaja pergi ke Tebuireng. Ingin ziarah ke pekuburan Gus Dur. Saya tidak sempat melayat pada waktu beliau tiada dan juga tak berkesempatan ikut mengantar menguburkannya. Ke Tebuireng saya ditemani Agus Gunawan dan dari Surabaya diantar oleh Sdr. Halim. Gus Sholah menerima kami dengan keramahan. Datar saja. Kami diterima di ruang kerjanya. Bahkan diajak berkeliling pesantren

yang tak terlalu luas. Setelah semua selesai saya minta ijin untuk duduk khusyu mendoakan Gus Dur, semoga mendapat tempat yang lapang di alam akhirat sana. Kami kembali ke Surabaya menjelang petang. Di jalan, kami sempat berhenti dulu. Nongkrong sambil menikmati durian.

Gus Sholah datang lagi ke rumah. Kali ini beliau ditemani dua anak muda. Mereka mengaku sebagai santrinya Gus Sholah. Kami mengobrol banyak tentang berbagai soal. Isi-isu nasional yang berkembang dan pertanyaan mengusik di mana sekarang kita berada. Bukan kebetulan kalau Gus Sholah datang pada waktu itu. Pemilu sudah dekat. Banyak harapan yang ingin dititipkan kepada pemimpin yang terpilih nanti. Realitas politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang semakin berjarak dengan yang diinginkan harus didekatkan.

Politik memang menarik. Kekuasaan konon memabukkan. Pemilu 2014 akan memunculkan kemungkinan-kemungkinan baru. Akan tetapi, dalam obrolan terakhir antara saya dengan Gus Sholah yang sungguh intensif lebih dari lima tahun yang lalu belum ada cerita kemungkinan munculnya calon fenomenal mantan walikota Solo di panggung kepemimpinan nasional. Tokoh yang dibicarakan masih dari itu ke itu saja. Saya sendiri lebih banyak merespons soal-soal ekonomi. Sesuatu yang sedikit saya tahu.

Bahkan pada waktu saya mengantarkan ke rumahnya di Jalan Bangka, beliau masih sangat antusias mendiskusikan bagaimana menyelesaikan persoalan struktural dalam perekonomian kita. Beliau sangat tertarik pada upaya bagaimana memutar balik industri kita menjadi topangan pembangunan yang pada waktu itu pun ditengarai telah mengalami kemerosotan yang mengkhawatirkan. Sejalan dengan itu beliau sangat konsen dengan mutu pendidikan yang sangat dominan dalam menopang peningkatan produktivitas dan efisiensi perekonomian.

Dari empat kali pertemuan dengan Gus Sholah tersebut saya mengambil beberapa kesimpulan, *pertama* Gus Sholah adalah tokoh yang memiliki kerinduan yang sangat besar agar bangsa dan negaranya segera menjadi kebanggaan para pemiliknya, yaitu rakyat Indonesia. *Kedua*, beliau juga paham bahwa rasa bangga rakyat Indonesia terhadap negara dan bangsanya hanya akan muncul dan bertahan apabila negara ini bisa memberikan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu kebanggaan itu akan lebih terekspresikan apabila setiap elemen masyarakat mendapatkan kebebasan untuk berekspresi, mengeluarkan pendapatnya, dan menyampaikan pikiran-pikirannya.

Menurut saya Gus Sholah adalah seorang demokrat tulen, yang membiarkan pemikiran siapapun berkembang dalam koridor dialog yang produktif. *Ketiga*, Gus Sholah adalah seorang negarawan yang sadar benar bahwa bangsa ini akan bergerak menyusuri sejarahnya ke masa depan. Pikiran beliau melampaui masa kini. Tidak '*myopic*'. Karena itu, beliau sangat memiliki perhatian kepada anak muda yang ingin menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk kemajuan bangsanya.

Gus Sholah, saya doakan dan *insyaallah* Anda *husnul khatimah* dan mendapat tempat yang lapang di alam sana. ❖

Gus Sholah Sang Moderat dan Penjaga Keseimbangan

Prof. Dr. Haedar Nashir
Ketua Umum PP Muhammadiyah

WAKTU itu awal Januari 2020. Film "Jejak Langkah 2 Ulama" yang menampilkan dua tokoh bersejarah KH. Ahmad Dahlan dam KH. Hasyim Asy'ari sudah hampir selesai penggarapannya. Saya dan KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) selain bertemu juga bertelepon untuk penyelesaian film tersebut. Beliau sangat bersemangat agar karya monumental itu dinikmati khalayak, mengikuti atsar pendiri Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Pada 12 Januari 2020, ada pesan WhatsApp (WA) masuk ke hp saya dari Gus Sholah. Isinya, beliau menyampaikan, "Akan lebih baik dampaknya terhadap minat masyarakat bila film itu diputar perdana di Jakarta yang dihadiri RI-1. Apa Panjenengan setuju? Apa kita membuat surat kepada RI-1 yang ditandatangani bersama?" Edisi perdana ingin disaksikan para tokoh penting di Republik ini.

Saya tentu menyanggupinya untuk bersama kirim surat ke Presiden Jokowi. Saya sempat berpikir, kenapa Gus Sholah begitu serius tentang film tersebut. Berarti ada *spirit* dan pesan sangat penting yang ingin beliau usung dari film dua tokoh umat itu. Dua hari sesudahnya, tanggal 14 Januari, saya dapat kabar beliau masuk RS Harapan Kita, Jakarta. Ada tindakan medis ablasi. Lalu

saya tanya via WA bagaimana kondisinya? Beliau menjawab, "*Alhamdulillah* telah selesai tadi jam 12.00. Sekarang sedang dalam proses pemulihan. Terima kasih."

Surat ke Presiden sudah dibikin dan dikirimkan tertanggal 22 Januari 2020 yang ditandatanganu berdua, saya atas nama PP Muhammadiyah dan Gus Sholah atas nama Pimpinan Ponpes Tebuireng Jombang. Namun, Gus Sholah kembali dirawat di rumah sakit. Hari Jumat tanggal 31 Januari saya diantar Fajar Riza Ul Haq membesuk KH. Salahuddin Wahid yang sedang dalam proses operasi jantung di RS Harapan Kita, Jakarta. Diterima Ibu Farida Salahuddin Wahid, Pak Lukman Hakim Saifuddin (Menag periode 2014-2019), Bu Lily Chodidjah Wahid dan dr. Umar Wahid, adik beliau, serta keluarga lainnya.

Rencananya tanggal 2 Februari akan ada pemutaran film Jejak Dua Ulama itu. Namun, Allah SWT menghendaki lain. Ahad 2 Febuari 2020 itu Gus Sholah dipanggil ke haribaan-Nya. Inna Lillahi wa inna Ilaihi raji'un, dari Allah kita berasal dan kepada-Nya kita kembali. Keluarga dan pihak Rumah Sakit sudah berikhtiar maksimal untuk kesembuhan beliau, tetapi Allah memanggil Gus Sholah ke sisi-Nya. Rupanya tanggal 2 Februari 2020, pemutaran film dua tokoh penting itu berubah menjadi episode terakhir kehidupan Gus Sholah yang penuh jejak penting, mengikuti Sang Kakek, Hadratussyeikh KH. Hasyim Asy'ari.

Saya kenal lama dengan Gus Sholah sebagai sosok yang rendah hati, bergaul luas dengan banyak kalangan, moderat, memiliki komitmen keislaman yang kuat, dan visi kebangsaan yang luas. Beliau berkomitmen kuat pada demokrasi dan hak asasi manusia dengan konsisten. Ketika Pemilu 2019 kami intensif bertemu bersama banyak kalangan untuk menggalang moderasi dan tidak terlibat politik partisan, agar ada kekuatan penyeimbang. Beliau tidak ingin pemilu menjadi faktor pemecah belah dan berujung

pada kegaduhan politik yang meruntuhkan persatuan, demokrasi, dan kebersamaan.

Kami memiliki kenangan spiritual bersama. Tahun 2017 saya bersama istri serta Gus Sholah bersama istri menunaikan ibadah haji undangan khusus Raja Salman. Siang hari saya dapat telepon dari Menteri Agama, Pak Lukman Hakim Saifudin, ditawari naik haji undangan Raja Saudi. Lalu saya jawab, "Terimakasih Pak Menag, minta waktu saya berembug dengan istri." Sebelum menutup telepon, sempat saya sampaikan, "Pak Menag, kalau jadi, saya sangat senang bila bisa bersama Gus Sholah dan Ibu."

Keesokan hari saya ditelepon ulang Pak Menag, menanyakan kesediaan saya. Lalu saya jawab, "Insya Allah, Pak Menag." Beliau menjawab, "*Alhamdulillah, insya Allah* Gus Sholah bersama ibu juga berangkat." Tidak tahu kenapa, rasanya ada rasa senang menunaikan ibadah haji undangan bersama Gus Sholah bersama Bu Nyai. Istri saya, Noor, juga tidak biasanya mau diajak pergi haji undangan. Biasanya suka menolak. *Alhamdulillah* saat itu bersedia.

Tiba waktu kami berangkat, bersama rombongan dari utusan lain. Ketika hendak naik bus dari kantor Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi, saya masih ingat Mas Ipang berpesan, "Titip Ayah ya Pak Haedar." Pesan itu saya pegang betul, karena saya lebih muda. Kami satu bus, begitu juga selama menunaikan ibadah haji sampai pulang selalu bersama. Di kamar hotel kami berempat, yaitu Gus Sholah, dua jenderal kembar, yakni Pak Letjend TNI Yoedhi Swastomo (Sekretaris Kemenko Polhukam) dan Letjend TNI Yoedhi Swastanto (Dirjen Strahan Kemenhan), dan saya sendiri. Dalam tempo 14 hari selama ibadah haji itulah kami berempat seperti menjalani "Pesantren Kilat" yang intensif. Diskusi soal umat dan bangsa sampai bersenda gurau hal-hal sehari-hari.

Dalam musim haji tersebut saya dan Gus Sholah berdua wakil rombongan Indonesia bersama tamu dari negara Islam lainnya yang

berkesempatan bertemu Raja Salman di Istana Mina. Tentu saja Pak Menteri Agama mewakili Pemerintah Indonesia, ada pula Pak Suhardi Alius Kepala BNPT. Acaranya salaman dengan Raja Salman dan mendengar pidatonya, setelah itu makan bersama.

Lucu juga, mau diterima di Istana Mina, kami malam hari dari Mina dibawa dulu ke Mekah, di hotel yang semula kami menginap. Biasa, jam ala Saudi selalu tidak pasti. Katanya ba'da Subuh akan dibawa ke Istana Raja, tetapi tidak jadi. Jam 09.00 pagi diminta siap lagi, tidak jadi lagi. Baru setelah shalat Dhuhur jadi berangkat dengan bus khusus. Tujuannya ternyata ke Istana Raja di Mina. Saya bersama Gus Sholah belajar bersabar, sambil tertawa bareng. Dari Mina kembali ke Mina, perjalanan lewat Mekkah sehari semalam.

Sepulang dari Istana Mina, kami turun tidak jauh dari kemah tempat lempar jumrah. Perkemaham kami memang diperuntukkan khusus bagi undangan Raja, yang terdekat ke tempat jamarat. Sampai di jalan yang membelah, karena mulai banyak jamaah yang menuju ke jamarat, Gus Sholah tampaknya bergerak ke jalan kiri, saya lurus ke arah kemah. Kami berpisah. Jamaah menuju jamarat lagi padat kala itu.

Saya menunggu Gus Sholah setengah jam lebih, ternyata beliau tidak muncul. Saya mulai cemas. Saya ingat pesan Mas Ipang Wahid. Lalu segera saya menuju kemah dan mengajak Pak Said Salim, jamaah dari Denpasar untuk ikut menemani mencari. Akhirnya kami menemukan Gus Sholah. Wah senang sekali, sampai saya rangkul beliau. Ternyata, ketika terpisah, Gus Sholah menelusuri jalan menuju Masjid yang berada di belakang kemah. Betul juga, tetapi jalannya menjauh dan tidak bisa masuk kemah karena pintunya di depan.

Banyak pengalaman personal dan dialog yang intens selama kami menunaikan ibadah haji. Hal yang menarik, Gus Sholah bercerita kalau haji bersama ini kali kedua, setelah haji pertama

sekitar tahun 1970-an, tentu sudah lama sekali. Mirip dengan Buya Syafii Maarif, beliau haji hanya sekali kalau tidak salah. Gus Sholah memang sosok yang sederhana dan santun. Selama sekitar dua minggu kami mengobrol dan berdiskusi banyak hal tentang Muhammadiyah dan NU, umat Islam, bangsa, dan perkembangan global. Wawasan Gus Sholah moderat dan melintasi, serta selalu menjaga keseimbangan.

Sepulang haji, kami makin sering berkomunikasi. Sebelum sakit yang terakhir, kami masih berkomunikasi tentang rencana pemutaran film Jejak Langkah Dua Tokoh Kyai Dahlan dan Kyai Hasyim Asy'ari sebagaimana diceritakan di awal tulisan ini, yang rencananya mengundang Presiden RI. Beliau begitu rupa ingin agar umat dan masyarakat luas, terutama generasi muda, mengenal KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari, kedua tokoh umat dan bangsa yang besar jasanya dan melahirkan Muhammadiyah dan NU sebagai warisan terpenting bagi Indonesia.

Ketika film itu diputar di bioskop, di Jakarta dan Yogyakarta, sayang beliau tidak dapat menyaksikannya bersama. Tetapi film itu menjadi saksi, betapa Gus Sholah telah berikhtiar menyambung mata rantai dua hal. Pertama agar antara warga Nahdliyin dan Muhammadiyah makin mengeluarga sebagai satu kesatuan dalam ukhuwah Islamiyah yang autentik, sebagaimana diteladankan oleh KH. Hasyim dan Kyai Dahlan, meskipun keduanya berbeda pilihan organisasi dan cara perjuangannya. Kedua, agar generasi bangsa Indonesia mengenal kedua tokoh dan kedua organisasi Islam terbesar itu serta memahami betapa besar jasanya bagi Republik ini, agar tidak melupakan dan menafikannya. Jangan ada anggapan NU dan Muhammadiyah sebagai beban bagi Indonesia dan karenanya harus diabaikan, ibarat Malin Kundang yang tidak mengakui ibu tercinta setelah dirinya digdaya padahal sang ibu telah berjuang susah payah mengandung, melahirkan, dan membesarkannya.

Sebelum wafat Gus Sholah bersama Ibu Nyai Farida sempat bersilaturahmi ke rumah kami di Yogyakarta. Sebelumnya juga bersilaturahmi ke PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Bila di Jakarta kami sering bertemu. Perhatiannya pada pendidikan sangat luar biasa, terutama untuk pengembangan pendidikan Islam yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni. Ketika saya, istri, dan anggota PP Muhammadiyah bertakziyah dan ikut prosesi pemakaman Almarhum di Jombang, terasa ada sesuatu yang hilang. Saya tidak bisa lama menyampaikan sambutan saat itu, teringat betapa lekat Almarhum dengan kami. Kita sungguh kehilangan tokoh yang moderat dalam lisan, tulisan, pikiran, dan tindakan. Sekaligus figur yang diterima banyak kalangan. Kami berharap jejak kehidupan Gus Sholah menjadi suri teladan bagi kaum muda yang mewarisi perjuangan keumatan dan kebangsaan di negeri Indonesia tercinta! ❖

Mengembangkan Toleransi Aktif

KH. Husein Muhammad

Pengasuh Pesantren Dar At-Tauhid
Arjowinangun, Cirebon

SAYA kenal Gus Sholah, tapi tidak sedekat perkenalan saya dengan Gus Dur. Karena saya memang lebih aktif di Ciganjur. Tiap bulan saya datang ke sana, mengaji di sana. Saya juga kenal dengan Gus Umar, sewaktu dulu itu beliau bekerja di Cirebon sebagai dokter di rumah sakit paru-paru, dan pernah merawat ibu saya.

Dengan Gus Sholah saya kenal, dan kalau ziarah saya mampir. Kebetulan istri Gus Sholah, Nyai Farida, pernah bersama-sama saya melakukan studi di Turki untuk isu aborsi aman. Gus Sholah juga pernah ke Cirebon. Mungkin mau silaturahmi ke seorang kiai di sana, dan dekat dengan rumah saya, sehingga saya menemuinya.

Pertama-tama yang saya tangkap dari beliau, adalah seorang yang rendah hati. *Kedua*, orang yang senantiasa aware dalam urusan kebersihan dan memperhatikan cara berpakaian. Beliau berpakaian bersih, apik, dan perlente. Beda dengan Gus Dur, yang tidak memikirkan pakaian. Saya pernah menulis tentang Gus Dur yang tidak mau memilih pakaian, apa aja yang ada beliau pakai. Yang *ketiga*, beliau itu disiplin. Beliau disiplin dalam menjaga dan merawat pondok yang merupakan peninggalan kakeknya dengan sebaik-baiknya. Yang *keempat*, beliau itu memiliki kemampuan

manajerial yang bagus. Mampu me-*manage* lembaga pesantren dengan bagus.

Saya melihat perkembangan yang terjadi di Pesantren Tebuireng sesudah dikelola oleh Gus Sholah. Tadinya saya masih ragu dan agak pesimis, apakah bisa bangkit atau tidak Tebuireng di bawah kendali Gus Sholah? Sebagai santri di Lirboyo tahun 1972-1973, kalau kebetulan libur saya mampir ke Tebuireng. Dulu saya menyaksikan pendidikan yang diterapkan di Tebuireng berbeda dengan Lirboyo. Salafinya beda. Kitab kuningnya yang diajarkan tidak setajam di Lirboyo. Saya melihat ada banyak kemajuan yang kemudian terjadi di Tebuireng. Itu menurut saya adalah karena kepemimpinan Gus Sholah. Ada perguruan tinggi, ada sekolah Muallimin, dan ada ma'had aly.

Mungkin banyak orang seperti saya, awalnya meragukan kemampuan Gus Sholah dalam mengelola pesantren. Jangan-jangan Tebuireng akan mundur.

Pada waktu ulang tahun pondok ke-100 saya diminta berkomentar dan kesan saya tentang Tebuireng.

Pertama, Pesantren Tebuireng harus menjadi pusat ilmu pengetahuan moderat, Islam moderat. Karena tokoh pendirinya itu sangat moderat. Ketiga-tiganya moderat, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, dan Gus Dur.

Sebetulnya moderat itu bisa dimaknai dengan maju dan modern. Tapi saya ingin menyebutnya moderat, dengan memperbandingkannya dengan salaf.

Komitmen Pesantren Tebuireng kepada kebangsaan dan moderasi sangat tinggi. Sebetulnya agak berbeda dengan pesantren salafi pada umumnya. Meskipun secara umum pesantren-pesantren salafi bisa menerima keragaman, tapi moderasi dan keberagaman di Pesantren Tebuireng terasa lebih progresif. Hal itu saya sebutkan sebagai toleransi aktif, bukan toleransi pasif. Jadi, mohon maaf, saya

menilai pesantren-pesantren lain itu pada umumnya toleransinya pasif. Artinya menerima keberadaan orang lain yang berbeda pandangan atau keyakinan di ranah publik atau media, tapi tidak aktif mengajak. Jadi toleransi aktif itu menurut saya menuntut dan ikut mendorong orang lain untuk memiliki dan mengembangkan sikap toleran. Menurut saya Pesantren Tebuireng itu demikian aktif toleransinya.

Yang kedua, sebagai pusat pengembangan komitmen kebangsaan. Saya kira Gus Sholah kuat sekali komitmennya. Jangan bertanya kepada beliau argumentasi keagamaannya, tapi lihatlah bagaimana cara pandang nasionalisme yang beliau miliki. Saya pernah mengatakan begini, "Andaikata bukan Kiai Hasyim, andaikata bukan Kiai Wahid Hasyim, dan andaikata bukan Gus Dur, maka penerimaan masyarakat atas Pancasila dan UUD 1945 itu mungkin kurang kokoh. Sementara keinginan untuk penerapan syariat Islam yang akan menguat." Jadi luar biasa, seakan-akan bagi saya, yang menentukan nasib bangsa ini adalah tokoh-tokoh itu. Gus Sholah juga demikian, beliau melanjutkan apa yang digariskan pendahulunya.

Dalam konteks itu, dan dalam kaitan dengan toleransi aktif seperti yang saya uraikan di atas, maka sesungguhnya orang-orang seperti Gus Dur memilih proaktif mengundang berbagai kelompok seperti Ahmadiyah yang pada waktu itu diperlakukan secara tidak adil dan dipinggirkan sebagai warga bangsa. Demikian itulah wujud komitmen kebangsaan dan toleransi aktif yang saya maksudkan.

Ada satu lagi kesan saya yang mendalam tentang Gus Sholah. Beliau itu punya watak dan sikap tidak ingin membebani orang lain. Sikap ini banyak diceritakan oleh banyak orang yang pernah berhubungan dengan Gus Sholah, terutama oleh istrinya, Nyai Farida. Kalau bisa seakan-akan Gus Sholah tidak mau merepotkan dan tidak ingin dibantu.

Gus Sholah itu biasa bepergian sendirian saja. Tidak perlu membawa ajudan. Jika merasa sakit dan perlu berobat ke RS, beliau pergi saja ke RS tanpa memberitahukan orang lain. Setelah di RS barulah memberitahukan ke orang lain.

Beberapa saat sebelum beliau wafat, saya bersama Pak Azyumardi Azra silaturrahmi ke beliau. Masyaallah, betapa rendah hatinya Gus Sholah menyambut tamunya. Tidak menunjukkan dia orang besar, dan mengambil jarak dengan orang lain. Saya menduga menghadapi para santri atau mahasiswa beliau juga bersikap egaliter seperti itu.

Karena itu saya ingin sekali menyampaikan kepada para kiai, hendaknya jangan menjaga jarak dengan anak-anak muda dan dengan santrinya. Model hubungan yang diterapkan Gus Sholah patut ditiru. Jangan gunakan lagi pola feodalistik. Penghormatan itu tetap perlu, tapi tidak harus berlebihan. Penghormatan yang berlebihan justru akan menjatuhkan potensi diri santri. Santri menjadi berkurang keberaniannya. Bertanya tidak berani, menyampaikan pendapat tidak berani. Jadi potensi-potensi manusia yang sebetulnya bisa dikembangkan menjadi terhalang untuk bisa diasah. Para santri merasa khawatir suul adab atau tidak sopan. Dan Gus Sholah tidak seperti itu. ❖

Gus Sholah
Negarawan Santun

Prof. Ir. Hermawan Kresno Dipojono, MSEE, Ph.D
Ketua Pembina YPM Salman ITB Bandung

GUS Sholah adalah panggilan akrab bagi KH. Ir. Salahuddin Wahid yang sering saya dengar digunakan oleh para senior di lingkungan Masjid Salman ITB. Walaupun saa-sama alumni ITB namun saya memang berbeda generasi dengan Gus Sholah yang jauh lebih senior; Gus Sholah masuk ITB tahun 1962 sedangkan saya masuk tahun 1974.

Dilihat dari tahun-tahunnya berada di ITB, Gus Sholah dan generasinya jelas tertempa oleh turbulensi dinamika kehidupan mahasiswa yang amat heroik. Masa itu dipandang legendaris oleh aktivis mahasiswa era tujuh puluhan dan selalu menjadi bahan perbincangan yang menarik dan dicari. Oleh karena itu mengenai rekam jejak Gus Sholah semasa muda memang saya peroleh melalui obrolan dengan para senior yang seangkatan dengan Beliau.

Meskipun demikian saya beruntung dapat berbincang dengan Beliau dalam berbagai kesempatan, baik di lingkungan Masjid Salman maupun di Jakarta. Tentu, berbagai pemikiran kebangsaan yang mendalam dan serius dari Beliau dapat diperoleh oleh siapapun melalui tulisan-tulisannya yang tersebar luas di berbagai media massa. Wawasan yang luas disertai pemahaman yang amat mendalam mengenai persoalan-persoalan kebangsaan, pendidikan

dan kesejahteraan umat mencerminkan adanya keterlibatan langsung Beliau dalam usaha-usaha untuk menyelesaikannya.

Cara berpikir yang sistematis, sistemik komprehensip merupakan wujud kuatnya pengaruh Pendidikan Arsitekturnya semasa di ITB. Gus Sholah sanggup membahas hingga sangat detail suatu topik besar yang tiba-tiba diberikan kepadanya. Sebenarnya hal ini tidak perlu membuat heran bagi siapapun yang secara cermat memperhatikan penampilan Beliau, suatu sosok yang tenang dengan kesan kuat adanya kedalaman dan kekuatan pikiran.

Mas Pungki Purwoto Handoko, mantan Ketua Dewan Mahasiswa ITB tahun 1966, salah seorang kawan dekat Gus Sholah semasa menjadi mahasiswa di kampus Ganesa, adalah salah satu sumber info saya mengenai rekam jejak Gus Sholah sewaktu menjadi mahasiswa di Arsitektur ITB. Saya sendiri merasa amat dekat dengan Mas Pungki sehingga dapat dengan mudah memperoleh berbagai ceritera mengenai dinamika mahasiswa ITB di masanya. Gus Sholah dikenal sebagai mahasiswa yang pandai bergaul, mudah diterima oleh siapa saja, namun dapat dengan teguh menjaga nama harum keluarga besar Wahid Hasyim. Dengan kata lain, yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa sejak muda ciri Nahdliyyin Beliau sudah tercermin amat kuat. Ini tentu bukan persaolan sederhana, karena pada masa itu semua ideologi hidup subur di kampus: ada ateisme, sekularisme, komunisme, dan juga santri. Sejak muda Gus Sholah telah dikenal tidak bersedia terlibat di dalam konflik namun selalu menempatkan diri di atas konflik, terkesan kuat tidak memihak, sehingga usulan penyelesaiannya dapat diterima oleh yang terlibat konflik. Karakter inilah yang mungkin menjadi bekal besar yang melalui perjalanan panjang kemudian menjadikan Gus Sholah diposisikan sebagai seorang negarawan, non-partisan, non-sektarian, tanpa mengorbankan prinsip dan tetap tertata, terjaga dalam kesantunan.

Gus Sholah adalah sosok yang dapat dengan nyaman, tulus dan jujur menggabungkan keislaman dan keindonesiaan. Semuanya merasa nyaman dengan Beliau, yang sedang berkontestasipun, mulai dari calon camat, caleg, hingga capres, bahkan yang sedang saling berhadapan itupun semuanya berlomba-lomba menemui, sowan kepada dan diterima oleh Gus Sholah dengan tangan terbuka. Tentu hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa Beliau mempunyai basis akar rumput yang amat besar dari kalangan Nahdliyyin. Di samping itu karena Beliau juga sangat piawai mengungkapkan pemikiran-pemikiran jernihnya, disertai ketulusan hati, melalui berbagai tulisan maupun forum seminar, talk show tv dan radio maka sangatlah wajar jika akhirnya mencapai arasy atau maqom sebagai Guru Bangsa yang diterima oleh semua kalangan, dari berbagai latar belakang.

Kepergian Beliau jelas merupakan suatu kehilangan besar bagi bangsa yang ditakdirkan mempunyai kekayaan keanekaragaman luar biasa besar dengan interaksi sosial-politik-ekonomi-budaya amat kompleks yang masih dalam proses membangun karakternya. Harus diakui bahwa keanekaragaman sosio-kultural dengan kompleksitasnya itu belum sepenuhnya mampu diubah oleh bangsa ini menjadi kawan latihnya untuk menjadi lebih cerdas, produktif, sejahtera, dan juga lebih bermartabat serta berwibawa dalam pergaulan antar bangsa.

Gus Sholah termasuk dari yang amat sedikit yang dapat melihat adanya rahmat berlimpah dari keanekaragaman itu. Beliau amat cerdas mengambil hikmah dan manfaat dari munculnya persoalan yang amat kompleks sebagai konsekuensi dari keanekaragaman itu. Kita beruntung sekali karena Gus Sholah juga mampu menuliskan pemikiran-pemikirannya mengenai kompleksitas itu sehingga generasi berikutnya tetap dapat mengambil pelajaran daripadanya. Jadi meskipun Beliau sudah tidak lagi hadir secara fisik namun

demikian dapat dipastikan bahwa pemikiran-pemikirannya yang jernih dan mendalam mengenai berbagai persoalan kebangsaan dan keummatan, mengenai keislaman dan keindonesiaan masih akan lama hadir dan mewarnai mosaik kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga itu semua akan menjadi bekal Beliau untuk memperoleh *maghfiroh* dan rahmat dari Allah SWT di alam akherat nanti. ❖

Sang Fasilitator Pelembagaan Pancasila

Iman PH Sirait, S.Sn., M.Si.
Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP

KETIKA menerima surat dari Tim Penulis Buku (Alm) Gus Sholah untuk menjadi kontributor dalam penulisan buku biografi beliau, saya sempat tertegun. Baru menyadari kembali bahwa orang yang saya kasihi dan kagumi telah tiada dan pergi untuk selamanya.

Oleh karena itu di awal tulisan ini izinkanlah saya untuk menaikkan doa dan penghormatan terbaik saya bagi beliau yang telah menjadi guru dalam kehidupan saya. Saya percaya beliau saat ini sudah bahagia bersama Sang Khalik di Surga.

Mengenang Gus Sholah dan menuliskannya dalam satu naskah tentu bukanlah hal mudah. Sangat banyak kenangan indah bersama beliau yang saya rasakan.

Demikian juga pelajaran yang saya peroleh dalam menapaki kehidupan berbangsa dan cinta kasih terhadap sesama manusia.

***

Kurun waktu 2014–2020 adalah periode penting dalam perjalanan saya, khususnya pengalaman bersama Gus Sholah. Dimulai pada tahun 2014, ketika Bangsa Indonesia melaksanakan pesta demokrasi, siklus lima tahunan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Ada dua pasang calon yang berlomba untuk meraih

dukungan suara rakyat, yaitu adalah pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla.

Saat itu saya dan beberapa tokoh senior aktif terlibat dalam kegiatan kampanye mendukung pasangan Joko Widodo–Jusuf Kalla. Kami membentuk kelompok Relawan. Kelompok ini kami beri nama Lintas Generasi. Diinisiasi oleh lima orang, termasuk saya di dalamnya. Sebagian besar mereka adalah sahabat satu almamater dengan Gus Sholah di ITB, dan ada juga yang bukan satu almamater tapi berteman dengan Gus Sholah karena sesama aktivis: Jo Rumeser-Psikologi (UI 1969), Ermawan Wangsaatmaja (Seni Rupa ITB 1970), Bernad Napitupulu (Seni Rupa ITB 1973), Toni Pangcu (Matematika ITB 1976) dan saya sendiri Iman Partogi HS (Desain Komunikasi Visual Trisakti 1993).

Dalam bergerak di masa kampanye kelompok ini juga bergabung dan bekerjasama dengan simpul lainnya. Saya mendapat tugas dari para senior untuk bergabung ke kelompok relawan yang lebih besar yaitu Bravo-5. Sebuah kelompok relawan yang dibentuk oleh Luhut Binsar Panjaitan.

Lewat materi visual dan tulisan kami, aktif mengam-panyekan pasangan Joko widodo–Jusuf Kalla baik *offline* maupun *online*. Fokus wilayah kerja kami waktu itu Jawa Barat dan Madura.

Sulit disangkal Pemilu 2014 merupakan kompetisi pa-ling menegangkan, bahkan sudah taraf berbahaya karena mengancam persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Pembelahan sosial terjadi hampir di semua wilayah. Peristiwa intoleransi, saling fitnah, caci maki, kekerasan dan teror secara simbolik diikuti hoax dan disinformasi bukan saja diproduksi namun juga di-reproduksi hampir setiap hari lewat berbagai platform media, baik darat maupun udara, menghiasi masa kampanye.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Seluruh Rakyat Indonesia merayakan dengan

gembira. Namun sebagian dari kami masih merasa risau. Kami sadar luka akibat kampanye masih menganga. Di akar rumput keterbelahan sosial akibat kampanye masih tersisa.

Kangmas KH. Saifullah Ma'shum (salah satu tokoh muda NU) dan Bang Sabar Mangadu Tambunan (alumni Teknik Sipil ITB' 1982) adalah senior-senior yang aktif juga mendukung pasangan Joko Widodo–Jusuf kalla pada masa kampanye. Dalam kegiatan di lapangan Mas Ma'shum dan Bang Sabar banyak membantu saya lewat jaringan relawan yang mereka miliki, khususnya wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta dan Sumatera Utara.

Suatu hari, di bulan November 2014, usai Pilpres, Mas Ma'shum dan Bang Sabar mengajak saya bertemu di kantornya, IKI (Institut Kewarganegaraan Indonesia). Nampak dua orang senior ini juga risau dan gelisah. Kami berdiskusi melakukan evaluasi terhadap berbagai peristiwa yang terjadi semasa kampanye Pilpres.

Mas Ma'shum mengatakan bahwa peristiwa kampanye Pilpres yang lalu sangat buruk serta membahayakan keutuhan bangsa. Dia mengajak kita untuk tetap bergerak mencari solusi dan membantu Presiden merealisasikan janji kampanyenya yang termaktub dalam Nawacita.

Hal ini menurut kami penting untuk disikapi, agar situasi pasca Pilpres tetap kondusif. Menurut Bang Sabar, ketegangan dan keterbelahan yang tersisa di akar rumput harus segera dirajut kembali. Saya sepakat saja, dengan pikiran ke dua senior ini. karena kami adalah pelaku di lapangan dan merasakan hal yang sama.

Saya diminta kedua orang senior ini untuk mengumpulkan semua materi, bahan dan jejak digital selama masa kampanye Pilpres dan mempelajari dengan cermat tentang Program Nawacita Jokowi–JK, dengan harapan kami bisa membantu merumuskan agenda strategis untuk menjadi poin dalam program Nawacita, selain untuk menjawab permasalahan pasca Pilpres.

Secara rutin kami bertiga bertemu untuk berdiskusi dan mempelajari data-data yang saya kumpulkan. Saya juga menyampaikan program Nawacita yang strategis dan relevan untuk menjawab tantangan dan permasalahan akibat keterbelahan sosial, yaitu Program Nawacita No. 8 dan No. 9, yang bunyinya:

8- Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9- Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. *(sumber:https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK.*

Pada pertengahan Desember 2014 Mas Ma'shum dan Bang Sabar mengajak saya tuk mendiskusikan masalah ini dengan tokoh yang lebih senior, untuk mendapatkan pandangan dan perspektif dari sudut yang lain. Kami bertiga menemui Gus Sholah.

Satu Pesan: Silaturahmi

Awal tahun 2015 pada suatu sore kami bertiga diterima di kediaman Gus Sholah di Tendean Jakarta Selatan. Dengan gayanya yang khas, sarungan kemeja batik dan kopiah, beliau dengan hangat menyambut kami bertiga.

Sore itu kebetulan beliau sedang ada di Jakarta. Selama ini beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus Pesantren Tebuireng di Jombang. Kami berbincang banyak hal dan menyampaikan apa yang menjadi kerisauan kami bertiga. Tentang

politik, kampanye saat Pilpres yang sarat dengan pembelahan sosial dalam bentuk; kekerasan, hoax, intoleransi dan politik kebencian hingga janji kampanye Jokowi-JK dalam program Nawacita.

Dengan sabar beliau mendengarkan kisah kami satu persatu. Sikap mau mendengar dan mau menyimak dengan baik, adalah sifat yang saya kagumi dari beliau.

"Pancasila adalah dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Saran saya, segera bicarakan ini, suarakan ini, lakukan silaturahmi ke banyak pihak. Nanti kita atur pertemuan seperti ini lagi, ketika saya ke Jakarta lagi. Di rumah ini saja," begitu tutur beliau.

Setelah pertemuan, segera Mas Ma'shum dan Bang Sabar menugaskan saya untuk menerjemahkan anjuran Gus Sholah menjadi sebuah konsep dan strategi komunikasi. Ya, dua pokok pikiran: "Pancasila dan Silaturahmi".

Sejak saat itu saya intensif berkomunikasi dengan beliau melalui telpon dan pesan whatsup. Setiap tahap konsep yang saya susun selalu saya konsultasikan pada beliau tuk meminta saran dan masukan, jika tak bisa bertelpon kami komunikasi lewat pesan whatsup, beliau banyak mengirimkan link referensi bacaan.

Pernah dalam sebuah percakapan di telepon, beliau menasehati saya. "Kamu harus banyak baca, berusaha disiplinkan diri untuk membaca apa saja, setiap hari, pokoknya 30 menit sampai satu jam. Pasti bermanfaat," ujarnya, dengan suara parau dan berat yang khas.

Pikiran dan Gagasan Gus Sholah kami bawa pulang dan mendiskusikannya ke jaringan kami masing-masing. saya masih rutin bertemu dan diskusi dengan senior saya di Lintas Generasi, dalam sebuah kesempatan saya ceritakan hasil pertemuan di kediaman Gus Sholah, mereka membenarkan dan antusias sekali dengan gagasan tersebut, bahkan mendorong saya agar menjadikan ini sebagai sebuah Gerakan.

Kami bertiga berkumpul lagi di rumah beliau sekitar bulan Maret 2015. Kami paparkan pikiran dan gagasan beliau dalam bentuk skema dan tahapan operasional. Nampak beliau bersemangat menanggapi.

"Segera wujudkan saja. Mulai lakukan pertemuan-pertemuan, apa yang perlu dipersiapkan, kalo perlu tempat pakai saja rumah ini, pakai kamar kerja saya yang di depan," ujarnya. Maklum, ketika itu kami memang belum punya *home base*. Tempat kami berkumpul bertiga secara rutin bisa di mana saja. Kadang di kantor Mas Ma'shum di IKI, di rumah Bang Sabar atau di manapun.

Pikiran dari hasil pertemuan mulai kami kembangkan. Saya mulai mendesain logo dan nama gerakan. Saya terus mengolah dua poin utama dari Gus Sholah: Pancasila & Silaturahmi.

Di Lintas Generasi kami juga terus mendiskusikannya. Sampailah suatu waktu terlontar ucapan dari Bang Bernad Napitupulu, kosa kata "kebajikan". Ya kebajikan, menurutnya yang sedang kita kerjakan ini adalah "sebuah usaha untuk kebaikan bersama". Di Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, kebajikan adalah "Sebuah kebaikan-keselamatan, perbuatan baik".

Saya mulai merangkai nama gerakan ini menjadi Gerakan Kebajikan Pancasila, disingkat GKP

Mas Ma'shum dan Bang Sabar terus bergerak mencari lokasi di mana tempat yang ideal untuk kami berkumpul. Mereka berusaha sebisa mungkin untuk tidak menggunakan kediaman Gus Sholah, agar tidak merepotkan beliau.

Akhirnya Mas Ma'shum menawarkan kantornya di gedung BNI 46 lantai 14 (Kantor IKI) untuk dijadikan semacam "Sekretariat Bersama". Kerja gotong royong ini tahap demi tahap terwujud.

Maret hingga Juni, kami mulai sibuk ke sana-ke mari, menyuarakan Pancasila. Bertemu dengan perorangan atau kelompok kami selalu berbicara Pancasila. Setiap ada unda-ngan seminar

atau bedah buku, Mas Ma'shum selalu menu-gaskan saya untuk menghadiri, agar saya bisa berkenalan dengan banyak orang dan jika ada peluang bicara, bisa menyampaikan wacana tentang Pancasila. Demikian juga dengan Bang Sabar, dia selalu mengajak saya jika ada rapat atau diskusi dengan berbagai kelompok.

Semua hasil kerja kami sekecil apapun kami doku-mentasikan dan kami wartakan, lewat akun sosial media kami masing-masing. Bang Sabar dan Mas Ma'shum lewat akun Facebook mereka, saya sendiri lebih suka menggunakan Twitter yang akunnya sengaja saya buat dengan nama gerakan ini: Gerakan Kebajikan Pancasila, @ *Gerak_Kebajikan*. Melalui akun ini saya aktif menggaungkan kembali pikiran dan kutipan para pendiri bangsa, tentu dengan maksud membangun kembali kesadaran kolektif kita sebagai anak bangsa di tengah situasi yang masih terbelah. Gus Sholah sendiri waktu itu sangat produktif menulis di berbagai media tentang Pancasila, baik cetak maupun *online*.

Kenangan indah bersama beliau ketika kami meren-canakan sebuah kegiatan untuk menyambut hari lahir Pancasila 1 Juni. Kami memperingati hari lahir Pancasila dengan talk show di radio Womans Radio, sebuah radio swasta dengan segmen market audiens untuk perempuan. Hadir sebagai nara sumber Gus Sholah, Mas Ma'shum, Bang Sabar dan saya sendiri.

Dalam wawancara di radio tersebut Gus Sholah dengan cermat dan detail sekali menguraikan tentang Pancasila dan mengaitkannya lewat tokoh-tokoh pahlawan perempuan Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan dulu. Beliau menutup wawancara tersebut dengan optimisme dan wejangan bagaimana perempuan dapat berperan serta memajukan bangsa dan Negara.

Enam bulan kami melangkah bersama, menggaungkan Pancasila. Dengan berbagai keterbatasan, kami bertiga terus melangkah. Suatu hari beliau meminta kami untuk mencari lagi

tokoh senior agar memperkokoh gerakan dan gaungnya bisa menjadi lebih besar. Bang Sabar mengusulkan Buya Syafii Maarif, dan kami setuju. Dalam gerakan ini akan ada dua tokoh Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Tentu akan menjadi semakin kuat resonansinya.

Buya menyambut baik gerakan ini dan bersedia mendukungnya. Dua tokoh senior yang sudah teruji integritas dan reputasinya bergerak bersama dalam Gerakan Kebajikan Pancasila. *Alhamdulilah*, puji Tuhan.

Selama kurun waktu enam bulan saya, Mas ma'shum dan Bang Sabar menemui banyak sekali tokoh dari berbagai latar belakang. Ada intelektual, akademisi, profesional, jurnalis, rohaniawan hingga budayawan.

Langkah silaturahmi yang beliau anjurkan mulai membuahkan hasil. Gerakan yang kami usung menemukan tempatnya, memperoleh energi. Banyak kalangan bersimpati dengan agenda yang kami kerjakan. Pancasila mulai disadari kembali sebagai milik bersama.

Institusionalisasi

Sepanjang 2015 setidaknya ada lima kasus intoleransi. Salah satunya pada 17 Juli 2015, terjadi peristiwa Tolikara di Papua. Ketika itu dalam suasana Idul Fitri.

Kami amati salah satu faktor yang membuat suasana semakin panas kala itu adalah maraknya berita-berita hoax di sosial media, ditambah opini yang bernada provokatif dan tidak bertanggung jawab. Terdorong atas situasi-kondisi tersebut, kami kembali bertemu di kediaman Gus Sholah. Dalam kesempatan ini Gus Sholah menegaskan supaya komunitas seperti kita harus tetap bergerak. "Namun Negara juga harus terlibat. Ini kerja besar, kerja bersama. Pancasila harus dilembagakan agar disadari sebagai nilai bersama," ujarnya.

Atas saran beliau, diadakan pertemuan dengan mengundang beberapa tokoh intelektual yang dianggap produktif berkarya dalam soal-soal kebangsaan. Pada 19 Oktober 2015, di kediaman beliau, pertemuan itu berlangsung. Hadir beberapa tokoh, di antaranya Buya Syafii Maarif, Jo Rumeser, Yudi Latif, Radhar Panca Dahana, Indradi Kusuma, dan beberapa tokoh alumni ITB serta sejumlah anak-anak muda. Selama hampir tiga jam para tamu berdiskusi, memberi pandangannya secara kritis pada konsep Gerakan Kebajikan Pancasila.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa catatan. Pertama, Gerakan Kebajikan Pancasila sesegera mungkin membuat acara yang lebih, mengundang banyak pihak dengan membahas tema utama tentang Pancasila. Diharapkan melalui acara tersebut tercipta kohesi sosial dan semua pihak bisa mengambil peran untuk menyuarakan kembali Pancasila, sehingga wacana Pancasila akan semakin bergulir di ruang publik. Kedua, komunikasi politik di tingkat elit harus segera dilakukan untuk mengingatkan pentingnya toleransi, persatuan dan kesatuan sebagai modal sosial bersama. Untuk poin ini Gus Sholah dan Buya Syafii yang akan bergerak.

Kami menyepakati untuk mengadakan event yang agak besar, untuk menggulirkan Gerakan Kebajikan Pancasila, pada tanggal 8 Desember 2015. Beliau mengusulkan agar kegiatan itu diselenggarakan saja di rumahnya. "Ada halaman luas di belakang rumah. Selain itu rumah ini juga kosong, karena hanya saya dan ibu yang tinggal di sini," tutur Gus Sholah.

Bulan November 2015 menjadi bulan paling sibuk bagi kami untuk menyiapkan acara yang mengundang banyak orang. Untuk melaksanakan event yang diamanatkan oleh para tokoh yang hadir di rumah Gus Sholah pada petemuan sebelumnya, kami membentuk tim kecil. Kami libatkan teman-teman jaringan yang bersimpati pada gerakan ini. Ada unsur Pesantren Tebuireng, Maarif institute, IKI,

Relawan IRM, tokoh aktivis senior di Lintas Generasi, juga individu-individu yang secara sukarela membantu dan mendukung kegiatan ini dari awal hingga akhir. Di antara mereka ada (alm) Pak Indradi Kusuma (Sekum IKI), Mas Eddy Setiawan (peneliti IKI), Mbak Nursinta Uli, Mbak Nia, Mas Mulyono, Bang Buntulan, Mas Amin (Tebuireng) serta banyak nama lagi.

Saya merasakan semangat kekeluargaan dalam menyiapkan kegiatan ini. Kami seperti anggota keluarga berada di rumah Gus Sholah. Ada yang bekerja di teras, ada yang diskusi di ruang tamu, ada yang mengetik di pekarangan belakang rumah. Saya sangat menikmati masa-masa itu, saling tolong, saling membantu. Saya semakin sadar bahwa di balik kesempatan yang beliau berikan kepada kami, sebenarnya beliau sedang mengajarkan nilai-nilai yang khas dan otentik Indonesia. Gotong Royong.

Kegiatan yang digelar secara lesehan di teras belakang rumah Gus Sholah itu kami beri nama "Seri Membangun Alam Pikir Pancasila dari Rumah". Istilah ini berangkat dari konsep Gus Sholah tentang silaturahmi. Kami ingin suasana yang tercipta adalah suasana kekeluargaan guyub rukun berkumpul bersama, layaknya sebuah keluarga yang sedang berkumpul di rumah. Sedang tema diskusi yang kami angkat adalah "Peran Pancasila dalam mencegah kekerasan di era teknologi informasi". Rumusan tema berangkat dari fenomena kekerasan sepanjang kampanye Pilpres sampai meletusnya beberapa peristiwa intoleransi, di mana teknologi informasi memiliki andil besar dalam mempengaruhi sikap dan perilaku publik.

Secara khusus dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mba Puri Kencana Putri, pegiat HAM (KONTRAS), Mba Dyah Ekarini dengan karyanya sebagai Pendiri Komunitas WEWO (*Weekend Workshop*), Mas Didik Supriyadi, Pendiri PERLUDEM/Pemred Merdeka.com, Mas Alex Junaidi, Direktur dan Pendiri Serikat Jurnalistik untuk

Keberagaman (SEJUK), Mas Witanto, Sekertaris Jenderal Ikatan Wartawan Online (IWO) dan Mas Shafiq Pontoh, pegiat *Digital & Social Media*. Sebuah kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami, karena pernah berjuang bersama sosok yang kita cintai bersama Gus Sholah dalam Gerakan Kebajikan Pancasila.

Hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 acara *launching* Gerakan Kebajikan Pancasila (GKP) dan diskusi tentang Pancasila berlangsung meriah meski diselenggarakan dengan penuh kesederhanaan. Hadir para jurnalis, tokoh agama, kalangan aktivis hingga pekerja dan kaum profesional. Rumah Gus Sholah dipenuhi para tamu dari teras depan hingga pekarangan belakang.

Para narasumber bergantian menceritakan pengalaman mereka di dunianya masing-masing, kemudian membahas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat belakangan ini, tentang intoleransi, teror dan kekerasan yang terjadi di dunia nyata dan dunia maya melalui teknologi informasi. Gus Sholah dengan serius mendengar pikiran-pikiran anak muda, sesekali beliau membantu melengkapi pikiran-pikiran yang berkembang saat tanya jawab dalam diskusi, lewat contoh-contoh ataupun lewat pengalaman hidup beliau. Pada akhir diskusi beliau kembali mengingatkan kita tentang akar jati diri kita sebagai bangsa yang beragam, tentang budaya saling menghormati, tentang perjuangan dalam meraih kemerdekaan dan falsafah bangsa yang telah menjadi kesepakatan para Pendiri Bangsa dan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila.

Pikiran beliau yang luas dan mendalam, dengan tutur kata yang sederhana dan teratur, membuat kami memahami kembali makna dari kerukunan, semangat persatuan dan kebangsaan. Terima kasih Gus.

Usai acara, sebagai kenang-kenangan, semua yang hadir membubuhkan tanda tangan ikrar setia pada Pancasila dalam sebuah media papan yang telah disiapkan panitia, setelah itu kami berfoto

bersama Gus Sholah. Saya menyimpan semua kenangan indah itu dengan rapi di komputer saya, beberapa foto ada yang saya cetak dan saya letakkan di meja kerja saya, agar setiap saat kenangan indah itu bisa kembali saya kenang.

Esoknya, berita kegiatan di teras belakang kediaman Gus Sholah itu tersebar luas di banyak media massa. Banyak pihak menghubungi kami ingin mengundang Gus Sholah untuk melakukan kegiatan serupa. Saya, Bang Sabar dan Mas Ma'shum secara bergantian mendampingi beliau ke berbagai acara, di samping itu kami juga tetap menjalankan rencana kami semula, yaitu melakukan safari, silaturahmi ke beberapa tokoh untuk menyuarakan gagasan besar ini.

Ujungnya, pada suatu hari di tahun 2016, kami dihubungi pihak Pemerintah. Kami diundang Pak Luhut Binsar Panjaitan ke kantor beliau. Saat itu beliau menjabat Menko Polhukam. Kami diundang untuk memaparkan konsep pelembagaan Pancasila yang kami ingin usulkan. Saat itu saya juga ditugaskan Gus Sholah untuk selalu mendampingi Kang Yudi Latif.

Komunikasi kami dengan Pak Luhut berjalan baik, beberapa kali kami diundang kembali untuk berdiskusi dengan Menko Polhukam. Beliau adalah tentara yang berpikiran terbuka dan pribadi yang mau mendengar. Kami diberi kesempatan dengan baik untuk mengutarakan semua pikiran-pikiran kami. Beliau juga meyumbangkan pikiran dan pandangan yang menyempurnakan lembaga Pancasila yang kami usulkan tersebut.

Secara pribadi melalui tulisan ini saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Karena beliau orang yang pertama kali menyambut semua ide gagasan kami dan berjanji untuk segera menindaklanjutinya. Dalam satu kesempatan Kang Yudi Latif juga diundang ke Istana untuk memaparkan konsep lembaga Pancasila tersebut. Gus Sholah selalu

membimbing saya dari belakang. Tiap langkah dan peristiwa penting yang terjadi, secara teratur selalu saya laporkan kembali kepada Gus Sholah, Buya Syafii Maarif, Mas Saifullah Ma'shum dan Bang Sabar untuk memperoleh masukan dan pandangan dari mereka, serta langkah apa yang harus diambil.

Masih di tahun 2016, kami kembali dihubungi oleh Pak Luhut Panjaitan, agar mempersiapkan konsep dan struktur lembaga yang kami bayangkan. Saya kembali ditugaskan oleh Gus Sholah untuk mendampingi Kang Yudi memaparkan konsep struktur lembaga Pancasila tersebut. Usai diskusi, Pak Luhut berjanji akan segera membahas konsep kami dengan jajaran beliau, dan menyempurnakannya dari sudut pandang Pemerintah. Kami diminta mempersiapkan diri jika dalam waktu dekat lembaga ini akan diwujudkan.

Dari sinilah di kemudian hari terbentuk Badan Pembi-naan Ideologi Pancasila (BPIP) yang awalnya berbentuk dan bernama Unit Kerja Presiden (UKP) Pembinaan Ideologi Pancasila. ❖

Keikhlasannya yang Tiada Tara

Irfan Asy'ari Sudirman Wahid
Putra Sulung Salahuddin Wahid

BICARA tentang Gus Sholah, kita akan melihat banyak hal yang sangat menarik. Banyak orang sering mengangkat beberapa hal yang mungkin sudah banyak diketahui orang; kesederhanaannya, kejujurannya, sifatnya yang sangat visioner, keramahannya, positif thinking terhadap banyak hal, dan lain lain.

Tetapi kali ini, saya kepingin membahas sisi yang lain. Sisi yang mungkin nggak terlalu banyak yang memperhatikan.

Gus Sholah itu adalah seorang pendengar yang baik, tanpa melihat latar belakang orangnya. Beliau tidak membeda-bedakan siapapun orangnya. Nah ini kuat sekali berhubungan dengan silaturahim beliau. Pernah satu saat, tiba-tiba Papa (Gus Sholah) datang ke kantornya mantan asisten saya (yang sekarang menjadi partner bisnis saya). Gus Sholah diundang buka puasa di kantor itu. Papa sama Mama datang ke situ bergabung dengan puluhan milenials buka puasa di pinggir kolam renang. Saya kaget, tapi juga bahagia.

Kemudian juga, siapapun orang yang datang ke rumah beliau, selalu didengar oleh beliau. Kadang hal ini juga mengkhawatirkan kita. Karena kadang menjadi beban pikiran beliau, terutama di saat

sakit. Jadi beliau tidak membeda-bedakan. Mau itu anak kecil, mau itu orang besar siapapun, tokoh nasional ataupun orang 'biasa' tetap saja didengarkan oleh beliau.

Untuk tokoh sekaliber Gus Sholah, ini sangat tidak mudah, menjadi pendengar yang baik bagi siapapun.

Kemampuan silaturahmi beliau pun, sangat luar biasa. Misalnya, diundang sama orang yang tidak terlalu dekat, juga yang secara kepangkatan mungkin ya 'biasa-biasa saja', rumahnya di ujung gunung misalnya. Beliau tetap datang untuk datang ke acara pernikahan anaknya atau acara syukuran atau acara apa.

Selama waktunya pas tidak bentrok, pasti *disambangi* oleh beliau.

Ini merupakan kemampuan silaturahim yang luar biasa.

Saat-saat terakhir, sebelum beliau wafat, hampir seluruh keponakan-keponakan, sepupu saya itu didatangi rumahnya satu persatu.

Hal ini merupakan kenangan berkesan bagi mereka. karena didatangi di rumahnya.

Itu nggak mudah dan itulah kemampuan silaturahim beliau. Jadi setiap kali kalau ke Jakarta karena tinggalnya di Jombang, yang sakit disambangi. Ada yang meninggal di-takziahi.

Gus Sholah juga memiliki daya ingat yang sangat tajam. Seringkali ada orang ditanya nomor teleponnya, dihafal luar kepala. Itu luar biasa tajamnya. Iya 11-12 sama Gus Dur mungkin ya, atau Gus Im. Hal-hal kecil apapun diingat sama beliau. Karena mungkin sering baca buku, daya ingat yang tajam. Lalu pemahaman terhadap sesuatu pun tajam juga, karena sering membaca buku. Jadi wawasannya sangat luas.

Tiga hal itu sangat luar biasa menurut saya. Tetapi, dari semua yang membekas di saya, yang sangat unik adalah sepanjang pengetahuan saya, tidak sampai lima kali marah, selama umur

hidup saya. Tidak sampai lima kali malah. Saya pernah melihat papa marah, waktu nyetir zaman dulu di Kalimalang. Saya mungkin masih SMP atau SMA. Lalu di beberapa kejadian yang lain, termasuk yang berhubungan sama Muktamar NU. Saya melihat bapak adalah sosok yang sangat penyabar, bersahaja, di samping yang semua yang telah disebut itu.

Kami semua kehilangan sosok tersebut, bukan cuma saya sebagai keluarga. Tapi juga banyak orang yang mengenal beliau.

Satu hal yang menjadi inspirasi dari Bapak, adalah kebiasaannya untuk selalu memberi. Kalaupun Bapak terpaksa harus meminta, pasti bukan buat Bapak pribadi. Pasti untuk diberikan ke tempat yang lain lagi. Nah ini, yang harus kita contoh.

Yang paling terakhir, yang sangat luar biasa dari Bapak adalah sifat keikhlasan beliau. Sangat ikhlas. Saya kayaknya belum pernah menjumpai orang ada yang lebih ikhlas dari Bapak. Dan ini yang mudah-mudahan bisa menjadi dorongan pada kami, untuk mencontoh dan meneruskan apa yang memang beliau sudah lakukan. ❖

Gus Sholah dan Kelanjutan Proyek-Proyek Sosial

Prof. Dr. Kacung Marijan

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Universitas NU Surabaya

SEKITAR sebulan sebelum beliau berpulang, saya sempat bertemu dan ngobrol agak lama dengan Gus Sholah, setelah cukup lama tidak berjumpa dan ngobrol-ngobrol. Yang pertama, di sebuah hotel di Surabaya, setelah beliau menghadiri undangan pernikahan. Biasa, kami saling menanyakan kabar masing-masing sambil minum teh dan pisang goreng. Yang diobrolkan pun macam-macam, dari yang ringan sampai agak berat, mulai dari perkembangan Indonesia sampai NU, khususnya terkait perkembangan pendidikan tinggi yang didirikan oleh NU dan komunitasnya.

Kebetulan saya pernah diajak beliau memikirkan pendirian kembali Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY) di Pesantren Tebuireng, Jombang. Universitas ini telah lama berdiri. Hanya, karena hanya memiliki program studi keagamaan (Islam), universitas itu berubah menjadi Institut Keislaman Hasyim Asya'ari (IKAHA). Gus Sholah bermaksud menjadikan IKAHA menjadi UNHASY kembali, melalui pendirian universitas baru dan memasukkan program studi program studi non-keagamaan ke dalamnya. Alhamdulillah, UNHASY berdiri kembali pada 2013. Gus Sholah bersita-cita,

Pesantren Tebuireng tidak hanya melahirkan para lulusan yang alim di bidang keagamaan, melainkan juga alim di bidang-bidang lain. Gus Sholah bercita-cita, ada universitas yang memiliki kualitas bagus di tengah-tengah pesantren.

Dalam perbincangan itu, saya juga menyatakan pengakuan bersalah karena sudah lama tidak mengetahui perkembangan universitas tersebut, padahal saya termasuk anggota Dewan Pembina Yayasan yang menaungi universitas. Gus Sholah bercerita, bahwa UNHASY berkembang cukup bagus. Bahkan, jumlah mahasiswa baru dalam beberapa tahun terakhir ini lebih banyak kalau dibandingkan dengan jumlah mahasiswa baru dari universitas-universitas lain di Jombang. Saya tentu senang mendengarnya, dan ikut berdoa agar UNHASY terus berkembang dan menjadi salah satu universitas terbaik yang berdiri di tengah-tengah pondok pesantren.

Gus Sholah lalu menanyakan perkembangan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), karena beliau mengetahui bahwa sejak pertengahan 2016 saya ikut membantu pengelolaan UNUSA, menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Saya bercerita bahwa UNUSA juga berkembang baik. Kalau pada 2016, peringkat UNUSA di Indonesia baru 2085, pada 2019 sudah masuk di peringkat 146. Gus Sholah senang mendengarnya, dan juga ikut mengamini doa agar UNUSA menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia dalam beberapa tahun yang akan datang.

Pembicaraan mengenai perguruan tinggi di lingkungan NU memang menjadi salah satu topik menarik, karena selama ini NU memang tidak lekat dengan brand universitas. Beberapa kali ketemu teman dan saya bertanya mengenai hal ini. Saya tanyakan ke mereka, "Ketika berbicara NU, apa yang Anda bayangkan?" Di antara jawabannya adalah: 'pesantren, kiai, tradisional, dan desa.' Dari sekian jawaban itu, tidak ada satu pun teman itu yang mengaitkan dengan universitas atau perguruan tinggi.

Ya, jawaban seperti itu memang tidak terlalu salah, karena selama ini memang NU memiliki brand yang lekat dengan pesantren dan kiai. Terkait hal demikian, saya menjadi teringat ketika suatu saat berkunjung ke Universitas Islam Malang (UNISMA) pada 2013. Di antaranya, saya ngobrol gayeng dengan Almarhum Kiai Tholhah Hasan. Saya kemukakan rasa kagum saya atas perkembangan pesat UNISMA, berbeda jauh dengan yang saya lihat beberapa tahun sebelumnya. Sambil bercanda, Almarhum menyela sambil terkekeh, "Mas Kacung, UNISMA ini maju karena tidak ada NU-nya. *He…he…*" Pernyataan bernada satire ini untuk menunjukkan bahwa selama ini NU memang tidak lekat dengan brand universitas. Selama ini ada kesan kalau orang NU itu tidak '*entos*' (bisa) mengelola universitas. Maka, ketika ada universitas di lingkungan NU berkembang sangat baik, itu seolah-olah dikelola oleh 'bukan NU'.

Dalam perbincangan dengan Gus Sholah itu saya kemukakan, bahwa harus ada rebranding tentang NU. Bahwa NU bukan hanya kental dengan brand pesantren dan Islam moderat, misalnya, melainkan juga kental dengan brand perguruan tinggi yang modern dan terbuka. Dalam kesempatan itu saya kemukakan bahwa UNUSA dan perguruan tinggi lain yang menyandang nama NU, harus membuktikan bahwa NU juga memiliki brand universitas yang baik juga. Bahwa orang NU juga entos di dalam mengelola universitas yang berkualitas dan terkemuka, bukan hanya mengelola pesantren yang sudah terbukti hasilnya.

Gus Sholah sangat setuju dengan pandangan itu. Di antara strategi yang kita bicarakan waktu itu adalah bagaimana masing-masing perguruan tinggi di lingkungan NU mengembangkan ciri khas dan keunggulan masing-masing. Pengembangan demikian, akan memungkinkan sebuah perguruan tinggi lekat dengan jati dirinya, melainkan juga mudah bergerak dan kompetitif kalau dibandingkan perguruan tinggi yang lainnya. Selain itu, yang tidak

kalah pentingnya, adalah memperkuat adanya kolaborasi antara satu dengan yang lain. Melalui kolaborasi, pengelolaan perguruan tinggi tidak hanya bisa lebih efektif dan efisien, melainkan juga bisa mempererat persaudaraan satu sama lain.

Amanah sebagai pengasuh Pesantren Tebuireng memang terkesan sebagai 'kecelakaan'. Gus Sholah memang darah biru di Tebuireng. Tetapi, beliau sepertinya tidak dipersiapkan untuk mengasuh pesantren. Hal ini terlihat dari latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Beliau lulus sebagai arsitek ITB, bukan dari pesantren atau beberapa pesantren sebagaimana pengasuh pesantren pada umumnya. Setelah lulus, beliau juga aktif di pekerjaan-pekerjaan profesional.

Tetapi, tanda-tanda bahwa Gus Sholah bukanlah profesional kepala kuda terlihat dari minatnya. Gus Sholah memiliki bakat yang tidak jauh dari kakaknya, Gus Dur, di dunia tulis menulis. Beliau justru banyak menulis di luar kearsitekturan, yakni masalah-masalah sosial keagamaan. Minat di luar dunia profesional, di perusahaan-perusahaan konstruksi itu, khususnya terjadi setelah krisis moneter. Beliau aktif di kegiatan-kegiatan sosial politik, di antaranya adalah menjadi anggota MPR, dan pada 2002 sebagai Wakil Ketua Komnas HAM. Gus Sholah juga aktif di kepengurusan PBNU.

Maka, 'kecelakaan' Gus Sholah sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, sebanarnya sudah ada yang mengatur. Selain memiliki darah biru, Gus Sholah yang sudah banyak pengalaman, justru memiliki banyak perspektif bagaimana mengelola pesantren. Beliau memahami bagaimana tradisi pesantren, tetapi juga memahami bagaimana organisasi modern itu dikelola. Maka, ketika dipimpin oleh Gus Sholah, Pesantren Tebuireng bukan mengalami keredupan, melainkan mengalami perkembangan yang lebih baik. Tradisi pembelajaran di pesantren terus berkembang di dalam wajah pesantren yang lebih rapi dan enak dipandang.

Pertemuan kedua berlangsung di *ndalem* beliau di Tebuireng, beberapa hari sebelum beliau berangkat ke Jakarta untuk berobat. Ketika itu, saya, bersama Pak Achmad Jazidie, Rektor UNUSA, menemani Pak M Nuh, yang memang memiliki janjian untuk ngobrol-ngobrol. Apa yang kami bicarakan juga tidak jauh dengan yang saya obrolkan sebelumnya. Hanya, karena bersama Pak Nuh, obrolan jadi lebih gayeng, khususnya mengenai ke-Indonesiaan dan ke-NU-an. Di antara yang kami perbincangkan adalah tentang pendirian dan pengembangan proyek-proyek sosial NU, seperti lembaga pendidikan dan kesehatan. Proyek-proyek ini perlu dikebut pembangunan dan pengembangannya sebagai hadiah untuk memperingati satu abad berdirinya NU.

Gus Sholah ingin melanjutkan pembicaraan setelah kembali berobat dari Jakarta. Memang, pertemuan fisik selanjutnya tidak pernah terjadi lagi. Gus Sholah harus lebih dahulu kembali. Tetapi, 'proyek-proyek sosial' yang kami obrolkan akan terus diobrolkan dan diwujudkan. Gus Kikin yang memperoleh amanah sebagai pemangku Pondok Pesantren Tebuireng, akan melanjutkan gagasan-gagasan besar para pendiri pesantren, termasuk dari Gus Sholah. Banyak aktivis NU yang lain juga akan melanjutkan 'proyek-proyek sosial' itu di berbagai tempat di Indonesia. Semoga. ❖

Konsistensi Peran Politik Kebangsaan dan Ke-NU-an

Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.
Gubernur Jawa Timur

BANYAK pengalaman berharga yang telah saya alami bersama dengan Gus Sholah. Beliau banyak mempertaruhkan banyak hal untuk saya selama saya berinteraksi dengan beliau. Misalnya beliau rela mendampingi saya ketika menjalani persidangan di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), ketika terjadi sengketa penetapan pasangan calon pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Timur. Beliau berkenan menjadi saksi untuk memberikan penjelasan di forum tersebut. Ini merupakan pertaruhan integritas dari seorang Kiai Haji Salahudin Wahid. Beliau ingin menunjukkan bahwa posisi saya memang benar, maka beliau merasa harus mendukung perjuangan di DKPP. Jadi kebenaran itu sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan.

Sering kali saya mendapatkan penguatan dan pencerahan dari beliau. Dalam beberapa kesempatan tak jarang kami berbincang banyak hal sampai berjam-jam. Misalnya, ketika bertemu di tengah malam yang semula hanya boleh sampai pukul 21.00 ternyata kami mengobrol tembus sampai pukul 01.00 pagi. Padahal dokter beliau mengizinkannya sampai pukul 21.00. Akhirnya saya memberikan kode (melalui gerakan mata) ke Bu Nyai Farida bagaimana

menyudahi berbincangan bertiga tersebut. Berbincang-bincang tentang kepentingan bangsa dengan beliau sangat *gayeng*, dan beliau semangat sekali.

Saya ingat betul bagaimana beliau menyampaikan ide-ide briliannya sebagai seorang kiai. Beliau ingin pikiran-pikiran besar yang ada di benaknya itu ada yang bisa memahami, menjalankan dan mengintroduksinya di dalam berbagai gerakan pemikiran di antara kita. Saya sungguh merasa bersyukur mendapatkan pencerahan cukup mendalam dari beliau.

Komitmen Ideologis dan Idealisme

Selama beliau memberikan dukungan terhadap perjuangan saya, beliau sering ditegur oleh beberapa orang. Intinya, mengapa Gus Sholah mau mempertaruhkan nama besar dan ketokohan beliau. Gus Sholah pun menjawab apa adanya, "*Loh* ini adalah soal keadilan. Soal yang prinsipil. Jadi saya membela Bu Khofifah ini atas dasar keadilan, bukan atas dasar permintaan perseorangan." Itulah sesungguhnya substansi dari pergerakan dan pemikiran beliau.

Saya merasakan bahwa antara sisi ideologis dan idealisme menyatu dalam diri seorang Kiai Salahuddin Wahid. Saya sering kali kangen dengan pikiran-pikiran yang secara filosofis sangat mendalam tentang keindonesiaan, persatuan. Beliau selalu mengatakan, tugas dan pekerjaan rumah kita yang harus dinomorsatukan, pertama adalah persatuan. Kedua persatuan, dan ketiga persatuan. Dari sisi itu tampak bagaimana sosok Salahudin Wahid ingin memberikan referensi kepada kita semua bahwa kebersatuan di antara kebhinekaan itu adalah tugas rumah mendasar kalau kita ingin kehidupan kemanusiaan, kebangsaan dan keindonesiaan kita terbangun secara lebih solid dan komprehensif.

Suatu saat beliau di Rumah Sakit PON yang tidak boleh orang lain tahu, karena dikhawatirkan istirahatnya akan berkurang. Kala

itu saya tidak tahu kalau tidak diperbolehkan mengunjungi beliau. Beliau kirim WA duluan ke saya. "Saya di sini, kalau nak Khofifah ada waktu saya ingin ketemu, tapi saya sudah sampai di rumah sakit," ungkap beliau di WA nya. Beliau memanggil saya dengan panggilan "nak", seakan ingin menunjukkan bahwa saya sudah dianggap sebagai anak oleh beliau.

Kemudian masuk chat WA lagi, "Nanti kalau sudah sampai di parkiran tolong kasih tahu saya." Saya sama tidak tahu bahwa waktu itu Gus Sholah tidak diperkenankan bertemu dengan orang lain. Sesampai di parkiran Gus Billy, putera beliau yang nomor dua, menjemput saya di bawah.

Kemudian saya naik, masuk ke ruangan Gus Sholah, dan Bu Nyai Farida kaget. "*Lho* kok bisa Mbak Fifah tahu kalau Gus Sholah di sini?" ucap Bu Nyai Farida. Saya sempat merasa tidak enak, tapi beliau langsung tidak pakai *introduction* lagi memulai cerita soal kebangsaan dan mengajak saya diskusi mengenai isu yang menurut saya sangat berat.

Yang dibahas oleh beliau menurut saya selalu masalah-masalah besar dan bagi saya itu soal yang sangat berat. Banyak cerita, termasuk persoalan bangsa yang aktual hari ini. Bagaimana bangsa hari ini berbenah, jadi bagaimana berbenah itu bukan cerita tentang Tebuireng. Yang selalu beliau pikirkan adalah bagaimana bangsa ini. Itu soal yang berat menurut saya.

Konsistensi Peran Politik Kebangsaan dan Ke NU-an

Membangun negeri ini memang ada proses politiknya. Pada posisi seperti inilah peran-peran Gus Sholah cukup signifikan. Karena sangat banyak tokoh senior yang kemudian mencoba mencari solusi dengan mencari referensi, dengan Sowan ke Gus Sholah atau dengan cara mengundang Gus Sholah, misalnya. Mereka mengharapkan pengayaan dari Gus Sholah tentang

ketatanegaraan dan kebangsaan. Gus Sholah, menurut saya, selalu memerankan politik kebangsaan. Beliau lebih merepresentasikan performa sebagai negarawan, bukan sebagai politisi. Beliau jauh dari kepentingan politik praktis.

Sedang di NU, Gus Sholah adalah NU kultural yang sangat kuat. NU hidup karena kultur, NU ini eksis karena kultur. Sedangkan struktur itu adalah tempat di mana NU menyemai secara ideologis, tersambungkan dengan berbagai elemen pada wilayah-wilayah administratif, wilayah setiap provinsi, kabupaten, kecamatan, termasuk Ranting sampai kelompok Anak Ranting.

Ada PW (pengurus wilayah) dan PC (pengurus cabang), itu struktur berbasis wilayah administratif. Sedangkan kultur itu *borderless*. Kultur tidak mengenal batas wilayah administratif. Ia bisa mendesiminasikan pikiran ke mana saja, di mana saja dan kapan saja, tanpa ada *barier* (penghalang atau sekat) bahwa ini wilayahnya A, ini wilayahnya B. Yang terkait dengan kewilayahan adalah domain struktur.

Dengan adanya struktur maka muncul kewenangan administratif, sedang kultur tidak memiliki batasan kewenangan administratif. Jadi sebetulnya Gus Sholah lebih kuat hadir sebagai sosok kultural NU. Bagi seorang Gus Sholah yang cucu Pendiri NU, pasti lebih lekat dengan kultur. Oleh sebab itu kita bisa memaklumi jika banyak hal yang selalu dipikirkan oleh beliau tentang NU dan perkembangannya. Dan hal ini agaknya yang sering membuat beliau merasa takut, yang kemudian bersikap lebih berhati-hati.

“Saya takut kalau nanti saya ditanyai sama Mbak Hasyim ,” ungkap Gus Sholah.

Jadi hal itu menjadi daya motivasi yang kuat sekali bagi Gus Sholah. Beliau merasa bahwa mandat untuk bisa menjalankan visi dan misi NU yang menjadi pikiran strategis Hadratussyeikh itulah yang Gus Sholah lakukan di mana saja, kapan saja dan di mana saja.

Bagi beliau, berjuang di NU tidak harus dalam struktur. Perjuangan secara kultural beliau perankan dengan luar biasa.

Manajer yang Sederhana

Sisi kesederhanaan dan kebersahajaan Gus Sholah sangat menonjol. Hal itu saya lihat dari sikap dan orientasinya dalam perjuangan yang tidak diletakkan pada target dan status jabatan, melainkan pada substansi perjuangan. Hal ini mungkin karena menyatunya nilai ideologis dan idealisme pada sosok beliau.

Mirip sebagaimana sikap kakaknya, Gus Dur. Misalnya dengan lontaran ucapan Gus Dur, "*Wong aku nggak dadi Presiden yo nggak patek en* (Saya tidak jadi Presiden ya tidak masalah)," kata Gus Dur. Gus Sholah tidak jauh dari sikap yang demikian. Bahkan di saat beliau tidak lagi pada posisi memiliki jabatan publik tertentu, idealisme beliau menemukan jalan lapang. Beliau bisa mengekspresikan apa yang menurut beliau pada hal tertentu harus dikoreksi. Beliau memahami koreksi sebagai jalan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Sisi kesederhanaan dan kebersahajaan beliau lainnya, adalah tampak dari upaya Gus Sholah melakukan berbagai konsolidasi pikiran dan budaya. Hal itu beliau lakukan dengan cara yang sangat sederhana, misalnya mengenai moda transportasi yang digunakan atau fasilitas kegiatan. Sebagai tokoh nasional di Ibu Kota, kemudian berada di kampung halaman, Tebuireng Jombang, tidak kemudian membuat sosok Gus Sholah merasa jatuh dan menjauh dari pikiran-pikiran besar tentang bagaimana masa depan bangsa.

Masih pada konsistensi peran kebangsaan, pada lingkup pesantren Gus Sholah membuktikan, bahwa keterampilan manajerial itu menjadi bagian penting untuk menata sebuah pesantren. Menariknya, pada posisi itu tidak kalah pentingnya adalah peran istri beliau, Ibu Nyai Farida. Bu Nyai Farida menjadi sosok yang sangat penting untuk bisa membangun citra pesantren yang sehat

dan bersih, selain tentunya pesantren yang inspiratif dan penguatan fasilitas pendidikan sebagai khazanah intelektual Islam, khususnya ke-NU-an. Menurut saya, beliau berdua merupakan pasangan yang sangat ideal, terutama dalam konteks kehidupan saat ini, di mana Pesantren Tebuireng menjadi referensi dari banyak pihak yang ingin menggali pikiran-pikiran NU dan pikiran-pikiran Hadratussyeikh.

Orang ingin menggali NU yang moderat dan toleran. Orang banyak ingin tahu bagaimana NU menyemai *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan atas dasar kemanusiaan), *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebagai sesama warga setanah air), dan *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan sesama Islam). Banyak para pendeta yang sowan ke Tebuireng, sampai kemudian bermalam di Tebuireng untuk bisa mendapatkan bukti keseharian yang dijalankan di lingkungan Tebuireng. Jadi jejaring yang dimiliki Gus Sholah, dan manajerial skill nya menjadi sisi penting dalam membangun sistem di Pesantren Tebuireng. Berjejaring dengan berbagai kalangan, tidak saja di kalangan antarpesantren, melainkan dengan berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri. Jejaring ini juga yang dapat kita cermati dari sisi pengembangan pesantren, sehingga ada Tebuireng 2 Tebuireng 3 dan seterusnya. Artinya Gus Sholah sedang menyemai Islam Ahlussunnah wal-Jama'ah melalui dunia pendidikan pesantren.

Ini merupakan peran kultural yang *borderless*. Jadi kalau dalam struktural yang kerja itu adalah cabang sesuai wilayahnya, beliau ini banyak melakukan peran kultural secara lebih kuat. Beliau tidak membedakan apakah itu PW, PC, atau tingkat stuktur di bawahnya. Kehadiran dan kapasitas Gus Sholah menjadi garansi bagi siapa saja yang ingin mendesiminasikan Ahlussunnah wal-Jamaah melalui lembaga pesantren.

Giat dan gigihnya Gus Sholah untuk menata masa depan Pesantren Tebuireng tidak dapat diungkapkan oleh Bu Nyai Farida dengan kata-kata. Gambarannya, Gus Sholah pulang dari rumah

sakit, bukannya istirahat di rumah (*ndalem*), melainkan langsung berangkat ke Aceh untuk melihat pesantren yang di sana. Pulang dari rumah sakit beliau ke Riau. Lokasi pesantren bukan di kota Pekanbaru, tapi masih jauh. Pulang dari rumah sakit Gus Sholah langsung ke Bengkulu, bukan di Kota Bengkulu, tapi jauh lagi dari kota Bengkulu. Giat dan gigihnya beliau sungguh luar biasa. Mudah-mudahan itu semua menjadi tabungan jariyah yang beliau "*unduh*" dan terima sekarang ini.

Dari berbagai pengalaman saya dengan beliau, tentu karena satu alasan, bahasa mudahnya, pikirannya cocok. Saya teringat akan kaidah sosial, bahwa kita akan bertemu pada orang yang memiliki referensi pemikiran yang sama. Pasti orang akan bertemu pada habitat yang sama, baik itu habitat pada sisi ideologis maupun sisi idealisme. Itulah yang kemudian menjadikan ruh kebersamaan kita.

Suatu saat kita harus bertemu, padahal kita sedang dalam kondisi capek sekali. Sesudah bertemu dengan Gus Sholah rasa capek langsung hilang. Bila saya tidak ke Tebuireng, kami bertemu di suatu tempat atau forum pertemuan yang jadwalnya bersamaan dan kami sama-sama diundang. Tidak selalu dalam pertemuan beliau menjadi nara sumber utama dan lebih banyak berbicara. Sering juga beliau kadang berposisi mendengarkan, bukan sebagai nara sumber. Kemudian setelah itu beliau diminta untuk menyampaikan pandangannya sebagai pengayaan, baru beliau "*dawuh*" apa sih sebetulnya.

Saya melihat kebersamaan yang saling mengikat dan bahwa komitmen perjuangan adalah suatu perikatan yang kuat, meskipun tidak ada perjanjiannya. Bagi saya ini adalah sebuah mitsaqan ghalidza, sebuah perikatan yang kuat. Sebuah perikatan yang kuat itu kalau ada gravitasinya mendorong kita tergerak untuk hadir, meskipun capek, setelah ketemu menjadi tidak capek. Meskipun jauh, akhirnya dijalani dan perjalanan tidak terasa jauh.

Selain sosok sederhana, Gus Sholah memiliki kepekaan sosial tinggi. Hal ini saya rasakan selama mengemban amanah sebagai Ketua Umum Muslimat NU. Dan saya rasa dalam darah dan dagingnya Gus Sholah selain mengalir darah dari seorang Kiai Wahid Hasyim, juga mengalir darah dari Bu Nyai Sholihah. Bu Nyai Sholihah sangat banyak mendirikan lembaga-lembaga sosial di Muslimat NU. Pada posisi seperti itu maka pasti gravitasi kegiatan sosial pada diri seorang Kiai Salahuddin Wahid itu kuat sekali. ❖

Salahuddin Wahid dan Penguatan HAM dan Wawasan Kebangsaan

Prof. Dr. Masykuri Abdillah
Staf Khusus Wakil Presiden RI

Pendahuluan

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan munculnya Era Reformasi pada 1998 mendorong munculnya reformasi politik yang demokratis dan memberikan kebebasan bereskpresi yang lebih besar dari pada era sebelumnya. Di masa presiden B.J. Habibie sebagai pengganti Soeharto, reformasi politik ini meliputi pemilihan umum segera secara bebas pada 1999, dukungan kepada ekspresi kebebasan dan penegakan hak-hak asasi manusia (HAM). Di samping itu, Habibie juga mendukung amandemen UU Partai Politik yang memungkinkan munculnya partai-partai politik baru berdasarkan berbagai latar belakang ideologis, termasuk agama. Kemudian reformasi ini dilanjutkan dengan perubahan (amendemen) UUD 1945 pada 1999, 2000, 2001 dan 2002 pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.

Dukungan kepada HAM tidak hanya dilakukan oleh negara, yakni dalam bentuk UU No. 23 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tetapi juga oleh *civil society* serta para inetelktual dan tokoh masyarakat. Di sisi lain, reformasi juga berimplikasi pada program sosialisasi Pancasila yang dinilai sebagai induktrinasi ideologi. Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 kemudian dicabut melalui

Ketetapan MPR no XVIII/MPR/1998, sehingga penataran-penataran P4 pun dihapus, termasuk lembaga yang menanganinya, yakni Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Demikian pula, Pendidikan Moral Pancasila (PMP) juga dihilangkan. Konsekuensinya adalah semakin banyak anak-anak Indonesia yang tidak hafal dan kurang mengenal Pancasila. Di sisi lain dengan adanya kebebasan yang luas itu, muncul ekspresi politik identitas kelompok-kelompok tertentu yang sebagian berusaha untuk mengembangkan ideologi keagamaan (terutama Islam) dan ideologi kiri (komunisme).

Hal tersebut memunculkan kekhawatiran akan terancamanya ideologi neagara dan persatuan bangsa, sehingga banyak para tokoh yang kemudian menyuarakan perlunya penguatan wawasan kebangsaan, terutama untuk mengharmonisasikan antara orientasi keagamaan dan orientasi kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang atau orientasi seseorang terhadap negara-bangsa sebagai satu kesatuan ideologis dalam bentuk Pancasila, kesatuan yurisdis berdasarkan UUD 1945, kesatuan geografis dalam bentuk negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) dan kesatuan demografis sebagai negara yang penduduknya sangat majemuk (berbhinneka). Salah satu di antara tokoh yang memiliki komitmen pada HAM dan wawasan kebangsaan adalah Dr. KH. Salahuddin Wahid (1943-2020), yang kemudian disebut Gus Sholah. Dia adalah putra keempat dari KH. Wahid Hasyim, dan cucu dari pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari. Tulisan ini membahas pemikirannya tentang HAM dan wawasan kebangsaan serta kiprahnya dalam penegakan HAM dan upaya-upaya yang dilakukan dalam penguatan wawasan kebangsaan.

Penegakan HAM

Sebagai salah satu negara muslim, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menghormati dan melindungi hak asasi

manusia (HAM) sejak awal kemerdekaan, seperti yang ditunjukkan oleh UUD 1945 yang secara eksplisit menyebutkannya. Hanya, saja pada masa lalu terdapat perbedaan penafsiran pemerintah terhadap HAM, yang terkait dengan kecenderungan politiknya. Pemerintahan Orde Baru memahami HAM dalam konteks masyarakat Indonesia yang "integralistik", yang tidak terlepas dari upaya-upaya untuk membatasi hak-hak sipil dan politik warga negara. Munculnya era reformasi ditandai sebagai titik awal dari transisi menuju demokrasi yang substantif di Indonesia, yang juga berarti komitmen yang lebih besar untuk perlindungan HAM dengan pemahaman HAM yang tidak membatasi hak-hak sipil dan politik warga negara. Komitmen itu ditunjukkan dengan legislasi UU No. 23 tahun 1999 tentang HAM, diikuti oleh UU No. 23 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Di samping itu, beberapa peraturan telah dicabut atau diubah, seperti UU tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, dikenal sebagai Anti-Subversif UU No 11/PNPS/1963 pada tahun 1999. Kemudian amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000 menyebutkan HAM secara lebih rinci. Sejalan dengan hal ini, pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang sebenarnya sudah pernah didirikan pada tahun 1993 tetapi belum berfungsi secara efektif. Komisi ini memiliki tugas: (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (2) untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM dalam rangka pengembangan kepribadian masyarakat Indonesia dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada tahun 2005, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dengan UU No. 11 tahun 2005, dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dengan UU No.12

tahun 2005. Hal ini berarti bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki instrumen paling lengkap tentang HAM. Konsekuensinya, pemerintah berkewajiban untuk pelaksanaan instrumen dengan membuat kebijakan dan langkah-langkah untuk mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Sejalan dengan hal ini, pemerintah dan DPR wajib untuk mereformasi peraturan negara yang tidak sesuai dengan HAM. Di samping itu, penegakan HAM juga menjadi program pemerintah yang disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dengan demikian, pada dasarnya pemerintah di era reformasi (1998-sekarang) telah mengakui, menghormati dan melindungi HAM dan menjadikannya sebagai visi dari semua sektor pembangunan nasional. Pemerintah menjamin kebebasan berekspresi, termasuk dalam bentuk kritik, oposisi, demonstrasi dan protes yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang lebih penting lagi adalah selama era ini pemerintah telah melakukan pemilihan umum yang bebas, di mana warga bisa menentukan pilihan mereka dengan bebas tentang partai politik serta calon anggota legislatif, presiden dan kepala daerah sesuai dengan aspirasi mereka sendiri.

Kemajuan-kemajuan dalam penegakan HAM tersebut telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Dewan HAM PBB (Human Rights Council of the United Nations). Namun disamping kemajuan-kemajuan tersebut, Dewan HAM PBB juga menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan ke depan dalam perlindungan HAM. Di antara rekomendasi yang disampaikan dalam Universal Periodic Review (UPR) kepada pemerintah Indonesia pada 2017 adalah persoalan hukuman mati dan persoalan penodaan agama yang masih tetap dipertahankan dalam KUHP, serta persoalan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

yang memang tidak bisa mendapatkan pengakuan dari publik. Rekomendasi semacam ini juga disampaikan kepada negara-negara maju yang selama ini dinilai sudah menegakkan HAM tetapi dianggap masih bermasalah dalam beberapa hal, walaupun substansi berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

Dalam kaitan dengan perlindungan HAM ini Gus Sholah memiliki peran yang cukup berarti, baik ketika menjadi Wakil Ketua Komnas HAM pada periode 2002-2007 maupun sebagai tokoh Ormas, LSM dan pendidikan. Semula dia awam dengan tugas-tugas di lembaga ini, tetapi dia melaksanakan tugas ini dengan serius, sehingga kemudian dia merasa menikmatinya. Hal ini terjadi karena melalui lemabaga ini dia bisa memberi bantuan bagi kalangan yang sedang mengalami masalah. Cukup banyak tugas yang dilakukan oleh dia, baik dalam bentuk kegiatan harian maupun keterlibatan dalam Tim Pencari Fakta. Dia pernah menjadi Ketua Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang menyelidiki kasus kerusuhan Mei 1998. Dia juga pernah menjadi Ketua Tim Penyelidik Adhoc Pelanggaran HAM Berat kasus Mei 1998.

Gus Sholah cukup banyak berbicara tentang perlindungan HAM terkait dengan persoalan agama. Hal ini bisa jadi karena pada periode itu dia adalah anggota Komnas HAM yang paling dekat dan memahami persoalan keagamaan. Dia pun membahas HAM dalam pespektif ajaran Islam dengan mengutip Q.S. al-Hujurat: 13, yakni: "*Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertaqwa.*" Menurut dia, Islam menghargai HAM sejak awal, tetapi dalam perjalanan sejarah HAM itu lalu terabaikan dan terlupakan. Umat Islam bahkan kemudian mempelajari HAM dari Barat. Pesan Nabi Muhammad pada khutbah haji wada' yang

menekankan pada persamaan manusia tanpa melihat ras dan warna kulit amat sarat dengan pesan menghargai kemanusiaan. Dia juga menguraikan, bahwa dalam ajaran Islam terdapat lima hal yang wajib dijaga karena merupakan hak dasar (keniscayaan) bagi setiap manusia, yakni *hifdh al-dîn* (menjaga agama), *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdh al-'aql* (menjaga akal) *hifdh al-mâl* (menjaga harta), dan *hifdh al-nasl* (menjaga keturunan).

Yang menarik adalah bahwa kalau pada umumnya para aktivis HAM cenderung pada konsep HAM Barat yang notabene sekuler, Gus Sholah tidak mendukung HAM sekuler, karena Indonesia bukan negara sekuler. Menurut dia, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanua adalah Ketuhananan Yang Maha Esa, dan adanya Kementerian Agama yang dibentuk pada Januari 1946 menunjukkan bahwa Pancasila tidak sekuler dan sesuai dengan Islam. Dia tetap mendukung pentingnya keberadaan Kementerian Agama ini, sambil mengutip Bapaknya, KH. A. Wahid Hasyim, bahwa "tugas Departemen Agama adalah menyelenggarakan kehidupan keagamaan tiap-tiap agama yang berhubungan dengan negara serta hubungan antargolongan agama dan golongan agama lainnya." Keberadaan Kementerian Agama mempertegas bahwa agama adalah elemen yang penting dan terkait secara fungsional dengan kehidupan bernegara di Indonesia. Pada 2000 dia pun menulis sebuah artikel di Harian Duta Masyarakat dengan judul "Negara Sekuler No, Negara Islam No". Bahkan dalam mensifati negara Indonesia ini, dia sependapat dengan ayahnya, KH. Wahid Hasyim, meski dia harus berbeda pendapat dengan kakaknya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dalam kenyataannya, meski konsep "HAM universal" itu berasal dari Barat, dalam kenyataannya, pelaksanaan HAM negara-negara Barat dalam beberapa hal terdapat perbedaan. Misalnya keberadaan aliran-aliran keagamaan (*cult*), ada negara Barat yang melarangnya,

tetapi ada juga negara Barat yang memperbolehkan sebagai bagain dari perlindungan HAM. Hal ini mengandung pengertian, bahwa pelaksanaan HAM juga tidak terlepas dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat di masing-masing negara. Oleh karena itu, berbeda dengan kelompok liberal dan sekuler, Gus Sholah memandang tepat pembatasan HAM pada pasal 28 (J) UUD 1945. Pembatasan ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi kebutuhan hanya dengan mengambil moralitas, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum menjadi pertimbangan. Pembatasan ini juga dibenarkan oleh ICCRP, sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 (3). Pembatasan ini merupakan "*margin of appreciation*" dalam pelaksanaan HAM, sebuah konsep yang dimunculkan oleh the European Court of Human Rights.

Namun demikian, dalam beberapa hal Gus Sholah tetap menunjukkan komitmen pada perlindungan HAM, yang dianggap tidak sejalan dengan banyak ulama dan tokoh agama di Indonesia, seperti dalam kasus aliran Ahmadiyah yang dianggap menyimpang dari aqidah Islam. Dia membedakan antara perspektif hukum agama dan hukum negara tentang aliran ini. Dalam perspektif hukum agama, seperti yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), aliran Ahmadiyah adalah aliran menyimpang dan sudah keluar dari ajaran Islam, tetapi dalam perspektif hukum negara, aliran ini mempunyai hak hidup di negara ini. Sebagaimana diketahui, fatwa MUI ini sejalan dengan Liga Muslim Dunia (Rabithah al-'Alam al-Islami) dalam konferensinya di Makkah pada 14-18 Rabbiul Awwal 1394 H (6-10 April 1974) dan diikuti oleh 140 delegasi negara-negara Muslim dan organisasi Muslim dari seluruh dunia menyatakan, bahwa aliran Ahmadiyah bukan termasuk Islam.

Akhirnya sikap pemerintah terhadap Ahmadiyah ini dinyatakan dalam bentuk Keputusan Bersama Menag, Mendagri, Jaksa Agung

tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (nomor: 3 Tahun 2008, nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, nomor: 199 Tahun 2008). Keputusan Bersama ini memuat ketentuan antara lain: memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, atau pengurus JAI untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, Keputusan Bersama ini juga memberi peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI.

Hal tersebut menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia harus menjaga kerukunan beragama, baik internal umat beragama maupun antarumat beragama. Kerukunan umat beragama menjadi faktor penting dalam kehidupan masyarakat dan negara dan bahkan menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Gus Sholah sangat memahami tentang kerukunan ini, dan dia pun sering ambil bagian dalam upaya-upaya penyelesaian kasus-kasus inteleransi atau konflik umat beragama. Namun dia menyadari bahwa legislasi tentang kerukunan ini cukup problematik, seperti dalam kasus usulan RUU yang diajukan Departemen Agama pada 2003. RUU ini banyak mendapatkan penolakan terutama dari kelompok aktivis HAM dan kelompok minoritas, yang menolak campur tangan negara dalam masalah kerukunan umat beragama. Sebenarnya UU tentan kerukunan ini sangat penting, karena sampai kini satu-satunya sila dalam Pancasila yang belum ada penjabarannya dalam bentuk UU adalah sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalaupun

ada yang keberatan tentang istilah "Kerukunan Umat Beragama" dalam UU, bisa saja digunakan kata "UU tentang Perlindungan Umat Beraagama". UU ini bisa memuat definisi atau kriteria agama, kebebasan beragama, organisasi majelis agama, aliran keagamaan, pendidikan agama, penyiaran agama, pendirian rumah ibadah, hari libur keagamaan, bantuan luar negeri, kerukunan umat beragama, forum kerukunan, dan penodaan agama.

Persoalan lain yang dikaitkan dengan HAM adalah wacana tentang pencabutan TAP MPRS No. XXV/1966 tentang Pelarangan PKI dan Ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme yang diajukan oleh Gus Dur ketika ia menjadi presiden. Pencabutan ini diusulkan karena menurutnya hal ini tidak sesuai dengan HAM dan sistem demokrasi, yang notabene menjamin adanya persamaan antara semua orang tanpa melihat ras, etnis, agama, ideologi, dan sebagainya. Di samping itu, hal ini juga dimaksudkan sebagai langkah awal untuk melakukan rekonsiliasi secara tuntas. Ketidaksetujuan Gus Sholah terhadap usulan ini diungkapkan dengan mengatakan, bahwa terlepas dari setuju atau tidak terhadap susbtansinya, yang jelas saatnya tidak tepat untuk mengemukakan usulan itu. Pendapat Gus Sholah ini sejalan dengan pendapat mayoritas rakyat dan semua ulama di Indonesia, terutama karena banyak ulama yang menjadi korban keganasan PKI tahun 1965. Yang jelas, pelarangan sebuah organisasi dan ideologinya yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau terhadap negara itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Barat demokratis, seperti pelarangan Nazi di Jerman.

Harmonisasi Islam dan Negara

Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 31 Mei-1 Juni 1945 terjadi perdebatan tentang dasar negara, terutama antara kelompok

nasionalis dan kelompok Islam. Kelompok nasionalis menginginkan negara Indonesia sebagai negara sekuler, sedangkan kelompok Islam menginginkan Islam menjadi dasar negara, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Akhirnya mereka setuju menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang juga disebut sebagai ideologi negara. Meski demikian, sepanjang sejarah negara ini, pemaknaan dan pelaksanaan kedudukan agama dalam negara ini mengalami dinamika dan tarik ulur, terutama antara kelompok agama dengan kelompok nasionalis.

Hal tersebut terjadi pada sidang-sidang Konstituante 1956-1959 yang berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tarik ulur ini juga terjadi pada masa demokrasi terpimpim, yang memberikan kesempatan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk berkuasa, tetapi kemudian berakhir dengan percobaan kudeta Gerakan 30 September (G 30 S) PKI) yang gagal. Tarik ulur antara Islam dan Pancasila pun berlangsung di awal-awal periode Orde Baru (1966-1998) dan awal-awal era reformasi (1998-sekarang). Saat ini pun perdebatan antara Islam dan Pancasila kadang-kadang masih terjadi, atau minimal antara orientasi keagamaan dan orientasi kebangsaan atau sekularisme. Hal ini diperburuk dengan munculnya kelompok-kelompok ekstrim kanan (keagamaan) dan ekstrim kiri, termasuk yang menuntut penghidupan kembali PKI di era reformasi ini. Di kalangan umat Islam di era reformasi ini muncul faham-faham dan prilaku keagamaan konservatif, radikal, bahkan ekstrimis dan mendukung terorisme, yang notabene berpotensi tidak toleran dan dapat mengancam ideologi negara dan keutuhan NKRI.

Melihat perkembangan tersebut banyak ulama serta intelektual dan tokoh Islam merespon dengan penegasan kembali bahwa Pancasila dan NKRI sudah sesuai dengan Islam; dan oleh karenanya, keduanya tidak boleh dipertentangkan melainkan harus diharmonisasikan. Di antara tokoh Islam yang terpanggil untuk

mengharmonisasikan antara Keislaman dan Keindonesiaan adalah Gus Sholah, sebagaimana tercermin dalam bukunya yang berjudul Memadukan Keindonesiaan dan Keislaman. Judul ini menunjukkan, bahwa Gus Sholah mendukung kedua orientasi Indonesia dan Islam, atau orientasi antara Pancasila dan Islam. Dengan demikian, dia menolah negara sekuler, yang notabene memisahkan antara agama negara. Dalam konteks agama Islam, pemisahan ini justru menimbulkan banyak masalah, karena berbeda dengan agama-agama lain, agama Islam banyak memberikan aturan yang lebih detail tentang prilaku pemeluknya dan norma-norma dalam hubungan sosial. Menurut dia, Pancasila bisa memberi jalan untuk memadukan Keindonesiaan dan Keislaman. Hal ini dibuktikan dengan pengesahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang notabene memberikan jalan masuknya syariat Islam ke dalam sistem hukum nasional.

Gus Sholah sangat memahami adanya perdebatan dalam sidang-sidang BPUPKI tahun antara nasionalis Islam dan nasionalis sekuler 1945 yang membahas tentang dasar negara, yang berakhir dengan kesepakatan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Kamudian, muncul perdebatan dalam Majelis Konstituante pada 1956-1959, yang berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dengan catatan dijiwai oleh Piagam Jakarta yang tidak terpisahkan dari UUD 1945. Demikian pula, pada dasawarsa 1980-an muncul ketentuan mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi ormas dan orpol, yang awalnya menimbulkan perdebatan tajam, tetapi pada akhirnya diterima oleh hampir semua ormas Islam. Dengan penerimaan ini dia memandang, bahwa dikhotomi dengan Islam dengan sekuler telah dapat diredam dengan adanya titik temu berupa “Negara Pancasila yang bersifat religius” atau “bukan negara agama dan bukan negara sekuler”.

Tulisan tersebut memang dipublikasi pada Desember 2000, karena dalam perkembangan berikutnya, muncul kelompok-kelompok baru yang menolak Pancasila sebagai ideologi negara dan menganggapnya sebagai thâghût, antara lain Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), dan Hizbut Tahir Indonesia (HTI), yang justru mengusung konsep negara Islam (*daulah Islâmiyyah*) atau negara khilafah. Di samping itu, ada juga kelompok-kelompok tertentu di Indonesia yang simpati dan bahkan mendukung Islamic State in Iraq and Sham (ISIS). Di antara mereka ada yang menggunakan kekerasan (teror) untuk mencapai tujuan mereka tersebut. Mereka berkesimpulan, bahwa negara Pancasila ternyata tidak mampu menghasilkan negara yang adil secara hukum dan secara sosial, masih banyak orang miskin dan kekurangan gizi, dan masih banyak penduduk yang belum bersekolah.

Sebenarnya alasan mereka mendirikan negara Islam tidak hanya didasarkan pada alasan obyektif, seperti kekurangan-kekurangan tersebut, tetapi juga alasan subyektif, dalam arti keharusan untuk menerapkan hukum Islam dan bahkan Khilafah Islamiyyah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan dalam Islam. Di samping berkembangnya gerakan yang berideologi Ikhwan al-Muslimun (yang populer dengan nama Tarbiyah) dan Hizbut Tahrir yang memang berorientasi politik, gerakan puritan (Salafi/Wahabi) pun semakin mendapatkan kesempatan untuk bekembang. Meski gerakan puritan ini pada dasarnya tidak berorientasi politik, dalam kenyataannya, gerakan ini tidak bisa terlepas sepenuhnya dari politik juga, karena kemudian mereka memiliki faham yang tidak toleran, baik terhadap sesama Muslim maupun terhadap non-Muslim. Di antara mereka ada juga menolak Pancasila dan menganggapnya bertentangan dengan Islam.

Menanggapi persoalan tersebut, Gus Sholah mengatakan, bahwa Pancasila itu sebenarnya masih baru di atas kertas dan baru

di lidah saja, belum terwujud secara nyata dalam kehidupan. Meski demikian, tidak jaminan bahwa mendirikan Daulah Islamiyyah atau Khilafah Islamiyyah akan mampu secara langsung mewujudkan negara hukum dan memperbaiki birokrasi pemerintah. Menurut dia, menyatakan Pancasila harus diwujdukan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama terkait dengan sila pertama (agama), sila kedua (kemanusiaan), dan sila kelima (keadilan sosial). Selama hal ini belum terwujud, bangsa Indonesia akan terus menghadapi kelompok-kelompok yang ingin menggatikan Pancasila dengan Islam sebagai dasar negara. Dia pun kemudian menyatakan, bahwa upaya-upaya untuk mewujudkan hal ini tidak hanya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi juga kewajiban seluruh umat Islam, terutama mereka yang berpendidikan tinggi.

Gus Sholah juga menyoroti wacana tentang hubungan antara Islam dan negara pada akhir dasawarsa 1990-an, yakni substantif-inklusif dan formal-eksklusif. Dia tidak setuju dengan kedua bentuk hubungan ini, karena dalam kenyataannya kini terdapat sejumlah UU yang menerapkan syari'at Islam secara formal, sepertu UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Zakat, UU Wakaf dan sebagainya. Keberadaan UU ini adalah sesuai dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pasal 29 UUD 1945. Yang jelas, dia tidak setuju legislasi syari'at Islam secara keseluruhan. Menurut dia, agama dan negara mempunyai wilayahnya masing-masing dan tidak boleh saling mencampuri. Oleh karenanya, dia pun mengusulkan perlunya perumusan batas-batas ini. Dia pun tidak sependapat jika sejumlah UU dinilai sebagai bentuk dari "Islamisasi Pancasila", tetapi hanya upaya menghindarkan Pancasila dari proses sekularisasi. Dalam kenyataannya, banyak negara-negara Eropa Barat yang memiliki UU terkait dengan agama, seperti UU tentang pendidikan agama, UU tentang pajak gereja, dan sebagainya.

Dalam konteks ini, menurut hemat saya, hubungan antara agama dan negara adalah hubungan *intersectional* (persinggungan antara agama dan negara). Hal ini berarti bahwa dalam hal-hal tertentu syari'at Islam menjadi hukum negara, yang disebut sebagai penerapan hukum Islam secara formal. Sedangkan dalam bidang-bidang lainnya, penerapannya bisa bersifat substantif atau essensial. Dengan demikian, agama tidak bisa sepenuhnya terlibat dalam urusan negara; dan sebaliknya, negara juga tidak bisa terlibat sepenuhnya dalam urusan agama, misalnya negara tidak boleh terlibat dalam menyatakan apakah suatu aliran keagamaan itu sesat atau tidak. Yang jelas, di era reformasi ini, pelibatan hukum agama sebagai sumber hukum nasional atau input dalam pengambilan kebijakan publik (*public policy*) sangat terbuka, baik secara formal maupun secara substantif dan essensial ini. Di samping UU Perkawinan, UU Zakat, UU Wakaf, juga terdapat UU Perbankan Syariah tahun 20008 dan UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2008.

Sebagai tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Gus Sholah merasa yakin bahwa NU mampu memberikan pengabdian untuk menjaga keutuhan bangsa secara terus menerus. Hal ini sudah dibuktikan dalam sejarah bangsa Indonesia ini, yang dimulai dari Resolusi Jihad yang memberikan fatwa kepada umat Islam untuk berperang melawan penjajah Belanda yang membonceng Sekutu. Demikian pula, tokoh dan umat Islam telah bersikap tegas terhadap Peristiwa Madiun, Peristiwa DI/TII dan PRRI/Permesta, serta terhadap G 30 S/PKI. Tugas menjaga keutuhan bangsa dan negara ini pun dimasukkan dalam proses pendidikan di lingkungan NU, termasuk di pesantren, yang dianggap sebagai subsistem pendidikan yang bersifat tradisional. Hal ini bisa dibuktikan, bahwa para alumni pesentren, dengan pemahaman Islam yang moderat menurut Ahlussunnah wal jama'ah, umumnya memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi, dan sekaligus memiliki sikap toleransi yang tinggi pula, termasuk

terhadap kelompok lain yang berbeda keyakinan atau berbeda aliran keagamaan.

Penutup

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Salahuddin Wahid (Gus Sholah) merupakan tokoh yang memiliki komitmen kepada hak-hak asasi manusia (HAM) dan sekaligus wawasan kebangsaan. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, karena di satu sisi HAM merupakan kebutuhan dasar manusia, tetapi ekspresinya bisa berlebihan sehingga bisa merusak persatuan bangsa dan ideologi negara. Oleh karenanya, dukungan kepada perlindungan HAM ini harus diimbangi dengan penguatan wawasan kebangsaan. Berbeda dengan umumnya para aktivis HAM yang cenderung mendukung HAM sekuler, Gus Sholah mendukung HAM yang dibatasi atau disesuaikan dengan kondisi sosial-politik di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 J UUD 1945. Demikian pula, dia pun menolak negara Indonesia yang sekuler, yang memisahkan antara agama dan negara, tetapi memadukan antara Keindonesiaan dan Keislaman. Untuk memperkuat wawasan kebangsaan ini, di satu sisi diperlukan edukasi tentang HAM dan wawasan kebangsaan bagi rakyat Indonesia, dan di sisi lain diperlukan uraian yang lebih jelas kepada mereka tentang karakteristik HAM dan wawasan kebangasaan yang dianut di Indonesia, tertutama dalam perspektif Islam moderat.

Dalam hal ini perlu penjelasan yang tepat tentang hubungan antara agama dan negara, yang dalam konteks Indonesia, dimana keduanya saling bersinggungan dan tidak bisa dipisahkan sepenuhnya seperti yang dianut negara-negara sekuler. Demikian pula, perlu ada penjelasan yang tepat tentang bentuk negara yang berideologi Pancasila, yang kemudian disebut sebagai perjanjian atau konsensus nasional (*al-mîtssâq al-wathanî*). Penjelasan ini sekaligus menolak

argumentasi pendukung "negara Islam" (*daulah Islâmiyyah*) secara formal atau sistem khilafah yang memanggap negara Pancasila bertentangan Islam. Khilafah memang menjadi sistem kenegaraan yang dipraktikkan sejak masa al-Khulafa' al-Râsyidûn sampai Dinasti Utsmani, tetapi sistem ini sebenarnya hanya peristiwa sejarah, bukan ajaran Islam yang bersifat absolut. Bahkan selain pada masa al-Khulafa' al-Râsyidûn, praktik-praktik khilafah ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam, misalnya kepemimpinan yang turun temurun dan kecenderungan otoritarianisme pada sebagian besar pemimpinnya. ❖

Gus Sholah Meneruskan Tradisi *Founding Fathers*

Dr. Martiono Hadianto
Direktur Utama PT Pertamina (1998-2000)

PERTANYAAN mendasar yang perlu dikemukakan sehubungan dengan berbagai persoalan kebangsaan yang akhir-akhir ini terus mengemuka, terutama terkait dengan ancaman disintegrasi bangsa oleh kelompok keagamaan yang masih mempersoalkan ideologi kebangsaan kita, adalah: adakah tokoh sekaliber Gus Dur dan Gus Sholah yang bakal muncul, yang diharapkan bisa menjaga integrasi bangsa dari perpecahan?

Kita sangat kehilangan figur Gus Sholah, yang sepanjang hayatnya melanjutkan perjuangan sang kakak, KH. Abdurrahman Wahid, mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk mencari solusi terhadap persoalan kebangsaan.

Saya sangat mengagumi keluarga KH. A. Wahid Hasyim, sebagai tokoh yang benar-benar konsisten memikirkan masalah kebangsaan, di atas persoalan pribadi dan golongan, apalagi kepentingan keluarga. Sang ayah, KH. Abdul Wahid Hasyim, dan dua orang putranya, Gus Dur dan Gus Sholah, telah mendemontrasikan dengan sangat baik tanggungjawab kebangsaan sebagai tokoh bangsa. Gus Dur dan Gus Sholah telah meneruskan tradisi yang dimiliki para *Founding Fathers*, yaitu idealisme yang terus terjaga dalam merawat kehidupan

kebangsaan. Dengan idealisame yang kuat, dan menjauhkan diri dari sikap pragmatis, itu menjadikan keluarga Wahid Hasyim berhasil meletakkan mainstream dalam kultur kehidupan warga Nadliyin sampai saat ini. Komitmen kebangsaan warga Nahdliyin yang tetap terjaga sampai saat ini merupakan warisan kultural yang ditinggalkan oleh keluarga Wahid Hasyim.

Saya satu almamater dengan Gus Sholah di ITB. Gus Sholah satu angkatan di atas saya yang kuliah di teknik kimia, sedangkan beliau masuk teknik sipil. Sebagai yuniornya ketika di kampus, saya tidak cukup dekat dengan Gus Sholah. Bersama Pungki Purwoto dan yang lain-lain, Gus Sholah waktu itu aktif di Dewan Mahasiswa dan aktif di Masjid Salman, sementara saya aktif di perhimpunan teknik kimia. Saya tidak tahu kalau Gus Sholah adalah putra tokoh yang saya kagumi karena pandangan kebangsaannya yang luas, KH. Wahid Hasyim. Tidak tampak bahwa ia putra seorang tokoh bangsa, karena penampilannya yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari di kampus.

Jika di kemudian hari saya merasa menjadi kawan dekat dengan Gus Sholah, itu lebih dipertautkan oleh kesamaan concern dan perhatian yang besar pada masalah kebangsaan. Feeling kami bisa menyambung dan ketemu sejak terjadinya reformasi. Gus Sholah terus menerus menuangkan keprihatinan dan gagasan tentang kebangsaan melalui tulisan-tulisan dan forum-forum di mana Gus Sholah hadir. Senior saya di ITB, Pungki Purwoto, yang sejak awal terus menjalin hubungan dengan Gus Sholah, banyak membuka jalan bagi terjadinya interaksi saya dengan Gus Sholah. Mas Pungki banyak menceritakan ihwal kiprah Gus Sholah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dan keprihatinannya melihat perkembangan kehidupan kebangsaan yang mengalami *setback*. Sejak itu hubungan kami menjadi akrab dan intens, dipersatukan oleh kesamaan *concern* terhadap masalah kebangsaan.

Sebenarnya gejala terjadinya potensi ancaman disintegrasi bangsa itu sudah muncul tahun 1958, ketika ada kebijakan pemulangan warga etnis Tionghoa ke RRC yang diikuti keputusan politik Bung Karno menjadikan Indonesia masuk dalam Kelompok Negara Ketiga atau dikenal dengan Gerakan Non-Blok. Kemudian disusul dengan kondisi di mana terjadi suasana pembelahan dan pembenturan secara dikhotomis antara kekuatan negara dengan rakyat, antara PKI dengan non-PKI, yang merupakan karakter dari perjuangan PKI, yang berujung dengan meletusnya peristiwa G30S PKI. Pada bulan Mei 1962 mulai muncul sentimen politik antargolongan yang luar biasa, sehingga kondisi negara tidak pernah stabil.

Kepemimpinan Pak Harto di era Orde Baru telah memecah belah elemen bangsa yang salah satunya berwujud dengan pembatasan-pembatasan yang diberlakukan bagi warga keturunan Cina. Sejak itu negeri ini terus menghadapi persoalan kebangsaan, bahkan hingga lahirnya reformasi tahun 1998.

Masalah kebangsaan juga muncul dan dipicu oleh persoalan ekonomi. Dari sisi ekonomi, cara kita membangun ekonomi negeri ini sebenarnya sama dengan apa yang dilakukan Belanda ketika menjajah. Yaitu membangun pulau Jawa dan melupakan membangun daerah-daerah lain. Itulah yang terjadi pada era Orde Baru.

Pasca reformasi masalah kebangsaan yang terjadi telah bergeser isu dan sumbernya. Bukan pembelahan dan pertentangan politik antara kekuatan negara dengan kekuatan PKI, atau mempertentangkan antara PKI dengan kekuatan non-PKI, tetapi beralih dengan memperhadapkan ideologi negara dengan paham keagamaan, terutama Islam, yang dikembangkan oleh kelompok Islam politik atau Islam ideologis.

Sejak dulu di Nusantara ini sudah berkembang agama-agama yang diakui oleh Negara sebagai agama yang resmi, dan antara

pemeluk agama yang satu dan yang lain bisa hidup harmonis dan merasa bersaudara dalam keluarga besar yang bernama bangsa Indonesia. Jika terjadi konflik kebangsaan, isunya bukan isu yang bersumber dari pertentangan politik antara ideologi bangsa dan kelompok agama, melainkan antara kekuatan PKI dan kekuatan non-PKI. Tetapi sejak era reformasi bergulir, persoalan kebangsaan dominan dipicu oleh isu hubungan Negara dan agama. Term "kafir" atau yang populer disebut dengan "*takfiri*" (mengafirkan orang lain yang tidak seiman atau sehaluan dengannya) demikian mudah dilontarkan. Bahkan pen-takfir-an itu juga terjadi di antara orang yang sesama agama, hanya karena perbedaan aliran atau mazhab.

Presiden Gus Dur hadir sebagai tokoh yang merestorasi kehidupan kebangsaan yang sudah mulai banyak melenceng dari paham kebangsaan yang diwariskan para Founding Fathers. Gus Dur mendemonstrasikan kepeduliannya terhadap kebangsaan, dan dilanjutkan oleh Gus Sholah. Gus Dur adalah Presiden yang pertama kali mengingatkan kembali persoalan kebangsaan.

Jika dirunut dari perkembangan awal tumbuhnya spirit menjaga nilai kebangsaan di tengah masyarakat, tampak benang merah perjuangan yang diperankan oleh kakek dan ayah Gus Sholah, hingga perkembangan yang terjadi saat ini. Sang kakek, yaitu KH. M. Hasyim Asyari, menginisiasi Resolusi Jihad sehingga lahir perlawanan 10 November 1945 bersama KH. A. Wahid Hasyim, dilanjutkan dengan penerapan Pancasila sebagai asas kehidupan berbangsa pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama (pada Muktamar NU di Asembagus Situbondo tahun 1984) yang dimotori oleh Gus Dur, kemudian dirawat dan terus diperjuangkan oleh Gus Sholah melalui berbagai forum dan tulisan-tulisannya. Paham dan spirit kebangsaan yang diwariskan oleh kakek dan ayah Gus Dur dan Gus Sholah inilah yang hingga kini menjadi tradisi dalam kehidupan warga NU dan menjelma menjadi sikap dan paham kebangsaan umat Nahdliyin.

Saya kagum dan benar-benar bangga dengan keluarga KH. A. Wahid Hasyim. Pemikiran, paham dan sikap kebangsaan mereka yang konsisten dan terus dijaga oleh putra-putra beliau. Sikap kebangsaan sebagai orang Indonesia dengan segenap kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai warga bangsa, tidak menghalangi untuk menjadi pemeluk Islam yang saleh. Paham kebangsaan yang tidak dipertentangkan dengan paham dan ajaran agama yang dianut. Itu juga yang dikehendaki oleh Bung Karno, yang dapat kita cermati dari berbagai kumpulan tulisannya yang menyatakan, bahwa sekalipun Indonesia tidak berdasarkan agama melainkan Pancasila, tetapi kita menolak Indonesia menjadi negara dan bangsa yang sukuler.

Saat bangsa ini menghadapi merajalelanya pragmatisme dan sentimen antarwarga bangsa yang dipicu oleh perbedaan, kita merindukan hadirnya sosok seperti KH. A. Wahid Hasyim, Gus Dur dan Gus Sholah.

Meski muncul sedikit terlambat dan tidak melalui jalur politik sebagaimana Gus Dur, kiprah kebangsaan yang dilalui Gus Sholah sungguh luar biasa. Beliau bagai tak mengenal lelah, di usianya yang sudah senja, selalu mencurahkan atensinya kepada masalah kebangsaan. Hadir di seminar-seminar yang diselenggarakan oleh organisasi apa pun, membentuk jaringan di antara kelompok-kelompok strategis, dan menemui tokoh-tokoh bangsa yang lain untuk diajak berdiskusi bagaimana mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi bangsa. Itulah yang dilakukan Gus Sholah hingga akhir hayatnya.

Dan Gus Sholah terasa pas melakukan peran itu, karena beliau memiliki keunggulan dibanding kakaknya, Gus Dur, yaitu dalam hal sikapnya yang bijak. Sikap bijak Gus Sholah itu pula yang menempatkan beliau sebagai tokoh integrator bangsa.

Sebagai pejabat, saya memiliki keterbatasan untuk bisa terlibat secara langsung dalam forum-forum yang diinisiasi oleh Gus Sholah.

Saya hanya bisa mengikuti melalui tulisan-tulisan karangan beliau, atau pemberitaan surat-surat kabar, dan sesekali berdiskusi secara personal dengan Gus Sholah.

Pada tahun 2013, saya berkesempatan bersilaturrahmi ke Pesantren Tebuireng Jombang, mendampingi Menteri Pertambangan. Banyak pejabat yang ikut dalam rombongan Menteri. Saya sungguh merasa terharu dan tidak menduga dengan penyambutan beliau kepada saya. Di tengah tamu rombongan yang jumlahnya banyak itu, dari gesture dan ekspresi yang tampak dari bahasa tubuhnya saya merasakan kalau saya dianggap sebagai kawan dekat. Sewaktu istri saya meninggal dunia bulan November 2016, di tengah kesibukannya Gus Sholah secara khusus menyempatkan diri untuk melayat ke rumah saya.

Saya bersyukur dan sangat terharu mendapatkan kesempatan bisa berkawan dengan Gus Sholah. Kini kita merindukan, akankah hadir sosok seperti Gus Dur dan Gus Sholah, di tengah problem kebangsaan yang semakin berat ini? ❖

Penjaga Warisan Kakek dan Ayahnya

Dr. Mujib Rohmat
Anggota Fraksi Golkar DPR RI

"SAYA senang dengan gagasan merdeka belajar dan kampus merdeka dari Mas Nadiem. Saya setuju orientasi Mas Nadiem yang tidak hanya terfokus pada *output* tetapi juga harus berorientasi pada *outcome*. Betul pemikirannya, bahwa kalau orang sudah jadi sarjana maka kalau bisa bangun usaha sendiri dan bermanfaat untuk masyarakat, membuka lapangan kerja untuk warga."

Demikian kira-kira ungkapan Gus Sholah yang masih saya ingat ketika mulai menulis testimoni ini. Pendapat Gus Sholah tersebut disampaikan kepada saya dan beberapa teman yang sowan kepada beliau di Pesantren Tebuireng, Jombang sekitar satu bulan sebelum beliau wafat di Jakarta.

Walaupun beliau telah lama menjadi pengasuh salah satu pesantren terkemuka di Tanah Air yang berkedudukan di Jombang, sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, namun Gus Sholah tidak pernah melepaskan perhatiannya terhadap isu-isu dan peristiwa nasional yang terjadi di Tanah Air. Berbagai komentar dan gagasannya muncul merespon perkembangan nasional yang terjadi, termasuk kebijakan Mendikbud, Nadiem Makarim tersebut.

Banyak kalangan yang meminta pendapat dan masukan Gus Sholah tentang berbagai hal. Baik ketika Gus Sholah di Jakarta

maupun ketika telah menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng. Mereka merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan beliau. Juga nyaman dengan isi komentar atau gagasan beliau.

Saya dalami mengapa situasi itu terjadi? Saya temukan minimal dua hal penyebabnya. Pertama, pendapat dan pemikiran Gus Sholah tergolong moderat, berpikir jalan tengah, menjauh dari kutub pemikiran ekstrim atau yang emosional dan revolusioner atau reaktif berlebihan. Dengan model pemikiran yang moderat itu maka Gus Sholah sesungguhnya mencerminkan jalan pemikiran mayoritas umat Islam dan bangsa ini. Melalui jalan pemikiran keislaman dan kebangsaan yang moderat itu, Gus Sholah menjadi salah satu contoh tokoh NU yang dapat menjadi acuan.

Kedua, dari aspek kepribadian dan sifat, Gus Sholah dinilai berbagai pihak menyenangkan dan membuat orang nyaman di dekatnya. Penampilan Gus Sholah santai dan bersahaja. Tidak ada kesan angkuh dan sombong di dalam dirinya sehingga siapapun bisa dekat dan disambut beliau. Suaranya tidak meledak-ledak, agak bariton. Kalau mengeritik, kritikannya tidak sampai jatuh ke sinisme. Beliau banyak senyum. Juga suka menyanyi.

Di sisi lain, pendapat yang dikemukakan beliau tidak ada kesan menggurui atau merasa pendapatnya paling benar. Beliau tetap meminta masukan dan saran tentang konsepnya agar menjadi lebih pas dan tepat. Kalau orang lain berbeda pendapat dengan beliau, ia tidak balik menyudutkannya dan juga tidak meremehkan pendapat tersebut. Beliau mau mendengarkan orang lain. Karena itu beliau terbiasa sabar mendengarkan pendapat yang dikemukakan orang lain, walau dari orang yang usianya jauh lebih muda, sebelum beliau merespon atau mengeluarkan gagasannya.

Pemikirannya tidak jatuh untuk membela suatu kelompok secara habis-habisan tetapi berupaya jernih dan melihat permasalahan secara komprehensif. Karena itu beliau dapat berdialog dan

berdiskusi dengan berbagai kalangan yang beragam pemikirannya dan tidak musti sama pendapatnya dengan dirinya. Termasuk beliau terbiasa bertukar pikiran dengan kakak kandungnya, Gus Dur, yang banyak memiliki pemikiran nyeleneh dan berbeda dengan dirinya.

Dengan jenis pemikiran dan kepribadian yang demikian, banyak orang dan kelompok yang senang menemui beliau dan dekat untuk bersilaturrahim dengan beliau. Gus Sholah banyak disukai orang. Persahabatan beliau sangat luas dengan berbagai kalangan dan lintas identitas. Persahabatannya juga panjang/lama sampai akhir hayat. Dan hal itu antara lain bisa dilihat dengan banyaknya tokoh dari berbagai kalangan yang silih berganti bertemu beliau untuk bertukar pikiran, baik di Jakarta maupun di Jombang. Banyaknya dan beragamnya kalangan yang menghadiri pemakaman beliau di Pesantren Tebuireng dan menghadiri tahlilan di kediamannya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan dan di Tebuireng, Jombang juga menunjukkan sangat banyaknya sahabat dan sahabat Gus Sholah.

***

Dari pandangan saya, model dan isi pemikiran Gus Sholah nampak sangat dipengaruhi oleh tradisi pemikiran dan pergaulan keluarga besarnya yang merupakan salah satu keluarga terkemuka di NU. Kakeknya, KH. Hasyim Asy'ari adalah pendiri NU dan mempunyai pengaruh dan peran sangat besar di zamannya. Bahkan ia satu-satunya tokoh NU yang mendapat gelar Hadratus Syekh. Ayah Gus Sholah, KH. Wahid Hasyim juga seorang tokoh NU yang sangat terkenal di eranya. Wahid Hasyim adalah salah seorang pendiri negara RI, aktif duduk di BPUPKI dan PPKI, dua lembaga yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan kelak setelah merdeka menjadi menteri agama.

Lingkungan sebagai anggota keluarga tokoh NU yang demikian menyebabkan Gus Sholah banyak memikirkan dan memperjuangkan

bagaimana bisa mewujudkan Indonesia yang religius, harmonis, damai, demokratis. Seiring dengan itu menjamin keberagaman dan tegaknya kemanusiaan. Pemikiran kebangsaan dan keagamaannya merupakan ikhtiar menjaga keutuhan dan eksistensi NKRI yang turut didirikan ayahnya dan menjaga keutuhan dan keberadaan NU yang didirikan oleh kakeknya. Gus Sholah ikut merawat dan menjaga warisan kakek dan ayahnya tersebut. Oleh karena itu bolehlah dikatakan jalan pikiran Gus Sholah tegak lurus dengan sikap kakek dan ayahnya. Pemikirannya baik di ruang diskusi maupun di media banyak membuktikan hal itu.

Latar belakang pendidikannya di ITB dan keluar dari kampus itu sebagai insinyur nampaknya juga mempengaruhi sistematika dan model berpikirnya kemudian. Sebagai arsitek sudah tentu beliau harus menghitung secara cermat dan presisi setiap desain bangunan. Juga harus indah dan selaras dengan lingkungan di mana bangunan itu akan didirikan. Model dan gaya bangunan tentu harus sesuai dengan zamannya. Tahapan dan jadwal pembangunan sudah ditentukan secara konkret.

Dengan demikian berbagai pemikiran Gus Sholah yang muncul di ruang diskusi atau di media merupakan kombinasi yang unik dan saling melengkapi antara latar belakang dan pergaulan keluarganya yang merupakan NU terkemuka di tanah air dengan latar belakang pendidikannya yang insinyur.

Pada saat menulis testimoni ini, ingatan saya kembali ke masa silam, sekitar tahun 1991an, yakni pertemuan saya yang pertama kali dengan beliau. Saat itu saya mendapat amanah menjadi sekretaris Yayasan Saifuddin Zuhri (YSZ), sebuah yayasan yang didirikan oleh keluarga Almarhum KH. Saifuddin Zuhri, di mana istri Gus Sholah adalah putri Almarhum Kiai Saifuddin Zuhri.

Tugas sebagai sekretaris YSZ menyebabkan saya sering bertemu dan berdiskusi dengan keluarga besar Almarhum Kiai Saifuddin

Zuhri, termasuk dengan Gus Sholah. Dalam rapat-rapat Yayasan, Gus Sholah sering hadir dan memberikan masukan dan pendapat. Saat itu saya memandang Gus Sholah sebagai orang yang berpikir kritis dan cermat memperhitungkan berbagai aspek dari materi rapat yang dibahas.

Forum pertemuan rutin lainnya dengan Gus Sholah ketika saya aktif di lingkungan Forum Indonesia Satu (FIS), berkedudukan di Jakarta. FIS dibentuk oleh beberapa tokoh NU seperti Gus Sholah, Mas Slamet Effendy Yusuf, Mas Ichwan Sam, Mas Arief Mudatsir, dan Mas Saifullah Ma'shum. Mereka mengorganisir berbagai potensi orang-orang NU agar lebih dapat dioptimalkan aktualisasinya di berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang pemikiran, sosial budaya, dan sosial ekonomi. Dalam berbagai rapat atau pertemuan FIS, saya ikut hadir dan bertemu Gus Sholah. Saat itu beliau menjabat sebagai pembina FIS. Adapun ketua FIS dijabat Mas Arief Mudatsir.

Dalam perkembangannya lembaga FIS kemudian dikenal sebagai salah satu think thank orang-orang NU yang cukup dikenal luas dan banyak memberikan saran dan masukan konseptual strategis kepada berbagai kalangan, termasuk pemerintah. Peranan FIS yang cukup strategis tersebut tentu tidak lepas dari kepemimpinan Gus Sholah yang mampu mengarahkan dan meramu berbagai potensi tokoh dan orang-orang NU yang aktif di lingkungan FIS.

Ketika saya bertakziyah di rumah duka, kenangan indah dan menyenangkan bersama beliau bermunculan silih berganti di pikiran. Seiring dengan itu, doa dari dalam hati saya tiada putus-putusnya untuk beliau yang meninggalkan kami semua yang masih hidup, semoga beliau husnul khotimah dan Allah SWT memberikan balasan surga untuk semua amal kebaikan dan perjuangannya. Selamat jalan Gus Sholah. ❖

Isyarat Langit Mbah Liem untuk Gus Sholah: Ngaji Al-Hikam

Prof. Dr. Nadirsyah Hosen

Rais Syuriah PCI NU Australia-New Zealand
dan Dosen Senior Monash Law School

TAHUN 1987, Gus Dur bersama Mbah Liem datang ke rumah Gus Sholah. Seperti ditulis sendiri oleh Gus Sholah dalam sebuah buku, kedua tokoh besar ini lama menanti kepulangan Gus Sholah di rumahnya.

Ada apa gerangan sampai Gus Dur dan Mbah Liem rela menunggu berjam-jam? Mbah Liem dipercaya sebagai salah satu wali. Nama lengkap beliau adalah KH. Muslim Rifa'i Imampuro pencetus ungkapan NKRI Harga Mati.

Keduanya ternyata hendak mengabarkan berita penting: Gus Sholah akan menggantikan pamannya KH. Yusuf Hasyim (Pak Ud) sebagai pengasuh Ponpes Tebuireng.

Gus Sholah tentu saja kaget mendengar isyarat langit yang disampaikan Mbah Liem. Latar belakang Gus Sholah adalah arsitek lulusan ITB. Bukan jebolan pesantren seperti Gus Dur.

Tahun 1999, Gus Sholah mengenang kembali peristiwa unik di atas:

"Secara akal sehat saya kurang percaya apa yang dikemukakan oleh Mbah Liem. Dari mana jalannya saya akan menjadi kiai

Tebuireng. Kepada Mbah Liem saya menjawab apapaun kalau memang Allah SWT menghendaki, maka apapun bisa terjadi. Saya tidak mengganggap serius perkataan Mbah Liem dan terbukti kini 12 tahun kemudian Pak Ud masih tetap menjadi Kiai Tebuireng."

Ya, 12 tahun kemudian (1987-1999) isyarat langit itu belum terwujud. Namun siapa sangka pada tahun 2006 Pak Ud sendiri yang kemudian meminta Gus Sholah menggantikannya sebagai pengasuh Ponpes Tebuireng.

Ternyata dibutuhkan 19 tahun untuk membuktikan kebenaran isyarat langit dari Mbah Liem. Sejak 2006 sampai wafatnya Gus Sholah di awal 2020, beliau menjadi Kiai dan mengasuh Ponpes Tebuireng peninggalan kakeknya Hadratussyeikh KH. Hasyim Asy'ari, persis seperti isyarat langit yang disampaikan Mbah Liem.

Kita mungkin menolak sebuah ketentuanNya karena, seperti kasus Gus Sholah di atas, kita tidak merasa siap dan secara logika tidak masuk akal. Namun jikalau itu sudah menjadi keputusanNya, pada saatnya akan terjadi dengan cara-Nya dan dalam waktu yang dipilihkanNya. Percayalah!

Syekh Ibn Athaillah mengingatkan kita:

لاَ يَـكُنْ تَـأَخُّرُ أَمَدِ الْعَطَاءِ مَعَ الْإِلْـحَـاحِ فِي الدُّعَاءِ مُوْجِـبَاً لِـيَأْسِكَ؛
فَـهُـوَ ضَمِنَ لَـكَ الْإِجَـابَـةَ فِيمَا يَـخْتَارُهُ لَـكَ لاَ فِيمَا تَـختَارُ لِـنَفْسِكَ؛
وَفِي الْـوَقْتِ الَّـذِيْ يُرِيْـدُ لاَ فِي الْـوَقْتِ الَّذِي تُرِيدُ

"Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian dari-Nya kepadamu, sedangkan engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, itu menyebabkan engkau berputus asa. Sebab, Tuhan pasti mengabulkan permintaanmu dengan cara yang Dia pilih, bukan dengan cara yang engkau pilih. Dia akan mengabulkan permintaan itu pada waktu yang Dia kehendaki, bukan menurut waktu yang engkau kehendaki."

لاَ يُشَكِّكَنَّكَ فِي الْوَعْدِ عَدَمُ وُقُوْعِ الْمَوْعُوْدِ ، وَإِنْ تَعَيَّنَ زَمَنُهُ ؛
لِئَلاَّ يَكُوْنَ ذَلِكَ قَدْحًا فِي بَصِيْرَتِكَ ، وَإِخْمَادًا لِنُورِ سَرِيْرَتِكَ

"Janganlah karena tiadanya pemenuhan atas apa-apa yang dijanjikan, padahal telah jatuh waktunya, membuatmu ragu terhadap janji-Nya; agar yang demikian itu tidak menyebabkan bashirah (pancaran illahiyyah dalam hati)-mu buram dan cahaya sirr (pancaran rahasia illahiyyah)-mu padam!" ❖

Yudistiro yang Lembut

Dr. Nashihin Hasan
Ketua Lakpesdam NU (2004-2015)

Dari Gus ke Kiai

Kiai atau Kyai bagi pemahaman Jawa adalah sebutan untuk "yang dituakan ataupun dihormati lantaran keutamaan dan kelebihannya", baik orang, benda ataupun binatang. Keunggulan yang dimaksud bisa karena bersifat keilmuan agama dan dalam pergerakan Islam (ulama, KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari), kekeramatan yang melekat pada suatu benda (keris, Kiai Joko Piturun), binatang (kerbau, Kiai Slamet) dan lainnya. Secara khusus, panggilan kiai juga dilekatkan kepada seseorang yang mendirikan dan memimpin pendidikan pesantren.

Dengan batasan seperti di atas, maka julukan kiai bagi *Allahumagfir lahu* Dr (hc) Ir. Salahudin Wahid menjadi simpul menarik untuk diangkat dan direfleksikan menjadi pelajaran dan tauladan (*uswah*), khususnya bagi komunitas pesantren, karena beberapa realitas yang ditampilkan. Pertama, dari segi kependidikan. Sebagaimana diketahui, almarhum tidak berpendidikan dalam tradisi keilmuan pesantren. Pendidikannya banyak dilakoni di sekolah umum dari mulai sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas sampai ke perguruan tinggi -- Institut Teknologi Bandung (ITB) --

jurusan arsitektur. Pendidikan agama diperoleh dari ibundanya Bu Nyai Sholihah, sementara pengajaran agama secara tidak langsung diperoleh dari kakeknya Mbah Kiai Bisri Syansuri, Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, Jawa Timur.

Fenomena kedua, sebutan kiai dalam arti ulama yakni seseorang yang menguasai bahasa Arab, memiliki dan ahli dalam pengetahuan luas agama Islam yang diperuntukkan kepada almarhum sempat menjadi pembicaraan. Kalau dari lingkungan pesantren, dapat dimengerti. Karena almarhun dari *dhurriyah* (keluarga) KH. Hasyim Asy'ari pendiri pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Panggilan Gus, tidak dapat dilepaskan dari tradisi dan budaya ini. Tetapi dari kalangan luar pesantren, dalam konteks ini, tidak sedikit warga masyarakat bahkan rekan dekat khususnya dari almamater ITB yang "mempertanyakannya". Dari "Gus" insinyur menjadi "Kiai".

Akan tetapi, bahwa almarhum sejak 2006 kemudian menjadi pengasuh Pesantren Tebuireng -- juga tetap menjadi keraguan beberapa pihak -- maka pertanyaan tersebut secara langsung terjawab. Inilah aspek ketiga yang tercatat sebagai kelebihan almarhum. Bukan tamatan dan jebolan pesantren tetapi mengasuh Pesantren Tebuireng, pesantren besar di Indonesia. Lebih-lebih, selama kurang-lebih 14 (empat belas) tahun, Pesantren Tebuireng di tangan dingin dan halusnya mengalami perkembangan kemajuan yang membanggakan. Tidak hanya secara internal, sampai dengan tahun 2019, Pesantren Tebuireng berdiri dan berkembang di 14 (empat belas) filial di Jawa dan luar Jawa. Dan masih banyak masyarakat yang menawarkan puluhan hektar lahan untuk menjadi padepokan jaringan Tebuireng yang berikutnya. Keberhasilan membawa kemajuan Tebuireng, dalam infrastruktur piranti lunak (*soft ware*) yang didukung piranti kerasnya (*hard ware*), tidak sedikit para pengamat pendidikan yang memberikan tabik kekaguman. Inilah fenomena menarik yang lahir dari lanskap pendidikan tradisional

keagamaan pesantren yang dikelola dengan kemampuan teknokratik berlandaskan kepemimpinan situasional (*situational leadership*).

Faktor keempat keutamaan almarhum adalah keluasan pertemanan dalam jaringan lintas agama, etnik dan profesi untuk membangun keberagamaan (perilaiku beragama) dalam ekosistem kemanusiaan, keumatan dan kebangsaan. Ketika menjadi anggota Komnasham beberapa kali beliau menjadi ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Penyelidikan Adhok Pelanggaran HAM berat kasus Mei 1998 dan penyelidikan Kasus Pulau Buru. Dalam perjuangan keumatan, pada tanggal 28 Oktober 2018, almarhum diminta sejumlah kiai di Jawa Timur untuk memimpin sebuah Komite guna meneguhkan Khitthah 1926 dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Sementara dalam perjuangan kebangsaan, sejumlah forum diinisiasi almarhum, seperi Forum Satu Bangsa, beranggotakan sejumlah keluarga "*Founding Fathers*". dan Forum Tanpa Nama, beranggotakan para pemikir dan aktivis.

Sejumlah unggulan komparatif di atas tidak serta merta menjadi unggulan kompetitif di ruang publik, sehingga mengubah panggilan kehormatan dari Gus menjadi Kiai. Menurut hemat saya, elemen kelima inilah yang sangat mewarnai perikehidupan almarhum, yakni membadankan nilai ajaran yang diyakininya menjadi ethos dan bukti etis yang menyadarkan dan menggerakkan untuk berinteraksi dengan sesama dan alam sekitarnya, yaitu berupa "kejujuran, kesantunan dan kelembutan".

Kiai Salahudin Wahid adalah Yudistiro dalam babak pewayangan. Raja Yudistiro (Pendawa) tak bisa mengalahkan Pendeta Durno (Kurawa). Agar menang, Yudistiro disarankan oleh Batoro Krisno untuk sedikit berbohong, dengan mengatakan bahwa anak Durna (Aswatama) telah mati. Menurut Durno apa yang dikatakan Yudistiro yang terkenal jujur pasti benar, pada hal yang dimaksud Aswatama adalah nama gajahnya bala Kurawa. Durna putus asa dan

kalah oleh Pendawa. Kiai Salahudin lebih dari itu. Dia berpendirian "tidak" ada kebohongan sedikitpun di antara kita. Lebih baik kalah dari pada menang dengan harus berbohong dan membohongi orang lain. Dalam ranah kebangsaan Kiai Salahuddin pengen betul bangsa Indonesia menjadi "*high trust community*" untuk mengantarkan negara Indonesia menjadi "*the most high trust country*", seperti Denmark, New Zealand dan Finlandia. Kiai Salahudin senantiasa mampu membalut kejujuran dengan kesantunan dan kelembutan dalam benteraksi maupun bertutur.

Di sini jelas bahwa kiai adalah sebutan keutamaan dalam kebajikan (*virtue*) yang menjadi bukti semangat emosional dalam laku (*patos*). Apa artinya ilmu dan keulamaan kalau tidak terwujud dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak. Apa artinya sebuah wejangan kalau ditulis di atas hamparan pasir. Dan apa artinya sebuah laku kalau mengalir di atas air dan mengambang terombang-ambing di permukaan desingan ombak kehidupan. Seseorang memperoleh panggilan sang kiai karena ia dianggap berhasil menginternalisasikan sejumlah nilai dan keilmuannya dalam perilaku keseharian untuk berinteraksi dengan sesama mahluk. Hal-hal yang bersifat ontologis berupa norma transenden dengan epistimologisnya (keluasan wawasan) dan logosnya (bukti nyata yang rasional) dihadirkan secara aksiologis berupa ethos, yakni bukti nyata etis yang menggerakkan. Bintang adalah pedoman, jangan sekali-kali menyalahkan kegelapan. Bulan adalah ketentraman dan kedamaian, segera jalinlah kemanusiaan. Matahari adalah cakrawala kehidupan dan bumi adalah arena membangun kemaslahatan. Pepatah Jawa menegaskan "*ajining dhiri ono ing lati lan ati*".

Sahabat

Beda teman dan sahabat. Berteman, adalah interaksi antara dua orang atau lebih dalam suasana senang dan gembina guna

menyukuri dan menikmati hasil. Sedangkan bersahabat antara dua orang atau lebih bertemu karena ada masalah yang sedang dihadapi. Bertatap muka dalam rangka ikhtiar memecahkan masalah bersama atau salah satu di antara mereka. *Khoiru al-ashhabi fi al-waqti al-dhiiqy* (sebaik-baik sahabat adalah saat dalam kesempitan). Suasananya interaktif, dinamis, dialogis, demokratis dan terkadang dialektif. Hasilnya, bisa terdapat kesepakatan bersama atau berbeda dengan perspektif "*agree to disagree*" (sepakat untuk berbeda) dalam arti tetap berinteraksi.

Saya kenal Dr. (Hc) Ir. KH. Salahudin Wahid (Gus Sholah) sudah lama, tahun 80-90-an, saat saya berkegiatan di LP3ES, WALHI dan P3M, sampai dengan almarhum aktif di Komnas HAM dan tahun 2000-an. Saya mulai bersahabat saat menjelang, pelaksanaan dan pasca Mu'tamar NU ke-33 Jombang 2015-2017. Persahabatan tersebut meningkat dan lebih intens mulai 28 Oktober 2018, saat dibentuknya Komite Khitthah 1926 di Jombang bersama kurang lebih 50 kiai pesantren. Selama 16 bulan atau 448 hari kami berdua berselancar dalam satu frekuensi dan saling "ngeklik" dalam matra keprihatinan sekaligus kepedulian, baik tentang ke-NU-an, kepesantrenan (Tebuireng/TBI) maupun kebangsaan (Indonesia). Dalam interaksi yang dinamis ini, saya telah mengikatkan diri (komitmen) hanya sebagai "pendamping". Sementara aktor utama perubahan adalah tetap Gus Sholah.

Persahabatan interaktif ini senantiasa berpegang pada 3 (tiga) pagar domain. Pertama nuansa yang bersifat patos, yakni adanya masalah maupun kasus yang membangkitkan keprihatinan yang terkadang cukup menyentuh emosi. Kedua, setiap persoalan yang kami angkat ke permukaan senantiasa bernuansa logos, yakni analisis berdasar pada bukti dan realitas rasional yang diterima akal sehat oleh siapapun. Dan ketiga, bersifat ethos, yakni setiap masalah yang kami hadapi harus berujung pada suatu kegiatan solutif berdasar

pada nilai-nilai yang kami patuhi bersama sebagai bukti etis yang menggerakkan adanya perubahan perbaikan.

Ada empat moment interaktif yang melekat tak terlupakan dalam persahabatan saya dengan Gus Sholah:

1. Revitalisasi-Kontekstualisasi-Optimalisasi Tebuireng

Pada suatu hari, saya diminta Gus Sholah untuk menyampaikan pikiran saya tentang TBI ke depan. Tanggal 20 Juni 2018, di Jl. Bangka, di depan beliau, sdr. Masykuri Abdillah dan Nurcholis Setiawan (keduanya adalah alumni Tebuireng), saya berkesempatan memaparkan konsep Revitalisasi, Kotekstualisasi dan Optimalisasi TBI.

Revitalisasi di sini dimaksudkan, bagaimana TBI memetik, menghidupkan dan menggiatkan kembali nilai-nilai pendidikan, pengajaran dan kejuangan yang dipedomankan pendirinya, KH. Hasyim Asy'ari. Petikan nilai harus yang vital dan asasi, jelas sumber dan sanadnya serta memiliki unggulan komparatif di zamannya, sehingga menjadi rujukan banyak pihak. Misalnya legasi Tebuireng sebagai pesantren hadis karena pendirinya Mbah Hasyim Asy'ari dikenal ahli dan penyebar hadis di Indonesia, sebagaimana yang diangkat oleh Ustadz Abdul Shomad dalam direstasi doktoralnya di Oumdurman Islamic University, Sudan, 24 Des 2019. Dan Tebuireng sebagai miqat (pintu masuk dan mulai) penggerak perjuangan mengusir tentara Inggris di Surabaya, karena pengasuhnya mendeklarasikan "Resolusi Jihad" yang revolusioner itu. Kontekstualisasi merujuk pada hadis "*Al-muhafadlotu 'ala al-qodimis al-sholih wal ahkdlu bi al-jadidi al-ashlah*" (mempertahankan yang lama yang baik dan bersamaan dengan itu memetik yang baru yang lebih baik).

Menitiktemukan dua aspek ini merupakan strategi yang perlu ditempuh, agar Tebuireng tidak lupa dan tidak ketinggalan

dalam meniti keberlanjutannya. Tetapi jalan sutra revitalisasi dan kontekstualisasi saja tidak cukup. Diperlukan "ruh jihad" yang ketiga, yakni optimalisasi. Upaya sungguh-sungguh dilakukan melalui proses pengambilan keputusan yang jitu untuk menetapkan visi (idaman) dengan perencanaan dalam *benchmark* (tolok capai) disertai "*key performance indicator*" yang jelas dan terukur. Kalau salah menyusun rencana berarti sudah merencanakan kesalahan. (*If you fail to plan, you plan the fail*). Di sini kiranya, Gus Sholah menampakkan taji leadershipnya, yakni "*doing right thing*" (melakukan sesuatu yang benar) dan kemampuan manajerialnya, yakni "*doing thing right*" (melakukan sesuatu dengan cara yang benar).

2. Komite Khitthah 1926.

Tanggal 24 Okt 2018, saya diundang Gus Sholah untuk hadir di Tebuireng dalam pertemuan 50 kiai. Saya terkejut karena masing-masing kiai menyampaikan refleksi kritis tentang perjalanan NU saat ini. Ada yang mengangkat aspek mendasar, yakni kesejatian "Ahlus Sunnah wal-Jama'ah (Aswaja)" yang menurut mereka telah dirasuki faham lain dan pemikiran yang cenderung di luar rel. Ada pula yang masuk ke arena politik tentang pilihan Capres no. 1 dan no. 2, maupun ke pencawapresan Rois Am Syuriah PBNU. Aspek politik ini melebar ke iklim politik praktis, yakni bagaimana saat ini NU diindikasikan menjadi instrument bahkan diremot oleh salah satu partai politik. Saat itu, saya membatin, waduh, ini kritikal.

Dari forum tersebut tergambarkan adanya fragmentasi sosial jama'ah. Menurut para kiai yang hadir, NU sedang dalam rentetan "pematang sawah" yang tidak bisa menampung dan membawa jalan hasil panenya. Politik praktis NU terlalu kecil. Bagi mereka, politik NU adalah politik pembelaan keumatan dan kebangsaan. Di penghujung diskusi, disimpulkan bahwa elemen-elemen di atas telah membawa NU dalam "penyelewengan" Khitthah 1926. Untuk

mengembalikan NU ke "relnya" diperlukan upaya sungguh-sungguh guna meneguhkan tegaknya Khitthah 1926 sebagai "kesepakatan fundamental". Nampaknya diperlukan sebuah gerakan baru.

Dalam kesempatan tersebut, tiba-tiba Gus Sholah tanya ke saya, bagaimana baiknya pak Nashihin? Saya langsung respons, kalau ini merupakan paparan keprihatinan dan usulan kepedulian para kiai, mengapa tidak. Melalui apa? tanya Gus Sholah lagi.

Saya jawab spontan, kenapa tidak melalui sebuah Komite Khittoh, sebagai tabarrukan kepada Komite Hijaz (saat berdirinya NU 1926). Gus Sholah, masih mendesak dengan pertanyaan, pak Nashihin, sebaiknya mulai kapan?. Dan saya jawab langsung, mengapa tidak dari sekarang. Berdasarkan dialog terbuka antara saya dengan Gus Sholah tersebut, maka diskusi memutuskan berdirinya Komite Khitthah 1926 (KK26). Salah satu agenda KK26 adalah mengadakan halaqah "Ngaji Khitthah" di 12 pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta dan Jogjakarta; dan membersihkan NU dari anasir politk uang (*risywah*).

3. Memburu Hikmah dan Unjuk Ajar.

Menjelang Ultah ke-120 TBI, Gus Sholah meminta saya merefleksikan kepengasuhan dan kepemimpinan Mbah Hasyim dan Pak Yusuf Hasyim. Ini permohonan yang tidak mudah untuk direspons. Tetapi saya berusaha untuk menemukan kata kuncinya. Dari cerita kakak kandung saya yang sempat mondok di Tebuireng, menurut tuturan Pak Abdul Karim Hasyim (adik Pak Wahid Hasyim), Mbah Hasyim Asy'ari mengutamakan panca (lima) tonggak dan soko guru kehidupan dalam mendidik santrinya. Yakni selamat akidahnya (*salimul aqidah*), benar dalam beribadah (*shohihul 'ibadah*), berbudi luhur (*matinul khuluq*), berdisiplin di setiap waktu dan tempat (*munadlomun fi jami'is syuun*) dan bermanfaat bagi orang lain (*nafi'un lil ghoiri*).

Dan lima aspek tersebut ditampilkan secara nyata oleh Mbah Hasyim selama 24 jam dalam berinteraksi dengan para guru dan santrinya. Inilah unjuk ajar melalui proses internalisasi menuju transformasi yang mengandalkan perubahan watak dan sikap. Sementara Pak Kiai Yusuf Hasyim lebih banyak membawa Tebuireng ke semangat kejuangan dan kebenaran untuk Islam dan membela yang lemah dari ketidakadilan.

Kepemimpinannya menganut gaya bagaimana TBI menjadi rujukan menghadapi ”situasi politik” yang sedang berkembang. Bagaimana Tebuireng senantiasa merespons setiap isu lokal, nasional dan internasional. Oleh karena itu, politik praktis banyak mewarnai perjalanan Tebuireng di zamannya. Meskipun jasa KH. Yusuf Hasyim membawa Tebuireng menjadi pusat data dan pemberdayaan masyarakat juga tak dapat dilupakan.

4. Keluarga Bangsa

Bahwa Tebuireng menjadi ”meeting point’ nya para tokoh lintas agama dan suku, itu suatu hal yang biasa dan lumrah. Mengapa, karena KH. Hasyim Asy’ari telah meninggalkan sebuah legasi tentang perlu dan pentingnya keluarga bangsa. Dalam kitabnya “Al-Tibyan fi an-nahyi ‘an Muqotho’ah al-Arham wa al-Aqarib wa al-ikhwan” (Uraian/penjelasan tentang larangan pemutusan hubungan dengan saudara, kerabat dan para teman). Buku berisi 41 halaman ini, menjadi pegangan bagi Pesantren Tebuireng di dalam melakukan interaksi mutikultural kebangsaan dan keberagamaan dalam keragaman.

Setelah seminar tentang moderasi di lantai 3 gedung Yusuf Hasyim Pesantren Tebuireng, tanggal 21 Desember 2019, yang melibatkan para ahli, Gus Sholah mengajak diskusi tentang gagasan bagaimana sejumlah pesantren, khususnya di Jawa, dapat menyelenggarakan program moderasi. Menurut saya ini program

strategis dimana Pemerintah sedang giat-giatnya mempermasalahkan isu radikalisme. Atas nama Community Resources Development Institute (BIDARA Jakarta) saya diminta menyusun draft. Keesokan harinya, tanggal 22 Desember 2019, di depan pengurus Ma'had Aly dan Balai Pendidikan dan Latihan Tebuireng, draf program didiskusikan dan disepakati dengan judul Gerakan Da'wah Moderasi oleh Pondok Pesantren. Tujuan umum program ini adalah terputusnya rantai eskalasi penyebarserapan faham radikalisme dalam rangka mentransformasikan masyarakat menjadi komunitas yang moderat. Yaitu masyarakat yang senantiasa menghidari sikap atau ungkapan yang ekstrim dan cenderung mempertimbangkan ke arah jalan tengah, sehingga dapat diterima pihak atau warga lain.

Program akan melibatkan aktif 18 pondok pesantren di 17 kabupaten di 5 provinsi di Jawa. Tujuan tersebut akan dicapai melalui tiga tahap. Pertama, pemetaan dan kajian spektrum radikalisme di sejumlah daerah.; Kedua, pelatihan bagi 34 orang da'i dari lingkungan pesantren; Ketiga, pelaksanaan da'wah moderasi oleh para da'i di pedesaan sekitar pesantren. Draft program sudah dibahas bersama staf BNPT (13 Januari 2020) dan siap untuk bekerjasama. Dengan kepergian Gus Sholah, untuk sementara program ini di-pause sambil menunggu pelaksanaan tepat waktu.

Persahabatan memang tak kenal waktu dan tempat. Empat hal di atas merupakan bukti nyata bagaimana sebuah persahabatan itu dirakit dalam kemanfaatan untuk pemecahan masalah yang kami hadapi. "*We are here with solution and not be a part of the problem*". Kami di sini (dalam bersahabat) senantiasa untuk pemecahan masalah, dan kami selalu berusaha untuk tidak menjadi bagian dari masalah). ❖

Gus Sholah Negarawan dengan Empat Kemampuan

Ir. Purwoto Handoko (Poengky)
Ketua Dewan Mahasiswa ITB (1967-1968)

SAYA Masuk ITB tahun 1962, kala itu saya ketahui kami seangkatan dengan Gus Sholah, namun empat tahun kemudian saya baru mengenalnya. Saya memanggilnya Sholah. Saya di Jurusan Teknik Kimia, sedang Gus Sholah di jurusan Teknik.

Saya mulai kenal dengan Gus Sholah tepatnya di tahun 1967, tatkala saya menjadi ketua Umum Dewan Mahasiswa ITB dan Gus Sholah menjadi Bendahara. Inilah awal persahabatan saya dengan beliau. Kala itu era pemerintahan Orde Lama.

Intensitas kami bertemu kemudian berkurang setelah saya menamatkan studi dan berkecimpung ke dalam dunia profesi. Lalu kami intens kembali berinteraksi di era reformasi. Dalam perjalanan waktu ini saya melihat Salahuddin dapat dikatakan sebagai sedikit sosok yang memiliki keteladanan yang kuat di tengah masa krisis keteladanan. Saya pastikan beliau memiliki keteladanan sebagai sosok negarawan; Pancasialis, ke-Indonesiaan dan Nahdliyyin.

Selama menjadi mahasiswa, saya menyimpulkan Salahuddin sebagai sosok yang memiliki bakat. Bila kita sebut KG (kilogram) sebagai dimensi berat, kemudian Meter sebagai dimensi jarak (gerak),

maka Sholah memiliki tiga dimensi dengan bobot yang baik. Pertama, Salahuddin sebagai manusia. Kedua, Salahuddin sebagai mahasiswa arsitektur ITB. Ketiga, Salahuddin sebagai Nahdliyyin. Apalagi di belakang namanya ada "Wahid", nama ayahnya yang merupakan sosok tokoh NU yang negarawan. Sejak mahasiwa, Sholah sudah pandai menjaga proporsinya pada tiga dimensi tersebut.

Sebagai mahasiswa Arsitektur ITB, Gus Sholah memiliki pergaulan yang luas kala itu. Masih era Orde Lama, perpindahan dari zaman Belanda. Sholah pandai menjaga kekhasannya sebagai Nahdliyyin dalam pergaulannya, ia tidak eksklusif meski belum nampak betul budaya kampus dengan khas Nahdliyyin. Jumlah mahasiswa ITB kala itu masih sangat sedikit dan budaya kala itu yang kami rasakan masih sangat sekuler. Meski Salahuddin Wahid suatu ketika ikut menyanyi dalam sebuah grup Band, mengingat hobinya menyanyi, seperti lagu-lagu Barat, tapi tetap tampak kepribadiannya yang khas.

Kami di ITB kala itu bergaul dengan berbagai komunitas, misalnya dengan sesama muslim saya mengenal kawan-kawan Muhammadiyah, Persis dan secara sosial kita mengenal banyak kalangan di kampus ITB. Saya melihat bahwa Gus Sholah sangat menjaga karakteristiknya sebagai Nahdliyyin.

Saya melihat, mungkin karena nama "Wahid" di belakangnya, beliau pandai menjaga citra itu. Di antara ciri Nahdliyyin yang saya ketahui dari sosok Gus Sholah adalah sikap sabar. Beliau selalu tampak sabar dan bersyukur. Saya perhatikan beliau tidak tampak sikap-sikap ambisius. Pembawaannya tenang.

Selain kami pernah bersama di ITB, kemudian kami pernah bekerjasama tatkala sudah terjun di medan profesi masing-masing. Tepatnya tahun 1999, pasca reformasi kami bertemu kembali. Dalam interaksi di awal era reformasi fokus perbincangan kami lebih dominan pada kepentingan dan persoalan kebangsaan.

Selain curhat tentang berbagai persoalan dan kondisi bangsa saat itu, satu tesis yang saya sampaikan, bahwa Indonesia mayoritas umat Islam, dari mayoritas umat Islam itu adalah Nahdliyyin. Maka sah saja jika Nahdliyyin menjadi bagian yang memimpin bangsa ini. Sekira kemudian Gus Sholah terpanggil menjadi bagian dari kepemimpinan bangsa ini, maka demikian sudah merupakan panggilan yang patut dipenuhi.

Mengapa tentang kepemimpinan yang saya kemukakan? Saya melihat *background* pendidikan dan profesi beliau selama ini sebagai arsitek dan profesional, yang dilengkapi dan dibekali dengan proses kepemimpinan. Faktor lain yang saya perhatikan, ialah *concern* Gus Sholah terhadap isu kemanusiaan, keislaman dan kebangsaan. Ditambah lagi kakaknya kala itu, Gus Dur, menjabat sebagai Presiden RI, juga merupakan sosok yang *concern* dengan problem keislaman dan kebangsaan, sebagaimana juga sang Ayah dan Kakeknya. Akhirnya saya menyarankan agar peran kebangsaan ini dilaksanakan oleh Gus Sholah jika diminta oleh banyak kalangan. Hendaknya peran ini dijalankan tanpa merasa berada di bawah bayang-bayang sebagai adik Gus Dur, karena Gus Sholah menurut saya memiliki karakteristiknya yang khas.

Kekhasan Gus Sholah ini saya pahami semakin mendalam dengan melakukan 40 kali kajian selama 40 bulan di Jakarta tentang sosok beliau ini. Dari sini paling tidak saya menyimpulkan beliau sosok negarawan yang mempertemukan keislaman dan keindonesiaan dengan empat kemampuan di dalam dirinya. Kemampuan ini tidak ia tonjolkan dan jarang orang mengetahuinya, namun banyak kalangan merasakan manfaatnya.

Pertama, beliau sosok yang konsisten menjaga kebenaran. Ia selalu faktual. Tidak suka dengan bumbu kosong dan angan melambung. Walaupun dengan sikap ini ia berada pada posisi minoritas.

Kedua, beliau memiliki kemampuan komunikasi. Pandai melihat situasi dan menyampaikan pesan secara baik. Saya melihatnya produktif menulis meski sejak mahasiswa peran ini lebih banyak dilakukan melalui komunikasi lisan. Kemudian apa yang menjadi gagasan dan pemikirannya ia tuangkan dalam tulisan-tulisan.

Ketiga, beliau sosok yang amanah. Meski Gus Sholah mengakui sendiri bahwa ia tidak suka klenik, mungkin latarbelakangnya seorang insinyur, namun ia mengakui bahwa dirinya percaya dengan yang gaib. Mana mungkin saya tidak beriman, kelakarnya.

Keempat, beliau memiliki kecerdasan. Ia selalu berpikir dan bersikap yang cerdas, sehingga ia mampu menempatkan dirinya pada posisi terbaik. Walaupun bagi kalangan umum seringkali putusan yang dihasilkan tidak populer. Hal ini saya perhatikan sendiri dari hasil cerita beliau terkait beberapa kasus, misalnya beberapa pejabat negara yang mendatangi beliau dan meminta pandangan beliau. Saya perhatikan Gus Sholah cerdas dalam memposisikan diri dan memberikan pandangan-pandangan solutif.

Demikian kesan saya dan kebersamaan saya dengan Gus Sholah di ITB masa Orde Lama dan saat kami bersama kembali di era reformasi. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT dan kita dapat meneladani sosok yang membanggakan ini. ❖

Sosok yang Rasional, Gigih dan Bersahaja

M. Sarmuji, M.Si.
Anggota DPR RI

Nalar Kalkulatif, Terukur dan Rasional.

Perjumpaan saya pertama kali dengan Gus Sholah di tahun 2001. Saat itu berlangsung sidang Umum MPR RI yang kemuian berubah menjadi Sidang Istimewa. Hiruk pikuk politik semakin memanas dan berkelanjutan.

Di saat suasana mengkhawatirkan akan terjadi sesuatu, Gus Sholahbersama teman-teman ITB membuka posko di Hotel Mulia.

Saya diajak oleh dr. Ali Mahsun dan Arifin SJ untuk bisa membantu di posko itu. Saya hampir sebulan berada di posko itu dan kejadiannya demikian cepat. Gus Dur mengeluarkan dekrit pembubaran Parlemen, yang kemudian berujung pada konflik terbuka dengan Parlemen.

Setelah Gus Dur mengeluarkan dekrit, malam itu pun terjadi suasana riuh di Hotel Mulia. Banyak sekali tokoh berdatangan, ada Pak Ginanjar, Pak Akbar, Pak Taufik Kiemas, banyak sekali berlalu-lalang di situ. Termasuk juga di posko Gus Sholah, saya ingat ada Marwah Daud Ibrahim, dan banyak lagi.

Saat itu saya sempat mendengar komentar Gus Sholah terkait apa yang sedang terjadi. “Gus Dur ini tahu semua hal, banyak

sekali yang Gus Dur tahu, tapi menghitung peta politik di Parlemen mengapa kok meleset? Padahal kan sederhana saja menghitung peta politik di Parlemen itu," ungkap Gus Sholah.

Saya cermati, kala itu Gus Sholah memperkirakan bilamana langkah Gus Dur demikian, maka akan berujung pada penjatuhan Gus Dur. Kemudian, apa yang menjadi prediksi Gus Sholah pun terjadi. Gus Dur akhirnya kalah berhadapan dengan Parlemen. Dari kejadian itu saya menyimpulkan bahwa Gus Sholah itu kalkulatif, terukur sekali, termasuk dalam dunia politik.

Sosok seperti Gus Sholah, menurut saya, prediksinya cenderung tepat, karena keterukurannya tadi. Sedang sosok Gus Dur memang tidak terduga. Kita bahkan tidak tahu sebenarnya apa yang ada di benak Gus Dur. Nanti apakah terbukti atau tidaknya lihat belakangan. Di antara dua bersaudara ini rasanya ada perbedaan, tapi perbedaan itu menurut saya saling melengkapi. Itulah kesan pertama saya terhadap Gus Sholah Sosok yang kalkulatif, terukur dan rasional.

Jiwa Penuh Perhatian dan Pengertian

Kesan kedua dengan Gus Sholah setelah selesai peristiwa di Hotel Mulia, saya melanjutkan kuliah di Strata 2 (dua) Universitas Indonesia. Saat itu sebagai anak muda perantauan yang mengejar bintang di langit, saya masih kekurangan biaya pendidikan. Kala itu saya sempat mengobrol dengan teman-teman ITB Gus Sholah. Teman-teman beliau menyarankan agar saya menemui Gus Sholah. Ternyata saran mereka tepat. Sungguh beliau ringan tangan, bersedia membantu saya untuk dapat mendaftar ulang S2 di UI.

Di sini saya memahami Gus Sholah itu penuh pengertian (pengerten). Padahal saat itu saya mengobrol topik lain, dan hanya sedikit sempat menyinggung tentang sekolah. Kemudian beliau membantu saya untuk menggenapkan biaya kuliah yang saya punya.

Setelah itu hari berganti, saya tidak bertemu Gus Sholah beberapa saat. Kemudian pada konvensi Golkar yang memenangkan Pak Wiranto menjadi Calon Presiden dan Pak Wiranto memilih Gus Sholah sebagai calon Wakil Presiden, saya bergabung kembali dengan Gus Sholah menjadi tim sukses bidang strategi. Saat itu saya masih di Balitbang AMPG.

Pertemuan kedua ini, tepatnya di tahun 2004, memberi pelajaran berharga bagi saya di dunia politik. Sebagai Tim Pemenangan Capres dan Cawapres ini saya belajar banyak dari para senior saya di Golkar kala itu. Selesai Pilpres 2004, hubungan saya masih berlanjut, meski tidak seintens sebelumnya.

Kemudian saat saya mau menikah di tahun 2006, saya meminta kesediaan Gus Sholah untuk mewakili keluarga. Gus Sholah waktu itu sudah menjadi Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang. Dan luar biasanya, beliau mau datang ke tempat saya di Surabaya mewakili keluarga. Saya masih ingat beberapa hal penting yang disampaikan Gus Sholah untuk saya dan keluarga. Dan tentu saja kehadiran Gus Sholah jadi demikian berarti, karena kami dari keluarga nahdliyyin, ada Gus Sholah, ada cucu pendiri NU, kesan kami luar biasa. Masyarakat terkejut saat itu, Gus Sholah bisa datang di pernikahan saya, sekaligus mewakili keluarga. Di sini saya memahami Sosok Gus Sholah penuh perhatian dan pengertian.

Konsisten dalam Pemikiran dan Pergaulan

Selain kesan di atas, menurut saya Gus Sholah adalah orang besar dengan sosok yang sederhana. Pemikirannya dalam membangun demokrasi luar biasa. Pikiran-pikirannya untuk membangun Islam moderat, tanpa tercerabut dari nilai Islam, kira-kira seperti yang disampaikan Gus Baha, menjadi moderat tidak harus liberal, itulah Gus Sholah. Gus Sholah sangat moderat, tapi tidak liberal.

Gus Sholah itu konsisten dengan demokrasi. Menurutnya tidak lagi ada persoalan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi dan Islam itu sesuatu yang sudah koherens. Keindonesiaan beliau juga tidak diragukan lagi. Islam dan keindonesiaan juga tidak ada split nilai di dalam pikiran dan pandangan Gus Sholah. Itulah yang menyebabkan Gus Sholah mudah diterima oleh semua kalangan. Bahkan di luar nahdliyyin, menurut saya, beliau figur yang bisa diterima.

Pergaulan Gus Sholah melampaui sekat-sekat komunitas. Seperti kita ketahui bahwa Gus Sholah adalah alumni ITB. Kampus yang dikenal multidimensi. Kolega dan jejaring sosial beliau beragam, ada yang dari PSI, Masyumi, dan lain-lain. Kolega dari kalangan Nahdliyyin tentu adanya. Justru saya HMI yang NU merasakan memiliki chemistry dengan Gus Sholah. Itu menunjukkan pergaulan Gus Sholah multi dimensional. Pandangan-pandangan Gus Sholah mewakili pergaulannya.

Dorong Santri Produktif Menulis

Jauh sebelum Gus Sholah memimpin Tebuireng, beliau memimpikan santri hendaknya produktif menulis. Saya juga tidak menyangka akhirnya Gus Sholah kembali ke Tebuireng dan mewujudkan mimpinya itu.

Mungkin Gus Sholah memandang, produktivitas santri dalam tulis-menulis selama ini cenderung merosot, tak seperti ulama-ulama dulu. Ulama dulu produktif sekali dalam menulis (kitab). Mungkin yang diharapkan Gus Sholah bukan hanya produktif menulis kitab, dalam pengertian buku manual keagamaan, tapi menuliskan opini dan suara pesantren. Bahkan lebih luas dari itu, bagaimana santri menyuarakan kehidupan sosial dan sebagainya.

Gus Sholah melihat santri mampu jika didorong untuk menjadi penulis yang produktif. Lantas beliau bercerita pengalamannya sendiri, agar tulisannya diterima di harian Kompas. Tak hanya

sekali beliau berkirim tulisan, melainkan berulang-ulang kali, baru kemudian bisa diterima. Berkali-kali tulisannya ditolak di media tersebut tidak menyebabkan ia patah semangat. Justru hal itu membuat Gus Sholah penasaran, dan beliau ingin membuktikan sendiri bila bersungguh-sungguh pasti bisa. Dan terbukti kemudian Gus Sholah menjadi kolumnis di media-media besar, baik Kompas, republika dan lain-lain.

Di sini saya melihat hendaknya kita belajar tentang kegigihan dan sikap optimis dari Gus Sholah. Kita bisa mewujudan mimpi beliau, bahwa santri mampu menjadi penulis yang produktif. Santri tak hanya produktif menulis kitab, tapi juga menyuarakannya ke dalam media dengan topik yang lebih luas. Saya yakin, banyak sisi yang dapat kita teladani dari sosok luar biasa ini. Saya kagum dengan Gus Sholah dan saya mengajak agar kita, generasi selanjutnya, belajar banyak dari apa yang beliau torehkan. ❖

Belajar Berdemokrasi dari Dua Gus Tebuireng

Saifullah Ma'shum

Ketua Umum Jam'iyyatul Qurra' wal Huffazh NU

BUMI Indonesia sebenarnya subur untuk dicocoktanami benih demokrasi, dengan kondisi lahannya yang penuh humus keberagaman. Keluarga KH. A. Wahid Hasyim selama ini sering dijadikan "demplot" tanaman demokrasi, karena benih perbedaan pendapat dan penghormatan terhadap perbedaan disemai dengan baik di tengah keluarga.

Representasi paling paripurna dari tradisi berdemokrasi di keluarga ini muncul dari dua figur kakak beradik, Gus Dur-Gus Sholah (*Allahu Yarhamhuma*), yang disimbolisasikan dari tetap terjaganya hubungan persaudaraan di antara mereka, sekalipun keduanya terlibat perdebatan keras di publik.

Awal tahun 2000-an kita pernah menyaksikan dialog dalam bentuk polemik antardua orang kakak beradik keluarga KH. Abdul Wahid Hasyim tersebut.

Dialog antarkeduanya terjadi melalui polemik di media massa yang dapat dinikmati oleh publik secara luas. Waktu itu materi dialog memang baru terbatas pada persoalan yang bersifat ideologis, yaitu menyangkut hubungan agama dan negara serta pilihan implementasi

model dan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang paling memungkinkan untuk diterapkan di negeri ini. Dari dialog tersebut, untuk sementara ini tercermin pilihan sikap masing-masing, yaitu bentuk bernegara secara sekuler (Gus Dur) dan tidak sekuler (Gus Sholah).

Tema yang didialogkan kedua kakak beradik itu sebenarnya bukan masalah baru, karena sudah sering dijadikan bahan perdebatan oleh tokoh sebelumnya. Setiap kali bangsa Indonesia menghadapi wacana dan proses politik yang menyentuh wilayah keagamaan, selalu saja masalah tersebut muncul ke permukaan. Yang bernuansa baru, dan karenanya patut memperoleh apresiasi tersendiri, adalah menyangkut pelaku dialog. Tampilnya dua saudara kandung yang sama-sama dibesarkan dan merupakan keturunan pendiri NU, yaitu Gus Dur dan Gus Sholah, memberikan nuansa tersendiri. Tidak mustahil, dan inilah yang diharapkan, dari polemik bertemakan masalah ideologis ini, kelak akan meluas pada tema atau substansi dialog lain yang tak kalah penting dan aktualnya.

Polemik di media massa antartokoh NU menyangkut gagasan besar tertentu sudah cukup lama tidak terjadi. Selama ini yang sering mengemuka ke permukaan lebih berupa konflik. Karena itu, sebagian orang di kalangan NU mungkin ada yang merasa 'risih' menyaksikan polemik antar-Gus Dur dan Gus Sholah melalui media massa, sampai-sampai pernah terdengar penuturan, "Apa keduanya sudah tidak bisa ketemu lagi?"

Penggunaan media massa sebagai wahana dialog bukan menandakan tidak ada lagi saluran dialog secara langsung yang bisa digunakan oleh keduanya. Dialog melalui media massa itu sengaja dipilih karena adanya dua pertimbangan berikut:

Pertama, pembahasan mengenai hubungan agama dan negara dan implikasi yang ditimbulkan dari setiap pilihan pola hubungan keduanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, telah

menjadi wacana publik, karena selama kurun waktu tersebut terus disampaikan Gus Dur dalam berbagai forum.

Kedua, sebagai sesuatu yang telah menjadi wacana publik, maka sudah selayaknya pembahasan terhadap tema itu dilakukan secara publik pula, salah satunya melalui media massa. Dengan cara demikian diharapkan terjadi penajaman gagasan dan perluasan partisipasi dari publik untuk terlibat dalam dialog tentang masalah yang sama. Dari segi pertanggungjawaban akademis dan sosial, tradisi yang demikian itu jelas lebih sehat ketimbang menyimpan rapat-rapat setiap perbedaan pandangan, sambil menggerutu di belakang. Sebab kalau itu yang terjadi, selain tidak muncul dialektik, juga dikuatirkan malah bisa mendatangkan fitnah.

Sejak tampil memimpin NU hampir 15 tahun, Gus Dur telah mencoba menghidupkan tradisi pemikiran kritis di kalangan NU dan membangun wacana pemikiran keagamaan baru. Begitu besarnya *concern* Gus Dur untuk membangkitkan tradisi pemikiran kritis di kalangan NU, sampai-sampai muncul fenomena 'Gusdurian', terutama di kalangan anak muda. Dalam konteks ini kita selayaknya memberikan apresiasi yang besar terhadap kepemimpinan Gus Dur.

Teramat besarnya posisi Gus Dur sebagai inspirator gagasan besar di kalangan NU, pada akhirnya, tanpa disadari, telah menciptakan keseragaman pemikiran, sehingga apa yang diharapkan Gus Dur agar terjadi dialektika pemikiran yang sehat di kalangan NU menjadi tidak terpenuhi. Memang, dilihat secara sepintas, dalam kurun belakangan ini telah muncul dinamika pemikiran yang berlangsung secara intensif di kalangan warga NU. Terutama di kalangan anak mudanya. Namun, jika dicermati, yang terjadi adalah wacana pemikiran yang monologis, dengan pemikiran Gus Dur sebagai landasan terminologis dan pijakannya. Dalam bentuk yang ekstrim, bisa disebutkan nyaris terjadi penyikapan yang mengabsolutkan

setiap gagasan yang muncul dari Gus Dur, tanpa ada upaya mengritisi atau mengimbanginya dengan pemikiran alternatif.

Meski baru memulai dan masih terbatas pada substansi gagasan tertentu, tampilnya Salahuddin Wahid dengan dialog melalui media massa yang terkesan berseberangan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid, telah memberikan "keseimbangan' wacana pemikiran di kalangan warga NU. Tampilnya Gus Sholah sebagai penyeimbang atau antitesa terhadap pemikiran Gus Dur diharapkan menciptakan iklim yang mendukung bagi munculnya tradisi dialog yang sehat, yang pada waktunya bisa memunculkan sintesa baru yang lebih mencerahkan.

Peran yang dilakukan Gus Sholah seperti itu jelas bukannya tanpa mengandung risiko. Melihat kemajemukan pola pikir masyarakat kita, terutama kalangan warga NU, maka apa yang dilakukan Gus Sholah sebagai pihak yang berposisi "berseberangan" dengan (sebagian pemikiran) Gus Dur, berpeluang mengondisikan munculnya dua bentuk respons berbeda yang sama-sama besarnya: sikap tidak setuju dan sikap mendukung.

Sikap tidak setuju akan muncul dari kalangan yang belum bisa menikmati perbedaan pendapat sebagai rahmat. Atau dari mereka yang tidak rela (baca belum siap) menghadapi tokoh yang paling dikagumi (Gus Dur) dikritisi orang lain. Apalagi selama hampir 15 tahun memimpin NU nyaris tidak ada pihak yang berani secara terbuka bersikap demikian. Sedangkan sikap mendukung akan lahir dari mereka yang merasa ada angin segar bagi munculnya silang pemikiran yang selama ini secara tidak disadari telah tertabukan di kalangan NU. Boleh jadi mereka yang mendukung itu adalah kalangan yang selama ini memilih bersikap diam lebih karena perasaan tidak se 'kufu' dan rasa "ngeri" berhadapan dengan Gus Dur. Posisi Gus Sholah sebagai adik kandung Gus Dur jelas menjadi faktor yang menghapuskan barier tersebut, sehingga ia bisa

melakukan "perdebatan" secara bebas dengan sang kakak, sesuatu yang selama ini tidak bisa dilakukan orang lain. Salahuddin Wahid, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dinilai cukup punya nyali dalam "menghadapi" Gus Dur.

***

Saya pernah berkesempatan mengedit dan membuat kata Pengantar pada buku berjudul KH. A. Wahid Hasyim dalam Pandangan Dua Putranya (Dialog Gus Dur dan Mas Sholah mengenai pandangan politik keislaman sang ayah), dan merupakan kumpulan artikel Gus Dur dan Gus Sholah yang dimuat di harian Media Indonesia pada bulan Oktober I998.

Munculnya tulisan yang bertemakan hubungan agama dan negara dengan mengambil kasus pemikiran KH . A. Wahid Hasyim, ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika yang menyertai pembetukan partai baru, baik partai yang bercorak nasionalis maupun partai agama, termasuk partai-partai yang didirikan oleh warga NU. Sebagaimana dimaklumi ada kecenderungan polarisasi ideologis dari partai-partai baru, yang oleh sementara kalangan dikuatirkan mengarah pada munculnya politik aliran.

Tulisan dalam buku ini menjelaskan di mana posisi keduanya. Ternyata keduanya memiliki pandangan yang berbeda, walaupun sesungguhnya, jika dilakukan "pendalaman" lebih jauh, masih terdapat bagian-bagian tertentu yang bisa dicarikan titik temunya.

Yang menarik, meskipun memiliki pandangan dan sikap yang berbeda, keduanya sama-sama menyandarkan pandangannya kepada sikap dan pemikiran sang ayah: KH. A. Wahid Hasyim. Di sinilah letak kontroversi itu: di mata Gus Dur, KH. A. Wahid Hasyim dinilai menganut pemikiran yang cenderung sekuleristik, sedangkan di mata Gus Sholah sebaliknya, KH. A. Wahid Hasyim memiliki sikap dan pemikiran yang tidak sekuler. Mana di antara dua klaim

itu yang benar, *wallahu a'lam*. Sosok pemikiran politik-keagamaan KH. A. Hasyim yang ternyata di mata dua orang putranya ditafsiri secara berbeda itu sungguh merupakan kenyataan yang unik dan menantang. Bagaimana kita memahami realitas ini? Adakah sesuatu yang musykil pada diri KH. A. Wahid Hasyim?

Adalah kenyataan yang wajar jika Gus Dur dan Gus Sholah memberikan penafsiran yang berbeda terhadap pemikiran KH. A. Wahid Hasyim, terutama menyangkut pemikiran hubungan agama dan negara. KH. A. Wahid Hasyim wafat pada usia relatif muda (39 tahun), saat kedua gus ini masih kanak-kanak. Pengenalan Gus Dur dan Gus Sholah terhadap pemikiran ayahandanya, sebagaimana diakui keduanya, lebih banyak dilakukan melalui tulisan yang tersiar atau penuturan dari tokoh-tokoh yang pernah hidup seangkatan dengannya. Kedua putranya ini, karena tingkat maturity mereka yang waktu itu belum cukup sempurna, tidak sempat melakukan dialog intensif dengan ayahandanya, terutama mengenai tema-tema besar, seperti masalah hubungan agama dan negara. Dengan kata lain, sumber yang dijadikan rujukan oleh keduanya dalam memotret sang ayah bersifat sekunder. Walhasil, kemungkinan *error*-nya penafsiran Gus Dur dan Gus Sholah terhadap sikap dan pemikiran KH. A.Wahid Hasyim sama-sama besar.

Seandainya toh apa yang diyakini Gus Dur tentang KH. A. Wahid Hasyim itu benar, atau mungkin sebaliknya, apa yang dipercaya Gus Sholah tentang ayahandanya yang benar, kesahihan pandangan keduanya tetap masih bisa digugat.

Pada fase golden age, usia paling dinamis bagi seorang manusia untuk berimajinasi dan berkreasi , yaitu antara 20-40 tahun, A. Wahid Hasyim muncul sebagai tokoh muda yang pemikirannya melampaui zamannya. Selain berpikiran kritis, beliau juga dikenal moderat. Kita tidak tahu pasti, apakah pemikiran KH. A. Wahid Hasyim mengenai hubungan agama dan negara sebagaimana yang ditafsiri kedua

putranya secara berbeda itu, merupakan bentuk pemikiran yang final? Seandainya KH. A. Wahid Hasyim dikaruniai usia panjang dan menyaksikan perkembangan baru perjalanan bangsanya, bagaimanakah pandangan kritisnya tentang posisi agama di dalam negara Pancasila dalam perspektif lndonesia kontemporer?

Sejarah Indonesia modern dalam perspektif perkembangan pemikiran keagamaan dan implementasi hubungan agama dan negara sesungguhnya menampakkan gejala yang sama dengan perkembangan yang pernah terjadi di beberapa negara lain, terutama di kawasan Timur Tengah. Sebagai negara bangsa yang berupaya memodernisasi diri, Indonesia tak dapat mengelak dari dilema strukturaI-ideologis: di mana posisi agama dalam wacana kehidupan bernegara? Turki pada masa Mustafa Kamal Ataturk, atau Iran pada zaman Syah Reza Pahlevi, menyelesaikan dilema itu dengan memilih model sekuler, meskipun keduanya tidak membuahkan hasil yang menggembirakan. Sedangkan sejumlah negara lain di Timur Tengah memilih model negara agama (Islam).

Bagi Gus Dur, jawabannya jelas, yaitu harus dilakukan pemisahan secara tegas antara negara dan agama. Pengelolaan negara adalah suatu yang 'duniawi' dan karena itu bersifat sekuler. Agama adalah domain personal yang tidak bisa diintervensi oleh campur tangan negara atau pun politik. Demikian juga sebaliknya, negara atau politik harus dijauhkan dari campur tangan dan kepentingan agama. Pemisahan agama dan negara, menjadi suatu keniscayaan. Agama, sebagaimana juga negara, harus independen dari campur tangan yang lain.

Apa yang menjadi pemikiran Gus Dur dalam soal itu, tidak berbeda dengan pandangan Halide Edib Hanoum, atau Mahmud Essad Bey, menteri kehakiman pada zaman Kamal Ataturk, yang dengan tandas menyatakan agama harus dimerdekakan dari belenggu pemerintah agar menjadi subur. Dengan menjadikan

Turki sebagai kasus, Essad mengungkapkan, ketika agama dipakai pemerintah, ia selalu digunakan sebagai alat untuk menghukum. Ketika zaman modern memisahkan urusan dunia dari soal spiritual, hal itu berarti menyelamatkan dunia dari banyak bencana.

Presiden pertama Rl, Soekarno, melalui tulisan-tulisannya yang dimuat di majalah Panji Islam tahun 1940-an, memberikan apresiasinya yang besar terhadap usaha-usaha sekularisme yang dilakukan pemerintah Ataturk, dan menilai bahwa hal yang sama juga seharusnya dilakukan di Indonesia.

Namun, agak berbeda dengan pandangan Gus Dur berkenaan dengan implementasi sekulerisme di Turki, Soekamo tetap memberikan celah bagi masuknya agama ke dalam proses politik negara. Menurut Soekarno, di suatu negara yang demokratis dan ada perwakilan rakyat yang benar-benar mewakili rakyat, rakyatnya bisa memasukkan segala "keagamaan" ke dalam setiap tindakan negara, ke dalam tiap-tiap undang-undang yang dipakai negara dan ke dalam kegiatan politik yang dilakukan negara. "Asal sebagian besar dari anggota parlemen itu politiknya politik Islam, maka suatu usulan politik tidak akan bisa berjalan jika tidak bersifat Islam," demikian tulis Soekarno.

Kecenderungan yang terjadi dalam proses Islam dan modernisasi di sejumlah negara, seperti disinggung Michael C. Hudson dalam Islam and Development Religion and Sociopolitical Change, adalah menekankan pada penggantian orientasi agama di dalam masyarakat muslim, yang umumnya dilakukan kaum sekuler dan rasionalistis. Kecenderungan lainnya, adalah memudarnya pengaruh elite Islam dalam proses politik di hadapan perwira, tentara, teknokrat, pengusaha dan cendekiawan yang sedang muncul. lndonesia ternyata mengalami hal yang sama. Perjuangan Gus Dur untuk memerdekakan agama dari campur tangan negara atau sebaliknya, membebaskan negara dari watak sektarian suatu

agama, serta keprihatinannya terhadap peranan elite Islam dalam kancah politik kenegaraan, makin memperkuat analisis Hudson.

Kecenderungan sekularisasi telah menjadi proses yang lazim bagi suatu negara yang memodernisasi diri. Donald E Smith, dengan mengambil kasus Islam, mengemukakan skema beralihnya watak tradisional Islam melalui Islam modernis, sosialisme Islam, lalu sosialisme, kemudian kepada humanisme-pragmatisme sekuler yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang memodernisasi.

Jika rakyat pada umumnya tidak menjadi sukuler sepenuhnya dalam proses modernisasi sebagaimana diperkirakan, maka dalam pandangan Smith, sebagian besar kemunduran yang dialami dunia Islam merupakan akibat dari pembatasan pengaruh politik pembentukan hukum keagamaan muslim.

Bagaimana dengan Gus Sholah?

Meskipun tegas-tegas menolak sekularisme, bukan berarti Salahuddin Wahid menyetujui formalisme Islam secara absolut. Ada wilayah tertentu di mana nilai (*syari'at*) Islam bisa (dan harus) diadaptasi dalam produk hukum positif lndonesia secara terbatas (proporsional). Selebihnya, di luar wilayah yang memang *syari'at* Islam perlu ditampilkan ke dalam hukum positif, yang diperlukan adalah tampilnya Islam secara substansial, sesuai dengan universalitas ajaran Islam dan juga agama-agama lain. Dengan kata lain, Salahuddin mengakui adanya watak sektarianisme agama, temasuk Islam, pada satu sisi, dan universalisme agama pada sisi yang lain. Pada domain sektarianisme, tak dapat dihindari terjadinya saling "berhadapan" agama satu dengan agama yang lain. Tetapi pada domain nilai universalisme ajaran agama-agama, terjadi "penyatuan" dan pertemuan "bernegara sekaligus beragama" di kalangan umat beragama tanpa dikuatirkan timbulnya konflik.

Di luar area legislasi syari'at Islam tertentu ke dalam perundang-undangan nasional, sebetulnya hasrat "mengislamkan" produk perudang-undangan nasional tetap bisa dipenuhi tanpa harus menimbulkan masalah. Dalam fiqh siyasah dinyatakan, suatu perundang-undangan atau peraturan dapat dinilai islami apabila dalam proses pembuatan dan isinya memenuhi kriteria prinsip-prinsip umum hukum Islam, yaitu: musyawarah, *raf'ul haraj* (tidak memberatkan atau mempersulit), mashalih mursalah (memenuhi hajat atau kepentingan umum) dan *tahqiqul* adalah (menjamin terwujudnya keadilan).

Pandangan lebih jauh lagi dikemukakan Ibnu Aqil. Menurutnya, perundang-undangan atau peraturan yang sanggup mengantarkan umat manusia ke arah kemaslahatan dan menjauhkannya dari mafsadah dapat dianggap sebagai perundang-undangan yang islami, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh satu pun ayat al-Qur'an atau hadits Nabi.

Jika menyimak pandangan Gus Dur dan Gus Sholah perihal masalah itu, tampak bahwa problem yang diperdebatkan dapat dilokalisasi pada domain sektarian Islam, seperti menyangkut legislasi hukum perkawinan Islam dalam hukum positif, dan lain-lain yang jumlahnya sangat terbatas itu. Di luar area tersebut, sesungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan.

Agaknya pandangan Gus Dur tentang gagasan sekularisme di Indonesia untuk memecahkan problem fundamental keislaman dan keindonesiaan, dilatarbelakangi oleh setting sosial yang teduh di Indonesia, yang sama persis dengan kondisi yang melatarbelakangi munculnya sekularisme di Turki. Terjadi kemerosotan moral pada hampir semua aspek kehidupan bangsa justru ketika Turki mengembangkan formalisme agama dalam kehidupan politik kenegaraan. lndonesia pun mengalami hal yang demikian. Lepas dari setuju atau tidak terhadap gagasan sekularisme yang dilontarkan Gus

Dur untuk menyelesaikan masalah, jelas kita menyetujui keprihatinan Gus Dur terhadap kondisi keberagamaan dan keberbangsaan dari bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kepemimpinan yang tidak amanah, moral korup, budaya kekerasan, manipulasi agama untuk kepentingan politik, dan tidak pekanya umat beragama terhadap isu-isu kemanusiaan sebagaimana yang pemah terjadi di Turki pada masa peralihan menuju sekularisme, juga sangat nyata dirasakan di sini. Kondisi itu menjadi keprihatinan Gus Dur dan Gus Sholah.

Keduanya sama-sama gelisah menghadapi problem fundamental yang dialami dalam kehidupan keberagamaan dan keberbangsaan di Indonesia. Hanya, bedanya, Gus Sholah tidak menjadikan pola hubungan agama-negara di Indonesia sebagaimana yang berlaku selama ini sebagai penyebab timbulnya masalah, sementara Gus Dur jelas-jelas menunjuk hal itu sebagai penyebab utama. Karena itu, tak aneh kalau solusi yang ditawarkan adalah dalam bentuk menyekulerkan negara. Namun, yang diharapkan dari seorang tokoh sekaliber Gus Dur waktu itu, tidak sekadar mengulangi apa yang pernah dilakukan Kamal Ataturk, yaitu melakukan perubahan bentuk negara (Pancasila) yang sekuler tidak dan negara agama pun juga tidak menjadi negara sekuler.

Gus Dur dan Gus Sholah, bersama tokoh-tokoh lainnya, tentunya mampu merumuskan formula keberagamaan dalam kehidupan kenegaraan bangsa lndonesia (dalam bentuknya yang seperti selama ini) yang tidak menimbulkan diskriminasi dan sikap sektarian dari pemimpin negara dan agama. Sebab yang dihadapi bangsa lndonesia saat ini bukanlah problem "bentuk negara", melainkan lebih pada problem kepemimpinan yang terjadi di semua level dan semua area, baik pemimpin negara maupun pemimpin agama, selain faktor fundamental lain.

Gus Dur dan Gus Sholah, meskipun garis pemikirannya berbeda, sama-sama mendasarkan dan mendedikasikan gagasannya demi

kepentingan Jam'iyah NU dan bangsanya. Hanya yang satu melalui jalur formal kelembagaan sedang satunya tidak. Beruntunglah NU punya tokoh seperti Gus Dur dan Gus Sholah atau tokoh-tokoh lain yang meskipun memiliki pandangan yang berbeda secara diametral, semua gagasannya diabdikan untuk kepentingan NU khususnya dan bangsa pada umumnya.

Keduanya, karena secara genealogis adalah keturunan pendiri NU, punya tanggung jawab yang sama besar untuk mengembangkan NU ke arah pemecahan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia yang kini menghadapi krisis "nasionalisme" memerlukan "campur tangan" agama. Agenda penting yang diperlukan saat ini, adalah aktualisasi pesan moral agama dan nilai universal agama-agama ke dalam tatanan kehidupan berbangsa.

Nasionalisme yang meskipun di satu sisi menjadi unsur perekat utama bangsa, juga bisa menjadi tenaga yang memecah persatuan suatu bangsa. Ketika nasionalisme bertendensi ke arah itu, maka, seperti dituturkan Prof. Hans Kohn, hal itu bisa dilunakkan oleh semangat liberal berupa toleransi dan kompromi, atau universalisme humaniter agama yang bersifat nonpolitik. Bukan sekadar menyekulerkan atau tidak menyekulerkan negara.

Kini, sepeninggal kedua Gus Tebuireng yang sering mengajari masyarakat bagaimana menghormati perbedaan pendapat dan menyemai kehidupan demokrasi, melalui esai-esainya, publik kehilangan keduanya.

Yang tersisa kini, adalah tulisan-tulisan yang diproduksi oleh para *buzzer* dan *influenzer* yang bermuatan puja-puji dan maki-maki dengan semangat kebencian antara satu pihak dan pihak yang lain. Juga sumpah serapah yang menghiasi media sosial yang isi dan pesannya kekanak-kanakan itu. ❖

Perjumpaan Demi Perjumpaan Bersama Gus Sholah

Sabar Mangadu Tambunan

MENURUT banyak teman, saya ini termasuk orang yang suka pada gagasan atau ide pembaharuan Gagasan Solutif yang diperjuangkan oleh seseorang ataupun segelintir orang yang tulus, setia, militan dan rela berkorban untuk mewujudkannya untuk menjadi fakta dan kenyataan. Dalam tulisan singkat ini, saya batasi saja pada sosok dan gagasan dari KH. Salahudin Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Sholah. Kemudian juga saya tahu bahwa Gus Sholah bersahabat dengan tokoh senior Muhammadiyah Prof. Ahmad Syafi'i Maarif, atau dikenal sebagai Buya Syafi'i. Juga dengan Bang Sabam Sirait, politisi senior PDI, kini PDI Perjuangan. Bang Sabam Sirait sendiri jauh sebelumnya telah bersahabat karib dengan Gus Dur, abang kandung Gus Sholah.

Sejak saya muda belia, sejak kuliah di Bandung tahun 1980-an segala gagasan dan kiprah tokoh-tokoh senior ini, Bang Sabam Sirait, Buya Syafi'i, Gus Dur dan Gus Sholah selalu kucoba ikuti dan hayati.

Perjumpaan di Gerakan Integritas Nasional (GIN)

Pada tahun 2011 Pdt. Natan Setiabudi, mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) periode tahun 2000-2005

menelpon dan mengajakku menghadiri Diskusi Bulanan yang diselenggarakan oleh Gerakan Integritas Nasional (GIN) di Jalan Veteran 2, Jakarta Pusat. GIN didirikan oleh 11 orang dimana Gus Sholah sebagai Ketua, Pdt. Natan Setiabudi sebagai Sekretaris GIN.

Maka perjumpaan demi perjumpaanku dengan Gus Sholah beberapa kali terjadi di acara Diskusi Bulanan GIN ini. Gus Sholah selalu hadir, meskipun saat itu beliau sudah menetap di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Saat itu Gus Sholah sudah menjadi Pengasuh PP. Tebu Ireng menggantikan pamannya, KH. Yusuf Hasyim.

Konsisten dan disiplin adalah salah satu kesan kuat yang kurasakan dari sosok Gus Sholah ini. Kesan kuat lainnya yang kudapat, sikap beliau sederhana, egaliter dan penuh perhatian kepada siapa saja. Pun terhadap diriku seorang Kristen Protestan yang bukan siapa-siapa bila dibanding dirinya dan sejarah keluarganya.

Kakeknya adalah KH. Hasyim Asyari, Bapaknya adalah KH. Wahid Hasyim, keduanya adalah Pahlawan Nasional. KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah abang kandungnya mantan Presiden RI ke-4. Pokoknya tiap kami berjumpa dan ngobrol, baik dalam perjumpaan yang direncanakan maupun tidak, baik diskusi ringan maupun berat, bahkan kami berdebat ataupun bercanda terasa tak ada jarak dan sekat yang saya rasakan. Padahal jarak umur kami 20 tahun *lho*. Gaya ngobrol antar sesama alumni ITB-pun kerap terjadi diantara kami. Semakin nyaman saja saya rasa.

Dari sinilah saya pribadi semakin paham dan menghayati kosa kata Islami yaitu Silaturahmi. Membangun tali silaturahmi dan pencarian gagasan semakin menjadi aktifitas yang menyenangkan.

Perjumpaan Jelang Pemilu 2014

Kala itu saya dan beberapa kawan sedang menggerakkan sebuah kelompok relawan politik yang kami namakan Barisan

Relawan Jokowi Presiden atau yang lebih dikenal dengan sebutan BARAJP. Misi utama dari gerakan ini adalah mengajak sebanyak-banyaknya rakyat untuk meminta, mendesak, bahkan menuntut agar PDI Perjuangan menetapkan kadernya sendiri, yaitu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai Calon Presiden 2014.

Setelah akhirnya Jokowi ditetapkan sebagai Calon Presiden oleh PDI Perjuangan pada hari Jumat 14 Maret 2014, tak lama kemudian KH. Saifullah Ma'shum, atau Mas Saiful, mengajak saya untuk membantu Dr. Mahfud MD agar menjadi calon wakil presiden-nya Jokowi. Saya bersedia, namun sebagai pribadi, bukan sebagai BARAJP. Saya pun kemudian mengajak politisi senior PDI Perjuangan yang juga sahabat karib dari Gus Dur, dan salah satu dari 10 orang pendiri PDI Perjuangan. Ternyata Bang Sabam Sirait bersedia!

Sedangkan Mas Saiful sendiri sudah kukenal sebelumnya dari Gus Sholah. Beliau adalah salah satu kader dari Gus Sholah.

Singkat cerita, di masa Pilpres 2014 inilah perjumpaan demi perjumpaanku dengan Gus Sholah kembali terjadi secara intensif, ditambah dengan Bang Sabam Sirait. Meskipun pada akhirnya Dr. Mahfud MD gagal menjadi cawapresnya Jokowi, di sisi lain tali silaturahmi antara saya dengan Gus Sholah, Bang Sabam Sirait, Mas Saiful, dan juga tentunya Mahfud MD sendiri menjadi semakin kuat.

Di masa Pilpres 2014 itu juga, ada seorang tokoh muda sering datang ke Markas BARAJP, namanya Partogi Sirait, seorang relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Kelompok Relawan BRAVO-5 yang dibentuk oleh Luhut Binsar Panjaitan, atau dikenal sebagai LBP. Kami berdua-pun jadi sering ngobrol.

Pilpres 2014 pun usai dengan kemenangan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla meraih 53,15% suara atas pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa meraih 46,85% suara.

Perjumpaan Pasca Pilpres 2014

Usai Pilpres 2014 itu, saya, Mas Saiful, dan Partogi Sirait sering berjumpa membahas dampak negatif akibat pertarungan politik yang demikian kerasnya selama Pilpres. Keterbelahan masyarakat begitu terasa kentara sungguh amat merisaukan kami bertiga. Hal ini berpotensi akan mengancam keutuhan Bangsa yang amat beragam ini, baik agama, suku, dan golongan. Motto Bhinneka Tunggal Ika yang dibentang kokoh oleh kedua kaki Burung Garuda Pancasila seolah meredup di mata kami bertiga.

Kemudian kami bertiga-pun mendatangi Gus Sholah menyampaikan segala kerisauan kami tentang keutuhan Bangsa kedepan. Ternyata beliau merasakan dan berpendapat sama dengan kami. Setelah beberapa kali perjumpaan dan pembahasan, dan Gus Sholah pun mengajak sahabatnya yaitu Buya Syafi'i Maarif akhirnya kami berlima bersepakat. Bahwa gagasan solutif untuk mengatasi kerisauan diatas adalah "Membumikan Pancasila Kembali".

Maka sejak itu mulailah kami berlima, Gus Sholah, Buya Syafi'i Maarif, Sabar Mangadu, Saifullah Ma'shum, dan Partogi Sirait bergerak ke sana-kemari bersilaturahmi ke berbagai tokoh ataupun pihak menyosialisasikan gagasan solutif "Membumikan Pancasila Kembali" ini, baik secara bersama maupun masing-masing. Gerakan ini kami namakan Gerakan Kebajikan Pancasila (GKP).

Menurut Gus Sholah, memang Pancasila secara Konstitusi sudah selesai menjadi Ideologi Negara Indonesia yaitu sebagai sebuah hasil kesepakatan bersama dari para tokoh pendiri Bangsa (Founding Founders) pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Namun dalam perjalanan sejarahnya sampai kini, Pancasila sebagai pedoman dasar bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara belumlah selesai 100%.

Menurut Gus Sholah masalah ini terutama disebabkan oleh 32 tahun rezim otoriter Orde Baru yang memperlakukan Pancasila juga

sebagai alat politik dalam mengelola kekuasaan otoriter saat itu. Lalu kemudian berlanjut dalam era demokratisasi hasil Reformasi '98, dimana Pancasila diperlakukan seolah barang atau mahluk yang harus dijauhi.

Selanjutnya Gus Sholah mengatakan bahwa situasi buruk ini tak boleh dibiarkan terus berlanjut. Semua komponen anak Bangsa harus segera membuang ketakutan yang lebih bersifat traumatik akibat warisan rezim otoriter Orde Baru dalam memperlakukan Pancasila sebagai alat politik. Karena jaman sudah berubah jauh, saat ini era demokrasi di mana semua dan setiap pihak berhak duduk dan membahas bersama bagaimana sebaiknya agar Pancasila bisa semakin membumi di segenap sanubari dan jiwa tiap Warga Negara Indonesia.

Membangun rasa saling empati dan tali silaturahmi diantara segenap anak bangsa untuk bergotong-royong "Membumikan Pancasila Kembali".

Perjalanan berupa kegiatan dan peristiwa dari Gerakan Kebajikan Pancasila di atas untuk mewujudkan "Membumikan Pancasila Kembali" diceritakan oleh Partogi Sirait di dalam buku ini yang berjudul "Sang Fasilitator Pelembagaan Pancasila". Perjalanan dari sebuah pergerakan yang diinisiasikan oleh kami berlima, di mana pada akhirnya Presiden Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Nomor 54 Tahun 2017 pada tanggal 19 Mei 2017. Lalu 8 (delapan) bulan kemudian ditingkatkan status kelembagaannya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan menerbitkan PERPRES Nomor 7 Tahun 2018 pada tanggal 28 Februari 2018.

Demikianlah ringkasan cerita dari Perjumpaan Demi Perjumpaan yang saya alami bersama Gus Sholah serta Buya Syafi'i Maarif, Saifullah Ma'shum, dan Partogi Sirait terkait gagasan solutif "Membumikan Pancasila Kembali" sampai terbentuknya UKP PIP dan BPIP.

Akhir kata, ijinkanlah saya menyampaikan di sini seperti yang tercantum dalam Al-Kitab (Bible).

"Aku telah mengahiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya".

Gus Sholah Katakan Darurat Rakyat Harus Dimulai Dari Desa

Selama perjalanan kami berlima dalam pencarian gagasan pembaharuan dan upaya mewujudkan "Membumikan Pancasila Kembali", dimana yang pada akhirnya Presiden Jokowi membentuk UKP PIP, lalu ditingkatkan menjadi BPPIP, muncul pertanyaan sederhana namun amat substansif yaitu apa strategi dan implementasinya agar nilai dari kelima Pancasila ini dapat segera tertanam dalam hati, jiwa, dan pikiran setiap warga negara Indonesia. Kami menilai bahwa hal ini tidak akan memadai bila hanya mengandalkan kinerja dari kelembagaan pemerintahan maupun negara seperti BPIP dan lembaga-lembaga lainnya.

Kami teringat pada ucapan para pendiri bangsa (Founding Fathers) terutama ucapan Bung Karno (Soekarno), yang terlahir dengan nama Kusno dari pasangan Raden Sukemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai (Idayu, perempuan Bangsawan Bali dari kasta Brahmana). Bung Karno menegaskan bahwa beliau bukanlah pencipta Pancasila, namun hanya menggalinya dari kehidupan sosiologis dan budaya masyarakat yang berasal dari bumi pertiwi Indonesia sendiri.

Kemudian mengacu pada UU No 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa, red), terbayang jelas di mata kami bahwa kini desa telah menjadi satuan pemerintahan terkecil yang berjumlah 75.000'an Desa. Disini tinggal dan hidup separuh rakyat Indonesia. Disini pula masih tinggal dan hidup budaya dari 714 Suku Nusantara dengan

segala kearifan lokalnya. Dan sampai kini diperkirakan sekitar 80% lebih warga kota-pun masih punya keterikatan dengan desa-nya masing-masing. Katakanlah masih punya kampung halaman di desa. Gus Sholah pun menuturkan pada kami, bahwa kehidupan warga Nahdlatul Ulama (NU) masih sangat kuat keterikatannya dengan desa dan budayanya.

Sehingga pertanyaan apa strategi dan implementasi untuk "Membumikan Pancasila Kembali" dari sisi dan oleh pihak masyarakat, kami rumuskan, katakanlah, mejjadi sebuah hipotesis baru. Yaitu bahwa "Demokrasi Pancasila harus dibangun dengan berakar kokoh pada budaya dari 714 Suku Nusantara, yang tinggal dan hidup di 75.000'an Desa kita dengan segala kearifan lokalnya…"

Untuk mewujudkan ataupun membuktikan hipotesis ini, kami sepakat untuk menggulirkan sebuah pergerakan baru, melengkapi Gerakan Kebajikan Pancasila yang sebelumnya dinamakan Gerakan Daulat Desa.

Gerakan Kebajikan Pancasila dan Gerakan Daulat Desa kami desain sebagai sebuah satu kesatuan pergerakan dalam "Membumikan Pancasila Kembali", baik dari sisi negara dan pemerintah maupun masyarakat. Dan dari sisi masyarakat dengan bermodalkan hipotesis diatas, maka seperti kata Gus Sholah daulat rakyat harus kita picu dan pacu agar bangkit di dan dari desa.

Akhir kata, ijinkanlah saya menyampaikan disini seperti yang tercantum dalam Al-Kitab (Bible).

"Aku telah mengahiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya".

Sekali lagi saya ucapkan, "Selamat Jalan, Gus". ❖

Mas Sholah, Pemikir yang Tidak Bisa Berkata Tidak

H. Tosari Widjaja
Dubes RI di Marokko (2015-2018)

PERJUMPAAN pertama kali saya dengan Mas Sholah terjadi saat saya aktif di PMII dan PBNU. Saat itu Mas Sholah memang belum aktif secara struktural di kepengurusan PBNU, namun beliau dekat sekali dengan pengurus NU yang lain. Selain karena latar belakang keluarganya sebagai darah biru NU, beliau sendiri aktif bergaul dan bercengkrama dengan teman-teman NU meski tidak ikut secara struktural. Mas Sholah menjadi istimewa karena sekalipun hampir tidak pernah menjadi pengurus NU (kecuali singkat sekali) namun bergaul dan diterima oleh teman-teman pengurus NU. Bukti kedekatan itu, beliau sampai dikenal publik sebagai tokoh NU.

Sejak pertama kali berjumpa, saya menangkap sosok Mas Sholah sebagai seorang pemikir. Sejak dulu, ketika berbincang dengan kami, beliau kerap menyoroti dan mengkritisi kondisi sosial warga NU. Beliau sering memaparkan ide-ide segarnya untuk mengangkat perekonomian warga NU lewat jalur pendidikan, salah satunya pesantren. Kalau bisa, pesantren harus menjadi pusat peradaban di Indonesia.

Selain kedekatan di organisasi, saya dengan Mas Sholah juga dekat karena beliau adalah paman saya melalui jalur istri (Hj.

Machsusoh Ujiati, Madiun). Belakangan, karena istri saya wafat beberapa tahun lalu maka hubungan saya dengan Mas Sholah menjadi ipar karena saya menikah dengan adik istri beliau (Hj. Julia). Itu membuat saya lumayan kerap berbincang secara personal dengan Mas Sholah. Meskipun harus saya akui, kedekatan saya dengan Mas Sholah tidak sedekat saya dengan Gus Dur.

Saat saya ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Marokko, Mas Sholah sempat datang ke sana pada tahun 2012. Pada pertemuan itu, kami sempat bercanda mengenai postur orang Indonesia yang kalah dibandingkan negara-negara lain, termasuk Marokko. Dari kejauhan saja, akan mudah menandai mana yang orang Indonesia karena posturnya yang kalah dengan penduduk negara lain, lebih kecil dan lebih pendek.

Obrolan ringan itu, ternyata direspon Mas Sholah dengan serius sekali. Sepulang Mas Sholah ke Indonesia dari Marokko, beliau langsung mendirikan rumah sakit di Pesantren Tebuireng. Itu sesuai obrolan kami waktu itu mendirikan rumah sakit di pesantren-pesantren untuk memperbaiki postur para santri. Adanya rumah sakit diharapkan bisa memastikan kecukupan gizi, sanitasi, dan kesehatan santri.

Rumah sakit tiga lantai di Pesantren Tebuireng itulah yang kemudian menjadi peninggalan Mas Sholah yang paling nampak nyata dan terkenang. Sosok Mas Sholah yang pemikir memang membuatnya tidak banyak menghasilkan *legacy*. Karakter pemikir membuatnya tidak memaksakan ide yang disampaikannya. Beliau memang pernah menjadi arsitek, namun itu pun tidak mencolok. Beliau pernah menjadi calon wakil presiden dan ikut Pilpres berpasangan dengan calon presiden, Wiranto, namun tidak mendapatkan hasil menggembirakan.

Saya pikir, Gus Sholeh bisa sukses mengurus Tebuireng karena ada pihak-pihak yang berhasil menerjemahkan ide-idenya di sana.

Sementara di tempat lain, ide-ide Mas Sholah seringkali tidak menemukan penerjemah atau eksekutor.

Pada saat Muktamar NU di Lirboyo, Kediri, Jatim pada 2009, Mas Sholah mengundurkan diri dari pencalonan Ketua Umum PBNU, walaupun mendapat dukungan suara cukup besar. Beliau kemudian ditunjuk menjadi salah seorang ketua PBNU dalam masa kepemimpinan KH. Hasyim Muzadi.

Sayangnya, Mas Sholah menjadi Ketua PBNU dalam tempo yang singkat sekali. Saya sempat merasa bersalah kepada Mas Sholah karena sebagai anggota DPR dari PPP mengusulkan beliau menjadi Komisioner Komnas HAM padahal saat itu posisi beliau sedang menjadi salah seorang Ketua PBNU. Tapi ini yang saya rasa menjadi kelemahan Mas Sholah juga karena beliau ternyata mau. Beliau di mata saya adalah sosok yang sulit untuk mengatakan tidak. Konsekuensinya, Mas Sholah seperti menjadi kerepotan sendiri dengan pilihan-pilihan yang disetujuinya tadi.

Salah satu pertimbangan ketika kami mencalonkan Mas Sholah sebagai Komisioner Komnas HAM karena latar belakangnya yang beragam dan pemikirannya yang inklusif serta menjunjung tinggi HAM. Beliau memang dekat dengan NU dan dikenal para tokoh NU, namun beliau juga dikenal luas komunikasi dan dekat hubungannya dengan tokoh-tokoh di luar NU, termasuk di luar Islam.

Kedekatan beliau dengan tokoh berbagai kalangan itu konsisten dengan ide-ide yang dilontarkannya sejak dulu. Mas Sholah sering mengungkapkan agar badan dan lembaga di bawah naungan NU bisa bekerja bersama. Misalnya IPNU bisa membantu LP Ma'arif karena selama ini badan dan lembaga di bawah naungan NU seperti berjalan sendiri-sendiri yang mengakibatkan langkah kaki mereka tidak mencolok.

Mas Sholah juga mengkritisi bagaimana NU harus mulai "berdamai" dengan organisasi-organisasi lain yang unggul di bidang-

bidang tertentu. Dalam pembangunan rumah sakit, misalnya, NU sudah saatnya bekerjasama dengan Muhammadiyah karena *toh* banyak SDM NU yang bekerja di rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah. Mas Sholah sebelum akhir hayatnya juga sedang menggarap film yang menggambarkan hubungan pertemanan antara pendiri dua ormas terbesar di Indonesia, yakni film tentang KH. Hasyim Asy'ari dan KH Achmad Dahlan.

Kerap juga Mas Sholah mengkritisi pengelolaan database warga NU. Mungkin karena terkendala basis kultural, sampai sekarang tidak jelas seberapa banyak jumlah warga NU. Padahal apabila dapat dilakukan pendataan dengan sistem IT yang modern maka akan diketahui berbagai database warga NU, termasuk jumlah dan profilnya. Dengan demikian, menurut Gus Sholah, akan semakin mudah menyusun dan melaksanakan program untuk meningkatkan kesejahteraan warga NU yang salah satunya melalui jalur pendidikan.

Ketika saya sedang menikmati menjelajahi perjalanan hidup dari kehidupan bersama Mas Sholah melalui ruang pemikiran tanpa batas, setiap saat, di manapun kami bertemu, dapat pastikan kami berdiskusi santai diselingi senda gurau ala NU. Bahkan tidak jarang diskusi menjadi sangat serius, bersemangat penuh energi yang luar biasa. Kami punya keinginan dan harapan sama, ingin melihat masa depan warga NU, umat Islam, dan bangsa Indonesia terus tumbuh dan berkembang maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Subhanallah, ternyata Allah SWT punya skenario lain terhadap Mas Sholah. Beliau dipanggil pulang keharibaan Allah *Azza wa Jalla* pada 2 Februari 2020. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.

Sungguh, ketika saya mendengar berita wafatnya Mas Sholah, walaupun 24 jam sebelumnya saya masih bersama beliau di RS Harapan Kita, Jakarta, tempat Mas Sholah dirawat, hati dan pikiran saya terguncang. Belasan tahun curhat kami yang panjang akan kehilangan mitra untuk melanjutkan senda gurau yang santai

dan serius dengan hasrat membangun Indonesia lebih maju dan bermartabat.

Mudah-mudahan gagasan yang telah saya lontarkan kepada Mas Sholah, K.H. Salahuddin Wahid, akan ada pihak-pihak yang mempunyai perhatian untuk melanjutkan cita-cita: "Menjadikan pesantren sebagai pusat pembangunan SDM dan peradaban Indonesia Baru".

Semoga Mas Sholah sudah tenang dan bahagia berada di haribaan-Nya di tempat mulia di sisi Allah SWT. Amin. ❖

Ikhlas Mengasuh Tebuireng

dr. Umar Wahid
Ketua Tim Dokter Kepresidenan (1999-2001)

DULU ada suatu masa di mana orang senang menyebut apa-apa terbalik. Kalau sekarang ini orang Malang menyebut dirinya Ngalam. Akhirnya dulu kita memanggil Gus Sholah itu Los, dan saya dipanggil Ram. Saya dengan Gus Sholah kalau berdua memakai *lu-gua*. Gus Dur kalau ke saya *ente*, saya juga ke Gus Dur *ente*. Belakangan ini dengan Gus Sholah, saya mulai banyak menggunakan panggilan *ente*, untuk menunjukkan penghormatan saya kepadanya sebagai kiai.

Bagi saya Gus Sholah itu abang kandung, hubungan adik-abang berjalan dengan baik, ditambah lagi hubungan sebagai teman. Jadi saya dengan Gus Sholah bicara apa saja ya nyambung. Mungkin karena di SMA kita mengambil jurusan yang sama, kemudian baik arsitek maupun dokter diajak berpikir analistis, jadi semua berdasarkan data. Saya diajarkan kalau memeriksa pasien itu apa yang kita dapatkan? Dan dari situ nanti, kita sudah harus bisa mendiagnosa penyakitnya apa, lalu butuh pemeriksaan tambahan untuk menguatkan diagnosa.

Nah arsitek kan sebetulnya mirip. Bikin gedung, keperluan membangun gedung untuk kantor dengan gedung untuk sekolah jelas berbeda. Ini yang membuat di kemudian hari, setelah kami

dewasa, kami bekerja dan hidup masing-masing, cara berpikir saya dengan Gus Sholah yang paling nyambung dibandingkan dengan saudara yang lain.

Sedangkan Gus Dur, sebagai perbandingan dulu, Gus Dur ini berbeda. Dia pintar sekali, lalu hobinya baca. Kita semua senang membaca, tapi Gus Dur sangat-sangat senang membaca. Lalu Gus Dur tahun 1957 sudah di Jogja, masuk Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), jadi sudah tidak menetap di rumah.

Dari situ Gus Dur ke Tegalrejo, Magelang. Lalu ke Tambakberas, jadi santrinya Kiai Fatah, lalu ke Mesir. Gus Dur berangkat ke Mesir tahun 1963, akhir 1970 atau awal 1971 baru pulang. Jadi ya memang tidak nyambung sebagai teman. Saya baru ketemu Gus Dur lagi tahun 1971. Setelah Gus Dur menikah, dia tinggal di Jombang. Sementara saya dengan Gus Sholah tetap di Jakarta. Bisa dibayangkan perbedaan kedekatan kami.

Sekarang dengan yang kedua, Bu Aisyah. Waktu ayah meninggal itu, Bu Aisyah kelas 5. Bu Aisyah sama Gus Sholah itu bedanya 2 tahun, saya dengan Gus Sholah itu 2 tahun, jadi saya beda umur dengan Bu Aisyah kurang lebih 4 tahun. Setelah ditinggal ayah, ibu harus menghidupi 6 anak, dengan sendirinya Bu Aisyah harus ikut membantu mengurusi rumah, rumah tangga, mengurus adik-adiknya. Jadi hubungan saya dengan Bu Aisyah ini ya kakak, ya ibu. Bu Aisyah juga menganggap seperti itu.

Dengan Gus Dur itu kita semuanya sudah berpisah lama (dari Jakarta). Gus Sholah sejak masuk ITB tahun 1962 sudah tidak serumah lagi dengan Bu Aisyah. Saya sampai tahun 1975, sampai selesai sekolah spesialis itu, serumah terus dengan Bu Aisyah. Saya baru pisah dengan Bu Aisyah pada waktu ditugaskan ke Bangka. Jadi hubungan saya dengan Bu Aisyah itu sangat dekat.

Kebetulan saya satu-satunya dokter di keluarga Wahid, dan waktu itu dokter masih barang langka. Jadi saya nyambung dengan

semua saudara saya juga, karena sebagai dokter saya harus ngurusi semuanya, jadi dokter keluarga. Akibatnya, saya berani bilang bahwa yang paling dekat dengan Gus Dur itu saya, yang paling dekat dengan Bu Aisyah itu saya, dan yang paling dekat dengan Gus Sholah itu saya. Mereka sudah wafat semuanya, tapi kalau ditanya orang, mereka pasti jawabnya begitu.

Di dalam keluarga Wahid, kami bisa berbeda pendapat tajam. Terutama Gus Sholah dengan Gus Dur itu bisa berbeda pendapat tajam sekali, dan itu menjadi polemik. Namun hubungan persaudaraan tetap baik-baik saja. Gus Dur itu sudah saya anggap guru saya, mentor saya. Sementara dari Bu Aisyah saya belajar mengenai tanggung jawab. Pada usia semuda itu dipasrahi tanggung jawab ngurusi adik-adiknya, dan dilaksanakan dengan baik sekali. Itu betul-betul hebat.

Dari Gus Sholah yang saya pelajari adalah kesabarannya. Gus Sholah itu sabar, mungkin di antara kami berenam Gus Sholah yang paling sabar. Paling *ngewongke* orang. Kemudian tutur katanya lebih lembut dari kami yang berlima, itu kelebihan Gus Sholah. Saya pernah tugas di Cirebon, tiga tahun lebih, di sana saya bertemu dengan para kiai, Kiai Abdullah Abbas Buntet, Kiai Masduqi Babakan Ciwaringin, Kiai Satori Arjawinangun, dan lainnya. Ada yang sempat menjadi santri langsung Hadratusy Syaikh, ada yang jadi teman ayah di pondok, ada yang muridnya ayah. Mereka banyak cerita tentang ayah. Saya tahu sosok ayah saya dari beliau-beliau ini. Dari sumber primer yang langsung bersentuhan dengan ayah saya.

Saya membuat kesimpulan yang kemudian saya konfirmasi kepada sumber-sumber tadi, jadi ada tiga hal yang menonjol pada ayah saya. Pertama, kecerdasan. Yang kedua kesabaran. Mereka bilang, "Persamaan Kiai Wahid dengan Gus Dur itu sama-sama cerdas, bedanya Gus Dur gak sabaran." Nah, Gus Sholah yang

mewarisi kesabaran ini. Gus Sholah tidak akan terpancing marah, dia itu sabar sekali. Yang ketiga disiplin waktu. Saya selama ini dikenal orang kalau ada janji tidak pernah telat datang. Jadi saya mengambil sisanya.

Kalau kita lihat Gus Sholah setelah lulus dari ITB, dia bekerja sebagai arsitek, sebagai seorang profesional. Gus Sholah mendirikan perusahaan biro arsitek namanya PT. Mirazh yang kantornya di Tebet. Jadi dia banyak bikin rumah, termasuk rumah saya di Billy Moon ini yang bikinkan Gus Sholah. Saat saya tugas di Bangka, Gus Sholah yang mengawasi pembangunan rumah saya, juga tinggal di sini beberapa tahun selama saya di daerah. Dan sebagai seorang pengusaha, saya kira Gus Sholah biasa-biasa saja, sebagai profesional juga biasa-biasa saja.

Di keluarga Wahid yang tidak tertarik dengan politik itu Gus Sholah dan saya, tapi kemudian Gus Sholah tertarik ke politik, saya tetap tidak. Mungkin karena pergaulannya sebagai seorang arsitek dan pengusaha itu lebih luas dari pergaulan saya sebagai seorang dokter. Kemudian terjadi banyak perbedaan pandangan politik antara Gus Dur dan Gus Sholah, sehingga pada waktu Gus Dur bikin PKB, Gus Sholah bikin PKU dengan Pak Yusuf Hasyim. Saya pernah bilang, "Ngapain sih *lu* bikin partai politik itu?"

Sebagai politisi juga saya kira Gus Sholah tidak terlalu sukses, biasa-biasa saja. Apa sih pencapaian Gus Sholah sebagai politisi? Coba ditunjukkan ke saya. Mendirikan PKU tidak sukses, hanya setahun dan bubar, tidak lagi terdengar ceritanya. Menjadi cawapres juga masuk dari NU. Sebetulnya ketokohan Gus Sholah baru mulai terlihat di NU. Kalau boleh dibilang, Gus Sholah menjadi cawapres itu lebih dilirik sebagai pribadi, bukan orang partai. Kemudian pada akhirnya pakai jalur PKB.

Gus Dur awalnya agak ragu karena pandangan politiknya sering berbeda. Saya bilang ke Gus Dur, "Sebetulnya sih sama saja ya, cuma

kan cara ente ngelihat aja beda." Pada akhirnya Gus Dur memahami. Yang menarik adalah, sejak saya dirawat di rumah sakit, Gus Dur menganggap saya sakit karena kepikiran masalah Gus Sholah yang belum disetujui jadi wakil presiden. Jadi Gus Dur membesuk dan bilang ke istri saya Endang. "Itu bilangin deh sama Umar, aku setuju loh dia jadi calon, tapi kan kita butuh proses." Dalam hati saya, siapa yang mikirin? Saya gak pernah mikir. Tapi Gus Dur bilang begitu, ya *alhamdulillah*. Langsung saya ngomong ke yang lain.

Kemudian saya juga melihat bagaimana perbedaan antara Gus Dur dan Gus Sholah. Gus Sholah itu semua pekerjaan selalu direncanakan dengan rapi. Tujuannya bisa didefinisikan walaupun tidak tertulis, lalu ada tahapan-tahapan secara sistematis. Itu yang saya bilang bahwa metodologi pemikiran saya dengan Gus Sholah sama. Kebalikannya, Gus Dur sering improvisasi, kadang-kadang sampai bingung mengikutinya.

Walaupun gagal dalam pemilihan umum, saya pikir sebagai cawapres Gus Sholah menunjukkan kelasnya. Yang pertama, dia mengundurkan diri dari Komnas HAM, karena Wiranto dianggap melanggar HAM di Timor Timur. Namun Gus Sholah berpandangan begini, "Saya mengikuti hukum, dan dia tidak pernah dibuktikan bersalah. Kita tidak bisa memvonis seperti itu, tapi karena dia dianggap seperti itu, saya harus mengundurkan diri dari Komnas HAM. Supaya tidak ada *conflict of interest* saya." Itu kan luar biasa.

Kemudian yang kedua, dia mundur dari Ketua PBNU, bandingkan dengan Pak Hasyim Muzadi yang hanya cuti, padahal posisinya sebagai Ketua Umum waktu itu. Saya bukannya menyepelekan Pak Hasyim Muzadi, tetapi dalam hal ini jelas perbedaan karakternya. Gus Sholah mengerti, etikanya dijaga. "Kalau NU sudah bilang kembali ke khittah, sebagai ketua ya saya gak boleh masuk dalam politik praktis. Kalau saya masuk, ya saya harus keluar dari jabatan struktural di NU," pola pikirnya seperti itu.

Ini yang saya kira kesamaan Gus Sholah dengan Gus Dur, orientasinya kepada apa yang harus dia lakukan karena tanggung jawabnya, bukannya apa dia berhasil atau tidak. Gus Dur juga begitu, *nothing to lose* untuk dirinya sendiri.

Kemudian sampailah tahun 2006 Gus Sholah menjadi pengasuh Tebuireng. Saya melihat keberhasilan Gus Sholah itu di Tebuireng, saya melihat kepemimpinannya muncul dengan optimal di Tebuireng, saya melihat rasa kemanusiaannya mencapai puncak di Tebuireng, semua di Tebuireng. Jadi prestasi Gus Sholah yang paling puncak itu di Tebuireng, dan pada saat berada di puncaknya itu dia pergi.

Contoh yang paling jelas adalah pada waktu beliau wafat, saya tidak menduga penghormatan orang kepada Gus Sholah akan seperti itu. Luar biasa sekali, orang dari berbagai golongan, dari berbagai lapisan masyarakat datang. Gus Sholah yang tadinya tidak dianggap sebagai ulama, sudah diakui sebagai kiai, dan itu tidak perlu SK. Itu bedanya dengan profesor. Profesor butuh SK.

Dua kunci yang saya lihat mewarnai tindakan Gus Sholah. Yang pertama, beliau ikhlas betul sebagai pengasuh. Meninggalkan segalanya itu ikhlas betul ke Tebuireng. Yang kedua, keikhlasannya ini membuat Gus Sholah sangat peduli. Jadi yang dia pikirkan hanya Tebuireng, Tebuireng, Tebuireng. Totalitasnya luar biasa. Saya tidak mengikuti masa Hadratusy Syaikh, tapi rasanya—dengan sama sekali tidak mengurangi penghargaan saya kepada para pendahulu—saya belum pernah melihat pengasuh Tebuireng yang totalitasnya seperti Gus Sholah.

Tadi saya sempat menyinggung bahwa Gus Sholah tidak memperhitungkan menang atau kalah. Contoh yang paling mutakhir adalah di NU, Muktamar tahun 2010 dan 2015. Yang terakhir itu saya hanya menanyakan, "*Lu* ngapain sih ikut-ikutan? Udahlah." Terus terang saja saya mengkritik keputusan Gus Sholah. Dia menjawab

begini, "Nih kamar *gua* nih, pesarean-nya Mbah sama pesarean-nya Bapak jaraknya itu seratus meter kali ya. *Lu* bayangin gak kalo *gua* ditanya Mbah sama Bapak, *gua* ngurusin NU apa enggak? Kalo gua nggak urusin itu, gimana tanggung jawab gua? *Gua* gak mikir soal kalah-menang, tapi menurut gua, NU rusak *gua* harus perbaiki itu, kalo gak berhasil ya sudah, itu kehendak Allah, tapi *gua* punya tanggung jawab untuk itu."

Jadi saya kira Gus Sholah tahu kok akan kalah. Kalau orang lain begitu kan tidak mau maju, mending damai-damai sajalah, kompromi. Jadi itulah sebetulnya bukan ambisi jadi ketua tadi, tapi keinginan memperbaiki NU. Memperbaiki NU itu cara yang paling efektif adalah berkuasa di NU, atau memiliki kewenangan.

Salah satu keberhasilan Gus Sholah di Tebuireng adalah merangkul *dzuriyyah*. Jadi ke depan saya bilang sama Gus Kikin, yang paling berat adalah tetap bisa merangkul gus-gus ini, dzuriyyah ini. Kembali lagi, kesimpulan saya adalah Gus Sholah sangat cocok sebagai pengasuh pesantren. Dengan integritas, kredibilitas yang tinggi, saya rasa sulit untuk mencari kelemahan Gus Sholah. Lebih gampang mencari kelemahan Gus Dur daripada Gus Sholah.

Termasuk usaha Gus Sholah untuk membangun Tebuireng itu dengan tidak malu-malu meminta kritik dan saran. Jadi awalnya di Tebuireng, terus terang Gus Sholah juga bingung melihat organisasinya, tidak nyambung satu dengan yang lain. Gus Sholah cerita, "*Gua* bingung nih." Terus saya bilang, "*Lu* mesti melakukan *team building*. *Gua* punya orang, anak-anak buah gua dulu di Pasar Rebo tuh dipake di mana-mana. *Ntar gua* suruh bantuin deh." Jadi tim dari Pasar Rebo melakukan *team building* di Tebuireng.

Kemudian waktu Bu Farida berpikir mau membenahi dapur segala, saya bilang, "*Udah lu* lihat aja deh dapur di Rumah Sakit Pasar Rebo." Saya dulu kan direktur RS Pasar Rebo. Terus beberapa tahun lalu, gantian saya bilang kepada temen-temen Pasar Rebo dan

direkturnya, "Sekarang *lu* yang mesti belajar ke Tebuireng, Tebuireng tuh jauh lebih bagus dari *lu* sekarang."

Banyak orang yang awalnya bingung melihat Gus Sholah menjadi pengasuh. Banyak yang tidak menduga, dan sebagian tidak yakin. Pada akhirnya semua mengakui, kuncinya adalah ikhlas, betul-betul ikhlas. Sampai Gus Sholah mau menjual rumahnya untuk kepentingan Tebuireng. Kalau saya belajar dari Gus Dur dari awal, saya lebih banyak belajar dari Gus Sholah pada akhir-akhir, setelah jadi pengasuh. *Sinau*-nya mengenai keikhlasan dan kepedulian.

Dan untuk menunjukkan solidaritas saya, pembukaan Muktamar NU di Jombang saya hadir. Itu pertama dan terakhir saya mengikuti pembukaan Muktamar NU. Saya pikir saya harus menunjukkan solidaritas saya, dan saya juga mendatangi beberapa cabang NU di Jawa Tengah, sosialisasi tentang Gus Sholah. Itu karena Gus Sholah, yang lain saya tidak ada urusan. Karena saya melihat dia itu berkenan maju bukan untuk kepentingan pribadi. ❖

Tafakkur menunggu Waktu Sholat

Sumber dan Referensi

Nara Sumber Penulisan:

1. Umar Wahid
2. Farida Salahuddin Wahid
3. Lily Chodijah Wahid
4. Irfan Asy'ari Sudirman (Ipang)
5. Iqbal Humam Dorojatun (Billy)
6. Arina Saraswati (Acha)
7. Wilawati
8. Amin Zein
9. Gugus Joko Waskito

Daftar Bacaan

1. Berangkat dari Pesantren
2. Berguru pada Realitas
3. Biografi KH. Salahuddin Wahid
4. Dialog Gus Dur-Mas Solah
5. Ikut Membangun Demokrasi
6. Jihad Akbar Melawan Korupsi
7. Kyai manajer, Biografi Singkat Salahuddin Wahid
8. Mendengar Suara Rakyat
9. Sama tapi Berbeda Potret Keluarga Besar KH. A. Wahid Hasyim

Memimpin Doa di Majelis Pertemuan

Profil Penulis

SAIFULLAH MA'SHUM

Sebelum reformasi, selama 15 tahun aktif di dunia jurnalistik. Reformasi mendorongnya terjun ke dunia politik, dan melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ia menjadi anggota DPR-RI dari dapil Malang Raya hasil Pemilu 2004.

Pernah menuntut ilmu di Pendidikan Pondok Pesantren Islam (PPPI) Jeru, Tumpang, Malang, Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Asembangus, Situbondo, dan Pesantren Kauman, Semarang. Menempuh pendidikan S1 di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, dan S2 di Universitas Indonesia.

Dari perkawinannya dengan Siti Masrifah, laki-laki kelahiran Malang ini dikaruniai empat orang anak dan tiga orang cucu. Setelah tidak aktif di dunia politik kini ia aktif di Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) sebagai ketua, dan dipercaya menahkodai Jam'iyyatul Qurra' wal-Huffazh NU, sebuah organisasi perkumpulan para qari' dan penghafal Al-Qur'an se-Indonesia, sebagai ketua umum. Kini mulai menekuni lagi dunia tulis-menulis yang telah ditinggalkan dalam waktu cukup lama.

Telah menulis beberapa buku, antara lain Pesan Al-Qur'an tentang Krisis Ekonomi, Sosial dan Politik, editor buku karya Menko Kesra Soepardjo Rustam Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat, KPU dan Kontroversi Pemilu 1999, DPR Terhormat DPR Dihujat, Dialog Gus Dur-Gus Solah tentang Hubungan Agama dan Negara, Ulama Kharismatik, biografi 26 Ulama NU, biografi KH. Abdul Wahab Chasbullah, biografi KH. Ahmad Syaichu, biografi Dr. Fahmi Dja'far

Saifuddin Zuhri, biografi Ny. Hj. Asmah Syahruni dan beberapa buku lain.

Kini, kesibukan lainnya yaitu mendirikan dan membina dua paguyuban UMKM di Malang Raya bernama "Jemari" (Jejaring Maju dan Mandiri) dan "Gemahripah" (Gerakan Rumah Industri Pangan dan Buah), serta mendirikan Yayasan Forum Arek Singgahan (FAS) di Desa Sanankerto, Turen, Malang. ❖

SAHLUL FUAD

Lahir di Desa Sungonlegowo, Bungah, Gresik, 30 Juli 1975. Saat ini ia tercatat sebagai dosen tetap dan alumni S1 di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah PTIQ Jakarta. Pada tahun 2008, ia meraih gelar S2 Ilmu Antropologi dari Pascasarjana Antropologi FISIP Universitas Indonesia. Selain mengajar, alumni Pondok Pesantren Tahafudzul Quran Kauman Semarang ini juga aktif terlibat menulis beberapa buku.

Antara lain buku Perjumpaan Bumi Al-Quran dan Langit Manusia yang terbit dalam Melangitkan Manusia: Kontribusi Pemikiran Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, (2019). Di Mahkamah Konstitusi RI ia terlibat dalam penulisan tiga buku, yaitu: Naskah Komprehensip Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Buku II Sendi-Sendi/ Fundamen Negara dan Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan, serta Undang-Undang Dasar 1945: ~~Konstitusi yang~~ Hidup, (2008). Komisi Yudisial RI juga menerbitkan tiga bukunya, yaitu: Zainal Arifin, S.H., Pengayom: Menapak Hidup di Jalan Allah (2010); Risalah Komisi Yudisial, pada 2014; dan Taufiqurrohman Syahuri: Memasyarakatkan Etik dan Mengetikkan Masyarakat (2016).

Bersama komunitas Nahdliyin, Wakil Ketua Lakpesdam NU Banten ini juga terlibat dalam penulisan tiga buku yang diterbitkan

Arruzz Media, yaitu: Rebutan NU dalam Dari Kiai Kampung ke NU Miring (2010); Magical Community dalam NUhammadiyah Bicara Nasionalisme (2011); dan Langgar dalam Jimat NU (2014). ❖

AGUS GHULAM AHMAD

Kelahiran Jakarta, 11 Agustus 1996. Setamat SD di Jakarta ia mesantren di Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Huda, Singosari, Malang, dan menamatkan sekolah di Madrasah Aliyah Ma'arif NU Singosari.

Anak ketiga dari empat bersaudara ini melanjutkan kuliahnya di Maroko mengambil jurusan Dirasat Islamiyyah, dan melanjutkan jenjang S2 di negara yang sama (2014-2020).

Aktif berorganisasi sejak sekolah dan meneruskannya hingga kuliah. Pernah dipercaya menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Pengurus PPI Dunia, serta aktif di kepengurusan PCI (Pengurus Cabang Istimewa) NU Maroko.

Semasa kuliah ia mendirikan media online Prodeo.id bersama teman-teman ngopinya di kafe Bahia Maroko, juga menjadi penyiar radio. Menulis puisi dan cerpen dengan nama pena Inas Pramoda yang telah dibukukan, sekaligus nyambi menjadi editor.

Kini ia bekerja di Aminin, sebuah lembaga yang mengelola aplikasi pembelajaran al-Quran dan pengetahuan keislaman on-line di bawah bendera PT Bahaso Intermedia Cakrawala. ❖

FIRDAUS

Akrab dipanggil Daus, putera pertama dari enam bersaudara, pasangan Mohd Siddiq dan Maryam. Pria asal Kepulauan Riau ini menempa pendidikan Tsanawiyah (MTs) di Madrasatul Quran Tebuireng, Jombang, dan Aliyah (MASS) Al-Asy'ari Keras Diwek, Jombang, Jawa Timur (1993-2000).

Daus meneruskan jenjang Pendidikan Strata 1 Fakultas Syari'ah (Jurusan Ahwal Syakhsiyyah) dan Strata 2 Prodi Manajemen Pendidikan Islam di kampus yang sama, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) Jakarta (2000-2009).

Pernah menjadi Ketua Komisariat PMII Kebayoran Lama (2002-2003) dan Ketua Umum PMII Cabang Jakarta Selatan (2003-2005).

Ayah dari empat anak ini juga pernah menjadi jurnalis di Tabloid Khalifah Indomedia Group (2005-2009), staf Litbang PTIQ Jakarta (2007-2009), pengurus harian Nusantara Mengaji. Kini menjadi Wakil Sekretaris PP JQH (Jam'iyyatul Qurra' wal-Huffazh) NU (2018-2023) dan Tenaga Ahli Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Suami Hena Nur Syifa ini aktif sebagai dosen Univeritas Pamulang-Tangsel. Menulis beberapa opini di media online, Banten News dan menyunting buku Makna Tersembunyi di Balik 757, serta menjadi nara sumber di beberapa forum diskusi. ❖

ALI ZAWAWI

Menyelesaikan sekolah dasar dan madrasah di kampung halamannya desa Gebang, Bonang, Demak. Ia adalah alumni Madrasah Al-Ma'ruf Bandungsari, Purwodadi dan pondok Pesantren Salafiyah Poncol, Salatiga. Pernah bekerja sebagai wartawan saat masih kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Ia bersyukur sempat menyelesaikan Program Magister (S2) di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Di dunia kerja, ia punya pengalaman cukup panjang. Pernah menjadi Staf Ahli Pimpinan DPR RI, Staf Ahli Fraksi PPP MPR RI, dan Staf Ahli Pimpinan MPR RI. Ketika bergabung di Mahkamah Konstitusi RI ia menggarap dua penerbitannya, yaitu Jurnal Konstitusi dan Majalah Konstitusi. Ia juga menggarap lebih dari 30 buku dengan tema beragam. Terbitan terakhirnya sebelum ikut menulis

biografi ini adalah buku berjudul Kiprah Para Menteri Agama Era Reformasi yang terbit saat ia menjadi Staf Khusus Menteri Agama RI periode 2014-2019.

Di luar itu, ia juga aktivis lembaga sosial yang berkiprah dalam beragam pemberdayaan masyarakat terkait hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial budaya di Yayasan Saifuddin Zuhri dan Yayasan Agribisnis Indonesia. Terakhir bersama Gus Salahuddin Wahid (Allah yarham) di Yayasan Forum Indonesia Satu (FIS) mengawal reformasi yang penuh berkah membawa Indonesia damai, maju, sejahtera, dan berkeadilan. ❖

ROFIQUL UMAM AHMAD

Lahir 26 Oktober 1965 di Madiun, Jawa Timur aktif dalam penulisan naskah-naskah buku, termasuk buku biografi para tokoh. Alumni FH Universitas Lampung saat ini bekerja sebagai staf anggota DPR RI dan aktif sebagai sekretaris di Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Jakarta. Selain itu, lulusan S2 Hukum Tata Negara Universitas Jayabaya, Jakarta tengah aktif di kepengurusan MUI Pusat dan ICMI Pusat sebagai wakil sekretaris jenderal. Saat ini, tengah studi di Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Dalam kehidupan keluarga, dikaruniai seorang istri (Lina Herlina) dan tiga anak (Daffa, Haniya, dan Alvi). ❖

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

Walaupun gagal dalam pemilu, saya pikir sebagai cawapres Gus Sholah menunjukkan kelasnya. Yang pertama, dia mengundurkan diri dari Komnas HAM, supaya tidak ada conflict of interest. Itu kan luar biasa. Kemudian ia mundur dari Ketua PBNU. Gus Solah mengerti, etikanya dijaga. "Kalau NU sudah bilang kembali ke khittah, sebagai ketua ya saya nggak boleh masuk dalam politik praktis. Kalau saya masuk, ya saya harus keluar dari jabatan struktural di NU."
(dr. Umar Wahid)

•••

Sejak muda Gus Sholah dikenal tidak bersedia terlibat di dalam konflik namun selalu menempatkan diri di atas konflik. Terkesan kuat tidak memihak, sehingga usulan penyelesaiannya dapat diterima oleh yang terlibat konflik. Karakter inilah yang mungkin menjadi bekal besar yang melalui perjalanan panjang menjadikan Gus Sholah diposisikan sebagai seorang negarawan, non-partisan, non-sektarian, tanpa mengorbankan prinsip. Dia sosok yang dapat dengan nyaman, tulus dan jujur menggabungkan keislaman dan keindonesiaan.
(Prof. Ir. Hermawan Kresno Dipojono, MSEE, Ph.D)

•••

Gus Sholah itu sosok NU kultural yang kuat. Beliau merasa bahwa mandat untuk menjalankan visi dan misi NU yang menjadi pikiran strategis Hadratussyeikh itu perlu terus dirawat dan dijalankan, sehingga mendorong Gus Sholah melakukan aktivitas ke mana saja, kapan saja dan di mana saja. Saya merasa bahwa sisi ideologis dan idealisme menyatu pada diri beliau.
(Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si)

•••

Dalam beberapa hal Gus Sholah tetap menunjukkan komitmen pada perlindungan HAM, yang dianggap tidak sejalan dengan banyak ulama dan tokoh agama di Indonesia, seperti dalam kasus aliran Ahmadiyah yang dianggap menyimpang dari aqidah Islam. Dia membedakan antara perspektif hukum agama dan hukum negara tentang aliran ini. Dalam perspektif hukum agama aliran Ahmadiyah adalah aliran menyimpang dan keluar dari ajaran Islam, tetapi dalam perspektif hukum negara, aliran ini mempunyai hak hidup.
(Prof. Dr. Maskuri Abdillah)

PONDOK PESANTREN
TEBUIRENG